

Memperkokoh Stabilitas, Mempercepat Reformasi Struktural untuk Memperkuat Fundamental Ekonomi

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2014



BANK INDONESIA



Keterangan sampul:

Perahu naga adalah olahraga tradisional yang populer di beberapa kepulauan di Indonesia. Sebuah perahu beranggotakan sejumlah pendayung dan seorang *steerer* yang menentukan arah. Untuk dapat menjadi yang tercepat, pendayung mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya berupa kekuatan (*power*) dan kecepatan (*speed*). Selain itu, anggota tim perahu naga juga harus menunjukkan kerjasama (*teamwork*) dan koordinasi (*coordination*) agar daya dorong yang dihasilkan menjadi maksimal.



LAPORAN
PEREKONOMIAN
INDONESIA
2014

ISSN 0522-2572

VISI

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

MISI

Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.

Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

NILAI-NILAI STRATEGIS

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas ***Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork***.



DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Diagram dan Gambar	xv
Dewan Gubernur Bank Indonesia	xvi
Prakata	xviii
Tinjauan Umum	xxii

BAGIAN 1

Perekonomian Global

1

Bab 1 Dinamika Perekonomian Global	7
1.1. Pertumbuhan Ekonomi Global	8
1.2. Harga Komoditas Global dan Inflasi Global	14
1.3. Pasar Keuangan Global	16
Boks 1.1. Dampak <i>Spillover</i> Perlambatan Perekonomian Global	18
Bab 2 Respons Kebijakan Ekonomi Global	21
2.1. Kebijakan Negara-Negara Maju	22
2.2. Kebijakan <i>Emerging Markets</i>	25
2.3. Kerjasama Internasional	27

BAGIAN 2

PEREKONOMIAN DOMESTIK

33

Bab 3

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	39
3.1. PDB Penggunaan	41
3.2. PDB Lapangan Usaha	46
3.3. Pertumbuhan Ekonomi Regional	47
3.4. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	51

Bab 4

Neraca Pembayaran Indonesia	55
4.1. Transaksi Berjalan	58
4.2. Transaksi Modal dan Finansial	65
4.3. Ketahanan Eksternal	69

Bab 5

Nilai Tukar	73
5.1. Dinamika Nilai Tukar	75
5.2. Struktur Pasar Valas Domestik	78
Boks 5.1. Dinamika Global dan Kebijakan Pengelolaan Nilai Tukar	80

Bab 6

Inflasi	83
6.1. Inflasi Inti	86
6.2. Inflasi Volatile Food	88
6.3. Inflasi Administered Prices	90
6.4. Inflasi Regional	91

Bab 7

Fiskal	97
7.1. Pendapatan Negara dan Hibah	99
7.2. Belanja Negara	100
7.3. Pembiayaan	104
7.4. Fiskal Daerah	107
Boks 7.1. Reformasi Belanja Subsidi Energi	110

Bab 8

Sistem Keuangan	115
8.1. Kinerja Perbankan	117
8.2. Kinerja Pasar Keuangan dan Institusi Keuangan Nonbank	124
8.3. Transmisi Kebijakan Moneter	129

Bab 9

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	135
9.1. Kinerja Sistem Pembayaran	137
9.2. Kinerja Pengelolaan Uang Rupiah	145



DAFTAR ISI

BAGIAN 3

RESPON BAURAN KEBIJAKAN

155

Boks Kebijakan Moneter dan Makroprudensial	160
--	-----

Bab 10

Kebijakan Moneter

10.1. Kebijakan Suku Bunga	166
10.2. Kebijakan Nilai Tukar	170
10.3. Penguatan Operasi Moneter	172
10.4. Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	174

10.5. Kebijakan Pengelolaan Lalu Lintas Devisa	179
10.6. Penguatan Jaring Pengaman Keuangan Internasional	180
Boks 10.1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan ULN Korporasi Nonbank	183

Bab 11

Kebijakan Makroprudensial

11.1. Kebijakan Makroprudensial	188
11.2. Kebijakan Keuangan Inklusif	194
11.3. Kebijakan Mendorong Pengembangan UMKM	198

Bab 12

Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

12.1. Kebijakan Sistem Pembayaran	203
12.2. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah	208
Boks 12.1. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)	215
Boks 12.2. Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	217

Bab 13

Koordinasi Kebijakan	219
13.1. Koordinasi Pengendalian Inflasi	220
13.2. Koordinasi Sektor Moneter, Rill, dan Fiskal	225
13.3. Koordinasi Sektor Keuangan	228
13.4. Koordinasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	232
13.5. Koordinasi Guna Mendukung Komitmen Internasional	236
Boks 13.1. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia: Tinjauan <i>Game Theory</i>	238



TANTANGAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

241

Bab 14

Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan	247
14.1. Tantangan Perekonomian	248
14.2. Arah Kebijakan	257
Boks 14.1. Industrialisasi, Modernisasi Pertanian dan Transformasi Struktural	265
Boks 14.2. Aktivitas Indonesia dalam Rantai Nilai Global	267
Boks 14.3. Transformasi Bank Indonesia	269

Bab 15

Prospek Perekonomian Indonesia	273
15.1. Prospek Perekonomian Global	274
15.2. Prospek Perekonomian Domestik	275
15.3. Prospek Ekonomi Jangka Menengah	280

Lampiran

Tim Penyusun	283
--------------	-----

342



DAFTAR TABEL

1. Dinamika Perekonomian Global	7	6. Inflasi	83
Tabel 1.1. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Global	9	Tabel 6.1. Penyumbang Inflasi Kelompok Inti	87
2. Respon Kebijakan Ekonomi Global	21	Tabel 6.2. Komoditas Penyumbang Inflasi Kelompok <i>Volatile Food</i>	89
Tabel 2.1. Kebijakan Otoritas Moneter Eropa	24	Tabel 6.3. Komoditas Penyumbang Inflasi Kelompok <i>Administered Prices</i>	91
3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	39	Tabel 6.4. Kebijakan Pemerintah terkait <i>Administered Prices</i> Tahun 2014	92
Tabel 3.1. Pertumbuhan PDB Permintaan	41		
Tabel 3.2. Ekspor Nonmigas Berdasarkan Komoditi	42		
Tabel 3.3. Indikator Kemudahan Berusaha di Indonesia	44		
Tabel 3.4. Pertumbuhan PDB Penawaran	45		
Tabel 3.5. Angkatan Kerja dan Pengangguran	51		
Tabel 3.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan	53		
Tabel 3.7. Indeks Keparahan Kemiskinan	53		
4. Neraca Pembayaran Indonesia	55		
Tabel 4.1. Neraca Pembayaran Indonesia	57		
Tabel 4.2. Posisi Investasi Internasional Indonesia	58		
Tabel 4.3. Ekspor Nonmigas menurut Kelompok Barang (Berdasarkan SITC)	61		
Tabel 4.4. Impor Nonmigas menurut Kelompok Barang	62		
Tabel 4.5. Rasio Solvabilitas Sektor Eksternal	70		
Tabel 4.6. Rasio Likuiditas Sektor Eksternal	71		
7. Fiskal	97		
Tabel 7.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro	98		
Tabel 7.2. Realisasi APBN-P	100		
Tabel 7.3. Realisasi Keuangan Daerah	108		
Tabel 7.4. Perkembangan Pangsa Belanja Daerah Berdasarkan Jenisnya	109		
Tabel 7.5. Kapasitas Fiskal Kawasan	109		
8. Sistem Keuangan	115		
Tabel 8.1. Alokasi Penyaluran KUR Berdasarkan Wilayah dan Sektor	120		
9. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	135		
Tabel 9.1. Daftar Penerbit Uang Elektronik	14		

10. Kebijakan Moneter	163
Tabel 10.1. Perbandingan Komposisi Instrumen Valas <i>Emerging Market</i>	175
Tabel 10.2. Kerjasama <i>Swap Arrangement</i>	182
<hr/>	
12. Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	201
Tabel 12.1. Nominal Transaksi BI-RTGS dan SKN-BI	207
Tabel 12.2. Proyeksi dan Realisasi Penarikan Uang Rupiah Periode Hari Raya Keagamaan	210
Tabel 12.3. Bank Umum Sebagai Pengelola Kas Titipan Bank Indonesia	211
<hr/>	
13. Koordinasi Kebijakan	219
Tabel 13.1. TPID Terbaik 2013	222
<hr/>	
14. Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan	247
Tabel 14.1. Sasaran Kedaulatan Pangan	259
<hr/>	
15. Prospek Perekonomian Indonesia	273
Tabel 15.1. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2016	275
Tabel 15.2. Prakiraan PDB sisi Lapangan Usaha	276



DAFTAR GRAFIK

1. Dinamika Perekonomian Global	7
Grafik 1.1. Lanskap Ekonomi Global	8
Grafik 1.2. Dinamika Proyeksi PDB Dunia	9
Grafik 1.3. Pertumbuhan Ekonomi AS	9
Grafik 1.4. Dekomposisi PDB AS	10
Grafik 1.5. Indikator Tenaga Kerja AS	10
Grafik 1.6. Indikator Produksi AS	10
Grafik 1.7. Tekanan Fiskal pada Negara Maju	11
Grafik 1.8. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Eropa	11
Grafik 1.9. Pertumbuhan Ekonomi Jepang	12
Grafik 1.10. Indikator Ekonomi Tiongkok	13
Grafik 1.11. Harga Komoditas Non-energi dan Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	14
Grafik 1.12. Pertumbuhan Historis Harga Komoditas Nonminyak	15
Grafik 1.13. Perkembangan Indeks Harga Komoditas Energi dan Non-energi	15
Grafik 1.14. Perkembangan Harga Minyak	15
Grafik 1.15. Indikator Risiko Pasar Keuangan Global	16
Grafik 1.16. Survei Bloomberg: Proyeksi Pasar terhadap Waktu Kenaikan FFR	17
Grafik 1.17. Indeks Pasar Saham Global	17
2. Respon Kebijakan Ekonomi Global	21
Grafik 2.1. Suku Bunga Kebijakan Beberapa Negara	23
Grafik 2.2. Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Turki	25
3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	39
Grafik 3.1. Ekspor Nonmigas ke Negara Maju dan Negara Berkembang	41
Grafik 3.2. Pertumbuhan Komponen Belanja Pemerintah	42
Grafik 3.3. PDB Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	43
Grafik 3.4. Pendapatan Perkapita	43
Grafik 3.5. Perkembangan Upah Minimum	43
Grafik 3.6. Periodogram Kenaikan BBM untuk Konsumsi RT	43
Grafik 3.7. Realisasi Investasi BKPM	44
Grafik 3.8. Pertumbuhan Impor dan Faktor yang Memengaruhi	44
Grafik 3.9. Impor Nonmigas Berdasarkan Jenis Barang	45
Grafik 3.10. Perekonomian Negara Kawasan	45
Grafik 3.11. Pertumbuhan Lapangan Usaha Penghasil Barang dan Penghasil Jasa	46
Grafik 3.12. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	46
Grafik 3.13. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	46
Grafik 3.14. Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	47

Grafik 3.15. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47	Grafik 4.11. Perkembangan Jumlah dan Remitansi TKI	65
Grafik 3.16. Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi, Pergudangan Informasi, dan Komunikasi	47	Grafik 4.12. Perkembangan Remitansi Tenaga Kerja Negara Peer Group 2010-2014	65
Grafik 3.17. Pertumbuhan Ekonomi Regional (diolah berdasarkan PDRB Tahun Dasar 2010)	48	Grafik 4.13. Investasi Langsung Nonresiden Menurut Negara Investor Utama	66
Grafik 3.18. Perkembangan Ekspor Regional	48	Grafik 4.14. Investasi Langsung Nonresiden Menurut Sektor Ekonomi	66
Grafik 3.19. Kinerja Pertumbuhan Sektor Utama Regional (diolah berdasarkan Tahun Dasar 2000)	49	Grafik 4.15. <i>Return on Equity (ROE)</i> Perusahaan Indonesia dan Kawasan	67
Grafik 3.20. Indeks Keyakinan Konsumen Regional	49	Grafik 4.16. Investasi Portofolio Asing di Indonesia	67
Grafik 3.21. Ekspor CPO di Sumatera dan KTI	49	Grafik 4.17. Perbandingan Kepemilikan Obligasi Pemerintah oleh Nonresiden di Beberapa Negara	68
Grafik 3.22. Volume Ekspor Tambang di Sumatera & KTI	50	Grafik 4.18. <i>External Debt to GDP</i> Negara Peer Group	69
Grafik 3.23. Perkembangan Produksi Padi	50	Grafik 4.19. Pertumbuhan ULN Indonesia Berdasarkan Peminjam	69
Grafik 3.24. Perkembangan Konsumsi Semen Kawasan	50	Grafik 4.20. Perkembangan ULN Indonesia Menurut Jangka Waktu Asal (<i>Original Maturity</i>)	69
Grafik 3.25. Perkembangan Nilai Ekspor Manufaktur Kawasan Jawa dan Jakarta	51	Grafik 4.21. Perkembangan <i>Basic Balance NPI</i>	70
Grafik 3.26. Perkembangan Produksi Kendaraan Bermotor Jabodetabek	51	Grafik 4.22. Perkembangan Cadangan Devisa	71
Grafik 3.27. Estimasi Okun's Law Indonesia	52	Grafik 4.23. Perkembangan DSR Indonesia	71
Grafik 3.28. Porsi Pekerja berdasarkan Status Pekerjaan	52		
Grafik 3.29. Tingkat Kemiskinan	52		
Grafik 3.30. Inflasi IHK dan Garis Kemiskinan	53		
4. Neraca Pembayaran Indonesia	55	5. Nilai Tukar	73
Grafik 4.1. Komposisi Ekspor Nonmigas Indonesia (Berdasarkan <i>Standard International Trade Classification/SITC</i>)	59	Grafik 5.1. CDS dan EMBIG Spread	75
Grafik 4.2. Perkembangan Transaksi Berjalan	60	Grafik 5.2. Covered Interest Parity	75
Grafik 4.3. Perkembangan Neraca Perdagangan Nonmigas	60	Grafik 5.3. Perkembangan Nilai Tukar 2014	76
Grafik 4.4. Ekspor Nonmigas menurut Negara Tujuan Utama	60	Grafik 5.4. Perubahan Nilai Tukar Kawasan	77
Grafik 4.5. Komposisi Ekspor Manufaktur Indonesia 2011-2014	61	Grafik 5.5. Perubahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Peer	77
Grafik 4.6. Kontribusi Ekspor Manufaktur terhadap PDB dan Indeks Daya Saing Manufaktur Negara ASEAN	62	Grafik 5.6. Volatilitas Rupiah Triwulanan	77
Grafik 4.7. Perkembangan Neraca Perdagangan Migas dan Harga Minyak	63	Grafik 5.7. Kepemilikan Asing Pada SUN, SBI, dan Saham	78
Grafik 4.8. Perkembangan Neraca Jasa	64	Grafik 5.8. Porsi Kepemilikan Nonresiden di Pasar SUN	78
Grafik 4.9. Rasio <i>Freight</i> Jasa Transportasi	64	Grafik 5.9. Volume Transaksi Valas Domestik	78
Grafik 4.10. Perkembangan Neraca Pendapatan Primer	64	Grafik 5.10. <i>Bid - Ask Spread</i> Rupiah	79
		Grafik 5.11. Volume Transaksi <i>Spot, Forward, dan Swap</i>	79
		Grafik 5.12. <i>Net Supply dan Demand</i> Valas	79
		6. Inflasi	83
		Grafik 6.1. Perbandingan Inflasi 2013 - 2014 dan Historis 3 Tahun	84

Grafik 6.2. Inflasi IHK Pada Periode Kenaikan Harga BBM	84	Grafik 7.20. Perkembangan Belanja Modal	109
Grafik 6.3. Event Analysis Inflasi	86		
Grafik 6.4. Dekomposisi Inflasi Inti Traded	87		
Grafik 6.5. Dekomposisi Inflasi Inti Nontraded	88	8. Sistem Keuangan	115
Grafik 6.6. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast	88	Grafik 8.1. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	116
Grafik 6.7. Pola Inflasi/Deflasi Volatile Food	89	Grafik 8.2. Jumlah Kantor Bank dan Rasio Densitas Tahun 2010-2014	117
Grafik 6.8. Perkembangan Inflasi Bahan Pokok	90	Grafik 8.3. Sebaran Spasial Rasio Densitas	117
Grafik 6.9. Pola Inflasi/Deflasi Administered Prices	91	Grafik 8.4. Rasio Kredit Terhadap PDB	118
Grafik 6.10. Perkembangan Inflasi Kawasan	93	Grafik 8.5. Pertumbuhan Kredit Total dan Per Jenis Penggunaan	118
Grafik 6.11. Perkembangan Inflasi Inti Kawasan	94	Grafik 8.6. Pertumbuhan Kredit 5 Sektor Ekonomi Terbesar	118
Grafik 6.12. Perkembangan Inflasi Volatile Food Kawasan	94	Grafik 8.7. Perkembangan Kredit Kawasan	119
Grafik 6.13. Perkembangan Inflasi Administed Prices Kawasan	95	Grafik 8.8. Perkembangan Kredit Modal Kerja Kawasan	119
Grafik 6.14. Perkembangan Upah Minimum Kawasan	95	Grafik 8.9. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah	119
7. Fiskal	97	Grafik 8.10. Trend Penyaluran Kredit UMKM	120
Grafik 7.1. Perkembangan Fiskal 2008-2014	98	Grafik 8.11. Perkembangan DPK	121
Grafik 7.2. Tax Ratio	99	Grafik 8.12. Perkembangan Dana Pihak Ketiga bank Syariah	121
Grafik 7.3. Komposisi Pendapatan Negara	101	Grafik 8.13. Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit, Suku Bunga Deposito Rupiah, dan BI Rate	121
Grafik 7.4. Pangsa Subsidi BBM dan Belanja Modal	101	Grafik 8.14. LDR dan Rasio AL / DPK	121
Grafik 7.5. Komposisi Belanja Pemerintah	102	Grafik 8.15. Return on Asset (ROA)	122
Grafik 7.6. Anggaran Subsidi Energi, Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan	102	Grafik 8.16. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	122
Grafik 7.7. Harga Minyak dan Kurs	103	Grafik 8.17. Perkembangan CAR Perbankan	122
Grafik 7.8. Harga Premium dan Solar	103	Grafik 8.18. Rasio Non Performing Loans (NPL)	123
Grafik 7.9. Pangsa Subsidi	103	Grafik 8.19. Perkembangan NPL Kawasan	123
Grafik 7.10. Subsidi Listrik dan Rasio Elektrifikasi	103	Grafik 8.20. Perkembangan NPL Kredit Modal Kerja (KMK) Kawasan	124
Grafik 7.11. Keseimbangan Primer di Berbagai Negara	104	Grafik 8.21. Tren Rasio NPL Kredit UMKM	124
Grafik 7.12. Imbal Hasil SBN	105	Grafik 8.22. Imbal Hasil SBN 10 Tahun dan Faktor Sentimen Selama 2014	125
Grafik 7.13. Tenor Kepemilikan Asing Dalam SBN	105	Grafik 8.23. Imbal Hasil SBN dan Net Beli / Jual Asing	125
Grafik 7.14. Komposisi Denominasi Mata Uang SBN	105	Grafik 8.24. Faktor-Faktor Penggerak IHSG Tahun 2014	127
Grafik 7.15. Perkembangan Berbagai Risiko SBN	106	Grafik 8.25. IHSG dan Perkembangan Bursa Global 2014	127
Grafik 7.16. Perkembangan Rasio Utang Pemerintah	106	Grafik 8.26. IHSG dan Net Beli / Jual Asing	127
Grafik 7.17. Total Pendapatan & Dana Perimbangan	107	Grafik 8.27. Perilaku Investor Pasar SBN	129
Grafik 7.18. Perkembangan PAD	108		
Grafik 7.19. Total Belanja & Belanja Pegawai	108		

Grafik 8.28. Suku Bunga PUAB O/N dan JIBOR Menurut Tenor	130	Grafik 9.18. Pangsa Nilai Transaksi Jual Beli UKA pada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank	145
Grafik 8.29. BI Rate dan Suku Bunga Kredit Menurut Penggunaan	131	Grafik 9.19. Posisi Uang Kartal yang Diedarkan	146
Grafik 8.30. Pertumbuhan Uang Primer dan Komponennya	131	Grafik 9.20. Pergerakan Uang Kartal yang Diedarkan Secara Harian	146
Grafik 8.31. Pertumbuhan M1 dan Komponennya	131	Grafik 9.21. Perkembangan UYD dan PDB Nominal	146
Grafik 8.32. Pertumbuhan M1 dan Kontribusi Pertumbuhan Komponennya	132	Grafik 9.22. Perkembangan UYD dan Konsumsi Rumah Tangga berdasarkan Harga Berlaku	147
Grafik 8.33. Pertumbuhan M2 dan Komponennya	132	Grafik 9.23. Posisi UYD dan Indeks Penjualan Eceran	147
Grafik 8.34. Pertumbuhan M2 dan Kontribusi Pertumbuhan Faktor-Faktor yang Memengaruhi	132	Grafik 9.24. Perkembangan <i>Currency Outside Banks</i> dan Dana Pihak Ketiga Perbankan	147
Grafik 8.35. Pertumbuhan M2 dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya	133	Grafik 9.25. Pangsa Nominal UYD Berdasarkan Denominasi	148
Grafik 8.36. Velositas Uang	133	Grafik 9.26. Pertumbuhan UYD Berdasarkan Denominasi	148
9. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	135	Grafik 9.27. Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia	148
Grafik 9.1. Indeks Sistem Pembayaran Nontunai	137	Grafik 9.28. Pola Siklikal Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia	149
Grafik 9.2. Transaksi Ritel terhadap PDB	138	Grafik 9.29. Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Kelompok Bank	149
Grafik 9.3. Rasio Transaksi Ritel terhadap Konsumsi Rumah Tangga	138	Grafik 9.30. Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah Ekonomi	149
Grafik 9.4. Indeks Penjualan Eceran dan Transaksi Ritel	138	Grafik 9.31. <i>Outflow</i> Uang Kartal dari Penyelenggaraan Kas Titipan	150
Grafik 9.5. Perkembangan Transaksi BI-RTGS	139	Grafik 9.32. <i>Outflow</i> Uang Kartal dari Kegiatan Kas Keliling	150
Grafik 9.6. Nilai Transaksi Rata-Rata Harian BI-RTGS	139	Grafik 9.33. TUKAB di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya	151
Grafik 9.7. Perkembangan Volume Antrian Kumulatif Sistem BI-RTGS per Kelompok Bank	140	Grafik 9.34. Rasio Posisi Kas terhadap Rata-rata Jumlah Bulan <i>Outflow</i>	151
Grafik 9.8. <i>Turn Over Ratio</i>	140	Grafik 9.35. Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar	152
Grafik 9.9. Perkembangan Transaksi BI-SSSS	141	Grafik 9.36. Temuan Uang Rupiah Palsu dan Rasionya terhadap Uang yang Beredar	152
Grafik 9.10. Perkembangan Transaksi SKNBI	141	Grafik 9.37. Temuan Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Wilayah	152
Grafik 9.11. Perkembangan Transaksi APMK	142	Grafik 9.38. Rasio Uang Palsu per 1 juta lembar Uang Yang Diedarkan di Negara <i>Emerging Markets</i>	152
Grafik 9.12. Perkembangan Transaksi ATM dan ATM/Debet	142		
Grafik 9.13. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	143		
Grafik 9.14. Rasio NPL Kartu Kredit	143		
Grafik 9.15. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	144		
Grafik 9.16. Pangsa Volume dan Nilai Transaksi Transfer Dana	144		
Grafik 9.17. Pangsa Nilai Transaksi Transfer Dana	145		
10. Kebijakan Moneter	163		
Grafik 10.1. Periodisasi Kebijakan Suku Bunga	166		

Grafik 10.2. BI rate dan Ekspektasi Inflasi Pasca Kenaikan Harga BBM 2013	167	14. Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan	248
Grafik 10.3. Event Analysis Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Respons Kenaikan BI Rate	169	Grafik 14.1. Proyeksi Populasi Indonesia (2010-2035)	251
Grafik 10.4. Periodogram Ekspektasi Inflasi (CF) pada Periode Kenaikan Harga BBM	170	Grafik 14.2. Produksi dan Konsumsi BBM	251
Grafik 10.5. Posisi Instrumen Operasi Moneter	172	Grafik 14.3. Perbandingan Intensitas Teknologi dalam Ekspor	253
Grafik 10.6. Komposisi Instrumen Operasi Moneter	173	Grafik 14.4. Perbandingan Perkembangan Upah Riil Daerah Jawa dan di Luar Jawa	253
11. Kebijakan Makroprudensial	187	15. Prospek Perekonomian Indonesia	273
Grafik 11.1. Pertumbuhan Kredit dan PDB	190	Grafik 15.1. Prakiraan Respons Kebijakan Global	274
Grafik 11.2. Pertumbuhan Kredit Properti	190	Grafik 15.2. Dependency Ratio Beberapa Negara	275
Grafik 11.3. Perkembangan Rasio NPL KPR	190	Grafik 15.3. Negara dengan Prospek Investasi Tinggi 2014-2016	276
Grafik 11.4. Porsi Pengelolaan Likuiditas Perbankan Syariah	191	Grafik 15.4. Sektor Tujuan Investasi 2010-2014	277
Grafik 11.5. Perkembangan Perbankan Syariah	192	Grafik 15.5. Prospek Inflasi 2015-2016	279
Grafik 11.6. Perkembangan TabunganKu	197		
12. Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	201		
Grafik 12.1. Penyelesaian Pengaduan Nasabah Jasa Sistem Pembayaran	206		
Grafik 12.2. Pengaduan Nasabah per Produk Sistem Pembayaran	207		
Grafik 12.3. Rasio Posisi Kas Bank Indonesia terhadap Outflow Bulanan Rata-rata	209		



DAFTAR DIAGRAM DAN GAMBAR

3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	39	Gambar 13.2. Sebaran Program Pengembangan Klaster Bank Indonesia untuk Komoditi Ketahanan Pangan	223
Gambar 3.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional 2014 (Diolah Berdasarkan PDRB Tahun Dasar 2000)	48	Gambar 13.3. Pusat Informasi Harga Pangan Nasional	224
6. Inflasi	83	Gambar 13.4. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)	229
Gambar 6.1. Inflasi 2014 dan Faktor – Faktor yang Memengaruhi	85	Gambar 13.5. Rute Ekspedisi Bhakti Kesejahteraan Sosial IV	236
Gambar 6.2. Peta Inflasi Regional 2014	93		
10. Kebijakan Moneter	163	14. Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan	247
Gambar 10.1. Bauran Kebijakan 2014	164	Diagram 14.1. Bauran Kebijakan Makroekonomi dan Reformasi Struktural	250
11. Kebijakan Makroprudensial	187	Gambar 14.1. Rencana Pembangunan Kawasan Industri di Luar Jawa	259
Gambar 11.1. Tingkat Inklusi Keuangan di ASEAN	195	Gambar 14.2. Lima Pilar Pendalaman Pasar Keuangan	260
12. Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	201	Diagram 14.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2015-2019	263
Gambar 12.1. Uang Kertas Bank Indonesia Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014	211		
Gambar 12.2. Peta Penyebaran Kas Titipan	212	15. Prospek Perekonomian Indonesia	273
13. Koordinasi Kebijakan	219	Gambar 15.1. Langkah Strategis Pemerintah Menghadapi KEA 2015 di Lapangan Usaha Industri	277
Gambar 13.1. Mekanisme Koordinasi Pengendalian Inflasi	222		



Agus D. W. Martowardojo

Gubernur



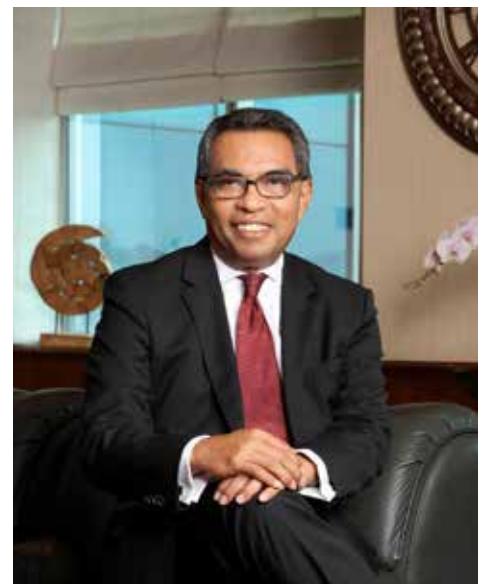
Mirza Adityaswara

Deputi Gubernur Senior



Halim Alamsyah

Deputi Gubernur



Ronald Waas

Deputi Gubernur

DEWAN GUBERNUR



Perry Warjiyo

Deputi Gubernur



Hendar

Deputi Gubernur



Agus D. W. Martowardjo
Gubernur Bank Indonesia

PRAKATA

Tahun 2014 yang baru saja berlalu ternyata kembali menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi global tidak secerah prakiraan semula. Pemulihan memang terus berlangsung di berbagai ekonomi utama dunia, namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata. Harga komoditas dunia pun terus melemah karena permintaan belum cukup kuat, khususnya dari Tiongkok. Di sektor keuangan, ketidakpastian kebijakan the Fed telah meningkatkan kerentanan dan volatilitas di pasar keuangan dunia. Sebagai negara berkembang (*emerging market*), kita turut merasakan adanya pergeseran arus modal asing keluar dari Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengamati adanya divergensi kebijakan moneter di negara-negara maju. Berbeda dengan the Fed yang berencana melakukan normalisasi kebijakan moneternya, bank sentral Jepang dan Eropa masih perlu menempuh kebijakan moneter yang sangat akomodatif.

Situasi di tataran global tersebut diperberat oleh berbagai permasalahan struktural pada perekonomiandomestik, yang sesungguhnya bukanlah suatu hal baru karena telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan struktural tersebut antara lain adalah ekspor yang masih didominasi produk berbasis SDA, ketahanan pangan dan energi yang masih rendah, pasar keuangan yang masih dangkal, serta ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang meningkat. Kombinasi situasi global yang kurang kondusif dan sejumlah permasalahan domestik yang masih mengemuka tersebut pada gilirannya meningkatkan risiko instabilitas perekonomian, yang terlihat pada berbagai indikator seperti neraca pembayaran, nilai tukar dan inflasi.

Menghadapi sejumlah tantangan dan risiko tersebut, Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah memperkuat sinergi dan menempuh berbagai bauran kebijakan dengan tetap memprioritaskan stabilitas makroekonomi dan terus mendorong reformasi struktural untuk memperkuat fundamental perekonomian. Bauran kebijakan yang ditempuh BI diarahkan pada upaya untuk mencapai sasaran inflasi, menurunkan defisit transaksi berjalan ke

tingkat yang lebih sehat, dan mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Di sepanjang tahun 2014, BI melanjutkan kebijakan moneter bias ketat, yang telah dimulai sejak pertengahan 2013.

Selama 11 bulan, yaitu dari Januari hingga November, BI mempertahankan suku bunga acuan BI Rate sebesar 7,50%. Tingkat BI Rate ini dipandang masih konsisten dengan upaya mencapai sasaran inflasi 2014 sebesar $4,5\pm1\%$ dan 2015 sebesar $4\pm1\%$, serta mengendalikan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Pada 18 November 2014, menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditempuh Pemerintah, BI menaikkan BI Rate menjadi 7,75%. Kenaikan BI Rate ini ditempuh untuk mematahkan risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasarannya.

Kebijakan suku bunga tersebut didukung oleh kebijakan moneter lainnya. Kebijakan nilai tukar Rupiah tetap diarahkan agar bergerak sesuai dengan fundamental perekonomian, dengan secara konsisten menjaga volatilitasnya. BI juga terus memperkuat operasi moneter untuk mengoptimalkan pengelolaan kecukupan likuiditas rupiah dan valas dalam rangka memperkuat transmisi kebijakan moneter. Menghadapi risiko tingginya utang luar negeri (ULN), BI memandang perlu mewajibkan korporasi pemilik ULN untuk menerapkan prinsip kehati-hatian berupa pemenuhan rasio lindung nilai tertentu. Upaya memperkuat resiliensi perekonomian ditopang pula oleh penguatan jaring pengaman keuangan internasional.

Respons kebijakan moneter juga kemudian disinergikan dengan kebijakan makroprudensial. Pada tahun 2014, BI melanjutkan kebijakan makroprudensial dengan mempertahankan tingkat giro wajib minimum (GWM) serta melanjutkan kebijakan *Loan to Value* (LTV).

Guna meningkatkan efektivitas bauran kebijakan, BI terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah serta dengan berbagai instansi

“Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin baik, dengan kondisi makroekonomi yang semakin kokoh, laju reformasi struktural yang semakin cepat, dan fundamental ekonomi yang semakin kuat.”

terkait, termasuk bank sentral dan otoritas keuangan negara lain. Penguatan koordinasi kebijakan tersebut terutama mencakup pengendalian inflasi, pengelolaan defisit transaksi berjalan, serta penguatan stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Selama tahun 2014, BI dan Pemerintah juga menempuh serangkaian kebijakan struktural guna memperbaiki fundamental perekonomian agar tercipta fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi. Kedua belah pihak menyadari pentingnya upaya-upaya untuk mempercepat reformasi struktural demi tercapainya pertumbuhan yang berkesinambungan.

Sebagaimana yang telah kita lihat bersama, berbagai respons bauran kebijakan yang ditempuh oleh BI dan Pemerintah pada tahun 2014 terbukti mampu menjaga stabilitas makroekonomi serta mengawal proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat. Keberhasilan ini tercermin pada laju inflasi yang terkendali, defisit transaksi berjalan yang lebih rendah, volatilitas nilai tukar yang bergerak dalam tren menurun dan defisit fiskal yang tetap terjaga. Selain itu, aliran masuk modal asing yang mencapai rekor tertingginya juga menunjukkan masih besarnya kepercayaan dunia kepada Indonesia.

Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin baik, dengan kondisi makroekonomi yang semakin kokoh, laju reformasi struktural yang semakin cepat, dan fundamental ekonomi yang semakin kuat. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan meningkat pada kisaran 5,4-5,8% dengan inflasi diperkirakan pada kisaran bawah sasaran $4\pm 1\%$ dan defisit transaksi berjalan diperkirakan sekitar 3% dengan kualitas yang lebih baik. Dalam jangka menengah, prospek perekonomian domestik berada dalam lintasan yang terus meningkat. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,5% dengan inflasi yang diperkirakan menurun hingga $3,5\pm 1\%$, serta didukung oleh perbaikan kondisi infrastruktur dan peningkatan produktivitas sehingga pada gilirannya meningkatkan kapasitas perekonomian secara keseluruhan. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga diperkirakan akan membaik dengan defisit transaksi berjalan yang lebih sehat.

Di luar berbagai capaian positif tersebut, beberapa risiko patut kita cermati bersama. Pemulihan ekonomi dunia diperkirakan masih akan berjalan lambat dan tidak merata bahkan cenderung bergerak dengan satu mesin pertumbuhan yaitu Amerika Serikat. Di tingkat regional, kita menghadapi tantangan baru seiring diberlakukannya

Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada akhir 2015. Dari domestik, perekonomian masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan upaya untuk memperkuat kedaulatan pangan dan energi, daya saing industri dan perdagangan, sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan ekonomi yang inklusif, dan modal dasar pembangunan. Dihadapkan pada sejumlah tantangan tersebut, BI berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan secara konsisten menempuh tiga bauran kebijakan yaitu moneter-makroprudensial, moneter-fiskal, dan reformasi struktural.

Uraian lebih lanjut tentang perjalanan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 tersebut telah kami susun dalam buku Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2014 yang kini ada dihadapan pembaca. Melanjutkan tradisi publikasi LPI pada tahun-tahun sebelumnya, buku ini kembali terbit dengan memuat catatan komprehensif tentang dinamika perekonomian Indonesia selama setahun terakhir. Buku ini juga mendokumentasikan pergulatan fikir yang dialami oleh BI maupun Pemerintah ketika memutuskan suatu kebijakan ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat. Berbagai peristiwa ekonomi tersebut kami sajikan tidak hanya sebagai bentuk dokumentasi, namun juga sebagai pelajaran bagi kita semua untuk melangkah dengan lebih baik ke depan.

Akhir kata, atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, kami persembahkan LPI 2014 dengan harapan bahwa buku ini akan memberi manfaat pengetahuan yang sebesar-besarnya bagi pembaca. Semoga buku ini juga mampu meneruskan reputasi LPI sebagai rujukan yang berkualitas dan terpercaya tentang perjalanan perekonomian bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan tantangan menuju pelabuhan kesejahteraan dan kemakmuran.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi langkah dan upaya kita dalam berkarya bagi negeri tercinta, Indonesia.

Jakarta, Maret 2015

Gubernur Bank Indonesia



Agus D. W. Martowardojo

Memperkokoh Stabilitas, Mempercepat Reformasi Struktural untuk Memperkuat Fundamental Ekonomi

Tahun 2014 berhasil dilalui dengan kinerja stabilitas makroekonomi yang semakin kokoh. Hal ini tercermin pada laju inflasi yang terkendali di tengah penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), defisit transaksi berjalan yang menyusut, surplus transaksi modal dan finansial yang tinggi, volatilitas nilai tukar yang dalam tren menurun, serta defisit fiskal yang terjaga. Kinerja yang baik ini terjadi di tengah berbagai tantangan yang tidak ringan, baik berasal dari global maupun domestik. Kondisi ekonomi global yang tidak secerah prakiraan semula menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian domestik. Kondisi tersebut diperberat oleh berbagai masalah struktural yang masih mengemuka seperti struktur ekspor yang masih didominasi produk berbasis sumber daya alam (SDA), ketahanan pangan dan energi yang masih rendah, pasar keuangan yang masih dangkal, serta ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang meningkat. Berbagai masalah tersebut meningkatkan tantangan pada stabilitas makroekonomi, yaitu neraca pembayaran, fiskal, nilai tukar dan ekspektasi inflasi. Merespons berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah memperkuat sinergi untuk menempuh bauran kebijakan guna memperkokoh stabilitas makroekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi ke arah yang lebih kuat. Kombinasi kebijakan moneter bias ketat dibarengi dengan kebijakan fiskal untuk menjaga defisit agar tetap terkendali mampu menjaga stabilitas makro. Disamping itu, langkah reformasi struktural di bidang energi melalui penyesuaian harga BBM yang pada akhirnya ditempuh oleh Pemerintah dan

upaya pendalaman pasar keuangan menjadi penguatan fondasi bagi perekonomian Indonesia di masa-masa yang akan datang. Namun, di tengah belum optimalnya reformasi struktural, perlambatan ekonomi global dan kebijakan stabilisasi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi domestik mengalami moderasi.

Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan semakin baik dengan fundamental yang lebih kuat, sejalan dengan semakin sinkronnya bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Disamping stabilitas makroekonomi yang semakin kokoh, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih tinggi, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan dana hasil penghematan subsidi untuk proyek infrastruktur dan mempercepat reformasi struktural. Namun, berbagai tantangan ke depan masih harus dicermati, antara lain pemulihan ekonomi global yang tidak merata, penurunan harga komoditas global yang terus berlanjut, serta divergensi kebijakan moneter negara maju, di tengah berbagai permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan. Untuk itu, BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (SPPUR). Selain itu, BI juga akan memperkokoh koordinasi dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta otoritas terkait lainnya dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan, penguatan sektor keuangan, serta percepatan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkesinambungan.

TINJAUAN UMUM

Kinerja Perekonomian Indonesia 2014

Tahun 2014 berhasil dilalui dengan kinerja stabilitas makroekonomi yang semakin kokoh dan proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat. Keberhasilan ini tercermin pada laju inflasi yang terkendali, defisit transaksi berjalan yang menurun, surplus transaksi modal dan finansial yang tinggi, volatilitas nilai tukar yang bergerak dalam tren menurun dan defisit fiskal yang terjaga. Hal ini tidak terlepas dari bauran kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan kebijakan fiskal untuk menjaga sustainabilitas fiskal dalam merespon tantangan perekonomian yang tidak ringan. Namun, kondisi global yang kurang kondusif dan langkah stabilisasi makro yang diambil, di tengah belum optimalnya reformasi struktural, menyebabkan perekonomian domestik tumbuh melambat.

Di tengah dinamika perekonomian global yang kurang menguntungkan, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2014 membaik seiring dengan implementasi kebijakan stabilisasi (Tabel 1). Defisit transaksi berjalan turun

menjadi 3,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 3,2% dari PDB. Pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat serta harga komoditas global yang masih rendah memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh komoditas berbasis SDA. Namun, perbaikan ekspor manufaktur yang didorong oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi negara maju, khususnya Amerika Serikat (AS), dan nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental, serta tertahannya laju pertumbuhan impor sejalan dengan moderasi permintaan domestik telah membawa defisit transaksi berjalan menuju tingkat yang lebih sehat. Sementara itu, seiring dengan persepsi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia dan imbal hasil yang tetap menarik, transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang meningkat, bahkan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir 2014 meningkat menjadi 111,9 miliar dolar AS atau setara 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah, di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Tabel 1. Neraca Pembayaran Indonesia

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014**				Total**
					I*	II*	III*	IV**	
Transaksi Berjalan	5.144	1.685	-24.418	-29.115	-4.149	-8.939	-6.963	-6.818	-26.233
Ekspor Barang	149.966	191.109	187.347	182.089	43.937	44.505	43.606	43.242	175.290
Impor Barang	-118.963	-157.284	-178.667	-176.256	-40.588	-44.880	-42.046	-40.874	-168.387
Jasa-jasa, netto	-9.791	-9.803	-10.564	-12.072	-2.230	-2.920	-2.595	-2.788	-10.532
Pendapatan Primer, netto	-20.698	-26.547	-26.628	-27.055	-6.354	-7.178	-7.133	-7.157	-27.822
Pendapatan Sekunder, netto	4.630	4.211	4.094	4.178	1.085	1.534	1.204	1.396	5.220
Transaksi Modal dan Finansial	26.526	13.636	24.909	22.010	7.190	13.872	14.731	7.794	43.586
Investasi Langsung	11.106	11.528	13.716	12.295	3.288	3.459	5.945	2.574	15.266
Investasi Portofolio	13.202	3.806	9.206	10.875	8.703	8.046	7.441	1.611	25.802
Derivatif Finansial	-94	69	13	-334	-140	45	-57	-61	-213
Investasi Lainnya	2.262	-1.801	1.922	-871	-4.662	2.314	1.398	3.655	2.705
Neraca Keseluruhan	30.343	11.857	215	-7.325	2.066	4.297	6.475	2.410	15.249
Memorandum									
Posisi Cadangan Devisa	96.207	110.123	112.781	99.387	102.592	107.678	111.164	111.862	111.862
Dalam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah	7,4	6,5	6,1	5,5	5,7	6,1	6,3	6,4	6,4
Transaksi Berjalan/PDB (%)	0,7	0,2	-2,8	-3,2	-2,0	-4,0	-3,0	-2,8	-3,0

Keterangan:

* angka sementara ** angka sangat sementara

Nilai tukar rupiah pada 2014 mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS), namun mencatat apresiasi terhadap mata uang mitra dagang utama lainnya. Depresiasi rupiah terhadap dolar AS terjadi pada triwulan IV 2014 dikarenakan kuatnya apresiasi dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama dunia. Hal ini sejalan dengan rilis data perbaikan ekonomi AS dan rencana kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR). Terhadap dolar AS, rupiah secara *point-to-point* (ptp) melemah 1,7% (yoy) selama tahun 2014 ke level Rp12.385 per dolar AS. Pelembahan terhadap dolar AS tersebut lebih rendah dari pelembahan rupiah terhadap dolar AS pada tahun sebelumnya yang sebesar 20,8%. Sementara itu, terhadap mata uang lainnya termasuk yen Jepang, dan euro, rupiah mengalami apresiasi yang cukup tinggi, walaupun masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara mitra dagang.

Inflasi pada tahun 2014 tetap terkendali di tengah tekanan yang tinggi dari *administered prices* (AP) dan *volatile food* (VF). Inflasi, yang hingga Oktober 2014 masih berada dalam kisaran sasarannya yaitu 4,19% (ytd), pada akhir 2014 tercatat sebesar 8,36% (yoy) (Tabel 2). Kenaikan inflasi terutama disebabkan pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan dampak gejolak harga pangan domestik pada akhir 2014. Kenaikan harga BBM bersubsidi telah mendorong kenaikan harga-harga, baik oleh dampak langsung maupun dampak lanjutan (*second round effect*). Selain BBM, penyesuaian harga barang *administered* lainnya

jugalah terjadi sepanjang 2014, seperti tarif tenaga listrik (TTL) dan *liquid petroleum gas* (LPG) 12 kg. Namun, inflasi inti tetap terkendali pada level 4,93%(yoy). Hal ini tidak terlepas dari peran kebijakan BI dalam mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi, serta semakin baiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah.

Di tengah belum optimalnya reformasi struktural, perlambatan ekonomi global dan kebijakan stabilisasi ekonomi mendorong melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2014. Perekonomian Indonesia tahun 2014 tumbuh sebesar 5,0%, melambat dibandingkan dengan 5,6% pada tahun 2013 dan lebih rendah dibandingkan perkiraan pada awal tahun 2014 yaitu sebesar 5,5-5,9%. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan terutama dari *emerging markets* (EM) dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Meskipun pertumbuhan ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur cenderung membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan AS dan nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah yang melambat sebagai akibat program penghematan guna menjaga sustainabilitas fiskal. Sementara itu, sejalan dengan perlambatan ekspor dan sikap *wait and see* investor terkait Pemilu, kegiatan

Tabel 2. Indikator Ekonomi Indonesia

Indikator	2011	2012	2013	Tw I 2014	Tw II 2014	Tw III 2014	Tw IV 2014	2014
PDB	6,5	6,0	5,6	5,1	5,0	4,9	5,0	5,0
Konsumsi Rumah Tangga	5,1	5,5	5,4	5,4	5,1	5,1	5,0	5,1
Konsumsi Lembaga NonProfit Rumah Tangga (LNPR)	5,5	6,7	8,2	23,7	22,8	5,6	-0,2	12,4
Konsumsi Pemerintah	5,5	4,5	6,9	6,1	-1,5	1,3	2,8	2,0
Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB)	8,9	9,1	5,3	4,7	3,7	3,9	4,3	4,1
Ekspor	14,8	1,6	4,2	3,2	1,4	4,9	-4,5	1,0
Impor	15,0	8,0	1,9	5,0	0,4	0,3	3,2	2,2
Inflasi	3,8	4,3	8,4	7,3	6,7	4,5	8,4	8,4
Inti	4,3	4,4	5,0	4,6	4,8	4,0	4,9	4,9
Diatur Pemerintah (<i>Administered Prices</i>)	2,8	2,7	16,7	17,5	13,5	6,5	17,6	17,6
Bergejolak (<i>Volatile Food</i>)	3,4	5,7	11,8	7,3	6,7	4,2	10,9	10,9
Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar AS (rata-rata)	8.776	9.358	10.455	11.833	11.629	11.770	12.244	11.876
Defisit APBN/PDB (%)	-1,1	-1,9	-2,2					-2,2

Keterangan: Perhitungan PDB menggunakan tahun dasar 2010

Sumber: BPS, Kementerian Keuangan

investasi juga tumbuh melambat. Namun demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi itu terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid. Dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kawasan ASEAN 5, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 relatif lebih tinggi.

Moderasi ekonomi domestik juga tidak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah untuk menjaga sustainabilitas fiskal. Pertumbuhan ekonomi yang melambat serta penurunan harga komoditas telah memberikan tekanan terhadap sisi penerimaan fiskal. Di tengah tekanan pada sisi penerimaan, masih tingginya beban subsidi energi mendorong pemerintah menempuh kebijakan penghematan belanja agar defisit fiskal tidak melampaui target 2,4% dari PDB. Selain melalui kebijakan penghematan belanja, pada 18 November 2014 Pemerintah juga menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengendalikan konsumsi dan beban subsidi BBM. Dengan respon tersebut, defisit fiskal 2014 tercatat mencapai 2,2% dari PDB, relatif sama dengan defisit tahun 2013. Pencapaian tersebut juga dibarengi dengan defisit keseimbangan primer yang membaik menjadi 0,9% dari PDB dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 1,0% dari PDB. Di sisi lain, kebijakan penghematan belanja yang ditempuh pemerintah berdampak pada perlambatan konsumsi dan investasi pemerintah, yang kemudian turut menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan lapangan usaha, perlambatan kinerja terjadi di sebagian besar lapangan usaha ekonomi, baik *tradable* maupun *nontradable*. Dari kelompok *tradable*, pelemahan terutama terjadi di lapangan usaha pertambangan. Menurunnya permintaan ekspor batubara serta implementasi UU Minerba pada awal tahun 2014 berdampak pada menurunnya kinerja pertambangan. Sedangkan, pertumbuhan lapangan usaha manufaktur sedikit meningkat didorong oleh peningkatan kinerja sub lapangan usaha makanan minuman antara lain dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu. Kinerja beberapa lapangan usaha *nontradable* juga tercatat melambat, terutama lapangan usaha jasa keuangan sejalan dengan pertumbuhan kredit yang melambat. Secara spasial, perlambatan ekonomi terutama terjadi di kawasan Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), sejalan dengan menurunnya permintaan ekspor komoditas berbasis SDA terutama di sektor pertambangan. Sementara itu, moderasi ekonomi di kawasan Jawa dipicu oleh perlambatan permintaan domestik, khususnya investasi.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan ekonomi domestik, stabilitas sistem keuangan (SSK) pada

tahun 2014 tetap terkendali, sejalan dengan kebijakan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Perkembangan tersebut tercermin dari indeks SSK yang membaik menjadi 0,7 dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 1,1. Risiko kredit tetap terjaga di tengah kinerja ekonomi domestik yang termoderasi dan ekonomi global yang kurang kondusif. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) sedikit meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2013, namun masih berada pada level yang rendah pada kisaran 2,0%. Meskipun sempat meningkat, tekanan likuiditas perbankan menurun sejalan dengan efektifitas kebijakan Giro Wajib Minimum-*Loan to Deposit Ratio* (GWM-LDR) dan ekspansi operasi keuangan Pemerintah. Sementara itu, terjadinya risiko pasar tercermin dari kenaikan suku bunga simpanan dan kredit yang relatif terbatas, dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap neraca perbankan yang terkendali, serta harga Surat Berharga Negara (SBN) yang meningkat. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) mencapai 19,6%, jauh di atas ketentuan minimum 8%, sebagai cerminan daya tahan perbankan yang kuat.

Selama 2014, kinerja pasar keuangan dan institusi keuangan nonbank, juga mencatat kinerja yang positif. Kinerja pasar saham dan obligasi pada tahun 2014 meningkat, meskipun sempat tertekan di penghujung tahun 2014. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup meningkat 22,3% dibandingkan tahun 2013 dan mencapai level 5.226,9 . Sementara, *yield* SBN terpantau menurun pada seluruh tenor. Investor menilai perkembangan ekonomi Indonesia membaik, seperti tercermin dari berbagai rilis data ekonomi yang positif. Penerapan berbagai bauran kebijakan BI dengan pemerintah dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM turut menopang pergerakan pasar saham dan SBN hingga tutup tahun. Kinerja institusi keuangan nonbank juga mencatat pertumbuhan positif, tercermin dari kenaikan total aset, baik pada perusahaan pembiayaan, industri asuransi, perusahaan dana pensiun dan reksadana.

Kebijakan moneter melalui penetapan BI Rate telah mendorong proses penyesuaian perekonomian dengan baik melalui jalur ekspektasi inflasi, suku bunga, dan kredit. Kebijakan moneter bias ketat sepanjang tahun 2014 mampu menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi pelaku ekonomi, tercermin pada ekspektasi inflasi yang terus menurun. Dari jalur suku bunga, transmisi ke suku bunga deposito tercermin pada kenaikan suku

bunga deposito. Sementara itu, kenaikan suku bunga kredit relatif terbatas, terkait dengan perilaku hati-hati perbankan untuk mengendalikan potensi kenaikan NPL di tengah ekonomi domestik yang melambat. Sejalan dengan kenaikan suku bunga kredit tersebut dan melambatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit pada 2014 melambat menjadi 11,6% dibandingkan dengan 2013 sebesar 21,6%. Sejalan dengan melambatnya ekonomi domestik, penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tumbuh melambat menjadi 15,1% dibandingkan dengan 2013 sebesar 15,5%. Dari sisi harga aset, kebijakan moneter yang cukup kredibel selama ini, didukung oleh fundamental ekonomi yang semakin baik, direspon positif oleh pelaku pasar sehingga mendorong peningkatan kinerja pasar saham dan pasar obligasi. Dengan perkembangan tersebut, likuiditas perekonomian pada tahun 2014 tetap terjaga di tengah derasnya arus masuk modal asing serta moderasi pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2014, sistem pembayaran (SP) yang berjalan secara aman, efisien dan andal turut mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta efisiensi perekonomian nasional. Terjaganya keamanan SP antara lain tercermin dari *fraud* alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) dan rasio NPL kartu kredit yang menurun. Kesadaran masyarakat mengenai SP yang semakin tinggi juga berkontribusi positif terhadap peningkatan keamanan SP. Bank Indonesia (BI) juga telah melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan efisiensi SP melalui perluasan interoperabilitas, *channel*, dan perluasan elektronifikasi. Hal ini tercermin pada nilai transaksi melalui SP ritel, yaitu sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI), APMK, dan uang elektronik yang meningkat dibandingkan tahun 2013. Selain aspek aman dan efisien, keandalan SP sebagai infrastruktur sistem keuangan dapat dijaga dengan baik selama 2014. Keandalan SP tercermin melalui terpenuhinya tingkat ketersediaan sistem sesuai tingkat layanan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan uang rupiah (PUR) yang andal turut mendukung kelancaran kegiatan transaksi ekonomi, stabilitas moneter, dan SSK. Ketersediaan uang kartal dengan jumlah yang cukup tercermin dari rasio posisi kas yang meningkat menjadi 3,5 bulan *outflow* rata-rata dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 2,5 bulan. Pencapaian posisi kas BI tersebut tidak terlepas dari peningkatan transaksi uang kartal antar bank (TUKAB) dan terjaganya kualitas uang rupiah yang diedarkan. Kualitas uang rupiah dalam kondisi layak edar yang terjaga tercermin dari peningkatan pemusnahan uang rupiah tidak layak edar. Dari aspek keamanan, jumlah temuan uang

rupiah palsu tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rasio sembilan lembar per satu juta lembar uang rupiah yang diedarkan.

Tantangan Perekonomian 2014

Upaya untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Di sisi global, proses *rebalancing* ekonomi masih berlangsung ditandai oleh masih rentan dan tidak meratanya pemulihan ekonomi global yang terjadi. Berlanjut dari tahun sebelumnya, lanskap ekonomi global tahun 2014 masih ditandai dengan perlambatan ekonomi EM khususnya Tiongkok, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, khususnya AS, menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang konsisten. Pertumbuhan ekonomi global terutama ditopang oleh pertumbuhan ekonomi AS yang terus membaik. Proses *rebalancing* di Tiongkok ke arah sektor ekonomi domestik di tengah masih tingginya risiko di sektor perumahan dan permasalahan *shadow banking* menyebabkan ekonomi Tiongkok terus melemah, walaupun Pemerintah telah melakukan berbagai stimulus. Di sisi lain, perekonomian AS yang ditunjang oleh kebijakan akomodatif the Fed yang sangat agresif dengan struktur ekonominya yang lebih fleksibel mampu melaju lebih cepat, meninggalkan ekonomi Eropa dan Jepang yang cenderung lebih kaku.

Pemulihan ekonomi global yang tak sesuai harapan pada gilirannya mendorong turunnya harga komoditas dunia. Sebagai pengguna komoditas sumber daya alam terbesar, pelemahan ekonomi Tiongkok menyebabkan permintaan terhadap komoditas global menurun. Kondisi ini menyebabkan penurunan harga komoditas dunia yang berlangsung sejak tahun 2012 terus berlanjut. Faktor kedua yang menyebabkan turunnya harga komoditas adalah anjloknya harga minyak sejak pertengahan 2014 sebagai akibat meningkatnya suplai minyak dari *shale oil* dan level produksi OPEC yang tidak dikurangi di tengah melemahnya permintaan minyak dunia.

Di sektor keuangan, ketidakpastian kebijakan the Fed serta divergensi kebijakan moneter negara maju meningkatkan kerentanan dan volatilitas di pasar keuangan dunia. Kondisi ekonomi AS yang terus membaik telah menjadi dasar bagi otoritas moneter untuk mengakhiri kebijakan *Quantitative Easing* (QE) pada Oktober 2014. Pengurangan stimulus moneter secara bertahap (*tapering off*) ini memberikan tekanan terhadap perekonomian EM. Hal ini ditunjukkan oleh kecenderungan bergesernya arus modal global dari

EM menuju negara-negara maju. Pasca *tapering off*, ketidakpastian muncul terkait dengan kepastian waktu bagi bank sentral AS untuk melakukan normalisasi suku bunga kebijakan yang rencananya dilakukan pada tahun 2015. Perilaku pasar keuangan yang mulai mengantisipasi normalisasi ini telah mendorong meningkatnya tekanan arus modal dari EM khususnya di bulan Desember 2014. Selain antisipasi terhadap normalisasi kebijakan bank sentral AS, perbedaan (*divergensi*) *stance* kebijakan moneter antara bank sentral Eropa (ECB) dan bank sentral Jepang (BOJ) yang menempuh kebijakan moneter longgar dan bank sentral AS yang berencana menaikkan FFR turut menambah tekanan volatilitas pasar keuangan dunia, yang selanjutnya berdampak pada volatilitas arus modal dan nilai tukar negara berkembang (EM), termasuk Indonesia.

Dari sisi domestik, tantangan terutama bersumber dari risiko meningkatnya defisit ganda (*twin deficits*), yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal. Tantangan ini bersumber dari permasalahan struktural yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, struktur ekspor nasional sampai tahun 2014 masih didominasi oleh komoditas primer seperti batubara, *Crude Palm Oil* (CPO) dan tembaga. Ekspor komoditas primer tersebut memiliki nilai tambah yang rendah, rentan terhadap pergerakan harga komoditas global, dan cenderung terkonsentrasi pada negara berkembang seperti Tiongkok dan India. Melambatnya perekonomian Tiongkok dan anjloknya harga komoditas menyebabkan ekspor komoditas terus tertekan. Kedua, besarnya subsidi energi menyebabkan meningkatnya risiko fiskal terutama ketika penerimaan fiskal turun sejalan dengan menurunnya harga komoditas. Di samping itu, besarnya subsidi semakin membatasi kemampuan sumber pembiayaan pemerintah untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan daya saing dalam negeri. Ketiga, rendahnya ketahanan energi di dalam negeri semakin mengemuka dalam tiga tahun terakhir. Defisit neraca perdagangan migas tercatat terus tinggi. Di tengah produksi minyak Indonesia yang terus menurun dan kemajuan program diversifikasi energi yang belum signifikan, kebutuhan energi tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, yang pada akhirnya terus membebani transaksi berjalan.

Di sektor keuangan, permasalahan struktural ditandai oleh pasar keuangan Indonesia yang masih dangkal dan meningkatnya ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Pasar keuangan Indonesia yang dangkal belum mampu menyediakan instrumen dan opsi pembiayaan investasi yang memadai. Hal ini tercermin dari masih

terbatasnya ketersediaan instrumen keuangan, baik dari sisi keragaman dan jangka waktu. Di sisi lain, kepemilikan asing di pasar keuangan seperti SBN tercatat meningkat dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tingginya kepemilikan asing pada pasar keuangan yang masih dangkal kemudian menyebabkan risiko volatilitas harga ketika terjadi pembalikan arus modal. Sementara itu, pembiayaan eksternal terutama ULN swasta cenderung meningkat dengan komposisi yang lebih besar dibandingkan dengan ULN sektor publik. Peningkatan jumlah ULN swasta yang pesat ini dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan dana pelaku usaha domestik untuk menopang aktivitas usahanya. Di sisi lain, dana di pasar global tersedia dalam jumlah melimpah dengan suku bunga yang relatif rendah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah ULN sektor swasta meningkat hampir tiga kali lipat. Peningkatan ini kemudian memunculkan beberapa risiko, yaitu risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko beban utang yang berlebihan (*overleverage*). Risiko nilai tukar cukup tinggi karena sebagian besar ULN digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang berorientasi domestik yang memiliki pendapatan rupiah. Risiko nilai tukar juga semakin tinggi karena minimnya penggunaan instrumen lindung nilai (*hedging*) di kalangan korporasi.

Kombinasi dinamika ekonomi global yang kurang kondusif dan sejumlah permasalahan domestik telah meningkatkan risiko kestabilan makroekonomi pada tahun 2014. Pertama, penyesuaian defisit neraca transaksi berjalan masih berjalan lambat akibat tetap tingginya defisit perdagangan migas di tengah mulai membaiknya defisit neraca pedagangan non migas. Kedua, meningkatnya risiko fiskal akibat rendahnya penerimaan dan masih tingginya beban subsidi mengharuskan pemerintah untuk melakukan penghematan yang memperlambat pertumbuhan permintaan domestik di tengah permintaan global yang juga masih terbatas. Ketiga, tingginya kepemilikan asing pada pasar keuangan nasional yang masih dangkal dan meningkatnya ULN swasta di tengah kondisi keuangan global yang masih penuh ketidakpastian menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan pembiayaan eksternal. Tingginya kepemilikan asing pada pasar keuangan nasional yang masih dangkal dapat meningkatkan risiko tekanan nilai tukar ketika terjadi pembalikan arus modal, terutama terkait rencana normalisasi kebijakan moneter the Fed. Keempat, tahun 2014 sebagai tahun transisi pemerintahan juga menambah ketidakpastian dan terhambatnya pengambilan keputusan yang strategis seperti reformasi subsidi yang seyogyanya dapat dilakukan lebih cepat, yang berdampak pada masih

tingginya ekspektasi inflasi. Hal ini menyebabkan bauran kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural tidak dapat secara optimal dilakukan dalam merespon tantangan global dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Respons Bauran Kebijakan 2014

Dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks tersebut, kebijakan ekonomi diarahkan untuk tetap memprioritaskan stabilitas makroekonomi dan terus mendorong reformasi struktural untuk memperkuat ketahanan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan belum optimalnya reformasi struktural, kebijakan ekonomi hingga Oktober 2014 lebih diarahkan untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta kebijakan fiskal guna menjaga sustainabilitas fiskal. Sejak November 2014, sejalan dengan implementasi reformasi subsidi, bauran kebijakan disesuaikan dengan melanjutkan kebijakan moneter bias ketat dalam rangka meredam inflasi pascakenaikan harga BBM dan kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan serta mendorong pengembangan kredit produktif seperti kredit kepada UMKM, dengan tetap mempertahankan SSK. Bauran kebijakan BI tersebut disinergikan dengan kebijakan fiskal yang mulai memberikan ruang stimulus bagi perekonomian. Disamping merespon permasalahan siklikal tersebut, sepanjang tahun 2014 BI dan Pemerintah berupaya mempercepat reformasi struktural dalam rangka memperkuat fundamental ekonomi.

Dari sisi BI, bauran kebijakan diarahkan pada upaya untuk mencapai sasaran inflasi, menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dan mendukung terperliharanya SSK. Dalam hal ini, BI memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan suku bunga, nilai tukar, lalu lintas devisa, operasi moneter, makroprudensial, dan SPPUR, serta berkoordinasi dengan pemerintah dan institusi lain guna meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mengatasi permasalahan siklikal perekonomian. Di samping itu, bauran kebijakan BI juga diperkuat dengan kebijakan struktural, antara lain berupa pendalaman pasar keuangan dan peningkatan keuangan inklusif. Dalam pelaksanaannya, BI senantiasa memonitor ketepatan takaran bauran kebijakan yang sesuai dengan dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik dari waktu ke waktu.

Sepanjang tahun 2014, BI melanjutkan kebijakan suku bunga bias ketat yang telah ditempuh sejak pertengahan 2013. BI menempuh kebijakan suku bunga bias ketat untuk menjangkar inflasi yang sesuai dengan lintasan sasaran inflasi dan mengarahkan defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat. Pada tahun 2014, BI mempertahankan BI Rate sebesar 7,50% selama 11 bulan hingga 17 November 2014. Tingkat BI Rate ini dipandang masih konsisten dengan upaya mencapai sasaran inflasi 2014 sebesar $4,5\pm1\%$ dan 2015 sebesar $4\pm1\%$ serta mengendalikan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditempuh Pemerintah di tengah tekanan terhadap nilai tukar yang meningkat seiring dengan berakhirnya program QE the Fed, BI pada 18 November 2014 menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 7,75%. Kenaikan BI Rate ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pascakenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasaran yaitu $4\pm1\%$ pada tahun 2015. Kebijakan tersebut juga konsisten dengan upaya untuk mengelola defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat. Dalam konteks tersebut, pada saat yang bersamaan BI tetap mempertahankan suku bunga *Deposit Facility* (DF) sebesar 5,75% dan menaikkan suku bunga *Lending Facility* (LF) sebesar 50 bps menjadi 8% untuk menghindari tekanan yang berlebihan pada likuiditas pasar keuangan, di samping untuk mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.

Sementara itu, kebijakan nilai tukar rupiah tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya guna mendukung upaya perbaikan defisit transaksi berjalan. Upaya mengarahkan nilai tukar agar bergerak sesuai dengan fundamentalnya dilakukan dengan mempertimbangkan perlunya ruang fleksibilitas nilai tukar yang cukup agar nilai tukar yang tercipta merefleksikan kondisi permintaan dan penawaran valas dan konsisten dengan upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Di samping itu, mengingat struktur pasar valas domestik yang belum dalam, fleksibilitas nilai tukar ini tetap disertai dengan upaya pengendalian volatilitas agar tidak menimbulkan ekspektasi depresiasi yang berlebihan. Langkah stabilisasi nilai tukar tersebut dilaksanakan melalui intervensi di pasar valas domestik secara terukur. Dalam pelaksanaan intervensi valas, BI juga memerhatikan sumber tekanan dari nilai tukar. Terkait dengan hal tersebut, salah satu strategi yang ditempuh BI adalah melakukan *dual intervention* ketika tekanan stabilitas nilai tukar bersumber dari arus modal keluar dari pasar surat berharga negara (SBN). Strategi *dual intervention* tersebut

dilaksanakan melalui intervensi jual di pasar valas untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang dibarengi dengan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas rupiah dan stabilitas pasar SBN.

Kebijakan penguatan operasi moneter ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan kecukupan likuiditas rupiah dan valas dalam rangka memperkuat transmisi kebijakan moneter. Strategi kebijakan penguatan operasi moneter rupiah secara konsisten diarahkan untuk melanjutkan upaya penyerapan ekses likuiditas dengan instrumen yang berjangka lebih panjang (*lengthening*), mengurangi penggunaan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara bertahap dan mengoptimalkan penggunaan SBN melalui *reverse repo* SBN yang bertenor di bawah 3 bulan. Sementara itu, di sisi penguatan operasi moneter valas, BI telah menerbitkan instrumen baru berupa *Term Deposit* (TD) Valas Syariah, yang antara lain ditujukan untuk menambah pilihan instrumen valas yang dapat digunakan untuk mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Terkait dengan upaya *lengthening* instrumen moneter rupiah, BI telah melakukan penguatan peran Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dengan menambah tenor SDBI menjadi 3 dan 6 bulan serta meningkatkan frekuensi lelang SDBI menjadi 3 kali sebulan. Dengan penambahan tenor dan frekuensi lelang SDBI tersebut, diharapkan perbankan akan terdorong untuk menggeser penempatan ekses likuiditas dari instrumen moneter berjangka pendek (*Deposit Facility*) ke SDBI.

Bauran kebijakan BI juga diperkuat dengan kebijakan di bidang pengelolaan lalu lintas devisa yang difokuskan pada upaya memperkuat resiliensi perekonomian domestik terhadap risiko tingginya ULN. Tingginya pembiayaan ULN diperburuk oleh masih minimnya upaya korporasi untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas ULN, sehingga meningkatkan kerentanan perekonomian domestik terhadap gejolak (*shock*) eksternal. Untuk itu, BI memandang perlu untuk mewajibkan korporasi pemilik ULN menerapkan prinsip kehati-hatian berupa pemenuhan rasio lindung nilai tertentu, rasio likuiditas valas minimum dan peringkat utang minimum. Ketentuan tersebut tidak ditujukan untuk melarang korporasi non bank untuk melakukan pinjaman luar negeri, namun lebih ditujukan untuk mendorong korporasi non bank untuk mengelola risiko yang timbul dari ULN, baik risiko nilai tukar, risiko likuiditas maupun risiko utang yang berlebihan, dengan lebih baik. Di samping itu, dengan mewajibkan korporasi pemilik ULN melakukan *hedging*, kebijakan ini diharapkan akan mendukung upaya BI dalam melakukan pendalaman pasar keuangan dan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Upaya memperkuat resiliensi perekonomian domestik juga ditopang oleh penguatan jaring pengaman keuangan international dalam bentuk penambahan bantalan cadangan devisa sebagai *second line of defense* dalam menghadapi guncangan eksternal. Pada tahun 2014, BI memperkuat kerjasama dengan bank sentral dan otoritas lain, baik dalam tataran regional maupun bilateral. Peningkatan kerjasama regional diwujudkan dalam bentuk penguatan kapasitas *Chiang-Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) melalui peningkatan nilai komitmen kerjasama dari 120 miliar dolar AS menjadi 240 miliar dolar AS, penyediaan fasilitas *Precautionary Line* untuk pencegahan krisis, dan peningkatan IMF *de-linked portion*. Penguatan kapasitas CMIM ini ditujukan untuk memperkuat jaring pengaman keuangan regional bagi negara anggota ASEAN+3 yang akan atau sedang menghadapi masalah neraca pembayaran dan kesulitan likuiditas jangka pendek. Sementara itu, di sisi kerjasama bilateral, pada tahun 2014 BI telah menyepakati *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan Bank of Korea (BoK) yang ditujukan untuk mempromosikan kegiatan perdagangan dan investasi serta memperkuat kerjasama keuangan kedua negara. Meski tidak secara langsung menambah cadangan devisa, implementasi kerjasama jenis ini dapat membantu mengurangi ketergantungan perekonomian pada mata uang dolar AS.

BI menyinergikan berbagai kebijakan moneter yang telah ditempuh dengan kebijakan makroprudensial dalam satu kerangka bauran kebijakan BI yang menyeluruh. Kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Sejalan dengan masih tingginya rencana pemberian kredit perbankan pada tahun 2014, BI memandang masih perlu dilakukan upaya untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kredit dan ketahanan terhadap likuiditas perbankan guna mendukung terjadinya SSK. Untuk itu, BI melanjutkan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh sejak pertengahan tahun 2013. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mempertahankan GWM LDR sebesar 78-92% dan GWM Sekunder sebesar 4% serta melanjutkan kebijakan *Loan to Value* (LTV). Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK melakukan *supervisory action* untuk memitigasi potensi risiko sistem keuangan. Kombinasi kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh telah menunjukkan hasil sesuai harapan. SSK tetap terjaga di tengah pertumbuhan kredit yang menurun. Menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan makroprudensial untuk memperluas sumber-

sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan serta mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang prioritas, termasuk mendorong penyaluran kredit UMKM.

Di bidang sistem pembayaran (SP), kebijakan BI diarahkan pada modernisasi SP melalui penguatan infrastruktur SP dan perluasan transaksi nontunai melalui pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) guna mendukung efisiensi perekonomian nasional. Penguatan infrastruktur SP dilakukan baik pada SP nilai besar maupun ritel. Pada SP nilai besar, BI melanjutkan pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyelesaian transaksi nilai besar. Sementara itu, pada SP ritel, BI mengembangkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II dan menginisiasi *National Payment Gateway* (NPG) yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan menata infrastruktur penyelenggaraan SP ritel. BI juga telah mengimplementasikan interkoneksi Bank Indonesia *Government electronic Banking* (BIG-eB) dengan sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara guna memperlancar kegiatan transaksi Pemerintah. Terkait dengan GNNT, pascakenaikan harga BBM, BI berupaya mendukung kelancaran dan perluasan penyaluran program-program bantuan dari Pemerintah kepada masyarakat guna mengurangi dampak kenaikan harga BBM, melalui penggunaan uang elektronik dan implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD).

Di bidang pengelolaan uang rupiah (PUR), kebijakan pengelolaan uang rupiah diarahkan untuk mendukung kelancaran kegiatan transaksi ekonomi, stabilitas moneter, dan SSK. Kebijakan yang ditempuh tersebut tetap berlandaskan pada tiga pilar pengelolaan uang rupiah, yaitu tersedianya uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta layanan kas prima. Selama tahun 2014, kebijakan yang ditempuh adalah menjaga kecukupan posisi kas BI, memperluas pembukaan Kas Titipan dengan prioritas di wilayah timur Indonesia dan di Sumatera, serta meningkatkan kerjasama dengan perbankan dan instansi pemerintah untuk memberikan layanan kas kepada masyarakat secara langsung pada periode hari raya keagamanan. Untuk mendukung kedaulatan negara, BI melakukan kegiatan layanan kas di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). BI juga telah menerbitkan uang rupiah kertas pecahan Rp100.000 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dari sisi infrastruktur sistem informasi, BI telah mengimplementasikan BI Sistem Informasi Layanan Kas (BISILK) secara nasional,

yang bertujuan untuk optimalisasi dan efisiensi kegiatan penarikan dan penyetoran uang kartal oleh perbankan melalui BI. Untuk mendukung penegakan hukum pemberantasan uang rupiah palsu oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI), BI memberikan layanan pemeriksaan laboratorium atas barang bukti uang rupiah palsu, keterangan ahli dalam kasus tindak pidana uang rupiah palsu, serta pertukaran data dan informasi uang rupiah palsu melalui database uang rupiah palsu (Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center*).

Guna meningkatkan efektivitas bauran kebijakan BI dalam memperkokoh stabilitas makroekonomi, BI terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan berbagai instansi lain yang terkait. Penguatan koordinasi kebijakan tersebut terutama mencakup pengendalian inflasi, pengelolaan transaksi berjalan/*Current Account Deficit* (CAD), serta penguatan SSK dan SPPUR. Koordinasi pengendalian inflasi ditujukan untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi penawaran dalam jangka pendek dan menengah panjang, sehingga ekspektasi inflasi dapat dijaga di kisaran sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme koordinasi TPI dan TPID, antara lain dengan memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan stabilisasi harga pangan dan energi, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengkinian peta surplus defisit komoditas pangan strategis, menjaga kesinambungan pasokan, dan mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di berbagai daerah. Koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait juga diperkuat dalam rangka mendorong percepatan reformasi struktural guna mengurangi tekanan CAD. Selain pengendalian inflasi dan pengeluaran CAD, penguatan koordinasi juga terus dilakukan melalui kebijakan makro dan mikroprudensial, upaya mendorong *financial inclusion*, serta upaya pencegahan dan penanganan krisis untuk mewujudkan SSK secara menyeluruh. Selain itu, terkait dengan SPPUR, Bank Indonesia juga terus meningkatkan efektifitas koordinasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan sistem pembayaran nontunai yang aman dan efisien, guna mendorong peningkatan penggunaan instrumen pembayaran nontunai, serta mendukung kelancaran pengelolaan uang rupiah. BI juga melakukan kerjasama dengan bank sentral dan otoritas keuangan negara mitra untuk memperkuat jaring pengaman keuangan internasional dalam menghadapi guncangan eksternal.

Bauran kebijakan BI yang difokuskan pada stabilisasi ekonomi makro didukung pula oleh kebijakan fiskal yang diprioritaskan pada upaya menjaga kesinambungan fiskal di tengah beban subsidi yang besar. Di tengah

perkembangan global yang kurang menguntungkan dan perlambatan perekonomian domestik, upaya menjaga sustainabilitas fiskal menjadi penting dalam memelihara kepercayaan pasar terhadap kredibilitas manajemen ekonomi makro. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2014 (APBN-P 2014) yang didominasi pengeluaran rutin dan beban subsidi, serta rendahnya realisasi penerimaan negara telah membawa Pemerintah pada pilihan kebijakan yang sulit dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah melakukan penghematan, terutama belanja barang dan modal, yang pada gilirannya mengurangi daya dukung Pemerintah terhadap perekonomian. Guna meningkatkan peran Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan beban subsidi BBM, Pemerintah pada 18 November menempuh kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini juga ditujukan untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih besar serta meletakkan fondasi yang kuat bagi reformasi energi secara menyeluruhan. Kebijakan ini juga diikuti dengan penyaluran program kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin.

Meskipun belum optimal, serangkaian kebijakan struktural telah ditempuh pada 2014 guna memperbaiki fundamental perekonomian demi terciptanya fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkesinambungan. Di sisi Pemerintah, reformasi struktural dilaksanakan di sektor energi, sektor pangan dan reformasi fiskal. Di bidang energi, kebijakan Pemerintah antara lain ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor energi dengan mewajibkan perusahaan tambang berorientasi ekspor untuk melakukan pengolahan bahan mineral mentah sebelum dieksport. Di bidang pangan, Pemerintah telah mencanangkan kedaulatan pangan antara lain melalui kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dengan pemanfaatan teknologi. Dalam rangka mendorong investasi dalam negeri, Pemerintah juga telah melakukan efisiensi pelayanan pemerintah melalui penyiapan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna mempermudah proses izin usaha dan penanaman modal. Berbagai kebijakan struktural tersebut juga didukung oleh reformasi fiskal yang ditandai dengan penerapan kebijakan *fixed subsidy* yang memberikan ruang fiskal yang luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, BI menempuh reformasi struktural dengan meneruskan kebijakan pendalaman pasar keuangan dan mendorong keuangan inklusif. BI senantiasa berusaha menciptakan pasar keuangan, baik rupiah maupun valas, yang efisien dan likuid yang tercermin pada terbentuknya tingkat harga yang wajar dan transaksi yang cukup. Untuk

meningkatkan akses keuangan masyarakat, BI secara konsisten terus mendorong berbagai inovasi, baik inovasi di bidang saluran distribusi yang berbasis teknologi, inovasi produk dan inovasi regulasi guna meningkatkan keamanan layanan keuangan.

Tantangan dan Arah Kebijakan ke Depan

Secara keseluruhan, dinamika perekonomian Indonesia pada tahun 2014 mengangkat beberapa pelajaran berharga bagi upaya mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pelajaran pertama yang mengemuka ialah pentingnya kebijakan makroekonomi, baik fiskal maupun moneter, yang disiplin dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Perjalanan ekonomi selama tahun 2014 menunjukkan bahwa bauran kebijakan moneter yang konsisten bias ketat dan kebijakan makroprudensial yang konsisten diarahkan untuk menjaga SSK, serta kebijakan fiskal yang tetap konsisten menjaga kesinambungannya dapat memperkokoh stabilitas makroekonomi. Kedua, di tengah berbagai tantangan perekonomian yang kompleks, baik yang siklikal maupun struktural, respon kebijakan yang hanya mengandalkan kebijakan stabilisasi dapat memiliki dampak yang kurang menguntungkan pada pertumbuhan ekonomi. Guna memitigasi dampak yang kurang menguntungkan tersebut, kebijakan stabilisasi dapat dibaurkan dengan kebijakan stimulus fiskal dan reformasi struktural, sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Ketiga, bauran kebijakan sebaiknya dapat diimplementasikan secara tepat waktu dengan takaran yang terukur. Terhambatnya implementasi salah satu kebijakan menyebabkan bauran kebijakan tidak dapat dilakukan secara optimal dalam merespon tantangan global dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi domestik. Keempat, koordinasi yang erat antar pemangku kebijakan menjadi elemen penting untuk memperkuat efektifitas bauran kebijakan. Pelajaran terakhir, dinamika perekonomian 2014 yang diwarnai oleh ketidakpastian yang sangat tinggi juga mengingatkan pentingnya percepatan reformasi struktural guna memperkuat fundamental ekonomi.

Ke depan, berkaca dari pelajaran berharga pada tahun 2014, berbagai tantangan perekonomian yang semakin kompleks, baik yang bersumber dari eksternal maupun domestik, perlu direspon melalui bauran kebijakan yang semakin sinkron, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kondisi ekonomi dan keuangan global yang diperkirakan masih kurang kondusif

dan sejumlah permasalahan struktural domestik yang masih belum terselesaikan diperkirakan masih akan tetap memberikan tantangan pada kestabilan makroekonomi ke depan. Menghadapi tantangan tersebut, bauran kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia, seyogyanya, dapat diimplementasikan secara terintegrasi, tepat waktu, dan dengan takaran yang terukur. Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta kebijakan fiskal yang tetap menjaga sustainabilitasnya diharapkan dapat terus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pada saat bersamaan, stimulus fiskal dan reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan dapat memitigasi dampak yang kurang menguntungkan dari kebijakan untuk menjaga stabilisasi makroekonomi pada pertumbuhan ekonomi. Berlanjutnya reformasi subsidi dan refomasi perpajakan diharapkan dapat menghasilkan postur fiskal yang menjaga sustainabilitasnya sekaligus memberikan stimulus pada perekonomian. Di sisi lain, reformasi struktural yang secara konsisten dijalankan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan struktural domestik, sehingga kapasitas perekonomian nasional dapat meningkat secara signifikan. Dengan demikian, ke depan, perekonomian Indonesia akan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang berada dalam lintasan yang meningkat dan stabilitas makroekonomi yang semakin kokoh.

Tantangan Perekonomian ke Depan

Ke depan, perekonomian nasional masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan, baik yang berasal dari global, regional, maupun domestik. Dari global, pemulihan ekonomi dunia diprakirakan masih akan berjalan lambat dan tidak merata bahkan cenderung bergerak dengan satu mesin pertumbuhan yaitu Amerika Serikat (AS). Sejalan dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang berjalan lambat dan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya serta harga minyak dunia yang masih lemah, harga komoditas global diprakirakan akan tumbuh lebih rendah. Perkembangan yang kurang kondusif tersebut berpotensi memberikan tekanan pada perbaikan kinerja transaksi berjalan. Di sektor keuangan, volatilitas pasar keuangan global masih berpotensi tinggi sejalan dengan divergensi kebijakan moneter negara maju, dimana AS kemungkinan akan menaikkan suku bunga FFR dan Eropa serta Jepang akan menempuh kebijakan QE. Perkembangan ekonomi global tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap Transaksi Modal dan Finansial (TMF), dan SSK (*spillover effect*) terutama didorong oleh potensi risiko semakin kuatnya mata uang

dolar AS, semakin meningkatnya risiko volatilitas aliran modal, dan semakin tingginya risiko premium.

Dari regional, berbagai tantangan mengemuka seiring akan diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada akhir 2015. Penerapan KEA diperkirakan akan meningkatkan arus perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini sejalan dengan berkurangnya berbagai hambatan perdagangan, baik barang maupun jasa, dan penguatan fasilitasi perdagangan intra ASEAN. Indonesia memiliki peluang menjadi basis produksi yang tidak saja berperan dalam memasok ke dalam rantai nilai ASEAN namun juga ke rantai nilai global. Namun, peluang ini sekaligus menjadi tantangan yang perlu dicermati. Apabila peluang tersebut tidak dapat dipersiapkan secara baik, maka dikhawatirkan Indonesia justru akan menjadi pasar bagi produk dan jasa negara-negara KEA lainnya.

Sementara itu dari domestik, perekonomian masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural terutama terkait kedaulatan pangan dan energi, daya saing industri dan perdagangan, sumber-sumber pembiayaan pembangunan, dan inklusi ekonomi. Pada sektor pangan, tantangan bersumber antara lain dari sisi produksi yang belum dapat mengimbangi peningkatan permintaan akibat dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pada sektor energi, berlanjutnya ekspansi kelas menengah mendorong meningkatnya konsumsi energi di tengah produksi energi yang semakin terbatas. Tantangan lain yang dihadapi adalah melemahnya daya saing industri dan perdagangan dalam persaingan global. Struktur produksi dalam negeri masih didominasi oleh komoditas berbasis SDA dan industri padat karya yang berteknologi rendah. Hal ini berpotensi memberikan tekanan pada proses perbaikan transaksi berjalan. Sementara itu, terbatasnya sumber dana yang bersifat jangka panjang untuk membiayai perekonomian masih menjadi tantangan yang harus dihadapi di masa yang akan datang. Tantangan struktural selanjutnya adalah masih kuatnya permasalahan ketidakmerataan akses pada kesempatan dan peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi masih terasa belum sepenuhnya inklusif.

Modal dasar pembangunan seperti kondisi infrastruktur, kapasitas inovasi dan teknologi, modal manusia, serta iklim usaha dan reformasi birokrasi yang belum memadai membuat solusi terhadap keempat permasalahan struktural fundamental ekonomi di atas masih terkendala. Dari sisi infrastruktur, jika dibandingkan dengan negara di kawasan, kualitas infrastruktur Indonesia masih relatif

tertinggal. Saat ini, ketersediaan dan kualitas infrastruktur konektivitas, baik fisik maupun digital, masih belum mampu mengefisiensikan biaya logistik dalam rantai produksi, baik untuk tingkat nasional maupun global, sehingga belum terlalu kompetitif dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Di samping itu, ketersediaan modal manusia terampil dengan tingkat pendidikan yang memadai di pasar tenaga kerja saat ini masih terbatas. Keterbatasan pasokan terutama terdapat pada SDM dengan keahlian dibidang *science, technology, engineering, mathematics and health* (STEM-H), yang merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi peningkatan daya saing ekspor sektor-sektor industri yang berbasis inovasi dengan muatan teknologi tinggi. Dari sisi iklim usaha dan reformasi birokrasi, prosedur dan waktu untuk memulai usaha masih cukup panjang, serta masih terdapat sejumlah hambatan regulasi dan pelayanan investasi.

Kombinasi tantangan ekonomi global dan sejumlah permasalahan domestik tersebut telah meningkatkan risiko ketidakstabilan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan di masa mendatang. Pertama, penyesuaian defisit transaksi berjalan berpotensi berjalan lambat bahkan tidak tertutup kemungkinan terdapat risiko peningkatan defisit transaksi berjalan. Hal ini terutama bersumber dari masih belum kuatnya kinerja ekspor, akibat pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok serta penurunan harga komoditas, dan meningkatnya impor terkait belanja modal Pemerintah untuk mendorong akselerasi proyek infrastruktur, di tengah keterbatasan kapasitas domestik. Kedua, masih tingginya ketidakpastian keuangan global berpotensi membatasi aliran modal masuk dan memberikan tekanan pada stabilitas sistem keuangan. Hal ini terjadi di tengah terbatasnya sumber pembiayaan domestik. Ketiga, pertumbuhan ekonomi domestik berpotensi melambat (*downside risks*) terutama berasal dari kemungkinan realisasi belanja Pemerintah yang tidak sebesar yang direncanakan dan melambatnya kinerja ekspor. Selain itu, apabila penerapan kebijakan reformasi struktural tidak dapat berjalan sesuai rencana, maka selain pertumbuhan ekonomi dapat lebih rendah dari prakiraan, akan diikuti pula oleh inflasi yang lebih tinggi dan perbaikan defisit transaksi berjalan yang lebih terbatas.

Arah Kebijakan Ekonomi ke Depan

Dihadapkan pada berbagai tantangan yang masih mengemuka, bauran kebijakan ekonomi perlu diarahkan

untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penguatan koordinasi bauran kebijakan merupakan sebuah keharusan. Pertama, Bank Indonesia akan melaksanakan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memastikan pencapaian sasaran inflasi, penyesuaian defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, penguatan koordinasi dengan kebijakan mikroprudensial yang dilakukan dengan OJK sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan sistem keuangan. Kedua, bauran kebijakan moneter dan fiskal akan diperkuat. Dalam hal ini, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan sustainabilitas fiskal melalui reformasi subsidi dan reformasi pajak. Ketiga, kebijakan reformasi struktural diperlukan agar dapat mendorong kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dengan kesinambungan yang terjaga. Di sektor riil, reformasi struktural dilakukan melalui pencapaian kedaulatan pangan dan energi, peningkatan daya saing industri dan perdagangan, penguatan ekonomi inklusif, dan penguatan modal dasar pembangunan. Hal ini perlu didukung oleh reformasi struktural untuk penguatan kapasitas pembiayaan ekonomi melalui pendalaman pasar keuangan, modernisasi sistem pembayaran, dan inklusi keuangan.

Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial guna menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kebijakan suku bunga yang tepat akan ditempuh untuk menjangkar inflasi agar sesuai dengan lintasan sasaran inflasi dan mengarahkan defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat. Upaya stabilisasi ekonomi makro juga akan didukung oleh kebijakan nilai tukar yang difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar bergerak sesuai kondisi fundamentalnya. Selain itu, guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, Bank Indonesia akan terus melakukan penguatan operasi moneter, baik rupiah maupun valas. Pada sisi lain, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan untuk mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan tersebut juga akan didukung oleh upaya Bank Indonesia untuk melanjutkan pendalaman pasar keuangan dan penguatan SPPUR sebagai satu kesatuan Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang terintegrasi.

Selain itu, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan kebijakan makroekonomi, bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut juga akan disinergikan dengan kebijakan fiskal. Hal ini akan dilakukan melalui penguatan koordinasi kebijakan moneter dengan fiskal yang difokuskan pada upaya pengendalian inflasi, pengelolaan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dan penguatan stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Sementara itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk tetap memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi dengan tetap memerhatikan sustainabilitas fiskal melalui reformasi subsidi dan reformasi pajak. Melalui kebijakan stimulus fiskal dan reformasi struktural yang akan dilakukan Pemerintah dan Bank Indonesia secara tersinergi diharapkan dapat memitigasi dampak yang kurang menguntungkan dari kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Berbagai upaya pengelolaan permasalahan siklikal tersebut juga ditopang oleh serangkaian kebijakan struktural guna memperbaiki fundamental perekonomian agar tercipta fondasi yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Terkait dengan itu, Pemerintah berupaya untuk mencapai kedaulatan pangan dan energi, memperkuat daya saing industri dan perdagangan, memperluas sumber-sumber pembiayaan pembangunan, dan mendorong inklusi ekonomi. Untuk meningkatkan kedaulatan pangan, Pemerintah telah mencanangkan sejumlah sasaran kedaulatan pangan antara lain tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, serta terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung oleh pengawasan distribusi pangan dan peningkatan cadangan pangan pemerintah. Untuk mencapai ketahanan energi, pemerintah antara lain akan berupaya meningkatkan produksi energi primer dan meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi. Untuk mengatasi tantangan peningkatan daya saing industri dan perdagangan, Pemerintah akan mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengembangkan wilayah industri, mendorong peningkatan populasi industri dan meningkatkan integrasi industri dalam rantai produksi global. Terkait tantangan perlunya penguatan basis pembiayaan pembangunan dan sekaligus penguatan SSK, BI dan Pemerintah akan bersinergi menempuh sejumlah kebijakan agar pasar keuangan domestik menjadi lebih dalam, likuid, dan efisien. Selanjutnya, untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan inklusi ekonomi, maka upaya pengikutsertaan sebanyak-banyaknya tenaga kerja, terutama dari golongan masyarakat yang kurang mampu, merupakan prinsip yang akan menjadi acuan

Pemerintah. Beberapa hal yang akan dilakukan adalah memperbesar keragaman aktivitas ekonomi pedesaan dengan mengembangkan industri pertanian yang berbasis komoditi rakyat serta dengan memberikan perhatian yang lebih pada pengembangan usaha mikro. Terkait dengan itu, Bank Indonesia akan melengkapi dengan program inklusi keuangan untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan.

Kebijakan struktural guna memperbaiki fundamental perekonomian tersebut akan ditopang oleh kebijakan dalam memperkokoh modal dasar pembangunan. Terkait dengan itu, Pemerintah akan menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung perbaikan kondisi infrastruktur, peningkatan kapasitas inovasi, teknologi, dan kualitas modal manusia, serta penguatan iklim usaha dan reformasi birokrasi. Untuk mendukung perbaikan kondisi infrastruktur, dalam 5 tahun ke depan, Pemerintah diantaranya telah menargetkan untuk meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi serta keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda dengan meningkatkan konektivitas nasional, baik di darat maupun di laut, sehingga tercipta keseimbangan pembangunan. Pemerintah juga berupaya memperkuat institusi untuk mendukung efisiensi dunia usaha, terutama melalui perbaikan iklim usaha dan reformasi birokrasi. Dalam rangka mendukung upaya-upaya perbaikan efisiensi perekonomian melalui perbaikan iklim usaha dan layanan publik tersebut, Bank Indonesia akan terus mendorong dilakukannya perubahan metode transaksi pembayaran yang ditopang oleh sistem pembayaran nasional yang semakin modern. Perubahan metode transaksi pembayaran akan dilakukan dari sebagian besar tunai menjadi nontunai yang memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara elektronis dan lebih efisien dari sisi waktu, media, dan biaya transaksi.

Prospek Ekonomi Jangka Pendek dan Menengah

Ke depan, sejalan dengan semakin sinkronnya berbagai bauran kebijakan, perekonomian Indonesia diperkirakan semakin baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan serta stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Hal ini ditopang oleh perbaikan ekonomi global, meskipun berjalan lambat, dan semakin kuatnya reformasi struktural dalam memperkokoh fundamental ekonomi nasional. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu tumbuh pada kisaran 5,4-5,8%, didukung

oleh investasi pemerintah, sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif termasuk pembangunan infrastruktur. Inflasi 2015 diperkirakan berada pada kisaran sasaran inflasi $4\pm1\%$. Hal ini didukung oleh terkendalinya inflasi inti dan menurunnya harga minyak dunia. Ekspektasi inflasi diperkirakan masih tetap terjaga sejalan dengan bauran kebijakan dan koordinasi yang ditempuh BI dan Pemerintah. Kebijakan tersebut diperkuat oleh koordinasi yang semakin baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui TPI dan TPID. Sementara itu, kinerja NPI pada 2015 diprakirakan berlangsung secara moderat dengan defisit transaksi berjalan di sekitar 3% dari PDB dengan struktur yang lebih sehat. Sejalan dengan perkembangan tersebut, DPK dan kredit diprakirakan tumbuh masing-masing sebesar 14-16% dan 15-17%.

Pada tahun 2016, perekonomian domestik diprakirakan tumbuh sebesar 5,6-6,0%. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap didorong oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi, serta perdagangan, hotel dan restoran. Kinerja ekonomi yang lebih baik tersebut ditopang oleh daya beli yang tetap resilien sejalan dengan ekspansi kelas menengah yang tetap berlanjut. Pada tahun 2016, dengan berbagai kebijakan yang diambil untuk mengendalikan inflasi, diprakirakan inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi $4\pm1\%$. Sumber tekanan inflasi antara lain diprakirakan berasal dari permintaan domestik yang meningkat di tengah turunnya harga komoditas yang semakin terbatas. Inflasi inti diprakirakan masih akan terjaga dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar. Inflasi *volatile food* juga diprakirakan akan cenderung menurun seiring dengan peningkatan produksi bahan makanan dan tata niaga yang lebih baik. Inflasi *administered prices* diprakirakan tetap pada level yang rendah sepanjang tidak terdapat kebijakan untuk menaikkan harga barang/jasa yang bersifat strategis. Seiring dengan prakiraan membaiknya perekonomian domestik, defisit neraca transaksi berjalan tahun 2016 diprakirakan sedikit meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan barang impor akibat permintaan domestik, terutama terkait proyek infrastruktur pemerintah, dan permintaan ekspor yang lebih tinggi. Meskipun demikian, peningkatan

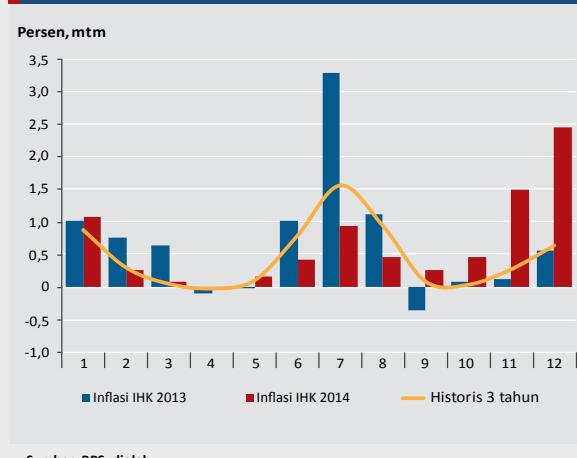
defisit transaksi berjalan ini diperkirakan hanya bersifat temporer dan bersifat lebih produktif karena terkait dengan perbaikan infrastruktur. Secara keseluruhan, defisit neraca transaksi berjalan masih berada pada kisaran 3% terhadap PDB. Di sisi lain, membaiknya fundamental ekonomi sejalan dengan reformasi struktural yang terus berlangsung mendorong arus modal masuk, terutama *Foreign Direct Investment* (FDI), sehingga kinerja Transaksi Modal dan Finansial (TMF) tetap positif dan memadai bagi pembiayaan defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah, prospek ekonomi domestik berada dalam lintasan yang terus meningkat didukung oleh perekonomian global yang semakin pulih dan kebijakan struktural Pemerintah di sektor riil yang semakin dapat mengatasi berbagai tantangan struktural. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan dapat tumbuh mencapai 6,5%. Sementara itu, kinerja NPI dalam jangka menengah diprakirakan akan membaik dengan defisit transaksi berjalan yang lebih sehat pada kisaran 2,5-3% dari PDB. Reformasi fiskal Pemerintah dan peningkatan harga minyak dunia secara gradual diprakirakan mampu menopang perbaikan kinerja neraca perdagangan migas. Pada neraca perdagangan nonmigas, peningkatan impor nonmigas akibat belanja infrastruktur dikompensasi oleh perbaikan kinerja ekspor nonmigas sejalan dengan pulihnya harga komoditas global dan meningkatnya nilai tambah ekspor manufaktur terutama hasil pengolahan dan pemurnian komoditas mineral. Melalui perbaikan kondisi infrastruktur dan peningkatan produktivitas, kapasitas perekonomian nasional akan semakin meningkat sehingga diprakirakan berdampak terhadap menurunnya tekanan inflasi hingga mencapai $3,5\pm1\%$ dalam jangka menengah. Lebih jauh, jika kapabilitas industrial dapat ditingkatkan dengan lebih optimal dan prakondisi kebijakan untuk mendukung kenaikan produktivitas serta daya saing perekonomian domestik juga terpenuhi, perekonomian Indonesia dalam jangka menengah diprakirakan dapat tumbuh secara berkelanjutan di atas 7%. Sebaliknya, apabila penerapan kebijakan reformasi struktural tidak dapat berjalan sesuai rencana, maka pertumbuhan ekonomi dapat lebih rendah dari prakiraan dengan diikuti oleh inflasi yang lebih tinggi dan perbaikan defisit transaksi berjalan yang lebih terbatas.

Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang konsisten menjaga stabilitas makro dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah secara umum berhasil mengendalikan inflasi 2014 di tengah besarnya tekanan inflasi pada kelompok *administered prices* (AP) dan *volatile food* (VF). Hal ini tercermin dari tekanan inflasi yang terus menurun sejak awal tahun dan kembali pada kisaran sasarannya pada 10 bulan pertama tahun 2014. Terkendalinya inflasi IHK juga terlihat dari dinamika inflasi bulanannya (*mtm*) yang terus menurun pada triwulan I dan lebih rendah dari historisnya pada triwulan II sampai dengan triwulan III (Grafik 1). Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi mulai 18 November 2014 dan gejolak harga pangan kemudian menyebabkan inflasi keseluruhan 2014 berada di atas sasaran yang ditetapkan. Meski demikian, capaian inflasi tahun 2014 tetap terkendali pada *single digit* dan sedikit lebih rendah dari realisasi tahun 2013.

Laju inflasi 2014 mencapai 8,36% (*yoY*), di atas sasaran inflasi 2014 (4,5±1%). Meskipun di atas target inflasi, pencapaian inflasi 2014 tetap dapat dikendalikan di tengah tingginya tekanan inflasi kelompok AP yang mencapai 17,57% dan VF sebesar 10,88%. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi fundamental, yang tercermin pada inflasi inti, relatif terjaga sehingga inflasi IHK 2014 sedikit lebih baik dibandingkan dengan inflasi 2013 (8,38%). Inflasi inti relatif terjaga pada 4,93%, di tengah meningkatnya tekanan inflasi dari sisi biaya (*cost push*) akibat kenaikan harga energi dan gejolak harga pangan.

Grafik 1. Perbandingan Inflasi 2013 - 2014 dan Historis 3 Tahun



Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan penyesuaian harga, khususnya di sektor energi, untuk mengurangi beban subsidi agar dapat dialihkan ke pembiayaan pembangunan dan sektor yang lebih produktif. Secara bertahap Pemerintah melakukan penyesuaian harga LPG 12 kg dan tarif tenaga listrik (TTL) bagi golongan pelanggan tertentu, serta penyesuaian harga BBM bersubsidi. Sejumlah kebijakan penyesuaian harga tersebut berdampak pada peningkatan inflasi AP dari tahun sebelumnya (16,65%) sehingga memberikan sumbangan tertinggi terhadap realisasi inflasi 2014, yakni sebesar 3,20%.

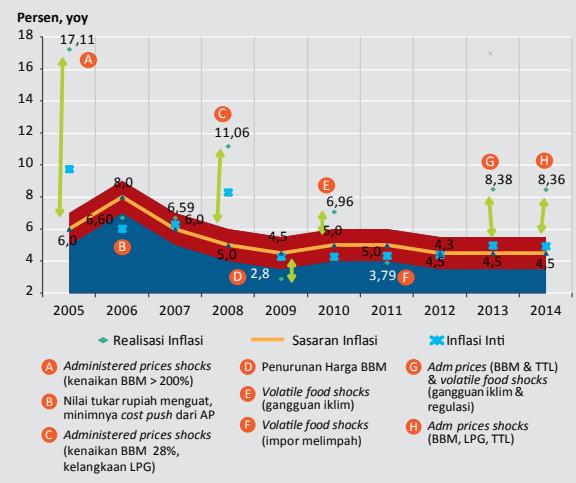
Secara umum, tekanan inflasi dari kelompok VF relatif terkendali, meski dari sisi level masih tinggi dan mencapai *double digits*. Hal ini didukung oleh pasokan yang melimpah untuk beberapa komoditas dan upaya koordinasi pengendalian inflasi oleh BI dan Pemerintah yang semakin kuat. Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi VF yang melambat terutama disebabkan oleh perkembangan inflasi daging sapi, daging ayam, dan bawang merah yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu.¹ Namun demikian, peningkatan inflasi VF di atas rata-rata historis terjadi pada triwulan IV 2014 terutama didorong oleh terbatasnya pasokan, khususnya komoditas aneka cabai dan beras akibat anomali cuaca serta tidak adanya beras untuk orang miskin (Raskin) di bulan November dan Desember. Di samping itu, kenaikan inflasi juga didorong oleh peningkatan biaya distribusi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014. Kelompok VF menyumbang 2,17% dari realisasi inflasi 2014.

Sementara itu, realisasi inflasi inti yang mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran agregat relatif melambat dibanding tahun 2013 (4,98%). Terjaganya ekspektasi inflasi dan moderasi pertumbuhan ekonomi domestik menjadi faktor terkendalinya laju inflasi inti. Hal ini tercermin pada perlambatan inflasi inti *nontraded* dari 6,6% menjadi 5,4% di tengah tingginya tekanan *cost push* dari kelompok AP maupun VF.² Dari sisi eksternal, meski terdapat tekanan dari depresiasi rupiah pada barang dengan kandungan impor, berlanjutnya tren pelemahan harga komoditas

1 Inflasi kelompok VF tahun 2013 tercatat sebesar 11,83%.

2 Inflasi inti *nontraded* adalah inflasi komoditas dalam kelompok inti yang tidak diperdagangkan dengan negara lain (domestik).

Grafik 2. Pencapaian Sasaran Inflasi



global mampu menahan dampak pelemahan nilai tukar tersebut. Hal ini tercermin dari terkendalinya peningkatan inflasi inti *traded* dari 2,6% pada tahun 2013 menjadi 4,3%. Dengan perkembangan tersebut, kelompok inflasi inti menyumbang 2,99% dari realisasi inflasi 2014.

Meski dalam dua tahun terakhir terdapat gejolak kenaikan harga BBM, laju inflasi IHK masih terkendali pada *single digit* (Grafik 2). Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi kebijakan yang telah ditempuh oleh BI dan Pemerintah, khususnya dalam rangka meminimalkan dampak lanjutan kenaikan AP dan gejolak harga pada kelompok VF, serta mengarahkan ekspektasi inflasi pada sasarnya.

Untuk merespon tekanan inflasi selama tahun 2014, BI menempuh berbagai kebijakan antisipatif melalui optimalisasi bauran kebijakan. Terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, BI pada 18 November 2014 merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps dan 50 bps menjadi 7,75% dan 8,00%, sementara suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 5,75%. Kebijakan ini ditempuh untuk mengelola ekspektasi inflasi yang meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tanpa memberikan tekanan yang berlebihan pada kondisi likuiditas di pasar uang. Untuk meminimalkan risiko *imported inflation*, BI senantiasa berupaya menjaga pergerakan nilai tukar agar sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian. Selain itu, BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial antara lain melalui langkah-langkah antisipatif untuk memastikan bahwa pertumbuhan kredit sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

Pemerintah juga menempuh berbagai kebijakan untuk meredam tekanan inflasi selama tahun 2014. Untuk mengendalikan dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi, Pemerintah mengendalikan kenaikan tarif angkutan antar kota dan penyeberangan, serta memberikan diskon pajak kendaraan bermotor.³ Sementara itu, untuk mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu akibat kenaikan harga-harga, Pemerintah menyiapkan beberapa program perlindungan sosial.⁴ Selanjutnya, upaya stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen dilakukan melalui penyediaan stok, operasi pasar (OP) dan melanjutkan penyaluran Raskin. Upaya stabilisasi ini cukup efektif untuk mengendalikan tekanan inflasi, misalnya percepatan penyaluran raskin pada bulan Februari-Maret 2014 pada saat terjadinya bencana alam dan banjir mampu mengendalikan tekanan harga beras. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dan kosongnya raskin pada dua bulan terakhir tahun 2014 diselenggarakan operasi pasar khusus.⁵

BI dan Pemerintah senantiasa memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas-TPID). Di tingkat pusat, Pemerintah, berdasarkan rekomendasi BI, menetapkan sasaran inflasi tahun 2016 – 2018 serta rekomendasi di bidang kebijakan energi dan stabilisasi harga pangan. Hal serupa juga dilakukan oleh Pokjanas-TPID yang memiliki beberapa program unggulan seperti mendorong terciptanya kesinambungan pasokan antardaerah surplus dan daerah defisit dengan menyusun panduan kerja sama antardaerah sebagai referensi TPID.

- 3 Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 58/2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi menetapkan besaran kenaikan tarif angkutan penyeberangan rata-rata 7,12% serta sebesar 10% untuk tarif angkutan antar kota berdasarkan Permenhub Nomor PM 57/2014.
- 4 Program perlindungan sosial yang disiapkan diantaranya adalah penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS). Program ini mencakup pemberian perlindungan sosial kepada sekitar 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) dengan besaran masing-masing diberikan sebesar Rp200 ribu per keluarga per bulan selama empat bulan.
- 5 Beras untuk kegiatan operasi pasar khusus ini bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).



Keterangan gambar:

Seperti layaknya Tari Caci dari NTT, dinamika perekonomian global pada tahun 2014 diwarnai oleh pergerakan dua kekuatan ekonomi dunia yaitu kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang. Kedua kelompok ini saling memberi pengaruh melalui aktivitas dan kebijakan ekonomi masing-masing.



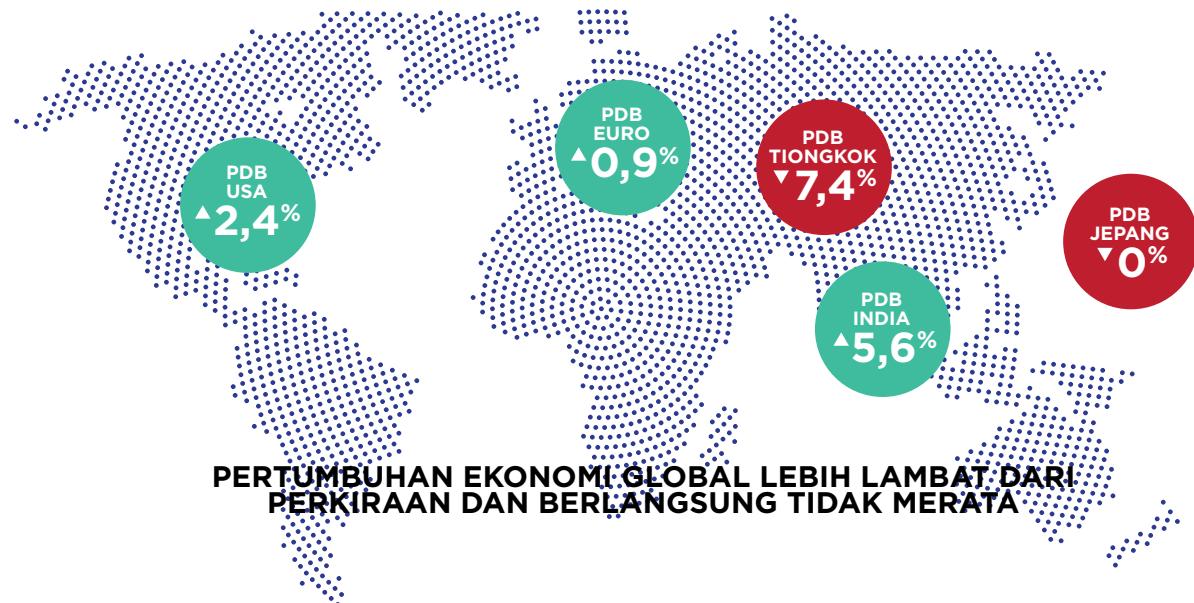
Perekonomian Global

BAGIAN

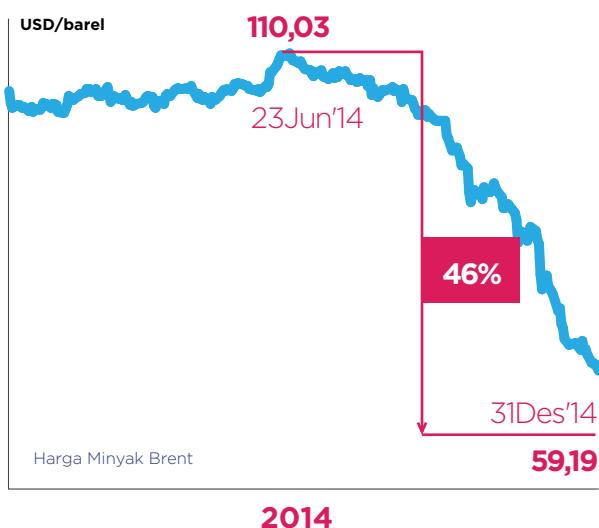
1

INFOGRAFIS BAGIAN 1

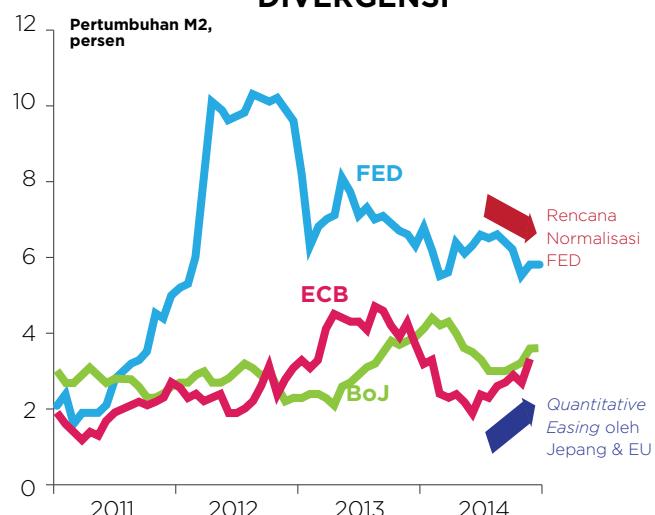
PEREKONOMIAN GLOBAL



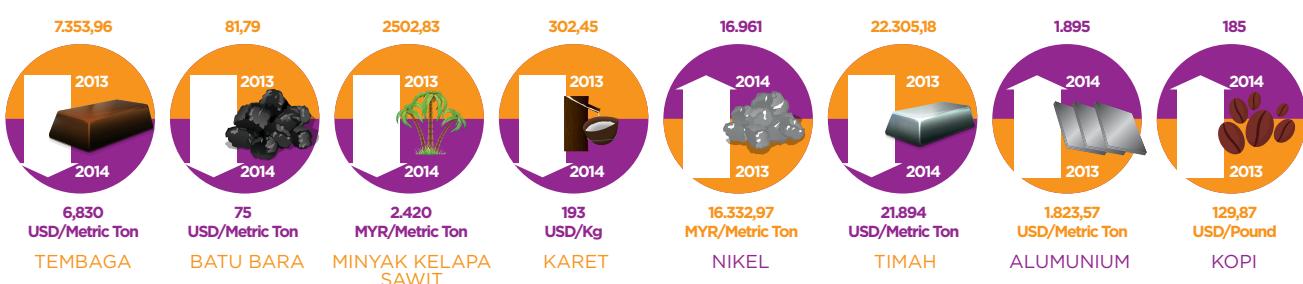
HARGA MINYAK MENURUN TAJAM



KEBIJAKAN MONETER DI NEGARA MAJU MENGALAMI DIVERGENSI



HARGA KOMODITAS INTERNASIONAL MASIH DALAM TREND MENURUN



PEREKONOMIAN GLOBAL

Proses *rebalancing* ekonomi dunia mewarnai dinamika perkembangan ekonomi negara maju dan *emerging markets* (EM) pada tahun 2014. Divergensi respons kebijakan yang ditempuh oleh negara maju dan EM berdampak pada pemulihan ekonomi global yang tidak merata dan berlangsung lebih lambat dari perkiraan semula. Negara maju menempuh kebijakan yang lebih akomodatif guna mendorong pemulihan ekonominya, sedangkan kebijakan negara EM cenderung lebih beragam dalam rangka memperkuat fundamental ekonominya. Respons kebijakan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2014 yang relatif stabil dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 3,3%, namun lebih rendah dibandingkan perkiraan awal tahun sekitar 3,7% (IMF). Perkembangan ekonomi dunia tersebut juga tidak terlepas dari kerja sama antarnegara melalui berbagai fora internasional. Kondisi ini terlihat dari fokus forum G-20 yang menekankan pentingnya kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sebagai respons terhadap pemulihan ekonomi global yang masih berjalan lambat dan tidak merata. Untuk mencapai hal tersebut, forum G-20 menyatakan perlunya reformasi struktural serta kerja sama untuk menggerakkan investasi.

Didukung oleh kebijakan yang lebih longgar, pemulihan ekonomi negara maju semakin kuat, meskipun dampaknya tidak seragam bagi semua negara. Secara keseluruhan, perkembangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi negara maju yang lebih tinggi menjadi 1,8% dari 1,4% pada tahun 2013. Kebijakan akomodatif, baik moneter maupun fiskal, yang ditempuh oleh Amerika Serikat (AS) mampu mendorong perbaikan ekonomi AS, bahkan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi global. Pemulihan ekonomi yang terus berlanjut tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi AS untuk menempuh kebijakan pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) secara bertahap sejak bulan Januari 2014 dan berakhir pada bulan Oktober 2014. Pemulihan ekonomi AS juga didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif berupa pelonggaran pemotongan anggaran. Sementara itu, dampak kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif terhadap perbaikan kinerja ekonomi kawasan Eropa dan Jepang masih belum signifikan. Penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang longgar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa, meskipun masih terbatas, menjadi 0,9% dibandingkan dengan kontraksi 0,4% pada tahun 2013.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jepang masih terus melambat meskipun pemerintah Jepang telah menempuh kebijakan moneter dan fiskal yang longgar. Reformasi struktural yang dicanangkan pada pertengahan tahun 2013 juga masih belum menunjukkan dampak yang signifikan.

Di tengah perbaikan ekonomi negara maju, ekonomi EM masih tumbuh dalam tren melambat. Dengan *stance* kebijakan yang lebih beragam, pada tahun 2014, ekonomi negara EM tumbuh melambat menjadi 4,4% dari 4,7%. Beberapa negara EM seperti Kolombia, Brazil dan Argentina menempuh kebijakan moneter ketat sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang masih lebar. Sedangkan Thailand, Korea Selatan, dan Meksiko menempuh kebijakan moneter yang longgar untuk mendorong perekonomiannya di tengah permintaan eksternal yang melambat. Upaya *rebalancing* untuk menggeser motor ekonomi Tiongkok dari investasi ke konsumsi berdampak pada perlambatan ekonomi Tiongkok menjadi 7,4% dari 7,7% pada tahun 2013. Upaya tersebut dilengkapi dengan kebijakan reformasi struktural di berbagai bidang dan kebijakan moneter yang akomodatif dalam bentuk pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dan penurunan suku bunga untuk menahan perlambatan yang lebih dalam. Sementara itu, reformasi struktural yang ditempuh oleh India ditengah penerapan kebijakan moneter ketat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi India menjadi 5,5% dari 4,7% pada tahun 2013. Kebijakan moneter ketat tersebut ditujukan untuk mengarahkan inflasi mencapai sasaran sekaligus untuk memperbaiki fundamental ekonomi menghadapi normalisasi suku bunga kebijakan *Fed Fund Rate* (FFR). Untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, India menempuh kebijakan reformasi struktural antara lain melalui program “*Make in India*”.

Pemulihan ekonomi global yang masih terbatas tersebut berdampak pada perkembangan harga komoditas global yang masih terus menurun, meskipun dengan laju yang semakin melambat. Selain dipengaruhi oleh permintaan yang rendah, penurunan harga komoditas non-energi juga dipengaruhi oleh beberapa kebijakan di Tiongkok, yang menyebabkan permintaan atas komoditas batu bara dan karet menurun. Selain itu, faktor cuaca (*el nino delay*) juga berpengaruh terhadap melimpahnya pasokan komoditas

khususnya minyak kelapa sawit. Komoditas minyak juga menunjukkan penurunan harga yang signifikan, terutama pada paruh kedua 2014. Setelah sempat meningkat sampai dengan pertengahan tahun, pada semester II minyak mencatat penurunan harga yang cukup besar dipengaruhi oleh pasokan minyak yang meningkat, terutama dalam bentuk *shale oil* dari AS. Faktor geopolitik dan permintaan yang menurun sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang belum kuat juga memengaruhi penurunan harga minyak. Secara keseluruhan, perkembangan harga tersebut mendorong inflasi global yang lebih rendah. Tingkat inflasi beberapa negara maju seperti AS, Eropa dan Jepang masih berada di bawah target inflasinya, bahkan Eropa berada dalam zona deflasi.

Di sisi pasar keuangan global, ketidakpastian atas kebijakan normalisasi the Fed dan divergensi kebijakan moneter negara maju menjadi faktor yang memengaruhi kerentanan pasar keuangan global. Kinerja ekonomi AS yang terus membaik mendorong the Fed untuk mulai mengurangi program *Quantitative Easing* sejak bulan Januari 2014. Namun demikian, pengumuman the Fed pada bulan Juli untuk menyelesaikan program *Quantitative Easing* pada bulan Oktober menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan global meningkat. Kondisi ini berdampak pada

aliran modal, terutama ke negara berkembang. Arus masuk modal asing ke Indonesia yang tinggi sampai dengan triwulan III 2014, cenderung menurun pada triwulan akhir 2014. Di samping itu, sebagai respons terhadap dampak kebijakan moneter longgar yang ditempuh negara maju, beberapa negara EM turut menempuh kebijakan moneter longgar untuk menjaga daya saing ekspor, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonominya.

Ke depan, perekonomian dunia diperkirakan tumbuh lebih tinggi, terutama didukung oleh perbaikan ekonomi negara maju, khususnya AS sebagai motor penggerak. Dengan prakiraan ini, diharapkan permintaan ekspor akan kembali meningkat sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, kebijakan QE oleh ECB dan Bank of Japan diperkirakan dapat mengimbangi sebagian pengaruh kebijakan the Fed terhadap pergerakan arus modal ke *emerging markets*, termasuk Indonesia. Dengan demikian aliran modal masuk ke Indonesia berpotensi relatif terbatas. Selain itu, divergensi kebijakan moneter di negara-negara maju tersebut dapat menimbulkan gejolak di pasar keuangan global yang selanjutnya dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan domestik.

Halaman ini
sengaja dikosongkan



Keterangan gambar:

Dinamika perekonomian global pada tahun 2014 diwarnai oleh divergensi dalam kebijakan moneter yang ditempuh oleh negara-negara maju. Kebijakan moneter di AS bersiap untuk mengetat sementara kebijakan moneter di Eropa dan Jepang masih cenderung akomodatif.



BAB 1

DINAMIKA PEREKONOMIAN GLOBAL

Proses *rebalancing* ekonomi global mewarnai dinamika perkembangan ekonomi negara maju dan *emerging markets*. Pemulihan ekonomi global berlangsung tidak merata dan lebih lambat dari perkiraan semula. Pertumbuhan ekonomi global yang masih terbatas menyebabkan tren penurunan harga komoditas nonmigas dan harga minyak terus berlanjut. Sementara itu, ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan divergensi kebijakan moneter negara maju memengaruhi kerentanan pasar keuangan global.

Ekonomi dunia pada tahun 2014 berada dalam proses *rebalancing*. Hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan tidak merata, tren penurunan harga komoditas yang terus berlanjut, serta ketidakpastian yang meningkat. Perbaikan ekonomi negara maju yang masih terbatas mendorong negara-negara tersebut melanjutkan kebijakan yang akomodatif. Sementara itu, *stance* kebijakan negara *emerging markets* (EM) cenderung beragam menyesuaikan dengan kondisi perekonomian di masing-masing negara dengan tujuan untuk memperkuat fundamental ekonominya.

Kinerja ekonomi dunia pada tahun 2014 tidak berjalan sesuai dengan optimisme di awal tahun. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2014 mencapai 3,3%, relatif sama dengan pertumbuhan tahun 2013, namun lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan pada awal tahun sebesar 3,7%.¹ Pertumbuhan ekonomi dunia yang semula diharapkan bersumber dari Amerika Serikat (AS), Eropa dan Jepang, dalam perkembangannya hanya bersumber dari AS sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Perkembangan tersebut berdampak pada kinerja ekonomi negara EM yang lebih lambat dari perkiraan. Selain itu, dampak perlambatan ekonomi Tiongkok terhadap kinerja ekonomi EM lainnya yang lebih dalam dibandingkan dengan perkiraan semula juga turut memengaruhi realisasi pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah.

Perlambatan ekonomi global, khususnya ekonomi EM, menyebabkan tren penurunan harga komoditas global masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 dan beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah Tiongkok menyebabkan permintaan terhadap komoditas global menurun. Di tengah pasokan komoditas global yang berlimpah, perkembangan tersebut berdampak pada terus berlanjutnya tren penurunan harga komoditas dunia². Pada tahun 2014, pertumbuhan harga komoditas nonmigas terkontraksi sebesar 4,3%, melanjutkan kontraksi pada tahun 2013 sebesar 8,0%. Rata-rata harga minyak pada tahun 2014 juga tercatat lebih rendah menjadi 99 dolar AS per barel dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 108,4 dolar AS per barel.

Sementara, ketidakpastian arah kebijakan bank sentral AS (the Fed) memengaruhi kerentanan pasar keuangan

1 IMF *World Economic Outlook* Januari 2014.

2 Selanjutnya, penurunan harga komoditas berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekspor dan akhirnya pada penurunan pertumbuhan ekonomi EM penghasil komoditas.

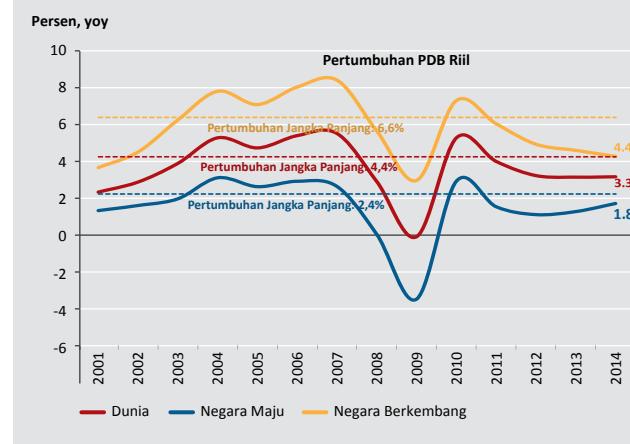
dunia.³ Pergeseran arus modal dunia terutama dipengaruhi oleh arah kebijakan the Fed terkait pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) AS secara bertahap sejak Januari 2014 dan berakhir pada Oktober 2014, serta rencana kenaikan suku bunga kebijakan AS pada tahun 2015.⁴

Ke depan, tekanan arus modal keluar dari EM diperkirakan meningkat sejalan dengan rencana normalisasi kebijakan moneter AS (rencana kenaikan suku bunga *Fed Fund*) yang diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun 2015. Namun, sebagian dampak normalisasi tersebut dapat diimbangi oleh berlanjutnya kebijakan QE yang ditempuh oleh Eropa dan Jepang sehingga likuiditas global diperkirakan masih berlimpah.

1.1. Pertumbuhan Ekonomi Global

Sebagaimana tahun 2013, lanskap ekonomi global tahun 2014 masih ditandai dengan perlambatan ekonomi EM khususnya Tiongkok, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju khususnya AS menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang konsisten (Grafik 1.1). Pada tahun 2014, pemulihan ekonomi global berlanjut meskipun berjalan tidak merata. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2014 tercatat sebesar 3,3%, relatif sama dengan pertumbuhan tahun 2013. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan pada awal tahun. Pada awal tahun 2014, *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan ekonomi dunia tahun 2014 akan tumbuh 3,7% ditopang oleh perbaikan kinerja ekonomi

Grafik 1.1. Lanskap Ekonomi Global



Sumber: IMF

3 sebagai respons terhadap perbaikan ekonomi AS.

4 Diumumkan pada FOMC Desember 2013.

negara maju khususnya AS, Jepang dan Eropa (Grafik 1.2). Namun, beberapa perkembangan global yang tidak sesuai harapan mengakibatkan realisasi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2014 lebih rendah yaitu 3,3%. Beberapa perkembangan yang kurang menguntungkan tersebut antara lain dampak perlambatan ekonomi Tiongkok terhadap negara EM lainnya yang lebih besar, ekonomi Jepang yang justru melambat, pemulihan ekonomi AS yang sempat terhambat cuaca dingin ekstrim, dan pemulihan ekonomi Eropa yang berjalan lambat.

Perkembangan Ekonomi Negara Maju

Ekonomi negara maju tumbuh 1,8% pada tahun 2014, meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,4% ditopang oleh pertumbuhan ekonomi AS dan Eropa yang meningkat (Tabel 1.1). Ekonomi AS tumbuh meningkat sebesar 2,4% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 2,2% dan berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara itu, ekonomi Eropa tumbuh ekspansif 0,9% dibandingkan dengan kontraksi 0,4% pada tahun 2013. Di lain pihak, ekonomi Jepang tumbuh melambat menjadi 0,0% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,6%.

Pertumbuhan ekonomi AS yang ekspansif ditopang oleh kebijakan moneter yang sangat akomodatif dan hambatan fiskal yang menurun. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi AS tersebut masih di bawah rata-rata historis jangka panjangnya dan masih di bawah PDB potensialnya (Grafik 1.3). Pada triwulan I 2014, pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2014 sempat terhambat cuaca dingin

Tabel 1.1. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Global

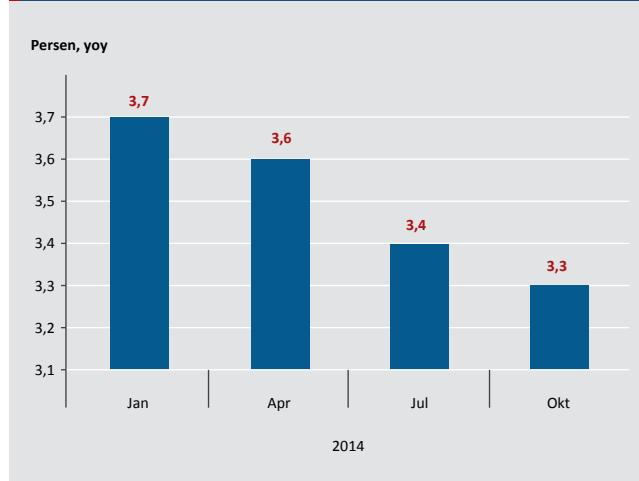
	2013	2014	Bobot WEO Okt-14	
			2013	2014
	Dunia	3,3	100,0	100,0
Negara Maju	1,4	1,8	43,6	43,0
Jepang	1,6	0,0	4,6	4,5
Amerika Serikat	2,2	2,4	16,5	16,3
Kawasan Eropa	-0,4	0,9	11,7	12,0
Negara Berkembang	4,7	4,4	56,4	57,0
Tiongkok	7,7	7,4	15,8	16,5
India	4,7	5,6	6,6	6,8

Sumber: IMF, diolah

ekstrim, namun kemudian mengalami *rebound* didukung oleh permintaan domestik yang menguat. Perbaikan permintaan domestik di AS terutama ditopang oleh konsumsi dan investasi nonresidensial yang berada dalam tren meningkat meski secara terbatas (Grafik 1.4). Di sisi konsumsi, beberapa indikator yang membaik antara lain pertumbuhan pengeluaran personal (*personal expenditure*), tingkat keyakinan konsumen (*consumer confidence*), serta tingkat penjualan ritel dan indeks pesanan baru domestik (*new domestic orders*).

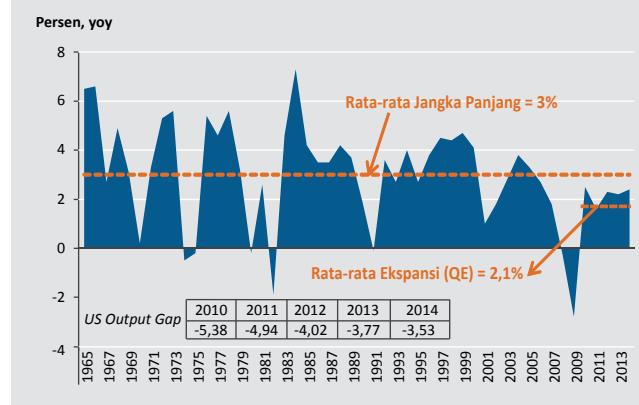
Permintaan domestik AS yang meningkat juga didukung oleh perbaikan kondisi tenaga kerja. Tren penurunan tingkat pengangguran terus berlanjut dari 6,7% pada akhir tahun 2013 menjadi 5,6% pada akhir tahun 2014, sehingga turut mendukung peningkatan konsumsi. Tingkat pengangguran yang menurun dipengaruhi

Grafik 1.2. Dinamika Proyeksi PDB Dunia



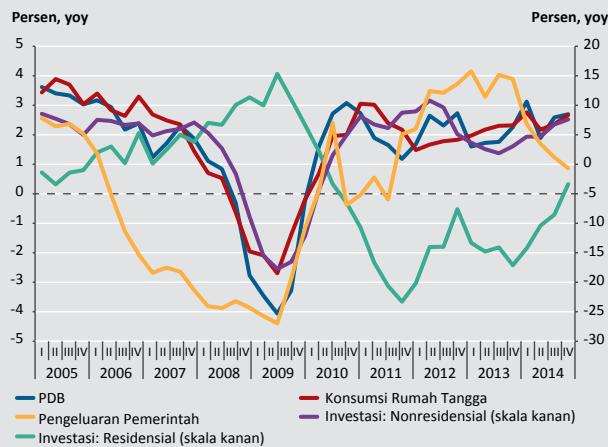
Sumber: IMF

Grafik 1.3. Pertumbuhan Ekonomi AS



Sumber: IMF, WEO database Oktober 2014

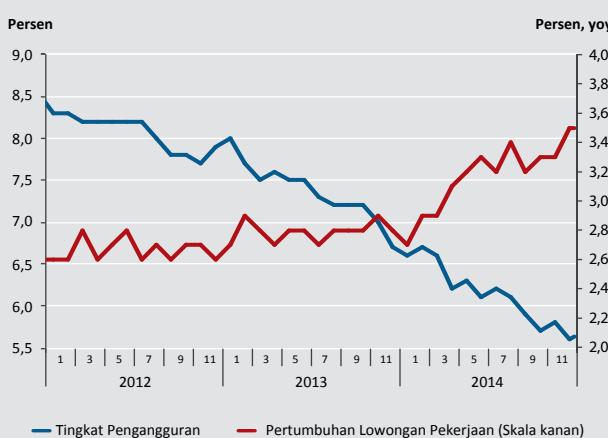
Grafik 1.4. Dekomposisi PDB AS



Sumber: Bloomberg, diolah

oleh jumlah lowongan pekerjaan (*job openings*) yang meningkat di tengah laju pemutusan hubungan kerja karyawan (*job layoffs*) yang menurun (Grafik 1.5). Selain itu, pekerja paruh waktu karena alasan ekonomi (*part-time workers for economic reasons*) berada dalam tren yang menurun.⁵ Pada sisi investasi, perbaikan ekonomi terutama bersumber dari pertumbuhan investasi nonresidensial. Kenaikan investasi nonresidensial terlihat dari investasi swasta domestik yang meningkat, sejalan dengan permintaan domestik yang menguat. Hal ini sejalan dengan perkembangan indikator terkini, indeks produksi, indeks manufaktur *Purchasing Manager's Index* (PMI), serta utilisasi kapasitas berada dalam tren yang

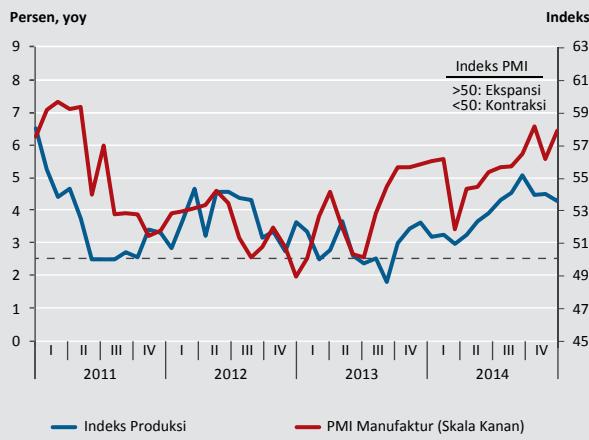
Grafik 1.5. Indikator Tenaga Kerja AS



Sumber: Bloomberg, diolah

⁵ *Part-time workers for economic reasons* (% dari total angkatan kerja) adalah jumlah pekerja yang bila lowongan kerja *full-time* tersedia, lebih memilih untuk bekerja *full-time* dibandingkan dengan bekerja paruh waktu.

Grafik 1.6. Indikator Produksi AS



Sumber: Bloomberg, diolah

meningkat (Grafik 1.6). Meskipun demikian, pertumbuhan investasi korporasi yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan profitnya menunjukkan ekspansi perusahaan masih terbatas. Sementara itu, perkembangan investasi residensial juga masih lemah. Hal tersebut terlihat pada penjualan rumah dan perijinan bangunan (*building permits*) serta indikator *housing starts* menunjukkan perbaikan yang terbatas.

Perbaikan ekonomi AS juga didukung oleh kebijakan fiskal pada tahun 2014 yang lebih akomodatif. Penerapan kebijakan *sequester* pada tahun 2013 telah menyebabkan pelemahan konsumsi rumah tangga dan keyakinan konsumen AS.⁶ Untuk menopang pemulihan ekonomi AS tahun 2014 dan 2015, *Bipartisan Budget Act of 2013* melonggar pemotongan anggaran menjadi sebesar 63 miliar dolar AS, berlaku untuk tahun anggaran 2014 dan 2015.⁷ Kesepakatan ini berhasil melonggar kebijakan fiskal ketat Pemerintah AS (*fiscal drag*) menjadi sekitar 0,5% dari PDB AS dibandingkan dengan tahun 2013 yang sekitar 2% (Grafik 1.7).⁸

Di sisi eksternal, pertumbuhan ekspor AS tahun 2014 relatif stagnan dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, tren penguatan dolar AS serta penurunan harga minyak dan komoditas lain yang diekspor oleh AS.⁹ Sementara itu,

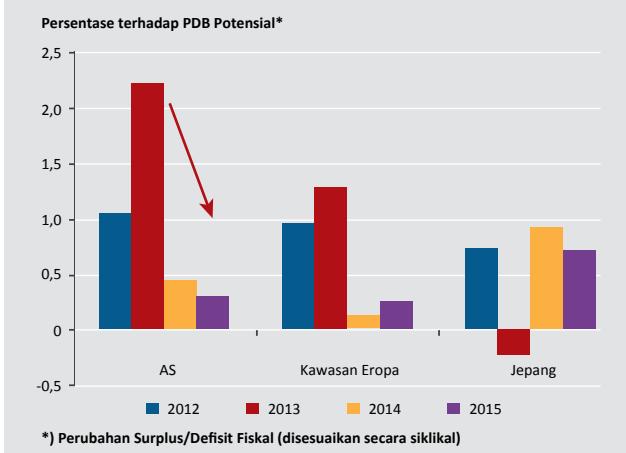
⁶ Kebijakan *sequester* adalah program pemotongan belanja Pemerintah AS sebesar 85 miliar dolar AS per tahun untuk menurunkan rasio utang Pemerintah/PDB menjadi 60% pada tahun 2021.

⁷ Kesepakatan legislatif AS.

⁸ IMF *Fiscal Monitor*, April 2014.

⁹ Memengaruhi dari nilai ekspor yang menurun.

Grafik 1.7. Tekanan Fiskal pada Negara Maju



Sumber: IMF Fiscal Monitor, April 2014

pertumbuhan impor meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sejalan dengan permintaan domestik yang meningkat dan tren penguatan dolar AS.

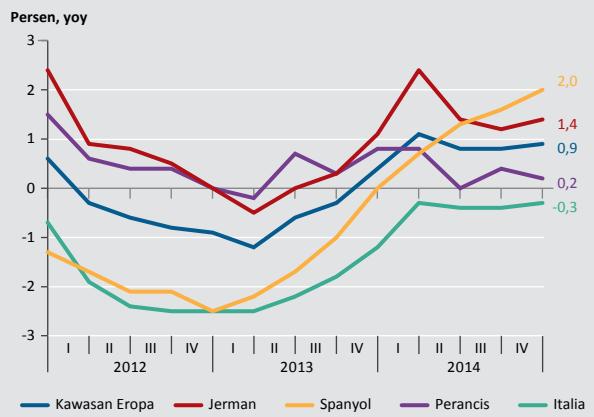
Di tengah proses pemulihan yang terus berlangsung, ekonomi AS masih memiliki beberapa permasalahan struktural. Pertama, stok modal (*capital stock*) yang menurun, tercermin pada indeks kualitas infrastruktur untuk periode 2013-2014 yang lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum krisis (2006-2007).¹⁰ Kedua, sektor tenaga kerja AS masih diwarnai oleh tren penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja (*job participation rate*). Hal tersebut disebabkan oleh tren perlambatan pertumbuhan penduduk. Selain itu, tren penurunan produktivitas dan penurunan kualitas tenaga kerja berdampak pada pertumbuhan upah yang terbatas, sehingga menahan peningkatan konsumsi masyarakat. Ketiga, penurunan produktivitas input ekonomi (*Total Factor Production*) yang disebabkan oleh pertumbuhan investasi yang lebih rendah.¹¹ Pada gilirannya, kondisi tersebut berpengaruh terhadap kondisi infrastruktur yang lebih usang sehingga menurunkan produktivitas ekonomi. Penurunan produktivitas input ekonomi juga dipengaruhi oleh produktivitas sektor jasa yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor manufaktur. Kondisi tersebut terjadi di tengah tren pergeseran komposisi output dari sektor manufaktur (*capital intensive*) menuju sektor jasa (*less capital intensive*). Selain itu, faktor eksogen yaitu perlambatan pertumbuhan penduduk dan penurunan kecepatan inovasi teknologi, serta berkurangnya

fleksibilitas tenaga kerja di AS juga menjadi faktor di balik produktivitas input ekonomi yang menurun.¹²

Perekonomian AS yang membaik turut mendukung proses pemulihan ekonomi kawasan Eropa, meskipun belum tumbuh merata (Grafik 1.8). Pada tahun 2014, ekonomi kawasan Eropa mampu mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,9% dibandingkan dengan tahun 2013 yang masih mencatat kontraksi 0,4%. Pemulihan ekonomi kawasan Eropa terutama didukung oleh respons kebijakan moneter yang akomodatif, kebijakan makroprudensial, *forward guidance* dan *quantitative easing* yang dilakukan oleh otoritas moneter kawasan Eropa (*European Central Bank, ECB*). Kebijakan tersebut juga didukung oleh kebijakan fiskal yang lebih akomodatif, tercermin pada *fiscal drag* yang turun cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2013 (Grafik 1.7). Meski demikian, pemulihan ekonomi kawasan Eropa pada tahun 2014 masih berjalan lambat dan di bawah rata-rata pertumbuhan jangka panjangnya sebesar 2%. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan konsumsi yang tertahan dan pertumbuhan investasi yang terbatas di tengah perkembangan eksternal yang kurang kondusif.

Pertumbuhan konsumsi di kawasan Eropa membaik meski secara terbatas. Pertumbuhan konsumsi tertahan oleh tingkat pengangguran yang masih tinggi sebesar 11,4% selain pertumbuhan gaji di kawasan Eropa yang masih terbatas, kecuali pertumbuhan gaji di Jerman yang meningkat. Pertumbuhan investasi yang moderat juga dipengaruhi oleh rasio utang terhadap PDB (*debt-to-GDP ratio*) yang masih besar. Di sisi eksternal, perbaikan ekspor di kawasan Eropa berlangsung secara moderat sejalan

Grafik 1.8. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Eropa



Sumber: Bloomberg, diolah

12 Berkurangnya fleksibilitas *movement* tenaga kerja antar perusahaan maupun keluar masuk angkatan kerja.

10 *Global Competitiveness Index*, World Economic Forum dan Article IV, IMF, July 2014.

11 84th BIS Annual Report, June 2014.

dengan pemulihan ekonomi global yang masih lambat. Namun demikian, pertumbuhan ekspor pada semester II cenderung menurun akibat permasalahan geopolitik di Ukraina dan Rusia serta pertumbuhan negara EM yang melambat. Selain itu, pemulihan ekonomi kawasan Eropa pada tahun 2014 masih rentan terkait dengan tren penurunan inflasi dan menyentuh angka negatif pada akhir tahun 2014. Tren penurunan inflasi di kawasan Eropa disebabkan oleh permintaan domestik riil yang belum kuat, permintaan eksternal yang masih lemah, serta harga minyak yang menurun.

Pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 2014 melambat menjadi 0,0% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,6%. Pada triwulan I, ekonomi Jepang masih berada dalam tren meningkat dan mampu tumbuh 2,4%. Namun, memasuki triwulan II sampai dengan akhir tahun 2014, ekonomi Jepang mengalami pembalikan yaitu memasuki zona resesi atau mencatat kontraksi masing-masing sebesar 0,3%, 1,4% dan 0,8% (Grafik 1.9). Perlambatan ekonomi Jepang terutama disebabkan oleh konsumsi yang menurun akibat kenaikan pajak penjualan dari 5% menjadi 8% pada bulan April 2014, sebagai bagian dari rencana jangka panjang konsolidasi fiskal. Selain itu, nilai tukar yen yang melemah akibat stimulus moneter yang dilaksanakan oleh *Bank of Japan* (BoJ) sejak tahun 2013 berdampak pada harga barang impor yang meningkat, sehingga menambah tekanan terhadap pertumbuhan konsumsi masyarakat.¹³ Penurunan tingkat keyakinan konsumen dan bisnis di Jepang terhadap kondisi ekonomi ke depan turut menahan konsumsi masyarakat.

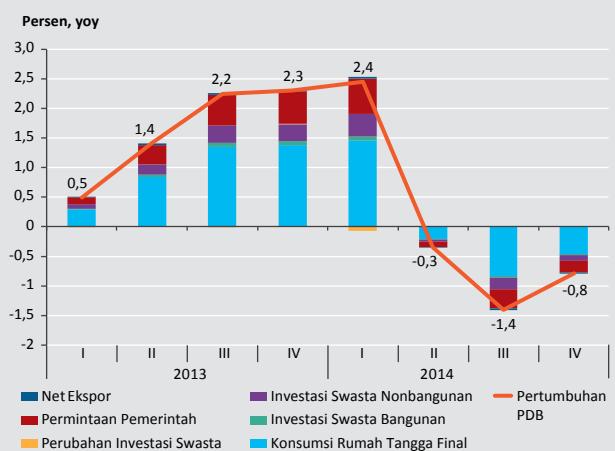
Perlambatan ekonomi Jepang juga dipengaruhi oleh tingkat investasi swasta yang menurun sejalan dengan ekspektasi konsumsi masyarakat ke depan yang rendah. Sementara itu, tingkat persediaan juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan konsumsi, mengingat proses produksi pada perusahaan Jepang sangat elastis terhadap perubahan permintaan.¹⁴

Fiscal drag pada tahun 2014 yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 juga memengaruhi perlambatan ekonomi Jepang (Grafik 1.7). Meskipun pada tahun anggaran 2014 (April 2014 - April 2015) Pemerintah Jepang memberikan tambahan stimulus fiskal sebesar 5 triliun yen atau setara dengan 51 miliar dolar AS (1%

¹³ *Bank of Japan* (BOJ) melakukan stimulus moneter melalui pembelian aset, sehingga menambah jumlah uang beredar dan berdampak pada yen yang melemah.

¹⁴ Meminimalkan persediaan dalam proses produksi atau *lean manufacturing*.

Grafik 1.9. Pertumbuhan Ekonomi Jepang



Sumber: Bloomberg, diolah

dari PDB), namun dampak *fiscal drag* dari kenaikan pajak penjualan pada bulan April 2014 terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang masih lebih dominan.¹⁵ Pada sisi lain, pertumbuhan ekspor sempat menurun pada semester I 2014 dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi EM dan pemulihan ekonomi negara maju yang masih terbatas. Selain itu, perusahaan manufaktur Jepang banyak yang memindahkan produksinya ke negara EM karena biaya operasional yang lebih rendah. Namun, pada semester II 2014, pertumbuhan ekspor Jepang mengalami perbaikan dipengaruhi oleh depresiasi yen yang semakin dalam dan penurunan harga minyak. Pertumbuhan impor juga berada dalam tren menurun, dipengaruhi oleh permintaan domestik dan permintaan eksternal, khususnya EM, yang menurun serta harga minyak yang lebih rendah.^{16 17}

Permasalahan struktural, khususnya terkait demografi penduduk dan potensi stagnasi, membayangi kinerja ekonomi Jepang. Pertumbuhan penduduk Jepang yang negatif dan tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja yang rendah membebani pertumbuhan *output*. Selain itu, kondisi tenaga kerja Jepang yang kurang efisien menjadi salah satu faktor di balik pertumbuhan gaji di Jepang yang terbatas. Kondisi demografi penduduk yang menua membuat masyarakat Jepang harus lebih banyak melakukan *saving* dibandingkan dengan *spending*. Hal ini menghambat kenaikan pertumbuhan ekonomi Jepang.

¹⁵ Berupa perbaikan infrastruktur, pembiayaan paska gempa bumi dan bantuan langsung pada keluarga berpendapatan rendah.

¹⁶ Permintaan domestik menurun dipengaruhi oleh semakin mahalnya barang impor karena depresiasi yen.

¹⁷ Barang input produksi untuk memenuhi permintaan ekspor.

Perkembangan Ekonomi Negara *Emerging Markets*

Pertumbuhan ekonomi negara EM pada tahun 2014 melambat menjadi 4,4% dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 4,7%. Perlambatan ekonomi negara EM terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat. Beberapa negara EM lainnya seperti Rusia, Brasil, Peru dan Cile juga berada dalam tren yang melambat. Dinamika ekonomi global dan permasalahan struktural domestik merupakan faktor-faktor yang memengaruhi perlambatan ekonomi EM. Pada satu sisi, tren penurunan harga komoditas global memberikan tekanan kepada sisi ekspor EM, terutama pada negara-negara dengan ekspor berbasis komoditas. Selain itu, arah kebijakan moneter AS yang melakukan *tapering off QE* selama tahun 2014 dan prakiraan kenaikan suku bunga the Fed pada pertengahan tahun 2015 akan memengaruhi pembiayaan ekonomi negara EM. Pada sisi lain, permasalahan struktural domestik menyebabkan kapasitas perekonomian dalam memenuhi permintaan domestik maupun eksternal menjadi tertahan. Hal ini berdampak pada impor yang meningkat di tengah ekspor yang tertekan, sehingga berujung pada defisit transaksi berjalan yang meningkat di beberapa negara.

Ekonomi Tiongkok pada tahun 2014 tumbuh melambat menjadi 7,4% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 7,7%. Perlambatan ekonomi Tiongkok tersebut sejalan dengan kebijakan *rebalancing* ekonomi Tiongkok, yaitu kebijakan untuk menggeser secara bertahap mesin perekonomian dari semula bertumpu pada investasi (*investment-led growth*) menuju model ekonomi yang lebih ditopang oleh konsumsi (*consumption-led growth*) untuk pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Perlambatan ekonomi Tiongkok pada tahun 2014 dipengaruhi oleh pertumbuhan investasi yang menurun, khususnya pada sektor perumahan dan infrastruktur (Grafik 1.10).¹⁸ Hal tersebut terlihat pada pertumbuhan investasi aset tetap, indeks produksi, impor barang modal dan sektor perumahan di Tiongkok yang masih lemah.

Pertumbuhan konsumsi masih belum cukup kuat untuk mengimbangi dampak dari pertumbuhan investasi yang melambat. Pertumbuhan penjualan ritel dan tingkat keyakinan konsumen masih dalam tren menurun dipengaruhi oleh risiko sektor perumahan di Tiongkok dan pemulihan ekonomi global yang lambat. Tren penurunan harga properti di Tiongkok semakin dalam dibandingkan

Grafik 1.10. Indikator Ekonomi Tiongkok



Sumber: Bloomberg, diolah

dengan tahun 2013, sejalan dengan pertumbuhan indikator *housing starts* dan penjualan rumah yang masih terkontraksi. Selain itu, komitmen otoritas Tiongkok untuk mendukung “green economy”, berdasarkan kesepakatan APEC Summit pada bulan Oktober 2014, telah menurunkan *output* produksi baja.¹⁹ Pada sisi eksternal, pertumbuhan ekspor Tiongkok pada tahun 2014 membaik meskipun masih terbatas sejalan dengan pemulihan ekonomi negara maju yang belum kuat. Menyikapi berbagai perkembangan tersebut, otoritas Tiongkok menempuh berbagai kebijakan untuk menahan perlambatan ekonomi Tiongkok.²⁰

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih menghadapi risiko sektor perumahan yang berkaitan dengan perbankan bayangan (*shadow banking*). *Shadow banking* di Tiongkok semakin marak sejak pemberlakuan kebijakan pengetatan kredit pada tahun 2010 untuk meredam gelembung properti.²¹ Pada tahun 2014, otoritas Tiongkok telah berhasil menurunkan pembiayaan melalui *shadow banking* dengan mengeluarkan berbagai kebijakan makroprudensial. Namun demikian, di sisi lain, kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap kinerja sektor perumahan yang juga banyak dibiayai oleh *shadow banking*. Hal ini menimbulkan risiko ke bawah terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Kinerja ekonomi India pada tahun 2014 membaik, tercemin pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat

19 Proses produksi baja berdampak buruk terhadap lingkungan.

20 Lihat Bab 2. Respons Kebijakan Ekonomi Global

21 Gelembung properti merupakan dampak dari stimulus fiskal besar-besaran di sektor infrastruktur dan properti, dalam rangka merespons perlambatan ekonomi akibat krisis keuangan global tahun 2008.

18 Dampak lanjutan dari kebijakan pengetatan kredit yang dilakukan sejak tahun 2010 untuk meredam gelembung harga properti.

menjadi 5,6% dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 4,7%. Ekspansi ekonomi India didukung oleh konsumsi dan investasi yang meningkat. Sentimen positif terhadap kondisi ekonomi ke depan paska terpilihnya Pemerintahan yang baru mampu mendorong peningkatan konsumsi. Hal tersebut tercermin pada pertumbuhan penjualan mobil dan konsumsi swasta yang meningkat. Tren penurunan inflasi akibat harga minyak dunia²² dan harga emas²³ yang menurun berdampak pada daya beli masyarakat untuk barang lainnya yang menguat. Sementara itu, pertumbuhan investasi meningkat sejalan dengan agenda reformasi struktural terutama untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur. Peningkatan investasi tercermin pada indeks infrastruktur, indeks produksi, indeks sektoral khususnya listrik, produksi batu bara dan pertambangan serta pertumbuhan angkutan udara (*air cargo*) dan angkutan darat (*railway freight*) yang lebih tinggi.

Perlambatan ekonomi Tiongkok dan pemulihan ekonomi negara maju yang berjalan lambat berdampak pada pertumbuhan ekspor India yang menurun. Sementara, pertumbuhan impor sempat meningkat sejalan dengan konsumsi yang meningkat meskipun pada akhir 2014 kembali menurun dipengaruhi oleh penurunan harga minyak. Pada sisi fiskal, konsolidasi fiskal untuk mengurangi utang pemerintah terus berlanjut didukung oleh penerimaan pajak yang meningkat sejalan dengan aktivitas ekonomi yang menggeliat dan reformasi pajak, serta liberalisasi harga BBM.

1.2. Harga Komoditas Global dan Inflasi Global

Tren penurunan harga komoditas global masih berlanjut sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang belum kuat. Harga komoditas non-energi pada tahun 2014 terkontraksi sebesar 4,3%, melanjutkan kontraksi pada tahun 2013 sebesar 8,0% terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi EM khususnya Tiongkok yang melambat. Hal tersebut terkonfirmasi oleh korelasi yang kuat antara pertumbuhan harga komoditas non-energi dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mencapai 0,9 (Grafik 1.11). Sementara itu, pertumbuhan harga

²² Pemerintah India pada tahun 2010 telah menetapkan subsidi harga BBM sejalan dengan harga minyak dunia yang meningkat. Pada tahun 2013 dan 2014 Pemerintah India telah meliberalisasi harga BBM. India merupakan negara net importir minyak dunia.

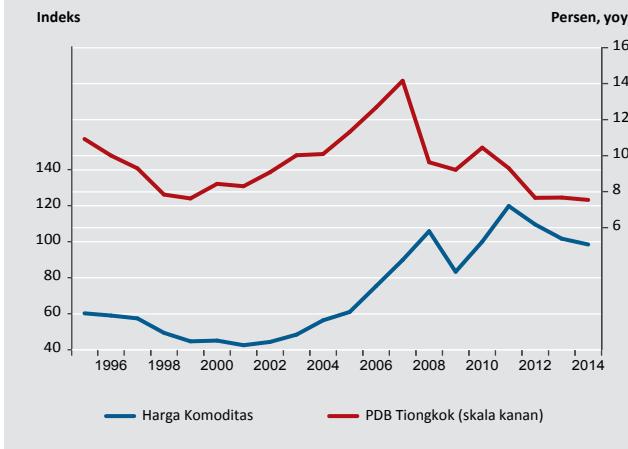
²³ Pembelian emas India mencapai 8% dari total konsumsi India.

komoditas non-energi pada tahun 2014 telah berada di bawah rata-rata historisnya (Grafik 1.12).

Pertumbuhan harga komoditas diperkirakan mulai memasuki *downward trend* dari *super cycle*-nya. Berdasarkan data historis, periode *upswing* harga komoditas mulai terjadi pada tahun 1998-2000 dan berlanjut sampai dengan tahun 2013, yaitu selama 13-15 tahun (Grafik 1.13). Pergerakan *super cycle* harga komoditas non-energi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan PDB dunia, harga komoditas pertanian (terutama hasil pertanian tropis), dan *contemporaneous effect* dari pertumbuhan ekonomi global terhadap harga komoditas global.²⁴ ²⁵

Harga batu bara dan karet pada tahun 2014 mencatat penurunan terbesar. Selain karena permintaan yang menurun, terutama terkait perlambatan ekonomi Tiongkok, pelemahan tersebut juga disebabkan oleh berbagai faktor lainnya. Penegakan hukum di Tiongkok terkait finansialisasi komoditas sebagai agunan berdampak pada penurunan permintaan dari semula “bubble demand” menjadi “real demand”.²⁶ Harga batu bara yang menurun juga disebabkan oleh komitmen otoritas Tiongkok yang memutuskan untuk mengurangi konsumsi batu bara terkait dengan polusi.²⁷ Harga karet

Grafik 1.11. Harga Komoditas Non-energi dan Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok



Sumber: Bloomberg, diolah

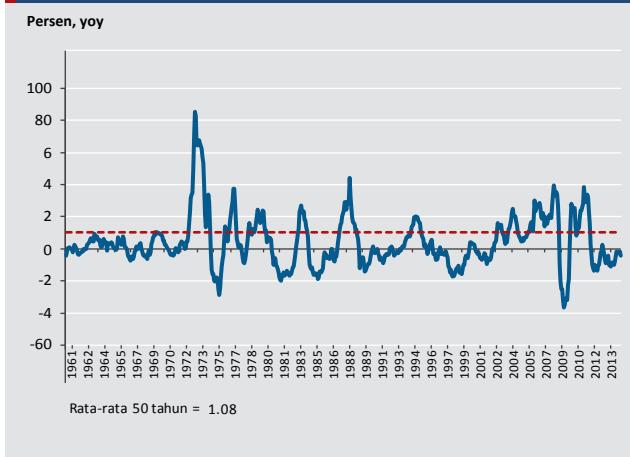
²⁴ Erten dan Ocampo (2012).

²⁵ *Contemporaneous effect* adalah akibat yang terjadi seketika.

²⁶ Investigasi dan inspeksi yang dilakukan di pelabuhan *Qingdao* karena banyaknya importir yang menggunakan agunan komoditas (terutama tembaga dan barang metal lainnya) untuk mendapatkan beberapa pendanaan sekaligus (*multiple collateral*).

²⁷ Otoritas Tiongkok berencana untuk terus mengurangi penggunaan batu bara hingga kurang dari 62% dari total komposisi energi yang digunakan (tahun 2014 sebesar 64,2%).

Grafik 1.12. Pertumbuhan Historis Harga Komoditas Nonminyak

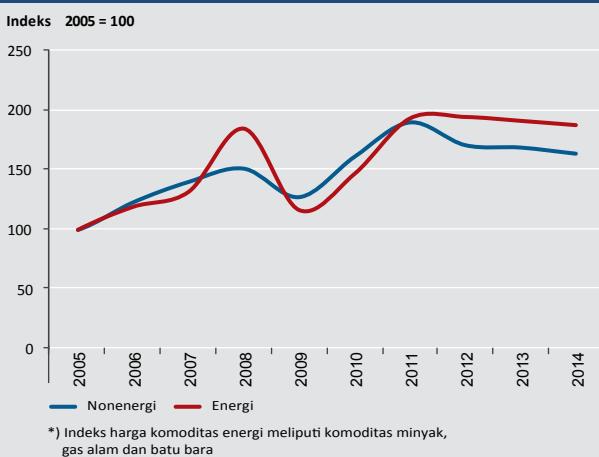


Sumber: World Bank, diolah

juga melemah sejalan dengan harga minyak dunia yang menurun, mengingat minyak berfungsi sebagai barang substitusi utama dari komoditas karet.²⁸ Pelembahan industri otomotif di Tiongkok dan Jepang serta kebijakan pembatasan kandungan karet alam (*natural rubber*) di Tiongkok terkait permasalahan lingkungan juga menambah tekanan pada harga karet. Sementara itu, harga minyak kelapa sawit tumbuh terbatas pada tahun 2014. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga kedelai yang menurun sebagai barang substitusi dari minyak kelapa sawit (kedelai diproduksi untuk menghasilkan *sunflower oil*), serta pasokan kelapa sawit yang meningkat setelah sebelumnya tertunda karena pengaruh cuaca El Nino. Selain itu, kebijakan Thailand, Malaysia dan Indonesia yang mengurangi pajak ekspor kelapa sawit juga berdampak pada pasokan minyak kelapa sawit yang meningkat.

Harga minyak dunia pada tahun 2014 turun 10,5% dibandingkan dengan tahun 2013. Penurunan ini antara lain tercermin pada pergerakan harga minyak Brent (Grafik 1.14). Realisasi harga minyak minas turun menjadi 99 dolar AS per barel dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 108,4 dolar AS per barel. Pada semester I 2014, harga minyak dunia masih berada dalam tren yang meningkat dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akibat cuaca dingin ekstrim yang melanda AS dan pasokan yang menurun akibat tensi geopolitik di Rusia dan Ukraina serta Timur Tengah yang meningkat.²⁹ Sejak awal semester II tahun 2014, harga minyak dunia mulai menurun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, permintaan terhadap minyak dunia menurun terutama

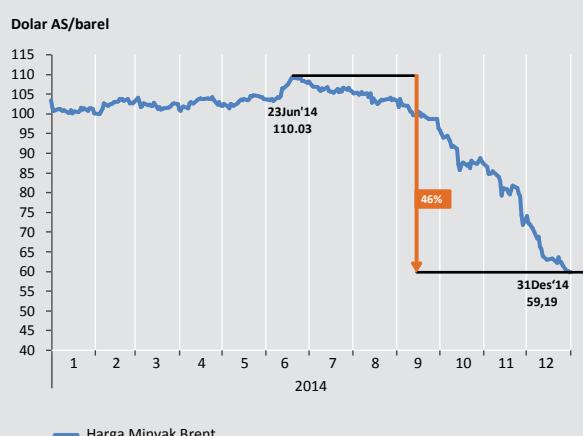
Grafik 1.13. Perkembangan Indeks Harga Komoditas Energi dan Non-energi



Sumber: IMF

akibat perlambatan ekonomi Tiongkok dan Jepang, serta pemulihan ekonomi kawasan Eropa yang berjalan lambat. Kedua, pasokan minyak dunia meningkat dipengaruhi oleh produksi *shale oil* di AS yang meningkat dan kebijakan pelonggaran peraturan ekspor minyak oleh otoritas AS serta menurunnya tensi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.³⁰ Penurunan harga minyak dunia semakin tajam setelah Organisasi Negara-Negara Eksportir Minyak (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*, OPEC) pada bulan November 2014 memutuskan untuk mempertahankan level produksinya dalam rangka menjaga pangsa pasar sebagai produsen minyak dunia.

Grafik 1.14. Perkembangan Harga Minyak



Sumber: Bloomberg, diolah

28 Karet sintetis terbuat dari minyak.

29 Tensi geopolitik di Irak terkait ISIS dan tensi geopolitik di Libya.

30 Khususnya Libya.

Pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan harga komoditas yang menurun berkontribusi pada tekanan inflasi global tahun 2014 yang menurun. Tingkat inflasi global tahun 2014 hanya mencapai 2,9%, menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 3,1%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh inflasi negara-negara maju yang rendah sebesar 1,4%, sementara inflasi negara berkembang tercatat 4,3%. Tingkat inflasi beberapa negara maju seperti AS, Eropa dan Jepang masih berada di bawah target inflasinya, bahkan Eropa pada akhir 2014 telah memasuki zona deflasi. Sementara itu, tekanan inflasi di negara berkembang juga menurun sejalan dengan penurunan harga komoditas, khususnya harga minyak.

1.3. Pasar Keuangan Global

Normalisasi kebijakan moneter AS sebagai respons terhadap proses pemulihan ekonomi AS berpengaruh terhadap kondisi pasar keuangan global pada tahun 2014. Arah kebijakan moneter AS yang mulai bersiap untuk melakukan normalisasi kebijakan meski tetap akomodatif, memicu peralihan arus modal dunia dari EM, termasuk Indonesia, menuju negara maju khususnya AS. Proses peralihan arus modal dunia ini menimbulkan ketidakpastian pada pasar keuangan global di tengah likuiditas global yang masih berlimpah sejalan dengan masih berlanjutnya kebijakan *Quantitative Easing* yang ditempuh Eropa dan Jepang.³¹³²

Risiko pasar keuangan global meningkat sejak pengumuman pelaksanaan *tapering off* pada rapat komite otoritas moneter Amerika Serikat (*Federal Reserve Open Market Committee*, FOMC) pada Desember 2013. Namun demikian, cuaca dingin ekstrim (*big freeze*) yang membekukan sebagian aktivitas ekonomi AS selama triwulan I 2014 memicu ekspektasi pasar terhadap penundaan kenaikan suku bunga kebijakan *Fed Fund Rate* atau FFR. Ekspektasi tersebut berdampak pada penurunan risiko arus modal dunia untuk keluar dari EM. Perkembangan tersebut tercermin pada indikator EM *Global index* dan *USD index* yang menurun selama periode Januari-Juli 2014 (Grafik 1.15). Namun,

³¹ AS melakukan program pengurangan stimulus moneter (*Tapering off Quantitative Easing III*) secara bertahap sejak Januari 2014 dan menyelesaikan program tersebut pada Oktober 2014, serta rencana kenaikan suku bunga kebijakan AS pada tahun 2015.

³² Preferensi risiko investor dunia bergeser dari yang semula bersifat *risk taker* demi mengejar *high yield asset* menjadi *risk averse* yang mencari *safe heaven asset*.

pertumbuhan ekonomi AS yang mengalami *rebound* sejak triwulan II 2014 menjadi dasar bagi the Fed, dalam *minutes FOMC* bulan Juni 2014 (riles Juli 2014), untuk mengumumkan rencana berakhirnya program stimulus moneter (*taper ends*) pada bulan Oktober 2014. Risiko pasar keuangan global sejak akhir Juli 2014 kembali meningkat paska pernyataan resmi the Fed tersebut dan terus berlanjut sejalan dengan pelaksanaan *taper ends* pada bulan Oktober 2014.³³ Krisis di Rusia pada bulan Desember 2014 yang bersamaan dengan peningkatan permintaan global terhadap mata uang dolar AS di akhir tahun turut memengaruhi dinamika pasar keuangan global.

Pernyataan (*statement*) FOMC Desember 2014 oleh the Fed berhasil menenangkan pasar terkait kekhawatiran pasar akan kenaikan suku bunga kebijakan AS yang lebih cepat dari perkiraan semula (*FFR early hike*). Dengan perkembangan tersebut, sebagian besar pelaku pasar memperkirakan kenaikan FFR akan terjadi pada pertengahan tahun 2015 (Grafik 1.16).

Pasar keuangan Asia masih menunjukkan kinerja positif pada tahun 2014 di tengah ketidakpastian sentimen di pasar keuangan global (Grafik 1.17). Kinerja positif dari bursa saham Asia tersebut dipengaruhi oleh langkah beberapa bank sentral lain seperti *European Central Bank* (ECB) dan *Bank of Japan* (BoJ) yang melakukan penambahan stimulus moneter (*quantitative easing*) di tengah langkah AS yang bersiap melakukan normalisasi kebijakan moneter. Perkembangan tersebut sejalan dengan arus modal masuk bersih nonresiden ke bursa saham

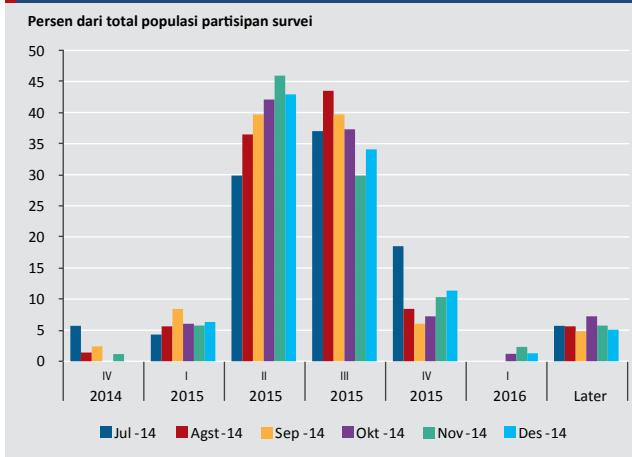
Grafik 1.15. Indikator Risiko Pasar Keuangan Global



Sumber: Bloomberg, diolah

³³ Sejalan dengan terus berlanjutnya pemulihan ekonomi AS pada triwulan III 2014.

Grafik 1.16. Survei Bloomberg: Proyeksi Pasar terhadap Waktu Kenaikan FFR



Sumber: Bloomberg, diolah

Asia selama tahun 2014, meskipun pada bulan Oktober 2014 sempat mencatatkan *net outflows* dipengaruhi oleh berakhirnya program stimulus moneter AS. Ke depan, tekanan arus modal keluar dari EM diperkirakan meningkat

Grafik 1.17. Indeks Pasar Saham Global



Sumber: Bloomberg, diolah

sejalan dengan rencana normalisasi kebijakan moneter AS pada tahun 2015 di tengah likuiditas global yang masih berlimpah didukung oleh kebijakan *Quantitative Easing* Eropa dan Jepang yang masih berlanjut.

Pada tahun 2014, pemulihan ekonomi dunia berjalan lambat dan tidak merata bahkan cenderung bergerak dengan satu mesin pertumbuhan yaitu Amerika Serikat (AS). Perekonomian AS terus menunjukkan tren kinerja yang membaik meskipun mengarah kepada *a new normal growth*. Hal ini berarti laju pertumbuhan ekonomi AS dalam jangka panjang kemungkinan tidak kembali ke rata-ratanya sebelum krisis global 2008-2009, namun lebih rendah. Sementara itu, pemulihan perekonomian di negara maju lainnya seperti Jepang dan Eropa berjalan lambat. Pada sisi lain, perekonomian negara *emerging markets* masih ditandai dengan perlambatan, khususnya Tiongkok. Proses *rebalancing* di Tiongkok ke arah sektor ekonomi domestik di tengah masih tingginya risiko di sektor perumahan dan permasalahan *shadow banking* menyebabkan ekonomi Tiongkok terus melemah, walaupun Pemerintah telah melakukan berbagai stimulus. Perlambatan pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok terindikasi bersifat struktural, artinya berpotensi permanen.¹ Potensi perlambatan permanen pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai *global factory* ini perlu diwaspadai karena akan memberi dampak lanjutan ke seluruh dunia, melalui jalur perdagangan, terutama melalui efek *spillover* ke Eropa dan negara-negara berkembang Asia lainnya.

Untuk menganalisa dampak *spillover* dari perkembangan ekonomi Tiongkok dan AS telah dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan ekonometrik metode Panel *Dynamic Ordinary Least Square* (DOLS) dengan periode sampel 2001-2013. Pengujian empiris menunjukkan bahwa penurunan investasi di Tiongkok akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi 10 negara EM

di kawasan Asia termasuk Indonesia.² Hasil estimasi juga menunjukkan adanya kointegrasi secara panel dalam pola hubungan jangka panjang antara indikator pertumbuhan investasi Tiongkok dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia yang menjadi sampel. Sebagaimana yang diilustrasikan pada Grafik 1, tampak hubungan yang cukup kuat, dimana penurunan pertumbuhan investasi di Tiongkok diikuti oleh penurunan pertumbuhan PDB Indonesia. Hal ini memperkuat hasil empirik bahwa ekonomi Indonesia berkointegrasi dengan ekonomi Tiongkok.

Namun demikian, indeks produksi (*industrial production index/IPI*) Tiongkok dan pertumbuhan PDB Tiongkok cenderung memiliki dampak (koefisien) yang lebih besar terhadap pertumbuhan PDB ke 10 negara EM di Asia, jika dibandingkan dengan investasi Tiongkok. Tingginya dampak IPI menunjukkan bahwa barang-barang yang diekspor ke Tiongkok lebih banyak berupa bahan baku untuk produksi atau *intermediate goods*. Temuan ini memperkuat studi sebelumnya oleh Kuroiwa (2014) yang menyebutkan bahwa Tiongkok banyak mengimpor bahan baku untuk dikelola dan diekspor kembali. Sementara itu, hasil uji empiris juga menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB Tiongkok memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global. Temuan ini memperkuat hasil temuan Harris *et al.* (2011) yang menunjukkan bahwa peran Tiongkok dalam perekonomian global tidak dapat diabaikan.

Sementara itu, hasil pengujian lainnya dengan Panel *cointegration* DOLS menunjukkan bahwa penurunan investasi di AS berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi kesepuluh negara EM di kawasan Asia tersebut yang lebih besar jika dibandingkan dengan dampak dari penurunan investasi di Tiongkok. Dengan menggunakan model *spillover* yang sama, namun dengan menggunakan indikator konsumsi AS sebagai variabel *spillover*, diperoleh koefisien yang lebih besar. Temuan ini

1 Menurut Eichengreen *et al.* (2013) perlambatan ekonomi natural suatu negara terjadi ketika PDB per kapita (dengan konstan *Purchasing Power Parity/PPP* dalam Dolar AS) lebih besar dari 10.000 dolar AS. Berdasarkan data Penn World Tables 6.3, data PDB China dengan konstan PPP dalam US dollar mencapai 8.511 dolar AS pada tahun 2007. Namun, pada tahun 2010 angka tersebut menurun ke 7.129 dolar AS. Perlambatan permanen di Tiongkok juga dapat disumbang oleh mulai melambatnya bonus demografi, mulai memudarnya peran akumulasi kapital sebagai pembentuk pertumbuhan jangka panjang, dan semakin menguatnya tuntutan untuk mendasari pertumbuhan jangka panjang pada modal manusia dan produktivitas.

2 Kesepuluh negara sampel adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Macau, Filipina, Vietnam, Bangladesh, Brunei, Kamboja dan Taiwan. Hasil lengkap estimasi Panel DOLS dapat dilihat pada Anglingkusumo, R., Anugrah, D.F., Fridayanti, Y. dan Hendharto, H. S. (2014) "Daya Saing Negara dan Dampak *Spillover* Perekonomian Dalam Jaringan Produksi Global", Bank Indonesia.

Grafik 1. Pertumbuhan Investasi Tiongkok dan Pertumbuhan PDB Indonesia

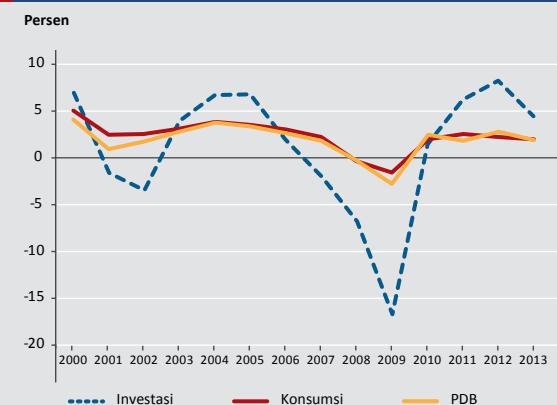


Sumber: CEIC Data, diolah

menunjukkan bahwa barang-barang yang diekspor oleh kesepuluh negara tersebut ke AS lebih banyak merupakan barang jadi yang digunakan untuk konsumsi dibandingkan barang antara atau bahan baku untuk keperluan produksi. Pada sisi lain, pengujian empirik dengan menggunakan pertumbuhan PDB AS sebagai indikator diperoleh hasil berupa koefisien *spillover* yang relatif sama dengan indikator konsumsi. Hal ini disebabkan pertumbuhan konsumsi dan PDB AS memiliki *path* yang sama (Grafik 2).

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak *spillover* dari perekonomian AS lebih

Grafik 2. Pertumbuhan Investasi, Konsumsi, dan PDB AS



Sumber: CEIC Data, diolah

besar dibandingkan dengan dampak *spillover* dari perekonomian Tiongkok terhadap pertumbuhan ekonomi kesepuluh negara EM di Asia, pada semua kriteria/indikator yang digunakan. Temuan ini memperkuat riset sebelumnya oleh Osborn dan Vehbi (2013) yang mendapatkan bahwa dampak *spillover* dari perekonomian AS lebih besar dibandingkan dampak *spillover* dari perekonomian Tiongkok untuk kasus Selandia Baru. Berdasarkan temuan tersebut maka diversifikasi eksport baik dalam bentuk produk maupun negara tujuan menjadi penting dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah perlambatan ekonomi global.



Keterangan gambar:

Forum G-20 yang beranggotakan 20 negara dengan PDB terbesar di dunia merupakan salah satu kerjasama internasional yang aktif diikuti oleh Indonesia. Pada tahun 2014, forum G-20 bersepakat untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.



BAB 2

RESPONS KEBIJAKAN EKONOMI GLOBAL

Berbagai kebijakan ditempuh negara-negara maju dan *Emerging Markets* (EM) untuk merespons ketidakpastian ekonomi global. Respons kebijakan di negara-negara maju diarahkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi. Sementara itu, menghadapi divergensi kebijakan negara maju dan tren penurunan harga komoditas yang terus berlanjut, negara-negara EM menempuh kebijakan untuk memperkuat fundamental ekonomi. Upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global yang meningkat dan lebih merata juga didukung oleh kerja sama multilateral dan antar negara kawasan (*regional*).

Secara umum, divergensi kebijakan masih mewarnai perkembangan ekonomi global. Negara maju masih menempuh kebijakan moneter akomodatif dan konsolidasi fiskal dalam jangka panjang. Kebijakan moneter akomodatif tersebut tercermin pada implementasi kebijakan *Quantitative Easing (QE)* dan kebijakan suku bunga rendah. Selama 2014, otoritas moneter Amerika Serikat (*Federal Reserve* atau the Fed) tetap melanjutkan kebijakan QE meski besarannya dikurangi secara bertahap (*Tapering-off QE III*) sejak Januari 2014 dan diselesaikan pada Oktober 2014.¹ Selain itu, the Fed juga mempertahankan suku bunga kebijakannya pada level rendah yaitu 0-0,25%. Sementara itu, kebijakan fiskal berupa pemotongan anggaran negara (*sequester*) Amerika Serikat (AS) masih berlanjut meski pada tahun 2014 Pemerintah AS melakukan pelonggaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Di kawasan Eropa, kebijakan moneter yang longgar ditunjukkan oleh penerapan kebijakan *negative deposit rate* yang disertai dengan langkah QE dan paket kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit. Sementara itu, kebijakan konsolidasi fiskal di kawasan Eropa terus berlanjut meski *fiscal drag* tahun 2014 mengalami penurunan dalam rangka pemulihan ekonomi Eropa. Di Jepang, pemerintah masih menerapkan paket kebijakan *Abenomics* dengan 3 panah (stimulus moneter, stimulus fiskal dan reformasi struktural) untuk mencapai sasaran pertumbuhan dan tingkat inflasi. Meski telah menempuh berbagai kebijakan untuk memperkuat pemulihan ekonominya, hanya Amerika Serikat yang tampil sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi dunia, sementara pertumbuhan ekonomi Eropa masih lemah bahkan Jepang masih dalam fase resesi.

Pada sisi lain, kebijakan yang ditempuh negara EM selama tahun 2014 diantaranya merupakan respon terhadap dampak rambatan (*spillover*) kebijakan negara maju khususnya *Tapering QE* oleh the Fed. Dengan komposisi likuiditas global yang mulai bergeser, negara EM diharuskan untuk memperbaiki kondisi fundamental ekonomi demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.² Negara EM menerapkan respons

1 Otoritas Amerika Serikat, the Fed, melakukan kebijakan *Quantitative Easing* dalam beberapa periode menyusul krisis finansial global tahun 2008. Periode QE I adalah November 2008-Juni 2010 dengan pembelian asset total sebesar 1,4 triliun dolar AS. Periode QE II adalah November 2010-Juni 2011 dengan pembelian asset sebesar 30 miliar dolar AS/bulan. Periode QE III adalah September 2012-Okttober 2014 pembelian asset sebesar 40 miliar dolar AS/bulan selama September 2012-Desember 2012 dan pembelian asset sebesar 85 miliar dolar AS/bulan selama Desember 2012-Desember 2013 *Tapering off QE 3* dimulai sejak Januari 2014 dan berakhir pada Oktober 2014.

2 Amerika Serikat mulai mengurangi besaran QE meski tetap akomodatif, sementara Jepang menambah besaran QE.

kebijakan yang beragam bergantung pada kondisi domestik masing-masing negara. Otoritas Tiongkok melanjutkan kebijakan *rebalancing* ekonomi dan reformasi struktural disertai dengan berbagai kebijakan pelonggaran moneter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan tetap pada kisaran 7,5%. Sementara itu, beberapa negara EM lainnya menempuh kebijakan moneter yang lebih ketat sebagai respons terhadap arus modal keluar yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang masih lebar. Beberapa negara seperti India, Meksiko dan Indonesia juga menempuh kebijakan reformasi struktural untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Di sisi lain, inkonsistensi kebijakan Bank Sentral Turki yang diperkirakan dipengaruhi oleh intervensi Pemerintah serta kondisi fundamental perekonomian telah menggiring negara tersebut ke arah perlambatan ekonomi dan pemburukan risiko.

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh negara maju dan negara EM juga didukung oleh kerja sama antarnegara melalui fora kerja sama internasional. Pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan tidak merata serta ketidakpastian pasar keuangan global dalam menghadapi kemungkinan kenaikan suku bunga *Fed Fund* mendorong kerja sama antarnegara yang semakin kuat untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul. Forum G20 telah memprioritaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja antara lain melalui pelaksanaan kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural pada empat pilar, yaitu kebijakan meningkatkan investasi, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan memperkuat perdagangan dan kebijakan persaingan usaha. Sementara itu, salah satu bentuk kerja sama negara kawasan (*regional*) yang telah ditempuh adalah kerja sama antara Indonesia dengan negara ASEAN+3 untuk menjaga stabilitas pada sektor keuangan melalui penguatan dan penyempurnaan jaring pengaman keuangan dalam konteks *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)*.

2.1. Kebijakan Negara-Negara Maju

Kebijakan yang ditempuh negara maju pada tahun 2014 secara umum masih akomodatif. Negara-negara maju masih menerapkan kebijakan suku bunga rendah dan menempuh kebijakan *Quantitative Easing* untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pada sisi fiskal, kebijakan fiskal negara maju, kecuali Jepang, pada tahun 2014 lebih longgar dibandingkan tahun 2013 untuk mendorong pemulihan ekonomi. Meski demikian, konsolidasi fiskal

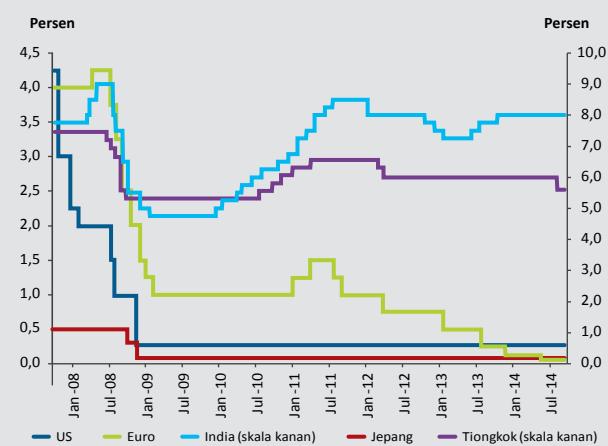
tetap dilanjutkan untuk menjamin keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang (*fiscal sustainability*).

Arah kebijakan moneter AS selama 2014 masih bersifat akomodatif. The Fed tetap melanjutkan kebijakan QE meski besarnya dikurangi secara bertahap (*tapering-off QE III*) sejalan dengan pemulihan ekonomi AS yang terus berlangsung.³ The Fed juga mempertahankan suku bunga kebijakannya pada level rendah yaitu 0-0,25% per tahun. Dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi ke depan, termasuk arah kebijakan moneter AS ke depan, the Fed menempuh strategi komunikasi *forward guidance* yang dituangkan dalam pernyataan resmi (*minutes* dan *statements* Rapat Komite Federal atau *Federal Reserve Open Market Committee*, FOMC). Indikator utama yang digunakan dalam *forward guidance* adalah tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dalam perkembangannya, penurunan tingkat pengangguran ternyata lebih dalam dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Hal ini mendasari the Fed untuk meninjau ulang penggunaan kedua indikator tersebut sebagai *forward guidance* dan menggantinya dengan penjelasan kualitatif mengenai perkembangan fundamental ekonomi AS. The Fed juga menegaskan bahwa bank sentral masih akan mempertahankan kebijakan suku bunga sangat rendah selama beberapa waktu (*considerable period of time*) setelah berakhirnya program *QE III*. Sejalan dengan perbaikan ekonomi AS yang terus berlangsung, kenaikan suku bunga *Fed Fund* diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun 2015.

Pada sisi fiskal, kebijakan konsolidasi fiskal (kebijakan *sequester*) masih berlanjut meski Pemerintah AS melakukan pelonggaran pemotongan anggaran menjadi sebesar 63 miliar dolar AS (*Bipartisan Budget Act of 2013*), berlaku untuk tahun anggaran 2014 dan 2015. Kebijakan fiskal tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi AS yang lebih solid.

Di kawasan Eropa, otoritas moneter kawasan Eropa (European Central Bank atau ECB) melakukan berbagai tambahan kebijakan pelonggaran sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi. ECB memotong suku bunga kebijakannya pada bulan Juni dan September 2014 masing-masing sebesar 10 bps menjadi 0%, sehingga suku

Grafik 2.1. Suku Bunga Kebijakan Beberapa Negara



Sumber: IMF

bunga *deposit rate* (*standing facility* operasi moneter) menjadi negatif. Suku bunga *deposit rate* pada Juni 2014 turun menjadi -0,1% dan kembali turun menjadi -0,2% pada September 2014 (Grafik 2.1). Selain itu, ECB juga mengeluarkan paket kebijakan yaitu *targeted long-term refinancing operations* untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan.⁴ Di sisi lain, ECB masih mempertahankan program *quantitative easing* berupa pembelian surat-surat berharga (SSB) dalam program *outright monetary transactions* (OMT) dengan jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian ECB sewaktu-waktu. Program OMT tersebut sangat membantu menurunkan *borrowing cost* (*yield*) beberapa negara di kawasan Eropa yang terkena krisis utang.

Meskipun ECB telah menempuh berbagai kebijakan pelonggaran tersebut, tingkat inflasi kawasan Eropa masih dalam tren menurun. Merespons kondisi tersebut, dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menghindari terjadinya deflasi, pada Oktober 2014, ECB memulai kebijakan penambahan program *quantitative easing* secara terbatas. Hal ini dilakukan melalui pembelian *asset backed securities* (ABS) dan *covered bonds* berdenominasi euro di pasar primer maupun pasar sekunder. Sejalan dengan tren penurunan tingkat inflasi Eropa yang masih terus berlanjut, ECB berencana melakukan asesmen pada Januari 2015 untuk mempertimbangkan keperluan penerapan program *quantitative easing* yang lebih bersifat *broad-based*

3 Meski QE III berakhir pada Oktober 2014, namun the Fed tetap mempertahankan kepemilikan aset sekuritas pada level yang tinggi melalui kebijakan reinvestasi dari nilai pokok surat utang maupun surat-surat berharga (*Mortgage Backed Securities/MBS*) yang jatuh tempo dan melanjutkan kebijakan *roll over* terhadap obligasi Pemerintah Amerika Serikat (*US Treasury* atau UST) yang jatuh tempo melalui lelang.

4 Yaitu paket kebijakan kredit murah bagi bank dimana jumlahnya dikaitkan dengan penyaluran kredit bank ke rumah tangga dan bisnis kecil.

Tabel 2.1. Kebijakan Otoritas Moneter Eropa

<i>Forward Guidance</i>	Menyatakan siap untuk melakukan apapun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menghindari deflasi.	
<i>Negative Deposit Rate</i>	Penurunan suku bunga kebijakan hingga <i>deposit rate</i> menjadi negatif.	Juni 14: -0,1% Sep 14: -0,2%
<i>Targeted Long-Term Refinancing Operations</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Paket kebijakan kredit murah bagi bank yang jumlahnya dihubungkan dengan penyaluran kredit bank ke rumah tangga (RT) dan bisnis. ● Bertujuan meningkatkan penyaluran kredit bank kepada sektor non-finansial, selain kredit kepada RT dan kredit kepemilikan rumah (KPR). 	Sep 14 - Jun 16 <i>Mature:</i> Sep 18
Pembelian Asal (ABS) dan <i>Covered Bonds</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Membeli ABS di pasar primer dan pasar sekunder dengan <i>tranche senior*</i> dan <i>tranche mezzanine</i> yang memiliki <i>guarantee</i>. ● Membeli <i>covered bonds**</i> berdenominasi Euro di pasar primer dan sekunder. 	Okt 14 s.d. Okt 16 (dapat diperpanjang)

Sumber: ECB, diolah

- *) *Tranche senior* adalah kualitas ABS dengan rating di atas BBB (piutang yang disekuritisasi), *tranche mezzanine* adalah kualitas ABS dengan rating di atas rating BBB (selevel dengan BBB)
- **) *Covered bonds* adalah obligasi yang diterbitkan dengan jaminan piutang. *Covered bonds* lebih aman dibandingkan ABS karena masih tercatat di dalam *balance sheet* penerbit obligasi (*bond issuer*).

(melalui pembelian obligasi Pemerintah).⁵ Pada sisi fiskal, *fiscal drag* tahun 2014 menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2013 untuk mendukung pemulihan ekonomi kawasan Eropa, meskipun kebijakan konsolidasi fiskal dalam jangka panjang tetap berlanjut (Tabel 2.1).

Di Jepang, kebijakan untuk mendorong ekonomi masih bertumpu pada program Perdana Menteri Shinzo Abe yaitu *Abenomics*, berupa stimulus moneter, stimulus fiskal dan reformasi struktural (kebijakan 3 panah Abe). Stimulus moneter dan stimulus fiskal telah dilakukan sejak tahun 2013, sementara reformasi struktural masih belum tampak. Sejalan dengan tren perbaikan ekonomi yang cukup menjanjikan pada tahun 2013 dan awal tahun 2014 (lihat Grafik 1.9), Pemerintah Jepang menempuh kebijakan kenaikan pajak penjualan dari 5% menjadi 8% untuk memperbaiki rasio utang Pemerintah dalam jangka panjang.⁶ Namun, perkembangan ekonomi Jepang pasca kenaikan pajak penjualan tersebut justru tidak berjalan seperti yang diharapkan.

5 Bahkan memasuki zona deflasi pada Desember 2014, antara lain dipengaruhi oleh harga minyak yang menurun

6 Didukung oleh kebijakan stimulus moneter dan fiskal pada tahun 2013

Mengingat dampak kenaikan pajak penjualan terhadap ekonomi Jepang tidak sesuai dengan harapan, pada akhir 2014, Pemerintah Jepang kembali mengungkapkan rencana untuk melakukan stimulus fiskal sebesar 3,5 triliun Yen atau 30 miliar dolar AS. Stimulus fiskal tersebut berupa transfer dana ke Pemerintah Daerah dan subsidi rumah tangga untuk pembelian bahan bakar. Selain itu, rencana kenaikan pajak penjualan tahap II (dari 8% menjadi 10%) pada Oktober 2015 ditunda hingga tahun 2017. Pemerintah Jepang juga melakukan diversifikasi penempatan dana pensiun Jepang senilai 1,1 triliun dolar AS sejak akhir Oktober 2014. Diversifikasi penempatan dana pensiun Jepang dilakukan dengan mengurangi porsi penempatan dana pada aset dengan imbal hasil rendah (obligasi Pemerintah Jepang atau *Japanese Government Bond*, JGB) dari sebelumnya 60% menjadi hanya 35% dari total dana pensiun. Sementara itu, porsi penempatan dana pada aset dengan imbal hasil yang lebih tinggi (ekuitas domestik maupun luar negeri) ditingkatkan dari sebelumnya 40% menjadi 65% dari total dana pensiun.⁷ Ke depan, Pemerintah Jepang juga berencana untuk menurunkan pajak perusahaan mulai tahun anggaran 2015 (April 2015-April 2016) dari 35% menjadi kurang dari 30%.⁸ Kebijakan tersebut ditempuh untuk meningkatkan daya saing perusahaan Jepang, mengingat pajak Perusahaan di Jepang saat ini lebih tinggi dibandingkan di Tiongkok, Korea Selatan dan Singapura.

Selama tahun 2014, stimulus moneter dilakukan dalam bentuk pembelian surat-surat berharga (SSB), terutama obligasi Pemerintah (*Japanese Government Bond*, JGB), sebesar 70 triliun Yen per tahun yang kemudian ditingkatkan menjadi 80 triliun Yen per tahun. Stimulus moneter ini berdampak pada tingkat inflasi Jepang yang meningkat (sejalan dengan melemahnya nilai tukar Yen), meski dalam perkembangan terakhir pada triwulan IV 2014, menurun dipengaruhi oleh harga minyak yang menurun. Pemerintah Jepang juga memberikan stimulus fiskal sebesar 5 triliun Yen atau 51 miliar dolar AS (1% dari PDB) dalam bentuk perbaikan infrastruktur, pembiayaan pasca bencana gempa bumi dan bantuan langsung pada keluarga berpendapatan rendah, untuk tahun anggaran 2014 (April 2014-April 2015). Stimulus fiskal ini ditempuh guna mengantisipasi dampak negatif dari kenaikan pajak penjualan pada April 2014.

Panah ketiga *Abenomics* yaitu reformasi struktural berjalan lebih lambat dari perkiraan semula. Reformasi struktural yang telah dicanangkan pada pertengahan

7 Kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan harga saham

8 Dengan syarat perusahaan menaikkan gaji pegawai minimal sebesar 3%

tahun 2013, belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, pada bulan Juni 2014 kabinet Pemerintahan Abe melakukan pengkinian terhadap rencana strategi pertumbuhan dan reformasi struktural. Kebijakan reformasi struktural Pemerintahan Abe difokuskan pada reformasi sektor tenaga kerja, sektor pertanian, sektor kelistrikan, sektor bisnis dan sektor finansial. Reformasi sektor tenaga kerja ditujukan untuk menambah jumlah angkatan kerja dengan mereformasi peraturan tenaga kerja agar lebih kondusif bagi tenaga kerja perempuan, tenaga kerja asing dan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta meningkatkan upah. Reformasi sektor pertanian, kelistrikan dan bisnis ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Reformasi sektor finansial ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil dari investasi Pemerintah maupun swasta.

2.2. Kebijakan *Emerging Markets*

Stance kebijakan yang ditempuh negara EM pada tahun 2014 cenderung bervariasi, yang ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, fiskal, dan reformasi struktural diarahkan untuk mengendalikan tekanan perekonomian guna menjaga stabilitas perekonomian dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, meskipun dengan besaran dan waktu kebijakan yang berbeda-beda. Sebagian EM merespons kondisi pelemahan aktivitas ekonomi dengan menurunkan suku bunga kebijakan. Namun, beberapa negara yang menghadapi tekanan arus dana keluar akibat ketidakpastian ekonomi global menempuh kebijakan moneter ketat. Selain itu, EM juga melakukan berbagai kebijakan reformasi struktural untuk memperbaiki kondisi fundamental ekonomi. Hal ini ditujukan dalam upaya mencapai kesinambungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, khususnya dalam menghadapi perubahan kondisi finansial global yaitu normalisasi kebijakan moneter AS (kenaikan FFR). Di sisi lain, respons kebijakan yang tidak konsisten, seperti di Turki, berpotensi membawa perekonomian ke arah perlambatan ekonomi dan pemburukan risiko.

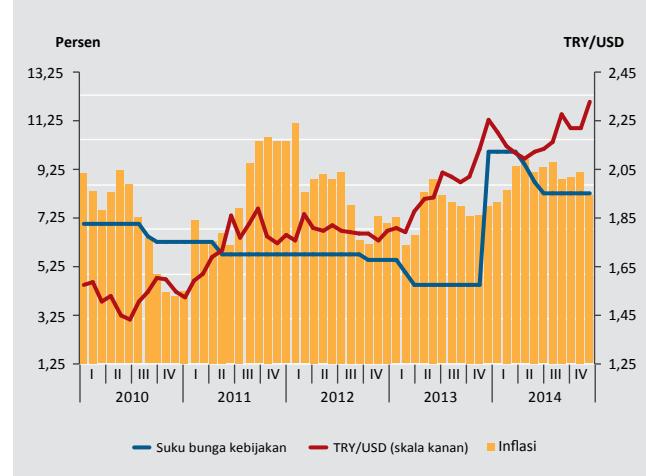
Kebijakan moneter longgar ditempuh antara lain Vietnam, Thailand, Korea Selatan, Chili, Meksiko dan Peru.

Kebijakan tersebut ditempuh dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah penurunan permintaan eksternal dan adanya permasalahan politik (khusus Thailand). Tiongkok juga menempuh kebijakan moneter longgar yang ditujukan untuk menahan perlambatan

ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan pelonggaran tersebut dilakukan baik secara *targeted* maupun *broad-based*. Secara *targeted*, Tiongkok menurunkan rasio giro wajib minimum (GWM) *targeted* pada bulan April dan Juni 2014, menambah likuiditas pada beberapa bank yang membutuhkan, serta melaksanakan ekspansi operasi moneter, baik yang bersifat reguler maupun bersifat *special liquidity operations*. Sedangkan secara *broad-based*, otoritas Tiongkok menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps untuk suku bunga deposito 1 tahun menjadi 2,75% dan sebesar 40 bps untuk suku bunga kredit 1 tahun menjadi 5,6%. Selain itu, batas atas suku bunga deposito yang diperbolehkan dinaikkan menjadi 1,2 kali dari suku bunga acuan (sebelumnya 1,1 kali). Turki juga menempuh kebijakan moneter longgar, namun pada saat yang tidak tepat.

Inkonsistensi respons kebijakan Turki, yaitu kebijakan moneter yang akomodatif di tengah ekspektasi inflasi dan prakiraan inflasi yang tinggi, berdampak pada perlambatan ekonomi dan pemburukan risiko. Kondisi itu diawali dengan pelemahan nilai tukar Lira sebesar 15% di tengah tekanan ekonomi global dan instabilitas politik domestik. Pelemahan Lira tersebut direspon dengan kebijakan pengetatan oleh Bank Sentral Turki pada awal tahun 2014. Namun, menjelang pertengahan tahun, di tengah ekspektasi dan proyeksi inflasi yang masih tinggi, Turki justru menempuh kebijakan penurunan suku bunga secara bertahap dengan total sebesar 175 bps (Grafik 2.2). Inkonsistensi kebijakan tersebut diperkirakan terkait dengan adanya intervensi kebijakan oleh Pemerintah, sehingga berdampak pada meningkatnya indikator risiko Turki dan berlanjutnya pelemahan nilai tukar Lira.

Grafik 2.2. Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Turki



Divergensi kebijakan moneter di negara EM tercermin pada *stance* kebijakan moneter India yang ketat. Dalam rangka memperbaiki fundamental ekonomi India terutama dari sisi defisit transaksi berjalan, nilai tukar, dan inflasi menjelang normalisasi suku bunga kebijakan AS, pada bulan Januari 2014, otoritas moneter India menempuh kebijakan moneter ketat untuk mengarahkan inflasi mencapai sasaran sekitar 4%. Beberapa negara EM lain, seperti Indonesia, Brazil, Argentina dan Colombia juga menempuh kebijakan moneter ketat pada tahun 2014 untuk menghadapi tekanan inflasi yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang masih lebar.

Kebijakan moneter ketat juga ditempuh oleh Rusia sebagai respons terhadap tren pelemahan nilai tukar Rubel akibat tingkat keyakinan investor terhadap ekonomi Rusia yang menurun. Penurunan tingkat keyakinan investor tersebut disebabkan oleh jatuhnya harga minyak serta sanksi ekonomi global yang harus dihadapi Rusia karena pilihan politik luar negerinya.⁹¹⁰¹¹ Selama tahun 2014, Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga kebijakannya lima kali dengan total kenaikan sebesar 1.150 bps. Kenaikan suku bunga tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014 sebesar 750 bps menjadi 17% dari sebelumnya 9,5%.¹² Pelemahan Rubel mereda setelah Bank Sentral Rusia mengeluarkan pernyataan tidak akan memberlakukan kebijakan *capital control*. Kebijakan moneter ketat tersebut sempat berseberangan dengan *stance* Pemerintah Rusia yang pro-pertumbuhan, meskipun pada akhirnya kebijakan tersebut tetap dijalankan untuk menjaga stabilitas ekonomi.¹³

Upaya negara EM untuk memperkuat fundamental ekonomi juga didukung oleh bauran kebijakan makroprudensial, fiskal dan reformasi struktural. Tiongkok juga menempuh berbagai kebijakan makroprudensial dan kebijakan stimulus fiskal yang mencapai 2,3 triliun yuan selama tahun 2014. Otoritas Tiongkok juga melakukan penegakan hukum terkait finansialisasi komoditas (*multiple collateral*) dan korupsi, serta melakukan harmonisasi kebijakan (kenaikan pajak bahan bakar untuk menahan

9 Ekonomi Rusia banyak bergantung pada ekspor minyak dan gas.

10 Sanksi ekonomi global antara lain berupa penolakan perpanjangan utang luar negeri pada perusahaan Rusia, sehingga permintaan terhadap dolar AS di Rusia meningkat dan menambah tekanan pada Rubel.

11 Intervensi militer Rusia di Ukraina.

12 Sebelum kenaikan suku bunga pada Desember 2014, Rusia telah melepas *band* nilai tukarnya menjadi *free float* untuk meredam spekulasi terhadap Rubel pada November 2014.

13 Salah satu pencapaian Pemerintahan Putin sejak menjabat tahun 1999 adalah perbaikan kestabilan harga.

penurunan inflasi dan mendukung *green economy*) demi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan dan ramah lingkungan.¹⁴

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, pada tahun 2014, otoritas Tiongkok melanjutkan kebijakan *rebalancing* ekonomi. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menggeser secara bertahap mesin perekonomian Tiongkok dari semula bertumpu pada investasi (*investment-led growth*) menuju model ekonomi yang lebih ditopang oleh konsumsi (*consumption-led growth*). Untuk mendukung proses *rebalancing* tersebut, Pemerintah Tiongkok menempuh kebijakan reformasi struktural (*China third planum*) yang telah dicanangkan pada tahun 2013. Paket kebijakan tersebut meliputi reformasi di bidang keuangan dan perbankan (internasionalisasi mata uang Renmimbi/RMB, liberalisasi suku bunga, pengembangan pasar obligasi, memperluas kesempatan bagi swasta di sektor perbankan dan menyiapkan beberapa area perdagangan bebas di Tiongkok), reformasi pajak dan fiskal (meratakan distribusi pajak pendapatan, menaikkan pajak bahan bakar minyak (BBM), membangun sistem asuransi nasional, dan memperluas jalur pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi perbankan bayangan), reformasi kependudukan (merelaksasi kebijakan maksimum 1 keluarga 1 anak, percepatan urbanisasi dan mobilisasi penduduk), serta reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Reformasi di bidang keuangan dan perbankan ditempuh otoritas Tiongkok diantaranya melalui liberalisasi suku bunga. Hal ini dilakukan dalam bentuk penghapusan *capping* untuk suku bunga kredit. Kebijakan liberalisasi suku bunga tersebut merupakan upaya untuk mengurangi perbankan bayangan (*shadow banking*) dan menjadi bagian dari paket kebijakan reformasi struktural.

Pemerintah India juga melanjutkan kebijakan reformasi struktural dan bahkan mencanangkan program reformasi struktural India yang lebih terintegrasi. Kebijakan reformasi struktural India fokus pada reformasi sektor energi, sektor industri, pajak, sektor tenaga kerja, sektor teknologi informasi, sektor pertambangan dan reformasi dalam upaya mengurangi tekanan inflasi dari sisi pasokan.

14 Finansialisasi komoditas (*multiple collateral*) yang banyak dilakukan oleh importir di Tiongkok berkaitan dengan tren peningkatan risiko *shadow banking*. Kebijakan penegakan hukum terkait hal ini (inspeksi komoditas yang disimpan sebagai agunan di beberapa pelabuhan di Tiongkok) turut berkontribusi terhadap penurunan harga beberapa komoditas global khususnya tembaga.

Reformasi sektor energi ditujukan untuk mengurangi subsidi yang membebani anggaran Pemerintah, sedangkan reformasi sektor industri ditujukan untuk meningkatkan dana investasi langsung dari luar negeri (*Foreign Direct Investment/FDI*) melalui program “*make in India*”.

Program ini meliputi simplifikasi dan percepatan proses pendirian bisnis baru, pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, pembentukan otoritas penanggung jawab, dan peningkatan perlindungan hak intelektual. Reformasi sektor pajak, tenaga kerja dan teknologi informasi ditujukan untuk mendukung terlaksananya program “*make in India*”. Sementara, reformasi sektor pertambangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah. Dengan kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi India meningkat menjadi 5,6% dari 4,7% pada tahun 2013.

Negara EM lainnya yang juga menempuh kebijakan reformasi struktural selama tahun 2014 adalah negara-negara Amerika Latin. Reformasi struktural merupakan respons terhadap perlambatan ekonomi sejalan dengan penurunan harga komoditas negara-negara Amerika Latin merupakan negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) dan mengandalkan ekspor komoditas untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Reformasi struktural yang ditempuh oleh negara-negara tersebut berupa reformasi sektor energi, sektor tenaga kerja, sektor pajak, sektor industri, dan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, reformasi struktural yang telah dicanangkan oleh Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi energi dalam bentuk pengurangan subsidi untuk listrik dan bahan bakar minyak, selain pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan layanan perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi. Selanjutnya, pada penghujung tahun 2014, Pemerintah memutuskan untuk menghilangkan subsidi bahan bakar Premium dan menetapkan subsidi tetap sebesar Rp1.000 per liter untuk bahan bakar Solar.

2.3. Kerjasama Internasional

Menyikapi ketidakpastian ekonomi global dan tantangan depan, Bank Indonesia beserta kementerian dan lembaga terkait pada tahun 2014 menempuh langkah-langkah penguatan di kerja sama tataran multilateral, negara kawasan (*regional*), dan juga bilateral. Dalam kerangka kerjasama multilateral, G20 dan IMF menggarisbawahi

perlunya respons kebijakan secara kolektif dan langkah-langkah yang ambisius dalam melakukan upaya pemulihan dan mengatasi tantangan perekonomian global. Sementara itu, dalam konteks kerjasama negara kawasan (*regional*) dan bilateral, fokus pembahasan dititikberatkan pada upaya menjaga stabilitas dan penguatan daya tahan kawasan dan mengatasi *downside risk* yang dihadapi.

Kerjasama Multilateral

Pada tahun 2014, forum G20 yang beranggotakan 20 negara dengan PDB terbesar di dunia kembali bersepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam pemulihan ekonomi global dengan prioritas utama pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, membangun ekonomi global yang lebih kuat dan tahan terhadap gejolak, serta memperkuat tata kelola institusi global. Dari ketiga area kerjasama tersebut, tema utama yang dicanangkan forum G20 dibawah presidensi Australia pada tahun 2014 adalah penguatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (*strengthening growth and creating jobs*).

Tekad meningkatkan pertumbuhan ekonomi oleh forum G20 tersebut ditandai dengan penetapan tujuan ambisius melalui implementasi strategi pertumbuhan, yaitu *Comprehensive Growth Strategy* (CGS), dengan tetap memperhatikan sustainabilitas fiskal dan stabilitas sektor keuangan. Melalui CGS, forum G20 berkomitmen meningkatkan secara kolektif pertumbuhan PDB G20 setidaknya 2% di atas pertumbuhan saat ini (WEO Oktober 2013) sampai dengan 2018. Apabila strategi pertumbuhan ini terlaksana dan seluruh program yang dicanangkan dapat diimplementasikan, tambahan PDB dunia diperkirakan mencapai 2,1% (sekitar 2 triliun dolar AS) serta dapat melahirkan jutaan lapangan kerja baru. Untuk memastikan implementasinya, forum G20 juga menyepakati mekanisme pemantauan melalui prinsip *mutual assessment* dan *country-led process*, yang pelaksanaannya dibantu oleh organisasi internasional terkait. Menyadari bahwa proses pembangunan bersifat dinamik, forum G20 memperbolehkan penyesuaian oleh masing-masing negara guna memastikan tercapainya target pertambahan pertumbuhan.

Secara umum, strategi kebijakan pada CGS mencakup kebijakan makroekonomi dan struktural. Dalam hal ini, selain memastikan pelaksanaan kebijakan makroekonomi yang memperkuat permintaan, CGS juga mengembangkan

sejumlah reformasi struktural yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sesuai target dimaksud. Dalam implementasinya, masing-masing negara G20 termasuk Indonesia dituntut melakukan langkah konkret dengan fokus pada reformasi struktural di 4 (empat) pilar kebijakan, yaitu kebijakan meningkatkan investasi, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan memperkuat perdagangan, dan kebijakan persaingan usaha. Strategi konkret ke empat pilar tersebut selanjutnya dituangkan secara komprehensif dalam sebuah dokumen yang disepakati dalam *G20 Summit* pada November 2014 di Brisbane, yang dikenal dengan nama *Brisbane Action Plan*.

Upaya reformasi pada pilar pertama (kebijakan investasi) dilakukan antara lain melalui pembentukan *Global Infrastructure Initiative* (GII). GII merupakan program kerja tahun jamak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas investasi infrastruktur oleh publik dan swasta. Hal ini ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi, peningkatan peran *Multilateral Development Banks* (MDBs), perumusan *best practice* PPP, dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Selain itu, forum G20 juga menyepakati pembentukan *Global Infrastructure Hub* yang diberikan mandat untuk mengembangkan *platform* untuk *knowledge-sharing* dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, bank pembangunan, dan organisasi internasional lainnya guna meningkatkan pembiayaan pada infrastruktur.

Untuk mendukung reformasi pada pilar kebijakan tenaga kerja, forum G20 di antaranya menyepakati upaya untuk mengurangi kesenjangan tingkat partisipasi tenaga kerja pria dan wanita sebanyak 25% pada tahun 2025. Pencapaian target ini diperkirakan mendorong lebih dari 100 juta kaum wanita memasuki dunia kerja. Pada pilar ketiga, kebijakan perdagangan, reformasi ditujukan untuk meningkatkan *global value chain* dan nilai tambah yang dihasilkan negara berkembang serta melonggarkan regulasi terkait. Sementara itu, reformasi pada pilar keempat ditujukan untuk meningkatkan persaingan usaha guna memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investasi.

Forum G20 selanjutnya juga telah menyepakati pentingnya pengelolaan normalisasi kebijakan moneter negara maju agar tidak mengganggu upaya memperkuat pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Meski disadari proses normalisasi mengindikasikan penguatan pertumbuhan di negara yang bersangkutan, proses normalisasi itu juga berpotensi mendorong volatilitas nilai tukar dan harga aset di negara lain yang pada gilirannya

berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi global. Mempertimbangkan hal tersebut, para pemimpin negara maju mengakui pentingnya peran komunikasi kebijakan yang akan ditempuh dan berkomitmen untuk melakukan komunikasi secara transparan dan berhati-hati agar dapat meminimalisir potensi dampak negatif kebijakan.

Berkaitan dengan reformasi sektor keuangan, forum G20 selama 2014 bertekad untuk fokus menyelesaikan empat area reformasi utama, yaitu membangun ketahanan lembaga keuangan, merumuskan resolusi untuk lembaga keuangan yang bersifat *too-big-to-fail*, mengelola risiko terkait kegiatan *shadow banking*, dan menciptakan pasar derivatif yang aman. Area fokus tersebut ditujukan untuk mengatasi kerentanan akibat krisis keuangan global dan mendukung tujuan G20 untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan, dan merata. Penyelesaian reformasi utama, dengan dukungan *Financial Stability Board* (FSB) itu, diharapkan dapat memfasilitasi negara anggota dari tahapan perumusan reformasi sektor keuangan hingga ke proses implementasi, monitoring, dan pengawasan.

Lebih lanjut, pada *Brisbane Summit* November 2014, para pemimpin G20 telah menyepakati ketentuan terkait kecukupan modal dan pengembangan pasar derivatif guna meningkatkan daya tahan perekonomian global dan kestabilan keuangan. Kemajuan yang cukup signifikan telah tercapai pada ketentuan terkait aturan permodalan bagi *Global Systemically Important Banks* (GSIB) guna mengatasi permasalahan *too-big-to-fail*. Namun demikian, forum G20 juga mencatat bahwa kemajuan yang konkret masih diperlukan terutama untuk mendukung implementasi reformasi di pasar derivatif.

Sejalan dengan langkah pemulihan oleh G20, IMF mencanangkan inisiatif *Global Policy Agenda* (GPA) yang menekankan pada upaya yang perlu dilakukan anggota IMF untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas, baik di tataran negara maupun global melalui tiga tema besar. Pertama, meningkatkan pertumbuhan (*Lifting growth*). Upaya peningkatan pertumbuhan perlu melibatkan reformasi struktural. Dalam hal ini kebijakan moneter akomodatif perlu dilanjutkan untuk mendorong permintaan. Namun, pelaksanaannya tetap diiringi dengan reformasi yang dapat menghilangkan distorsi berkepanjangan di pasar barang dan tenaga kerja, meningkatkan aliran kredit ke sektor produktif, memperkuat kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan, serta mengurangi kesenjangan infrastruktur.

Tema GPA kedua adalah memperkuat daya tahan (*Building resilience*): Dengan risiko stabilitas keuangan yang masih tinggi, regulasi yang tepat dan pengawasan sektor keuangan yang berhati-hati, serta pengembangan dan penerapan instrumen makroprudensial dapat membantu membatasi pengambilan risiko keuangan yang berlebihan. Di sisi lain, menjelang normalisasi kebijakan moneter di negara maju, negara berkembang perlu bersiap dengan memperkuat kerangka kebijakan, institusi, dan fundamental ekonomi yang dapat memitigasi *spillover* negatif.

Tema GPA ketiga adalah mendorong *koherensi* (*Achieving coherence*): Kerja sama internasional dalam bentuk dialog dan koordinasi kebijakan diperlukan untuk memperlancar upaya menyeimbangkan permintaan global, meminimalisir *spillover* dan *spillbacks* negatif dari tidak sinkronnya pembalikan dari kebijakan moneter yang akomodatif, menjamin regulasi keuangan yang konsisten, dan memperkuat jaring pengaman keuangan global yang memadai.

Dalam bidang pengawasan (*surveillance*) ekonomi, IMF terus berupaya menyempurnakan kegiatan pengawasan dengan melakukan *review* tiga tahunan (*triennial surveillance review* atau TSR) untuk mendorong penguatan ekonomi dan keuangan global serta untuk mencegah berulangnya krisis. TSR 2014 secara umum bertema upaya pengawasan IMF untuk mendukung pertumbuhan yang berkesinambungan di tengah dunia yang semakin saling terkait pascakrisis. IMF selanjutnya menekankan pentingnya komunikasi yang baik mengenai strategi dan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan IMF selama ini. Melalui kegiatan pengawasan tersebut, IMF memainkan peran penting dalam mendorong kerja sama global pascakrisis untuk mendukung upaya stabilisasi ekonomi dan keuangan global.

Selanjutnya, IMF secara ekstensif memperkuat modalitas *Global Financial Safety Net* (GFSN) serta mengatasi masalah stigma yang membebani IMF. Guna memperkuat modalitas GFSN, IMF telah melakukan review terhadap kerangka fasilitas pencegahan krisis, yakni *Flexible Credit Line* (FCL) dan *Precautionary and Liquidity Line* (PLL), khususnya terkait permintaan terhadap fasilitas tersebut, persyaratan, serta permasalahan akses dan *exit*. IMF juga telah membuat beberapa perbaikan terhadap fasilitas FCL dan PLL untuk mengurangi ketidakpastian terkait persyaratan pemanfaatan fasilitas. Sementara itu, untuk mengatasi masalah stigma, IMF mengusulkan penyelenggaraan kegiatan *outreach* yang lebih ekstensif dan berjangka panjang, serta mengeksplorasi kemungkinan alternatif modalitas dan operasional dalam GFSN.

Kerjasama Negara Kawasan (*Regional*)

Perkembangan dan *outlook* ekonomi global yang belum menggembirakan di tengah ketidakpastian prospek normalisasi kebijakan negara maju juga tidak luput dari perhatian kerjasama di tataran negara kawasan (*regional*) Asia. Perbaikan ekonomi yang tidak merata telah menahan laju pertumbuhan ekonomi global membuat negara-negara di kawasan tetap mewaspadai *downside risk* yang masih mengancam. Peningkatan risiko dan ketidakpastian global tersebut telah mendorong otoritas negara kawasan pada tahun 2014 untuk mengedepankan stabilitas keuangan dan daya tahan kawasan melalui penguatan kerjasama di area tersebut.

Pada kerja sama ASEAN+3, Indonesia dan negara anggota lainnya melakukan penguatan dan penyempurnaan jaring pengaman keuangan dalam konteks *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)*. Penguatan yang telah berlaku efektif sejak 17 Juli 2014 tersebut dilakukan melalui peningkatan komitmen volume *pooling fund* menjadi 240 miliar dolar AS, penambahan fasilitas pencegahan krisis, dan peningkatan *IMF de-linked portion* menjadi 30%. Dalam konteks kerja sama bilateral, Bank Indonesia sejak 2003 juga memiliki kerjasama dalam bentuk transaksi *swap* dengan Bank of Japan (BoJ), yang telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir (2014) nilai kerja sama tersebut telah meningkat menjadi 22,76 miliar dolar AS. Kerja sama yang dikenal dengan *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) tersebut merupakan salah satu fasilitas pemupukan cadangan devisa dengan menggunakan metode transaksi *swap* dolar AS dengan rupiah yang bertujuan untuk mengatasi masalah neraca pembayaran dan kesulitan likuiditas jangka pendek.

Masih dalam rangka menjaga stabilitas keuangan kawasan, Bank Indonesia beserta seluruh anggota kerjasama bank sentral di Asia Pacific yang tergabung dalam *Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks* atau EMEAP, pada awal 2014 telah merampungkan dokumen kerangka pengelolaan krisis -- dikenal dengan *EMEAP Crisis Management and Resolution Framework* (EMEAP-CMRF).¹⁵ Finalisasi dokumen tersebut merupakan tindak lanjut persetujuan prinsip para Gubernur bank sentral anggota EMEAP pada tahun 2013 atas aspek substantif CMRF. Dokumen ini menjabarkan kerangka kerjasama negara

15 EMEAP adalah *Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks* yang beranggotakan Reserve Bank of Australia, People's Bank of China, Hong Kong Monetary Authority, Bank Indonesia, Bank of Japan, Bank of Korea, Bank Negara Malaysia, Reserve Bank of New Zealand, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, dan Bank of Thailand.

kawasan (*regional*) yang terintegrasi untuk memfasilitasi interaksi dan kerjasama di antara anggota EMEAP untuk mencegah dan mengelola krisis dengan cara pertukaran informasi (*exchange of information*), diskusi kebijakan (*discussion of policy actions*), dan kemungkinan kebijakan yang terkoordinasi (*consideration of coordinated action*).

Komitmen untuk menjaga stabilitas keuangan juga terus dilakukan dalam kerja sama ASEAN sejalan dengan upaya integrasi ekonomi menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA). Dalam mendukung liberalisasi aliran modal di ASEAN, negara anggota ASEAN menyadari pentingnya stabilitas di sektor keuangan di tengah ketidakseimbangan pasar keuangan global. Sepanjang tahun 2014 telah dilakukan dialog kebijakan antar negara ASEAN untuk bertukar pandangan tentang tantangan dan *safeguard measures* dalam memitigasi dampak dari aliran modal serta menjaga stabilitas. Selain itu, untuk melengkapi pengukuran liberalisasi *capital account* di ASEAN (*CAL-Heatmap*), negara ASEAN juga menyepakati penyusunan *Individual Country Milestone* agar tercapai proses liberalisasi aliran modal yang teratur (*orderly*) di ASEAN dan konsisten dengan kondisi masing-masing negara ASEAN.

Selain penguatan stabilitas dan daya tahan kawasan seperti dijelaskan di atas, berbagai kerja sama di tataran negara kawasan (*regional*) juga memberi perhatian pada upaya pemulihan ekonomi dan juga reformasi sektor keuangan kawasan. Salah satunya, guna mendukung perdagangan dan investasi intra-ASEAN, para Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 31 Desember 2014 telah menyepakati sebuah kerangka operasional yang disebut sebagai *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF) *Guidelines*. ABIF bertujuan untuk menyediakan akses pasar (*market access*) dan keleluasaan operasional (*operational flexibility*) bagi *Qualified ASEAN Banks* (QAB) yang beroperasi di negara anggota ASEAN.¹⁶ *Guidelines* dimaksudkan menjadi panduan bagi negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dan proses integrasi perbankan di ASEAN. Dengan implementasi ABIF, bank-bank di ASEAN diharapkan dapat mengembangkan bisnis mereka dengan lebih luas, efisien, dan stabil di kawasan ASEAN, sehingga selanjutnya diharapkan menjadi pendorong perdagangan dan investasi di ASEAN.

Bagi Indonesia, ABIF dipandang dapat memberi peluang dan potensi bagi perbankan dan pelaku bisnis Indonesia

¹⁶ QAB adalah bank-bank ASEAN yang memenuhi persyaratan tertentu yang telah disepakati bersama oleh ASEAN.

untuk mendapatkan akses pasar dan kegiatan usaha yang lebih luas di kawasan ASEAN. Dalam negosiasi penyusunan *Guideline ABIF*, Indonesia berhasil memperkuat prinsip resiprokal dalam ABIF agar manfaat yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) antar negara anggota ASEAN dapat lebih terjamin dalam implementasinya. Selain itu, Indonesia juga berhasil menjabarkan mekanisme yang lebih jelas dalam *Guideline ABIF* agar dalam implementasinya dapat membantu mengurangi kesenjangan akses pasar dan fleksibilitas operasional khususnya di antara negara-negara anggota ASEAN yang sebelumnya telah memiliki keterkaitan aktivitas perbankan (*home-host relationship*). Tercapainya kesepakatan ABIF ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang erat antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, menyadari keterkaitan perdagangan yang kuat antara ASEAN dengan negara-negara mitranya, negara-negara ASEAN juga menempuh perundingan kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Terkait hal ini, ASEAN pada tahun 2012 bersepakat meluncurkan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang merupakan platform kerja sama ekonomi yang lebih komprehensif dan saling menguntungkan antara ASEAN dengan 6 (enam) negara mitra (Tiongkok, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, dan India). RCEP dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan suatu perjanjian liberalisasi perdagangan yang diharapkan dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan integrasi di antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara mitra. Pembentukan RCEP juga diyakini akan menjadikan kawasan ini sebagai pasar perdagangan bebas terbesar di dunia sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi motor perekonomian dunia.

Tingginya volume perdagangan antar negara Asia dan besarnya ketergantungan negara-negara Asia tersebut pada penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan juga telah memunculkan inisiatif penggunaan mata uang lokal di kawasan dalam penyelesaian transaksi perdagangan. Selain mendorong perdagangan intra-Asia, inisiatif yang dikenal dengan *local currency settlement* (LCS) ini diharapkan dapat mengurangi instabilitas nilai tukar mata uang negara di kawasan sehingga dapat mendukung stabilitas keuangan kawasan. Salah satu bentuk LCS yang berkembang saat ini adalah *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA), yakni kerjasama dalam bentuk *swap* mata uang domestik antar dua bank sentral. Indonesia juga cukup aktif mengupayakan BCSA dengan beberapa negara di kawasan. Pada 6 Maret 2014, Gubernur Bank Indonesia dan Bank of Korea (BoK) telah

menandatangi perjanjian kerja sama *swap* KRW/IDR senilai KRW10,7 triliun/Rp115 triliun (setara 10 miliar dolar AS).

Masih dalam rangka penguatan pemulihan ekonomi kawasan, sejumlah negara Asia yang dimotori oleh Tiongkok telah menandatangi *Memorandum of Understanding* (MoU) pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) pada 23-24 Oktober 2014. *Authorized capital* dari AIIB disepakati sebesar 100 miliar dolar AS dengan nilai *initial subscribed capital* di antara *regional funding member* sebesar 50 miliar dolar AS. AIIB akan berkantor pusat di Beijing.

AIIB bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan konektivitas infrastruktur di Asia melalui investasi pada infrastruktur dan sektor produktif lainnya. Selain itu, AIIB juga diharapkan dapat mempromosikan kerjasama dan *partnership* negara kawasan (*regional*) dalam menghadapi tantangan pembangunan melalui kolaborasi dengan institusi bilateral dan multilateral lainnya. Inisiatif pembentukan AIIB juga didasarkan pada masih adanya *financing gap* dalam pembiayaan infrastruktur. Dengan mengatasi permasalahan *financing gap* dimaksud, AIIB selanjutnya diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan integrasi ekonomi di Asia.

Indonesia juga terlibat aktif dalam proses perundingan pembentukan AIIB dan merupakan salah satu *prospective*

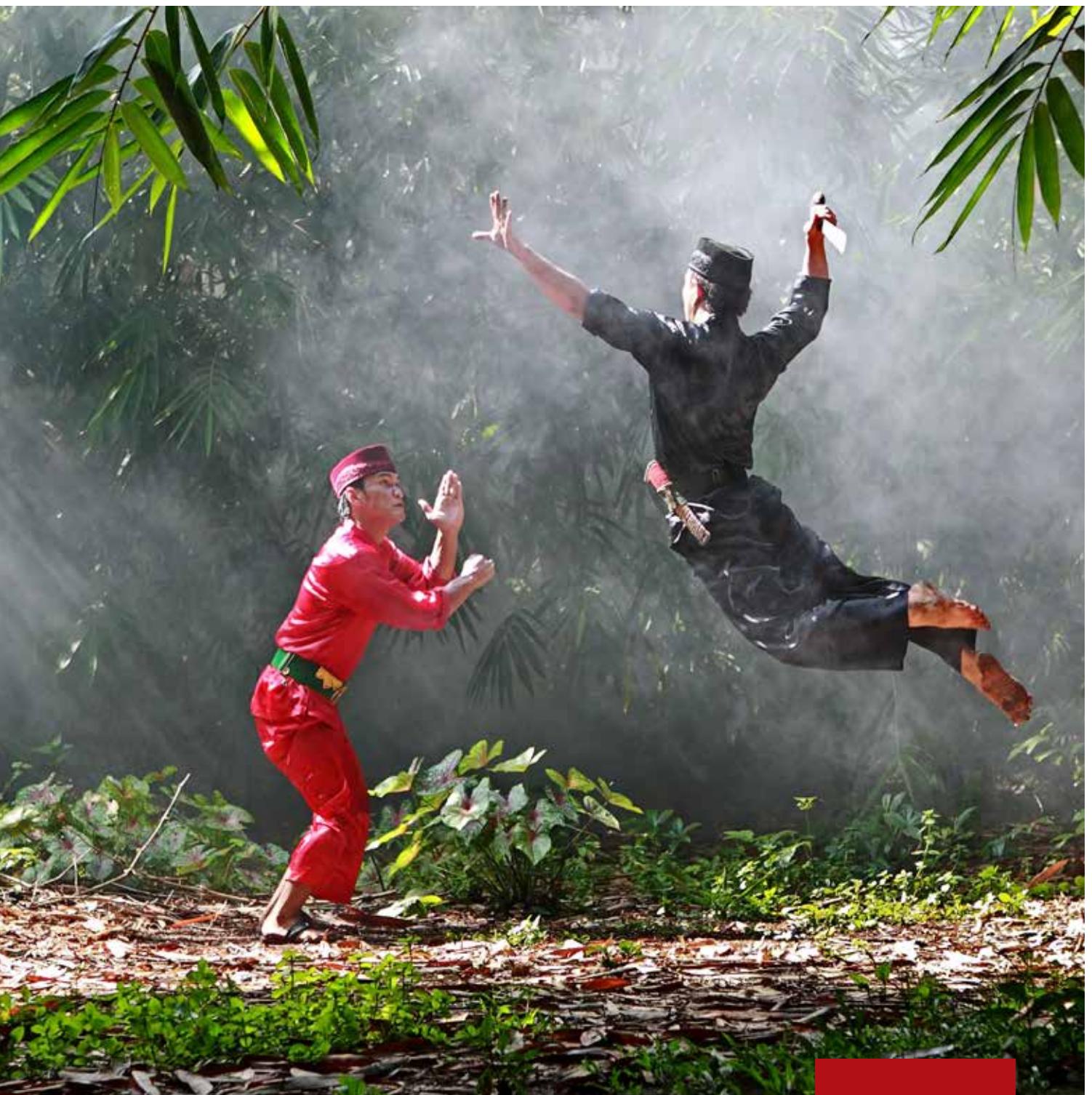
founding member. Indonesia sendiri mulai bergabung dalam AIIB pada 25 November 2014. Keterlibatan tersebut didasari atas pertimbangan agar Indonesia tetap berada dalam kancan forum kerjasama ekonomi dan keuangan negara kawasan (*regional*) serta dapat berperan strategis dalam manajemen AIIB. Indonesia berpandangan bahwa kerjasama dalam AIIB perlu didorong dalam semangat kebersamaan dan konsensus, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional masing-masing negara anggota AIIB.

Terakhir, agenda reformasi regulasi keuangan yang bergulir pada tataran global juga menjadi perhatian kerja sama negara kawasan (*regional*) khususnya EMEAP. Perhatian terutama diberikan pada reformasi regulasi yang dipandang berpotensi memengaruhi kelancaran fungsi institusi dan pasar keuangan di kawasan. Dalam hal ini, negara anggota EMEAP berkoordinasi untuk menyampaikan pandangan secara kolektif (*collective voice*) kepada regulator terkait. Salah satu di antaranya adalah rencana reformasi regulasi yang dilakukan oleh otoritas Amerika yang ditujukan untuk membatasi penempatan dana oleh bank-bank Amerika. Berdasarkan hasil penelitian anggota EMEAP, rencana pengaturan tersebut berpotensi memengaruhi pasar obligasi di kawasan, terutama *sovereign debt market*, di mana bank-bank AS saat ini merupakan pemain utama.



Keterangan gambar:

Sebagaimana layaknya seorang pesilat tangguh yang berusaha mempertahankan diri dari berbagai serangan, perekonomian nasional pada tahun 2014 berupaya memperkokoh stabilitas dan daya dukung ekonomi untuk merespon tantangan yang mengemuka.

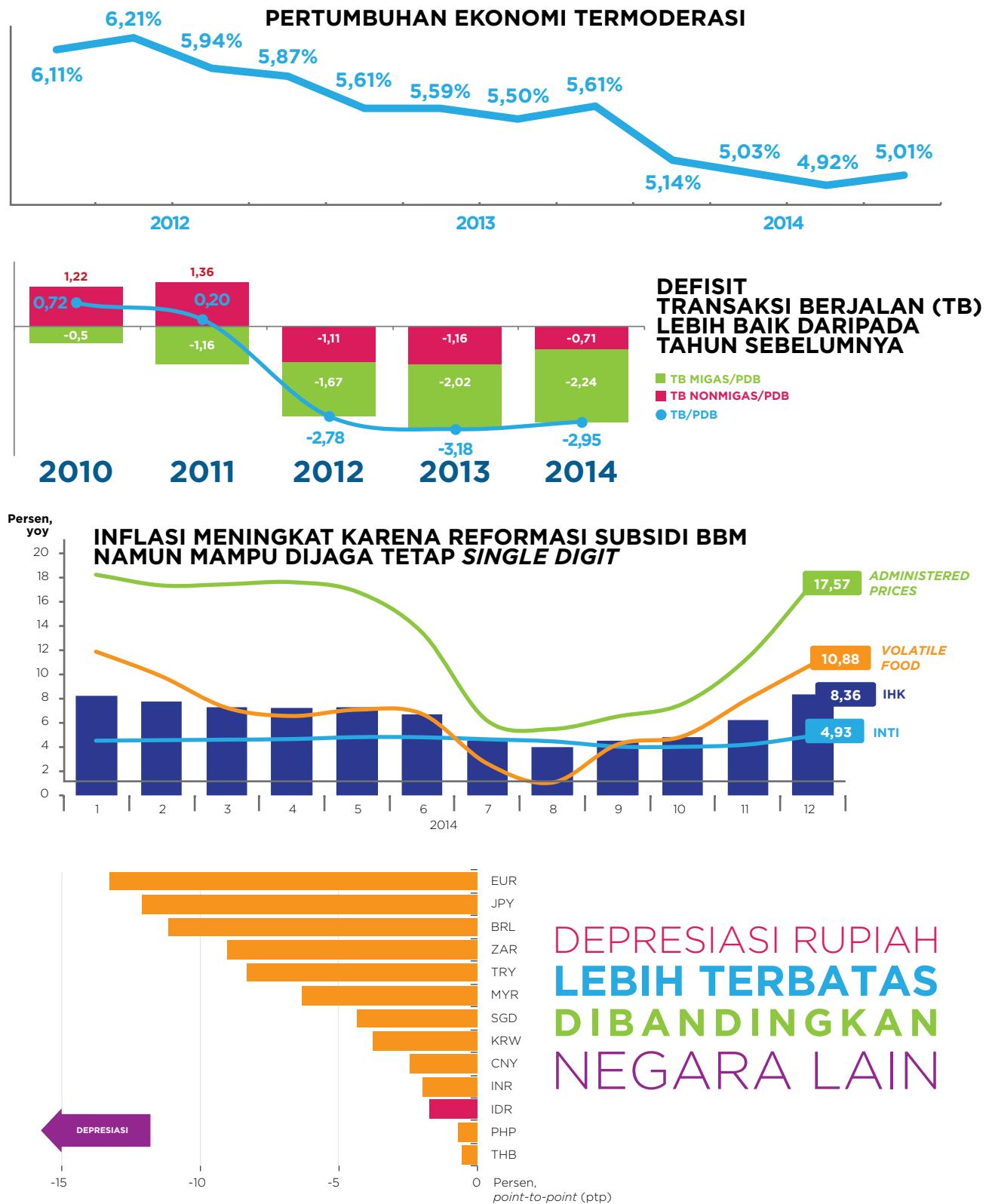


PEREKONOMIAN DOMESTIK

BAGIAN
2

INFOGRAFIS BAGIAN 2

PEREKONOMIAN DOMESTIK



Bagian II

PEREKONOMIAN DOMESTIK

Menghadapi perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif ditengah permasalahan struktural yang masih mengemuka, bauran kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah selama tahun 2014 mampu menjaga stabilitas perekonomian domestik. Kombinasi kebijakan moneter bias ketat yang dibarengi dengan kebijakan fiskal untuk menjaga sustainabilitas mampu membuat laju inflasi terkendali ditengah kenaikan BBM, defisit transaksi berjalan yang menyusut, surplus transaksi modal dan finansial meningkat, volatilitas nilai tukar yang menurun dan defisit fiskal yang terkendali. Namun, ditengah belum optimalnya reformasi struktural, perkembangan ekonomi global yang tidak sebaik perkiraan semula dan kebijakan stabilisasi makroekonomi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 5% pada tahun 2014. Meski demikian pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan negara ASEAN 5 sebesar 4,7%.

Sinergi kebijakan stabilisasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah berhasil mengarahkan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat. Perbaikan ekonomi global yang berjalan lambat dan penurunan harga komoditas di tengah struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh komoditas SDA telah memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor. Namun, kebijakan stabilisasi yang ditujukan untuk mengendalikan impor di tengah kondisi ekspor yang tertekan mampu menurunkan defisit transaksi berjalan. Di jalur keuangan, kuatnya keyakinan investor asing terhadap ketahanan dan prospek perekonomian Indonesia di tengah likuiditas global yang berlimpah berdampak pada surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan, bahkan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Perkembangan tersebut telah memperkuat kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), sehingga mampu menjaga ketahanan eksternal antara lain tercermin dari kemampuan cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban ULN jangka pendek yang meningkat.

Sejalan dengan perbaikan defisit transaksi berjalan serta konsistensi kebijakan untuk mengarahkan nilai tukar sesuai dengan fundamental perekonomian, stabilitas nilai tukar rupiah pada tahun 2014 tetap terjaga. Secara *point to point*, nilai tukar melemah 1,7% disertai dengan

volatilitas yang terus menurun di sepanjang tahun 2014. Perkembangan nilai tukar rupiah terutama dipicu oleh defisit transaksi berjalan yang masih berlanjut, ketidakpastian rencana normalisasi the Fed, serta dinamika politik nasional. Pada penghujung tahun 2014, upaya Bank Indonesia melalui *dual intervention* yang disertai dengan perkembangan positif dari struktur mikro pasar valas domestik dan pasar keuangan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan depresiasi yang meningkat.

Inflasi tahun 2014 tetap terkendali *single digit* di tengah tekanan inflasi *administered prices* dan *volatile food* yang meningkat, didukung oleh kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makro dan koordinasi dengan Pemerintah yang semakin solid. Tekanan inflasi pada 10 bulan pertama 2014 dapat dikendalikan, sehingga inflasi kembali bergerak menuju lintasan sasaran inflasi. Keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014 berdampak pada realisasi inflasi tahun 2014 yang melampaui sasaran yang telah ditetapkan sebesar $4,5\pm1\%$, yaitu mencapai 8,36%. Meski demikian, realisasi inflasi 2014 masih lebih rendah dari tahun lalu. Inflasi 2014 yang terkendali *single digit* juga didukung oleh perkembangan inflasi inti yang tetap terjaga.

Dinamika ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan dan kebijakan stabilisasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah berimbas pada perekonomian Indonesia tahun 2014 yang mengalami moderasi. Pertumbuhan ekonomi domestik melambat menjadi 5,0% dibandingkan dengan 5,6% pada tahun 2013 dan lebih rendah dibandingkan perkiraan pada awal tahun sebesar 5,5-5,9%. Selain bersumber dari perlambatan ekspor, moderasi ekonomi juga disebabkan oleh stimulus fiskal dalam perekonomian yang menurun sejalan dengan program penghematan belanja yang ditempuh Pemerintah. Secara spasial, moderasi ekonomi juga terlihat di seluruh kawasan, khususnya Kawasan Timur Indonesia (KTI) sejalan dengan ekspor komoditas SDA yang menurun, terutama karena melemahnya permintaan ekspor dari Tiongkok. Sejalan dengan perlambatan ekonomi, angka pengangguran sedikit meningkat. Namun, perkembangan harga yang terkendali sampai dengan bulan Oktober 2014 mampu membawa perbaikan bagi kondisi kemiskinan di tahun 2014.

Di tengah kondisi ekonomi global yang kurang kondusif dan pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat, Pemerintah mampu menjaga kesinambungan fiskal. Pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat serta harga komoditas yang menurun memberikan tekanan terhadap penerimaan negara. Sementara, kenaikan harga minyak dunia selama paruh pertama 2014 memberikan tekanan terhadap belanja melalui beban subsidi BBM yang meningkat. Perkembangan ini mendorong Pemerintah untuk menempuh kebijakan penghematan anggaran untuk memastikan agar defisit fiskal tidak melampaui target, sehingga dapat menjaga sustainabilitas fiskal. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014 untuk mengendalikan konsumsi dan beban subsidi BBM bersubsidi. Dengan respon tersebut, defisit fiskal 2014 tercatat mencapai 2,2% dari PDB, relatif sama dibandingkan dengan tahun 2013, namun lebih rendah dari target APBNP sebesar 2,4% dari PDB. Pencapaian tersebut juga dibarengi dengan defisit keseimbangan primer yang membaik menjadi 0,9% dari PDB dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,0% dari PDB.

Stabilitas sistem keuangan pada tahun 2014 tetap terkendali, ditopang oleh ketahanan perbankan yang tetap terjaga dan kinerja pasar keuangan yang membaik. Ketahanan industri perbankan tercermin pada risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Perkembangan tersebut tercermin dari indeks stabilitas sistem keuangan membaik menjadi 0,6 dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,1. Rasio NPL sedikit meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2013, namun masih pada level yang rendah di kisaran 2,0%. Risiko likuiditas yang sempat meningkat pada paruh pertama 2014, kembali menurun sejalan dengan ekspansi operasi keuangan Pemerintah yang disertai dengan kebijakan GWM-LDR. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal yang tinggi mencapai 19,6% mencerminkan daya tahan perbankan yang kuat. Kinerja pasar keuangan yaitu di pasar saham dan obligasi juga meningkat tercermin pada kenaikan IHSG dan penurunan yield SBN di seluruh tenor.

Kebijakan moneter melalui penetapan BI *rate* telah direspon melalui jalur ekspektasi inflasi, suku bunga, dan kredit. Kebijakan moneter bias ketat mampu mengarahkan ekspektasi inflasi yang terus menurun. Dari jalur suku bunga, transmisi ke suku bunga deposito terlihat lebih kuat dibandingkan dengan transmisi ke suku bunga kredit. Sejalan dengan kenaikan suku bunga kredit dan moderasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit pada tahun 2014 melambat menjadi 11,6% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 21,6%.

Pada tahun 2014, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah berjalan secara aman, efisien, dan andal untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sekaligus meningkatkan efisiensi perekonomian. Terjaganya keamanan sistem pembayaran antara lain tercermin dari *fraud APMK* (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dan rasio NPL kartu kredit yang menurun. Kebijakan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran tercermin pada nilai transaksi melalui sistem pembayaran ritel yang meningkat. Sementara, kinerja pengelolaan uang rupiah yang handal terlihat dari ketersediaan uang kartal dengan jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar. Rasio posisi kas meningkat menjadi 3,5 bulan *outflow* rata-rata dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 2,5 bulan didukung oleh peningkatan transaksi uang kartal antar bank (TUKAB) dan terjaganya kualitas uang rupiah yang diedarkan.

Ke depan, dengan fundamental ekonomi yang lebih kuat, implementasi bauran kebijakan moneter yang masih bias ketat serta kebijakan makroprudensial dan fiskal yang lebih akomodatif paska kenaikan harga BBM bersubsidi diharapkan dapat memiliki efek yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Reformasi subsidi yang telah diterapkan oleh Pemerintah memberikan ruang yang luas bagi belanja yang lebih produktif sehingga dapat memperkuat fundamental ekonomi. Selain itu, sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah untuk melaksanakan komitmen reformasi struktural diharapkan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang berkesinambungan dan berkualitas.

Halaman ini
sengaja dikosongkan



Keterangan gambar:

Minyak dan gas merupakan salah satu komponen ekspor Indonesia. Harga komoditas internasional, termasuk minyak dan gas bumi, yang masih dalam tren menurun turut menjadi faktor yang menekan kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014.



BAB 3

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Perekonomian Indonesia pada tahun 2014 mengalami moderasi pertumbuhan. Hal tersebut merupakan imbas dari dinamika ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan dan kebijakan stabilisasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Meskipun termoderasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0% pada tahun 2014, masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN 5 yang rata-rata sebesar 4,7%. Sejalan dengan termoderasinya pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran sedikit meningkat. Namun, kondisi kemiskinan dapat membaik sebagai dampak dari inflasi yang terkendali.

Dinamika ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia pada tahun 2014. Perbaikan kondisi ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan terlihat dari pemulihan ekonomi negara maju yang terbatas dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang melambat. Kondisi ini diperburuk oleh penurunan harga komoditas dunia, termasuk harga minyak pada paruh kedua 2014. Permintaan ekonomi global yang masih lemah dan harga komoditas global yang rendah berdampak pada kinerja ekspor Indonesia yang melambat. Hal ini terkait dengan struktur ekspor Indonesia masih bertumpu pada komoditas berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dengan negara tujuan utama ekspor adalah negara-negara berkembang.

Di sisi domestik, struktur ekonomi Indonesia masih rentan terkait reformasi struktural yang belum berjalan sesuai dengan harapan. Menghadapi struktur ekspor Indonesia yang masih bertumpu pada komoditas berbasis SDA, Pemerintah menempuh langkah reformasi di sektor pertambangan. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan, meskipun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala. Sementara di sisi fiskal, reformasi subsidi sektor energi berjalan lambat sehingga berdampak pada beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi. Hal ini menyebabkan ruang fiskal yang tersedia untuk belanja produktif menjadi terbatas.

Dihadapkan pada sejumlah tantangan tersebut, kebijakan ekonomi yang diupayakan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan terus mendorong reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Guna menghindari pemburukan pada neraca transaksi berjalan karena kinerja ekspor yang menurun, kebijakan stabilisasi dilakukan melalui pengendalian permintaan domestik dan nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya. Selanjutnya, kebijakan untuk mengurangi beban subsidi BBM melalui kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014 diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi belanja produktif pemerintah. Merespons kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, bauran kebijakan disesuaikan dengan melanjutkan kebijakan moneter bias ketat dalam rangka meredam ekspektasi inflasi paska kenaikan harga BBM.

Kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan dan struktur ekonomi Indonesia yang masih rentan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014. Ekonomi Indonesia pada 2014

tumbuh 5,0% lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,6% maupun dengan prakiraan Bank Indonesia pada awal tahun sebesar 5,5-5,9%. Tidak kondusifnya perkembangan ekonomi global yang mengakibatkan pelemahan kinerja ekspor merupakan sumber utama rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2014. Selain itu, adanya kendala dalam penerapan UU Minerba (Mineral dan Batu bara) yang menyebabkan terhentinya ekspor mineral tambang pada paruh pertama 2014 semakin memperlemah kinerja ekspor. Kondisi ini berpengaruh terhadap permintaan domestik terutama pada kinerja investasi nonbangunan dan pendapatan masyarakat di wilayah penghasil tambang.

Kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah turut memengaruhi pertumbuhan permintaan domestik yang melambat. Dari sisi domestik, konsumsi Pemerintah tumbuh terbatas terkait program penghematan belanja, sebagai dampak dari menurunnya penerimaan dan meningkatnya tekanan beban subsidi BBM. Konsumsi rumah tangga tumbuh melemah namun masih tetap tumbuh solid, ter dorong oleh aktivitas pelaksanaan Pemilu pada paruh pertama 2014. Investasi tumbuh melambat sebagai respons moderasi ekspor dan konsumsi rumah tangga pada paruh kedua tahun 2014, serta dampak dari kebijakan stabilisasi seperti suku bunga dan *Loan to Value* (LTV), terutama pada investasi bangunan. Dengan perkembangan ini, laju pertumbuhan impor pada 2014 dapat direndah walaupun masih sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan lapangan usaha, perlambatan ekonomi terjadi baik pada lapangan usaha *tradables* dan *nontradables*. Dari kelompok *tradable*, pelemahan terutama terjadi di lapangan usaha pertambangan sejalan dengan menurunnya permintaan ekspor batubara serta implementasi UU Minerba pada awal tahun. Melemahnya permintaan domestik dan menurunnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha *nontradables*, antara lain lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran, lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi, serta lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa.

Secara spasial, perlambatan ekonomi terjadi di seluruh kawasan, dengan perlambatan terbesar terjadi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terkait dengan menurunnya kinerja lapangan usaha pertambangan. Pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa yang juga melambat disebabkan oleh pertumbuhan investasi yang lebih rendah.

Meskipun tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2013, pertumbuhan ekonomi 2014 mampu dipertahankan sekitar 5%, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan negara ASEAN 5 sebesar 4,7%.

Sejalan dengan perlambatan tersebut, angka pengangguran sedikit mengalami peningkatan. Namun, kondisi kemiskinan mengalami perbaikan sebagai dampak dari perkembangan inflasi yang rendah sampai dengan Oktober 2014.

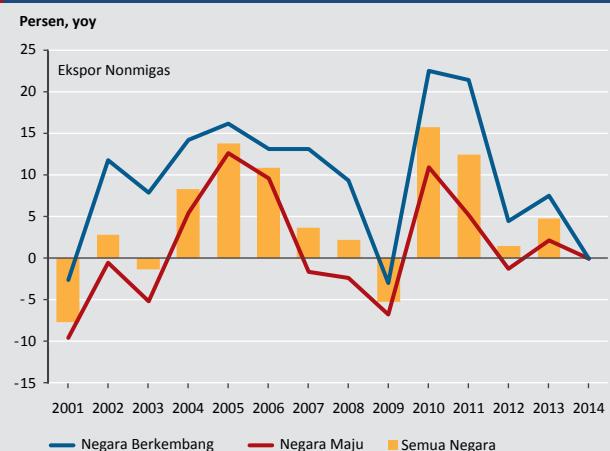
Pencapaian stabilitas perekonomian pada tahun 2014 tersebut perlu terus dijaga melalui penguatan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah. Selain itu, percepatan reformasi struktural yang terjadi pada 2014 harus dipertahankan sehingga mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Ke depan, perekonomian pada tahun 2015 diperkirakan tumbuh membaik sejalan dengan perkiraan kondisi ekonomi global yang membaik. Sementara di sisi domestik, pendorong pertumbuhan diperkirakan berasal dari investasi pemerintah terkait prospek proyek infrastruktur pemerintah yang meningkat.

3.1. PDB Penggunaan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 yang termoderasi didorong oleh dinamika ekonomi global yang kurang menguntungkan dan kebijakan stabilisasi, di tengah belum optimalnya reformasi struktural. Dinamika ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan berdampak pada menurunnya kinerja eksport. Selain itu, penerapan

Grafik 3.1. Eksport Nonmigas ke Negara Maju dan Negara Berkembang



UU Minerba turut memengaruhi penurunan eksport di lapangan usaha pertambangan. Menghadapi kinerja eksport yang menurun, ditempuh kebijakan stabilitasi melalui pengendalian permintaan domestik dan nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya, guna menghindari pemburukan pada neraca transaksi berjalan. Sebagai hasilnya, impor tumbuh rendah pada tahun 2014. Konsumsi rumah tangga tumbuh melambat meskipun terdapat dorongan aktivitas Pemilu pada paruh pertama 2014. Sementara, konsumsi Pemerintah tumbuh melambat terkait program penghematan belanja. Sebagai respons atas berlanjutnya pelemahan eksport serta melambatnya konsumsi rumah tangga, investasi tumbuh melambat. Berbagai kondisi tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia pada 2014 yang tumbuh 5,0%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,6% (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Pertumbuhan PDB Permintaan

	2011	2012	2013	2014					Total
				Q1	Q2	Q3	Q4	Total	
Konsumsi Rumah Tangga	5,1	5,5	5,4	5,4	5,1	5,1	5,0	5,1	5,1
Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT)	5,5	6,7	8,2	23,7	22,8	5,6	-0,2	12,4	
Konsumsi Pemerintah	5,5	4,5	6,9	6,1	-1,5	1,3	2,8	2,0	
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	8,9	9,1	5,3	4,7	3,7	3,9	4,3	4,1	
PMTB Bangunan	6,0	8,1	6,7	5,5	4,9	4,5	7,1	5,5	
PMTB Nonbangunan	17,1	11,7	1,6	2,4	0,6	2,1	-3,1	0,4	
Eksport	14,8	1,6	4,2	3,2	1,4	4,9	-4,5	1,0	
Impor	15,0	8,0	1,9	5,0	0,4	0,3	3,2	2,2	
Produk Domestik Bruto	6,2	6,0	5,6	5,1	5,0	4,9	5,0	5,0	

Sumber: BPS, diolah

Perlambatan kinerja ekspor pada tahun 2014 dipengaruhi oleh permintaan dari negara berkembang yang menurun dan permintaan dari negara maju yang masih terbatas (Grafik 3.1). Kondisi ini berdampak pada kinerja ekspor yang melambat karena struktur ekspor Indonesia masih bertumpu pada komoditas berbasis SDA dengan negara tujuan utama ekspor adalah negara berkembang. Selain itu, penerapan UU Minerba pada awal tahun berdampak pada ekspor komoditas mineral yang terhenti sampai dengan paruh pertama 2014.

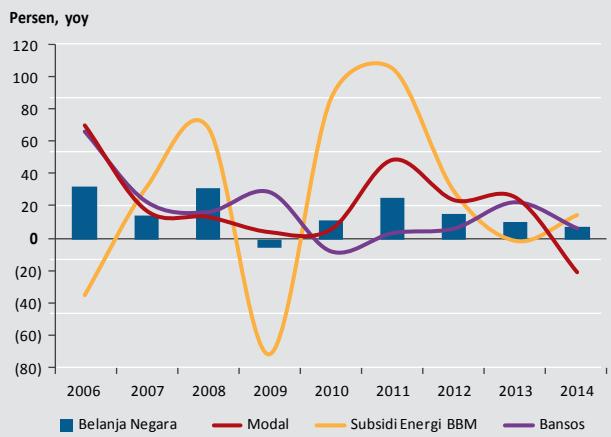
Ekspor komoditas berbasis SDA, terutama pertambangan mengalami penurunan pada tahun 2014. Ekspor batubara turun signifikan dipengaruhi oleh permintaan dari Tiongkok yang lebih rendah dan harga batubara yang menurun. Selain itu, ekspor komoditas pertambangan juga dipengaruhi oleh penerapan UU Minerba pada awal tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan melalui pembatasan ekspor mineral tambang mentah. Namun, penerapan kebijakan tersebut belum berjalan sesuai harapan, sehingga berdampak pada terhentinya ekspor komoditas mineral tambang hingga paruh pertama 2014. Ekspor mineral tambang baru dapat terealisasi pada triwulan III 2014, setelah tercapainya kesepakatan antara Pemerintah dan pelaku usaha terkait pembangunan pabrik pengolahan mineral tambang dan penurunan bea ekspor.

Ekspor manufaktur mengalami peningkatan sejalan dengan permintaan dari negara maju, khususnya AS yang mulai pulih. Komoditas manufaktur yang meningkat antara lain minyak kelapa sawit, makanan olahan dan produk kimia, sedangkan komoditas utama lainnya yaitu tekstil tumbuh melambat (Tabel 3.2). Untuk minyak kelapa sawit, peningkatan kinerja ekspor didukung oleh serapan dari India, Pakistan dan Eropa yang masih kuat.

Tabel 3.2. Ekspor Nonmigas Berdasarkan Komoditi

Komoditas Utama Ekspor	Pangsa		Pertumbuhan (% yoy)		
	2013	2014	2013	2014	
1. Tekstil dan Produk Tekstil	15,0	15,4	3,9	2,4	↓
2. Batubara	12,2	10,6	11,6	-13,7	↓
3. Peralatan Listrik	6,1	6,2	12,1	0,3	↓
4. Minyak Kelapa Sawit	5,3	5,8	6,3	8,4	↑
5. Barang dari Logam Dasar	4,6	4,8	-5,5	4,1	↑
6. Karet Olahan	4,7	4,0	-2,7	-15,7	↓
7. Makanan Olahan	2,8	3,2	2,3	12,2	↑
8. Udang	2,1	2,2	8,9	0,5	↓
9. Kayu Olahan	1,9	2,1	13,1	10,6	↓
10. Produk Kimia	1,7	1,9	-4,3	11,5	↑

Grafik 3.2. Pertumbuhan Komponen Belanja Pemerintah



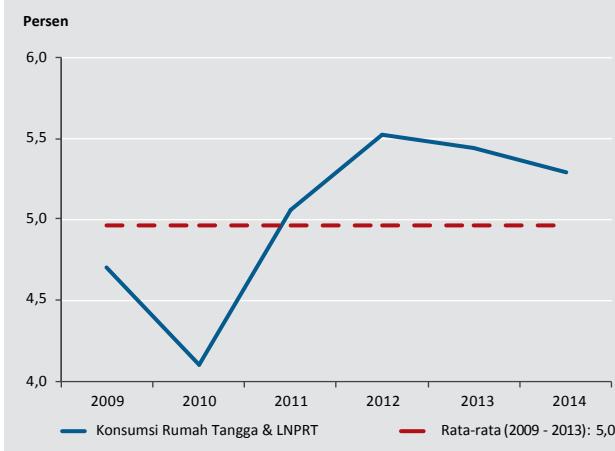
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Ekspor manufaktur yang meningkat juga didukung oleh prospek ekspor otomotif yang membaik. Pada tahun 2014, ekspor industri otomotif meningkat dengan pasar yang cukup terdiversifikasi. Hal ini berdampak pada membaiknya neraca perdagangan otomotif meskipun secara keseluruhan masih defisit. Defisit neraca perdagangan industri otomotif terutama bersumber dari impor suku cadang kendaraan bermotor, sementara untuk mobil utuh mengalami surplus. Selain itu, menurunnya defisit neraca perdagangan industri otomotif di dukung oleh membaiknya struktur input industri otomotif yaitu menurunnya kandungan impor.

Konsumsi Pemerintah pada tahun 2014 melambat akibat program penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menjaga kesinambungan fiskal. Beban subsidi BBM dan belanja wajib lain masih tinggi, sementara penerimaan fiskal menurun sejalan dengan perlambatan ekonomi domestik dan penurunan harga komoditas global. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran. Hal ini berdampak pada pertumbuhan konsumsi Pemerintah pada tahun 2014 yang lebih rendah menjadi 2,0% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 6,9%. Pertumbuhan belanja modal Pemerintah bahkan mengalami kontraksi pada tahun 2014 (Grafik 3.2). Sementara, reformasi subsidi energi pada akhirnya dilakukan Pemerintah pada November 2014 setelah Pemerintah mengurangi subsidi untuk BBM. Namun, dampak dari kebijakan itu terhadap stimulus fiskal pada tahun 2014 masih minimal dan diperkirakan baru berdampak signifikan pada tahun 2015.

Konsumsi rumah tangga (termasuk LNPRT) masih mampu tumbuh lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun terakhir

Grafik 3.3. PDB Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT

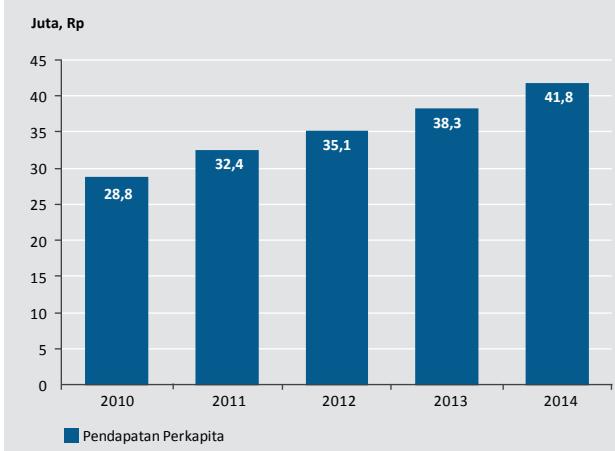


Sumber: BPS, diolah

(Grafik 3.3). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut masih cukup tinggi meskipun dampak dorongan Pemilu legislatif pada triwulan I 2014 dan Pemilu Presiden pada triwulan II 2014 tidak sekutu perkiraan semula.

Dari sisi daya beli, pendapatan per kapita Indonesia meningkat dari Rp38,3 juta menjadi Rp41,8 juta atau setara dengan 3.522,6 dolar AS (Grafik 3.4). Dengan tingkat pendapatan per kapita tersebut, Indonesia masih tergolong dalam kelompok negara berpenghasilan menengah bawah (*lower middle income*).¹ Daya beli yang terjaga ditopang oleh komposisi tenaga kerja yang membaik dan Upah

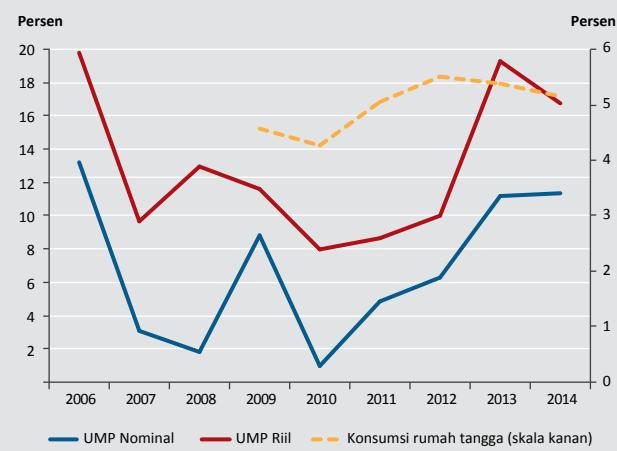
Grafik 3.4. Pendapatan Perkapita



Sumber: BPS, diolah

1 Menurut Bank Dunia, klasifikasi kelompok negara berdasarkan pendapatan perkapita adalah *low income* (≤ 1.005 dolar AS); *lower middle income* (1.006-3.975 dolar AS); *upper middle income* (3.976-12.275 dolar AS); and *high income* (≥ 12.276 dolar AS).

Grafik 3.5. Perkembangan Upah Minimum

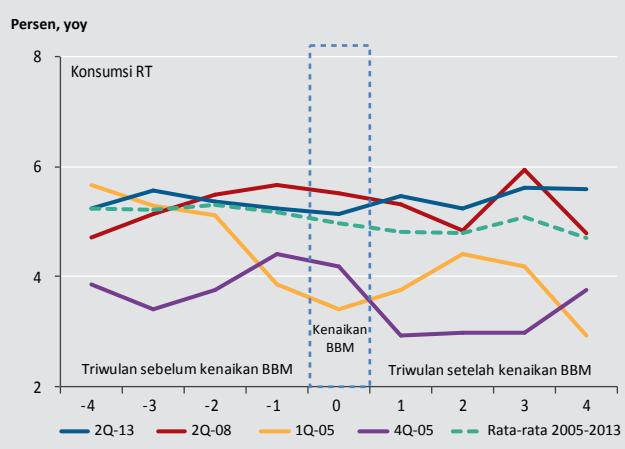


Sumber: Kemenakertrans, BPS, diolah

Minimum Provinsi (UMP) yang meningkat, terutama bagi masyarakat kelompok menengah ke bawah. Komposisi tenaga kerja yang membaik tercermin dari pangsa tenaga kerja formal yang meningkat, sehingga berdampak pada meningkatnya kelompok masyarakat berpendapatan tetap. Sementara di sisi penghasilan, UMP riil pada tahun 2014 secara rata-rata meningkat 16,7%, membaik dibandingkan dengan kenaikan tahun sebelumnya sebesar 14,0% (Grafik 3.5).

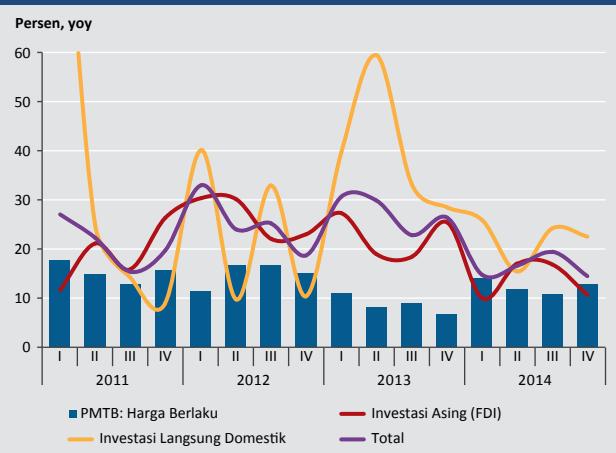
Konsumsi rumah tangga mulai termoderasi lebih dalam pada paruh kedua 2014 sejalan dengan perlambatan ekonomi serta hilangnya dampak Pemilu. Di samping itu, kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah. Berdasarkan rata-rata pola historis kenaikan BBM

Grafik 3.6. Periodogram Kenaikan BBM untuk Konsumsi RT



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.7. Realisasi Investasi BKPM



Sumber: BPS, BKPM, diolah

bersubsidi tahun 2005 - 2013, konsumsi rumah tangga akan tumbuh melambat pada triwulan yang bersangkutan sampai dengan dua triwulan setelahnya (Grafik 3.6).

Investasi pada tahun 2014 tumbuh melambat sebagai respons atas permintaan ekspor yang menurun serta moderasi konsumsi rumah tangga. Selain itu, kebijakan stabilisasi berupa suku bunga dan LTV berdampak pada kredit investasi yang menurun dan investasi bangunan yang termoderasi.² Pada saat yang bersamaan, dukungan belanja modal Pemerintah berkurang terkait program penghematan anggaran. Pertumbuhan investasi yang melambat bersumber dari investasi nonbangunan yang masih lemah dan investasi bangunan yang termoderasi. Pada investasi nonbangunan, melambatnya permintaan domestik dan menurunnya permintaan ekspor menyebabkan tertahannya respons pelaku usaha untuk menambah investasi. Sementara pada investasi bangunan, dampak dari penerapan kebijakan stabilisasi melalui LTV masih terasa pada tahun 2014. Melambatnya kinerja investasi juga tercermin dari realisasi investasi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) terutama pada semester I 2014 (Grafik 3.7).

Kinerja investasi juga dipengaruhi oleh faktor *wait and see* dari investor terkait Pemilu dan kemudahan melakukan investasi di Indonesia. Meskipun terdapat perbaikan peringkat dalam *Doing Business* 2015, kemudahan melakukan investasi di Indonesia masih di bawah *peer countries*.³ Indonesia menempati peringkat 114 dalam

2 Penjelasan tentang LTV dapat dilihat pada Bab 11. Kebijakan Makroprudensial.

3 Survei *Doing Business* 2015 merupakan asesmen terhadap kondisi ekonomi pada tahun 2014.

Tabel 3.3. Indikator Kemudahan Berusaha di Indonesia

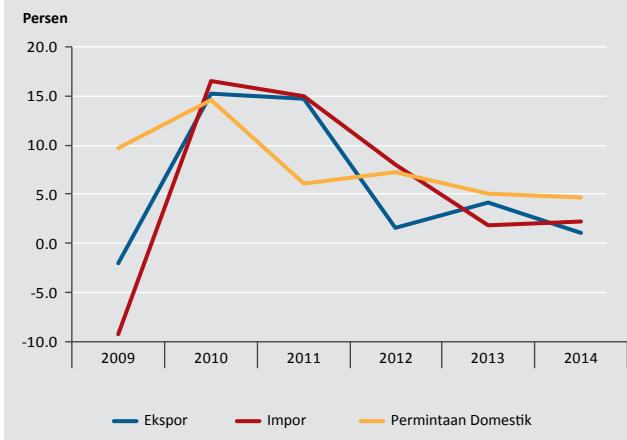
Indikator	Indonesia		
	2014	2015	
Peringkat <i>Doing Business</i>	120	114	↑
Memulai Bisnis	175	155	↑
Pengurusan IMB	88	153	↓
Permohonan Sambungan Listrik	121	78	↑
Pendaftaran Hak Merek	101	117	↓
Akses Kredit Perbankan	86	71	↑
Perlindungan Investor	52	43	↑
Pembayaran Pajak	137	160	↓
Perdagangan	54	62	↓
Kepatuhan Terhadap Kontrak	147	172	↓
Penyelesaian Kapailitan	144	75	↑

Sumber: *Doing Business* 2015

publikasi *Doing Business* 2015, membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menempati ranking 120 (Tabel 3.3). Namun, peringkat tersebut jauh di bawah negara-negara *peer* yaitu Malaysia (18), Thailand (26), Vietnam (78) dan Filipina (95). Selain itu, dari 10 indikator yang menjadi tolak ukur, lima diantaranya masih harus diperbaiki yaitu kemudahan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pendaftaran hak merek, pembayaran pajak, proses perdagangan ekspor dan kepatuhan terhadap kontrak.

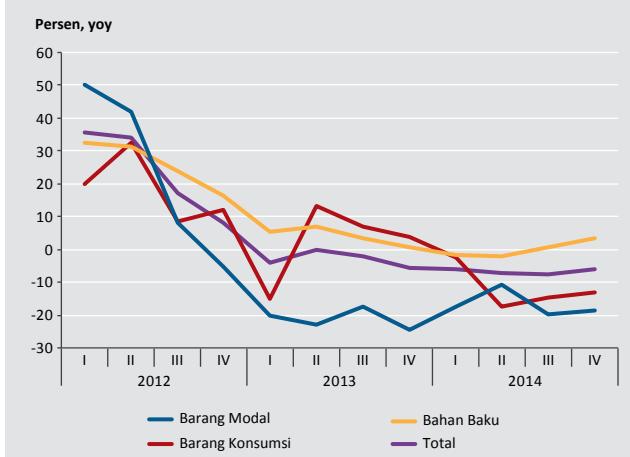
Impor tumbuh terbatas merespons penurunan kinerja ekspor dan melambatnya permintaan domestik. Impor pada tahun 2014 hanya tumbuh 2,2% (Grafik 3.8). Terbatasnya pertumbuhan impor ini sejalan dengan upaya stabilisasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam

Grafik 3.8. Pertumbuhan Impor dan Faktor yang Memengaruhi

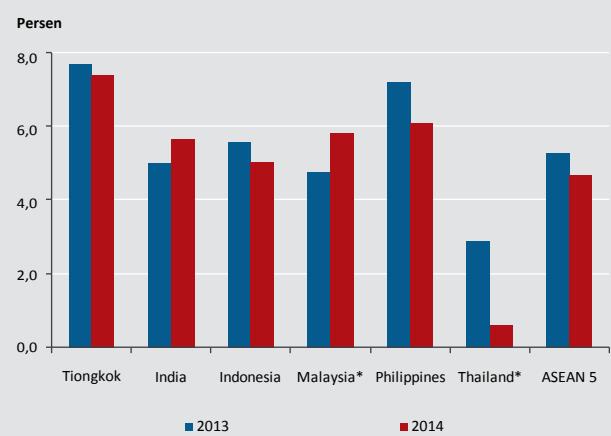


Sumber: BPS, diproses

Grafik 3.9. Impor Nonmigas Berdasarkan Jenis Barang



Grafik 3.10. Perekonomian Negara Kawasan



Sumber: IMF, CEIC, *Consensus Forecast Februari 2015

mengendalikan defisit transaksi berjalan. Dilihat dari komponennya, impor barang modal tumbuh negatif sepanjang tahun 2014 seiring terbatasnya investasi nonbangunan. Sementara, melemahnya konsumsi rumah tangga berdampak pada menurunnya impor barang konsumsi. Namun demikian, impor bahan baku mulai tumbuh positif pada triwulan III 2014 (Grafik 3.9). Hal ini

mengindikasikan masih kuatnya ketergantungan produsen dalam negeri akan bahan baku impor.

Secara keseluruhan, di tengah kondisi perekonomian global yang kurang menguntungkan dan implementasi kebijakan stabilitasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, ekonomi Indonesia masih mampu

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDB Penawaran

	2011	2012	2013	2014					Total
				Q1	Q2	Q3	Q4	Total	
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,9	4,6	4,2	5,3	5,0	3,6	2,8	4,2	
Pertambangan dan Penggalian	4,3	3,0	1,7	-2,0	1,1	0,8	2,2	0,5	
Industri Pengolahan	6,3	5,6	4,5	4,5	4,8	5,0	4,2	4,6	
Listrik, Gas, dan Pengadaan Air *	5,6	9,6	5,1	3,3	6,2	5,7	6,2	5,4	
Konstruksi	9,0	6,6	6,1	7,2	6,5	6,5	7,7	7,0	
Perdagangan Besar, Eceran, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**	9,2	5,6	5,1	6,2	5,3	5,0	3,7	5,0	
Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi***	9,2	9,8	9,4	9,2	9,5	8,9	8,7	9,1	
Jasa Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan****	7,7	8,4	7,9	5,0	5,9	4,2	8,3	5,9	
Jasa-jasa Lainnya*****	5,3	5,5	7,2	5,6	5,1	3,3	6,1	7,1	
Pajak Dikurang Subsidi atas Produk	19,6	15,0	22,1	12,9	2,9	6,0	-0,2	5,1	
Produk Domestik Bruto	6,2	6,0	5,6	5,1	5,0	4,9	5,0	5,0	

Sumber: BPS

*) Penggabungan 2 lapangan usaha yaitu (i) Pengadaan Listrik dan Gas dan (ii) Pengadaan Air

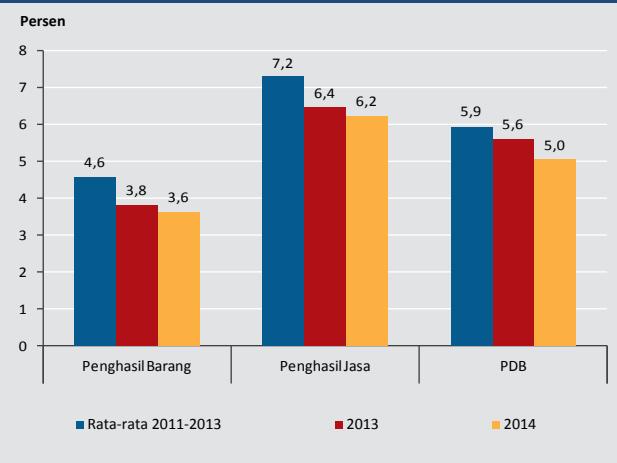
**) Penggabungan 2 lapangan usaha yaitu (i) Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Motor serta (ii) Penyediaan akomodasi dan makan minum

***) Penggabungan 2 lapangan usaha yaitu (i) Transportasi dan Pergudangan serta (ii) Informasi dan Komunikasi

****) Penggabungan 3 lapangan usaha yaitu (i) Jasa Keuangan, (ii) Real Estate dan (iii) Jasa Perusahaan

*****) Penggabungan 4 lapangan usaha yaitu (i) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (ii) Jasa Pendidikan, (iii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya dan (iv) Jasa Lainnya

Grafik 3.11. Pertumbuhan Lapangan Usaha Penghasil Barang dan Penghasil Jasa



Sumber: BPS, diolah

tumbuh cukup tinggi dibandingkan dengan negara kawasan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0% pada tahun 2014 masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN 5 yaitu rata-rata sebesar 4,7% (Grafik 3.10).⁴

3.2. PDB Lapangan Usaha

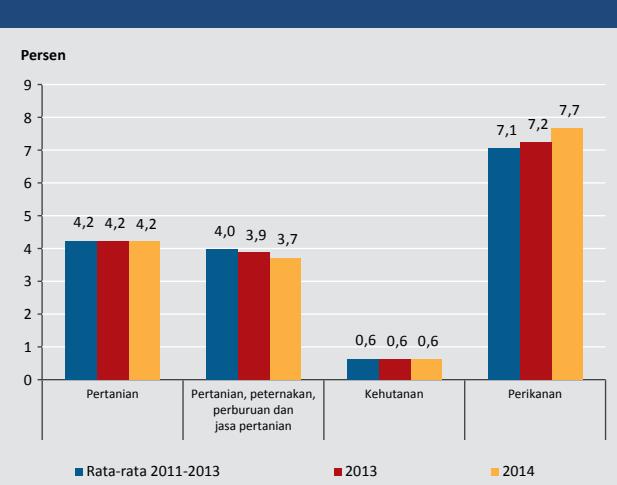
Dari sisi produksi, selain perlambatan pada lapangan usaha pertambangan, perlambatan kinerja juga terjadi di lapangan usaha jasa. Pada lapangan usaha barang, pelemahan yang cukup dalam terjadi pada lapangan usaha

pertambangan. Perlambatan pertumbuhan lapangan usaha pertambangan disebabkan oleh permintaan ekspor batubara yang menurun dan penerapan UU Minerba di awal tahun. Sementara, lapangan usaha industri tumbuh sedikit lebih tinggi sejalan dengan permintaan ekspor manufaktur yang membaik. Di lapangan usaha jasa, moderasi pertumbuhan terutama pada lapangan usaha perdagangan dan akomodasi makanan minuman, lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi, serta lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa, seiring dengan permintaan domestik dan ekspor yang melambat (Tabel 3.4 dan Grafik 3.11).

Lapangan usaha pertanian tumbuh stabil pada tahun 2014 di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung (Grafik 3.12). Di sub lapangan usaha tanaman bahan pangan (Tabama), produksi padi turun 0,94% dari tahun 2013, namun produksi pangan lain seperti jagung dan kedelai meningkat masing-masing sebesar 3,3% dan 18,1% (berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II-BPS). Produksi padi yang menurun dipengaruhi oleh faktor cuaca dan konversi lahan pertanian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencetakan lahan pertanian baru.

Kinerja lapangan usaha pertambangan melambat pada 2014 disebabkan oleh permintaan ekspor batubara yang menurun dan kebijakan pembatasan ekspor mineral tambang mentah (Grafik 3.13). Kinerja sub lapangan usaha batubara yang menurun dipengaruhi oleh turunnya harga batubara dan permintaan dari Tiongkok yang lemah. Di sisi lain, pemberlakuan UU Minerba berdampak pada menurunnya kinerja sub lapangan usaha pertambangan tembaga, bauksit, nikel, dan bijih besi.

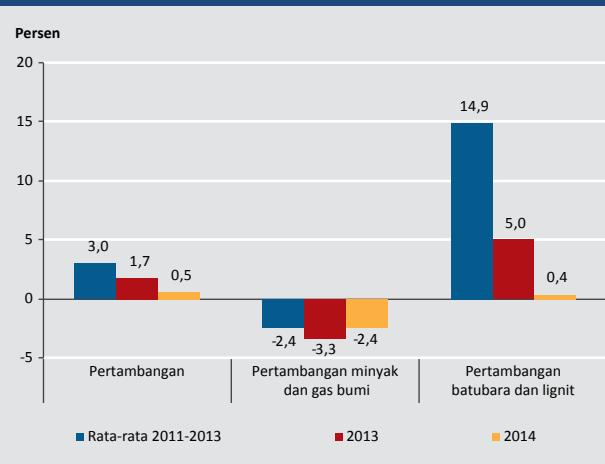
Grafik 3.12. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: BPS, diolah

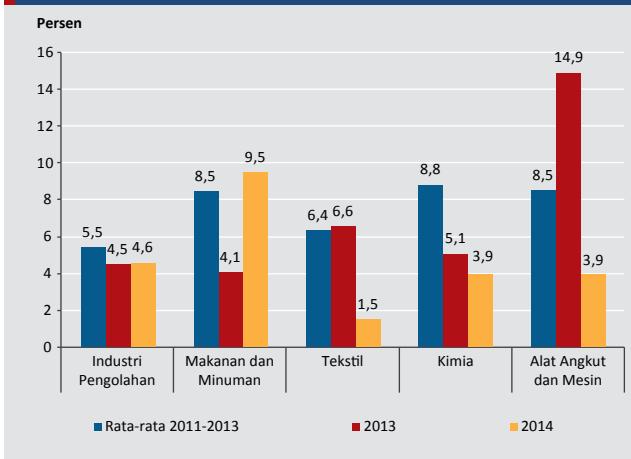
4 ASEAN 5 adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Grafik 3.13. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.14. Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan

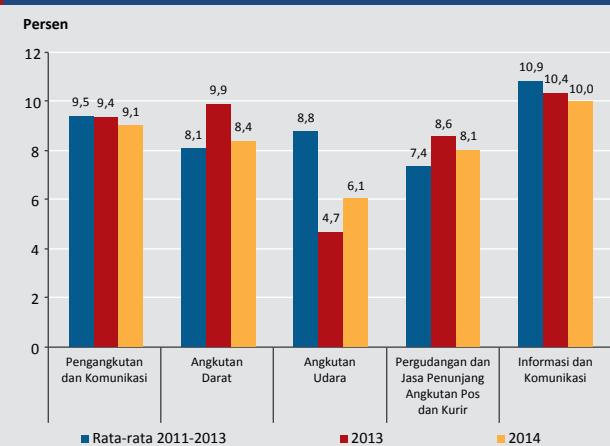


Sumber: BPS, diolah

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2014 tumbuh membaik menjadi 4,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,5% (Grafik 3.14). Perbaikan tersebut dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga (RT) yang meningkat pada semester I 2014 karena faktor Pemilu dan permintaan ekspor manufaktur yang membaik. Kinerja industri pengolahan yang membaik antara lain ditopang oleh sub lapangan usaha makanan dan minuman yang meningkat sejalan dengan eksport minyak kelapa sawit (*crude palm oil /CPO*) yang masih kuat. Selain itu, eksport sub lapangan usaha alat angkutan yaitu eksport mobil mengalami peningkatan.

Perlambatan pertumbuhan juga terjadi di lapangan usaha penghasil jasa. Kinerja lapangan usaha penghasil jasa masih tumbuh kuat pada paruh pertama 2014 dipengaruhi

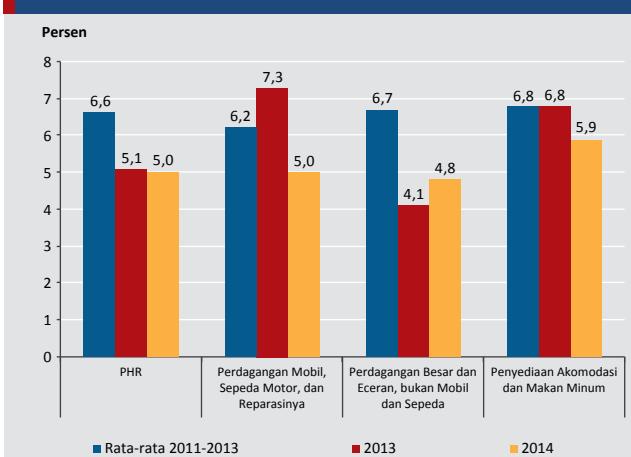
Grafik 3.16. Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi, Pergudangan Informasi dan Komunikasi



Sumber: BPS, diolah

oleh Pemilu, kemudian melambat di paruh kedua 2014. Secara keseluruhan tahun 2014, kinerja lapangan usaha perdagangan dan penyediaan akomodasi makan minum tumbuh melambat sejalan dengan permintaan domestik serta perdagangan ekspor yang melambat (Grafik 3.15). Pemilu hanya berdampak temporer terutama tercermin pada peningkatan kinerja sub lapangan usaha penyediaan akomodasi pada paruh pertama 2014. Pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha informasi dan komunikasi, yang melambat bersumber dari moderasi pertumbuhan di sub lapangan usaha komunikasi (Grafik 3.16). Moderasi yang terjadi bersumber dari komunikasi suara dan *short messaging service (SMS)* yang menurun, sementara komunikasi data cenderung stabil.

Grafik 3.15. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

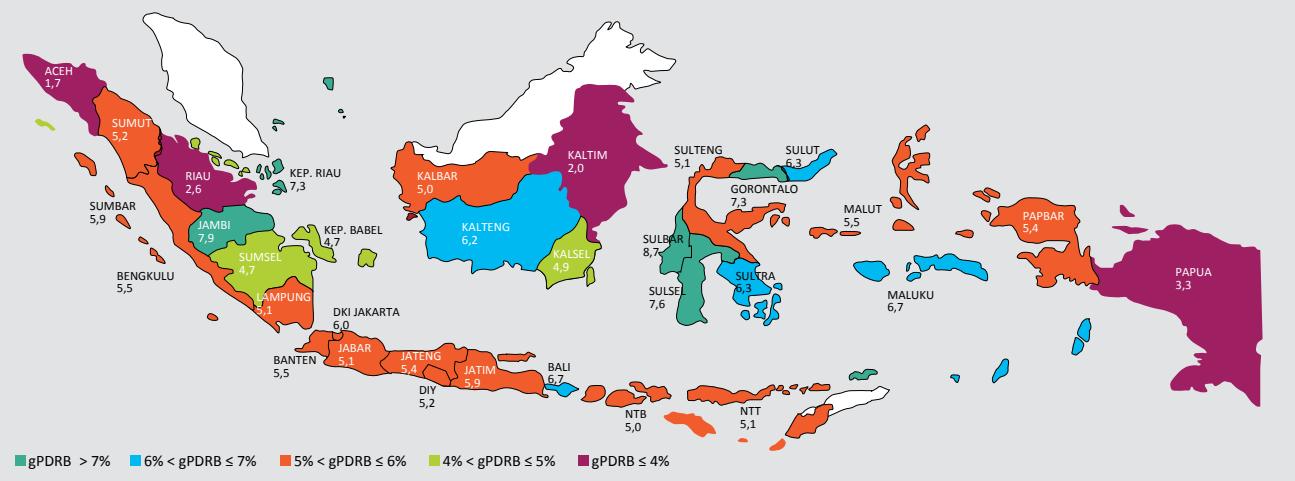


Sumber: BPS, diolah

3.3. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Moderasi ekonomi nasional juga tercermin dari melambatnya ekonomi di seluruh kawasan, khususnya di Kawasan Indonesia Timur (KTI) dan Jawa. Ekonomi KTI dan Jawa tercatat tumbuh masing-masing 6,0% dan 5,5% pada 2014, lebih rendah dari 7,9% dan 6,1% pada 2013. Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 4,7% pada 2014, setelah pada tahun sebelumnya tumbuh 5,3%. Sementara itu, laju pertumbuhan Kalimantan terendah pada 2014, meski mencatatkan perlambatan paling moderat dibandingkan dengan kawasan lain. Perekonomian Kalimantan tumbuh sebesar 3,2% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,5%. Perkembangan tersebut, menunjukkan selain adanya

Gambar 3.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional 2014 (Diolah Berdasarkan PDRB Tahun Dasar 2010)



Sumber: BPS, diolah

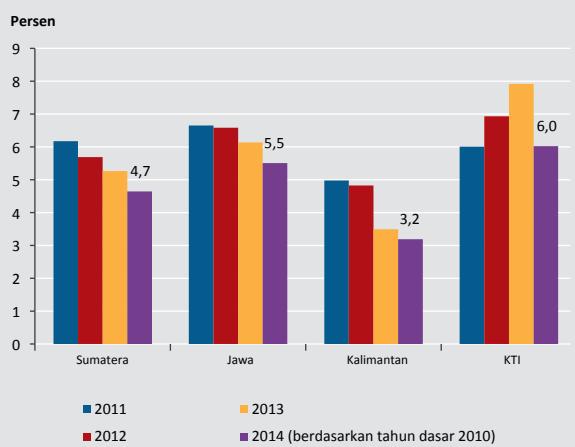
dinamika secara spasial (Gambar 3.1), juga terdapat dinamika antar waktu (Grafik 3.17).

Melambatnya ekonomi regional terutama bersumber dari penurunan kinerja ekspor dan investasi. Perlambatan ekonomi di kawasan luar Jawa (Sumatera, Kalimantan, dan KTI) secara spesifik merupakan imbas dari turunnya nilai ekspor komoditas SDA tambang serta volume ekspor sebagai dampak penerapan UU Minerba (Grafik 3.18). Terbatasnya pemulihan ekonomi global menahan perbaikan kinerja ekonomi Jawa yang dominan ditopang oleh ekspor produk industri manufaktur. Lemahnya permintaan dan efek moderasi ekonomi luar Jawa turut memberikan tekanan pada kinerja manufaktur Jawa (Grafik 3.19). Investasi di sebagian besar kawasan tumbuh melambat yang terkonfirmasi dari penurunan

pertumbuhan kredit investasi terutama di kawasan luar Jawa.

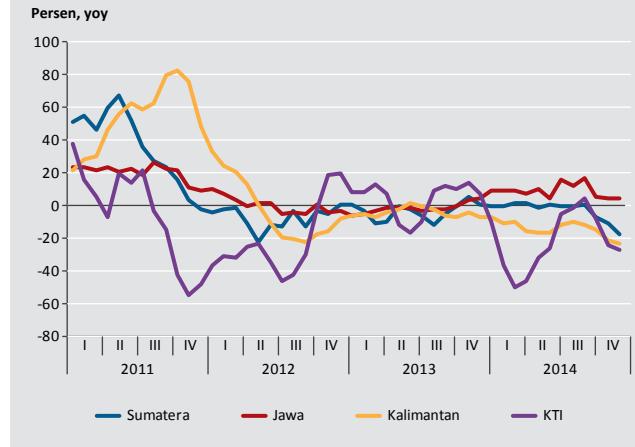
Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih relatif kuat di sebagian besar kawasan seperti tercermin pada indeks keyakinan konsumen (Grafik 3.20). Masih kuatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan terjaganya tingkat pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja, serta adanya dukungan belanja Pemilu. Peningkatan konsumsi juga didukung oleh bertambahnya kelas menengah yang relatif memiliki daya beli lebih tinggi, khususnya di Jawa. Relatif lebih lemahnya konsumsi rumah tangga di kawasan luar Jawa dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan dari kegiatan eksplorasi SDA tambang.

Grafik 3.17. Pertumbuhan Ekonomi Regional (Diolah Berdasarkan PDRB Tahun Dasar 2000)



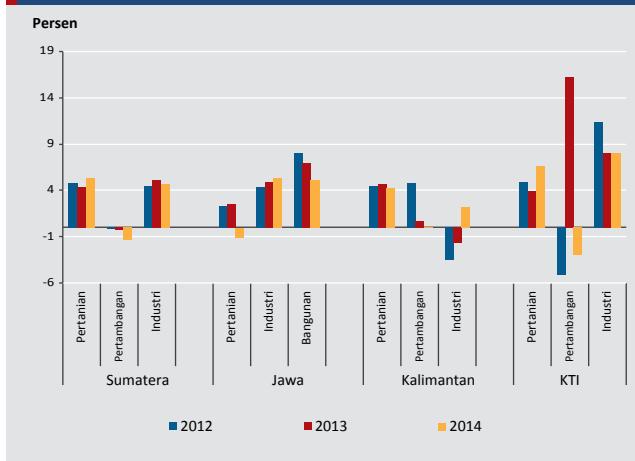
Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.18. Perkembangan Ekspor Regional



Sumber: BPS, diolah menggunakan kumulatif rata-rata berjalan

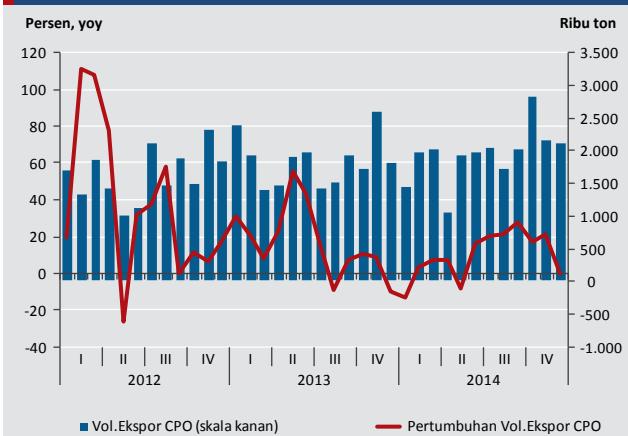
Grafik 3.19. Kinerja Pertumbuhan Sektor Utama Regional (Diolah Berdasarkan Tahun Dasar 2000)



Sumber: BPS, diolah

Perlambatan ekonomi Sumatera bersumber dari turunnya kinerja lapangan usaha pertambangan dan industri. Terkontraknya pertumbuhan di lapangan usaha pertambangan terutama sebagai akibat dari penurunan produksi minyak dan gas di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Riau dan Sumatera Bagian Selatan. Salah satunya adalah diakhirnya pengoperasian lapangan gas alam Arun di NAD yang telah beroperasi selama 36 tahun terakhir. Terus menurunnya *lifting* minyak di Riau dengan semakin menuanya usia sumur produksi turut mengurangi kinerja lapangan usaha pertambangan di Sumatera. Pertumbuhan lapangan usaha industri juga melambat di Sumatera sebagai pengaruh dari terbatasnya ekspansi investasi pada industri pengolahan hasil perkebunan yang terkonfirmasi oleh penurunan pertumbuhan impor barang modal. Terbatasnya permintaan global terhadap minyak kelapa

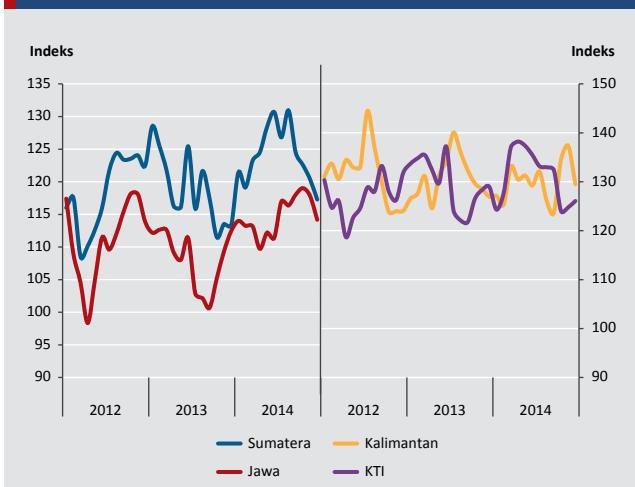
Grafik 3.21. Ekspor CPO di Sumatera dan KTI



sawit dan karet pada tahun 2014 juga berpengaruh pada melambatnya kinerja lapangan usaha industri (Grafik 3.21). Di sisi lain, kinerja lapangan usaha perkebunan membaik dengan volume yang meningkat moderat, sejalan dengan adanya perluasan area tanam kelapa sawit. Produksi tandan buah segar (TBS) yang lebih tinggi terindikasi di Riau dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk tabama, peningkatan kinerja terjadi di Bengkulu dan Lampung.

Melambatnya perekonomian KTI juga dikontribusi oleh turunnya kinerja lapangan usaha pertambangan (Grafik 3.22). Dua komoditas mineral tambang yang secara signifikan terkena dampak adalah tembaga dan nikel. Larangan ekspor kedua komoditas tambang tersebut secara khusus berdampak pada penurunan kinerja perekonomian Papua dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang didominasi oleh ekspor tembaga, serta di Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh ekspor nikel.⁵ Dukungan pada perekonomian KTI berasal dari lapangan usaha industri yang tumbuh relatif stabil dengan dukungan dari industri terigu di Sulawesi Selatan dan pengoperasian pabrik olahan CPO di Sulawesi Barat. Pembangunan proyek infrastruktur di KTI turut berpengaruh positif pada kinerja produksi industri semen di Sulawesi yang telah melakukan penambahan kapasitas produksi pada tahun 2013. Lapangan usaha pertanian juga berkontribusi pada perekonomian KTI dengan meningkatnya produksi tabama yang didukung oleh penguatan infrastruktur irigasi.

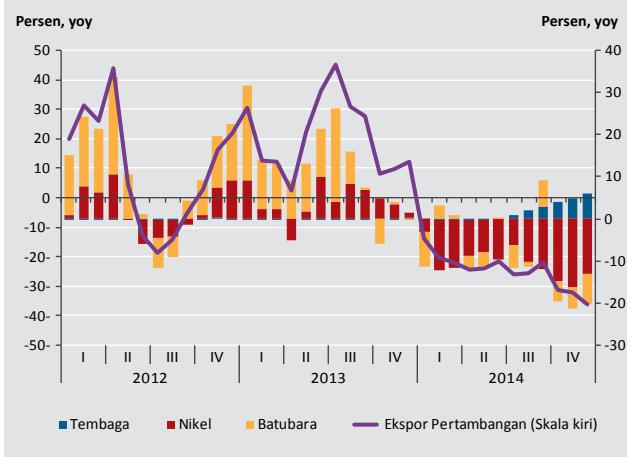
Grafik 3.20. Indeks Keyakinan Konsumen Regional



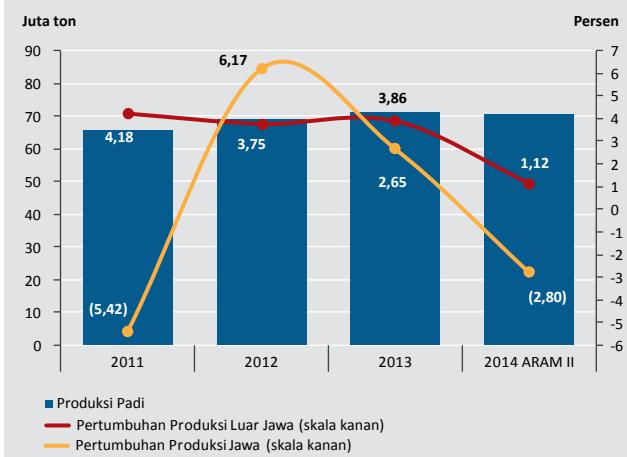
Sumber: BPS

5 Dampak larangan ekspor mineral mentah secara signifikan terindikasi di Provinsi NTB yang tumbuh sebesar 5,0% di 2014, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di 2013 (5,7% dengan tahun dasar 2000). Demikian halnya, Provinsi Papua hanya tumbuh sebesar 3,3% di 2014, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 14,8% (tahun dasar 2000).

Grafik 3.22. Volume Ekspor Tambang di Sumatera dan KTI



Grafik 3.23. Perkembangan Produksi Padi



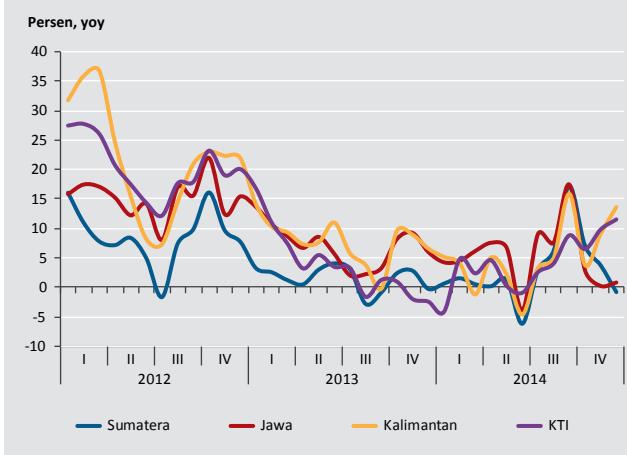
Sumber: BPS, diolah

Moderasi perekonomian Kalimantan dipengaruhi oleh kinerja ekspor batubara yang menurun. Penurunan ekspor batubara terutama disebabkan oleh melemahnya permintaan ekspor dari Tiongkok, sejalan dengan melambatnya perekonomian di negara tersebut. Pangsa ekspor ke Tiongkok yang mencapai 28% dari total ekspor batubara Indonesia, sebagian besar dipasok oleh Kalimantan. Turunnya produktivitas sumur minyak dan gas seperti di Blok Mahakam dan Sanga-sanga juga sangat memengaruhi kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, tercatat adanya peningkatan investasi pada eksplorasi, pengembangan dan produksi di lapangan usaha hulu migas pada 2014.⁶ Hal ini mendukung meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri di Kalimantan. Selain itu, juga terdapat sejumlah smelter sedang dalam tahap pembangunan untuk mendukung peningkatan nilai tambah ekspor mineral tambang. Di lapangan usaha pertanian, terjadi penurunan kinerja pada produksi tabama akibat adanya gagal panen di sejumlah sentra produksi khususnya di Kalimantan Barat.

Dengan pangsa ekonomi terbesar secara nasional (57% pada tahun dasar 2010), melambatnya perekonomian Jawa sangat berpengaruh. Perlambatan ekonomi Jawa pada 2014 terjadi di keseluruhan wilayah, terutama sebagai pengaruh menurunnya kinerja pada lapangan usaha pertanian dan bangunan. Menurunnya lapangan usaha pertanian disebabkan oleh penurunan produksi padi pada 2014 yang relatif dalam dengan adanya lahan

puso akibat banjir (Grafik 3.23). Wilayah yang paling terpengaruh bencana banjir adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah.⁷ Lapangan usaha konstruksi di Jawa juga tumbuh melambat, sejalan dengan melemahnya investasi properti pada tahun Pemilu dan terbatasnya pembangunan infrastruktur. Selain terkait dengan kebijakan pengetatan LTV dan Kredit Pemilikan Rakyat *indent* yang dimaksudkan untuk menjaga tingkat risiko kredit properti, juga terdapat faktor kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang relatif tinggi di sebagian besar wilayah di Jawa. Pada sisi infrastruktur, pembangunan fisik sejumlah proyek infrastruktur dalam skala besar di Jawa mengalami kendala

Grafik 3.24. Perkembangan Konsumsi Semen Kawasan

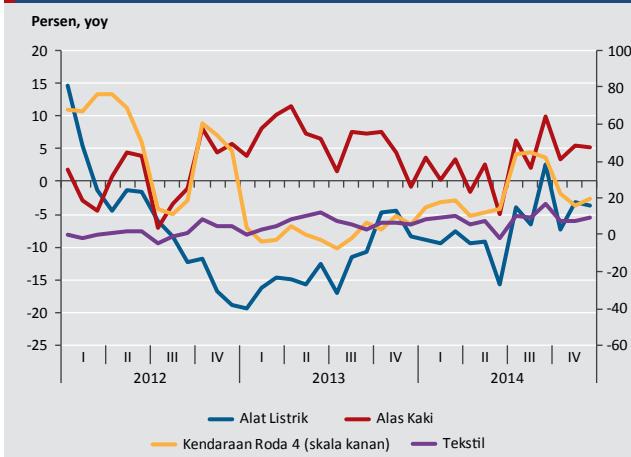


Sumber: BPS, diolah menggunakan kumulatif rata-rata berjalan

6 Investasi di lapangan usaha hulu migas yang sebagian besar di KTI, meningkat sekitar 32% pada 2014. Peningkatan pada kegiatan eksplorasi mencapai 3,84 miliar dolar AS, terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

7 Perekonomian Provinsi Jawa Tengah mengalami perlambatan terdalam di Jawa dengan tumbuh sebesar 5,4%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di 2013 yang tercatat sebesar 5,8% (tahun dasar 2000).

Grafik 3.25. Perkembangan Nilai Ekspor Manufaktur Kawasan Jawa dan Jakarta

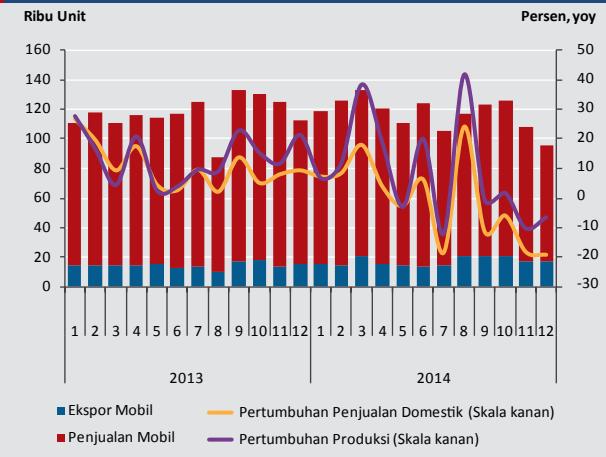


Sumber: BPS, diolah menggunakan kumulatif rata-rata berjalan

terkait dengan pembebasan lahan. Penurunan kinerja lapangan usaha konstruksi di Jawa terkonfirmasi dari konsumsi semen yang melambat (Grafik 3.24). Spesifik di Jakarta, masih berlanjutnya moratorium *mall* dan semakin mahal serta terbatasnya lahan di Jakarta, turut memengaruhi investasi properti komersial.

Meski terjadi perlambatan ekonomi di Jawa, kinerja lapangan usaha industri yang dominan mengalami sedikit perbaikan, didukung oleh industri manufaktur di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Peningkatan konsumsi domestik dengan adanya belanja Pemilu terindikasi di sebagian besar wilayah. Membaiknya permintaan ekspor juga menjadi faktor peningkatan lapangan usaha industri (Grafik 3.25). Produk manufaktur berorientasi ekspor yang tumbuh meningkat, diantaranya adalah bahan kimia, makanan dan minuman yang dominan di Jawa Timur, serta produk kendaraan bermotor yang tersebar di Jakarta dan daerah sekitarnya yang termasuk dalam wilayah Jawa Barat (Grafik 3.26). Meski tumbuh meningkat, investasi

Grafik 3.26. Perkembangan Produksi Kendaraan Bermotor Jabodetabek



Sumber: CEIC, diolah

pada lapangan usaha industri di Jawa relatif terbatas dan terdapat tekanan dari kenaikan biaya produksi yang berasal dari komponen upah, logistik, energi (tarif tenaga listrik dan gas), serta bahan baku impor. Selain itu, sejumlah masalah struktural terkait kelancaran perdagangan antar daerah, khususnya pada sistem logistik dan distribusi serta kondisi infrastruktur juga belum sepenuhnya teratas. Hal ini menjadi tantangan dalam peningkatan daya saing lapangan usaha industri di Jawa untuk mampu tumbuh lebih tinggi.

3.4. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

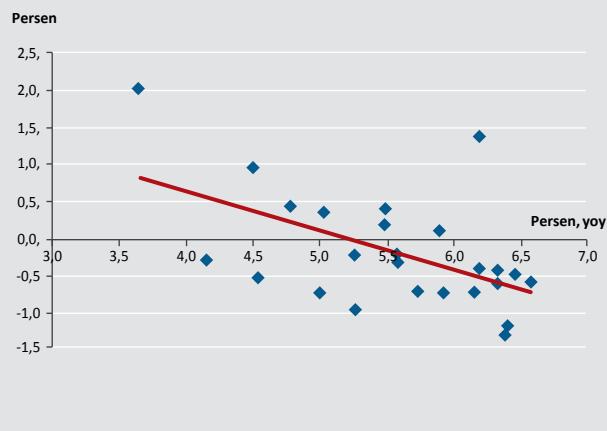
Moderasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 menurunkan daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja. Tren penurunan tingkat pengangguran yang telah terjadi sejak 2005 mulai tertahan dan justru mengalami sedikit peningkatan pada Agustus 2014. Tingkat

Tabel 3.5. Angkatan Kerja dan Pengangguran

No	Kegiatan Utama	2012		2013		2014	
		Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
1	Penduduk Usia Produktif (usia 15 tahun ke atas)	172,9	177,5	178,8	180,0	181,2	183,0
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,7	67,8	69,2	66,8	69,2	66,6
2	Angkatan Kerja	120,4	120,3	123,6	120,2	125,3	121,9
	Jumlah Total Pekerja	115,1	113,0	116,4	112,8	118,2	114,6
	- Pekerja Penuh (%)	64,0	64,7	64,5	62,4	64,8	64,7
	- Pekerja Paruh Waktu (%)	17,6	18,6	18,5	22,3	21,1	21,4
	- Setengah Pengangguran (%)	12,1	10,6	11,1	9,2	8,4	7,9
	- Pengangguran Terbuka (%)	6,2	6,1	5,8	6,2	5,7	5,9

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.27. Estimasi Okun's Law Indonesia



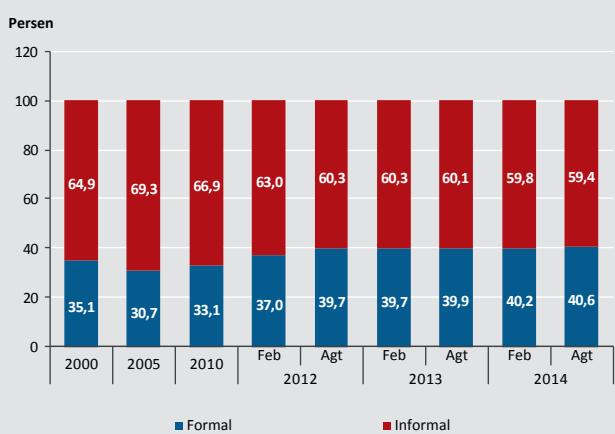
Sumber: BPS

pengangguran pada Agustus 2014 mencapai 5,94%, lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2014 (5,70%), namun lebih rendah dari Agustus 2013 (6,17%) (Tabel 3.5).

Tingkat penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan. Berdasarkan prakiraan model "Okun's Law" Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang melambat di bawah kisaran 5,3% berisiko meningkatkan tingkat pengangguran (Grafik 3.27). Pengangguran yang meningkat juga diakibatkan oleh tingkat penyerapan tenaga kerja yang menurun. Pada tahun 2013 dan 2014, rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja menurun menjadi 1% dibandingkan dengan rata-rata tahun 2011 dan 2012 sebesar 2,9%.

Meskipun serapan tenaga kerja melemah, kualitas pekerja tetap menunjukkan tren perbaikan. Pangsa pekerja

Grafik 3.28. Porsi Pekerja berdasarkan Status Pekerjaan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.29. Tingkat Kemiskinan



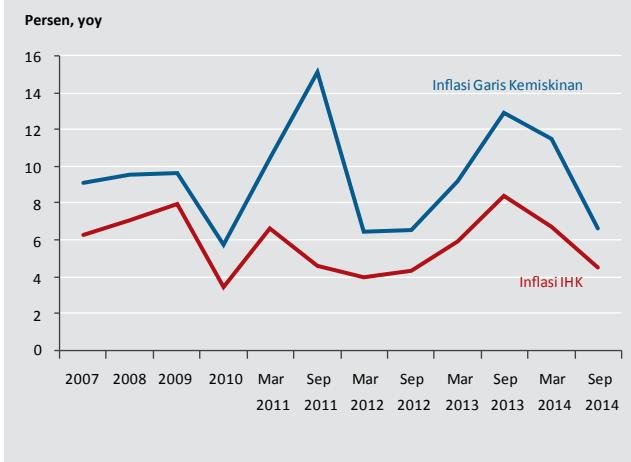
Sumber: BPS, diolah

formal pada Agustus 2014 mencapai 40,6%, membaik dibandingkan dengan kondisi Februari dan Agustus 2014 masing-masing sebesar 40,2% dan 39,9% (Grafik 3.28). Peningkatan porsi pekerja formal dengan tingkat pendapatan yang lebih tetap memberikan kontribusi terhadap resiliensi konsumsi rumah tangga. Namun demikian, dominasi tenaga kerja informal perlu mendapat perhatian karena kelompok ini umumnya berpendapatan tidak tetap.

Di sisi kesejahteraan, perkembangan kondisi kemiskinan menunjukkan perbaikan. Pada bulan September 2014, jumlah dan persentase penduduk miskin kembali berada dalam lintasan yang menurun. Jumlah penduduk miskin turun menjadi 27,73 juta orang atau 11,0% dari total penduduk, membaik dibandingkan dengan Maret 2014 dan September 2013 masing-masing sebesar 11,2% dan 11,5% (Grafik 3.29). Perbaikan kondisi kemiskinan tersebut didukung oleh pertumbuhan garis kemiskinan yang melambat sejalan dengan tekanan inflasi pada tiga triwulan pertama 2014 yang menurun (Grafik 3.30).⁸ Perlambatan inflasi ini mampu mengkompensasi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode yang sama sehingga kondisi kemiskinan dapat membaik. Secara historis, kenaikan garis kemiskinan sejalan dengan perkembangan inflasi, namun dengan magnitude yang lebih tinggi. Hal ini terkait dengan komposisi keranjang masyarakat miskin yang didominasi

⁸ Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan untuk perkotaan dan perdesaan pada bulan September 2014 mencapai Rp312.328 per kapita per bulan.

Grafik 3.30. Inflasi IHK dan Garis Kemiskinan



Sumber: BPS, diolah

oleh komoditas makanan yang pergerakan harganya lebih bergejolak.

Ketimpangan penduduk miskin sedikit membaik. Indeks kedalaman kemiskinan pada bulan September 2014 membaik menjadi 1,75 dibandingkan dengan bulan September 2013 sebesar 1,88 (Tabel 3.6).⁹ Hal ini menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan yang membaik menjadi 0,44 dibandingkan dengan bulan September 2013 sebesar 0,48 (Tabel 3.7).¹⁰ Hal ini mengindikasikan disparitas pengeluaran rumah tangga di antara penduduk miskin menyempit dibandingkan dengan bulan September 2013.

Tabel 3.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
2004	2,18	3,43	2,89
2005	2,05	3,34	2,78
2006	2,61	4,22	3,43
2007	2,15	3,78	2,99
2008	2,07	3,42	2,77
2009	1,91	3,05	2,50
2010	1,57	2,8	2,21
Mar 2011	1,52	2,63	2,08
Sep 2011	1,48	2,61	2,05
Mar 2012	1,40	2,36	1,88
Sep 2012	1,38	2,42	1,90
Mar 2013	1,26	2,23	1,74
Sep 2013	1,41	2,36	1,88
Mar 2014	1,25	2,26	1,75
Sep 2014	1,25	2,25	1,75

Tabel 3.7. Indeks Keparahan Kemiskinan

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
2004	0,58	0,90	0,78
2005	0,60	0,89	0,76
2006	0,77	1,22	1,00
2007	0,57	1,09	0,84
2008	0,56	0,95	0,76
2009	0,52	0,82	0,68
2010	0,40	0,75	0,58
Mar 2011	0,39	0,70	0,55
Sep 2011	0,39	0,68	0,53
Mar 2012	0,36	0,59	0,47
Sep 2012	0,36	0,61	0,48
Mar 2013	0,31	0,55	0,43
Sep 2013	0,37	0,60	0,48
Mar 2014	0,31	0,57	0,44
Sep 2014	0,31	0,57	0,44

9 Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan atau tingkat kemiskinan semakin dalam.

10 Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin tinggi ketimpangan antara penduduk miskin.



Keterangan gambar:

Aktivitas bongkar muat di pelabuhan merupakan cermin kegiatan perdagangan dan menjadi salah satu komponen Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Pada tahun 2014, NPI kembali mencatat surplus setelah mengalami defisit pada tahun sebelumnya.



BAB 4

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA

Defisit transaksi berjalan berhasil ditekan ke arah yang lebih sehat sehingga memperkuat kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2014. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan didukung oleh koordinasi yang semakin kuat dengan Pemerintah. NPI kembali mencatat surplus, setelah mengalami defisit pada tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan surplus neraca perdagangan barang dan meningkatnya aliran masuk modal nonresiden. Perbaikan kinerja NPI tersebut disertai dengan terjadinya ketahanan eksternal Indonesia, antara lain tercermin dari meningkatnya kemampuan cadangan devisa dalam memenuhi kewajiban Utang Luar Negeri (ULN) jangka pendek.

Kinerja sektor eksternal Indonesia tahun 2014 masih diwarnai berbagai risiko global, antara lain pemulihan ekonomi global yang tidak secepat perkiraan semula dan tidak merata. Lambatnya pemulihan ekonomi dunia tersebut memberikan tekanan kepada NPI melalui jalur perdagangan dan jalur harga komoditas. Permintaan komoditas sumber daya alam dari negara berkembang dan Jepang yang melemah belum mampu diimbangi oleh permintaan produk manufaktur dari negara maju yang meningkat. Sementara itu, tekanan dari sisi harga, khususnya pada komoditas sumber daya alam (SDA), yang bersumber dari permintaan yang melemah dan harga minyak yang turun tajam pada paruh kedua tahun 2014 menyebabkan pemburukan *terms of trade* (ToT) Indonesia.¹ Pada periode yang sama, normalisasi kebijakan the Fed memberikan risiko kepada kinerja sektor eksternal melalui jalur keuangan.

Kondisi global yang masih berisiko tersebut diperberat oleh berbagai permasalahan domestik yang bersifat struktural. Separuh ekspor Indonesia masih berupa produk primer yang sangat rentan dengan dinamika harga global, dengan nilai tambah dan negara tujuan ekspor yang terbatas. Di sisi lain, ketergantungan terhadap impor masih relatif tinggi, baik untuk memproduksi barang ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan domestik. Di samping itu, ketahanan energi yang masih lemah di tengah permintaan domestik terhadap energi yang terus meningkat menyebabkan upaya untuk memperbaiki defisit neraca migas menjadi tidak mudah.

Dihadapkan pada kondisi tersebut, Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah melanjutkan rangkaian bauran kebijakan berorientasi stabilitas yang telah ditempuh sejak tahun 2013. Kebijakan stabilisasi dalam rangka pengendalian permintaan domestik mampu menekan kinerja impor nonmigas. Sementara itu, kebijakan Bank Indonesia yang berupaya menjaga nilai tukar sesuai dengan fundamental turut mendukung perbaikan ekspor manufaktur seiring dengan perbaikan ekonomi negara maju, khususnya Amerika Serikat. Kinerja ekspor manufaktur yang positif tersebut, meskipun belum mampu mengimbangi tekanan pada ekspor komoditas SDA, dapat menahan koreksi yang lebih dalam pada ekspor nonmigas. Keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014 diharapkan dapat membantu memperbaiki kinerja neraca migas, meskipun harga minyak turun tajam pada paruh kedua tahun 2014.

1 *Terms of trade* adalah rasio harga ekspor terhadap harga impor.

Di jalur keuangan, kebijakan pendalamannya pasar, antara lain dengan menyediakan alternatif instrumen penempatan di Bank Indonesia mampu mengurangi penempatan dana bank-bank ke perbankan di luar negeri sekaligus memperkuat cadangan devisa. Pada saat yang sama, keberhasilan dan konsistensi kebijakan dalam memperbaiki defisit transaksi berjalan dan persepsi positif pasca Pemilu memicu sentimen positif investor global. Kondisi tersebut membuat Indonesia mampu memanfaatkan likuiditas global yang masih cukup tinggi, sehingga aliran masuk modal asing ke Indonesia pada tahun 2014 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Berbagai bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah tersebut mampu memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia tercermin pada defisit transaksi berjalan yang lebih rendah dan NPI yang kembali surplus (Tabel 4.1). Defisit transaksi berjalan pada tahun 2014 membaik menjadi 3,0% dari PDB dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,2% dari PDB. Perbaikan transaksi berjalan tersebut ditopang oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang, neraca jasa dan neraca pendapatan sekunder. Perbaikan neraca perdagangan barang terutama berasal dari peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas karena penurunan impor nonmigas yang lebih tajam dari ekspor nonmigas. Meskipun demikian, perbaikan neraca perdagangan barang tertahan oleh defisit neraca perdagangan migas yang masih meningkat. Pemburukan neraca migas terutama disebabkan oleh kebutuhan energi domestik yang tetap tinggi pada saat produksi minyak turun, sehingga volume impor minyak meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, defisit neraca jasa yang membaik dan surplus pendapatan sekunder yang meningkat terutama didukung oleh impor jasa *freight* yang lebih rendah, serta penerimaan jasa perjalanan dan remitansi TKI yang lebih tinggi. Di sisi lain, defisit neraca pendapatan primer meningkat seiring dengan posisi kewajiban luar negeri Indonesia yang meningkat.

Transaksi modal dan finansial pada tahun 2014 ditandai dengan aliran modal asing tertinggi dalam sejarah yang terutama berasal dari peningkatan aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio. Secara neto, aliran modal masuk dalam investasi portofolio mencapai 23,4 miliar dolar AS, meningkat pesat dari 12,1 miliar dolar AS pada tahun 2013. Aliran modal dalam bentuk investasi langsung asing dan investasi lainnya juga meningkat sehingga secara total transaksi modal dan finansial mencatat surplus 43,6 miliar dolar AS, hampir dua kali lipat surplus pada tahun 2013. Dengan defisit transaksi berjalan yang lebih rendah dan surplus transaksi modal

Tabel 4.1. Neraca Pembayaran Indonesia

Rincian	2010	2011	2012	2013	2014**				Total**
					I*	II*	III*	IV**	
I. Transaksi Berjalan	5.144	1.685	-24.418	-29.115	-4.149	-8.939	-6.963	-6.181	-26.233
A. Barang, neto	31.003	33.825	8.680	5.833	3.350	-375	1.560	2.368	6.902
- Ekspor	149.966	191.109	187.347	182.089	43.937	44.505	43.606	43.242	175.290
- Impor	-118.963	-157.284	-178.667	-176.256	-40.588	-44.880	-42.046	-40.874	-168.387
1. Barang dagangan umum	29.983	32.215	6.711	4.069	2.832	-703	1.192	2.072	5.393
- Ekspor	148.866	189.432	185.337	180.294	43.414	44.171	43.232	42.941	173.757
- Impor	-118.884	-157.217	-178.626	-176.225	-40.581	-44.874	-42.039	-40.868	-168.363
a. Nonmigas	26.750	32.865	11.950	13.777	5.581	2.475	4.326	4.852	17.233
- Ekspor	120.208	151.366	149.766	146.706	35.822	36.657	35.970	36.557	145.005
- Impor	-93.458	-118.500	-137.816	-132.928	-30.241	-34.182	-31.644	-31.705	-127.771
b. Minyak	-8.653	-17.526	-20.436	-22.483	-6.056	-6.137	-6.037	-5.682	-23.914
- Ekspor	15.691	19.576	17.891	17.889	3.500	3.885	3.590	2.831	13.806
- Impor	-24.344	-37.102	-38.327	-40.372	-9.556	-10.022	-9.627	-8.514	-37.719
c. Gas	11.886	16.876	15.197	12.775	3.308	2.959	2.904	2.903	12.074
- Ekspor	12.968	18.491	17.680	15.700	4.092	3.629	3.672	3.553	14.946
- Impor	-1.082	-1.615	-2.483	-2.925	-785	-670	-768	-649	-2.873
2. Barang Lainnya	1.020	1.610	1.969	1.765	518	328	368	295	1.509
- Ekspor	1.099	1.676	2.009	1.795	524	333	374	302	1.533
- Impor	-79	-67	-41	-31	-6	-5	-6	-6	-24
B. Jasa-Jasa, neto	-9.791	-9.803	-10.564	-12.072	-2.230	-2.920	-2.595	-2.788	-10.532
C. Pendapatan Primer, neto	-20.698	-26.547	-26.628	-27.055	-6.354	-7.178	-7.133	-7.157	-27.822
D. Pendapatan Sekunder, neto	4.630	4.211	4.094	4.178	1.085	1.534	1.204	1.396	5.220
II. Transaksi Modal dan Finansial	26.526	13.636	24.909	22.010	7.190	13.872	14.731	7.794	43.586
A. Transaksi Modal	50	33	51	45	1	7	3	15	27
B. Transaksi Finansial	26.476	13.603	24.858	21.964	7.189	13.864	14.728	7.779	43.559
- Aset	7.294	-16.453	-17.971	-15.467	-6.245	-2.907	-3.917	1.031	-12.039
- Kewajiban	33.770	30.057	42.829	37.431	13.434	16.771	18.645	6.748	55.598
1. Investasi Langsung	11.106	11.528	13.716	12.295	3.288	3.459	5.945	2.574	15.266
a. Aset	-4.186	-9.037	-7.485	-11.112	-2.883	-2.407	-2.226	-2.905	-10.421
b. Kewajiban	15.292	20.565	21.201	23.407	6.171	5.866	8.171	5.478	25.686
2. Investasi Portofolio	13.202	3.806	9.206	10.875	8.703	8.046	7.441	1.611	25.802
a. Aset	-2.511	-1.189	-5.467	-1.273	465	-991	1.299	1.635	2.409
b. Kewajiban	15.713	4.996	14.673	12.148	8.238	9.038	6.142	-25	23.393
3. Derivatif Finansial	-94	69	13	-334	-140	45	-57	-61	-213
a. Aset	1.128	527	333	345	239	64	-120	-23	159
b. Kewajiban	-1.222	-458	-320	-679	-379	-19	63	-38	-372
4. Investasi Lainnya	2.262	-1.801	1.922	-871	-4.662	2.314	1.398	3.655	2.705
a. Aset	-1.725	-6.754	-5.353	-3.427	-4.066	428	-2.870	2.323	-4.186
b. Kewajiban	3.987	4.954	7.275	2.556	-596	1.887	4.268	1.332	6.891
III. Total (I + II)	31.670	15.321	491	-7.105	3.040	4.932	7.768	1.613	17.353
III. Selisih Perhitungan Bersih	-1.327	-3.465	-275	-220	-974	-636	-1.292	797	-2.105
IV. Neraca Keseluruhan (III + IV)	30.343	11.857	215	-7.325	2.066	4.297	6.475	2.410	15.249
VI. Cadangan Devisa dan yang Terkait	-30.343	-11.857	-215	7.325	-2.066	-4.297	-6.475	-2.410	-15.249
Memorandum:									
- Posisi Cadangan Devisa	96.207	110.123	112.781	99.387	102.592	107.678	111.164	111.862	111.862
- Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	7,6	6,7	6,2	5,5	5,7	6,1	6,3	6,4	6,4
- Transaksi Berjalan/PDB (%)	0,7	0,2	-2,7	-3,2	-2,0	-4,0	-3,0	-2,8	-3,0

*angka sementara **angka sangat sementara

Tabel 4.2. Posisi Investasi Internasional Indonesia

Rincian	2010	2011	2012	2013	2014**				Total**
					I*	II*	III*	IV**	
Posisi Investasi Internasional Indonesia, neto	-291.062	-318.272	-361.224	-370.453	-394.639	-400.869	-414.221	-419.770	-419.770
- Investasi Langsung, neto	-154.063	-178.600	-199.234	-211.468	-216.129	-218.411	-225.534	-229.029	-229.029
- Investasi Portofolio, neto	-139.320	-144.764	-164.907	-147.221	-174.369	-179.899	-191.495	-192.287	-192.287
- Derivatif Finansial, neto	24	14	-37	32	98	37	21	30	30
- Investasi Lainnya, neto	-93.910	-105.045	-109.827	-111.182	-106.831	-110.274	-108.377	-110.345	-110.345
- Cadangan Devisa	96.207	110.123	112.781	99.387	102.592	107.678	111.164	111.862	111.862

*angka sementara **angka sangat sementara

dan finansial yang lebih tinggi, NPI 2014 kembali surplus setelah sebelumnya defisit pada tahun 2013. Surplus transaksi modal dan finansial tersebut mengakibatkan investasi nonresiden di Indonesia (Kewajiban Finansial Luar Negeri) yang tercatat pada Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia lebih besar dibandingkan dengan investasi Indonesia di luar negeri (Aset Finansial Luar Negeri) (Tabel 4.2).² Pada triwulan IV, tekanan terhadap NPI sempat meningkat akibat meningkatnya aliran keluar modal nonresiden yang dipicu oleh pengumuman rencana kebijakan normalisasi yang akan dilakukan the Fed. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan transaksi modal dan finansial pada triwulan IV 2014 mengalami penurunan surplus dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Sejalan dengan surplus NPI 2014, cadangan devisa pada akhir 2014 meningkat dan indikator kerentanan eksternal tetap terjaga. Posisi cadangan devisa pada akhir 2014 mencapai 111,9 miliar dolar AS atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2013, yaitu 99,4 miliar dolar AS atau setara dengan 5,5 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah. Di samping itu, pergerakan keseimbangan eksternal ke arah yang lebih sehat juga tercermin dari perkembangan indikator kerentanan yang terjaga, seperti terjadinya rasio ULN terhadap PDB, meningkatnya kemampuan cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri jangka pendek dan membaiknya indikator *basic balance* yang menunjukkan meningkatnya kemampuan sumber pembiayaan jangka panjang dalam membiayai defisit transaksi berjalan. Meskipun demikian, beberapa indikator seperti *Debt*

Service Ratio (DSR) menunjukkan peningkatan risiko sejalan dengan peningkatan ULN swasta.

Ke depan, proses pemulihan keseimbangan eksternal Indonesia ke arah yang lebih sehat diperkirakan terus berlanjut. Pemulihan ekonomi global diharapkan membawa dampak positif pada ekspor meskipun masih dibayangi risiko penurunan harga komoditas dunia dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Sementara itu, dalam jangka pendek, reformasi struktural Pemerintah antara lain melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur dapat mendorong impor sehingga perbaikan transaksi berjalan akan sedikit tertahan. Meskipun demikian, kenaikan impor tersebut secara struktural lebih sehat dan akan meningkatkan kapasitas produksi Indonesia sehingga dapat mendukung perbaikan transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat dalam jangka menengah-panjang. Di sisi transaksi modal dan finansial, aliran masuk modal nonresiden diperkirakan masih berlanjut meskipun dengan intensitas yang menurun. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi sentimen terkait kenaikan *Fed Fund Rate* di tengah kebijakan akomodatif Jepang dan Eropa serta berlanjutnya sentimen positif terhadap proses reformasi struktural perekonomian domestik yang masih berlangsung.

4.1. Transaksi Berjalan

Sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah yang dijalankan dengan konsisten berhasil membawa transaksi berjalan tahun 2014 ke arah yang lebih sehat. Defisit transaksi berjalan pada 2014 tercatat 26,2 miliar dolar AS atau setara dengan 3,0% dari PDB, lebih baik dibandingkan dengan defisit tahun 2013 sebesar 29,1 miliar dolar AS atau setara dengan 3,2% dari PDB.

² Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia merupakan neraca posisi aset finansial luar negeri (AFLN) dan kewajiban finansial luar negeri (KFLN) Indonesia pada suatu waktu tertentu.

Perbaikan tersebut ditopang oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang nonmigas, neraca jasa dan neraca pendapatan sekunder di tengah defisit neraca perdagangan migas dan neraca pendapatan primer yang meningkat.

Perbaikan kinerja neraca perdagangan barang nonmigas berhasil mendorong peningkatan surplus total neraca perdagangan barang. Surplus neraca perdagangan barang nonmigas tahun 2014 mencapai 18,7 miliar dolar AS atau meningkat 20,6% dari kinerja tahun sebelumnya. Peningkatan surplus yang cukup signifikan tersebut terutama dipengaruhi impor nonmigas yang terkontraksi lebih dalam sebesar 3,9%, dibandingkan dengan ekspor yang hanya terkontraksi 1,3%. Penurunan impor nonmigas terjadi di seluruh kelompok barang, baik barang konsumsi, bahan baku maupun barang modal sejalan dengan moderasi permintaan domestik yang masih berlangsung dan ekspor yang melemah. Di sisi lain, perlambatan kinerja ekspor nonmigas Indonesia masih diwarnai oleh harga komoditas yang rendah dan permintaan eksternal yang melambat akibat perbaikan ekonomi global yang tidak sebaik perkiraan semula. Namun, ekspor manufaktur yang membaik sejalan dengan perbaikan ekonomi negara maju yang disertai dengan kebijakan nilai tukar yang diarahkan sesuai dengan fundamentalnya mampu menahan perlambatan ekspor yang lebih dalam.

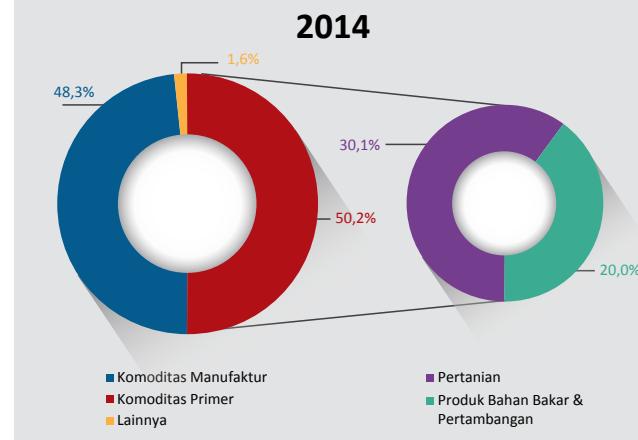
Kondisi global yang kurang menguntungkan terutama berdampak pada kinerja ekspor beberapa komoditas SDA sehingga memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor nonmigas yang masih didominasi oleh komoditas SDA. Ekspor batubara turun tajam sebesar 21,3% dibandingkan dengan penurunan pada tahun 2013 sebesar 2,6%. Kondisi ini berdampak pada pangsa komoditas SDA yang menurun terutama disebabkan oleh tekanan pada ekspor batubara dan penghentian ekspor mineral mentah sejak pertengahan Januari 2014 dalam rangka penerapan UU Minerba No 4 Tahun 2009 (Grafik 4.1).

Meskipun demikian, pemburukan ekspor nonmigas yang lebih dalam tertahan oleh kinerja ekspor produk manufaktur yang melanjutkan tren pertumbuhan positif. Kinerja produk manufaktur tidak hanya disebabkan perbaikan harga namun didukung oleh pertumbuhan volume yang mencapai 5,0% atau hampir dua kali lipat dari pertumbuhan tahun 2013 yang hanya 2,7%. Kinerja ekspor produk manufaktur yang terus berada dalam tren positif tersebut seiring dengan perbaikan ekonomi negara maju, terutama Amerika Serikat yang didukung oleh kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamentalnya.

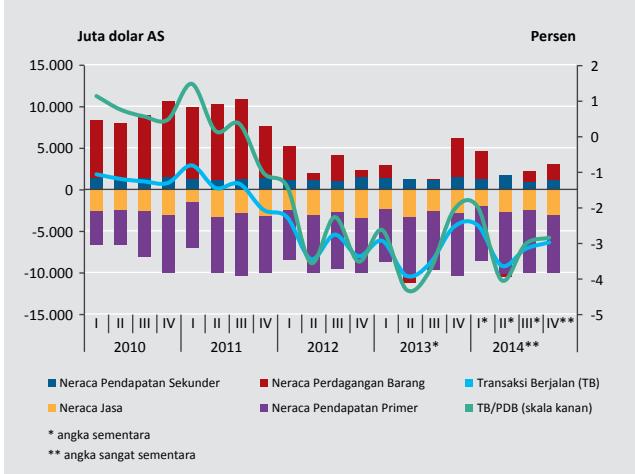
Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas yang cenderung meningkat menahan perbaikan neraca perdagangan barang dan defisit transaksi berjalan yang lebih tinggi. Defisit neraca perdagangan migas masih meningkat 22,0% di tengah penurunan harga minyak dunia pada triwulan akhir 2014. Tingginya defisit neraca perdagangan migas tidak terlepas dari permasalahan struktural sektor migas di Indonesia, antara lain kemampuan produksi lapangan minyak Indonesia yang terus menurun dan penambahan kapasitas produksi gas yang masih terbatas di tengah konsumsi BBM domestik yang terus meningkat. Dampak buruk dari defisit volume minyak yang semakin besar dan surplus volume gas yang menyusut terhadap neraca migas belum mampu diimbangi oleh dampak positif penurunan harga minyak yang signifikan pada triwulan IV. Kebijakan reformasi energi berupa penghapusan subsidi pada BBM premium dan subsidi tetap pada BBM solar mulai 1 Januari 2015 diharapkan akan membantu memperbaiki kinerja neraca migas melalui konsumsi BBM dan impor minyak yang lebih terkendali.

Perbaikan transaksi berjalan juga didukung oleh perbaikan kinerja neraca jasa dan pendapatan sekunder, meskipun defisit neraca pendapatan primer meningkat (Grafik 4.2). Defisit neraca jasa mencatat perbaikan yang cukup signifikan pada tahun 2014 dengan penurunan defisit 1,5 miliar dolar AS. Perbaikan defisit neraca jasa terutama berasal dari pembayaran jasa transportasi barang yang lebih rendah sejalan dengan penurunan impor, serta peningkatan surplus jasa perjalanan sejalan dengan bertambahnya jumlah kedatangan wisatawan manca negara. Sementara itu, surplus neraca pendapatan sekunder meningkat yang dipengaruhi oleh perbaikan

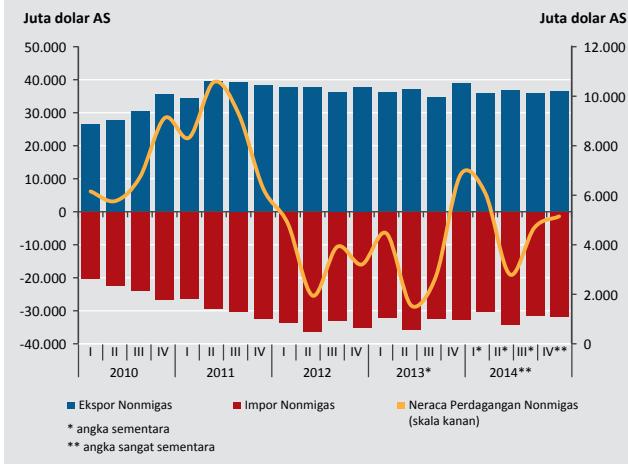
Grafik 4.1. Komposisi Ekspor Nonmigas Indonesia
(Berdasarkan Standard International Trade Classification/SITC)



Grafik 4.2. Perkembangan Transaksi Berjalan



Grafik 4.3. Perkembangan Neraca Perdagangan Nonmigas



penerimaan TKI di luar negeri. Meskipun demikian, defisit neraca pendapatan primer kembali meningkat sebagai dampak dari peningkatan posisi kewajiban luar negeri Indonesia, seiring dengan derasnya aliran masuk modal asing.

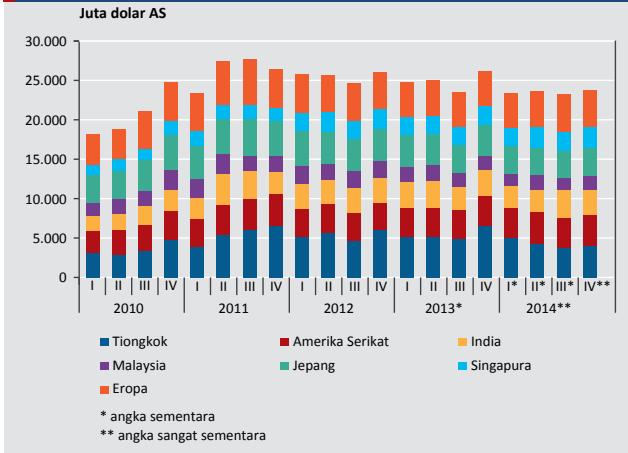
Neraca Perdagangan Non Minyak dan Gas (Nonmigas)

Neraca perdagangan nonmigas memiliki peran terbesar dalam mendukung perbaikan defisit transaksi berjalan. Meskipun sempat menurun pada triwulan II 2014, surplus neraca perdagangan nonmigas secara keseluruhan tahun menunjukkan kinerja yang membaik. Kontraksi ekspor yang lebih terbatas dibandingkan dengan kontraksi impor berdampak pada pertumbuhan surplus neraca perdagangan yang lebih tinggi menjadi 20,6% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 11,7% (Grafik 4.3).

Kinerja ekspor nonmigas membaik meskipun masih tumbuh negatif di hampir sepanjang 2014. Meskipun tidak setajam pelemahan pada tahun sebelumnya, tekanan terhadap ekspor nonmigas masih berlanjut sehingga ekspor nonmigas tahun 2014 kembali mencatat kontraksi 1,3%. Kontraksi tersebut disebabkan oleh permintaan eksternal yang melemah serta harga komoditas yang masih rendah. Pemulihan ekonomi global yang lambat dan tidak merata berdampak pada pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia. Ekspor ke Tiongkok (pangsa 11,2% dari total ekspor nonmigas) tumbuh melambat sebesar 22,2%. Demikian pula ekspor

ke Jepang dan India yang melambat 8,7% dan 5,7% (Grafik 4.4). Meskipun permintaan dari negara maju, utamanya Amerika Serikat, tumbuh positif namun tidak mampu mengimbangi pelemahan permintaan dari beberapa negara mitra dagang tersebut sehingga volume ekspor tahun 2014 terkontraksi 0,6%. Sementara itu, tren penurunan harga komoditas yang masih berlanjut menambah tekanan terhadap ekspor Indonesia. Harga komoditas bahkan mengalami koreksi yang lebih dalam pada triwulan IV sejalan dengan penurunan harga minyak dunia, sehingga ekspor triwulan IV mencatat kontraksi paling dalam sebesar 6,5% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tren penurunan harga yang terus berlanjut menyebabkan ToT Indonesia mengalami penurunan dari 88,3 pada bulan Desember 2013 menjadi 81,3 pada bulan Desember 2014. Pemburukan ToT tersebut berdampak

Grafik 4.4. Eksport Nonmigas menurut Negara Tujuan Utama



pada kontraksi ekspor komoditas primer yang lebih dalam menjadi 8,1% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,8%.

Tekanan terhadap ekspor juga dipengaruhi oleh struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi (50,2%) oleh komoditas SDA. Struktur ekspor tersebut sangat rentan terhadap pergerakan harga selain memiliki nilai tambah yang rendah. Dominasi ekspor SDA tercermin pada pangsa ekspor batubara ke Tiongkok dan Jepang yang masing-masing mencapai 33% dan 17,7% dari total ekspor ke Tiongkok dan Jepang. Minyak nabati, yang merupakan komoditas terbesar kedua ekspor nonmigas Indonesia, meskipun secara riil masih tumbuh positif namun peningkatannya tertahan oleh harga yang masih terkoreksi 2,2%. Dalam rangka memperbaiki struktur ekspor Indonesia ke depan, Pemerintah memberlakukan UU Minerba yang melarang ekspor mineral mentah. Sebagai dampaknya, sejak Januari 2014, ekspor komoditas tambang, seperti biji tembaga (pangsa 2,0%), nikel (pangsa 1,1%) dan bauksit (pangsa 0,9%), terhenti dan baru melakukan ekspor kembali secara terbatas pada Agustus 2014. Kondisi ini turut memengaruhi penurunan ekspor nonmigas.

Sementara itu, kinerja ekspor manufaktur mampu menahan pelemahan lebih lanjut ekspor nonmigas. Di tengah pelemahan ekspor produk primer, ekspor manufaktur pada tahun 2014 tumbuh positif 6,9% (Tabel 4.3). Pertumbuhan tersebut bahkan lebih tinggi dari kinerja tahun 2013 yang tumbuh 0,1%. Kinerja positif manufaktur terutama ditopang oleh meningkatnya volume ekspor yang dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi negara maju, terutama AS. Di samping itu, peningkatan kinerja ekspor juga didukung oleh kebijakan Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah pada level fundamentalnya. Komoditas produk manufaktur yang menjadi kontributor utama antara lain kendaraan, bahan kimia organik, mesin industri dan perlengkapannya, alas kaki, barang dari kayu, barang-barang logam lainnya serta benang tenun dan kain.

Meskipun telah tumbuh positif, kinerja ekspor manufaktur masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan struktural industri manufaktur Indonesia. Struktur ekspor manufaktur Indonesia sebagian besar masih berupa komoditas berbasis SDA (Grafik 4.5). Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Indonesia yang relatif berlimpah SDA. Meskipun demikian, berbagai permasalahan struktural di Indonesia seperti sebagian industri manufaktur Indonesia yang masih padat tenaga kerja serta infrastruktur yang masih terbatas menyebabkan daya saing Indonesia masih lebih rendah dari beberapa negara ASEAN lain. Hal ini

Tabel 4.3. Ekspor Nonmigas menurut Kelompok Barang (Berdasarkan SITC)

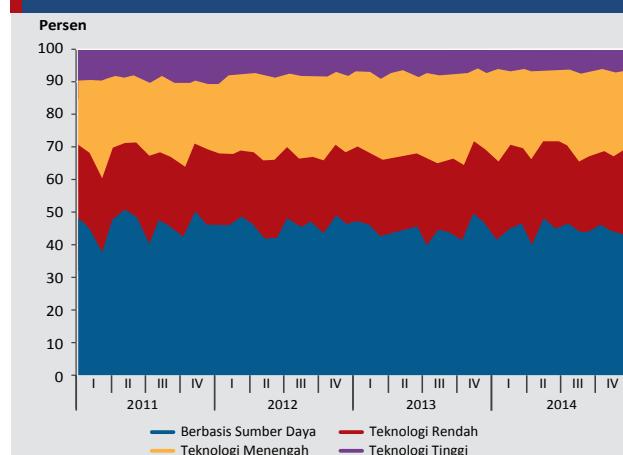
Rincian	Pertumbuhan Tahunan (% yoy)					
	2013	2014				
		Total	Tw. I	Tw. II*	Tw. III*	Tw. IV**
A. Produk Primer						
Nominal	-3,8	-9,0	-9,4	0,8	-13,5	-8,1
Riil	7,5	-3,4	-10,6	-0,3	0,6	-3,4
Indeks Harga	-10,6	-5,8	1,4	1,2	-13,9	-4,4
B. Produk Manufaktur						
Nominal	0,1	9,2	8,6	6,8	3,4	6,9
Riil	2,7	10,3	8,2	3,1	-1,4	5,0
Indeks Harga	-2,5	-1,0	0,4	3,5	4,8	1,9
C. Lainnya						
Nominal	-7,8	41,3	20,8	-24,3	-32,2	-4,9
Riil	1,1	61,7	27,2	-23,0	-28,7	0,1
Indeks Harga	-7,8	-12,0	-4,9	-1,2	-4,7	-5,9
Total						
Nominal	-2,2	-0,3	-0,9	3,0	-6,5	-1,3
Riil	4,7	2,8	-2,6	-0,2	-1,9	-0,6
Indeks Harga	-6,6	-3,0	1,8	3,2	-4,6	-0,7

*angka sementara **angka sangat sementara

juga menyebabkan peran sektor manufaktur dalam perekonomian Indonesia masih relatif rendah dan berada di bawah Thailand dan Malaysia (Grafik 4.6).

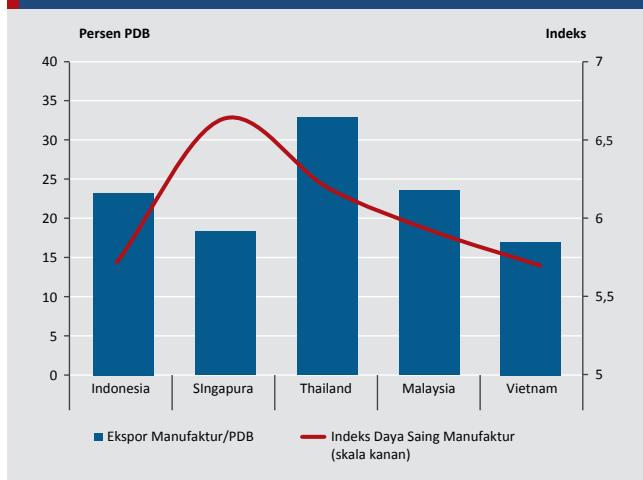
Di tengah pelemahan ekspor, impor nonmigas terkontraksi lebih dalam sehingga surplus neraca perdagangan nonmigas meningkat. Kebijakan pengendalian permintaan

Grafik 4.5. Komposisi Ekspor Manufaktur Indonesia 2011-2014



Sumber: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Grafik 4.6. Kontribusi Ekspor Manufaktur terhadap PDB dan Indeks Daya Saing Manufaktur Negara ASEAN



Sumber: World Bank dan Deloitte

domestik yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah menyebabkan impor nonmigas kembali terkontraksi. Kontraksi impor pada tahun 2014 tercatat semakin dalam menjadi 3,9% dibandingkan dengan kontraksi pada tahun 2013 sebesar 3,8%. Penurunan impor nonmigas tersebut disebabkan oleh turunnya volume impor di seluruh kelompok barang, baik konsumsi, bahan baku maupun barang modal.

Tabel 4.4. Impor Nonmigas menurut Kelompok Barang

Rincian	Pertumbuhan Tahunan (%, yoy)					
	2013		2014			
	Total	Tw. I	Tw. II*	Tw. III*	Tw. IV**	Total**
Barang Konsumsi						
Nominal	2,8	4,8	-8,8	-7,6	-10,3	-6,1
Riil	2,0	-2,6	-17,6	-14,5	-13,3	-13,1
Indeks Harga	0,8	7,6	10,7	8,0	3,4	8,1
Bahan Baku						
Nominal	-0,7	-6,2	-4,8	-0,8	-1,6	-3,4
Riil	4,2	-1,7	-2,2	0,3	3,4	-0,8
Indeks Harga	-4,7	-4,7	-2,6	-1,0	-4,8	-2,7
Barang Modal						
Nominal	-14,3	-7,1	-0,8	-7,1	-3,6	-4,6
Riil	-21,4	-17,7	-11,0	-19,8	-18,6	-15,4
Indeks Harga	9,0	12,8	11,6	15,8	18,5	12,8
Total						
Nominal	-3,8	-5,6	-4,2	-2,9	-2,9	-3,9
Riil	-2,8	-6,1	-6,9	-7,6	-5,9	-6,5
Indeks Harga	-1,0	0,6	3,0	5,1	3,3	2,8

*angka sementara **angka sangat sementara

Kinerja impor yang memburuk tersebut merupakan dampak dari moderasi permintaan domestik dan kontraksi ekspor. Kinerja konsumsi dan investasi yang melambat berdampak pada volume impor barang konsumsi yang terkontraksi 13,1% (Tabel 4.4). Moderasi konsumsi domestik yang disertai dengan kontraksi ekspor selanjutnya membatasi rencana investasi korporasi sehingga permintaan impor barang modal secara riil turun 15,4%. Kondisi tersebut berdampak pada kontraksi impor bahan baku sebesar 0,8% dibandingkan dengan tahun 2013 yang masih tumbuh positif sebesar 4,2%. Meski terjadi penurunan impor bahan baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, kandungan impor pada produk ekspor Indonesia masih tinggi. Selain disebabkan oleh kebutuhan bahan baku impor untuk memenuhi konsumsi domestik yang menurun, kontraksi impor bahan baku juga dipengaruhi oleh kandungan impor pada produk ekspor Indonesia yang masih tinggi. Sekitar 60,5% produk ekspor manufaktur Indonesia memiliki kandungan impor lebih dari 30%.

Neraca Perdagangan Minyak dan Gas (Migas)

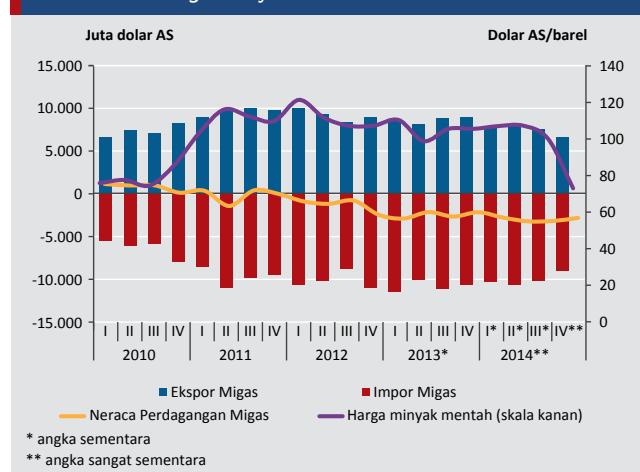
Peningkatan defisit neraca perdagangan migas menahan perbaikan transaksi berjalan. Neraca migas 2014 mencatat defisit 11,8 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 9,7 miliar dolar AS. Kenaikan defisit neraca perdagangan migas tersebut melanjutkan tren peningkatan defisit sejak neraca perdagangan migas pertama kali mencatat defisit di tahun 2011. Peningkatan defisit disebabkan oleh penurunan ekspor migas yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan impor migas. Turunnya ekspor migas dipicu baik oleh faktor volume maupun harga sehingga menyebabkan penerimaan dari ekspor migas turun 14,4%. Sementara itu, penurunan impor migas sebesar 6,2% sejalan dengan harga minyak global yang menurun sementara volume impor masih meningkat.

Peningkatan defisit neraca migas terutama karena defisit neraca minyak yang terus meningkat. Defisit neraca minyak meningkat menjadi 23,9 miliar dolar AS dibandingkan dengan defisit pada tahun 2013 sebesar 22,5 miliar dolar AS. Berlanjutnya pemburukan neraca minyak pada tahun 2014 terutama dipengaruhi oleh penurunan ekspor minyak yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan impor minyak. Salah satu faktor penyebab turunnya ekspor minyak adalah tidak tercapainya target *lifting* sehingga volume ekspor minyak turun. Pada tahun 2014, *lifting* minyak turun menjadi 794

ribu barel per hari dibandingkan dengan tahun 2013 dan target APBN-P 2014 masing-masing sebesar 818 ribu barel per hari.³ Tren penurunan *lifting* tersebut telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan berpotensi akan terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum ditemukannya lagi lapangan minyak baru yang cukup besar sementara lapangan minyak yang saat ini beroperasi telah memasuki tahap usia tua dengan tingkat *natural declining* yang cukup tinggi. Dampak penurunan *lifting* minyak pada tahun 2014 tersebut diperparah oleh penurunan harga minyak global terutama pada triwulan IV (Grafik 4.7). Gejolak penurunan harga minyak yang sangat tajam pada paruh kedua tahun 2014 dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya berlebihnya suplai dan produksi *shale oil* AS serta perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai salah satu konsumen minyak terbesar.

Sementara itu, penurunan nilai impor minyak lebih disebabkan harga yang turun tajam karena volume impor masih naik. Impor minyak pada tahun 2014 turun menjadi 37,7 miliar dolar AS dari 40,4 miliar dolar AS. Penurunan nilai impor minyak tersebut merupakan efek positif dari turunnya harga minyak global di tengah volume impor minyak yang masih meningkat. Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM Rp2.000 per liter pada November 2014 belum mampu memberikan efek signifikan pada penurunan konsumsi BBM karena terjadi di penghujung tahun. Ke depan, kebijakan energi yang lebih komprehensif disertai kebijakan reformasi pada sektor-sektor terkait seperti transportasi sangat dibutuhkan untuk menekan pertumbuhan konsumsi BBM mengingat suplai dari dalam negeri yang semakin terbatas.

Grafik 4.7. Perkembangan Neraca Perdagangan Migas dan Harga Minyak



³ Angka dari SKK Migas

Di sisi neraca gas, pemburukan neraca gas dipengaruhi oleh penurunan ekspor gas. Penurunan harga gas sejalan dengan harga minyak dunia yang lebih rendah berdampak negatif pada kinerja neraca gas Indonesia yang sampai saat ini masih mencatat surplus. Sementara itu, produksi gas nasional relatif stagnan di tengah kebutuhan domestik terhadap gas terus meningkat. Hingga akhir tahun 2014, porsi kebutuhan domestik meningkat menjadi 52,0%, dibandingkan dengan alokasi untuk ekspor (48,0%) dan juga lebih tinggi dibanding porsi kebutuhan domestik tahun sebelumnya sebesar 49,9%. Kondisi yang kurang berimbang antara peningkatan produksi gas dan peningkatan konsumsi domestik menyebabkan ekspor gas terus turun sejak tahun 2012.

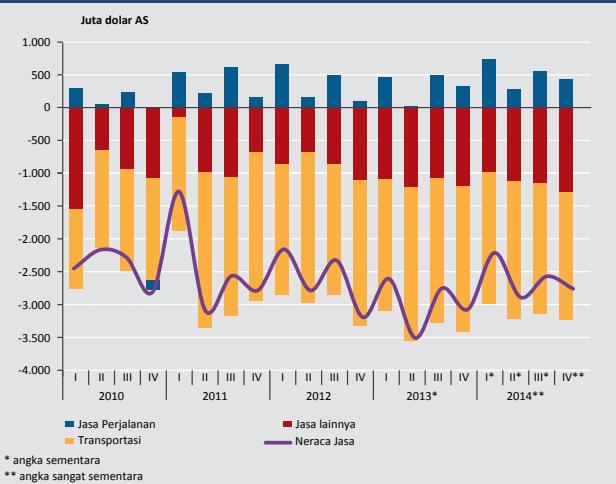
Neraca Perdagangan Jasa, Pendapatan Primer dan Pendapatan Sekunder

Kinerja neraca perdagangan jasa pada 2014 membaik dan mampu menopang perbaikan transaksi berjalan. Defisit neraca jasa yang menyempit dipengaruhi oleh pembayaran jasa *freight* yang lebih rendah sejalan dengan impor yang menurun, serta penerimaan jasa perjalanan yang meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia dengan pola pengeluaran yang lebih tinggi (Grafik 4.8).

Selama tahun 2014, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia tercatat sebanyak 9,5 juta orang, meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 8,9 juta orang. Selain jumlah wisman yang meningkat, pengeluaran wisman pada 2014 juga sedikit meningkat sehingga penerimaan jasa perjalanan dari wisman naik menjadi 2,2 miliar dolar AS dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,4 miliar dolar AS. Wisman asal Singapura, Malaysia, Australia dan Tiongkok merupakan kelompok wisman terbesar yang berkunjung ke Indonesia selama 2014. Adapun tujuan favorit wisman ke Indonesia masih terkonsentrasi pada tiga daerah, yaitu Bali, Jakarta, dan Batam.

Salah satu kebijakan reformasi struktural yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dan diharapkan dapat membantu perbaikan defisit transaksi berjalan adalah reformasi di bidang kelautan (maritim). Hingga saat ini, persentase biaya pengeluaran untuk pengangkutan barang-barang impor (*ratio freight import to import*) yang menggunakan moda transportasi laut berada pada kisaran 5%, sementara persentase penerimaan untuk pengangkutan barang-barang eksport (*ratio freight export to export*) hanya berada pada kisaran 1% (Grafik 4.9). Tingginya

Grafik 4.8. Perkembangan Neraca Jasa



ratio *freight import* dibanding *freight export* menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap penggunaan kapal nonresiden yang masih tinggi, sementara pada saat yang sama kapal domestik masih belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan di jalur perdagangan. Untuk itu, kebijakan reformasi maritim diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kapal nonresiden dalam kegiatan jasa angkutan barang oleh kapal laut sehingga dapat memperbaiki kinerja neraca jasa, khususnya jasa transportasi. Reformasi bidang kelautan juga akan menguatkan pemberlakuan asas *cabotage* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran).⁴

Sementara itu, defisit pendapatan primer meningkat dari 27,1 miliar dolar AS menjadi 27,8 miliar dolar AS di tahun 2014 (Grafik 4.10). Peningkatan defisit tersebut sejalan dengan kenaikan ULN guna memenuhi kebutuhan pembiayaan, terlihat pada neto kewajiban PII Indonesia yang semakin tinggi. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan pembayaran dividen dan bunga pinjaman luar negeri yang meningkat, baik Pemerintah maupun sektor swasta, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pembayaran bunga atas kepemilikan surat-surat utang domestik oleh nonresiden, khususnya surat utang Pemerintah.

Defisit transaksi berjalan yang menurun juga ditopang oleh surplus neraca pendapatan sekunder yang

4 Asas *cabotage* wajibkan kapal yang beroperasi di Indonesia menggunakan bendera Merah Putih atau dengan kata lain kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia, serta dikemudikan oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

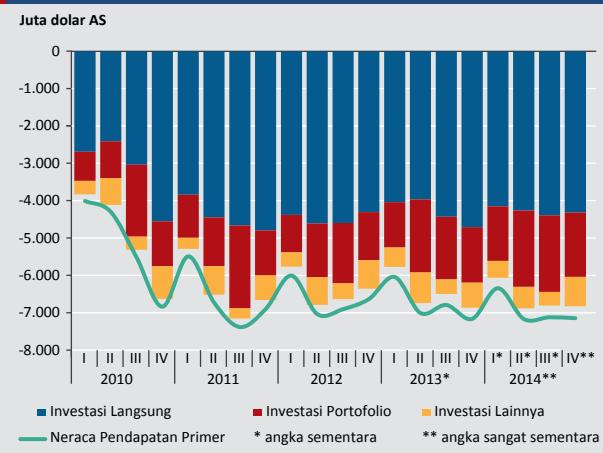
Grafik 4.9. Rasio Freight Jasa Transportasi



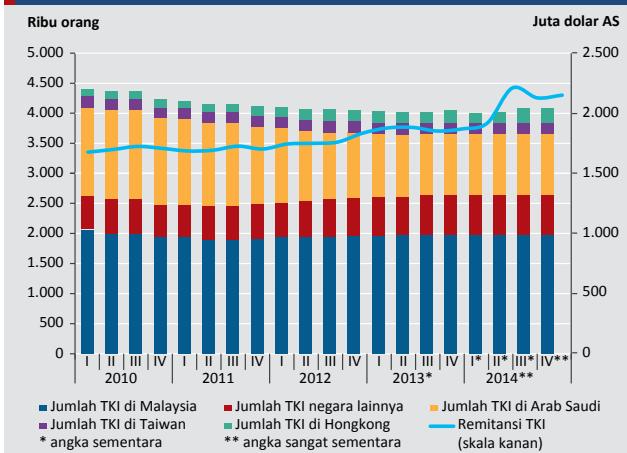
meningkat. Kenaikan surplus neraca pendapatan sekunder terutama disumbang oleh penerimaan remitansi TKI di luar negeri yang lebih tinggi. Meskipun jumlah TKI relatif sama dengan tahun 2013 (4,0 juta orang) sebagai dampak perpanjangan moratorium TKI informal ke negara-negara Timur Tengah, namun nilai remitansi TKI meningkat 12,5% dari tahun 2013 menjadi 8,3 miliar dolar AS (Grafik 4.11). Kondisi tersebut ditopang oleh perbaikan rata-rata upah TKI di beberapa negara penempatan antara lain di Hongkong, Korea Selatan, Taiwan dan Malaysia.

Untuk mendukung penerimaan remitansi TKI, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang berlaku sejak 8 April 2014. Dengan PBI ini, Bank Indonesia berupaya untuk mempermudah TKI dalam

Grafik 4.10. Perkembangan Neraca Pendapatan Primer



Grafik 4.11. Perkembangan Jumlah dan Remitansi TKI



Grafik 4.12. Perkembangan Remitansi Tenaga Kerja Negara Peer Group 2010-2014



Sumber: World Bank

hal pengiriman remitansi sehingga diharapkan penerimaan remitansi Indonesia meningkat dan membantu perbaikan defisit transaksi berjalan.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk membantu perbaikan defisit transaksi berjalan adalah perbaikan kualitas sumber daya manusia TKI. Data *World Bank* menunjukkan penerimaan remitansi Indonesia berada jauh dibawah negara *peer group* seperti India, Filipina dan Vietnam (Grafik 4.12). Posisi Indonesia yang rendah dalam penerimaan remitansi TKI terkait dengan posisi TKI yang belum kuat dalam pasar tenaga kerja di negara nonresiden. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah secara bertahap telah menerapkan kebijakan *Roadmap Zero Domestic Worker 2017*.⁵ Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah TKI informal yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) sekaligus meningkatkan upah TKI sehingga pada gilirannya penerimaan remitansi TKI ikut meningkat.

4.2. Transaksi Modal dan Finansial

Respons kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mengarahkan defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat mampu

meningkatkan tingkat kepercayaan investor nonresiden untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja transaksi modal dan finansial sehingga mencatat kenaikan surplus, bahkan mencapai level surplus tertinggi sepanjang sejarah. Meskipun selama 2014 terdapat pembayaran kembali obligasi global Pemerintah yang jatuh tempo dalam jumlah yang cukup besar, surplus transaksi modal dan finansial mencapai 43,6 miliar dolar AS, meningkat hampir dua kali surplus pada tahun 2013 yang sebesar 22,0 miliar dolar AS. Kenaikan surplus tersebut bersumber dari ketiga komponen, baik investasi langsung, investasi portofolio maupun investasi lainnya.

Surplus transaksi modal dan finansial yang lebih besar juga disertai dengan struktur investasi yang lebih bersifat jangka panjang, tercermin dari aliran masuk investasi langsung yang tetap besar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Minat investor yang masih tinggi untuk meningkatkan kepemilikannya atas aset finansial domestik juga tercermin dari kenaikan posisi investasi nonresiden yang tercatat pada PII Indonesia menjadi 419,8 miliar dolar AS dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 370,5 miliar dolar AS.

Secara triwulanan, surplus transaksi modal dan finansial meningkat hingga triwulan III 2014. Namun, tekanan terhadap pasar keuangan global yang disebabkan oleh sentimen terkait dengan normalisasi the Fed menyebabkan surplus transaksi modal dan finansial mengalami penurunan pada triwulan IV 2014. Tekanan pada pasar keuangan global juga bersumber dari rilis IMF terkait perlambatan ekonomi dunia sehingga mendorong adanya sentimen negatif. Hal ini menyebabkan surplus transaksi

5 Kebijakan *Roadmap Zero Domestic Worker 2017* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas TKI di luar negeri. Dengan kebijakan tersebut, pada tahun 2017, seluruh TKI yang berkerja di luar negeri harus berbasis pada empat jabatan kerja yaitu *house keeper* (pengurus rumah tangga), *cooker* (tukang masak), *baby sitter* (pengasuh anak), dan *caregiver* (perawat jompo).

modal dan finansial triwulan IV 2014 mencapai 7,8 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada triwulan-triwulan sebelumnya. Penurunan surplus pada triwulan tersebut disebabkan oleh aliran keluar modal nonresiden terutama pada investasi portofolio dalam bentuk saham. Sementara itu, investasi lainnya mencatat surplus yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya penarikan simpanan domestik di luar negeri.

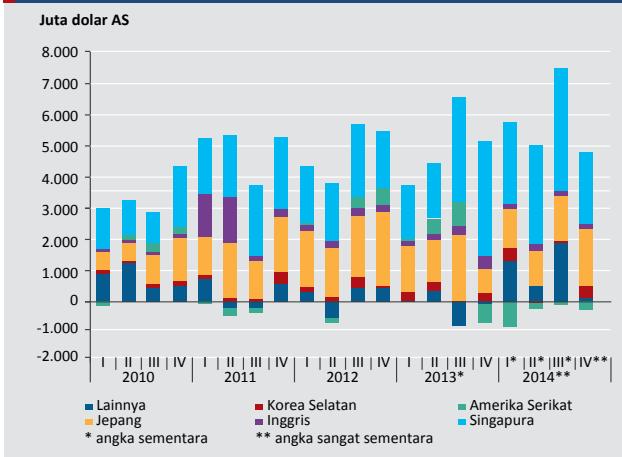
Investasi Langsung

Terjaganya tingkat kepercayaan investor nonresiden terhadap prospek perekonomian Indonesia mendorong arus masuk investasi langsung (sisi kewajiban) menjadi 25,7 miliar dolar AS dari 23,4 miliar dolar AS. Peningkatan aliran masuk investasi langsung ini juga didukung oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia selama tahun 2014 yang mengindikasikan kegiatan usaha domestik masih ekspansif. Di sisi aset, ketidakpastian pasar keuangan global menyebabkan investasi langsung pada 2014 turun menjadi 10,4 miliar dolar AS dari tahun 2013 sebesar 11,1 miliar dolar AS. Namun demikian, karena kenaikan surplus investasi langsung sisi kewajiban lebih besar dibanding penurunan investasi langsung sisi aset, maka surplus investasi secara neto mengalami kenaikan dari 12,3 miliar dolar AS menjadi 15,3 miliar dolar AS. Peningkatan arus masuk investasi langsung tersebut menyebabkan neto kewajiban investasi langsung pada PII Indonesia meningkat dari 211,5 miliar dolar AS pada tahun 2013 menjadi 229,0 miliar dolar AS.

Berdasarkan negara asal investasi, Singapura masih menjadi investor Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia, disusul Jepang (Grafik 4.13). Nilai investasi kedua negara tersebut mencapai 18,2 miliar dolar AS atau 81,6% dari total PMA Indonesia. Di sisi lain, negara-negara kawasan ASEAN juga masih menjadi investor utama bagi Indonesia. Hal ini tercermin dari nilai investasi negara-negara ASEAN yang mencapai 13,5 miliar dolar AS atau 60,6% dari total PMA.

Secara sektoral, realisasi PMA 2014 terkonsentrasi pada lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, perburuan & kehutanan dan pertambangan & penggalian (Grafik 4.14). Minat investor nonresiden yang tetap tinggi tersebut tidak terlepas dari permintaan domestik dan ekspor beberapa komoditas pada lapangan usaha dimaksud yang masih kuat. Nilai investasi pada lapangan usaha industri pengolahan mencapai 7,5 miliar dolar AS dengan Singapura dan Jepang sebagai investor utama.

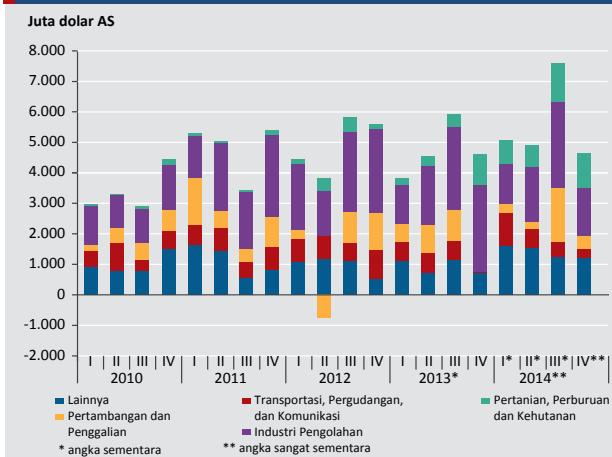
Grafik 4.13. Investasi Langsung Nonresiden menurut Negara Investor Utama



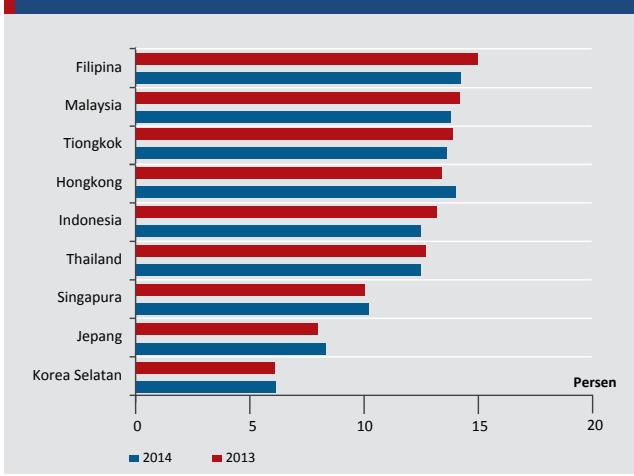
Sedangkan nilai investasi lapangan usaha pertanian, perburuan & kehutanan mencapai 3,8 miliar dolar AS dengan Singapura sebagai investor utama. Sementara itu, nilai investasi lapangan usaha pertambangan dan penggalian mencapai 2,7 miliar dolar AS dengan Tiongkok sebagai investor utama.

Peningkatan PMA di Indonesia juga sejalan dengan *return on equity* (ROE) perusahaan-perusahaan di Indonesia yang cukup tinggi mencapai 12,6% pada tahun 2014, di atas Thailand, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan (Grafik 4.15). Selain itu, peningkatan nilai PMA juga disertai dengan kualitas PMA yang membaik. Hal ini tercermin dari penyaluran PMA yang lebih merata di wilayah Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa pangsa realisasi investasi

Grafik 4.14. Investasi Langsung Nonresiden menurut Sektor Ekonomi



Grafik 4.15. *Return on Equity (ROE) Perusahaan Indonesia dan Kawasan*



Sumber: Bloomberg

di luar pulau Jawa sepanjang 2014 meningkat menjadi 45,9% dari total PMA dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 39,5%. PMA di luar pulau Jawa tersebut terutama terkonsentrasi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.

Investasi Portofolio

Kepemilikan surat berharga domestik oleh investor nonresiden meningkat di tengah faktor global dan sentimen domestik yang mengemuka. Di sisi global, dinamika geopolitik Eropa Timur dan Timur Tengah, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta kemungkinan normalisasi kebijakan the Fed yang lebih cepat dari perkiraan semula, mendorong meningkatnya kekhawatiran investasi di EM. Sementara itu, faktor sentimen domestik terutama terkait dengan pelaksanaan Pemilu legislatif serta ekspektasi inflasi yang meningkat paska kenaikan BBM bersubsidi, juga sempat menjadi faktor pemicu melambatnya arus masuk dana investor nonresiden.

Namun demikian, persepsi positif investor terhadap kestabilan perekonomian Indonesia serta imbal hasil investasi yang menarik melampaui sentimen negatif atas kondisi global dan domestik. Sejalan dengan hal tersebut, arus masuk neto investasi portofolio asing selama 2014 meningkat menjadi sebesar 25,8 miliar dolar AS dari 10,9 miliar dolar AS pada tahun 2013 (Grafik 4.16). Peningkatan tersebut disebabkan oleh investasi portofolio nonresiden di Indonesia (sisi kewajiban) yang meningkat dari 12,1 miliar dolar AS menjadi 23,4 miliar dolar AS. Di sisi lain, investasi portofolio Indonesia ke luar negeri (sisi aset)

mencatat surplus 2,4 miliar dolar AS seiring neto jual investor Indonesia atas instrumen portofolio asing. Dengan perkembangan tersebut, posisi neto kewajiban investasi portofolio pada PII Indonesia 2014 mencapai 192,3 miliar dolar AS, meningkat dari posisi tahun 2013 sebesar 147,2 miliar dolar AS.

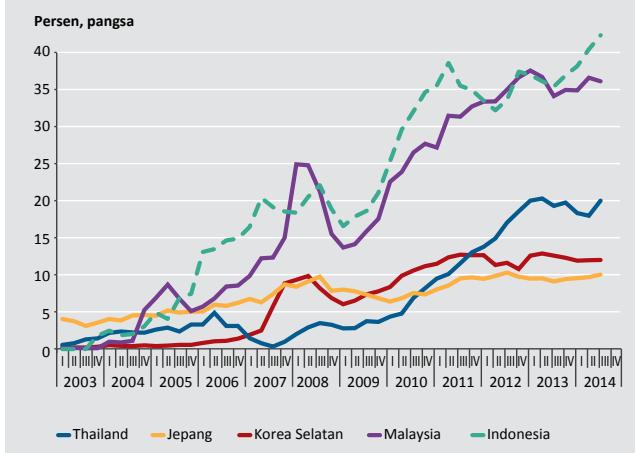
Sepanjang 2014, instrumen portofolio berdenominasi rupiah menjadi kontributor utama peningkatan aliran masuk investasi portofolio. Aliran masuk dana nonresiden secara neto pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi rupiah mencapai 11,8 miliar dolar AS meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 4,7 miliar dolar AS. Sementara itu, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara neto mencatat aliran keluar 0,1 miliar dolar AS, berkebalikan dibandingkan dengan tahun 2013 yang secara neto mencatat aliran masuk 0,3 miliar dolar AS. Di sisi lain, investor nonresiden juga masih meningkatkan kepemilikannya atas surat utang Pemerintah berjangka panjang, termasuk dari penerbitan obligasi dan sukuk global. Penerbitan obligasi global pada 2014 tercatat sebesar 5,1 miliar dolar AS yang terdiri dari 3,7 miliar dolar AS pada Januari 2014 dan 1,3 miliar dolar AS pada Juli 2014. Sementara pada September 2014, pemerintah menerbitkan sukuk global sebesar 1,4 miliar dolar AS.

Optimisme investor nonresiden terhadap ekonomi Indonesia juga tercermin pada peningkatan neto beli saham sebesar 3,5 miliar dolar AS dibandingkan dengan neto jual sebesar 1,9 miliar dolar AS. Di sisi lain, aliran arus modal nonresiden pada instrumen surat utang berdenominasi valuta asing tetap positif ditopang oleh penerbitan obligasi korporasi dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pertamina dan PT

Grafik 4.16. *Investasi Portofolio Asing di Indonesia*



Grafik 4.17. Perbandingan Kepemilikan Obligasi Pemerintah oleh Nonresiden di Beberapa Negara



Sumber: Asian Bond Online - ADB

Perusahaan Gas Negara (PGN) masing-masing sebesar 1,5 miliar dolar AS dan 1,4 miliar dolar AS pada Mei 2014.

Minat investor terhadap aset domestik yang terjaga juga tampak dari lelang SUN di pasar perdana selama tahun 2014 yang selalu mengalami kelebihan penawaran (*oversubscribed*), bahkan meningkat di akhir tahun ketika target lelang pemerintah menurun. Pembelian SUN oleh nonresiden tersebut dilakukan baik oleh investor jangka panjang (*real money*) maupun spekulan (*trader*). Dibandingkan dengan beberapa negara kawasan, akumulasi kepemilikan obligasi pemerintah oleh nonresiden di Indonesia merupakan yang tertinggi diantara negara kawasan (Grafik 4.17).

Investasi Lainnya

Perbaikan kinerja investasi lainnya menjadi salah satu penopang kenaikan surplus transaksi modal dan finansial. Investasi lainnya secara neto mencatat surplus sebesar 2,7 miliar dolar AS, dibandingkan dengan defisit 0,9 miliar dolar AS pada tahun 2013. Perbaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan surplus investasi nonresiden lainnya di Indonesia (sisi kewajiban) dari 2,6 miliar dolar AS menjadi 6,9 miliar dolar AS. Di sisi lain, defisit investasi Indonesia lainnya ke luar negeri (sisi aset) meningkat dari 3,4 miliar dolar AS menjadi 4,2 miliar dolar AS. Seiring perbaikan defisit investasi lainnya tersebut, posisi neto kewajiban investasi lainnya pada PII Indonesia menjadi sebesar 110,3 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 111,2 miliar dolar AS.

Perbaikan kinerja investasi lainnya di Indonesia terutama berasal dari sektor swasta. Surplus investasi lainnya di sektor swasta meningkat disumbang oleh neto penarikan ULN swasta nonafiliasi dan kenaikan simpanan bukan penduduk pada bank domestik. Pinjaman swasta nonafiliasi mencatat neto penarikan 8,2 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,0 miliar dolar AS. Sementara itu, simpanan bukan penduduk pada bank domestik meningkat menjadi 2,4 miliar dolar AS dari 1,4 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Sementara itu, investasi lainnya oleh sektor publik mencatat net pembayaran pinjaman luar negeri sebesar 4,2 miliar dolar AS, naik dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,4 miliar dolar AS. Perkembangan ini sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah untuk mengurangi sumber pembiayaan fiskal yang berasal dari pinjaman luar negeri. Penarikan pinjaman luar negeri Pemerintah turun dari 4,9 miliar dolar AS menjadi 4,0 miliar dolar AS dengan komposisi sebagian besar dalam bentuk pinjaman proyek.

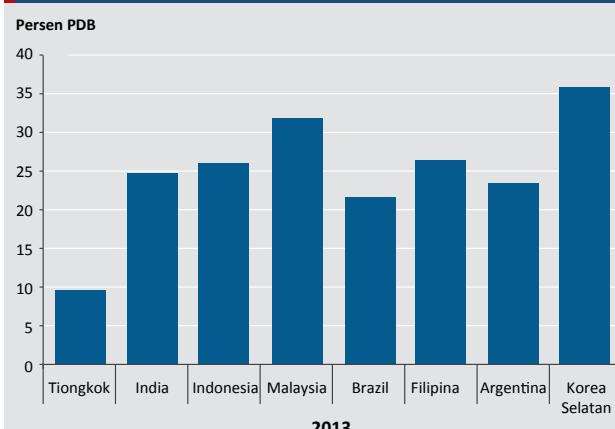
Secara neto, investasi lainnya sempat mencatat defisit pada triwulan I 2014 sebesar 4,7 miliar dolar AS. Defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh penempatan simpanan sektor swasta domestik di luar negeri dan transaksi pinjaman luar negeri sektor publik yang mencatat defisit. Kondisi defisit investasi lainnya tersebut kemudian berbalik menjadi surplus di triwulan II 2014 dan berlanjut hingga akhir tahun. Surplus di tiga triwulan terakhir 2014 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penarikan pinjaman luar negeri bank dan korporasi serta penarikan simpanan domestik di luar negeri.

Utang Luar Negeri

Pertumbuhan ULN Indonesia pada tahun 2014 mengalami akselerasi 10,1% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 5,4%. Hal ini didorong oleh semakin tingginya kebutuhan pembiayaan eksternal. Posisi ULN pada akhir Desember 2014 tercatat sebesar 293,0 miliar dolar AS yang terdiri dari ULN sektor publik sebesar 129,7 miliar dolar AS (44,3% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar 163,2 miliar dolar AS (55,7% dari total ULN). Dengan posisi tersebut, rasio ULN terhadap PDB menjadi 33,0%, naik dibandingkan rasio tahun sebelumnya yang sebesar 29,0%. Rasio tersebut masih dalam area aman dan berada pada kisaran negara *peer group* (Grafik 4.18).

Akselerasi ULN terjadi baik pada ULN sektor publik maupun sektor swasta (Grafik 4.19). ULN sektor publik tumbuh sebesar 5,0% dibandingkan dengan tahun 2013

Grafik 4.18. External Debt to GDP Negara Peer Group

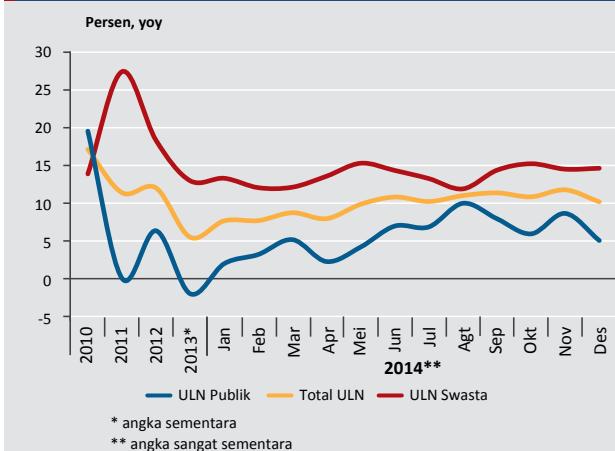


Sumber: World Bank

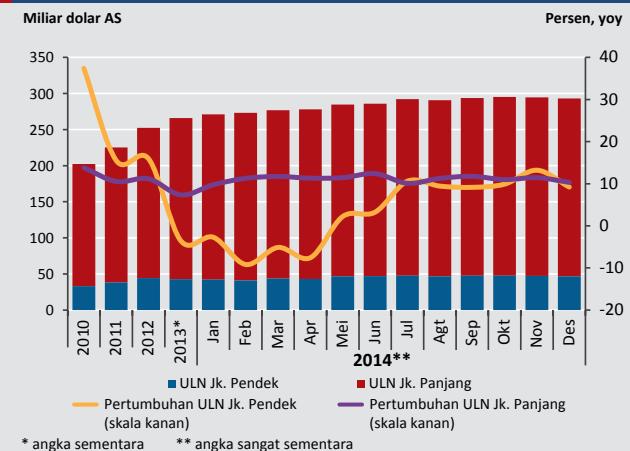
yang mencatat kontraksi 2,0%. Pertumbuhan ULN sektor publik dipengaruhi kepemilikan surat utang Pemerintah oleh nonresiden yang meningkat. Sementara itu, perbaikan perekonomian domestik mendorong ULN sektor swasta tumbuh 14,6%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 12,8%.

Berdasarkan jangka waktu asal, peningkatan pertumbuhan posisi ULN terjadi baik pada ULN jangka pendek maupun ULN jangka panjang (Grafik 4.20). Pada tahun 2014, ULN jangka panjang tumbuh 10,3%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 7,3%. Sementara itu, ULN jangka pendek tumbuh 9,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar -3,6%. Struktur ULN Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang relatif sehat, tercermin dari dominasi ULN jangka panjang baik pada sektor publik

Grafik 4.19. Pertumbuhan ULN Indonesia Berdasarkan Peminjam



Grafik 4.20. Perkembangan ULN Indonesia Menurut Jangka Waktu Asal (*Original Maturity*)



maupun sektor swasta. Posisi ULN jangka panjang pada akhir 2014 mencapai 246,4 miliar dolar AS atau 84,1% dari total ULN, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 84,0% dari total ULN. Dari jumlah tersebut, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai 126,1 miliar dolar AS atau 97,2% dari total ULN sektor publik sementara ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat 120,3 miliar dolar AS atau 73,7% dari total ULN swasta.

4.3. Ketahanan Eksternal

Proses pemulihan keseimbangan eksternal Indonesia masih terus berlangsung dan menuju ke arah yang lebih sehat. Secara keseluruhan, indikator ketahanan eksternal masih menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, meskipun terdapat pelemahan pada beberapa indikator terkait ULN. Di satu sisi, perbaikan NPI menyebabkan sumber pembiayaan jangka panjang untuk menopang defisit transaksi berjalan mengalami peningkatan. Kondisi ini tercermin pada *basic balance* yang meningkat dibanding tahun sebelumnya (Grafik 4.21).⁶ Indikator ketahanan eksternal lainnya, yaitu cadangan devisa juga meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya seiring NPI yang kembali surplus. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan pembiayaan eksternal yang bersumber dari ULN menjadi risiko yang tetap perlu diwaspadai terhadap ketahanan eksternal Indonesia.

6 *Basic Balance NPI* menunjukkan kemampuan pembiayaan transaksi berjalan dengan sumber dari pendanaan jangka panjang. Persamaan yang digunakan : $\text{Basic Balance} = \text{Transaksi Berjalan} + \text{Neto Investasi Langsung} + \text{Neto Investasi Lainnya Jangka Panjang}$.

Dari sisi solvabilitas, beberapa indikator mengindikasikan pelemahan sisi eksternal ekonomi Indonesia dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (Tabel 4.5). Hal ini antara lain dilihat dari lebih rendahnya kemampuan sumber-sumber pendapatan valas dari neraca berjalan untuk menopang neto kewajiban finansial luar negeri (KFLN) dan membayar ULN, seiring bertambahnya KFLN Indonesia di saat kenaikan pendapatan valas relatif terbatas. Namun, penambahan KFLN tersebut diiringi perbaikan pada struktur pembiayaan yang tercermin dari meningkatnya rasio aliran modal asing dalam bentuk non-utang (*non-debt creating inflows*) terhadap PDB dan porsi sumber pembiayaan berjangka panjang (tercermin dari rasio net kewajiban investasi langsung terhadap PDB), sejalan dengan masih derasnya aliran masuk modal investasi langsung.

Di sisi likuiditas, posisi cadangan devisa yang meningkat seiring dengan NPI yang kembali surplus menyebabkan indikator ketahanan eksternal membaik (Tabel 4.6). Posisi cadangan devisa meningkat dari 99,4 miliar dolar AS pada tahun 2013 menjadi 111,9 miliar dolar AS. Jumlah cadangan devisa ini cukup untuk membayai 6,6 bulan kebutuhan pembayaran impor atau 6,4 bulan kebutuhan pembayaran impor dan ULN Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor (Grafik 4.22). Meningkatnya posisi cadangan devisa mengakibatkan kemampuan cadangan devisa untuk menjaga berbagai kewajiban jangka pendek meningkat, terindikasi dari kenaikan rasio cadangan devisa terhadap impor, uang beredar, dan ULN jangka pendek.

Sejalan dengan meningkatnya sumber pembiayaan eksternal yang berasal dari ULN, indikator *debt service*

Tabel 4.5. Rasio Solvabilitas Sektor Eksternal

Indikator	Keterangan	2013*	2014**
1. Rasio Net PII Indonesia terhadap PDB	Rasio yang digunakan untuk mengukur porsi PII dari keseluruhan perekonomian domestik.	40,5	47,2
2. Rasio Net PII terhadap Penerimaan Transaksi Berjalan ¹⁾	Rasio yang digunakan untuk mengukur porsi PII terhadap penerimaan transaksi berjalan.	171,6	195,4
3. Rasio Utang Luar Negeri terhadap PDB	Rasio peran ULN terhadap pembiayaan perekonomian domestik.	29,1	32,9
4. Rasio Utang Luar Negeri terhadap Ekspor Barang dan Jasa	Rasio yang mengukur seberapa besar porsi ULN terhadap penerimaan ekspor barang dan jasa.	129,8	147,5
5. Rasio Utang Luar Negeri Neto ²⁾ terhadap Penerimaan Transaksi Berjalan ¹⁾	Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan membayar ULN neto dari penerimaan transaksi berjalan.	48,6	55,0
6. Rasio Net Kewajiban Investasi Langsung terhadap PDB	Rasio yang digunakan untuk mengukur peran investasi langsung terhadap perekonomian domestik.	27,4	31,3
7. Rasio Non-debt creating inflows ³⁾ terhadap PDB	Rasio yang mengukur peran aliran modal masuk non-utang terhadap pembiayaan perekonomian domestik.	35,9	42,7

1) Selisih antara komponen utang di sisi KFLN dan sisi AFLM pada PII Indonesia

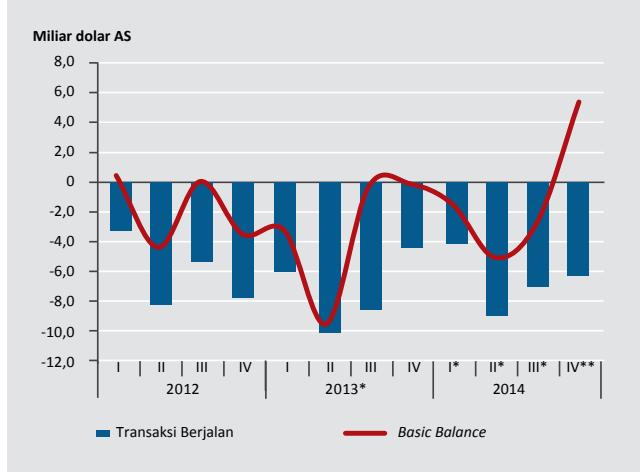
2) Total penerimaan ekspor barang dan jasa serta pendapatan primer dan sekunder

3) Kewajiban Investasi Langsung + Ekuitas Investasi Portofolio

*angka sementara

**angka sangat sementara

Grafik 4.21. Perkembangan Basic Balance NPI



ratio (DSR) lebih rentan dibandingkan tahun 2013.⁷ Indikator DSR meningkat menjadi 46,1% dari 41,2% pada tahun 2013. DSR tersebut terdiri dari DSR sektor publik sebesar (3,0%) dan DSR sektor swasta sebesar (43,1%) (Grafik 4.23). Peningkatan DSR ini, pada satu sisi, tidak terlepas dari penerimaan transaksi berjalan pada tahun 2014 yang menurun sejalan dengan kontraksi ekspor.⁸ Di sisi lain, peningkatan tajam DSR swasta perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan *default risk* (risiko gagal bayar) sektor swasta. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BI telah menerbitkan PBI No 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan

7 Indikator *Debt Service Ratio* atau DSR adalah rasio pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman luar negeri jangka panjang maupun jangka pendek terhadap penerimaan transaksi berjalan.

8 Penerimaan transaksi berjalan (*current account receipts*) adalah penerimaan yang berasal dari ekspor barang dan jasa, neraca pendapatan primer dan pendapatan sekunder.

Tabel 4.6. Rasio Likuiditas Sektor Eksternal

Indikator	Keterangan	2013*	2014**
1. Rasio Cadangan Devisa terhadap Impor Barang dan Jasa	Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan cadangan devisa dalam memenuhi kebutuhan impor barang dan jasa.	47,0	55,4
2. Rasio Cadangan Devisa terhadap <i>Broad Money</i> (M2)	Indikator yang digunakan untuk mengukur dampak potensial dari penurunan kepercayaan terhadap mata uang domestik.	31,0	32,8
3. Rasio Cadangan Devisa terhadap Utang Luar Negeri Jangka Pendek	Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan cadangan devisa dalam membayar ULN jangka pendek.	215,5	235,0
4. Rasio Cadangan Devisa terhadap Utang Luar Negeri Jangka Pendek (sisa jangka waktu)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan cadangan devisa dalam membayar ULN jangka pendek berdasarkan sisa jangka waktu.	176,6	191,6

*angka sementara

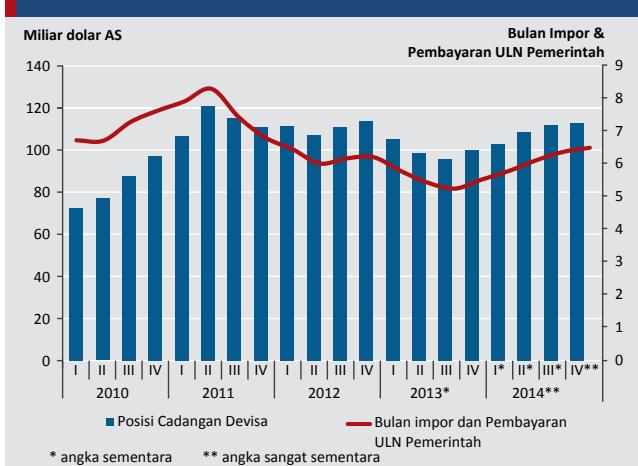
**angka sangat sementara

Grafik 4.23. Perkembangan DSR Indonesia



Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non-Bank dan Surat Edaran Ekstern No 16/24/ Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non-Bank. Ketentuan tersebut dirilis agar korporasi nonbank dapat memitigasi risiko yang dapat timbul dari kegiatan ULN sehingga mampu berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional tanpa menimbulkan gangguan pada kestabilan ekonomi.

Grafik 4.22. Perkembangan Cadangan Devisa





Keterangan gambar:

Tugas pokok Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah yang antara lain tercermin pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lainnya. Tugas ini menjadi tidak mudah di era ekonomi global yang semakin terbuka dan terintegrasi.



BAB 5

NILAI TUKAR

Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas dan arah nilai tukar yang sejalan dengan fundamental perekonomian. Pelemahan nilai tukar yang terjadi pada tahun 2014 juga merupakan respon kebijakan Bank Indonesia untuk mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Depresiasi nilai tukar terutama dipicu oleh berlanjutnya defisit transaksi berjalan dan sentimen eksternal, serta dinamika politik nasional. Namun, perkembangan positif dari struktur mikro pasar valas domestik, kebijakan *dual intervention*, dan pasar keuangan yang semakin dalam bersinergi menghasilkan volatilitas nilai tukar dalam koridor yang stabil.

Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah mampu menjaga stabilitas dan arah nilai tukar yang sejalan dengan fundamental perekonomian di tengah tekanan terhadap nilai tukar yang cukup kuat. Namun, upaya tersebut menghadapi sejumlah tantangan baik dari sisi eksternal maupun domestik. Di sisi eksternal, tekanan nilai tukar tidak terlepas dari pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan penurunan harga komoditas global sehingga berdampak pada defisit transaksi berjalan yang masih berlanjut. Tensi geopolitik Ukraina, Rusia, dan Timur Tengah yang memanas turut memicu peningkatan risiko di negara berkembang dan mendorong aliran keluar nonresiden dalam beberapa periode. Di samping itu, rencana normalisasi kebijakan the Fed seiring dengan perbaikan ekonomi AS memicu penguatan dolar dan turut menekan rupiah terutama pada akhir tahun 2014.

Di tengah ketidakpastian global, tekanan nilai tukar juga terjadi akibat perkembangan dalam negeri yang kurang menguntungkan. Meskipun sempat menguat pada triwulan I 2014 akibat perbaikan indikator domestik dan optimisme pencalonan *popular candidate* pada Pemilihan Umum, rupiah kembali terdepresiasi pada triwulan II – IV. Tekanan nilai tukar semakin kuat dipicu oleh defisit transaksi berjalan yang masih berlanjut serta hasil Pemilu Legislatif yang kurang konklusif akibat tidak adanya partai politik yang menguasai suara secara dominan dan memberikan tantangan pada proses pembentukan koalisasi paska pelaksanaan Pilpres. Paska kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, tekanan depresiasi rupiah masih berlanjut seiring dengan ekspektasi inflasi yang meningkat.

Tekanan rupiah yang cukup kuat tersebut mampu dimitigasi oleh bauran kebijakan dan upaya stabilisasi Bank Indonesia. Pada tahun 2014, secara *point to point*, rupiah terdepresiasi sebesar 1,7% mencapai level Rp11.876 per dolar AS lebih rendah dibandingkan depresiasi pada tahun 2013 yang mencapai 20,8%. Sementara itu, secara rata-rata, rupiah melemah sebesar 12,0% disertai dengan volatilitas yang terus menurun.

Pelembahan nilai tukar juga terjadi di negara-negara lain sebagai konsekuensi dari pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh beberapa bank sentral dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya saing ekspor. Pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan ECB, juga diikuti oleh bank sentral di Asia Pasifik, seperti Tiongkok, Malaysia, Singapura dan Australia dan berdampak pada depresiasi nilai tukar negara-negara tersebut secara bersamaan. Pada tahun 2014, Singapura mencapai depresiasi sebesar 1,3%, sementara Thailand dan Malaysia mencapai depresiasi masing-masing

sebesar 5,8% dan 4,0%. Pelonggaran kebijakan moneter serta pelemahan nilai tukar pada saat yang bersamaan ini mengindikasikan terjadinya *currency war* dalam perekonomian dunia (lihat Boks 5.1).

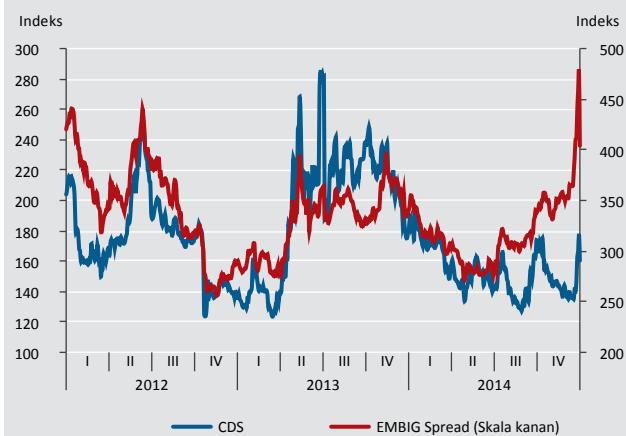
Dalam kerangka kebijakan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menempuh dua kebijakan intervensi (*dual intervention*) di pasar valas dan pasar rupiah melalui Surat Berharga Negara (SBN). Kebijakan intervensi di pasar valas yang dilakukan secara terukur diarahkan untuk meminimalkan volatilitas rupiah. Sementara itu, intervensi di pasar SBN dilakukan untuk menjaga kecukupan likuiditas di sistem perbankan dan mendukung stabilitas di pasar SBN.¹ Keberhasilan kebijakan intervensi tersebut mampu menjaga stabilitas nilai tukar sehingga meningkatkan keyakinan pasar untuk berinvestasi di Indonesia dan memitigasi terjadinya pembalikan aliran modal asing pada saat terjadi kejutan dalam perekonomian.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan pendalamannya pasar valuta asing domestik, khususnya untuk lebih meningkatkan transaksi lindung nilai (*hedging*), pada tahun 2014 Bank Indonesia mengeluarkan rangkaian penyempurnaan ketentuan. Pada tanggal 8 April 2014 Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 16/9/PBI/2014 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai atas kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya lindung nilai atas penghasilan investasi di Indonesia.

Upaya Bank Indonesia untuk mengarahkan nilai tukar sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian juga mampu mengurangi tekanan pada defisit transaksi berjalan. Pelemahan rupiah mampu menekan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat menjadi 3,0% dari PDB dibandingkan dengan 3,2% dari PDB pada tahun 2013 di tengah pemulihan ekonomi global yang lambat dan harga komoditas dunia yang menurun. Bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah juga mampu menjaga kepercayaan investor tercermin pada derasnya aliran masuk modal asing ke Indonesia pada tahun 2014. Di tengah tingginya likuiditas global akibat kebijakan akomodatif beberapa Bank Sentral terutama AS, Eropa, dan Jepang, aliran masuk modal asing meningkat cukup tinggi. Persepsi positif terhadap Indonesia tercermin dari *Credit Default Swap* (CDS) yang menurun dari level 238,7

¹ Penjelasan lebih detil terkait kebijakan *dual intervention* dapat dilihat dalam Bab 10.4.

Grafik 5.1. CDS dan EMBIG Spread



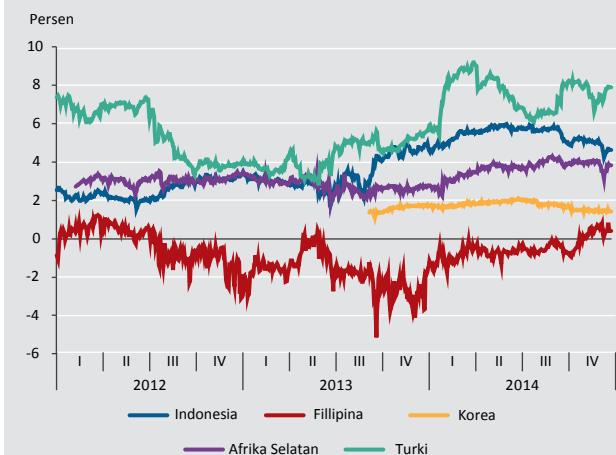
Sumber: Bloomberg, diolah

pada tahun 2013 menjadi 160,3 serta peningkatan *risk appetite* investor yang terindikasi dari *Emerging Market Bond Index Global* (EMBIG) spread yang menurun pada paruh pertama 2014 (Grafik 5.1).² Sementara itu, imbal hasil investasi Indonesia, tercermin oleh *Covered Interest Parity* (CIP), yang meningkat menjadi 5,38% pada tahun 2014 menjadi daya tarik bagi likuiditas global ke dalam negeri. CIP Indonesia juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara, terutama Filipina, Korea, dan Afrika Selatan (Grafik 5.2).

Dengan perkembangan tersebut, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia mampu mengelola masalah trilema kebijakan moneter (*impossible trinity*) untuk menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan sistem devisa bebas. Di tengah tingkat keterbukaan aliran modal yang tinggi, Bank Indonesia mampu mencapai level nilai tukar yang sejalan dengan fundamental perekonomian serta menjaga stabilitas nilai tukar. Pada saat yang bersamaan, independensi Bank Indonesia tercermin dari kebijakan suku bunga tetap sampai dengan bulan November 2014 masih selaras dengan target pencapaian inflasi.

Ke depan, aliran masuk modal asing diharapkan terus berlanjut mengingat likuiditas global masih akan melimpah sejalan dengan kebijakan akomodatif beberapa bank sentral di dunia seperti Jepang, Eropa, dan Tiongkok. Di sisi domestik, persepsi investor yang terjaga, fundamental ekonomi yang membaik serta optimisme terhadap

Grafik 5.2. Covered Interest Parity



Sumber: Bloomberg, diolah

Pemerintahan baru diharapkan dapat menarik aliran masuk modal asing ke Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM juga menjadi sentimen positif bagi investor karena penghematan subsidi BBM dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif dan mendukung kesinambungan fiskal ke depan.

Bank Indonesia akan terus berupaya untuk menjaga nilai tukar bergerak searah dengan fundamental perekonomian dan mengelola volatilitas rupiah dalam koridor yang stabil. Kebijakan stabilisasi tersebut dianggap penting sehingga penyesuaian nilai tukar dapat terjadi secara bertahap dan terukur pada saat pasar mengalami guncangan.

5.1. Dinamika Nilai Tukar

Pada tahun 2014, secara rata-rata, rupiah terdepresiasi 12% ke level Rp11.812 per dolar AS dari Rp10.445 per dolar AS pada 2013. Secara *point to point*, rupiah terdepresiasi sebesar 1,7% mencapai level Rp11.876 per dolar AS lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi pada tahun 2013 yang mencapai 20,8%. Rupiah cenderung melemah hampir pada sepanjang tahun 2014, kecuali pada triwulan I 2014 (Grafik 5.3).

Penguatan rupiah pada triwulan I 2014 dipengaruhi oleh sentimen positif domestik. Secara *point-to-point* (ptp), rupiah menguat 7,13% dibandingkan dengan akhir tahun 2013 dan ditutup pada level Rp11.360 per dolar AS pada akhir triwulan. Penguatan terutama terjadi pada bulan Februari – Maret 2014 ditopang oleh faktor internal berupa perbaikan indikator fundamental ekonomi domestik serta optimisme terhadap pelaksanaan Pemilu.

² EMBIG spread adalah *spread* antara yield surat utang pemerintah AS dan rata-rata tertimbang dari *yield* surat utang negara berkembang. Semakin rendah EMBIG spread maka semakin tinggi toleransi risiko investor (*risk appetite*) investor.

Grafik 5.3. Perkembangan Nilai Tukar 2014



Pada triwulan II-III 2014, rupiah kembali melemah dipicu oleh moderasi pertumbuhan ekonomi domestik dan *risk-on risk-off* kondisi politik dalam negeri. Sementara, dari sisi eksternal, tekanan rupiah terutama bersumber dari kekhawatiran terhadap dampak normalisasi kebijakan the Fed dan perlambatan ekonomi global. Eskalasi ketegangan geopolitik di perbatasan Rusia-Ukraina juga menjadi faktor negatif yang mengoreksi *risk appetite* investor terhadap *high yielding asset* seperti negara berkembang Asia yang kemudian menekan nilai tukar. Ekspansi perekonomian Tiongkok pada triwulan I 2014 yang termoderasi ke level 7,4% (yoY) dari 7,7% (yoY) di triwulan IV 2013 turut menekan nilai tukar negara berkembang Asia.

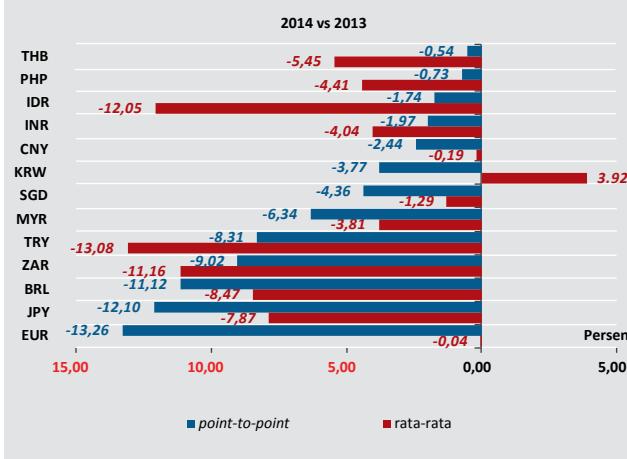
Pada triwulan IV 2014, tekanan terhadap rupiah meningkat dipengaruhi oleh indeks dolar yang terus menguat. Ekonomi AS yang membaik ditengah pemulihan global yang berjalan lambat mendorong peningkatan permintaan dolar sebagai *safe haven assets*. Penguatan indeks dolar tertinggi terjadi pada akhir bulan Desember 2014 mencapai level 90,27 atau terapresiasi sebesar 12,8% (ytd), sehingga menekan nilai tukar rupiah dan kawanannya. Rupiah sempat mencapai Rp12.725 per dolar AS pada tanggal 16 Desember 2014 yaitu level tertinggi sejak tahun 1998. Kemungkinan kenaikan suku bunga the Fed yang lebih cepat (*early-hike*) menjelang FOMC tanggal 16 Desember

sejalan dengan meningkatnya keyakinan pasar terhadap pemulihan sektor tenaga kerja AS turut memberikan tekanan terhadap rupiah.

Selain penguatan indeks dolar, pada triwulan IV 2014, pelemahan rupiah juga didorong oleh krisis Rusia-Ukraina dan kegagalan program *free float* Rusia dalam mengatasi depresiasi mata uang ruble. Akibatnya, beberapa negara berkembang Asia juga mengalami tekanan nilai tukar. Namun, peningkatan tekanan nilai tukar rupiah tersebut dapat dimitigasi dengan baik oleh Bank Indonesia. Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan nilai tukar bergerak sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian, Bank Indonesia mengupayakan kebijakan yang efektif melalui *dual intervention* melalui penjualan valas dan pembelian SBN pada saat yang bersamaan. Meskipun terdepresiasi cukup tajam mencapai level 4,25% dibandingkan dengan akhir November 2014, namun pelemahan rupiah masih lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang Brazil, Jepang, dan India.

Secara keseluruhan, depresiasi rupiah pada tahun 2014 relatif sejalan dengan pergerakan mata uang kawasan (Grafik 5.4). Pelemahan nilai tukar terjadi di hampir semua mata uang, seiring menguatnya indeks dolar. Meski melemah terhadap dolar AS, namun rupiah cenderung

Grafik 5.4. Perubahan Nilai Tukar Kawasan

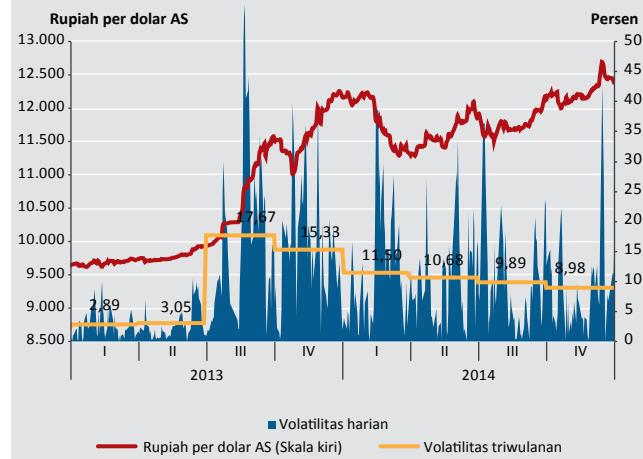


Sumber: Bloomberg dan Reuters, diolah

mengalami apresiasi relatif terhadap mata uang utama lainnya termasuk mata uang negara mitra dagang utama seperti JPY dan EUR (Grafik 5.5).

Pelelemahan rupiah tersebut disertai dengan volatilitas yang terus menurun hingga akhir tahun, meski sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volatilitas rupiah yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2013 terkait dengan perkembangan rupiah yang sempat menguat pada triwulan I 2014 namun kemudian melemah sampai akhir tahun. Secara tahunan, volatilitas rupiah meningkat menjadi 10,2% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 9,71%. Peningkatan volatilitas terutama terjadi pada triwulan I 2014 yaitu sebesar 11,5% yang kemudian terus menurun hingga menjadi 8,98% di triwulan IV. Volatilitas yang terus menurun hingga akhir

Grafik 5.6. Volatilitas Rupiah Triwulanan

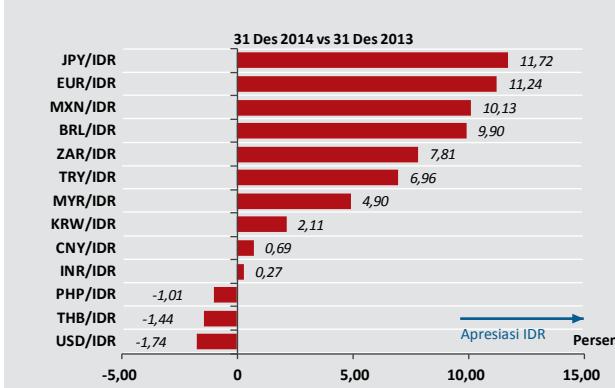


Sumber: Reuters, diolah

tahun tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mengarahkan nilai tukar sesuai dengan fundamental ekonomi (Grafik 5.6).

Di tengah depresiasi rupiah dan ketidakpastian ekonomi global, pasar keuangan domestik mencatat *net inflow* nonresiden yang meningkat signifikan pada tahun 2014. Peningkatan aliran masuk modal asing tersebut sejalan dengan minat investor asing yang terjaga dan imbal hasil instrumen keuangan domestik yang relatif tinggi. Selama tahun 2014, aliran dana masuk nonresiden tercatat sebesar 15,37 miliar dolar AS atau meningkat dari 2,44 miliar dolar AS pada 2013. Akumulasi kepemilikan asing terjadi di SUN dan saham masing-masing mencapai 11,8 miliar dolar AS dan 3,7 miliar dolar AS lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013. Sementara pada instrumen SBI, pelaku asing mencatat *net outflow* sebesar 0,14 miliar dolar AS sejalan dengan beberapa SBI yang telah jatuh tempo (Grafik 5.7).

Grafik 5.5. Perubahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Peer

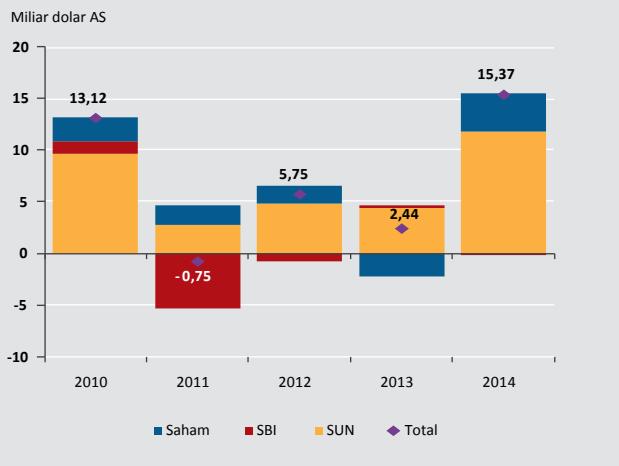


Sumber: Bloomberg dan Reuters, diolah

Aliran masuk modal asing terutama terjadi pada paruh pertama 2014 sejalan dengan optimisme terhadap perbaikan ekonomi domestik dan pelaksanaan PEMILU. Pada triwulan I 2014, peningkatan pembelian asing pada instrumen SUN juga ditopang oleh strategi *front loading* pemerintah. Meskipun demikian, aliran masuk modal asing semakin terbatas pada paruh kedua akibat ketidakpastian faktor domestik dan eksternal.

Pada triwulan IV 2014, terjadi tekanan *outflow* seiring meningkatnya kekhawatiran atas normalisasi the Fed, koreksi harga minyak sampai menyentuh level 55 dolar AS per barel, dan tekanan mata uang Rusia ruble. Tekanan *outflow* pada aliran dana nonresiden mencapai level

Grafik 5.7. Kepemilikan Asing Pada SUN, SBI, dan Saham



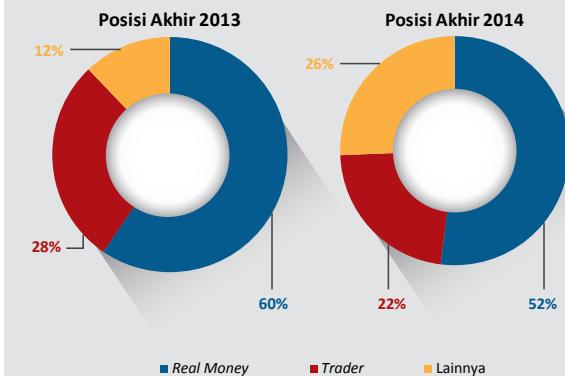
tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 2,4 miliar dolar AS.

Minat investor berinvestasi di aset domestik tetap terjaga meskipun mendapat tekanan *outflow* pada beberapa periode. Hal ini tercermin dari lelang SUN di pasar perdana selama tahun 2014 yang selalui mengalami *oversubscribe* bahkan meningkat pada akhir tahun. Pembelian SUN oleh nonresiden dilakukan baik oleh investor jangka panjang (*real money*) maupun spekulan (*trader*). Porsi kepemilikan investor jangka panjang pada instrumen SUN mencapai pangsa 52%, sementara pangsa spekulan sebesar 22% sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 35%. Selain kedua tipe investor tersebut, akumulasi kepemilikan nonresiden pada instrumen SUN juga berasal dari investor lainnya. Investor ini adalah investor yang baru masuk pada tahun 2014 dan secara statistik belum dapat digolongkan sebagai investor jangka panjang maupun spekulan. Porsi kepemilikan investor nonresiden yang berjenis lainnya tersebut terus meningkat menjadi 26% di 2014 (Grafik 5.8).

5.2. Struktur Pasar Valas Domestik

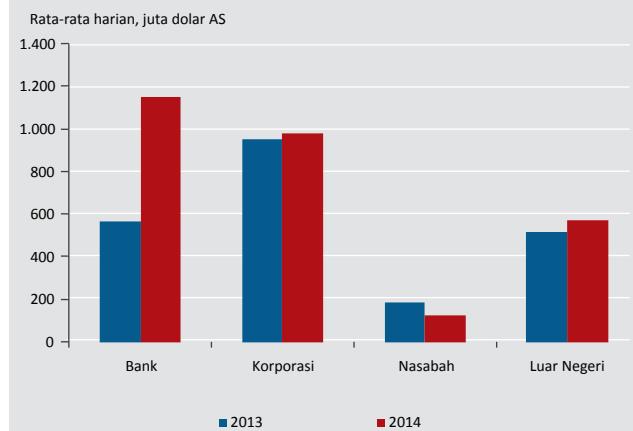
Kebijakan pendalaman pasar keuangan yang ditempuh Bank Indonesia mendorong transaksi di pasar valas yang lebih aktif. Volume transaksi valas selama 2014 meningkat menjadi 2,9 miliar dolar AS per hari dari 2,22 miliar dolar AS per hari pada tahun 2013. Kenaikan volume transaksi tersebut terutama terjadi pada transaksi valas antarbank, nonresiden, dan korporasi, sementara transaksi nasabah (*retail*) sedikit menurun (Grafik 5.9).

Grafik 5.8. Porsi Kepemilikan Nonresiden di Pasar SUN

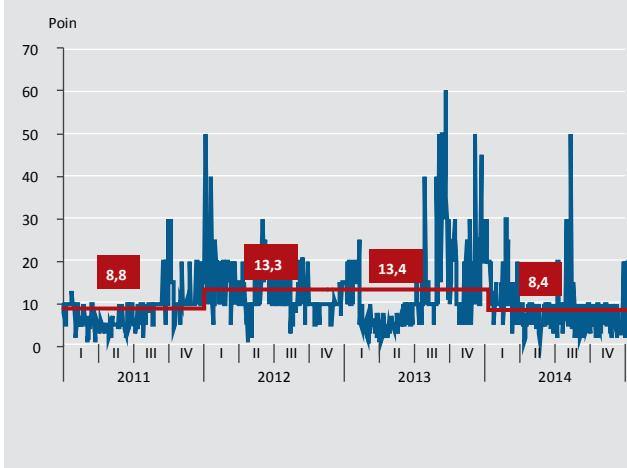


Transaksi di pasar valas yang lebih aktif mampu meredam risiko likuiditas yang dapat menambah tekanan terhadap rupiah. Indikasi lebih aktifnya transaksi valas tercermin dari *spread bid-ask* rupiah yang berada di bawah rata-rata historisnya yaitu sebesar 11 poin. *Spread bid-ask* sempat meningkat pada akhir Juli 2014 terutama akibat risiko politik dalam negeri serta tensi geopolitik global. Namun, *spread bid-ask* kembali turun dan bergerak di bawah rata-rata historis sejalan dengan fundamental ekonomi domestik yang membaik. Pada akhir tahun 2014, *spread bid-ask* mencapai level 8,4 poin atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 13,4 poin (Grafik 5.10). Persepsi investor terhadap pergerakan rupiah ke depan yang lebih terjaga juga tercermin pada *spread NDF-spot* yang tipis mencapai 47 poin lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 87 poin

Grafik 5.9. Volume Transaksi Valas Domestik



Grafik 5.10. Bid - Ask Spread Rupiah

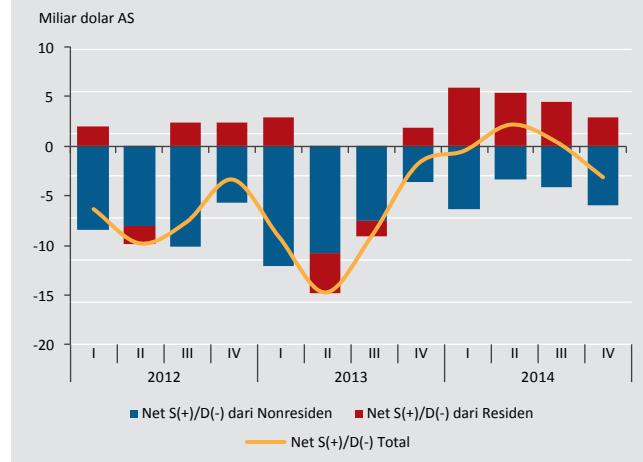


Sumber: Reuters, diolah

meskipun sempat mengalami peningkatan *spread NDF-spot* ke level 124 poin pada Desember 2014.

Pendalaman pasar valas pada tahun 2014 juga terindikasi dari volume transaksi *forward* dan *swap* yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Volume transaksi *forward* meningkat menjadi 158 juta dolar AS per hari, sementara volume transaksi *swap* meningkat menjadi 1,4 miliar dolar AS per hari dibandingkan dengan tahun 2013 masing-masing sebesar 142 juta dolar AS dan 1,2 miliar dolar AS (Grafik 5.11). Meskipun demikian, transaksi *spot* yang masih dominan dibandingkan dengan *forward* dan *swap* menjadi tantangan dalam menjaga volatilitas nilai tukar ke depan. Pada tahun 2014, pangsa transaksi *spot* mencapai sebesar 68%, transaksi *forward* sebesar 4%, dan transaksi *swap* sebesar 28%. Kondisi ini berbeda dengan

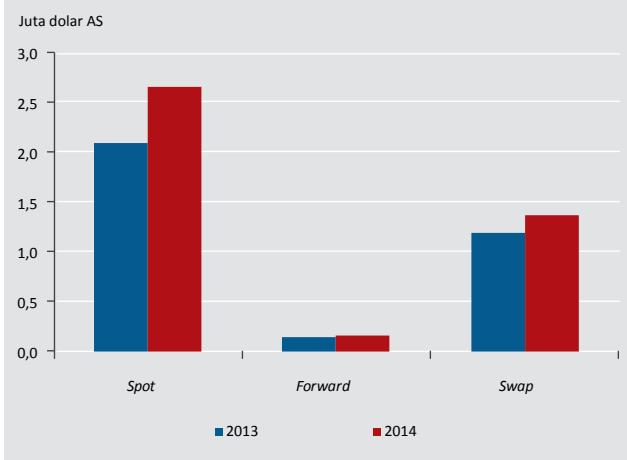
Grafik 5.12. Net Supply dan Demand Valas



komposisi instrumen valuta asing di beberapa negara EM yang menunjukkan transaksi derivatif (*forward* dan *swap*) memiliki proporsi lebih tinggi sehingga volatilitas nilai tukar dapat lebih terjaga.

Pasar valas yang lebih dalam dan aktif menggiring *supply-demand* di pasar valas domestik yang relatif berimbang pada tahun 2014. *Net demand* valas pelaku dalam negeri yang meningkat dapat diimbangi oleh pasokan dari pelaku nonresiden. Pada tahun 2014, pelaku dalam negeri mencatat kelebihan permintaan valas sebesar 19,7 miliar dolar AS yang relatif dapat diimbangi oleh pasokan pelaku nonresiden yang mencapai 18,5 miliar dolar AS. Penurunan permintaan valas dalam negeri sejalan dengan moderasi pertumbuhan impor di tengah pasokan valas dari pelaku nonresiden yang meningkat akibat *bullish* pasar keuangan domestik yang menarik aliran dana dari pelaku nonresiden.

Grafik 5.11. Volume Transaksi *Spot*, *Forward*, dan *Swap*



Secara triwulanan, tekanan permintaan valas terutama terjadi pada triwulan III - IV 2014 seiring dengan meningkatnya kebutuhan valas pelaku dalam negeri di tengah semakin terbatasnya pasokan pelaku nonresiden. Namun, secara keseluruhan pada tahun 2014, pasar valas (residen dan nonresiden) mencatat kelebihan permintaan tipis sebesar 1,23 miliar dolar AS dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 34,91 miliar dolar AS (Grafik 5.12).

Dinamika Global dan Kebijakan Pengelolaan Nilai Tukar

Dinamika perekonomian global terutama memasuki semester kedua 2014 memunculkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan kebijakan nilai tukar. Perbedaan prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dunia memicu divergensi kebijakan moneter. Berlanjutnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan Inggris mendorong semakin kuatnya sinyal kenaikan suku bunga dan pengetatan kebijakan moneter. Sementara itu, tren perlambatan ekonomi Eropa, Jepang dan negara *Emerging Market* (EM) terutama Tiongkok mendorong dilakukannya pelonggaran kebijakan moneter. Sebagian negara EM juga berisiko menerima dampak negatif dari tren penguatan dolar AS terkait ekspektasi kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS (the Fed). Selain itu, tren penurunan tajam harga komoditas, terutama minyak juga menjadi faktor penentu arah perkembangan ekonomi global. Negara eksportir minyak dan komoditas mengalami tekanan pertumbuhan ekonomi, sedangkan negara importir minyak diperkirakan memperoleh tambahan ruang bagi pertumbuhan ekonomi meskipun sebagian dihadapkan pada meningkatnya risiko deflasi.

Perkembangan pemulihan ekonomi yang belum cukup kuat (*sustainable*) dan masih belum berimbang tersebut memicu respon kebijakan moneter bank sentral global yang cenderung agresif. Secara umum, kebijakan moneter bank sentral akhir-akhir ini merespon setidaknya satu dari tiga tantangan yang dihadapi perekonomian, yaitu tekanan perlambatan ekonomi, tekanan deflasi dan tekanan penguatan mata uang yang berlebihan (Diagram 1). Penurunan harga minyak yang tajam sejak memasuki triwulan ketiga 2014 mengancam pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara yang

memiliki kontribusi ekspor cukup tinggi pada PDB-nya, serta meningkatkan risiko sustainabilitas fiskal bagi negara yang mengandalkan penerimaan hasil migas.

Sementara itu, lambatnya pemulihan ekonomi dan meningkatnya tekanan deflasi sejalan turunnya harga minyak dunia memicu semakin kuatnya sinyal kebijakan perluasan *quantitative easing* (QE) oleh European Central Bank (ECB). Mengantisipasi kebijakan QE oleh ECB dan ekspektasi akan semakin menguatnya mata uang kawasan Eropa non-Euro serta meningkatnya tekanan deflasi, termasuk isu potensi kerugian dari pengelolaan cadangan devisa bank sentral Swiss (SNB), direspon SNB dengan kebijakan suku bunga negatif dan pelepasan *upper cap* sebesar 1,2 Swiss Franc per Euro. Respon kebijakan berupa penurunan suku bunga hingga negatif dilakukan pula oleh bank sentral Denmark secara agresif meski tetap mempertahankan *peg* mata uangnya terhadap Euro dan oleh beberapa bank sentral lain non-Euro lain di Eropa. Kebijakan bank sentral yang bersifat menahan apresiasi mata uang (*competitive devaluation*) ini terlihat semakin meluas.

Pengumuman kebijakan perluasan QE oleh ECB direspon beberapa bank sentral yang khawatir terhadap dampak negatifnya dengan melakukan pelonggaran kebijakan. Secara umum, kebijakan moneter longgar dilakukan dengan menurunkan suku bunga acuan (bahkan hingga menembus *zero lower bound*), menambah likuiditas secara langsung (semacam QE), "memperlemah" nilai tukar, atau kombinasi dari beberapa pilihan kebijakan tersebut. Sebagai gambaran, dalam tiga bulan terakhir, setidaknya 17 bank sentral telah menurunkan suku bunga acuan. Sembilan bank sentral diantaranya bahkan menurunkan suku bunganya pada periode Januari – Februari 2015. Tidak hanya itu, berbagai langkah pelonggaran lain seperti menurunkan rasio GWM serta meningkatkan fleksibilitas nilai tukar juga dilakukan, terutama bagi bank sentral yang sudah tidak memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga. Rangkuman dan *timing* respon kebijakan yang diambil oleh beberapa bank sentral terdapat pada Diagram 2.

Langkah pelonggaran kebijakan yang berlangsung hampir dalam waktu bersamaan tersebut di tengah tren penguatan dolar AS dan menjelang dimulainya

Diagram 1. Determinan Respon Kebijakan Bank Sentral

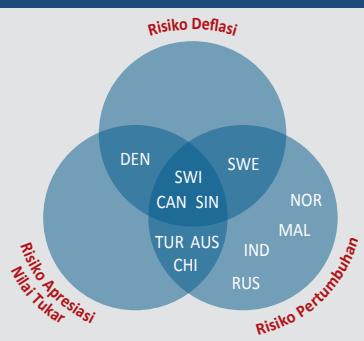
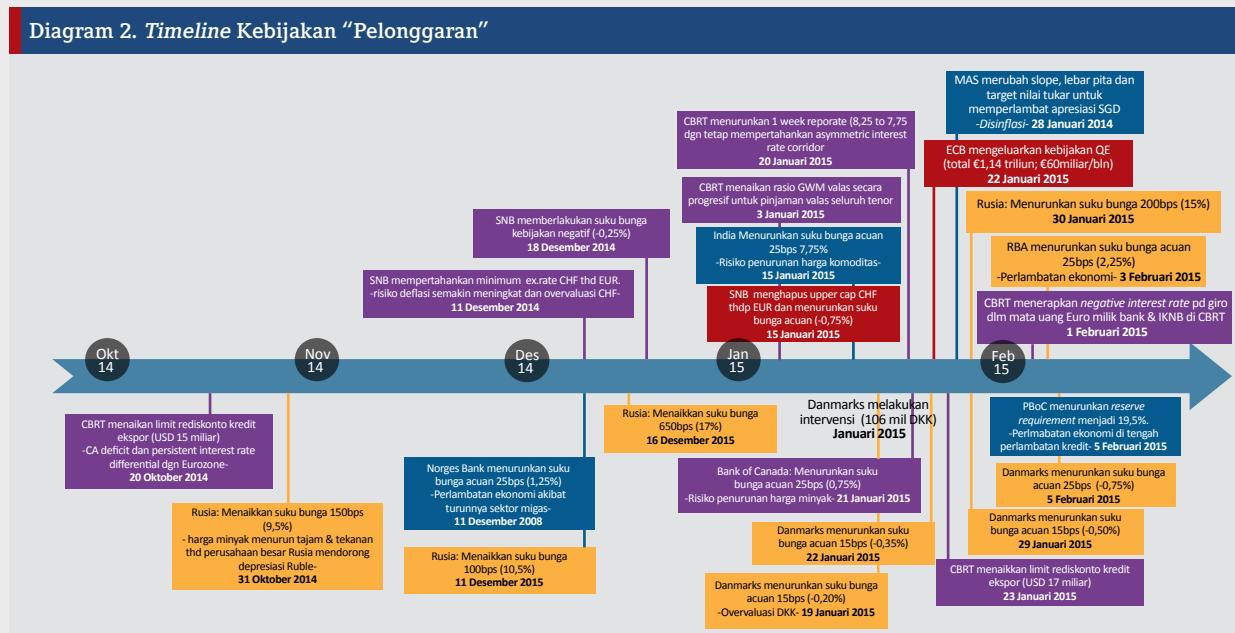


Diagram 2. Timeline Kebijakan “Pelonggaran”



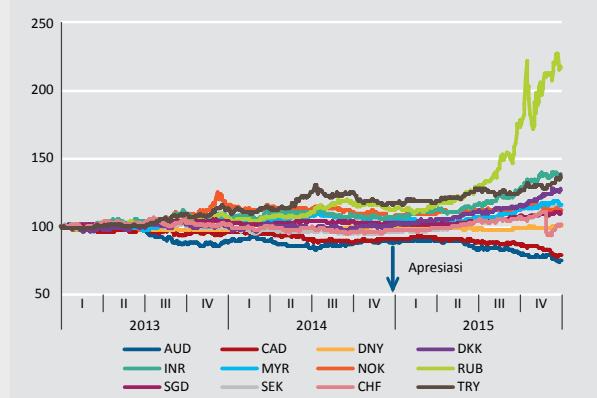
era *quantitative easing* ECB menguatkan indikasi perang mata uang (*currency war*) guna menjaga atau meningkatkan daya saing perdagangan (*competitive devaluation*). Terkait risiko nilai tukar, bagi bank sentral Swiss dan Denmark (termasuk Turki), ancaman terbesar yang dihadapi berupa risiko apresiasi nilai tukar terhadap Euro. Pangsa ekspor Swiss dan Denmark ke Euro area sekitar 40% sehingga upaya menahan apresiasi mata uangnya terhadap Euro penting untuk menjaga daya saing ekspor. Sementara di luar Eropa, khususnya Kanada dan Australia, kekhawatiran terhadap apresiasi nilai tukar terutama terhadap dolar AS (Grafik 1). Bagi Kanada dan Australia (serta Norwegia) langkah pelonggaran kebijakan moneter diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang terdampak penurunan harga komoditas dan menjaga daya saing ekspor, yang notabene merupakan mesin pertumbuhan negara-negara tersebut, khususnya dari sektor minyak dan komoditas primer.

Pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh beberapa bank sentral dunia, termasuk QE yang dilakukan ECB, yang juga diikuti oleh bank sentral di Asia Pasifik, seperti Tiongkok, India, Singapura dan Australia akan berdampak pada keberlangsungan arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam jangka pendek, berbagai kebijakan pelonggaran tersebut telah meningkatkan volatilitas di pasar keuangan. Kekhawatiran akan semakin meluasnya pelonggaran kebijakan moneter di tengah tekanan tren penguatan dolar AS (*broad appreciation*) terkait semakin menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga

the Fed dan masih kentalnya risiko perlambatan ekonomi global dapat memicu *risk off* pelaku pasar global terhadap aset negara berkembang, termasuk Indonesia, yang pada gilirannya dapat memicu *flight to quality*.

Dalam menghadapi tingginya volatilitas dan ketidakpastian di perekonomian global tersebut, Bank Indonesia akan terus mengelola nilai tukar yang sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan menjaga volatilitas nilai tukar rupiah sehingga tidak menimbulkan tekanan pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Langkah stabilisasi tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap mendorong proses penyesuaian eksternal dan memerhatikan ketahanan kecukupan cadangan devisa.

Grafik 1. Indeks Nilai Tukar Beberapa Mata Uang Eropa terhadap USD





Keterangan gambar:

Perekonomian Indonesia pada tahun 2014 antara lain diwarnai dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Di tengah tingginya tekanan dari *administered prices*, termasuk harga solar, inflasi pada tahun 2014 tetap terkendali di *single digit*.

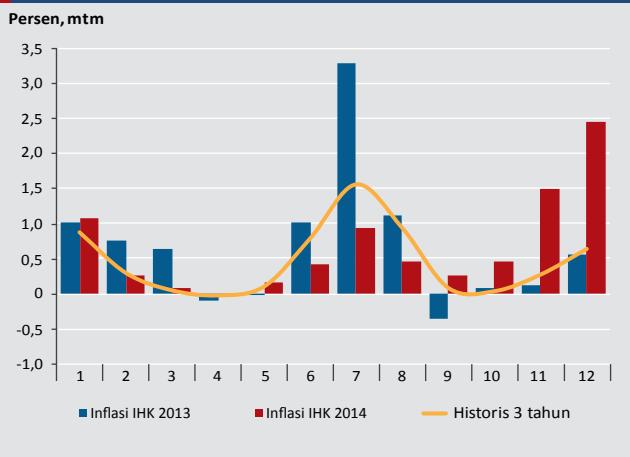


BAB 6

INFLASI

Kebijakan moneter bias ketat yang dilengkapi dengan koordinasi pengendalian inflasi yang solid antara Bank Indonesia dan Pemerintah berhasil mengendalikan inflasi 2014 di tengah tingginya tekanan inflasi pada kelompok *administered prices* dan *volatile food*. Perkembangan inflasi paska kenaikan harga BBM bersubsidi pada 2013 dapat diarahkan kembali pada kisaran sasaran inflasi, terutama pada 10 bulan pertama tahun 2014. Ke depan, dengan adanya reformasi subsidi BBM diharapkan upaya pengendalian inflasi menuju kisaran dapat semakin terjaga.

Grafik 6.1. Perbandingan Inflasi 2013 - 2014 dan Historis 3 Tahun



Sumber: BPS, diolah

Di tengah tingginya tekanan inflasi dari kelompok *administered prices* dan *volatile food*, inflasi tahun 2014 tetap terkendali didukung oleh penerapan kebijakan moneter bias ketat dan koordinasi pengendalian inflasi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Inflasi IHK pada tahun 2014 mencapai 8,36%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 8,38%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari penerapan kebijakan moneter bias ketat dan keberhasilan koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah paska kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan tahun 2013. Terkendalinya inflasi IHK terlihat dari dinamika inflasi bulanan (*month-to-month* atau mtm) pada triwulan I yang terus menurun dan bahkan lebih rendah dari historisnya pada triwulan II sampai dengan triwulan III (Grafik 6.1). Ke depan, kebijakan reformasi subsidi yang telah ditempuh Pemerintah sejak awal tahun 2015 diharapkan dapat memberikan fondasi bagi upaya pengendalian inflasi yang lebih terjaga.

Tekanan inflasi 2014 terutama bersumber dari inflasi kelompok *administered prices* yang meningkat menjadi 17,57% dari 16,65% pada tahun 2013. Tingginya tekanan inflasi tersebut terkait dengan upaya reformasi subsidi energi yang mencakup *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), Tarif Tenaga Listrik (TTL), dan Bahan Bakar Minyak (BBM).¹ Perkembangan inflasi kelompok *volatile food* juga memberikan tekanan terhadap inflasi, tercermin pada gejolak harga pangan pada triwulan IV 2014 akibat terbatasnya pasokan karena faktor musim dan dampak

Grafik 6.2. Inflasi IHK Pada Periode Kenaikan Harga BBM



lanjutan dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Di sisi lain, perkembangan inflasi inti relatif terjaga dan bahkan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, tekanan inflasi yang moderat didukung oleh harga komoditas yang menurun dan inflasi mitra dagang yang melambat, sehingga dapat meminimasi dampak *exchange rate pass-through* dari depresiasi nilai tukar rupiah. Dari sisi domestik, tekanan inflasi juga moderat sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terjaga dan pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat. (Gambar 6.1).

Terjaganya inflasi di tengah meningkatnya tekanan inflasi tidak terlepas dari langkah yang ditempuh Bank Indonesia yang telah secara konsisten menjaga stabilitas makro dan melakukan koordinasi pengendalian inflasi yang semakin baik dengan Pemerintah (Grafik 6.2).² Kebijakan moneter bias ketat yang ditempuh oleh Bank Indonesia dapat mengendalikan ekspektasi inflasi paska kenaikan harga BBM bersubsidi.³ Selain itu, upaya pengendalian inflasi diperkuat melalui koordinasi kebijakan yang semakin baik dengan Pemerintah, baik di pusat maupun daerah dalam forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi antara lain dilakukan melalui rekomendasi pengendalian tarif angkutan darat dan koordinasi dalam menjaga kelancaran distribusi dan bahan pokok.⁴ Dari sisi Pemerintah, pengendalian

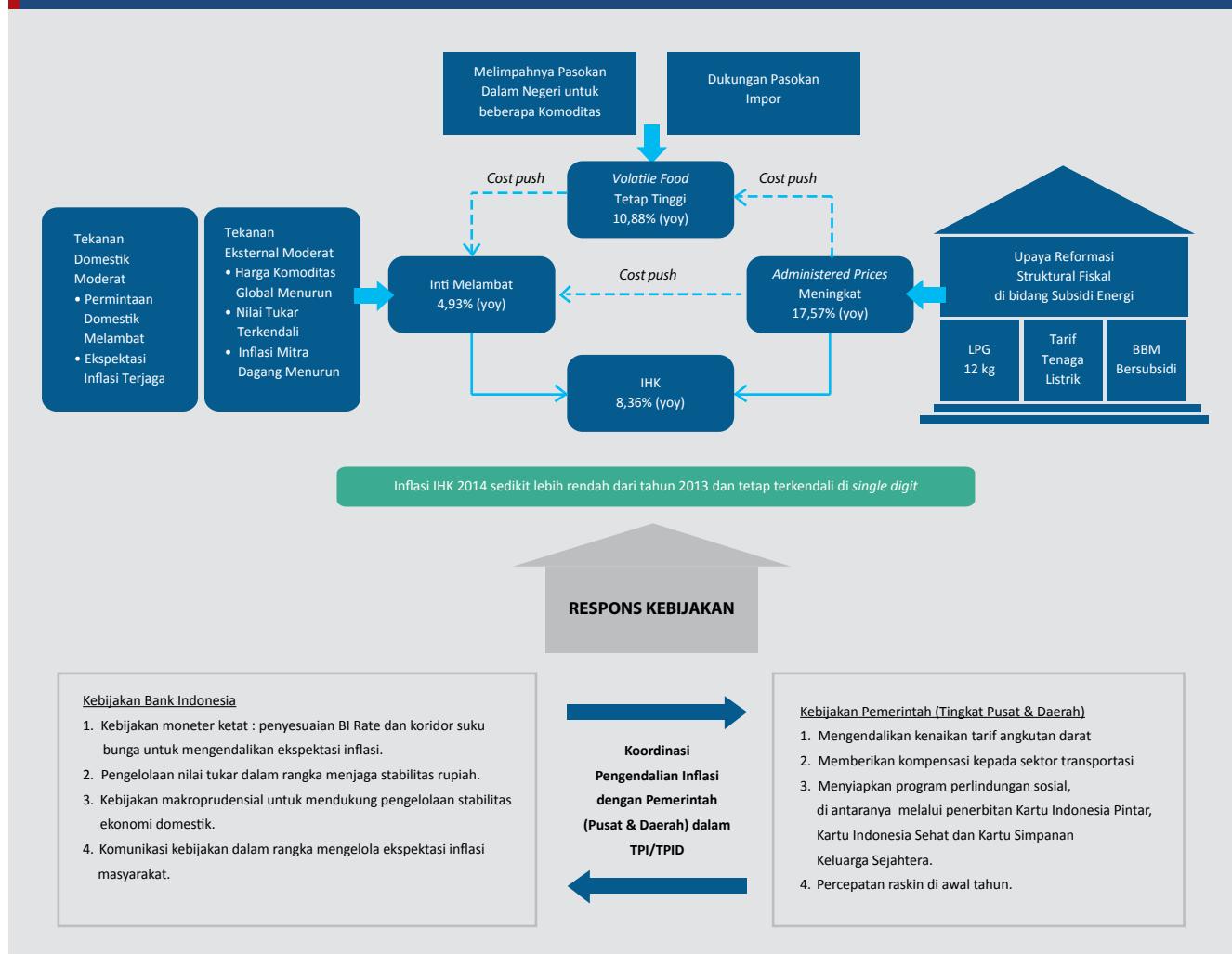
1 Besarnya beban subsidi energi di tengah penerimaan pemerintah yang menurun menyebabkan ruang fiskal Pemerintah menjadi terbatas. Hal ini mendorong Pemerintah untuk menaikkan harga beberapa komoditas pada kelompok energi yang berimplikasi terhadap kenaikan inflasi.

2 Sebelum tahun 2013 – 2014, hanya di tahun 2003 inflasi IHK di periode kenaikan harga BBM bersubsidi tidak mencapai *double digit*. Hal ini terutama didorong oleh deflasi *volatile food* yang sangat dalam pada tahun tersebut (-1,89%).

3 Lebih lengkap lihat Bab 10 Kebijakan Moneter.

4 Dalam rangka menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan dan mempercepat distribusi barang khususnya kebutuhan pokok, Pokjanas

Gambar 6.1. Inflasi 2014 dan Faktor – Faktor yang Memengaruhi



kenaikan tarif angkutan darat, dan penyiapan program perlindungan sosial merupakan kebijakan yang ditempuh guna mengendalikan dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Selama tahun 2014, koordinasi kebijakan pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia dan Pemerintah juga berupaya untuk mendorong reformasi struktural melalui beberapa rekomendasi dan program strategis. Di tingkat pusat, Pemerintah, berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia, menetapkan sasaran inflasi tahun 2016 – 2018 dan kajian rekomendasi di bidang kebijakan energi dan stabilisasi harga pangan. Hal serupa juga dilakukan oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang memiliki beberapa program unggulan seperti:

(i) mendorong terciptanya kesinambungan pasokan antar

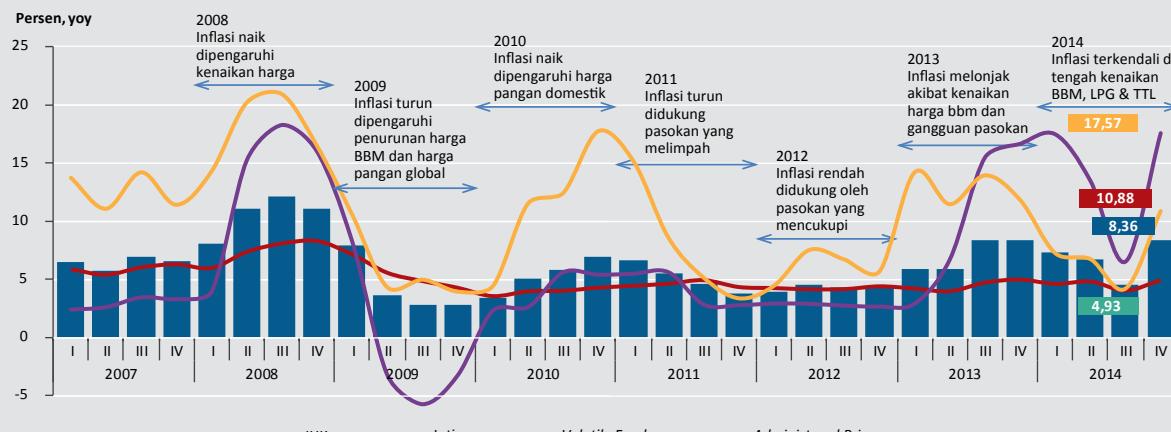
daerah surplus dan defisit yang bentuk kerjasamanya akan mengikuti panduan kerja sama antar daerah yang akan disusun sebagai referensi TPID; (ii) memperluas pengembangan pusat informasi harga pangan di berbagai daerah dan mengintegrasikannya dalam pusat informasi harga nasional dalam rangka memperluas akses informasi harga bagi publik dan mengurangi asimetri informasi harga.⁵

Namun demikian, beberapa permasalahan masih membayangi upaya pengendalian inflasi ke depan (Grafik 6.3). Dari kelompok *administered prices*, terdapat permasalahan tentang ketahanan dan pengelolaan energi domestik. Subsidi TTL dan LPG 3 kg yang masih cukup

TPID merekomendasikan penerbitan Surat Mendagri No.500/6858/SJ Tanggal 24 November 2014 Perihal Pengendalian Inflasi Daerah.

5 Pokjanas TPID terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri yang melakukan fungsi koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di seluruh Indonesia (selengkapnya lihat Bab 13 Koordinasi Kebijakan).

Grafik 6.3. Event Analysis Inflasi



Sumber: BPS, diolah

besar menyebabkan rentannya kondisi fiskal terhadap gejolak harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang berpotensi memicu penyesuaian subsidi dan meningkatkan tekanan inflasi.⁶ Pada kelompok *volatile food*, kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan menjadi sumber risiko utama yang berpengaruh terhadap harga bahan makanan dalam negeri. Sementara itu, pembentukan ekspektasi inflasi yang belum sepenuhnya menjangkar pada sasaran inflasi merupakan tantangan bagi upaya pengendalian inflasi ke depan.⁷

Ke depan, potensi tekanan inflasi akan bersumber terutama dari kelompok pangan, sementara tekanan dari kelompok inti dan *administered prices* diperkirakan relatif moderat. Dari kelompok pangan, risiko bersumber dari faktor iklim yang semakin sulit diprediksi dan masalah struktural di bidang pertanian. Sementara itu, tekanan inflasi inti masih akan terkendali terutama didukung oleh ekspektasi inflasi yang terjaga dan tekanan eksternal yang moderat di tengah tekanan domestik yang sedikit meningkat seiring dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang membaik. Selanjutnya, tekanan dari kelompok *administered prices* diperkirakan akan lebih rendah terutama karena kebijakan Pemerintah yang telah memulai reformasi subsidi energi secara signifikan. Dalam kaitan dengan sumber tekanan inflasi tersebut, agar inflasi tetap terjaga pada sasarnya, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan dan mempererat koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah.

⁶ Subsidi TTL pada pelanggan Rumah Tangga 450 VA dan 900 VA serta Industri Kecil.

⁷ Sasaran inflasi ditetapkan menurun secara bertahap yakni tahun 2016 dan 2017 sebesar $4\pm 1\%$ dan tahun 2018 sebesar $3,5\pm 1\%$.

6.1. Inflasi Inti

Tekanan inflasi inti pada tahun 2014 tetap terjaga di tengah tingginya kenaikan biaya input (*cost push*) yang bersumber dari kenaikan harga BBM bersubsidi dan gejolak *volatile food*. Inflasi inti pada tahun 2014 sebesar 4,93% lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar 4,98%. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar yang terjaga, penurunan harga komoditas global, ekspektasi inflasi yang terkendali, serta perlambatan permintaan domestik.

Terkendalinya inflasi inti terlihat dari dinamika inflasi inti pada semester kedua yang lebih rendah dari tahun lalu. Pada paruh pertama, inflasi inti sempat meningkat sebagai dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah pada tahun 2013 dan meningkatnya tekanan inflasi dari sektor jasa. Transmisi dari depresiasi nilai tukar rupiah pada tahun 2013 pada harga jual baru terjadi pada tahun 2014. Hal ini terlihat dari kenaikan harga beberapa komoditas seperti otomotif, elektronik, dan komoditas lain yang memiliki kandungan impor cukup besar.⁸ Sementara itu, tekanan inflasi dari sektor jasa bersumber dari sektor perumahan (khususnya kontrak rumah dan sewa rumah) dan besaran upah yang antara lain didorong oleh kenaikan TTL dan kenaikan UMP. Di triwulan III 2014, tekanan inflasi kembali melambat sebagai akibat terjaganya ekspektasi inflasi, moderatnya tekanan permintaan domestik, dan minimalnya tekanan eksternal. Pada akhir tahun 2014,

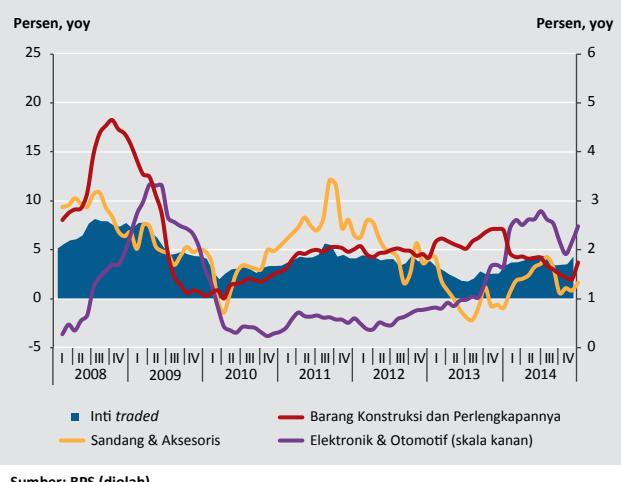
⁸ Rata-rata nilai tukar rupiah mengalami depresiasi cukup tajam pada semester II 2013. Indikasi penundaan *pass through* depresiasi nilai tukar tersebut ke triwulan I 2014 antara lain disebabkan oleh pertimbangan daya beli masyarakat yang melemah dan *timing* penetapan harga yang mayoritas dilakukan pada awal tahun.

tekanan inflasi tetap terkendali sekalipun mengalami inti sedikit peningkatan karena *cost-push* penyesuaian harga BBM bersubsidi (Tabel 6.1).

Apabila dilihat dari determinan inflasi, tekanan inflasi inti dari faktor eksternal (*imported inflation*) relatif moderat. Hal ini terutama karena terjaganya stabilitas nilai tukar dan tren penurunan harga komoditas global yang masih berlanjut. Pengaruh penurunan harga global tercermin pada penurunan indeks harga *imported inflation* menjadi sebesar 9,2% lebih rendah dibandingkan tahun 2013.⁹ Penurunan harga global ini mampu meminimalkan dampak *pass through* depresiasi nilai tukar rupiah pada tahun 2014. Secara keseluruhan, pengaruh eksternal yang moderat tercermin dari inflasi inti *traded* yang hanya mengalami sedikit peningkatan dari 2,6% pada tahun 2013 menjadi 4,3% (Grafik 6.4).¹⁰

Tekanan inflasi dari sisi domestik yang moderat terutama didorong oleh tekanan permintaan yang melambat dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Hal ini tercermin pada inflasi inti *nontraded* (terutama *nonfood* barang dan jasa) dari 6,58% menjadi 5,42% (Grafik 6.5). Tekanan inflasi dari sektor jasa perumahan juga menunjukkan penurunan seiring dengan perlamaan pertumbuhan kredit, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai dampak kebijakan *Loan to Value* (LTV) yang ditempuh Bank Indonesia sejak Juni 2012. Selain itu, terkendalinya *cost-push* dari dampak lanjutan kebijakan energi pemerintah

Grafik 6.4. Dekomposisi Inflasi Inti *Traded*



Sumber: BPS (diolah)

(LPG 12 kg, TTL industri, dan BBM bersubsidi) juga mendorong moderatnya tekanan inflasi domestik.¹¹

Tekanan inflasi dari sisi permintaan melambat seiring dengan moderasi pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2014 menjadi 5,0% dari 5,6% pada tahun 2013. Moderasi permintaan domestik ini ditunjukkan pula oleh kecenderungan penurunan perkembangan beberapa indikator ekonomi. Indikator seperti penjualan eceran dan kapasitas produksi terpakai menunjukkan perlambatan sejalan dengan daya beli masyarakat yang menurun. Selain itu, besaran moneter seperti kredit konsumsi juga menunjukkan perlambatan.

Ekspektasi inflasi yang terjaga mendorong terkendalinya inflasi inti. Hal ini tercermin pada berbagai hasil survei ekspektasi kepada pelaku pasar. Survei *Consensus Forecast* (CF) menunjukkan bahwa peningkatan ekspektasi inflasi sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi hanya terjadi pada triwulan II (Survei Juni) (Grafik 6.6).¹² Terkendalinya ekspektasi inflasi ini tidak terlepas dari dampak kebijakan moneter bias ketat yang ditempuh oleh Bank Indonesia melalui BI Rate yang dipertahankan pada level 7,50% hingga 17 November 2014. Kenaikan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014 direspon oleh Bank Indonesia

Tabel 6.1. Penyumbang Inflasi Kelompok Inti

No.	Inti	(%, yoy)	Kontribusi (%, yoy)
Inflasi			
1	Nasi Dengan Lauk	8,35	0,18
2	Tarif Sewa Rumah	2,75	0,12
3	Mie	9,19	0,11
4	Tarif Kontrak Rumah	2,73	0,11
5	Mobil	3,67	0,08
6	Semen	7,41	0,06
Deflasi			
1	Emas Perhiasan	(1,59)	(0,02)

Sumber: BPS (diolah)

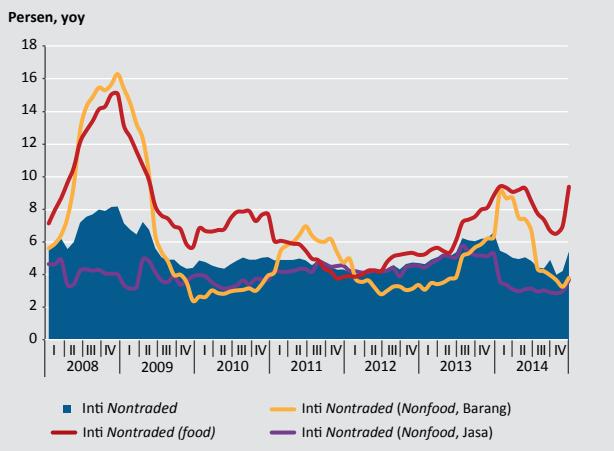
9 Indeks komposit harga global menggunakan metode rata-rata tertimbang (berdasarkan persentase impor dan bobot di IHK) dari komoditas pangan (CPO,gandum, gula, jagung dan kedelai), dan nonpangan (minyak dunia WTI, emas, kapas, dan besi).

10 Definisi ‘traded’ adalah barang yang diperdagangkan baik secara ekspor maupun impor yang tercermin dalam neraca perdagangan.

11 Penyesuaian tarif mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2014 untuk golongan Industri menengah *go public* (I3) dengan kenaikan sebesar 8,6% dan industri besar (I4) dengan kenaikan sebesar 13,3% mulai 1 Mei 2014. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri ESDM No.19/2014, Pemerintah menetapkan kenaikan TTL secara bertahap mulai 1 Juli 2014 untuk 6 golongan, termasuk golongan industri menengah *non go public* (I-3) sebesar 11,57%.

12 Peningkatan ekspektasi inflasi lebih dipengaruhi oleh ketidakpastian *timing* kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah.

Grafik 6.5. Dekomposisi Inflasi Inti Nontraded

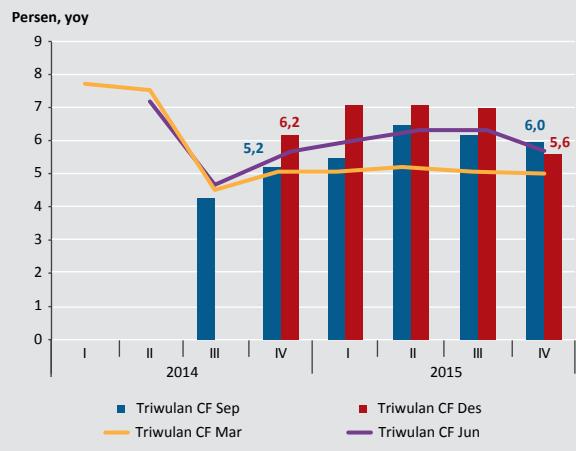


Sumber: BPS (diolah)

melalui bauran kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi yang intensif dengan Pemerintah. Respons kebijakan ini ternyata cukup efektif untuk mengendalikan ekspektasi inflasi para pelaku ekonomi sehingga pada gilirannya mampu menahan tekanan inflasi yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari hasil survei CF Desember yang menunjukkan peningkatan ekspektasi inflasi yang terbatas dibandingkan dengan episode kenaikan harga BBM sebelumnya.¹³ Hasil Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) juga menunjukkan perkiraan inflasi akhir tahun yang terkendali yakni sebesar 7,35%, lebih rendah dari realisasi IHK sebesar 8,36%.¹⁴

Ekspektasi inflasi untuk satu tahun ke depan juga terkendali, terlihat dari penurunan perkiraan inflasi untuk akhir tahun 2015. Berbeda dengan pola historisnya, hasil survei CF Desember menunjukkan ekspektasi inflasi untuk akhir tahun 2015 sebesar 5,6%, lebih rendah dari hasil survei CF September sebesar 6,0%.¹⁵ Hal ini mengindikasikan keberhasilan pengendalian inflasi pada tahun 2013, termasuk respons kebijakan moneter, berkontribusi terhadap pengendalian ekspektasi inflasi yang terjangkar. Berdasarkan survei SPIME, perkiraan inflasi satu tahun ke depan melambat dari perkiraan sebelumnya 6,64% menjadi 5,43%. Berbagai kebijakan yang ditempuh terkait pengendalian inflasi termasuk kenaikan BI Rate

Grafik 6.6. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast



Sumber: BPS (diolah)

ternyata mampu menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan tekanan inflasi paska kenaikan harga BBM bersubsidi akan tetap terkendali dan pada lintasan sasaran inflasi yang ditetapkan.

Pengelolaan ekspektasi inflasi merupakan salah satu tantangan pengendalian inflasi di Indonesia khususnya dalam menjangkar ekspektasi inflasi pada sasarnya. Ke depan, tantangan ini akan semakin berat terutama berkaitan dengan penurunan sasaran inflasi secara bertahap, ditengah pembentukan ekspektasi inflasi yang belum sepenuhnya menjangkar ke sasaran inflasi. Beberapa kebijakan ditempuh untuk mengendalikan inflasi melalui pengelolaan ekspektasi inflasi telah ditempuh, antara lain berupa penetapan sasaran inflasi yang menurun gradual dan penguatan program komunikasi secara intens melalui *interview* di stasiun TV dan komunikasi pada media lain seperti radio dan media online. Terkait pengendalian dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi, komunikasi melalui media massa juga secara intensif dilakukan agar masyarakat memahami bahwa (i) dampak kenaikan harga BBM bersubsidi bersifat temporer, (ii) pengurangan subsidi bermanfaat untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi, dan (iii) adanya program kompensasi yang berdampak positif bagi masyarakat dengan mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap kemiskinan.

13 Pada tahun 2014, setiap 1% rata-rata kenaikan harga BBM bersubsidi akan menaikkan ekspektasi inflasi sebesar 0,03%. Respons ini lebih rendah dibandingkan dengan episode kenaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya.

14 Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

15 Hasil survei CF setelah kenaikan BBM selalu menunjukkan peningkatan ekspektasi inflasi pada akhir tahun pada 1 tahun ke depan.

6.2. Inflasi Volatile Food

Tekanan inflasi *volatile food* relatif terkendali, meskipun sempat meningkat pada triwulan IV 2014. Hal ini terutama karena pasokan yang melimpah pada beberapa komoditas

dan semakin kuat upaya koordinasi pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Inflasi *volatile food* tercatat sebesar 10,88%, lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebesar 11,83%. Tekanan inflasi *volatile food* yang melambat terutama disebabkan oleh perkembangan inflasi daging sapi, daging ayam, dan bawang merah yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (Tabel 6.2). Sementara itu, dampak *cost push* dari kenaikan biaya angkut akibat kenaikan harga BBM bersubsidi relatif moderat seiring dengan terkendalinya kenaikan tarif angkutan.

Terkendalinya inflasi *volatile food* tercermin pada dinamika inflasi bulanan *volatile food* yang lebih rendah dari tahun lalu terutama pada triwulan I - III (Grafik 6.7). Pada triwulan I, meski sempat meningkat pada bulan Januari akibat bencana alam dan banjir yang mengganggu produksi dan distribusi pangan, inflasi secara umum pada triwulan I masih mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I 2013. Berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dampak banjir yang lebih baik dibandingkan dengan episode sebelumnya berhasil mendorong penurunan inflasi pada triwulan I.¹⁶ Pasokan daging ayam dan telur ayam yang melimpah akibat jumlah *Day Old Chicken* (DOC) yang mencukupi juga mendorong rendahnya inflasi pada triwulan ini.¹⁷ Meskipun tekanan inflasi pada triwulan III 2014 meningkat, namun tetap terkendali dan di bawah nilai historisnya hal ini seiring dengan kenaikan permintaan musiman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Keberhasilan pengendalian tekanan inflasi ini merupakan hasil intensnya koordinasi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah.¹⁸

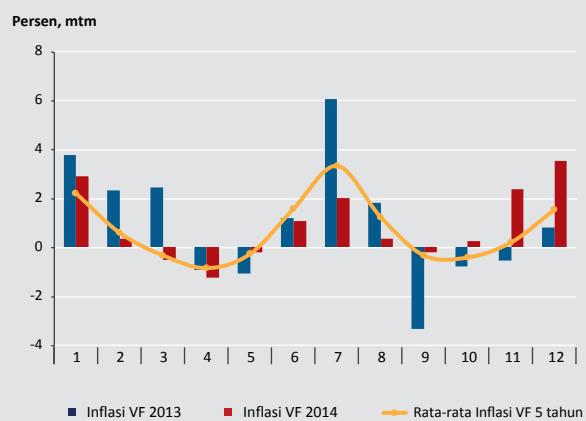
Sementara itu, inflasi *volatile food* pada triwulan IV 2014 meningkat lebih tinggi daripada rata-rata historisnya. Tekanan harga terutama bersumber dari aneka cabai dan beras. Kenaikan harga aneka cabai yang mencapai 40 - 60%, jauh lebih tinggi daripada historisnya, terutama

16 Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah terkait hal ini adalah mempercepat alokasi penyaluran raskin pada Februari – Maret 2014 dan mengintensifkan koordinasi penanganan banjir dengan Pemerintah Daerah yang mengalami bencana seperti Pemda Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.

17 Kemendag mengeluarkan Surat Mendag No.644/M-DAG/SD/4/2014 tanggal 15 April kepada ketua dan anggota Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU Indonesia) dan para pengusaha pembibitan unggas terkait pembatasan produksi DOC dalam rangka menjaga pendapatan yang wajar dari peternak unggas dan agar tidak terjadi lonjakan harga eceran di tingkat konsumen pada saat HBKN.

18 Pokjanas TPID antara lain merekomendasikan penyusunan Surat Mendagri No.511.1/2901/SJ Perihal Menjaga stabilitas harga pangan menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dan Surat Mendagri No.511.2/3419/SJ Perihal Penanganan Pasar Tumpah.

Grafik 6.7. Pola Inflasi/Deflasi *Volatile Food*



Sumber: BPS (diolah)

disebabkan oleh anomali cuaca di sejumlah sentra produksi dan pola tanam yang tidak terkelola dengan baik.¹⁹ Sementara inflasi beras yang lebih tinggi dari rata-rata historis disebabkan oleh pasokan yang terbatas akibat musim paceklik dan kekosongan penyaluran raskin akibat penyaluran yang dipercepat pada awal tahun (Grafik 6.8). Di luar faktor tersebut, estimasi Bank Indonesia menunjukkan dampak *cost push* dari kenaikan biaya angkut akibat kenaikan harga BBM bersubsidi relatif terkendali. Hal ini seiring dengan moderatnya kenaikan tarif angkutan dan keberhasilan langkah – langkah antisipatif TPID untuk menjaga stabilitas harga,

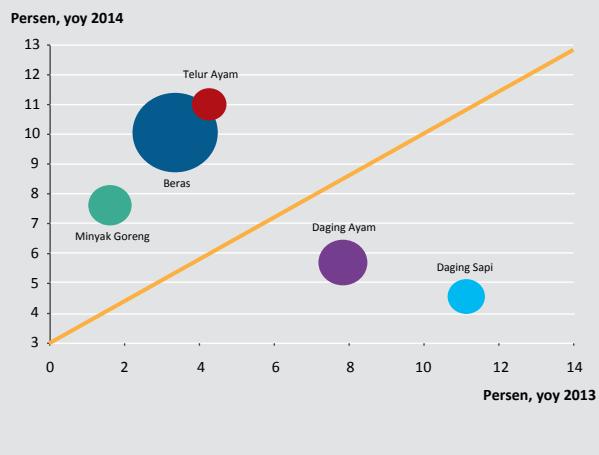
Tabel 6.2. Komoditas Penyumbang Inflasi Kelompok *Volatile Food*

No.	Volatile Food	(%, yoy)	Kontribusi (%, yoy)
Inflasi			
1	Cabai Merah	77,56	0,43
2	Beras	10,07	0,38
3	Cabai Rawit	96,23	0,19
4	Daging Ayam Ras	5,70	0,07
5	Telur Ayam Ras	11,00	0,07
6	Minyak Goreng	7,62	0,07
Deflasi			
1	Bawang Merah	(30,51)	(0,18)

Sumber: BPS (diolah)

19 Terkait dengan pola tanam, kenaikan harga cabai juga didorong oleh rendahnya harga cabai pada panen sebelumnya yang mengakibatkan petani kekurangan modal untuk musim tanam berikutnya sehingga memengaruhi pasokan cabai pada triwulan IV.

Grafik 6.8. Perkembangan Inflasi Bahan Pokok



Sumber: BPS (diolah)

ketersediaan pasokan, dan mempercepat distribusi barang khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

Meski terkendali, tekanan inflasi pada kelompok *volatile food* secara umum masih dipengaruhi beberapa permasalahan struktural ketahanan pangan. Pertama, laju produktivitas yang rendah sehingga produksi domestik belum dapat memenuhi permintaan. Hal ini menyebabkan rentannya harga terhadap gangguan pasokan baik antarwaktu maupun antardaerah. Keterbatasan pasokan domestik kemudian dipenuhi oleh impor seperti yang terjadi pada komoditas bawang merah dan bawang putih. Dalam kondisi ini, kendala implementasi kebijakan pengaturan tata niaga impor akan mendorong kenaikan harga domestik. Kedua, infrastruktur yang belum memadai yang menjadi penyebab sering terjadinya gangguan distribusi pasokan dan ongkos transportasi yang tinggi. Ketiga, mekanisme pembentukan harga yang belum transparan dan struktur pasar yang belum efisien menyebabkan disparitas harga yang lebar terjadi di tingkat produsen dan konsumen.²⁰

Guna mengatasi permasalahan struktural tersebut, koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah perlu terus ditingkatkan. Pokjanas TPID mendorong kerjasama antardaerah surplus dan defisit dalam rangka menjamin kesinambungan pasokan, sementara integrasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional berguna untuk

20 Analisis lengkap lihat Silalahi, et.al. (2011). "Pemetaan Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi". Kertas Kerja. Bank Indonesia; Ridhwan, et.al. (2012). "Perdagangan Antar Daerah, Distribusi, Transportasi, dan Pengelolaan Stok Komoditas Pangan Strategis di Indonesia". Kertas Kerja. Bank Indonesia.

mengurangi asimetri informasi. Selain itu, TPID juga terlibat aktif dalam menyusun rekomendasi kebijakan stabilisasi harga pangan strategis yang berperan penting sebagai masukan bagi kebijakan Pemerintah. Secara umum, rekomendasi kebijakan difokuskan pada penentuan jenis komoditas prioritas yang perlu dijaga stabilitas harganya, penguatan kemampuan modal BULOG, peningkatan cadangan pangan Pemerintah, dan instrumen stabilisasi harga. Dalam jangka panjang, perbaikan juga perlu dilakukan dalam aspek-aspek berikut yakni: (i) jaminan tahun kesediaan benih sepanjang tahun; (ii) perbaikan sistem penyimpanan dan logistik; (iii) pengaturan penyerapan produksi dalam negeri oleh industri sebagai syarat impor; serta (iv) pengintegrasian antara petani produsen dengan industri pengolahan.

6.3. Inflasi Administered Prices

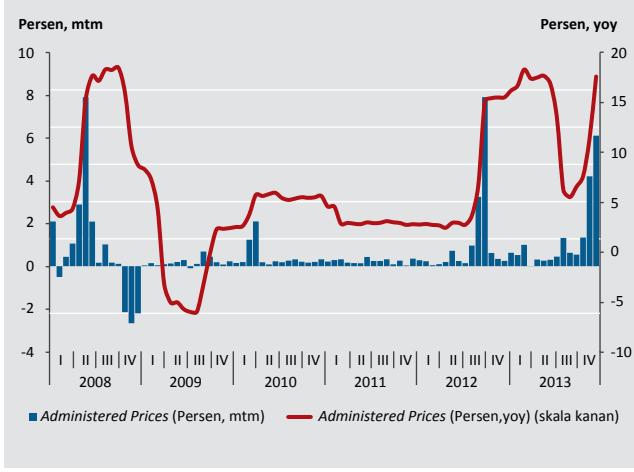
Sepanjang tahun 2014, kenaikan inflasi *administered prices* didorong oleh sejumlah kebijakan reformasi di bidang subsidi energi. Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah antara lain sebagai salah satu upaya untuk mengalihkan beban subsidi energi ke pembiayaan pembangunan pada sektor yang lebih produktif. Kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan inflasi *administered prices* mencapai 17,57%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 16,65% (Grafik 6.9).

Kebijakan Pemerintah terkait harga Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) dan TTL menyumbang inflasi yang cukup signifikan. Tekanan inflasi pada BBRT bersumber dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga LPG 12 kg sebanyak 2 kali (Januari dan September).²¹ Kenaikan ini diperkirakan berdampak pada perubahan pola konsumsi sebagian masyarakat yang beralih ke LPG 3 kg akibat adanya disparitas harga yang lebar antara LPG 3 kg dengan LPG 12 kg. Perilaku ini kemudian mendorong peningkatan permintaan terhadap LPG 3 kg sehingga berdampak pada kenaikan harga LPG 3 kg. Untuk keseluruhan tahun 2014, kelompok BBRT menyumbang inflasi sebesar 0,37%. Terkait TTL, Pemerintah menerapkan kebijakan *tariff adjustment* untuk pelanggan golongan rumah tangga yang sudah mencapai tarif keekonomiannya dan kenaikan tarif listrik untuk kelompok pelanggan tertentu yang diarahkan secara bertahap menuju tarif keekonomiannya.²² Secara

21 Bahan bakar rumah tangga pada keranjang SBH 2012 terdiri dari LPG 12 kg, LPG 3 kg, dan minyak tanah.

22 Penerapan *tariff adjustment* dipengaruhi oleh tiga variabel yakni perubahan harga minyak dunia (ICP), nilai tukar (Rp/USD), dan inflasi.

Grafik 6.9. Pola Inflasi/Deflasi Administered Prices



Sumber: BPS, diolah

total, kenaikan tarif listrik menyumbang tambahan inflasi sebesar 0,64% (Tabel 6.3).²³

Inflasi kelompok *administered prices* kemudian melonjak di penghujung tahun yang didorong oleh kenaikan harga BBM bersubsidi dan dampak lanjutannya terhadap penyesuaian tarif angkutan (Tabel 6.4). Bensin dan Solar secara total menyumbang inflasi sebesar 1,09%, sementara dampak 2nd round-nya kepada tarif angkutan relatif terkendali yakni sebesar 0,66%.²⁴ Dengan perkembangan ini, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2014 kepada inflasi tercatat lebih rendah dibandingkan dengan episode kenaikan BBM sebelumnya yakni pada Maret 2005, Oktober 2005, Mei 2008, dan Juni 2013.

Dampak lanjutan kenaikan harga BBM yang terkendali tersebut tidak terlepas dari keberhasilan penguatan langkah – langkah koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang tergabung dalam TPI baik di pusat maupun daerah. Langkah koordinasi kebijakan antara lain dilakukan dengan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar dengan penetapan batas toleransi kenaikan tarif angkutan darat antarkota dan dalam kota agar dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dampaknya terhadap inflasi. Pemerintah juga menyiapkan beberapa paket kebijakan

Tabel 6.3. Komoditas Penyumbang Inflasi Kelompok Administered Prices

No.	Administered Prices	(%, yoy)	Kontribusi (%, yoy)
Inflasi			
1	Bensin	26,02	1,04
2	Tarif Listrik	21,81	0,64
3	Angkutan Dalam Kota	20,87	0,63
4	Bahan Bakar RT	24,34	0,37
5	Tarif Angkutan Udara	34,12	0,22
6	Rokok Kretek Filter	8,57	0,15
7	Angkutan Antar Kota	19,12	0,14
8	Rokok Kretek	9,75	0,08
9	Solar	36,37	0,06
10	Rokok Putih	9,75	0,05

Sumber: BPS

dan program perlindungan sosial untuk mengurangi peningkatan jumlah masyarakat miskin dan hampir miskin serta mempertahankan daya beli masyarakat.²⁵ Selain itu, bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia juga dapat mengendalikan ekspektasi inflasi sehingga dampak lanjutnya dari kenaikan BBM relatif terkendali.

Terbatasnya produksi minyak dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM yang terus meningkat menjadi salah satu permasalahan struktural kelompok *administered prices* yang perlu dihadapi dalam isu ketahanan dan pengelolaan energi domestik. Subsidi TTL Rumah Tangga untuk golongan 450 – 900 VA dan LPG 3 kg yang masih cukup besar menyebabkan kondisi fiskal rentan terhadap gejolak harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Kondisi ini pada gilirannya akan memicu penyesuaian subsidi yang akan mendorong tekanan inflasi.

6.4. Inflasi Regional

Tren perlambatan inflasi terjadi di hampir keseluruhan kawasan. Pada tahun 2014, perlambatan inflasi yang paling dalam tercatat di Kalimantan dan Sumatera, diikuti oleh Jawa (Gambar 6.2). Sementara inflasi di KTI justru tercatat lebih tinggi. Kebijakan harga di kelompok *administered prices* memberikan dampak yang berbeda di tiap kawasan. Hal ini terkait dengan perbedaan kondisi di setiap kawasan, baik dari aspek konektivitas, struktur pasar,

23 Sebagaimana tahun 2013, kebijakan kenaikan TTL ini masih mengecualikan golongan tarif dengan daya tersambung 450 VA dan 900 VA yang secara nasional berjumlah 79% dari total pelanggan PT PLN.

24 Dampak *second round* kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap tarif angkutan adalah estimasi internal Bank Indonesia dengan mengeluarkan dampak dari kenaikan permintaan dari faktor musiman (Hari Besar Keagamaan Nasional/HBKN) terhadap tarif angkutan.

25 Program perlindungan sosial diantaranya melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).

Tabel 6.4. Kebijakan Pemerintah terkait Administered Prices Tahun 2014

No.	Kebijakan	Periode	Besaran	Keterangan
1	Penerapan pajak rokok	1 Januari 2014	Rata – rata 10%	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak rokok yang dimaksud adalah pungutan atas cukai rokok Pemerintah kepada pengusaha dan importir rokok. Jenis rokok yang ditarik pajaknya adalah sigaret, cerutu, serta rokok daun.
2	Kenaikan harga LPG 12 kg	1 Januari 2014	Rp3.959/kg	Harga jual gas LPG 12 kg di tingkat konsumen mengalami kenaikan rata – rata sebesar Rp3.959/kg.
		7 Januari 2014	Rp1.000/kg	Kenaikan harga jual LPG 12 kg direvisi menjadi Rp1.000/kg
		10 September 2014	Rp1.500/kg	Harga jual LPG 12 kg kembali mengalami kenaikan rata – rata sebesar Rp1.500/kg.
3	Fuel surcharge angkutan udara	26 Februari 2014	Rata – rata 7% - 9%	Biaya tambahan tarif penumpang angkutan udara (<i>surcharge</i>) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No.2/2014. Penerapan ini didorong oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga avtur.
	Tarif batas atas angkutan udara	1 Oktober 2014	Rata – rata 10%	Pemerintah menaikkan tarif batas atas penerbangan sebesar 10% melalui revisi KM 26/2010 tentang Tarif Pesawat Ekonomi, mempertimbangkan kuatnya tekanan finansial terhadap maskapai akibat depresiasi rupiah.
4	Tarif Tenaga Listrik Rumah Tangga	1 Mei 2014	Penyesuaian tarif tiap bulan	Penerapan <i>tarif adjustment</i> terhadap pelanggan listrik nonsubsidi rumah tangga besar >6600 VA (R3) mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2014.
		1 Juli 2014, bertahap tiap 2 (dua) bulan	Bervariasi tiap golongan	Pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No.19/2014, menetapkan kenaikan TTL untuk 6 golongan, termasuk kelompok Rumah Tangga (RT) yaitu (i) R-2 (daya 3.500 VA-5.500 VA) dengan kenaikan rata-rata 5,70%; (ii) R-1 (daya 2.200 VA) dengan kenaikan rata-rata 10,43%; (iii) R-1 (daya 1.300 VA) dengan kenaikan rata-rata 11,36%.
5	Kenaikan harga BBM bersubsidi	18 November 2014	Rata – rata 33,57%	Melalui penetapan Keputusan Menteri ESDM Nomor 34.PM/11/MEM/2014 tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran BBM Bersubsidi, dengan rincian harga bensin premium dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter dan minyak solar dari Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter.
6	Kenaikan tarif angkutan dan penyeberangan	20 November 2014	Rata – rata 10%	Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58/2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi menetapkan besaran kenaikan tarif angkutan penyeberangan rata-rata sebesar 7,12% serta sebesar 10% untuk tarif angkutan antarkota berdasarkan Permenhub Nomor PM 57/2014.

serta kebijakan daerah. Dibandingkan dengan episode kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2013, dampak lanjut dari penyesuaian harga BBM bersubsidi pada tahun 2014 di sebagian besar kawasan cenderung lebih dapat dikendalikan. Ini tidak terlepas dari peran penting TPID dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meredam dampak inflasi lanjut dari kenaikan harga BBM bersubsidi serta gangguan bencana alam di sejumlah daerah. Selain itu, TPID juga secara aktif mendorong sejumlah agenda reformasi struktural, yang secara khusus ditujukan untuk mencapai target sasaran inflasi yang lebih rendah dalam beberapa tahun mendatang.

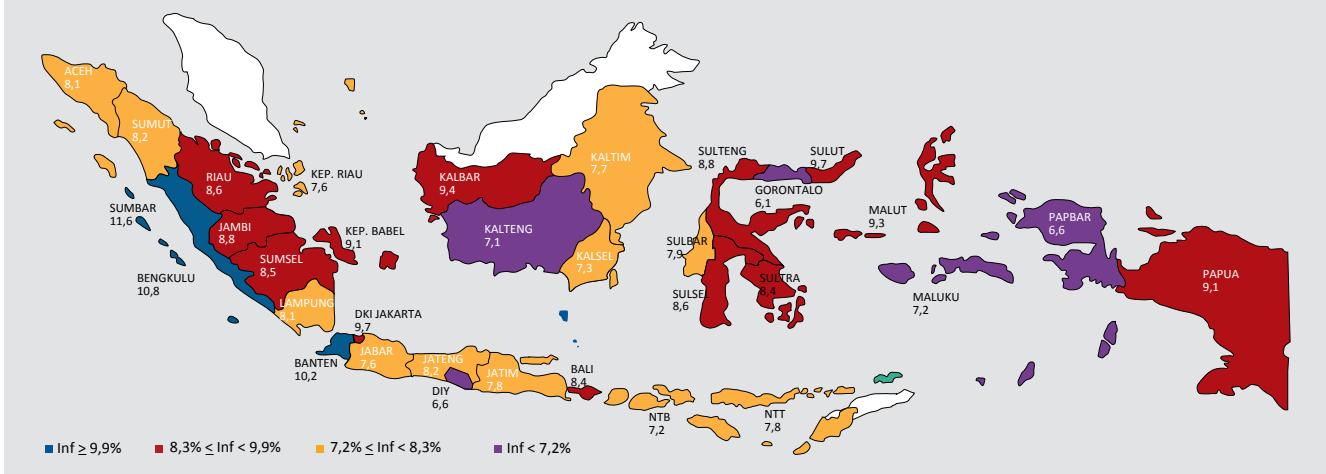
Inflasi Kalimantan merupakan yang terendah diantara kawasan lain. Inflasi Kalimantan tercatat sebesar 7,87%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar 8,56%.²⁶ Perlambatan ini inflasi terutama didukung

²⁶ Lebih rendahnya inflasi Kalimantan terutama didukung oleh melambatnya tingkat inflasi secara signifikan di Kalimantan Timur, yakni dari 9,87% pada tahun 2013 menjadi 7,67% pada tahun 2014.

oleh dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang relatif moderat dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya produk hortikultura. Dalam rangka mengurangi ketergantungan pangan dari luar Kalimantan, terdapat upaya pengembangan klaster cabai dan bawang merah, serta penerapan proyek percontohan metode tanam hazton.²⁷ Kenaikan tarif angkutan di sejumlah wilayah Kalimantan yang relatif lebih rendah pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya di Kalimantan Timur, cukup berpengaruh untuk menahan potensi dampak lanjut yang lebih tinggi. Sementara itu, tingginya intensitas hujan yang mengganggu produksi pangan mendorong kenaikan inflasi Kalimantan Barat. Selain itu, juga terdapat kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah area di wilayah tersebut.

²⁷ Metode tanam hazton menggunakan jumlah bibit yang lebih banyak dalam satu lubang tanam. Pada tahun 2014, hasil pengujian metode hazton yang diterapkan di beberapa sentra di Kalimantan Barat menunjukkan adanya peningkatan produktivitas padi hingga 2 kali lipat.

Gambar 6.2. Peta Inflasi Regional 2014



Sumber: BPS

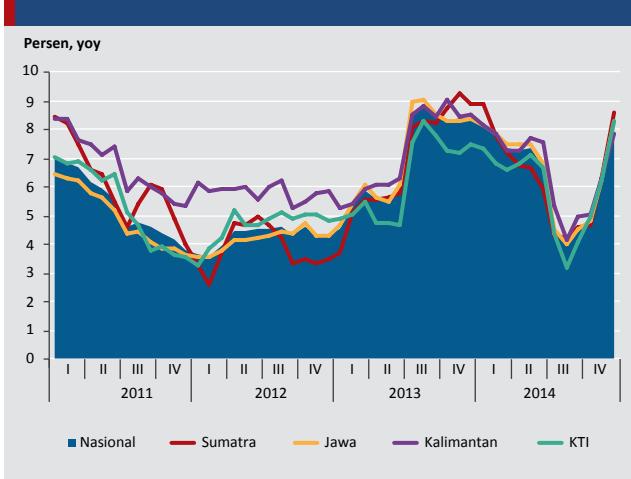
Inflasi kawasan Sumatera juga tercatat melambat, sejalan dengan terjaganya kelancaran distribusi barang dan relatif terkendalinya kenaikan biaya distribusi paska kenaikan harga BBM bersubsidi (Grafik 6.10). Meski dalam tren melambat, inflasi Sumatera merupakan yang tertinggi secara nasional, yakni sebesar 8,63%. Perlambatan inflasi di hampir seluruh wilayah di Sumatera, termasuk Sumatera Utara, yang sempat mengalami gangguan pasokan pangan akibat meletusnya Gunung Sinabung sejak awal 2014. Respons penanggulangan bencana yang terkelola dengan baik menjadi faktor penahan kenaikan inflasi yang lebih tinggi baik di Sumatera Utara maupun di Aceh terkait dengan banjir dialami pada akhir tahun 2014. Provinsi yang mengalami inflasi tertinggi dan juga secara nasional adalah di Sumatera Barat, yakni sebesar 11,58%. Selain terkena dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi, gejolak harga

cabai yang memiliki nilai konsumsi cukup besar di wilayah tersebut turut berpengaruh pada peningkatan inflasi di penghujung tahun 2014.

Perlambatan inflasi Jawa relatif moderat, yaitu menjadi 8,34% pada tahun 2014 dari semula 8,36% pada tahun 2013. Hal ini khususnya dipengaruhi oleh peningkatan inflasi di Jakarta yang cukup tinggi.²⁸ Di sisi lain, terjaganya ketersediaan pasokan dan relatif lebih stabilnya harga pangan menjadi faktor yang menahan peningkatan inflasi di Jawa.²⁹

Bencana alam banjir yang sempat terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah berdampak masih relatif moderat, meskipun luas banjirnya lebih besar daripada tahun 2013 dan sempat terputusnya jalur distribusi utama melalui pantai utara (pantura). Bencana banjir tersebut menyebabkan adanya gangguan produksi pangan di sejumlah sentra produksi pangan, khususnya yang terkena puso. Namun, dukungan Pemerintah Daerah dan keberhasilan koordinasi lintas daerah yang cukup baik menjadi kunci pengedalian dampak bencana banjir pada sejumlah sentra produksi di Jawa. Pergeseran musim tanam akibat faktor cuaca turut memengaruhi dinamika inflasi di Jawa. Tekanan harga aneka cabai di akhir tahun 2014. Sementara itu, kenaikan harga BBM mendorong kenaikan harga barang dan jasa sebagai akibat dari

Grafik 6.10. Perkembangan Inflasi Kawasan



Sumber: BPS, diolah

28 Tekanan inflasi di kawasan Jakarta telah dimulai sejak awal tahun 2014, terkait dengan banjir yang mengganggu ketersediaan pasokan pangan. Peningkatan tekanan inflasi di Jakarta juga bersumber dari kuatnya permintaan yang tercermin pada peningkatan inflasi inti. Inflasi inti di Jakarta pada tahun 2014 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan rata-rata historis lima tahun terakhir.

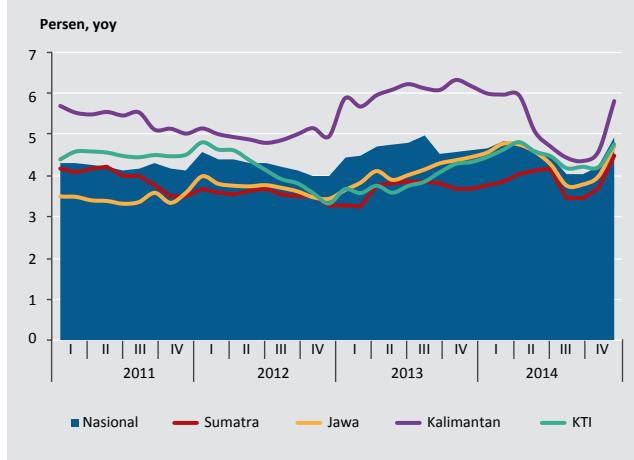
29 Inflasi terendah tercatat di DI Yogyakarta sebesar 6,59% dan tertinggi tercatat di Banten sebesar 10,2%.

meningkatnya biaya distribusi di Jawa. Peningkatan upah di Jawa yang salah satunya didorong oleh kenaikan upah minimum juga menjadi faktor kuatnya permintaan yang berdampak pada inflasi.

Inflasi yang meningkat di KTI terutama bersumber dari wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Bali. Inflasi KTI tercatat sebesar 8,31%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³⁰ Sementara inflasi di Nusa Tenggara tercatat melambat. Peningkatan inflasi dipengaruhi oleh faktor gagal panen sebagai dampak kekeringan di sejumlah sentra produksi pangan. Selain itu, permasalahan kelangkaan pasokan ikan dan pengurangan kuota solar bagi nelayan pada tahun 2014 menjadi penyumbang inflasi di KTI. Meski demikian, sejumlah kerjasama wilayah khususnya dalam rangka ketahanan pangan telah terjalin, seperti antara Gorontalo-Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah. Selain itu, juga terdapat upaya untuk menekan dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan penerapan batas maksimal kenaikan tarif angkutan di sejumlah wilayah di KTI pada kisaran 10 - 15%.

Relatif terjaganya inflasi inti di keseluruhan kawasan dipengaruhi oleh melambatnya permintaan domestik dan terkendalinya ekspektasi inflasi (Grafik 6.11). Bila dibandingkan dengan tahun 2013, inflasi inti hanya melambat di Kalimantan, meskipun secara level merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kawasan lain. Sementara itu, peningkatan inflasi inti di Jawa disebabkan oleh kenaikan tarif listrik untuk industri dan pelemahan nilai tukar dengan dampak terbesar terindikasi di Jakarta. Hal ini didorong oleh kenaikan harga komponen barang

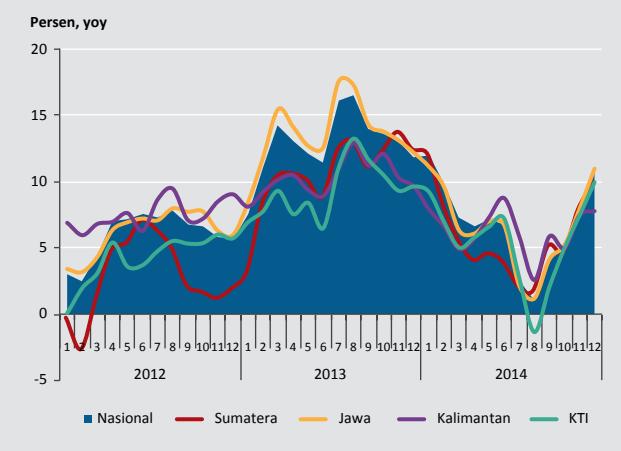
Grafik 6.11. Perkembangan Inflasi Inti Kawasan



Sumber: BPS, diolah

30 Inflasi Sulawesi Utara tercatat paling tinggi, yakni sebesar 9,67%, sementara inflasi terendah tercatat sebesar 6,14% di Gorontalo.

Grafik 6.12. Perkembangan Inflasi *Volatile Food* Kawasan



Sumber: BPS, diolah

impor seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, dan bahan konstruksi, selain peningkatan upah jasa serta sewa dan kontrak rumah.

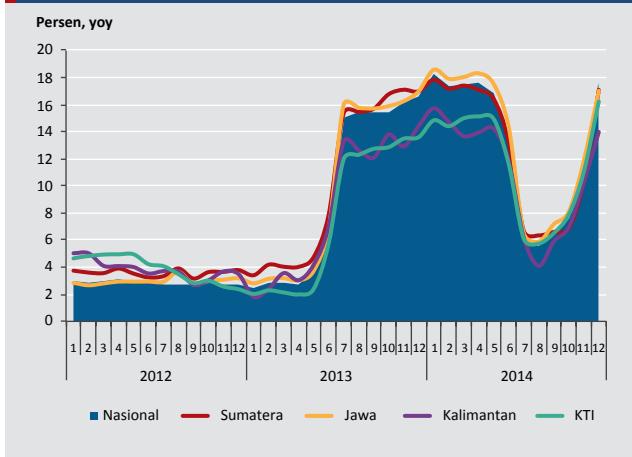
Inflasi *volatile food* dalam tren melambat terjadi di seluruh kawasan hingga bulan Agustus (Grafik 6.12). Perlambatan tersebut sejalan dengan relatif lebih terjaganya pasokan dan harga pangan. Bahkan, inflasi *volatile food* di KTI mampu mencatat deflasi paska puncak permintaan di perayaan Lebaran 2014.³¹ Sementara, tekanan inflasi pada awal tahun akibat bencana banjir hanya lebih berpengaruh ke Jakarta. Inflasi *volatile food* di Jakarta yang secara konsisten lebih tinggi daripada kawasan lain ternyata juga dipengaruhi oleh kuatnya permintaan dan ketergantungan pasokan pangan daripada daerah lain. Pada akhir tahun 2014, inflasi *volatile food* mengalami peningkatan di keseluruhan kawasan sebagai dampak dari kenaikan biaya angkutan paska penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kenaikan harga aneka cabai di sebagian besar kawasan.

Inflasi *administered prices* kembali meningkat dan mencapai double-digit dengan intensitas yang berbeda di keseluruhan kawasan pada tahun 2014 (Grafik 6.13). Hal ini terkait dengan penyesuaian TTL, tarif angkutan, harga BBRT, dan kenaikan harga BBM bersubsidi yang memiliki dampak relatif berbeda terhadap inflasi antardaerah.³² Seperti pada tahun sebelumnya, inflasi *administered prices* tertinggi kembali tercatat di Sumatera dan Jawa. Secara spasial, dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang

31 Deflasi inflasi *volatile food* di KTI pada bulan Agustus 2014 merupakan yang pertama dalam 4 tahun terakhir.

32 Adanya perbedaan bobot komoditas penyumbang inflasi di tiap daerah, menyebabkan sumbangan inflasi dari kenaikan harga atau tarif yang diatur pemerintah (*administered prices*) bervariasi antar daerah.

Grafik 6.13. Perkembangan Inflasi Administed Prices Kawasan



Sumber: BPS, diolah

cukup signifikan terjadi di Jakarta, Banten, dan Sumatera Barat. Sementara di KTI, dampak yang terbesar terjadi di Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara. Apabila dibandingkan dengan episode kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2013, KTI mengalami dampak relatif lebih besar.

Dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM bersubsidi, terutama dari kenaikan tarif angkutan dalam kota, terhadap inflasi berbeda di tiap-tiap daerah.³³ Kenaikan biaya distribusi barang yang bervariasi antar daerah sebagai konsekuensi dari perbedaan biaya operasional transportasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap besaran dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ke inflasi di tiap daerah. Efisiensi sistem logistik yang berbeda di tiap daerah juga turut berpengaruh pada perbedaan kenaikan tarif angkutan barang.

Di samping itu, variasi kenaikan upah minimum juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh pada inflasi regional. Tren kenaikan upah minimum terjadi di seluruh kawasan dan mempunyai dampak pada inflasi dari sisi *cost push* maupun faktor daya saing.³⁴ Secara agregat, kenaikan upah minimum di Jawa yang menjadi basis aglomerasi industri manufaktur relatif lebih rendah pada 2014 dibandingkan kawasan lainnya (Grafik 6.14). Hal ini menjadi faktor penahan inflasi yang tinggi di Jawa yang

Grafik 6.14. Perkembangan Upah Minimum Kawasan



Sumber: BPS, diolah

dapat terjadi dipicu oleh laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat permintaan yang cukup tinggi, serta relatif ketatnya persaingan pasar tenaga kerja trampil di Jawa. Meski demikian, kenaikan upah minimum di Jakarta yang terindikasi lebih cepat dari kenaikan produktivitas pekerja perlu dicermati terutama dalam kaitannya dengan daya saing industri.³⁵

Secara umum, terlihat adanya indikasi tren penyempitan disparitas inflasi dalam 2 tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh semakin terjaganya faktor-faktor inflasi daerah dan semakin efektifnya upaya pengendalian inflasi. Disparitas inflasi cenderung menyempit pada periode moderasi ekonomi 2013 – 2014 sebagai pengaruh dari pelemahan permintaan dan relatif terjaganya ekspektasi inflasi, di tengah gejolak kenaikan harga BBM bersubsidi dalam 2 tahun terakhir.³⁶ Dinamika ini merupakan perkembangan positif bagi upaya untuk mengarahkan inflasi ke tingkat yang lebih rendah dan mendukung proses konvergensi inflasi daerah dalam jangka panjang. Meski demikian, masih diperlukan upaya dan komitmen yang kuat untuk memperbaiki konektivitas antardaerah, terutama di KTI yang diidentifikasi memiliki hambatan struktural dari sisi infrastruktur dan sistem logistik.

³³ Penyesuaian tarif angkutan dalam kota sekitar 15 - 33%, lebih rendah dibandingkan dengan periode kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2013 yang secara rata-rata mencapai 29,7%. Kenaikan tarif angkutan umum yang tinggi terjadi di Jakarta, sementara kenaikan yang cukup rendah tercatat di Makassar.

³⁴ Peningkatan upah minimum tertinggi pada 2014 terjadi di NTT sebesar 38,6%, sedangkan yang terendah tercatat di DI Yogyakarta sebesar 4%.

³⁵ Kajian Faktor Inflasi Jakarta: Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Inflasi Jakarta, Grup Asesmen Ekonomi, 2014.

³⁶ Episode kenaikan harga BBM bersubsidi tahun 2005 dan 2008 menunjukkan disparitas inflasi yang melebar cukup signifikan.



Keterangan gambar:

Pengelolaan keuangan negara pada tahun 2014 dihadapkan pada tantangan defisit fiskal akibat penerimaan yang menurun di tengah belanja subsidi yang terus meningkat. Guna menjaga sustainabilitas fiskal, belanja pemerintah melambat dan berdampak pada terbatasnya alokasi belanja infrastruktur. Ke depan, alokasi belanja instrastuktur, seperti jalan dan jembatan Kelok Sembilan di Sumatera Barat ini, perlu ditingkatkan guna meningkatkan daya dukung modal dasar pembangunan pada pertumbuhan ekonomi nasional.



BAB 7

FISKAL

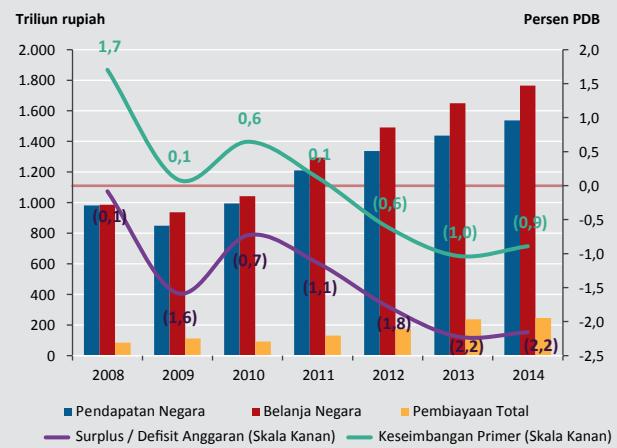
Pemerintah mampu menjaga kesinambungan fiskal tahun 2014 dengan defisit sebesar 2,2% dari PDB, di tengah berbagai tekanan ekonomi global maupun domestik serta transisi pemerintahan. Beban subsidi BBM yang besar di tengah penerimaan negara yang menurun mendorong Pemerintah melakukan penghematan belanja, sehingga daya dukung fiskal terhadap perekonomian menurun. Ke depan, pelaksanaan realokasi penghematan subsidi BBM untuk belanja yang lebih produktif dan penguatan kesejahteraan sosial diharapkan dapat mendorong peran fiskal yang semakin signifikan dalam perekonomian sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.

Kesinambungan fiskal pada tahun 2014 tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, serta pergantian pemerintahan. Transisi pemerintahan yang berlangsung dengan baik berkontribusi positif dalam mendukung stabilitas perekonomian, meskipun dengan peran Pemerintah dalam perekonomian yang lebih terbatas. Defisit fiskal dapat dijaga stabil sebesar 2,2% dari PDB, disertai dengan defisit keseimbangan primer yang membaik menjadi 0,9% dari PDB dibandingkan dengan 1,0% dari PDB pada tahun 2013 (Grafik 7.1). Defisit primer ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan beberapa negara *Emerging Markets (EM)* seperti India, Malaysia dan Thailand.

Terjaganya defisit fiskal pada tahun 2014 tidak hanya mencerminkan dampak dari dinamika ekonomi global dan domestik, namun juga dinamika pergantian pemerintahan. Kondisi ekonomi global yang tidak sebaik perkiraan semula berdampak pada moderasi ekonomi domestik yang lebih dalam (Tabel 7.1). Perkembangan ini berdampak terhadap penerimaan Pemerintah yang menurun signifikan. Realisasi total penerimaan hanya mencapai 94% dari target APBN-P, yang merupakan capaian terendah pascakrisis keuangan global tahun 2008. Penurunan penerimaan yang sudah terindikasi sejak awal tahun tersebut menyebabkan Pemerintah melakukan strategi penghematan belanja guna mengendalikan defisit agar tidak melampaui target. Kondisi ini menyebabkan konsumsi Pemerintah pada tahun 2014 tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal.

Selain menempuh kebijakan penghematan belanja, Pemerintah juga melakukan realokasi subsidi BBM

Grafik 7.1. Perkembangan Fiskal 2008-2014



Sumber: Kementerian Keuangan, menggunakan PDB dengan metode dan tahun dasar 2010

kepada belanja yang bersifat produktif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada November 2014 telah meletakkan dasar bagi keberadaan ruang fiskal yang lebih luas dan reformasi energi yang lebih solid. Pada akhir tahun, realisasi nominal belanja subsidi BBM dapat ditekan di bawah pagu, meskipun volume konsumsi sedikit lebih tinggi dari pagu. Kenaikan harga BBM bersubsidi yang disertai dengan penghematan belanja sejak awal tahun pada akhirnya mampu mengendalikan defisit di bawah target. Secara keseluruhan, kebijakan tersebut berdampak pada penyerapan dan kualitas belanja Pemerintah yang menurun. Penyerapan belanja pada tahun 2014 hanya mencapai 94% dari target dengan pangsa subsidi BBM yang meningkat dan pangsa belanja modal yang menurun.

Tabel 7.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Asumsi Makro	2013			2014		
	APBN	APBN-P	Realisasi	APBN	APBN-P	Realisasi*
Pertumbuhan ekonomi y.o.y (%) ¹	6,8	6,3	5,6	6,0	5,5	5,0
Inflasi y.o.y (%)	4,9	7,2	8,4	5,5	5,3	8,4
Nilai tukar (rupiah terhadap dolar AS)	9.300	9.600	10.445	10.500	11.600	11.878
Rata-rata suku bunga SPN 3 bln (% per tahun)	5,0	5,0	4,5	5,5	6,0	5,8
Harga minyak internasional-ICP (dolar AS per barel)	100	108	106	105	105	97
Lifting minyak Indonesia (ribu barel per hari)	900	840	825	870	818	794
Lifting gas Indonesia (ribu barel setara minyak per hari)	1.360	1.240	1.213	1.240	1.224	1.221

Sumber: Kementerian Keuangan, ESDM dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

*) Sumber: Konferensi pers Kemenkeu tentang realisasi APBN-P 2014 pada tanggal 5 Januari 2015

¹⁾ Pertumbuhan ekonomi harga konstan yang telah menggunakan metode dan tahun dasar 2010

Ekspansi likuiditas Pemerintah berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejalan dengan kebijakan penghematan belanja. Secara kumulatif, sampai dengan bulan Juli, operasi keuangan Pemerintah masih mencatat *net inflow*, berbeda dengan pola historisnya. Untuk keseluruhan tahun 2014, *outflow* operasi keuangan Pemerintah juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 sejalan dengan penerapan strategi *front loading* dalam penerbitan SBN dan kebijakan penghematan belanja yang berlangsung sejak awal tahun.

Ke depan, pelaksanaan komitmen pemerintahan baru terhadap reformasi struktural sangat penting untuk mendorong peran fiskal yang lebih signifikan dalam perekonomian sekaligus menjaga ketahanan fiskal. Selain itu, realokasi penghematan subsidi BBM untuk berbagai program perlindungan sosial perlu dipastikan tepat sasaran sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

7.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2014 menurun dibandingkan dengan tahun 2013. Penurunan tersebut tampak baik dari penurunan porsi terhadap PDB, pertumbuhan nominal maupun dari capaian terhadap target APBN-P (Tabel 7.2). Penurunan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat dan harga komoditas seperti CPO, batubara dan minyak yang menurun. Selain itu, perlambatan ekonomi tahun lalu juga menyebabkan cukup besarnya jumlah restitusi pajak yang harus dibayarkan Pemerintah pada tahun 2014.¹

Penurunan terbesar tercatat pada komponen penerimaan pajak dengan rasio pajak yang turun tajam (Grafik 7.2).² Capaian penerimaan pajak hanya sebesar 91,7% dari target, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 93,8% dari target APBN-P. Target pajak yang tidak tercapai mencapai Rp 102,8 triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2013. Capaian penerimaan pajak yang semakin jauh dari target perlu diwaspadai mengingat pemerintahan baru memerlukan penerimaan negara dalam jumlah yang cukup besar

untuk mendanai berbagai program reformasi yang telah direncanakan.

Capaian penerimaan yang menurun juga terjadi pada komponen lain seperti PPh Migas, PPN, Cukai, dan Pajak Perdagangan Internasional. Faktor yang dominan menyebabkan penurunan ini adalah perlambatan ekonomi domestik dan global serta penurunan harga komoditas global seperti harga minyak. Penerimaan perpajakan yang turun cukup besar telah mengurangi dominasi penerimaan pajak terhadap total penerimaan (Grafik 7.3). Secara sektoral, penerimaan pajak dari sektor pertambangan, sebagai salah satu sektor andalan penerimaan perpajakan, mencatat penurunan yang cukup signifikan akibat kebijakan minerba yang diterapkan Pemerintah sejak awal tahun 2014.

Di sisi lain, PNBP menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan capaian yang relatif stabil, mampu sedikit melampaui target APBN-P. Depresiasi nilai tukar di tengah penurunan harga komoditas menghasilkan dampak yang relatif netral terhadap PNBP (Tabel 7.2). Capaian PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas melampaui target, sementara capaian PNBP SDA Nonmigas di bawah target.

Dari sisi kebijakan, sepanjang tahun 2014 Kementerian Keuangan telah secara aktif menggunakan kebijakan perpajakan dan bea cukai guna mendorong percepatan reformasi struktural. Beberapa dari kebijakan yang ditempuh terindikasi berdampak negatif terhadap penerimaan Pemerintah dalam jangka pendek seperti kebijakan terkait minerba dan bea masuk ditanggung Pemerintah atas berbagai produk impor yang penting bagi industri sektor tertentu di dalam negeri. Sementara itu,

Grafik 7.2. Tax Ratio



Sumber: Kementerian Keuangan, BPS, diolah

1 Dengan sistem *cash basis* maka restitusi pajak akan mengurangi penerimaan pajak tahun berjalan.

2 Rasio pajak mengalami perubahan seiring dengan perubahan metode dan tahun dasar (2010) dalam perhitungan PDB.

Tabel 7.2. Realisasi APBN-P

Rincian	APBN-P 2013		Realisasi LKPP 2013				APBN-P 2014		Realisasi 2014*			
	Triliun Rp	Triliun Rp	% PDB**	%yoy	% APBN-P	Triliun Rp	Triliun Rp	% PDB**	%yoy	% APBN-P		
A. Pendapatan Negara	1.502,0	1.438,9	15,1	7,5	95,8	1.635,4	1.537,2	14,6	6,8	94,0		
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.497,5	1.432,1	15,0	7,5	95,6	1.633,1	1.534,0	14,6	7,1	93,9		
1. Penerimaan Perpajakan	1.148,3	1.077,3	11,3	9,9	93,8	1.246,1	1.143,3	10,8	6,1	91,7		
- Pajak Dalam Negeri	1.099,9	1.029,9	10,8	10,6	93,6	1.189,8	1.099,9	10,4	6,8	92,4		
- Pajak Perdagangan Internasional	48,4	47,5	0,5	-4,4	98,1	56,3	43,4	0,4	-8,7	77,0		
2. Penerimaan Bukan Pajak	349,2	354,8	3,7	0,8	101,6	386,9	390,7	3,7	10,1	101,0		
II. Hibah	4,5	6,8	0,1	18,1	151,8	2,3	3,2	0,0	-53,2	137,6		
B. Belanja Negara	1.726,2	1.650,4	17,3	10,7	95,6	1.876,8	1.764,6	16,7	6,9	94,0		
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.196,8	1.137,1	11,9	12,5	95,0	1.280,3	1.190,8	11,3	4,7	93,0		
1. Belanja Pegawai	233,0	221,7	2,3	12,0	95,1	258,4	245,3	2,3	10,6	94,9		
2. Belanja Barang	206,5	169,7	1,8	20,5	82,2	195,2	162,8	1,5	-4,1	83,4		
3. Belanja Modal	192,6	180,9	1,9	24,6	93,9	160,8	145,8	1,4	-19,4	90,7		
4. Pembayaran Bunga Utang	112,5	113,0	1,2	12,5	100,5	135,4	133,4	1,3	18,0	98,5		
5. Subsidi	348,1	355,0	3,7	2,5	102,0	403,0	392,9	3,7	10,7	97,5		
6. Belanja Hibah	2,3	1,3	0,0	1.638,7	56,8	2,9	0,9	0,0	-31,1	31,5		
7. Bantuan Sosial	82,5	92,1	1,0	21,8	111,6	96,7	98,1	0,9	6,5	101,5		
8. Belanja Lain-lain	19,3	3,4	0,0	-17,3	17,4	27,9	11,6	0,1	244,5	41,6		
II. Transfer ke Daerah	529,4	513,3	5,4	6,8	97,0	596,5	573,8	5,4	11,8	96,2		
1. Dana Perimbangan	445,5	430,4	4,5	4,6	96,6	491,9	477,0	4,5	10,8	97,0		
2. Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian	83,8	82,9	0,9	19,5	98,9	104,6	96,7	0,9	16,7	92,5		
C. Keseimbangan Primer	-111,7	-98,5	-1,0	87,3	88,2	-106,0	-93,9	-0,9	-4,6	88,6		
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	-224,2	-211,5	-2,2	38,2	94,3	-241,5	-227,3	-2,2	7,5	94,2		
E. Pembiayaan	224,2	226,8	2,5	24,1	101,1	241,5	246,4	2,3	8,7	102,0		
I. Pembiayaan Dalam Negeri	241,1	243,4	2,7	22,6	101,0	254,9	261,7	2,5	7,5	102,7		
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	-16,9	-16,7	-0,2	4,4	98,5	-13,4	-15,3	-0,1	-8,1	114,2		

Sumber: Kementerian Keuangan

* Berdasarkan konferensi pers Kemenkeu tgl. 5 Januari 2015

** Didasarkan pada nominal PDB dengan tahun dasar 2010

dampak dari kebijakan yang berdampak positif terhadap penerimaan seperti pengenaan PPnBM bagi kendaraan bermotor yang tergolong mewah, masih terbatas.³ Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan reformasi untuk mengurangi berbagai hambatan birokrasi yang

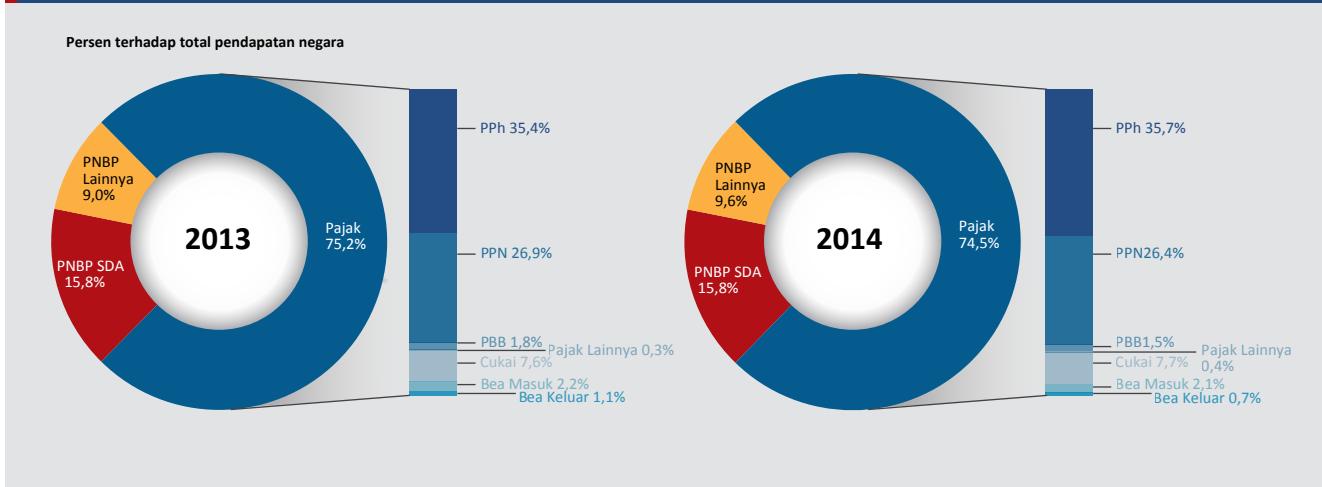
3 Melalui PMK Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, kendaraan bermotor yang tergolong mewah seperti kendaraan Completely Build Up (CBU) dikenakan tarif PPnBM antara 10% sampai dengan 125%.

mengurangi daya saing seperti dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu di BKPM.

7.2. Belanja Negara

Respons Pemerintah untuk menjaga ketahanan fiskal di tengah tekanan yang besar pada penerimaan berdampak terhadap kinerja belanja negara yang menurun, tercermin pada pertumbuhan tahunan, capaian terhadap pagu, dan porsi terhadap PDB yang lebih rendah (Tabel 7.2). Pertumbuhan belanja yang melambat tidak terlepas dari indikasi penurunan penerimaan negara yang tampak sejak awal tahun. Terbatasnya stimulus fiskal juga disebabkan

Grafik 7.3. Komposisi Pendapatan Negara



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

masih cukup besarnya pangsa subsidi BBM. Peningkatan pangsa subsidi BBM di tengah keterbatasan penerimaan mengurangi alokasi belanja produktif (Grafik 7.4).

Sebagai respons terhadap penurunan penerimaan tersebut, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah pengendalian belanja sejak dulu yang berdampak pada penghematan belanja di berbagai kementerian. Menjelang pembahasan UU APBN-P 2014, kebijakan penghematan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 4 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 yang menginstruksikan total penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp100 triliun.

Besarnya penghematan untuk masing-masing K/L berkisar antara 12-27% dari pagu anggaran APBN.

Inpres tersebut menyampaikan instruksi Presiden kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan *self-blocking* dalam penghematan dan pemotongan anggaran terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak. Inpres tersebut juga memberikan batasan bahwa penghematan/pemotongan anggaran tidak dapat dilakukan terhadap anggaran pendidikan, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU). Menurut Inpres tersebut, pelaksanaan pemotongan anggaran belanja dalam DIPA Kementerian/Lembaga dilakukan setelah Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2014 disahkan. Namun, APBN-P 2014 akhirnya hanya mengesahkan penghematan belanja sebesar Rp43 triliun.

Grafik 7.4. Pangsa Subsidi BBM dan Belanja Modal



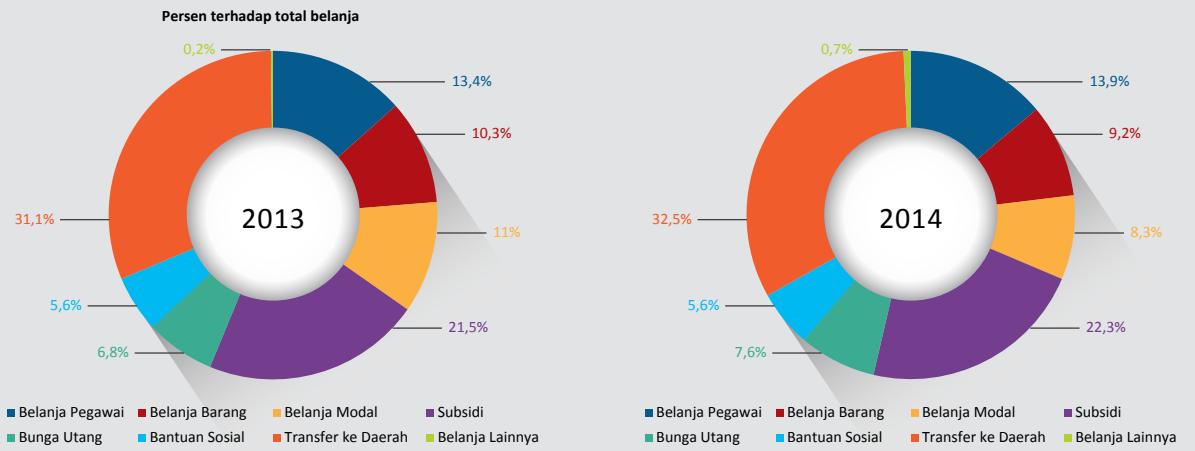
*) realisasi sementara

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tingkat penyerapan komponen belanja rutin seperti belanja pegawai dan pembayaran bunga utang, relatif stabil dengan tahun lalu. Tingkat penyerapan belanja barang meningkat karena penurunan pagu dalam APBN-P. Penyerapan bantuan sosial meningkat terkait program kompensasi kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan menjelang akhir tahun.

Pergantian pemerintahan juga turut berperan dalam penurunan penyerapan belanja. Pergantian pemerintahan

Grafik 7.5. Komposisi Belanja Pemerintah



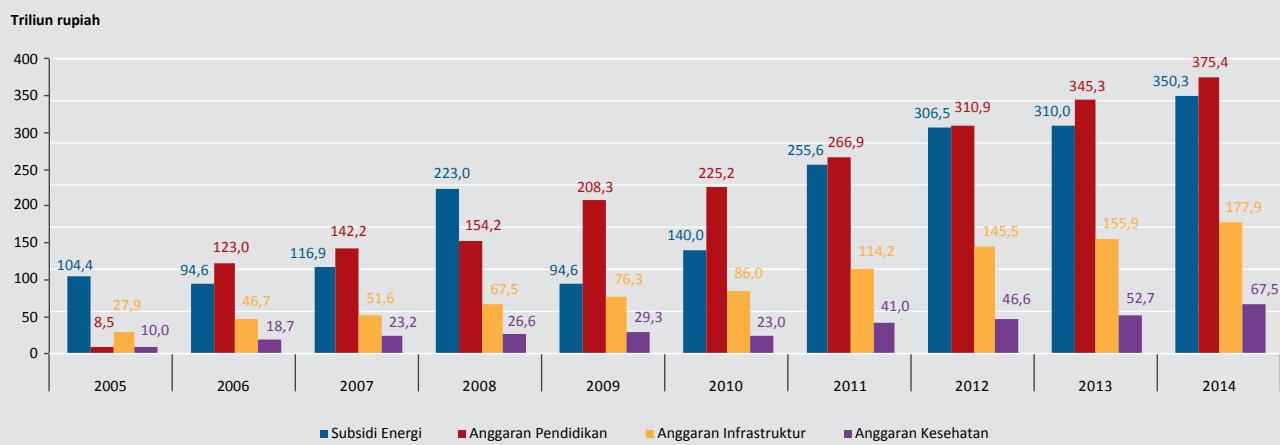
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

dan kesibukan Pemilu menyebabkan keterlambatan proses administrasi pencairan anggaran belanja khususnya Belanja Modal. Selain itu, masih terdapat masalah-masalah klasik penyerapan anggaran seperti masalah perizinan dan pengadaan/pembebasan lahan, bencana alam serta masalah sosial.

Porsi belanja modal terhadap total belanja turun dari 11,0% pada tahun 2013 menjadi 8,3% pada tahun 2014 (Grafik 7.5). Penurunan ini juga tercermin dalam realisasi belanja modal yang mencapai 90,7% dari pagu sebesar dari Rp160,8 triliun. Realisasi belanja modal yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran infrastruktur menyiratkan realisasi pembangunan infrastruktur yang lambat di tengah anggaran lain, seperti anggaran subsidi energi yang lebih besar (Grafik 7.6).

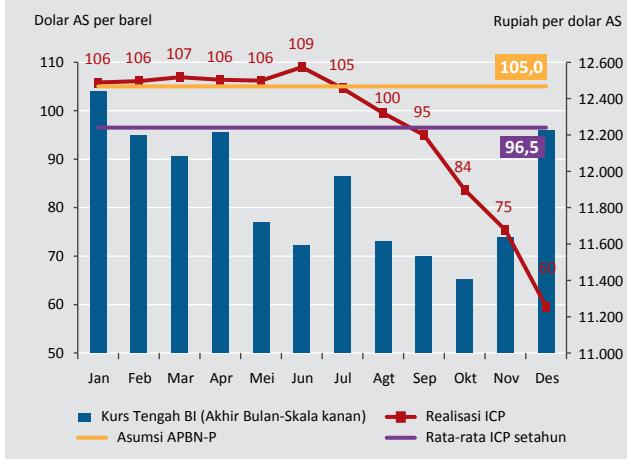
Selain dari sisi penerimaan, tekanan untuk menjaga kesinambungan fiskal juga datang dari subsidi BBM yang masih besar di tengah harga minyak yang masih tinggi dan tekanan nilai tukar pada semester I 2014 (Grafik 7.7). Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan implementasi kebijakan reformasi subsidi yang kurang efektif mendorong Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Hingga triwulan III berbagai kebijakan Pemerintah untuk mengendalikan volume konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui pagu 46 juta kilo liter menghadapi kendala yang sangat besar dan sempat memicu beberapa konflik sosial. Pada 18 November 2014, pemerintahan baru akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu harga premium naik menjadi Rp8.500 per liter dan harga solar naik menjadi Rp6.500 per liter (Grafik 7.8). Meskipun berdampak pada kenaikan inflasi

Grafik 7.6. Anggaran Subsidi Energi, Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 7.7. Harga Minyak dan Kurs

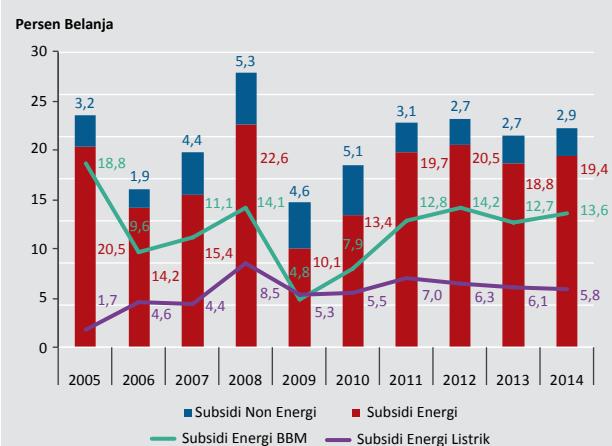


Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, diolah

dan penurunan daya beli masyarakat, pelaku pasar merespons positif kebijakan tersebut. Respons pasar dalam menyambut kebijakan kenaikan harga tersebut tampak dalam peningkatan IHSG dan penguatan nilai tukar pada tanggal pengumuman kenaikan.⁴ Meskipun realisasi subsidi BBM tidak melampaui pagu, pangsa subsidi BBM terhadap total belanja tetap meningkat (Grafik 7.9). Hal ini menunjukkan tingginya tekanan subsidi BBM terhadap kondisi fiskal sepanjang tahun 2014 (Lihat Boks 7.1).

Di sisi lain, kebijakan Pemerintah dalam subsidi listrik telah berhasil menekan angka subsidi listrik sehingga pangsa subsidi listrik turun dari 6,1% menjadi 5,8% dari total belanja (Grafik 7.9). Meski demikian, penurunan

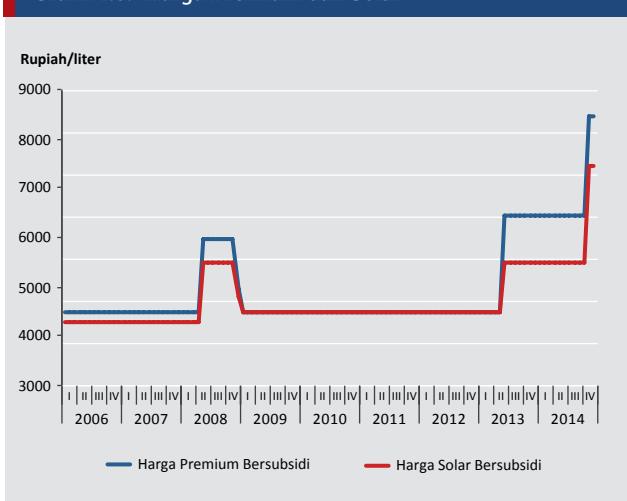
Grafik 7.9. Pangsa Subsidi



Sumber: Kementerian Keuangan

pangsa tersebut terjadi di tengah subsidi listrik yang cukup tinggi. Peningkatan subsidi listrik ini sejalan dengan rasio elektrifikasi yang meningkat. Pada tahun 2014, rasio elektrifikasi nasional mencapai 84,1% dengan kesenjangan yang masih tinggi (Grafik 7.10). Rasio elektrifikasi terendah berada di Nusa Tenggara Timur (43,2%) dan rasio tertinggi berada di DKI Jakarta (107,9%).⁵ Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi sebesar 99% pada tahun 2020. Selain rasio elektrifikasi, bauran sumber energi listrik juga menjadi faktor yang menyebabkan tingginya subsidi listrik. Sepanjang tahun 2014, Pemerintah telah melakukan

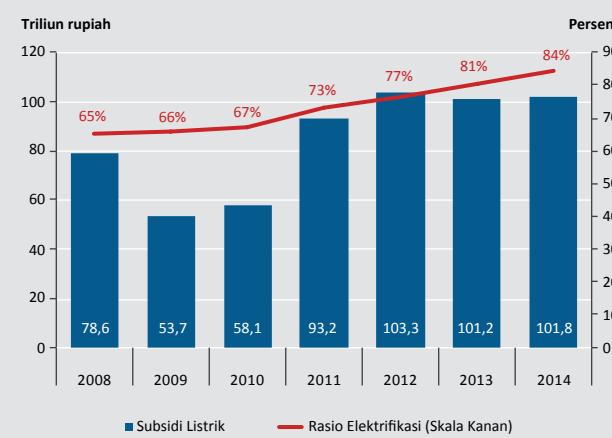
Grafik 7.8. Harga Premium dan Solar



Sumber: CEIC

4 IHSG pada tanggal 18 November ditutup menguat 48,53 bps atau 0,96% dan kurs tengah dolar AS ditutup menguat 0,4% dari Rp12.193 per dolar AS menjadi Rp12.146 per dolar AS.

Grafik 7.10. Subsidi Listrik dan Rasio Elektrifikasi



Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan KESDM, diolah

5 Rasio elektrifikasi menggambarkan tingkat ketersediaan listrik di suatu daerah, merupakan perbandingan antara jumlah pelanggan sambungan listrik dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Dua provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah masih berada di Kawasan Timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur dengan rasio elektrifikasi sebesar 43,2% dan Papua dengan rasio elektrifikasi 59,5%.

penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada bulan Mei dan Juli. Penyesuaian ini ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen, meningkatkan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi yang lebih tepat sasaran. Penyesuaian TTL merupakan upaya agar TTL sebagian besar pelanggan mencapai Biaya Pokok Produksinya (BPP). Apabila TTL telah mencapai BPP, maka penyesuaian tarif akan dilakukan berdasarkan nilai tukar dan harga minyak.

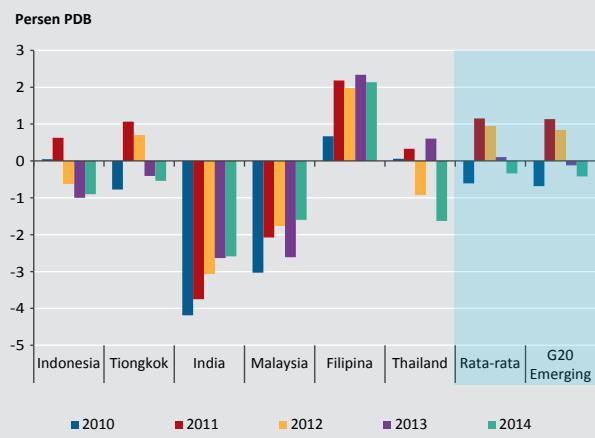
Realisasi Bantuan Sosial meningkat namun dengan pangsa terhadap total belanja yang stabil sekitar 5,6% dari total belanja. Realisasi Bantuan Sosial pada tahun 2014 dipengaruhi oleh realisasi berbagai program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi diwujudkan dalam 4 program yaitu: Program Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Keluarga Sejahtera, dan Simpanan Keluarga Sejahtera. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) adalah program penyaluran kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam bentuk bantuan tunai sebagaimana program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun 2013. Realisasi PSKS pada akhir tahun 2014 mencapai 95,9%. Program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi diharapkan mampu mengendalikan dampak negatif kenaikan harga terhadap daya beli kelompok masyarakat kurang mampu.

7.3. Pembiayaan

Di tengah tekanan pada sisi penerimaan, Pemerintah masih dapat mengendalikan belanja sehingga capaian defisit masih sesuai dengan APBN-P sebesar Rp227,3 triliun atau 2,2% dari PDB. Capaian defisit ini relatif sama dibandingkan dengan realisasi defisit 2013 (Tabel 7.2). Realisasi defisit tahun 2014 yang terkendali disertai dengan keseimbangan primer yang membaik sejalan dengan belanja negara, di luar pembayaran bunga utang, yang menurun. Defisit primer pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp93,9 triliun atau 0,9% terhadap PDB, sedikit membaik dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp98,5 triliun atau 1,0% terhadap PDB. Defisit primer ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan defisit primer di beberapa negara EM seperti India, Malaysia dan Thailand (Grafik 7.11).⁶

⁶ Kecuali Indonesia, data tahun 2013 masih merupakan prakiraan IMF. PDB yang digunakan adalah PDB dengan Purchasing Power Parity (PPP).

Grafik 7.11. Keseimbangan Primer di Berbagai Negara



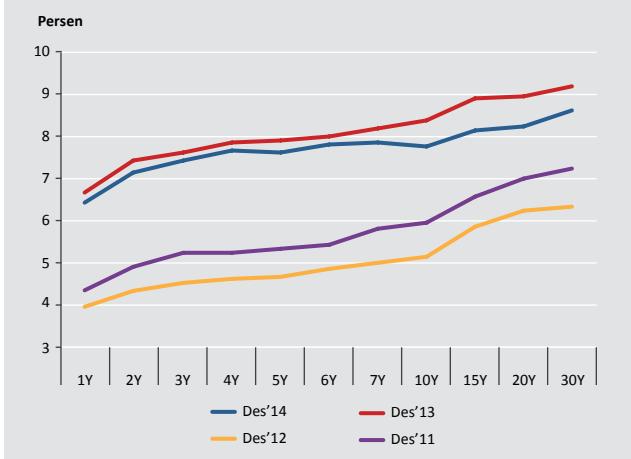
Sumber: *Fiscal Monitor IMF*, Oktober 2014

Di tengah pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat, sebagian negara EM menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif untuk memperkuat fundamental ekonominya dengan tetap menjaga kesinambungan fiskalnya. Hal ini tercermin pada keseimbangan primer yang mencatat defisit dibandingkan dengan tahun 2013 yang masih mencatat surplus 0,1% dari PDB. Pemerintah Tiongkok menempuh kebijakan reformasi pada bidang pajak dan fiskal untuk mendukung proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok. Sementara, kebijakan fiskal India dan Malaysia masih ditujukan untuk menjaga kesinambungan fiskalnya, tercermin pada defisit keseimbangan primer yang terus menurun (Grafik 7.11).

Total pembiayaan pada tahun 2014 melampaui kebutuhan untuk defisit fiskal. Total pembiayaan mencapai Rp246,4 triliun, setara dengan 102,0% dari target pembiayaan atau 108,2% dari total defisit fiskal 2014 (Tabel 7.2). Capaian pembiayaan yang melebihi target maupun kebutuhan ini disebabkan oleh antusiasme pasar yang masih tinggi dan berbagai upaya pengendalian defisit yang telah dilakukan Pemerintah. Secara keseluruhan, pembiayaan defisit APBN-P 2014 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp19 triliun.

Pada tahun 2014, Pemerintah kembali melakukan strategi *front loading* guna memenuhi kebutuhan pembiayaannya. Imbal hasil SBN sedikit menurun untuk berbagai tenor dibandingkan dengan tahun 2013 (Grafik 7.12). Penurunan imbal hasil yang lebih besar terjadi pada tenor jangka panjang yang mengindikasikan peningkatan kepercayaan investor terhadap masa depan investasi di Indonesia. Indikasi peningkatan kepercayaan pasar juga tampak dari kepemilikan asing dalam total SBN yang meningkat

Grafik 7.12. Imbal Hasil SBN



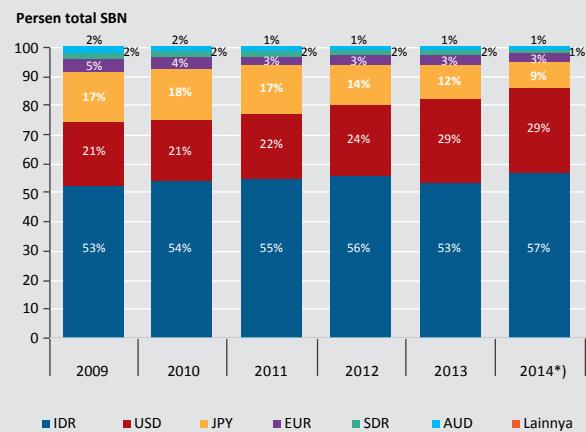
Sumber: Profil Utang Pemerintah Januari 2015 (Kemenkeu-Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko/DJPPPR), diolah

menjadi 37% dari 32,3% pada tahun 2013. Peningkatan ini terjadi terutama pada tenor jangka menengah 2 sampai dengan 10 tahun (Grafik 7.13).

Pemerintah meningkatkan porsi pembiayaan yang berasal dari SBN berdenominasi rupiah. Porsi utang yang berasal dari SBN meningkat dari 69,9% menjadi 74,2% dari posisi total utang Pemerintah Pusat dengan porsi SBN rupiah meningkat dari 53,1% menjadi 57% pada tahun 2014. Porsi SBN dalam mata uang asing menurun di tengah upaya Pemerintah untuk melakukan diversifikasi dalam bentuk penerbitan seri perdana *Euro Bonds* (pangsa 3% dari total SBN) (Grafik 7.14).

Secara keseluruhan, penerbitan *gross SBN* sepanjang tahun 2014 mencapai Rp428,1 triliun dengan penerbitan

Grafik 7.14. Komposisi Denominasi Mata Uang SBN

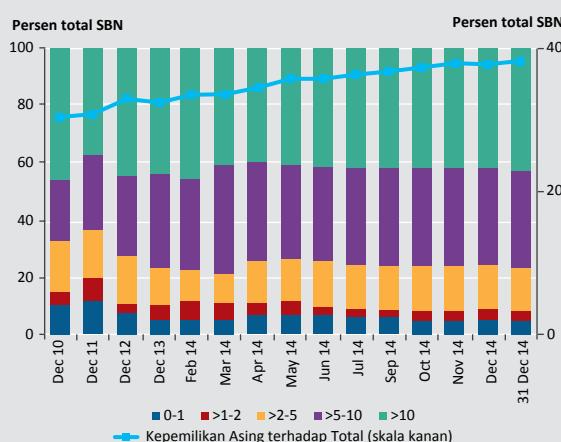


Sumber: Profil Utang Pemerintah Januari 2015 (Kemenkeu-DJPPPR), diolah

neto mencapai Rp265 triliun. Selain instrumen baru, Pemerintah juga menerbitkan instrumen reguler seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI), *global bond* berdenominasi dolar, Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Semenjak awal tahun, Kementerian Keuangan juga aktif menerbitkan instrumen dengan sumber dana yang berasal dari dana kelolaan lembaga-lembaga pemerintah lainnya seperti Kementerian Agama dalam penerbitan SBSN Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

Realisasi pembiayaan yang melampaui defisit tersebut masih mendukung utang pemerintah dalam tingkat yang sehat. Risiko utang pemerintah dilihat dari berbagai jenis risiko menunjukkan perbaikan (Grafik 7.15). Peningkatan utang Pemerintah Pusat secara nominal yang masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan rasio utang pemerintah terhadap PDB mengalami sedikit perbaikan (Grafik 7.16).⁷ Penurunan rasio pada tahun 2014 ini sejalan dengan tren penurunan utang yang telah terjadi. Tingkat rasio tersebut masih di bawah batasan maksimal rasio utang dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60% dari PDB⁸ dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Baik capaian rasio utang maupun capaian total defisit yang masih berada di bawah batas maksimal defisit sebesar 3% dari PDB menyiratkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Grafik 7.13. Tenor Kepemilikan Asing Dalam SBN

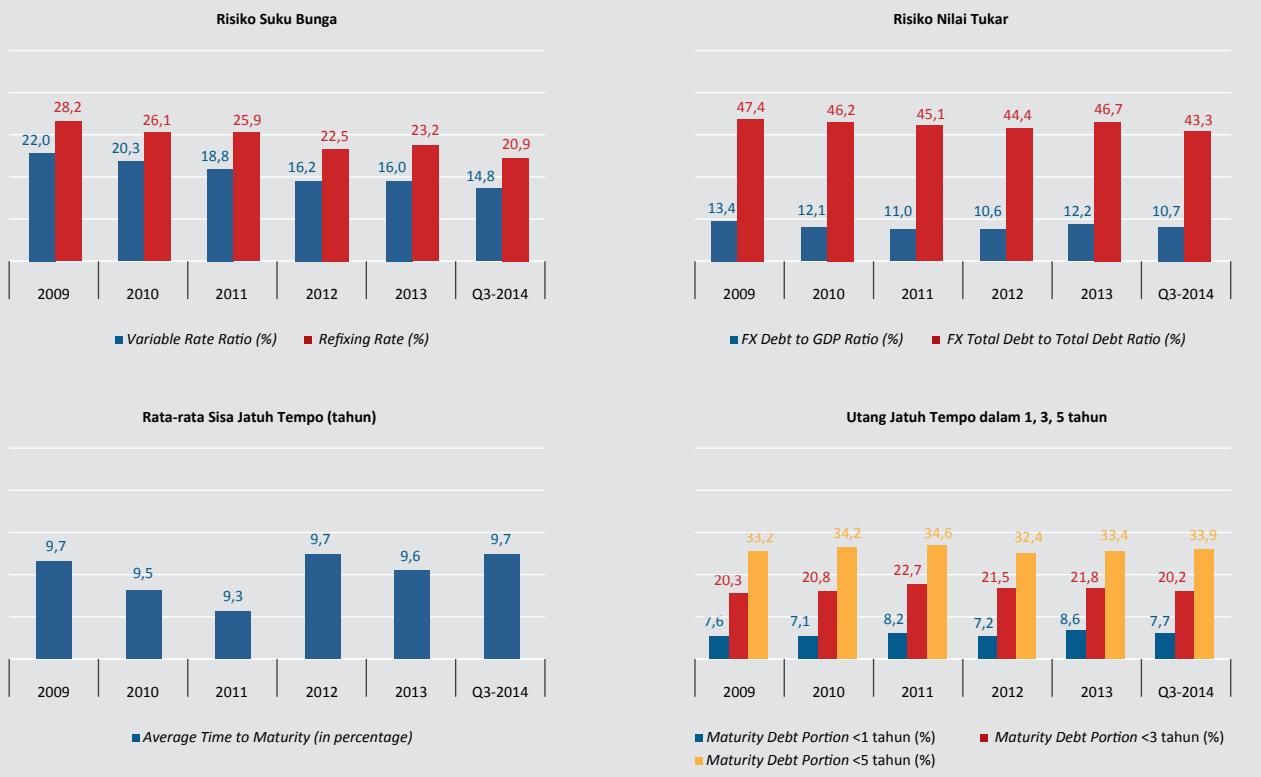


Sumber: Profil Utang Pemerintah Januari 2015 (Kemenkeu-DJPPPR), diolah

7 Masih menggunakan PDB dengan metode dan tahun dasar 2000.

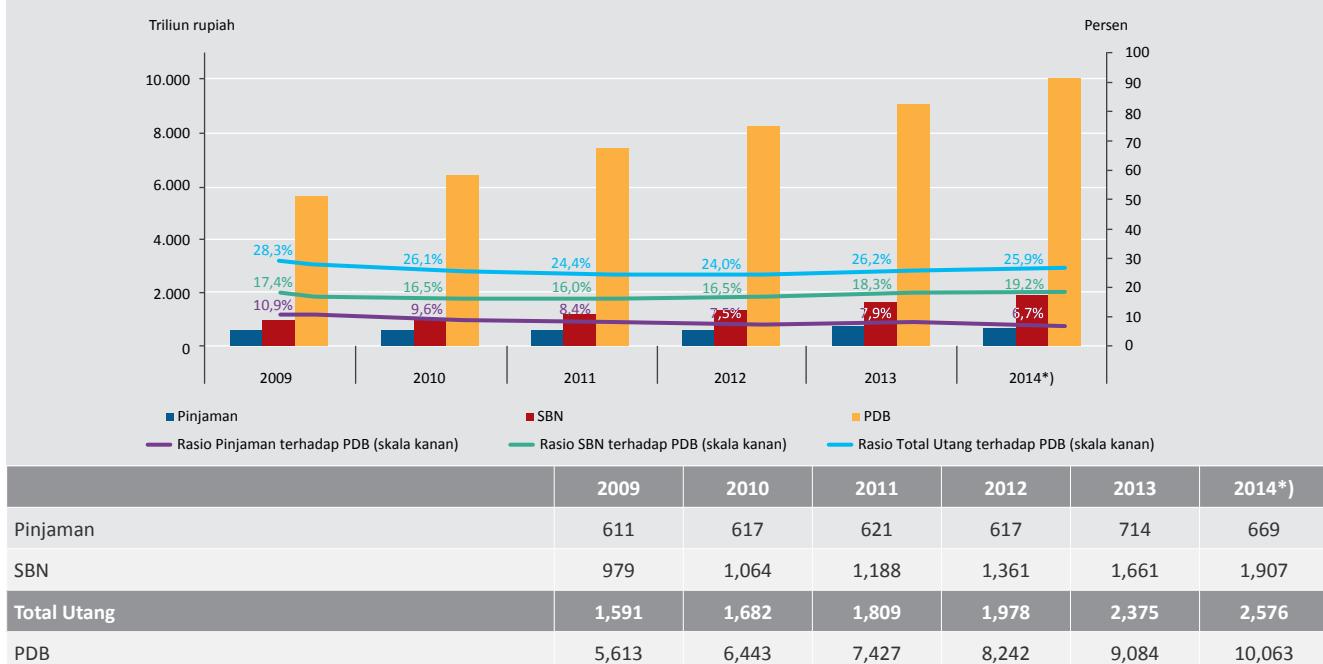
8 Penjelasan pasal 12 ayat 3 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa "Jumlah pinjaman (utang) dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto". Angka ini merujuk pada batasan maksimal dalam *Maastricht treaty*.

Grafik 7.15. Perkembangan Berbagai Risiko SBN



Sumber: Profil Utang Pemerintah Pusat Februari 2015 (Kemenkeu - DJPPR)

Grafik 7.16. Perkembangan Rasio Utang Pemerintah



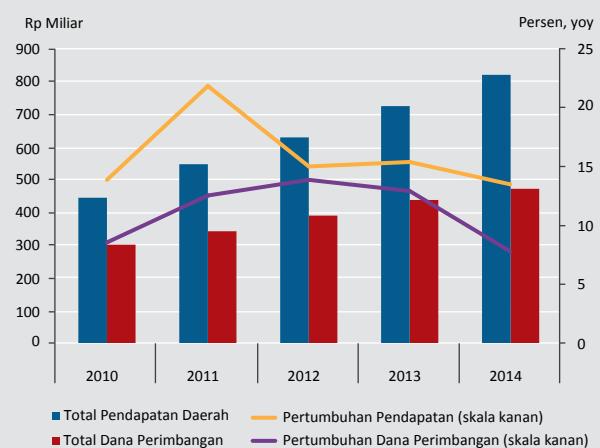
7.4. Fiskal Daerah

Di tengah kondisi perlambatan perekonomian sepanjang 2014, kinerja fiskal daerah dalam menopang pertumbuhan melalui peningkatan belanja APBD yang berkualitas, relatif masih terbatas. Keterlambatan pengesahan APBD di sejumlah daerah menyebabkan mundurnya proses administrasi pengadaan.⁹ Selain itu, terdapat pula keterlambatan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan adanya penundaan penetapan ketentuan teknis pencairan. Keterlambatan pada DBH juga terkait dengan dilakukannya estimasi ulang alokasi penyaluran DBH di semester I, sebagai respons dari penurunan produksi dan ekspor SDA tambang yang signifikan.

Berdasarkan komposisi pendapatan daerah, dana perimbangan yang mencapai Rp592,5 triliun masih mendominasi (76,7% dari total pendapatan). Total alokasi dana perimbangan di 2014 meningkat 11,9% daripada tahun sebelumnya. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang diterima Aceh dan Papua, serta DI Yogyakarta mengalami peningkatan terbesar, yaitu mencapai sekitar 25%. Sementara itu, alokasi DAK dan DBH diproyeksikan meningkat masing-masing sebesar 4,1% dan 10,7% di 2014. Realisasi DBH hasil SDA yang lebih rendah di kawasan luar Jawa sebagai pengaruh dari penerapan UU Minerba yang membatasi ekspor komoditas mineral mentah. DBH hasil pajak juga terindikasi lebih rendah di sejumlah wilayah dengan menurunnya pendapatan dan usaha masyarakat. Adapun realisasi DAK terindikasi menurun dalam level yang moderat yang ditengarai sebagai akibat dari masih terkendala ny sejumlah proyek pembangunan, khususnya terkait dengan pengadaan lahan.

Merujuk pada data sementara realisasi APBD 2014, realisasi pendapatan daerah dan secara khusus kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih baik, meski tumbuh melambat di tengah melemahnya perekonomian domestik (Grafik 7.17). Meski persentase realisasi pendapatan dan PAD pada 2014 lebih rendah dari 2013, namun mampu melebihi target yang ditetapkan (Tabel 7.3). Secara spasial, dampak dari perlambatan perekonomian ke kinerja pendapatan daerah terindikasi di Jakarta dengan realisasi PAD baik dari sumber pajak maupun retribusi yang jauh di bawah target.¹⁰ Dari sisi

Grafik 7.17. Total Pendapatan dan Dana Perimbangan



Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, diolah

target PAD, postur APBD Jakarta cenderung lebih optimis dalam menargetkan pertumbuhan PAD. Sementara APBD kawasan Jawa dan Sumatera relatif lebih pesimis dalam menargetkan penerimaan dari PAD. Di sisi lain, KTI memproyeksikan pendapatan daerah yang lebih tinggi dengan target PAD yang lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh adanya asumsi masih akan meningkatnya transfer dana perimbangan di awal tahun anggaran.

Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah diproyeksikan sebesar 24,2% di 2014, lebih tinggi dibandingkan 2013 (21,7%). Apabila dilihat dalam perspektif yang lebih panjang, terlihat adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah dalam 5 tahun terakhir (Grafik 7.18).¹¹ Rasio kemandirian keuangan tertinggi tercatat di Jakarta, meskipun realisasi PAD lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, rasio kemandirian keuangan cenderung meningkat di kawasan luar Jawa.

Dari sisi belanja, penyerapan belanja daerah pada 2014 diprakirakan mencapai level terendah dalam 4 tahun terakhir.¹² Berdasarkan data sementara, realisasi belanja daerah secara agregasi mencapai sekitar 93,1%, lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan anggaran belanja 2013 sebesar 97,1%. Pertumbuhan realisasi belanja daerah juga menurun tajam yang salah satunya disebabkan oleh belanja APBD di Jakarta yang tumbuh

9 Dari total 539 daerah Dati I dan II, hanya 354 daerah yang mengesahkan APBD 2014 pada akhir Desember 2013.

10 Realisasi PAD Jakarta hanya mencapai sekitar 83%, namun tetap mencatatkan SILPA yang tinggi di 2014 sebagai pengaruh dari penyerapan belanja yang jauh lebih rendah.

11 Tingkat kemandirian keuangan daerah yang diukur dari rasio realisasi PAD terhadap realisasi total pendapatan daerah.

12 Daya serap belanja daerah yang belum optimal terindikasi dari besarnya penempatan dana Pemerintah Daerah di perbankan hingga akhir 2014.

Tabel 7.3. Realisasi Keuangan Daerah

Uraian	Realisasi APBD		Total APBD	Realisasi APBD	
	2013		2014	2014*	
	Juta Rp	%	Juta Rp	Juta Rp	%
Pendapatan	726.750.398	106,36	797.865.865	824.626.944	103,35
PAD	157.855.464	112,49	180.675.151	199.717.248	110,54
Dana Transfer Pemerintah Pusat	442.761.145	102,20	482.186.334	477.052.755	98,94
Pendapatan Lain-lain	126.133.789	114,92	135.004.380	147.856.941	109,52
Belanja	716.461.519	97,12	856.241.717	796.698.082	93,05
Belanja Pegawai	287.790.109	96,96	326.870.642	303.595.154	92,88
Belanja Barang & jasa	144.627.413	97,61	183.471.831	171.511.687	93,48
Belanja Modal	163.072.900	92,76	214.214.498	190.780.525	89,06
Belanja Lain-lain	120.971.097	103,50	131.684.744	130.810.715	99,34

Catatan:

*) Estimasi dari data sementara pada Desember 2014

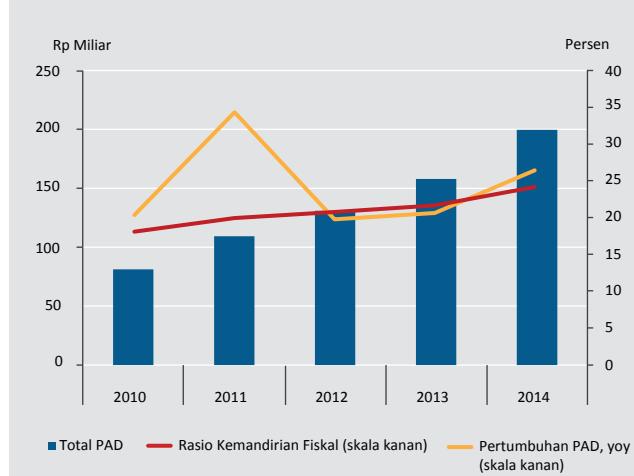
Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu

sangat rendah (Grafik 7.19). Pertumbuhan belanja pegawai maupun belanja modal cenderung melambat (Grafik 7.20), sementara pertumbuhan belanja barang dan jasa sedikit meningkat.¹³ Kendala dalam penyerapan belanja, antara lain disebabkan oleh permasalahan teknis administrasi pengadaan, serta kendala dalam penyediaan lahan yang secara khusus memengaruhi realisasi belanja modal. Kinerja Unit Layanan Pengadaan dan sistem otomatisasi pengadaan juga masih belum cukup optimal di sejumlah daerah. Selain hambatan dari sisi belanja sendiri, masih rendahnya penyerapan belanja ditengarai juga terpengaruh aspek pembiayaan daerah yang relatif

lebih ketat pada 2014. Hal ini khususnya pada daerah yang memiliki ketergantungan besar pada DBH dari SDA untuk membiayai belanja daerah. Meski demikian, rasio belanja daerah terhadap PDRB masih dalam tren meningkat dalam 5 tahun terakhir.¹⁴ Dinamika tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan belanja APBD yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan jenis belanja, pangsa belanja pegawai masih tetap mendominasi, meski secara proporsi telah terlihat adanya pergeseran ke belanja modal yang lebih produktif. Pada alokasi belanja daerah di APBD 2014, komposisi

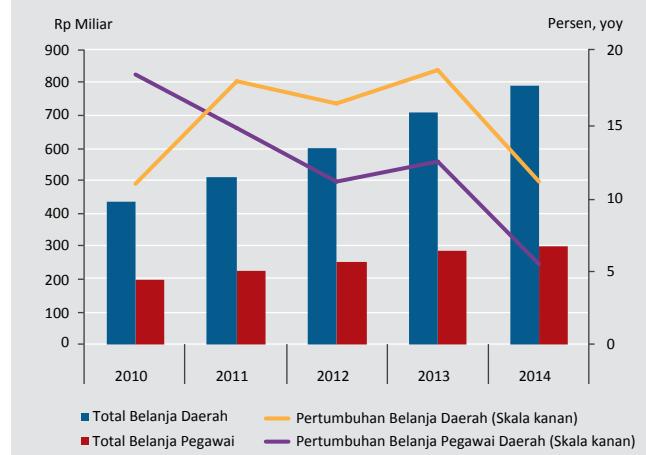
Grafik 7.18. Perkembangan PAD



Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, diolah

13 Kebijakan pengetatan anggaran melalui larangan kegiatan di hotel juga berlaku di pemerintahan daerah pada akhir triwulan IV 2014.

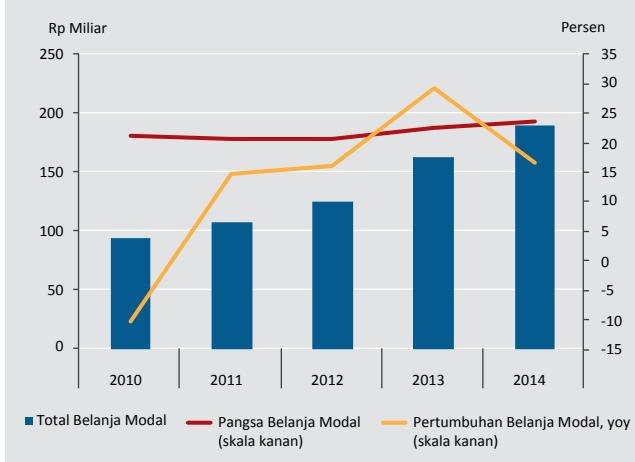
Grafik 7.19. Total Belanja Daerah dan Belanja Pegawai



Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, diolah

14 Rasio belanja APBD terhadap PDRB tertinggi di KTI, diikuti dengan kawasan Sumatera, Jawa, dan Jakarta.

Grafik 7.20. Perkembangan Belanja Modal



Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, diolah

belanja pegawai mencapai hampir 40% dari total belanja, sedikit lebih rendah dibandingkan 2013 (Tabel 7.4). Pangsa belanja pegawai cenderung mengalami penurunan di seluruh kawasan, terutama di Jawa. Meski demikian, belanja pegawai di Jawa masih jauh lebih tinggi dari kawasan lain, terkait dengan jumlah daerah administratif yang lebih besar. Pangsa belanja pegawai di KTI merupakan yang tertinggi, sementara yang terendah dicatatkan oleh Kalimantan. Adapun jumlah daerah dengan alokasi belanja pegawai lebih dari 50% dalam tren menurun semenjak adanya kebijakan moratorium rekrutmen pegawai pada 2012, meskipun masih terdapat 244 daerah dengan alokasi belanja pegawai di atas 50% pada 2014.

Secara umum, kapasitas fiskal daerah pada 2014 tidak terlalu banyak berubah (Tabel 7.5).¹⁵ Kalimantan memiliki kapasitas fiskal tertinggi dibandingkan dengan

Tabel 7.5. Kapasitas Fiskal Kawasan

Daerah	2012		2014	
	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
Sumatera	0,550	Rendah	0,565	Rendah
Jawa	1,481	Tinggi	1,408	Tinggi
Kalimantan	2,329	Sangat Tinggi	2,205	Sangat Tinggi
KTI	0,499	Rendah	0,614	Rendah

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, diolah

kawasan lain. Namun, terlihat penurunan yang relatif signifikan dalam indeks kapasitas fiskal Kalimantan pada 2014. Penurunan tersebut terutama sebagai pengaruh dari menurunya penerimaan DBH, di samping masih terbatasnya optimalisasi PAD. Adapun peningkatan kapasitas fiskal terlihat di KTI, sejalan dengan ekspansi dan perluasan jenis PAD. Indeks kapasitas fiskal di Jawa tergolong tinggi, terutama didukung oleh kapasitas fiskal Jakarta yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Tingginya kapasitas fiskal di Jakarta berkaitan dengan kemampuan mengoptimalkan PAD, khususnya dari pajak dan restribusi di sektor jasa. Sementara itu, kapasitas fiskal juga tergolong tinggi di sejumlah wilayah yang memiliki kapabilitas untuk mengeksplorasi SDA, seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Meski demikian, penyerapan anggaran belanja pada wilayah tersebut cenderung rendah. Adapun wilayah yang diidentifikasi memiliki kapasitas fiskal rendah adalah wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Tabel 7.4. Perkembangan Pangsa Belanja Daerah Berdasarkan Jenisnya

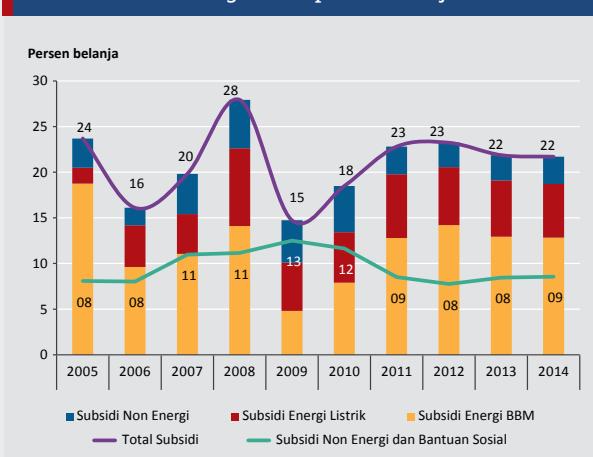
Pangsa Belanja Daerah	2011	2012	2013	2014
Belanja Pegawai	46,25	44,12	41,94	39,54
Belanja Barang & Jasa	21,04	20,65	20,93	22,30
Belanja Modal	22,92	23,22	24,83	26,07
Belanja Lain-lain	9,78	12,01	12,30	12,09

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, diolah

¹⁵ Kapasitas fiskal merupakan penjumlahan PAD, DBH, DAU, lain-lain pendapatan daerah dikurangi belanja pegawai dan jumlah penduduk miskin.

Reformasi Belanja Subsidi Energi

Grafik 1. Perkembangan Komponen Belanja Subsidi

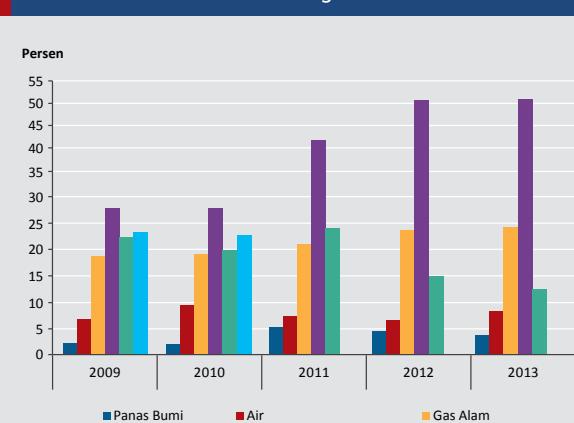


Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Dalam arti yang sangat luas, subsidi dapat didefinisikan sebagai berbagai program pemerintah yang memberikan keuntungan kepada swasta (*WTO Report*, 2006). Secara umum, dilihat dari penerimanya, subsidi dapat diberikan kepada produsen atau konsumen untuk ongkos produksi atau harga jual. Menurut OECD dan UNEP, selain dalam bentuk pemberian dana tunai secara langsung, subsidi dapat juga berupa kemudahan-kemudahan seperti keringanan pajak. Belanja negara dalam APBN memberikan subsidi dalam 2 kelompok besar yaitu Subsidi Energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan Subsidi Non Energi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP).¹ Baik subsidi BBM maupun subsidi listrik lebih merupakan subsidi kepada konsumen. Subsidi harga kepada konsumen menyebabkan harga jual eceran relatif tidak terpengaruh fluktuasi faktor-faktor pembentuk biaya produksi seperti harga minyak dan nilai tukar.

Pemerintah memberikan subsidi harga eceran BBM untuk transportasi dan keperluan memasak sejak tahun 1967 (Dillon dkk, 2008). Dalam perjalannannya, Pemerintah kemudian menghapuskan subsidi atas 4

Grafik 2. Bauran Sumber Energi Listrik



Sumber: Statistik PLN 2013

jenis BBM yaitu avtur, avgas, *Marine Fuel Oil (MFO)*, dan minyak diesel. Pasca-reformasi, subsidi BBM yang tersisa adalah subsidi untuk minyak tanah, premium, dan solar dengan dominasi konsumsi premium pasca-konversi minyak tanah. Mulai tahun 2007, Pemerintah melakukan upaya konversi minyak tanah menjadi LPG dalam tabung 3 kg. Konversi tersebut berhasil menekan volume konsumsi minyak tanah dari 9,85 juta kilo liter pada tahun 2007 menjadi 0,92 juta kilo liter pada tahun 2014 dengan besarnya perkiraan penghematan setelah dipotong biaya konversi sebesar Rp151,4 triliun.² Mulai tahun 2015, Pemerintah menghilangkan subsidi premium sehingga BBM yang disubsidi hanya minyak tanah dan solar. Sebagaimana ditampilkan pada Grafik 1, Subsidi BBM mengalami peningkatan sejak tahun 2010, seiring kenaikan harga minyak dunia.

Subsidi listrik diberikan Pemerintah berdasarkan perbedaan antara rata-rata biaya produksi listrik yang diajukan PLN dan rata-rata Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang ditetapkan Pemerintah. Harga energi primer (gas, batubara, BBM) dan bauran energi listrik yang digunakan merupakan komponen pembentuk Biaya Pokok Pengadaan (BPP) listrik. Hingga tahun

1 Subsidi dalam belanja negara dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu (1) Subsidi Energi yang terdiri atas (a) Subsidi BBM dan LPG, dan (b) Subsidi Listrik; dan (2) Subsidi Non Energi yang terdiri atas (a) Subsidi Pangan; (b) Subsidi Pupuk; (c) Subsidi Benih; (d) Subsidi Kredit Program; (e) Subsidi PSO; dan (f) Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah.

2 Dalam kurun waktu 7 tahun tersebut, Pemerintah berhasil menghemat subsidi sebesar kurang lebih Rp164,7 triliun sementara biaya konversi adalah sebesar Rp13,2 triliun sehingga besarnya penghematan setelah biaya konversi adalah sekitar Rp151,4 triliun.

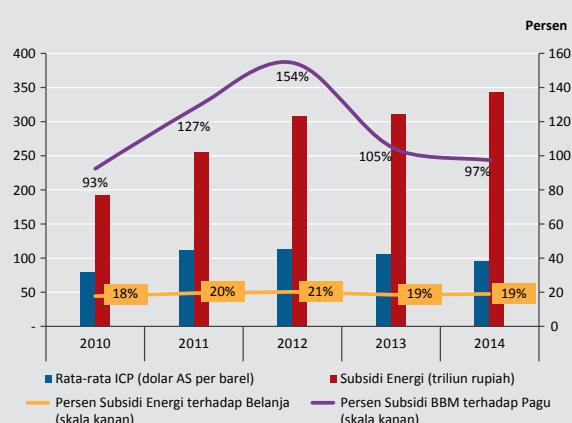
2013, batubara masih mendominasi bauran sumber energi listrik, disusul gas alam dan BBM (Grafik 2). Sejak tahun 2008, pelanggan dengan daya 6600 VA ke atas dikenakan tarif nonsubsidi. Pada 1 Juli 2010, Pemerintah menaikkan TTL untuk pelanggan dengan daya di atas 900 VA sebesar 10%. Sepanjang tahun 2013 Pemerintah melakukan 2 kebijakan kenaikan TTL terhadap industri, bisnis, pemerintahan dan rumah tangga dengan daya \geq 1300 VA sehingga pada tahun 2015 terdapat 12 kelompok pelanggan yang sudah tidak lagi menikmati subsidi listrik³.

Salah satu argumen pemberian subsidi energi adalah dampak positif terhadap pertumbuhan. Subsidi energi yang diberikan kepada produsen atau konsumen menyerap segala *shock* akibat fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar. Tingkat harga sumber energi yang biasanya memiliki pangsa cukup besar dalam keranjang konsumsi masyarakat menjadi relatif stabil. Namun pada sisi lain, stabilitas harga pada level konsumen tersebut berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi sendiri karena mengurangi daya dukung Pemerintah terhadap pembangunan. *Shock* dalam biaya produksi energi yang tidak diteruskan kepada harga jual akhirnya diserap oleh Pemerintah dalam bentuk keterbatasan belanja Pemerintah. Grafik 3 menunjukkan bagaimana subsidi energi dan pangsaanya terhadap total belanja Pemerintah meningkat ketika harga minyak naik. Pelampauan pagu yang tinggi sebagaimana yang terjadi pada tahun 2012 tentu saja sangat memengaruhi ruang bagi penyerapan belanja nonsubsidi energi ketika Pemerintah cukup teguh memegang *fiscal rule* berupa batas maksimal defisit fiskal 3% dari PDB. Selain itu, di negara net importir minyak seperti Indonesia, tingginya konsumsi bahan bakar fosil memperparah defisit ganda fiskal dan transaksi berjalan.

Pemberian subsidi energi berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Harga yang relatif

³ Kedua belas kelompok pelanggan tersebut adalah sebagai berikut: (1) rumah tangga R-1/tegangan rendah (TR) daya 1.300 VA, (2) rumah tangga R-1/TR daya 2.200 VA, (3) rumah tangga R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, (4) rumah tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, (5) bisnis B-2/TR daya 6.600VA sampai 200 kVA, (6) bisnis B-3/tegangan menengah (TM) daya di atas 200 kVA, (7) industri I-3/TM daya di atas 200 kVA, (8) industri I-4/tegangan tinggi (TT) daya 30 ribu kVA ke atas, (9) kantor pemerintah P-1/TR daya 6.600 VA sampai 200 kVA, (10) kantor pemerintah P-2/TM daya di atas 200 kVA, (11) penerangan jalan umum P-3/TR, dan (12) layanan khusus TR/TM/TT.

Grafik 3. Perkembangan Subsidi Energi



Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, diolah

murah menyebabkan konsumsi yang berlebihan, sehingga pada gilirannya meningkatkan emisi karbon secara berlebihan. Subsidi juga membuat kurangnya insentif bagi para pelaku pasar untuk meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan.

Selain pertimbangan dampak terhadap pertumbuhan, argumen pentingnya subsidi energi yang sering mengemuka adalah dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pengurangan atau penghapusan subsidi akan menaikkan harga, memicu peningkatan inflasi, memperparah kondisi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga dapat memicu gejolak sosial. Faktanya, Pemerintah dan berbagai lembaga menyatakan bahwa subsidi energi baik BBM maupun listrik lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, menyimpulkan adanya alokasi subsidi yang kurang tepat.⁴ Oleh karena itu, argumen subsidi energi merupakan fungsi distribusi Pemerintah menjadi kurang tepat dan membutuhkan koreksi.

Terdapat setidaknya dua alasan mengapa diperlukan reformasi belanja subsidi energi yaitu (1) Dampak besar dan fluktuasinya terhadap konsumsi dan investasi Pemerintah; (2) Dampak negatifnya terhadap struktur penyebab defisit transaksi berjalan. Porsi subsidi energi yang cukup besar yaitu sekitar seperlima

⁴ Pada Mei 2008, Menko Perekonomian menyatakan bahwa 40% masyarakat dengan penghasilan tertinggi mengonsumsi 70% subsidi sementara 40% masyarakat berpenghasilan terendah mengonsumsi hanya 15% subsidi. Sejalan dengan itu, survei Agustina dkk (2008) juga menyimpulkan bahwa 90% subsidi hanya dinikmati 50% masyarakat berpenghasilan tertinggi.

Tabel 1. Program Kompensasi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Jenis	Maret 2005	Okttober 2005	2008	2013	2014
Bantuan tunai kepada masyarakat miskin dan rentan miskin		✓	✓	✓	✓
Beasiswa kepada siswa miskin	✓			✓	✓
Kartu sehat untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	✓				✓
Program sanitasi bersih				✓	

Sumber: OECD berdasarkan Adam dan Lestari (2008) dan TNP2K

dari total belanja berdampak pada penyerapan belanja yang sensitif terhadap fluktuasi harga minyak. Kondisi belanja yang kurang sehat ini membatasi kapasitas Pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan dan dalam menjalankan fungsi distribusi demi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sebagaimana tampak dalam Grafik 1, pangsa subsidi energi yang terdiri atas subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik masih mendominasi belanja subsidi. Pangsa subsidi non-energi bahkan tidak lebih besar daripada subsidi listrik. Bahkan dengan memperhitungkan bantuan sosial, tampak bahwa porsi belanja subsidi non-energi dan bantuan sosial mengalami penurunan sejak tahun 2010, di tengah tren peningkatan total subsidi. Hal ini menyiratkan penurunan porsi fungsi perlindungan sosial dan fungsi-fungsi lain dari belanja subsidi Pemerintah seperti untuk menjaga ketahanan pangan.

Besarnya penghematan akibat perubahan skema subsidi BBM pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp194 triliun. Dari penghematan tersebut, sebesar Rp85,5 triliun akan dialokasikan untuk menambah belanja infrastruktur. Sebagai ilustrasi, dana realokasi subsidi BBM dapat membangun 19 jembatan Suramadu yang bernilai sebesar Rp4,5 triliun. Ruang fiskal yang diperoleh dari subsidi BBM luar biasa besar.

Guna meredam dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap penurunan daya beli masyarakat, Pemerintah mengeluarkan berbagai program kompensasi setiap kali terjadi kenaikan harga (Tabel 1). Program-program kompensasi secara umum ditujukan untuk membantu daya beli kelompok masyarakat

yang paling terdampak kenaikan harga, yaitu rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin. Selain diberikan dalam bentuk tunai baik tunai tanpa syarat maupun tunai bersyarat, program kompensasi juga diberikan dalam bentuk natura, yaitu peningkatan alokasi beras miskin dan dalam bentuk beasiswa bagi siswa kurang mampu. Tabel di atas adalah rekapitulasi jenis program-program kompensasi pada berbagai event kenaikan harga.

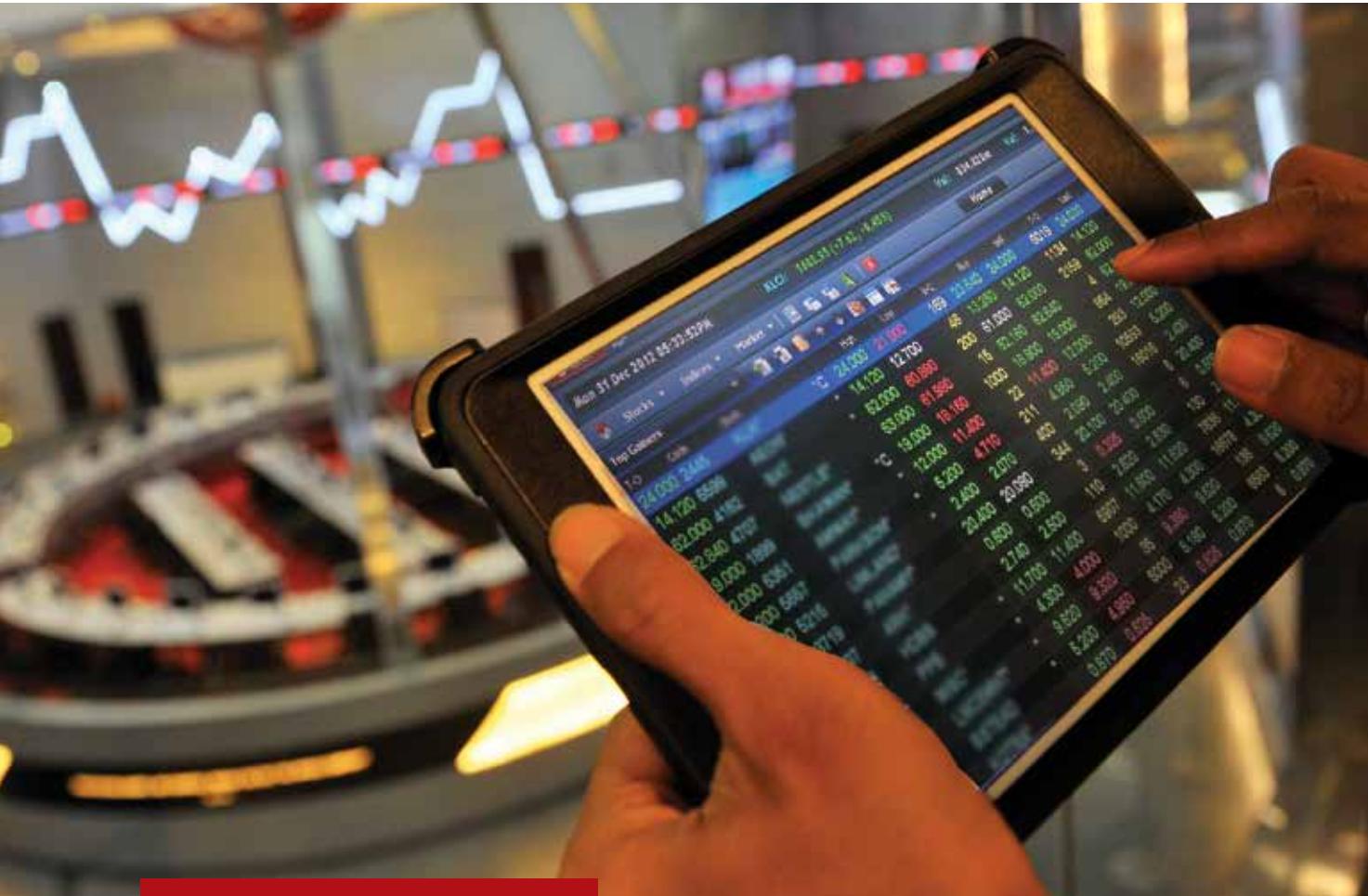
Terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan reformasi energi: (i) Antisipasi dampak langsung fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar terhadap inflasi. Pilihan skema subsidi tetap yang diambil Pemerintah sejak awal tahun 2015 menyebabkan tingkat harga BBM terdampak langsung fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar; (ii) Komitmen Pemerintah dalam mendukung pengembangan energi terbarukan di tengah penurunan harga komoditas dunia. Penurunan harga komoditas dunia yang berdampak pada penurunan harga jual eceran berisiko menyebabkan konsumsi bahan bakar fosil secara berlebihan yang kemudian akan meningkatkan ketergantungan dan mengurangi upaya pengembangan sumber energi terbarukan. Risiko ini akan semakin meningkat karena biaya pengembangan energi terbarukan yang masih tinggi; (iii) Kendala kapasitas dan hambatan penyerapan belanja realokasi subsidi BBM. Dengan keterbatasan penyerapan belanja selama ini, dibutuhkan banyak koordinasi antarlembaga dan antarsektor untuk meningkatkan kapasitas dan menyelesaikan hambatan penyerapan sehingga penghematan subsidi BBM benar-benar dapat produktif.

Halaman ini
sengaja dikosongkan



Keterangan gambar:

Pasar keuangan merupakan bagian penting perekonomian karena menyediakan instrumen dan sumber pembiayaan pembangunan. Pada tahun 2014, berbagai indikator di pasar keuangan menunjukkan kinerja yang positif.



BAB 8

SISTEM KEUANGAN

Secara umum, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meski mendapat tantangan berupa ketidakpastian ekonomi global dan moderasi ekonomi nasional. Kondisi ketahanan perbankan masih kuat di tengah moderasi pertumbuhan kredit yang lebih besar dari perkiraan. Di pasar keuangan, kinerja pasar saham dan pasar obligasi meningkat sejalan dengan persepsi positif pelaku pasar dan likuiditas global yang masih berlebih. Selain itu, kebijakan moneter melalui penetapan BI Rate telah ditransmisikan melalui jalur suku bunga perbankan dan kredit.

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global dan moderasi ekonomi domestik. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari bauran kebijakan yang telah ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam rangka mendukung terjaganya SSK. Kondisi ini tampak dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang membaik menjadi 0,7 dari tahun 2013 sebesar 1,1 (Grafik 8.1). Dinamika di sektor keuangan selama tahun 2014 juga secara umum menunjukkan kebijakan moneter melalui penetapan BI Rate telah ditransmisikan melalui jalur suku bunga perbankan dan kredit.

Meskipun dibayangi oleh dinamika ekonomi global yang kurang menguntungkan dan pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat, kinerja industri perbankan tetap terjaga. Di tengah pertumbuhan kredit yang melambat lebih dalam dari perkiraan, industri perbankan masih mampu menjaga profitabilitas tetap tumbuh. Perlambatan pertumbuhan kredit yang cukup dalam menjadi 11,6% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 21,6% berdampak pada rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM) yang menurun, meskipun masih berada pada level yang cukup tinggi.

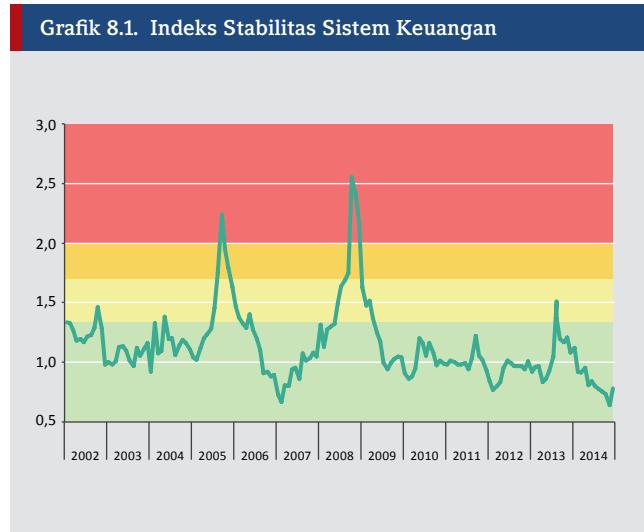
Kinerja industri perbankan yang terjaga juga didukung oleh ketahanan perbankan nasional yang kuat, tercermin pada rasio modal yang tinggi dan risiko yang terjaga. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) tahun 2014 mencapai 19,6%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan minimum sebesar 8%. Risiko kredit yang terjaga tercermin pada rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang masih rendah pada kisaran 2%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan masih memiliki bantalan yang cukup untuk menyerap

peningkatan risiko-risiko akibat dari perlambatan ekonomi lebih lanjut.

Selain dipengaruhi perkembangan ekonomi, kondisi perbankan selama 2014 juga tidak terlepas dari pengaruh bauran kebijakan yang diambil Bank Indonesia. Kebijakan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia telah berhasil menjaga kondisi likuiditas perbankan, di tengah peningkatan risiko likuiditas yang bersumber dari melambatnya pertumbuhan sumber pendanaan, terutama Dana Pihak Ketiga (DPK). Langkah antisipatif Bank Indonesia dengan menerbitkan kebijakan tentang pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bulan September 2013 berhasil memperlambat laju pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas bank, melalui penurunan batas atas kisaran LDR dari 78 - 100% menjadi 78 - 92%.

Kinerja pasar keuangan, baik pasar obligasi maupun pasar saham juga menunjukkan peningkatan sejalan dengan persepsi positif pelaku pasar dan likuiditas global yang masih berlebih, meskipun sempat tertekan pada triwulan IV 2014. Di pasar obligasi, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan *Credit Default Swap* (CDS) sedikit meningkat, namun dapat kembali pulih pada penghujung 2014 didukung oleh koordinasi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Kinerja pasar saham domestik juga mampu berbalik arah (*rebound*), bahkan kinerja pasar saham Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara kawasan, seperti Tiongkok dan Thailand.

Dinamika sektor keuangan selama tahun 2014 menunjukkan bahwa kebijakan moneter melalui penetapan BI Rate telah ditransmisikan melalui jalur suku bunga simpanan perbankan yang kemudian diikuti oleh suku bunga kredit. Kebijakan moneter yang mempertahankan BI Rate pada level 7,50% hingga 17 November 2014 dan menaikkan BI Rate menjadi 7,75% pada tanggal 18 November 2014 telah ditransmisikan dengan baik melalui jalur tersebut. Dari jalur suku bunga, suku bunga deposito dan kredit menunjukkan peningkatan walaupun kenaikan suku bunga kredit lebih terbatas. Sejalan dengan kenaikan suku bunga kredit dan moderasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit pada tahun 2014 melambat. Dari sisi harga aset, kebijakan moneter yang cukup kredibel selama ini, didukung oleh fundamental ekonomi yang semakin baik, direspon positif oleh pelaku pasar sehingga mendorong peningkatan kinerja pasar saham dan pasar obligasi.



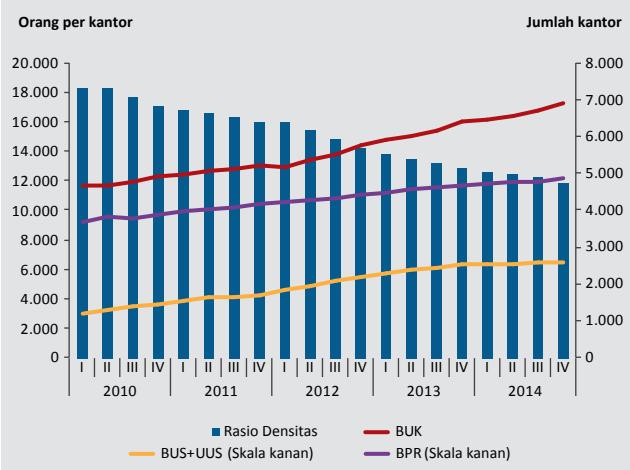
8.1. Kinerja Perbankan

Struktur industri keuangan Indonesia pada tahun 2014 masih didominasi oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini terlihat dari rasio total aset industri perbankan terhadap lembaga keuangan yang tercatat sebesar 78,6%.¹ Meskipun jumlah BU turun dari 120 bank menjadi 119 bank, dan angka jumlah BPR naik dari 1.635 menjadi 1.643, jumlah aset tumbuh 13,4% dari Rp4.954,5 triliun menjadi Rp5.615,1 triliun. Peningkatan total aset didukung dengan perluasan jaringan usaha bank, terlihat dari jumlah kantor BU dan BPR yang meningkat masing-masing dari 18.558 dan 4.678 pada tahun 2013 menjadi 19.948 dan 4.895 kantor. Dari total BU, jumlah bank syariah sebanyak 12 bank, dengan 2.175 kantor, meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 11 bank dengan 1.987 kantor. Sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) menurun dari 23 menjadi 22 UUS.² Bank umum di luar bank syariah merupakan Bank Umum Konvensional (BUK).

Peningkatan jaringan kantor bank tersebut, selain untuk mendukung ekspansi usaha juga mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap sistem keuangan (*financial inclusion*). Peningkatan akses tersebut antara lain dapat diukur dengan rasio jumlah kantor bank dengan jumlah penduduk atau *density ratio* (ratio densitas). Dari tahun ke tahun, rasio densitas perbankan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Selama tahun 2014, satu kantor bank melayani 11.913 orang, membaik dibandingkan dengan tahun 2013 yang harus melayani 12.878 orang (Grafik 8.2). Secara spasial, sebagian besar daerah di Indonesia telah memiliki rasio densitas yang cukup baik (Grafik 8.3). Kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan industri perbankan dalam rangka perbaikan iklim usaha perlu terus ditempuh agar perbankan mau meningkatkan ekspansi jaringan kantor terutama ke daerah dengan rasio densitas yang masih terbatas.

Dari sisi kredit, pada tahun 2014, kredit perbankan tumbuh melambat menjadi 11,6% dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 21,6% sejalan dengan perlambatan ekonomi domestik. Perlambatan kredit tersebut juga sebagai dampak dari kebijakan GWM LDR yang ditujukan untuk menjaga kondisi likuiditas perbankan mengingat

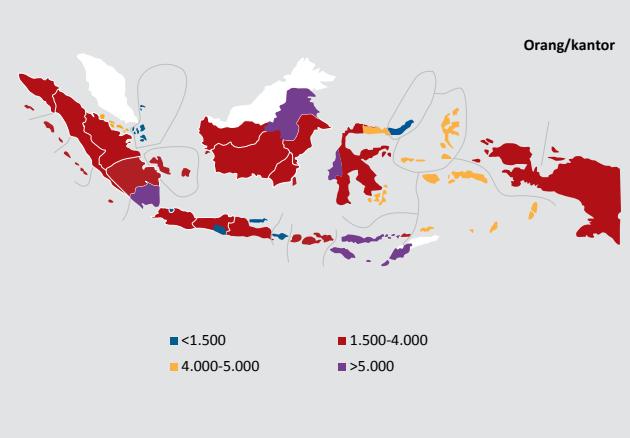
Grafik 8.2. Jumlah Kantor Bank dan Rasio Densitas Tahun 2010-2014



perkembangan likuiditas perbankan pada akhir tahun 2013 sampai dengan paruh pertama 2014 sempat cenderung ketat akibat perlambatan pertumbuhan sumber pendanaan, terutama DPK. Pertumbuhan kredit yang berlebihan juga berpotensi meningkatkan risiko kredit yang berujung pada meningkatnya potensi tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Peran perbankan dalam pembangunan nasional masih stabil di tengah perlambatan kredit yang cukup dalam. Hal ini tercermin dari rasio kredit terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2014 yang relatif tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2013 pada kisaran 36%. Namun, rasio tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan negara kawasan seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang telah berada di atas 100% (Grafik 8.4). Rasio kredit

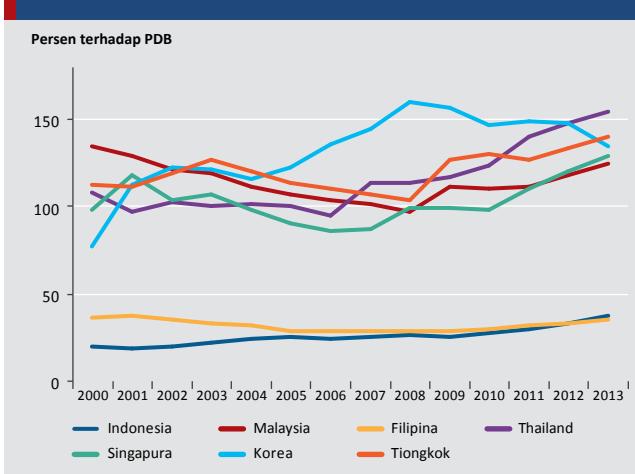
Grafik 8.3. Sebaran Spasial Rasio Densitas



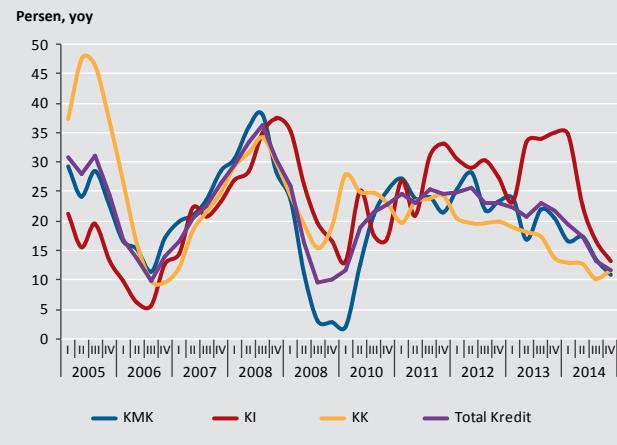
1 Kajian Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) edisi September 2014

2 Jumlah UUS berkurang karena digabung dengan salah satu bank konvensional yang berubah menjadi bank syariah.

Grafik 8.4. Rasio Kredit terhadap PDB



Grafik 8.5. Pertumbuhan Kredit Total dan Per Jenis Penggunaan



terhadap PDB yang relatif rendah antara lain disebabkan oleh terbatasnya sumber pendanaan bagi bank yang tercermin dari rasio total aset per PDB yang cenderung stabil dan masih cukup jauh di bawah negara lain di kawasan.

Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit produktif melambat sepanjang tahun 2014, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan kredit konsumsi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) yang melambat menjadi 10,8% pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 20,4%. Sementara itu, perlambatan Kredit Investasi (KI) tercatat lebih dalam menjadi 13,2% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 35,0% (Grafik 8.5). Perlambatan ekonomi domestik dan penurunan harga komoditas global telah berdampak pada profitabilitas korporasi yang menurun sehingga berdampak pada permintaan terhadap KMK dan KI yang lebih rendah.

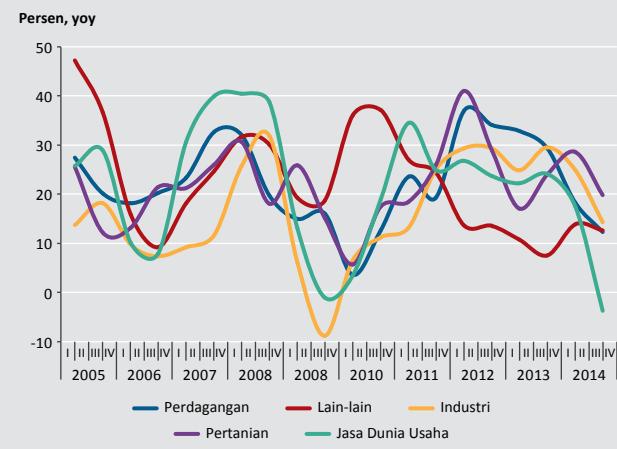
Pertumbuhan Kredit Konsumsi (KK) melambat menjadi 11,5% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 13,7%. Kredit konsumsi sebagian besar berasal dari sektor rumah tangga, terdiri atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Multiguna. Perlambatan kredit konsumsi tersebut sejalan dengan moderasi ekonomi domestik, selain dampak penerapan aturan *Loan to Value ratio* (LTV) dan *Down Payment* (DP).

Pertumbuhan kredit yang melambat hampir terjadi di semua sektor ekonomi. Perlambatan terutama terjadi pada sektor Perdagangan, Industri dan Jasa Dunia Usaha (Grafik 8.6) sejalan dengan penurunan kinerja korporasi publik akibat moderasi ekonomi domestik sehingga menyebabkan

penurunan permintaan KI dan KMK. Pertumbuhan kredit sektor perdagangan yang melambat disebabkan oleh moderasi ekspor akibat permintaan dari negara mitra dagang yang menurun serta terbatasnya impor akibat pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat dan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi. Perlambatan kredit sektor industri juga dipengaruhi impor yang tumbuh rendah akibat depresiasi nilai tukar rupiah serta penurunan permintaan produk industri akibat perlambatan ekonomi domestik. Sedangkan perlambatan di sektor Jasa Dunia Usaha dipengaruhi perlambatan ekonomi domestik yang juga berimbas pada penurunan permintaan kredit ke lembaga *leasing*.

Dinamika penyaluran kredit perbankan secara spasial juga menunjukkan perlambatan di keseluruhan kawasan

Grafik 8.6. Pertumbuhan Kredit Lima Sektor Ekonomi Terbesar



pada tahun 2014. Berdasarkan kawasan, perlambatan kredit terutama terjadi di Kalimantan yang hanya tumbuh sebesar 9,7% dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 21,7% (Grafik 8.7). Hal tersebut disebabkan oleh perlambatan KI yang antara lain dipengaruhi oleh penurunan harga dan permintaan komoditas pertambangan dari negara importir. Meskipun perlambatan KMK telah terjadi di seluruh kawasan selama tiga tahun terakhir, perlambatan KMK di Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidak sedalam kawasan lainnya (Grafik 8.8). Hal ini merupakan pengaruh dari aktivitas perekonomian dan konsumsi rumah tangga yang masih cukup kuat di kawasan tersebut.

Di sisi KI, perlambatan terdalam terjadi di kawasan Sumatera dan KTI, sebagai pengaruh dari melambatnya investasi pada sektor pertambangan dan subsektor perkebunan pada 2014. Kredit investasi di kawasan Sumatera dan KTI masing-masing tumbuh melambat menjadi 5,4% dan 9,8% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 37,8% dan 37,5%. Di kawasan Jawa, KI masih mampu tumbuh cukup tinggi sebesar 17,9% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 27,0%. Hal ini merupakan pengaruh dari kinerja investasi di sektor manufaktur yang terjaga, meskipun melambat dibandingkan dengan tahun lalu.

Fungsi intermediasi perbankan syariah juga melambat sejalan dengan moderasi ekonomi domestik. Dari sisi penyaluran pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah juga melambat, yaitu dari 24,8% pada tahun 2013 menjadi 8,3% (Grafik 8.9). Perlambatan pembiayaan syariah terutama dipengaruhi pertumbuhan pembiayaan akad murabahah yang melambat dari 25,6%

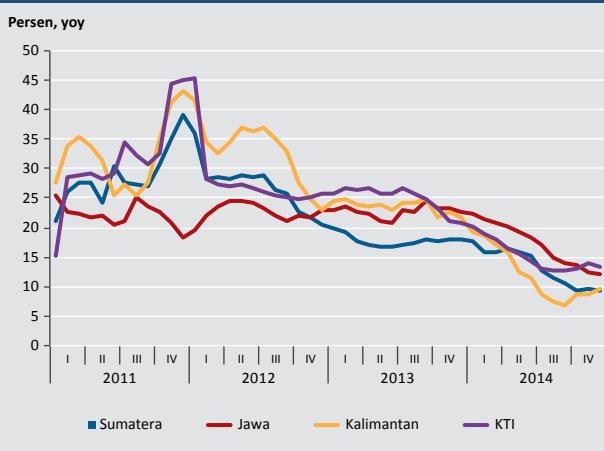
Grafik 8.8. Perkembangan Kredit Modal Kerja Kawasan



pada tahun lalu menjadi 6,2%. Jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan kredit terutama terjadi pada KMK dan KK yang masing-masing melambat dari 27,6% dan 24,1% pada tahun 2013 menjadi 8,9% dan 1,2%. Seiring dengan moderasi ekonomi domestik dan perlambatan pertumbuhan pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah cenderung meningkat meskipun tetap di bawah batas aman, yaitu dari 2,6% pada tahun 2013 menjadi 4,3%.

Moderasi ekonomi domestik juga menyebabkan perlambatan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada tahun 2014, kredit UMKM mencapai Rp731,8 triliun atau tumbuh melambat sebesar 15,1% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 15,5% (Grafik 8.10). Perlambatan ekonomi domestik berdampak pada

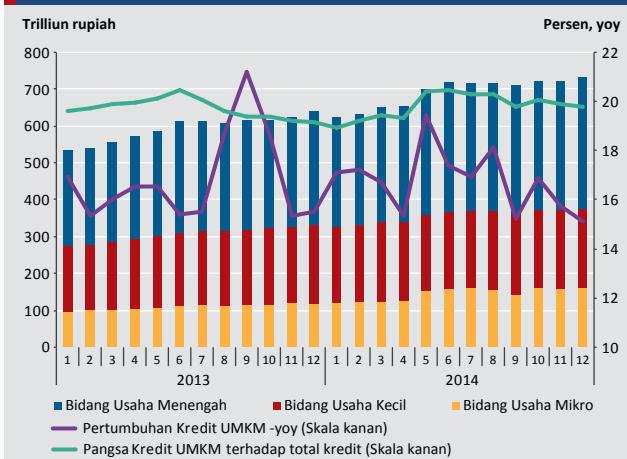
Grafik 8.7. Perkembangan Kredit Kawasan



Grafik 8.9. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah



Grafik 8.10. Trend Penyaluran Kredit UMKM



daya beli masyarakat yang menurun sehingga permintaan barang dan jasa menjadi berkurang. Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM terutama pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 12,3% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 29,4%. Sektor Real Estate bahkan mencatat kontraksi 5,3% dibandingkan dengan tahun 2013 yang masih mampu mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 20,8%.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat menjadi 19,7% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 19,2%. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan kredit UMKM yang lebih tinggi yaitu sebesar 15,1% dibandingkan dengan non UMKM sebesar 10,8%. Menurut klasifikasi usaha, sebagian besar (48,8%) penyaluran kredit UMKM ditujukan kepada Usaha Menengah, yang mayoritas diserap oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, yaitu sebesar 50,5% (Rp369,8 triliun), diikuti Industri Pengolahan (9,9%), dan Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (7,8%).

Secara geografis, mayoritas penyaluran kredit UMKM dilakukan di Jawa sebesar 57,7% (terutama diserap oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 49,3% dan sektor Industri Pengolahan sebesar 13,3%), Sumatera sebesar 20,7% (terutama diserap oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 49,1%, serta sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar 19,5%), dan Sulawesi sebesar 7,1% (terutama diserap oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 61,5% dan sektor Konstruksi sebesar 5,5%).

Tabel 8.1. Alokasi Penyaluran KUR Berdasarkan Wilayah dan Sektor

Wilayah	Sektor Perdagangan besar dan Eceran	Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
Jawa	70,5%	8,4 %
Sumatera	43,3%	38,8 %
Kalimantan	42,3%	37,2 %
Sulawesi	60,6%	13,0 %
Papua dan Maluku	59,9%	14,6 %

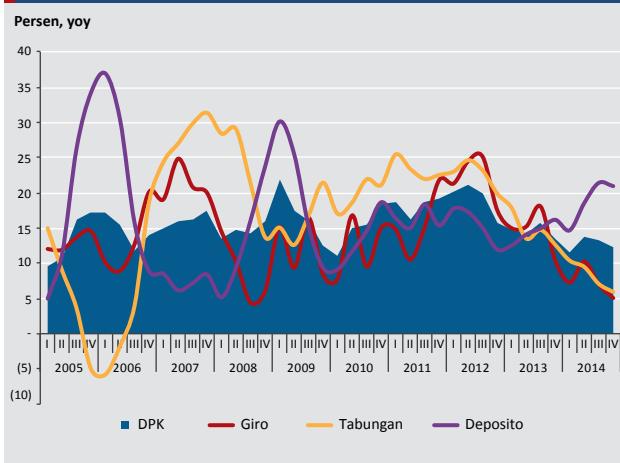
Pada tahun 2014, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp40,3 triliun atau 108,9% dari target 2014.³ Dengan perkembangan tersebut, akumulasi realisasi KUR sejak tahun 2007 hingga Desember 2014 telah mencapai Rp178,8 triliun. Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor Perdagangan (59,8%), sementara penyaluran pada sektor Pertanian termasuk Perikanan hanya sebesar 20,6%. Dominasi penyaluran KUR ke sektor Perdagangan dipengaruhi oleh perputaran usaha perdagangan yang lebih menguntungkan dan risiko yang lebih terukur dibandingkan dengan sektor lainnya. Sementara penyaluran KUR pada sektor Pertanian yang rendah disebabkan oleh penilaian risiko usaha yang cukup tinggi karena karakteristik usahanya yang banyak dipengaruhi oleh faktor alam.

Secara geografis, penyaluran KUR masih terpusat di Jawa sebesar 48,8%, diikuti oleh Sumatera (24,4%), Kalimantan (10,4%), Sulawesi (8,6%), Bali dan Nusa Tenggara (4,9%), serta Papua dan Maluku (2,9%). Mayoritas penyaluran KUR di masing-masing wilayah diserap oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (Tabel 8.1). Sedangkan untuk penyaluran KUR di Bali dan Nusa Tenggara diserap oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya masing-masing sebesar 71,1% dan 8,1%.

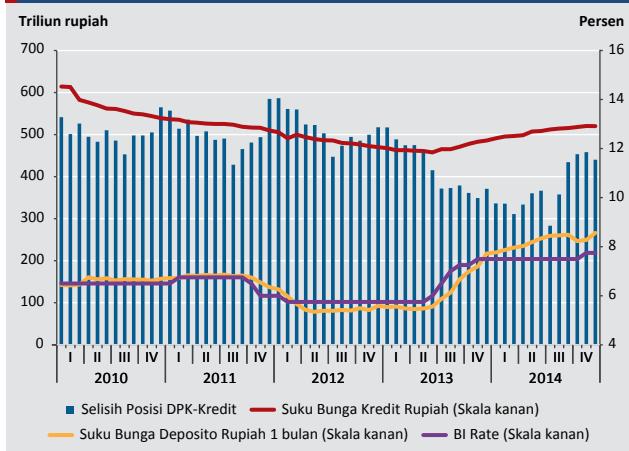
Dari sisi dana, sumber pendanaan utama perbankan di Indonesia yaitu DPK, tumbuh melambat menjadi 12,3% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 13,6% sejalan dengan moderasi ekonomi domestik. Perlambatan tersebut didorong oleh pertumbuhan giro dan tabungan yang melambat, sementara pertumbuhan deposito meningkat (Grafik 8.11). Hal ini mengindikasikan

³ Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Grafik 8.11. Perkembangan DPK



Grafik 8.13. Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit, Suku Bunga Deposito Rupiah, dan BI Rate



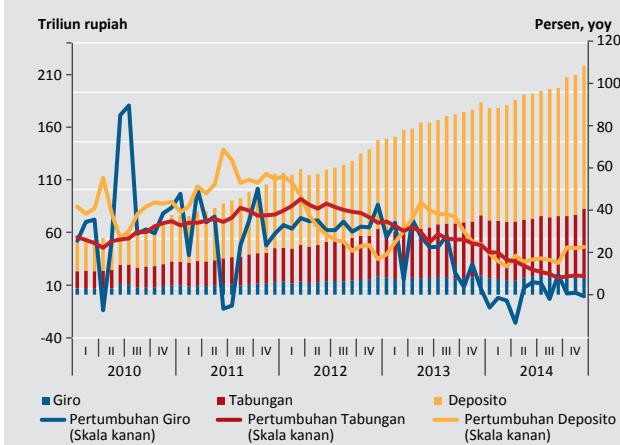
terjadinya pergeseran dana masyarakat kepada simpanan jangka panjang sejalan dengan kenaikan suku bunga simpanan. Pergeseran tersebut menyebabkan biaya dana yang ditanggung bank menjadi lebih mahal dan berpengaruh pada profitabilitas bank. DPK perbankan syariah juga tumbuh melambat dari 24,4% pada tahun 2013 menjadi 18,7% (Grafik 8.12). Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada seluruh komponen DPK, terutama pertumbuhan Tabungan iB yang melambat dari 26,9% pada tahun 2013 menjadi 11,2%.

Suku bunga simpanan meningkat sejalan dengan kenaikan BI Rate sejak pertengahan tahun 2013. Suku bunga kredit juga mengalami peningkatan, namun tidak setinggi peningkatan suku bunga deposito, sehingga *spread* suku bunga cenderung menyempit

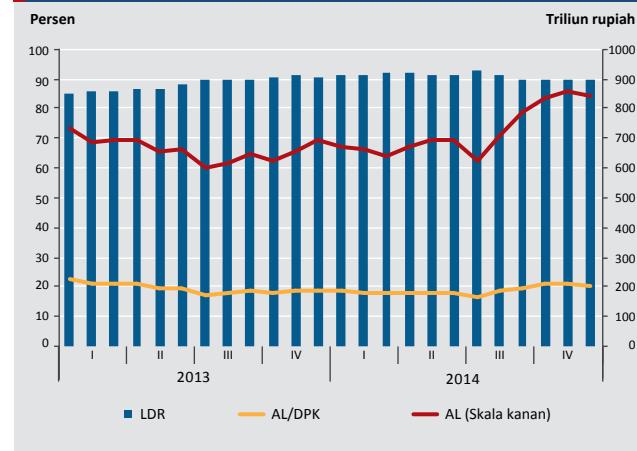
(Grafik 8.13). *Funding gap* (selisih DPK dan Kredit) yang sempat menyempit sejak pertengahan tahun 2013 kembali melebar sebagai dampak dari implementasi kebijakan GWM LDR, koordinasi BI dan OJK dalam menjaga ketahanan likuiditas perbankan serta semakin menariknya bunga simpanan.

Perlambatan pertumbuhan (DPK) di tengah perlambatan kredit yang semakin dalam menyebabkan LDR membaik. Perbankan dapat menambahkan kembali alat likuidnya, sehingga rasio Alat Likuid terhadap DPK meningkat menjadi 20,5% dibandingkan tahun 2013 sebesar 19,0% (Grafik 8.14). Rasio alat likuid tersebut masih cukup tinggi sehingga masih memadai untuk mengantisipasi potensi risiko penarikan dana.

Grafik 8.12. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah



Grafik 8.14. LDR dan Rasio AL / DPK



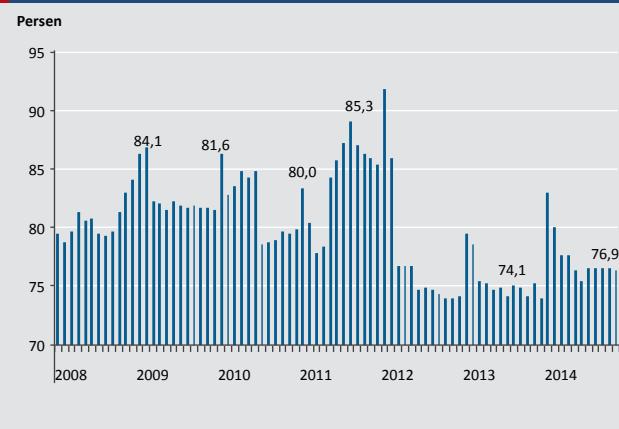
Profitabilitas dan efisiensi perbankan menurun tercermin pada rasio ROA yang menurun dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang meningkat. Penurunan kinerja ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit yang melambat, risiko kredit yang mulai meningkat serta suku bunga dana yang meningkat. Dari sisi profitabilitas, laba sebelum pajak perbankan tumbuh melambat menjadi 7% dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 15% sejalan dengan *Return on Assets* (ROA) yang menurun (Grafik 8.15). Namun demikian, bila dibandingkan dengan negara kawasan, ROA perbankan Indonesia masih lebih tinggi.

Rasio *Net Interest Margin* (NIM) turun sejalan dengan selisih antara suku bunga DPK dan kredit yang mengelil. Rasio NIM tercatat 4,2%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 4,9%. Namun demikian, NIM tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Singapura yang berada pada kisaran 1,6-2,4%.

Terkait efisiensi perbankan, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami peningkatan. Rasio BOPO meningkat menjadi 76,9% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 74,1% (Grafik 8.16). Kenaikan suku bunga DPK yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan suku bunga kredit berdampak pada beban operasional bank yang meningkat.

Di tengah penyaluran kredit yang melambat dan profitabilitas perbankan yang menurun, ketahanan perbankan nasional tetap meningkat. Hal ini tercermin dari modal bank umum pada tahun 2014 yang meningkat menjadi Rp746,6 triliun dibandingkan dengan tahun

Grafik 8.16. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)



2013 sebesar Rp626,8 triliun. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga meningkat menjadi 19,5% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 18,4% (Grafik 8.17). Rasio permodalan yang tinggi juga mengindikasikan bahwa bank masih dapat meningkatkan ekspansi kreditnya dan masih tahan terhadap berbagai potensi risiko akibat perlambatan intermediasi.

Hasil *stress test* dengan skenario sangat buruk menunjukkan bahwa secara umum industri perbankan masih memiliki ketahanan yang tinggi. Hasil *stress test* risiko kredit menunjukkan bahwa secara industri NPL *gross* masih di bawah batas aman 5% dan CAR masih di atas 8%. Hasil *stress test* risiko pasar menunjukkan bahwa CAR industri perbankan masih berada di atas 14%. Berdasarkan kelompok Bank Umum menurut Kelompok

Grafik 8.15. *Return on Asset* (ROA)



Grafik 8.17. Perkembangan CAR Perbankan



Usaha (BUKU) tidak ada yang memiliki CAR di bawah 8%. Apabila dilakukan *stress test* secara terintegrasi yaitu kombinasi *stress test* risiko kredit dan risiko pasar dengan skenario sangat buruk, CAR industri perbankan maupun per kelompok BUKU diperkirakan masih di atas 8%. Namun diperkirakan sudah ada bank yang memerlukan suntikan modal, khususnya jika terjadi perlambatan ekonomi yang sangat signifikan.

Risiko kredit perbankan meningkat, namun masih berada pada level yang aman. Pada tahun 2014, rasio *Non Performing Loan* (NPL) gross perbankan meningkat menjadi 2,2% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,9% (Grafik 8.18). Peningkatan NPL tersebut disebabkan karena perlambatan perekonomian yang disertai dengan depresiasi nilai tukar rupiah sehingga kemampuan korporasi dan perorangan dalam membayar kredit menjadi menurun. Namun demikian, perbankan masih mampu menjaga risiko kredit berada cukup jauh di bawah batas aman, yaitu 5%, sehingga belum membahayakan kondisi stabilitas sistem keuangan.

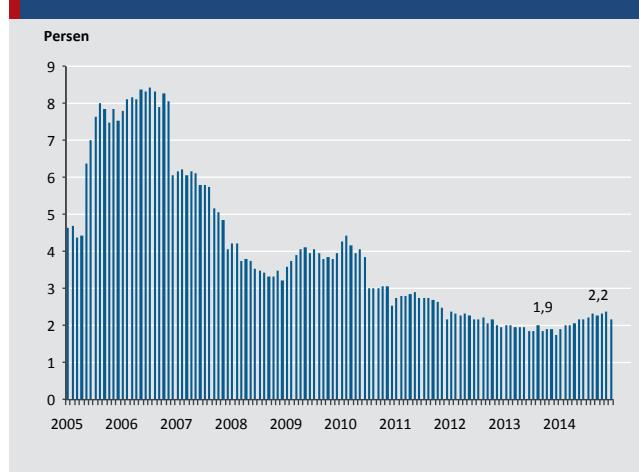
Peningkatan NPL terutama berasal dari sektor Perdagangan, Pertambangan dan Konstruksi. Ketiga sektor tersebut cukup sensitif terhadap perlambatan ekonomi global dan domestik namun rasio NPLnya masih berada dibawah batas aman. Peningkatan NPL Perdagangan terkait perlambatan ekonomi, penurunan impor dan inflasi. Sementara, NPL sektor pertambangan yang meningkat dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor pertambangan yang terpengaruh penurunan harga dan permintaan komoditas dunia. Sementara NPL Konstruksi, terpengaruh perlambatan ekonomi domestik dan depresiasi nilai tukar yang menyebabkan beberapa bahan

konstruksi yang masih diimpor menjadi mahal. Perbankan di Indonesia masih sangat berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya termasuk dengan memitigasi penyaluran kredit kepada sektor yang sensitif terhadap perlambatan ekonomi dan penerima pinjaman valas yang memiliki *cash flow* dalam rupiah.

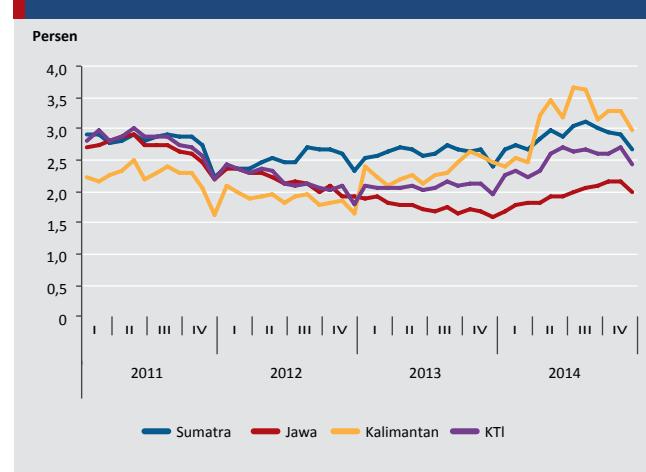
Sementara secara spasial, risiko kredit juga mengalami tren peningkatan di keseluruhan kawasan hingga akhir 2014, sejalan dengan perlambatan perekonomian. Meski demikian, NPL di keseluruhan kawasan masih berada di bawah batas aman. Peningkatan NPL tertinggi terjadi di kawasan luar Jawa, terutama di kawasan Sumatera dan KTI (Grafik 8.19). Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor pertambangan dan subsektor perkebunan. Peningkatan NPL di kedua sektor tersebut terutama pada kredit jenis KMK dan terjadi sejak awal 2014 (Grafik 8.20). NPL kredit konsumsi di kawasan Sumatera dan KTI juga perlu menjadi perhatian karena turut mengalami peningkatan dibandingkan dengan daerah lain yang relatif stabil.

Pada tahun 2014, risiko kredit UMKM cenderung meningkat tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang lebih tinggi menjadi 3,97% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,19% (Grafik 8.21). Memburuknya rasio NPL kredit UMKM diantaranya disebabkan oleh: (i) kemampuan keuangan debitur yang menurun akibat perlambatan usaha, suku bunga kredit yang relatif tinggi, kenaikan harga beberapa komponen usaha (antara lain bahan bangunan, *spare part* kendaraan), gagal panen karena kondisi cuaca, dan turunnya keuntungan usaha debitur, serta (ii) infrastruktur dan SDM bank yang belum memadai dalam pengelolaan kredit UMKM terutama

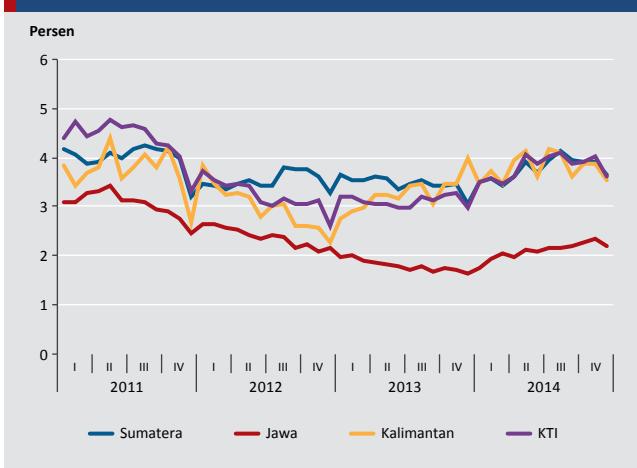
Grafik 8.18. Rasio Non Performing Loans (NPL)



Grafik 8.19. Perkembangan NPL Kawasan



Grafik 8.20. Perkembangan NPL Kredit Modal Kerja (KMK) Kawasan



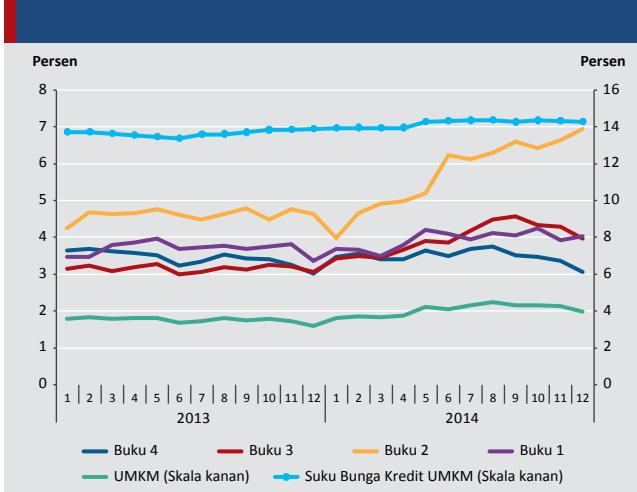
terkait dengan keterbatasan jaringan kantor, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, dan belum sempurnanya bisnis proses kredit UMKM.

Pemburukan rasio NPL kredit UMKM terutama didorong oleh peningkatan rasio NPL di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi serta sektor Transportasi & Telekomunikasi. Berdasarkan skala usaha, rasio NPL kredit Usaha Kecil lebih tinggi dibandingkan rasio NPL pada skala usaha lainnya, yaitu sebesar 4,73%. Sedangkan rasio NPL kredit Usaha Mikro sebesar 3,33% dan Usaha Menengah 3,79%. Rasio NPL KUR pada tahun 2014 juga sedikit memburuk menjadi 3,19% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,07%. Secara umum, hal tersebut disebabkan oleh proses bisnis penyaluran KUR pada

bank pelaksana maupun permasalahan yang dialami debitur KUR.

Risiko likuiditas pada tahun 2014 kembali terjaga didukung oleh keberhasilan penerapan kebijakan makroprudensial terkait GWM-LDR. Sejak paruh kedua tahun 2013 sampai dengan paruh pertama 2014, risiko likuiditas perbankan cenderung meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan sumber pendanaan, terutama DPK, yang melambat di tengah pertumbuhan kredit yang masih kuat sampai dengan triwulan I 2014. Peningkatan risiko likuiditas selama paruh pertama 2014 juga dipengaruhi oleh pasokan likuiditas dari pemerintah yang lebih terbatas sejalan dengan kebijakan penghematan belanja yang ditempuh Pemerintah. Bank Indonesia merespon perkembangan ini dengan menerapkan kebijakan makroprudensial yaitu GWM-LDR pada triwulan III 2013 untuk meredam laju pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan. Implementasi kebijakan tersebut yang disertai dengan ekspansi operasi keuangan pemerintah berhasil mengurangi tekanan likuiditas perbankan, berdampak pada risiko likuiditas pada tahun 2014 yang terjaga.

Grafik 8.21. Tren Rasio NPL Kredit UMKM



8.2. Kinerja Pasar Keuangan dan Institusi Keuangan Nonbank

Pasar Obligasi

Selama tahun 2014, kinerja pasar obligasi tercatat meningkat, tercermin dari imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang menurun. Imbal hasil SBN dengan tenor 10 tahun pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar 7,80%, turun 66 bps dibandingkan dengan akhir tahun 2013 sebesar 8,45% (Grafik 8.22). Peningkatan kinerja tersebut tidak terlepas dari sentimen positif baik dari sisi domestik maupun global. Dari sisi domestik, persepsi positif dipicu oleh optimisme pelaku pasar terhadap respon bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pada awal tahun 2014, sentimen positif bersumber dari rilis data PDB 2013 yang lebih tinggi dari perkiraan yang disertai dengan surplus neraca perdagangan bulan Desember 2013. Sementara, dari sisi global, sentimen positif di pasar obligasi antara lain terkait dengan meredanya kekhawatiran akan percepatan penghentian Quantitative Easing (QE) setelah rilis data Nonfarm Payroll (NFP) AS yang turun.

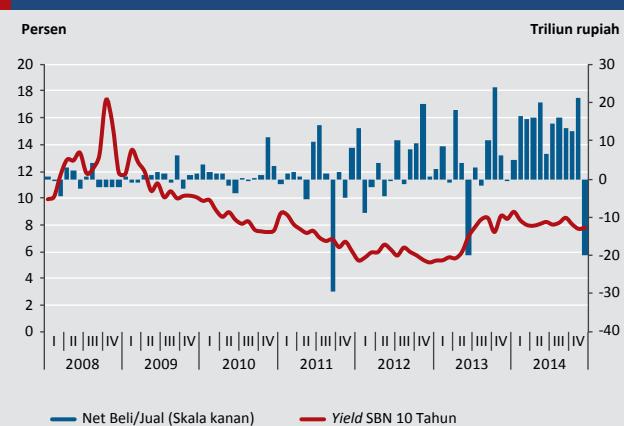
Paska tren penguatan pada awal tahun, kinerja pasar SBN mengalami tekanan, namun tetap terjaga hingga akhir tahun 2014. Kondisi domestik yang tetap kondusif seiring dengan proses transisi kepemimpinan nasional yang berjalan lancar berkontribusi menjaga kinerja pasar SBN di tengah sentimen negatif global antara lain kekhawatiran akan kenaikan *Fed Fund Rate* yang lebih cepat paska rilis data perekonomian AS yang membaik pada bulan September 2014.

Pada bulan November 2014, imbal hasil SBN dengan tenor 10 tahun kembali menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 7,69% yang merupakan titik terendah pada tahun 2014. Peningkatan kinerja SBN tersebut merupakan respons positif pelaku pasar atas kebijakan Pemerintah mengurangi subsidi BBM dan kebijakan Bank Indonesia menaikkan BI Rate untuk tetap menjaga ekspektasi inflasi dalam lintasan pencapaian target Bank Indonesia.

Meskipun demikian, tren penurunan pada akhir tahun 2014 tersebut sedikit tertahan pada bulan Desember 2014 seiring dengan peningkatan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan menguatnya sentimen kenaikan *Fed Fund Rate* yang lebih cepat di tahun 2015. Namun demikian, kinerja pasar SBN tetap terjaga sebagai dampak dari penerapan *dual intervention* di pasar SBN dan pasar valas dalam rangka menjaga nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Strategi Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk memitigasi berlanjutnya risiko tekanan di pasar keuangan sekaligus mengelola likuiditas di pasar uang.

Peningkatan kinerja pasar SBN selama tahun 2014 terefleksi dari banyaknya investor non residen yang

Grafik 8.23. Imbal Hasil SBN dan Net Beli / Jual Asing

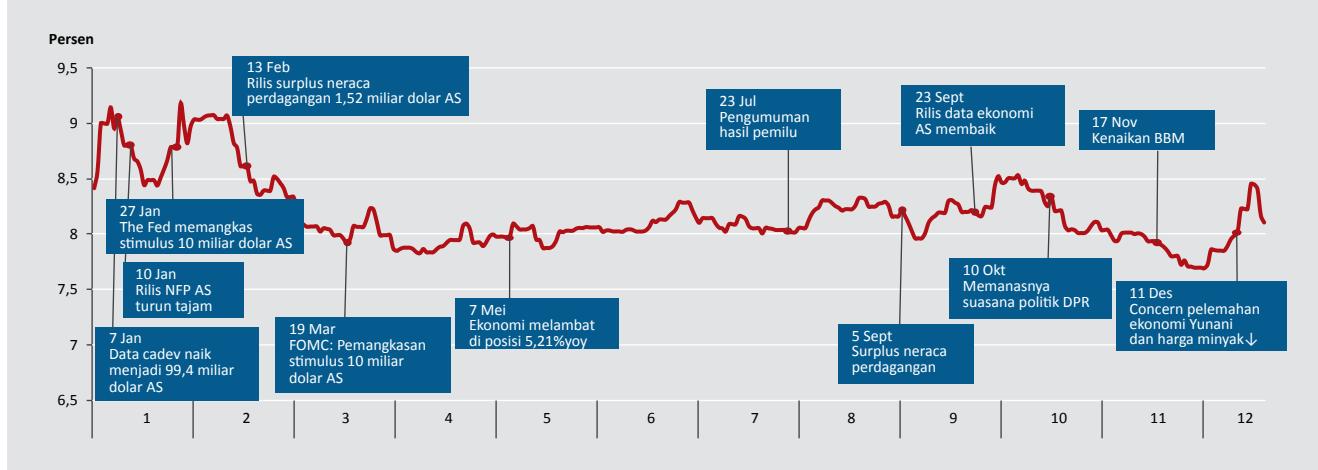


Sumber: Bloomberg, diolah

membeli SBN (Grafik 8.23). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, investor nonresiden yang membeli SBN di tahun 2014 tercatat yang paling banyak. Investor mencatat net beli sepanjang tahun 2014, dengan net beli terbesar pada bulan Mei 2014 (Rp20,2 triliun) dan bulan November 2014 (Rp18,5 triliun). Aksi beli oleh investor nonresiden tersebut tidak terlepas dari persepsi positif atas tren perbaikan kondisi fundamental Indonesia dan kondisi domestik yang tetap kondusif seiring dengan lancarnya proses transisi kepemimpinan nasional.

Di pasar perdana, kinerja pasar SBN juga meningkat ditunjukkan oleh imbal hasil SBN yang menunjukkan tren penurunan. Imbal hasil SBN untuk tenor 1 tahun yang ditawarkan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar 6,82% atau turun dibandingkan dengan awal tahun 2014 sebesar 7,01%. Jumlah penerbitan SBN (neto) pada tahun 2014

Grafik 8.22. Imbal Hasil SBN 10 Tahun dan Faktor Sentimen Selama 2014



Sumber: Bloomberg, diolah

tersebut mencapai Rp265 triliun, atau meningkat 13,7% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp233 triliun.

Berbeda dengan pasar SBN, kinerja pasar obligasi korporasi sedikit menurun, terutama di pasar perdana. Penerbitan obligasi korporasi selama tahun 2014 tercatat sebesar Rp47,82 triliun, atau turun sebesar 13,5% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp55,3 triliun. Sebagaimana pada tahun sebelumnya, penerbitan obligasi korporasi tersebut didominasi oleh perusahaan *multifinance*.

Penurunan kinerja pasar obligasi korporasi seiring dengan moderasi ekonomi pada tahun 2014. Suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu menyebabkan peningkatan biaya dana dalam pembiayaan, sehingga berimbas pada kondisi penurunan di pasar obligasi. Selain itu, beberapa korporasi juga menunda penerbitan obligasi dan lebih memilih *wait and see* proses transisi kepemimpinan nasional pada tahun 2014.

Pasar Saham

Pasar saham domestik juga menunjukkan peningkatan kinerja pada tahun 2014. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang meningkat di hampir seluruh sektor. Tren penguatan IHSG terjadi sejak awal tahun 2014. Pada awal tahun 2014, optimisme terhadap perekonomian Indonesia dan meredanya kekhawatiran *tapering* berkontribusi pada kenaikan IHSG. Sentimen positif optimisme terhadap perekonomian Indonesia diperkuat dengan rilis data PDB 2013 yang lebih tinggi dari perkiraan awal. Sementara itu, meredanya kekhawatiran percepatan penghentian QE diawali dengan testimonial Gubernur Bank Sentral AS Janet Yellen pada awal tahun 2014 yang mengindikasikan stimulus masih dibutuhkan.

Sentimen positif dan optimisme di pasar saham domestik pada awal tahun 2014 tersebut tidak terlepas dari respons Bank Indonesia bersama Pemerintah melalui bauran kebijakan menghadapi tekanan di pasar keuangan pada tahun sebelumnya. Respons Bank Indonesia bersama Pemerintah secara tidak langsung berdampak positif pada penguatan tren positif di pasar saham domestik. Dalam konteks ini, pelaku pasar memberi apresiasi positif terhadap bauran kebijakan dalam mengendalikan neraca transaksi berjalan, menjaga nilai tukar rupiah, menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi.

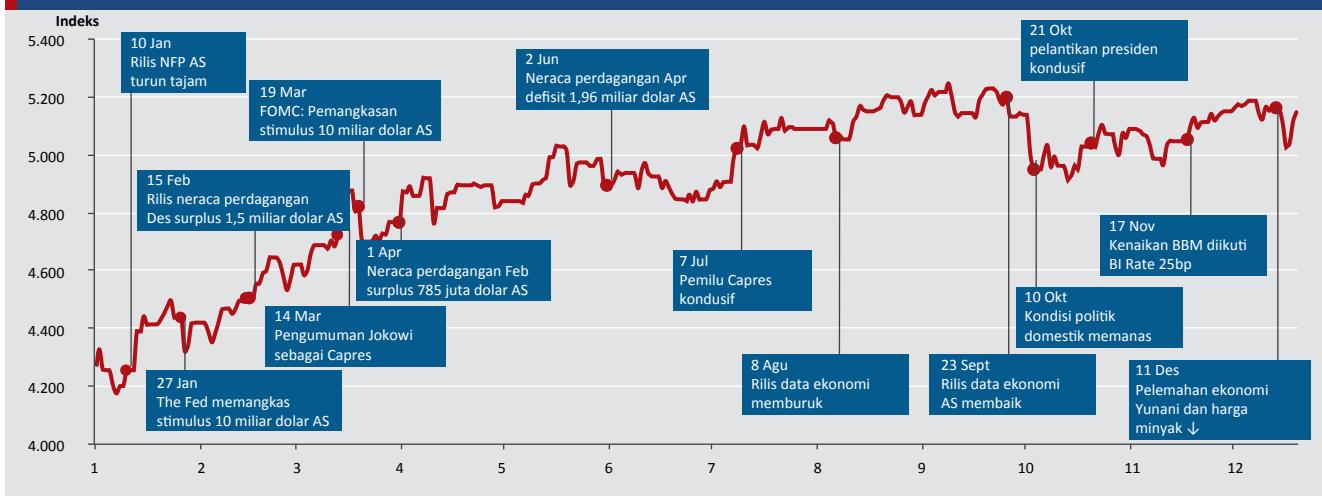
Tren penguatan IHSG yang dimulai sejak awal tahun 2014 tersebut sempat sedikit tertahan seiring dengan perilaku investor yang lebih memilih *wait and see* terkait pelaksanaan Pemilihan Presiden pada pertengahan 2014. Meskipun demikian, tren penguatan tersebut tetap terjaga seiring dengan pelaksanaan pemilu yang aman, lancar dan kondusif, serta proses transisi kepemimpinan nasional yang berjalan dengan lancar. Pelaksanaan Pemilihan Presiden yang lancar dan kondusif pada bulan Juli 2014 mendorong penguatan lebih lanjut hingga mencapai level di atas 5.000 meskipun dinamika proses transisi Pemerintahan baru dan pimpinan Legislatif sempat memengaruhi fluktuasi kinerja IHSG pada paruh kedua tahun 2014 (Grafik 8.24).

Respons positif pelaku pasar pada akhir tahun 2014 atas kebijakan Pemerintah mengurangi subsidi BBM dan kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan BI Rate juga turut menjaga tren penguatan IHSG. Pada akhir tahun 2014, IHSG mencapai level 5.226,95, meningkat 22,3% dibandingkan pada akhir tahun 2013 sebesar 4.274,2. Dibandingkan dengan negara kawasan, IHSG memiliki kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan sebesar 22,3% atau berada di bawah Tiongkok (52,9%), India (29,9%) dan Filipina (22,8%) (Grafik 8.25).

Penguatan IHSG pada tahun 2014 juga didorong oleh penguatan indeks hampir di seluruh sektor. Dari sisi fundamental perusahaan, margin keuntungan perusahaan sebesar 8,6% pada tahun 2014 menjadi salah satu faktor positif penguatan indeks hampir di seluruh sektor tersebut. Secara sektoral, penguatan terbesar berasal dari sektor properti sebesar 55,8%, diikuti sektor keuangan yang menguat sebesar 35,4%. Adapun sektor yang mengalami pelemahan tercatat hanya sektor pertambangan sebesar -4,2% seiring dengan harga komoditas di sektor pertambangan yang menurun.

Peningkatan kinerja pasar saham pada tahun 2014 didukung oleh kepemilikan saham oleh investor nonresiden yang meningkat (Grafik 8.26). Sampai dengan bulan Juli 2014, investor nonresiden mencatat net beli sebesar Rp57,19 triliun seiring dengan persepsi positif atas tren perbaikan kondisi fundamental Indonesia. Pada bulan Desember 2014, investor nonresiden melakukan aksi jual seiring dengan peningkatan tekanan nilai rupiah dan kekhawatiran percepatan kenaikan *Fed Fund Rate* di tahun 2015. Meskipun demikian, selama tahun 2014, investor nonresiden tercatat melakukan net beli sebesar Rp42,6 triliun, atau lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencatat net jual sebesar Rp20,65 triliun.

Grafik 8.24. Faktor-Faktor Penggerak IHSG Tahun 2014



Sumber: Bloomberg, diolah

Di pasar perdana, kinerja pasar saham masih menunjukkan tren penurunan seiring dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. Selama tahun 2014, jumlah pembiayaan dalam bentuk *right issue* di pasar perdana tercatat sebesar Rp39,36 triliun, atau turun 3,5% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp40,8 triliun. Sementara itu, jumlah pembiayaan melalui *Initial Public Offering* (IPO) tercatat sebesar Rp8,3 triliun, atau turun 50,3% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp16,7 triliun. Penurunan tersebut seiring dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. Beberapa korporasi juga menunda pembiayaan melalui saham pada tahun 2014 dan lebih memilih *wait and see* proses transisi kepemimpinan nasional pada tahun 2014.

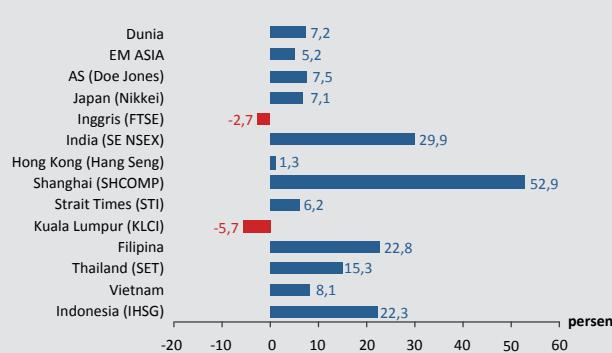
Sementara itu, dalam rangka pendalaman pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengeluarkan aturan

baru mengenai *lot size* yang semula 500 menjadi 100. Penurunan *lot size* tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat mengingat modal investasi menjadi lebih terjangkau. Selain itu, pada tahun 2014, BEI juga mencanangkan Gerakan Cinta Pasar Modal untuk meningkatkan kesadaran serta kecintaan masyarakat terhadap investasi pasar modal. Peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan baik aktivitas perdagangan di pasar saham maupun aktivitas pembiayaan di pasar perdana.

Institusi Keuangan Nonbank

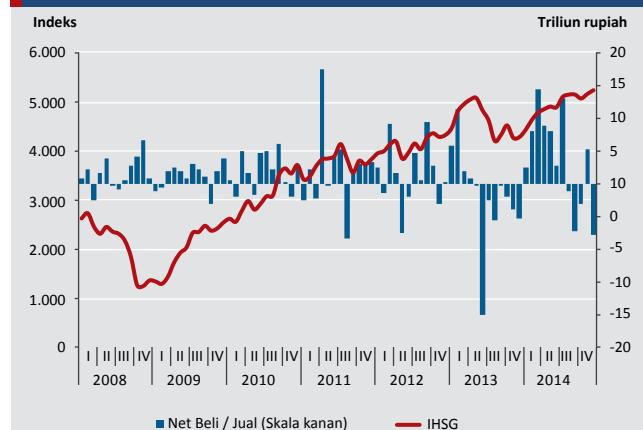
Institusi Keuangan Nonbank (IKNB) mencatat pertumbuhan positif di tengah moderasi pertumbuhan

Grafik 8.25. IHSG dan Perkembangan Bursa Global 2014



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 8.26. IHSG dan Net Beli / Jual Asing



Sumber: Bloomberg, diolah

ekonomi pada tahun 2014. Hal ini ditunjukkan oleh aset IKNB yang tercatat tumbuh positif dan risiko IKNB yang juga menunjukkan tren perbaikan. Pada tahun 2014, total aset Perusahaan Pembiayaan (PP), industri asuransi dan perusahaan dana pensiun masing-masing tumbuh 4,96%, 17,1%, dan 13,7%. Kinerja perusahaan reksadana juga mencatat pertumbuhan positif, ditunjukkan oleh Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tahun 2014 yang meningkat mencapai Rp228,35 triliun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp185,5 triliun.

Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan PP pada tahun 2014 melambat menjadi 5,2% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 15,2% seiring dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. Perlambatan pertumbuhan pembiayaan PP pada tahun 2014 tersebut terjadi pada jenis pembiayaan konsumen, *leasing* dan anjak piutang. Apabila dibandingkan pada tahun 2013, pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang masing-masing tumbuh melambat menjadi 10,2%, -5,5% dan 22,3% dibandingkan dengan tahun 2013 masing-masing sebesar 16,2%, 11,7% dan 49,5%.

Berdasarkan komponen, pembiayaan konsumen masih mendominasi pembiayaan PP dengan kontribusi sekitar 67,12% dari total pembiayaan, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 64,06%. Sementara itu, sewa guna usaha merupakan komponen terbesar kedua dengan pangsa pada akhir tahun 2014 sebesar 30,3%, atau turun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 33,7%. Secara nominal, jumlah pembiayaan selama tahun 2014 mencapai Rp366,1 triliun dalam bentuk pembiayaan konsumen (Rp245,7 triliun), *leasing* (Rp110,95 triliun), anjak piutang (Rp9,4 triliun) dan kartu kredit (Rp29,0 miliar). Dengan demikian, sebagaimana pada tahun sebelumnya, fokus PP masih pada pembiayaan konsumen, khususnya dengan jangka waktu pendek.

Dari sisi risiko, sejalan dengan penurunan risiko di pasar keuangan pada akhir semester I 2014, risiko IKNB juga menunjukkan tren perbaikan. Risiko tingkat usaha industri asuransi yang menurun ditunjukkan oleh rasio klaim bruto terhadap premi bruto pada semester I 2014 sebesar 61,29% atau sedikit turun dibandingkan dengan semester IV 2013 sebesar 62,19%. Meskipun demikian, khusus untuk PP, terdapat potensi risiko nilai tukar terkait dengan indikasi pergeseran pendanaan PP dari utang dalam negeri ke utang luar negeri untuk pembiayaan domestik. Pergeseran sumber pendanaan ke utang luar negeri

tersebut tidak terlepas dari suku bunga luar negeri yang relatif lebih murah.

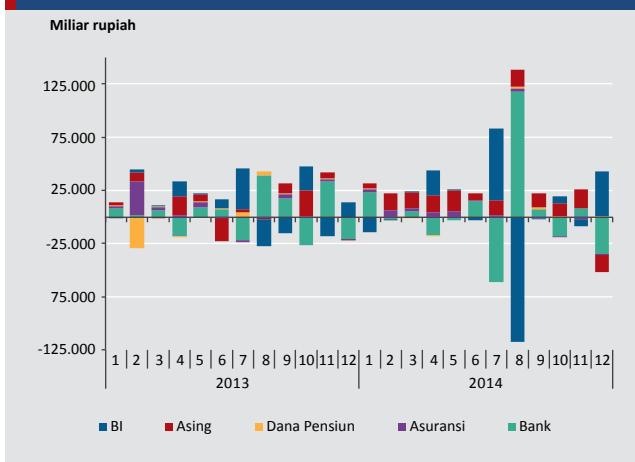
Struktur Investor

Dinamika di pasar saham domestik menunjukkan bahwa peran investor asing masih dominan di pasar saham. Kontribusi investor asing di pasar saham pada tahun 2014 masih dominan dengan level kontribusi 64,5%, atau sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 62,9%. Nilai kapitalisasi investor asing di pasar saham pada tahun 2014 mencapai Rp1.865 triliun, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp1.475,5 triliun. Secara kelembagaan, kontribusi investor institusional, baik asing maupun domestik, masih cukup besar.

Meski peran investor asing masih dominan, investor domestik masih cukup berperan besar sebagai *shock absorber* dalam mengimbangi dominasi investor asing. Hal tersebut tercermin pada perkembangan IHSG yang tetap menguat meski investor asing membukukan net jual di pasar saham. Sebagai ilustrasi, meskipun pasar IHSG mengalami tekanan net jual asing pada bulan Agustus dan September 2014, level IHSG tetap terjaga pada level di atas 5.100 ditopang oleh peran investor domestik sebagai *shock absorber*. Struktur pasar yang relatif lebih berimbang akan berdampak pada peningkatan peran investor domestik sebagai *shock absorber*. Struktur pasar yang relatif lebih berimbang tersebut pada gilirannya akan berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Pada pasar SBN, pelaku nonresiden dan perbankan domestik masih mewarnai pergerakan harga pada tahun 2014 (Grafik 8.27). Tingginya minat investor nonresiden pada pasar SBN merupakan cermin atas kepercayaan investor global yang tinggi terhadap kondisi ekonomi makro yang kondusif serta persepsi positif atas tren perbaikan kondisi fundamental Indonesia. Hal tersebut tampak pada perilaku investor nonresiden yang terus menambah kepemilikannya di pasar SBN seiring dengan imbal hasil yang menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2014, pangsa kepemilikan nonresiden pada pasar SBN meningkat menjadi 37,0% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 31,5%. Peran asing yang meningkat juga ditunjukkan oleh pangsa kepemilikan SBN oleh bank, dana pensiun dan asuransi yang menurun masing-masing menjadi 29,4%, 12,1% dan 3,5% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 32,0%, 12,6% dan 3,8%. Meskipun

Grafik 8.27. Perilaku Investor Pasar SBN



demikian, dinamika pasar SBN 2014 menunjukkan investor domestik secara bertahap mampu mengimbangi peran investor asing yang masih dominan.

8.3. Transmisi Kebijakan Moneter

Dinamika di sektor keuangan selama tahun 2014 juga secara umum menunjukkan kebijakan moneter melalui penetapan BI Rate ditransmisikan melalui jalur ekspektasi inflasi, suku bunga perbankan, dan kredit. Kebijakan moneter yang mempertahankan BI Rate pada level 7,50% hingga 17 November 2014 dan menaikkan BI Rate menjadi sebesar 7,75% pada tanggal 18 November 2014 telah direspon dengan baik oleh jalur transmisi tersebut.

Pada jalur suku bunga perbankan dan kredit, kenaikan BI Rate pada tahun 2013 dan tetap dipertahankannya BI Rate pada level 7,5% hingga 17 November 2014 tertransmisikan dengan baik pada peningkatan suku bunga deposito. Demikian pula kenaikan BI Rate pada bulan November 2014 juga dicerminkan pada kenaikan suku bunga deposito. Namun, kenaikan BI Rate belum sepenuhnya dapat ditransmisikan kepada suku bunga kredit. Salah satu penyebab lambatnya kenaikan suku bunga kredit adalah perbankan sengaja menetapkan strategi menahan kenaikan suku bunga kredit agar dapat mempertahankan pangsa kredit dan kekhawatiran akan potensi peningkatan NPL.

Pada jalur kredit, seiring dengan kenaikan suku bunga kredit, pertumbuhan kredit pada tahun 2014 menunjukkan tren perlambatan dan tercatat tumbuh sebesar 11,6% atau lebih rendah jika dibandingkan

dengan pertumbuhan kredit pada akhir tahun 2013 yang sebesar 21,6%. Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut terjadi pada hampir semua sektor ekonomi. Apabila dilihat berdasarkan 5 sektor ekonomi dengan share kredit terbesar, perlambatan kredit terutama terjadi pada kredit ke sektor jasa dunia usaha, perdagangan, industri dan pertanian, sementara pertumbuhan kredit untuk sektor lain-lain masih menunjukkan tren peningkatan. Pertumbuhan sektor lain-lain yang masih kuat tersebut ditopang oleh tingginya pertumbuhan kredit multiguna pada tahun 2014.

Sementara itu, pada jalur harga aset keuangan, sinyal BI Rate yang tetap dipertahankan hingga November 2014 untuk menjaga stabilitas, direspon pelaku pasar sebagai sentimen positif di pasar keuangan. Selain itu, sinyal kenaikan BI Rate pada November 2014 untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap dalam lintasan sasaran inflasi 2015, juga direspon positif oleh pelaku pasar. Sentimen positif di pasar keuangan tersebut tertransmisikan pada peningkatan kinerja pasar saham dan pasar sekunder surat berharga negara. Di pasar saham, kinerja IHSG menunjukkan tren penguatan. Di pasar sekunder SBN, imbal hasil SBN menunjukkan tren penurunan.

Likuiditas perekonomian yang tercermin pada M2 selama tahun 2014 tetap terjaga. Sebagai respons dari perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, rata-rata pertumbuhan M2 tahun 2014 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013. Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M2 ditopang oleh tingginya pertumbuhan *Net Foreign Assets* (NFA), ditengah melambatnya pertumbuhan *Net Domestic Assets* (NDA), terutama kredit swasta.

Transmisi Kebijakan Jalur Suku Bunga

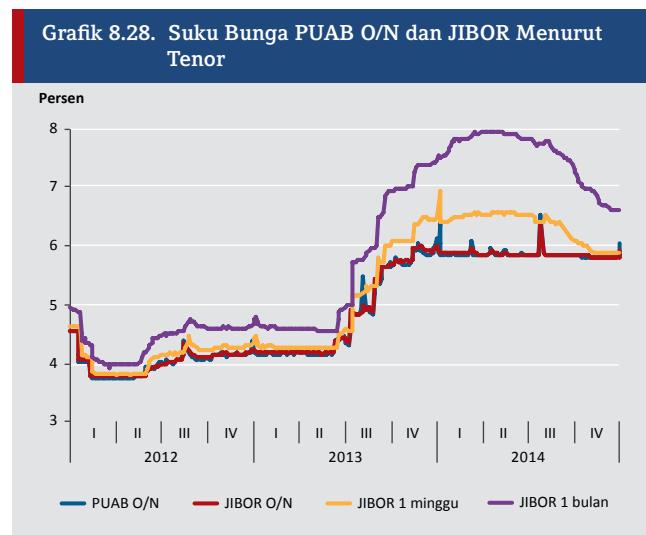
Bekerjanya transmisi kebijakan jalur suku bunga tercermin pada perkembangan suku bunga PUAB yang secara umum mengikuti BI Rate dan DF rate sepanjang 2014. Perkembangan ini ditopang upaya Bank Indonesia dalam menjaga suku bunga PUAB melalui ketersediaan likuiditas perbankan baik dalam bentuk rupiah dan valas. *Stance* kebijakan Bank Indonesia berupa BI Rate yang diikuti oleh DF Rate direspon positif. BI Rate dan DF rate yang tetap hingga 17 November 2014 direspon searah oleh suku bunga PUAB *Overnight* (O/N).

Kebijakan Bank Indonesia pada tanggal 18 November 2014 untuk menaikkan BI Rate ke level 7,75% dengan

tetap mempertahankan DF Rate tetap pada level 5,75% direspon oleh suku bunga PUAB O/N yang relatif tidak banyak berubah. Suku bunga PUAB O/N yang relatif stabil konsisten dengan intensi kebijakan Bank Indonesia untuk meminimalisir dampak lanjutan dari kenaikan BI Rate pada likuiditas perbankan. Perkembangan ini mengindikasikan likuiditas perbankan yang tetap terjaga. Suku bunga PUAB O/N yang relatif stabil juga tercermin pada pergerakan suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) O/N yang terjaga (Grafik 8.28). Sementara itu, suku bunga JIBOR tenor lain cenderung turun pada paruh kedua 2014 yang tergambar dari rata-rata harian suku bunga JIBOR 1 minggu yang turun sebesar 80 bps menjadi 6,13% dan suku bunga JIBOR 1 bulan yang turun sebesar 97 bps menjadi 6,60% pada akhir 2014. Penurunan suku bunga JIBOR dengan tenor yang lebih panjang (1 minggu dan 1 bulan) tersebut merupakan cerminan membaiknya likuiditas perbankan pada tahun 2014.

Volume transaksi PUAB untuk tenor O/N cenderung meningkat. Rata-rata harian volume transaksi PUAB O/N pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp6,9 triliun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp6,0 triliun. Sementara itu, rata-rata harian volume transaksi dengan tenor lebih panjang (>O/N) turun sebesar Rp0,5 triliun dari tahun sebelumnya menjadi Rp4,2 triliun. Dengan demikian, secara total seluruh tenor, rata-rata harian volume transaksi PUAB pada tahun laporan tercatat sebesar Rp11,1 triliun, naik dibanding volume transaksi tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,7 triliun.

Kenaikan BI Rate pada tahun 2013 dan tetap dipertahankannya BI Rate pada level 7,5% hingga 17



November 2014 tertransmisikan dengan baik pada peningkatan suku bunga deposito. Demikian pula kenaikan BI Rate pada bulan November 2014 juga dicerminkan pada kenaikan suku bunga deposito. Secara rata-rata, suku bunga deposito pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar 8,78% atau meningkat 109 bps dibandingkan dengan akhir tahun 2013 sebesar 7,69%. Namun demikian, secara individual, beberapa bank telah menawarkan suku bunga pada level sama atau di atas suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, beberapa bank juga memberikan insentif nonbunga (seperti berbagai kemudahan dan hadiah langsung) dalam upaya untuk mempertahankan nasabah dari *flight to quality*.

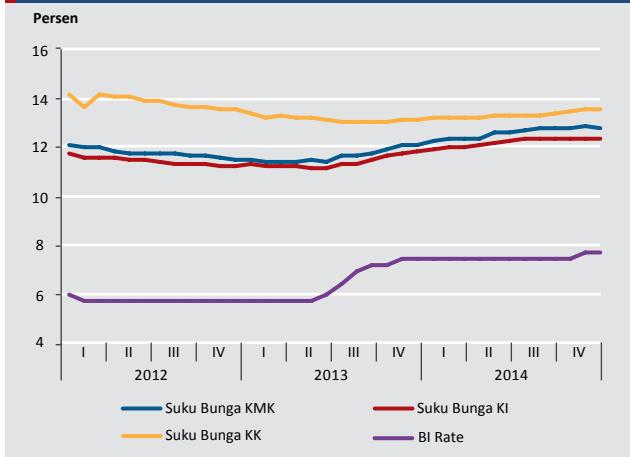
Kenaikan suku bunga deposito ditransmisikan lebih lanjut ke suku bunga kredit, meskipun dengan besaran yang lebih terbatas. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar 12,9% atau meningkat 56 bps dibandingkan dengan akhir tahun 2013 sebesar 12,4%. Berdasarkan jenis penggunaannya, semua jenis suku bunga kredit meningkat dengan besaran yang bervariasi. Dibandingkan dengan akhir tahun 2013, suku bunga KMK naik 67 bps menjadi 12,8%, suku bunga KI naik 54 bps menjadi 12,4% dan suku bunga KK naik 45 bps menjadi 13,6% (Grafik 8.29).

Dengan demikian, sebagai respons atas kebijakan BI Rate selama tahun 2014, kenaikan suku bunga deposito lebih besar dibandingkan dengan suku bunga kredit. Hal ini berdampak pada selisih antara suku bunga deposito dan suku bunga kredit pada akhir tahun 2014 yang menurun menjadi sebesar 417 bps dibandingkan dengan akhir tahun 2013 yang sebesar 470 bps. Dari sisi mikro, perilaku tersebut tidak terlepas dari upaya bank untuk menahan kenaikan suku bunga kredit agar dapat mempertahankan pangsa kredit dan adanya kekhawatiran akan potensi peningkatan NPL. Sementara itu, dari sisi makro, hal tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan efisiensi perbankan.

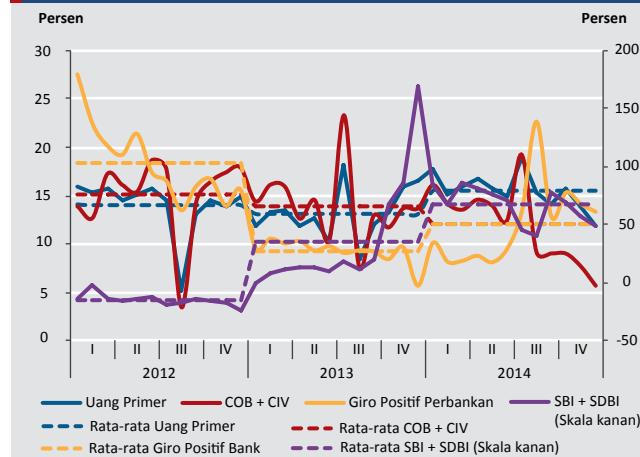
Perkembangan Likuiditas Perekonomian dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya

Likuiditas perekonomian yang tercermin dari M2 selama tahun 2014 tetap terjaga. Perkembangan likuiditas perekonomian tersebut sejalan dengan dinamika faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu *Net Foreign Assets* (NFA) dan *Net Domestic Assets* (NDA). Selama tahun 2014, arus masuk modal asing yang meningkat

Grafik 8.29. BI Rate dan Suku Bunga Kredit Menurut Penggunaan



Grafik 8.30. Pertumbuhan Uang Primer dan Komponennya



tercermin pada NFA yang tinggi. Sedangkan, NDA tercatat menurun, terutama disebabkan oleh perlambatan kredit di sektor swasta seiring dengan perlambatan ekonomi. Meskipun kontribusinya terhadap likuiditas perekonomian sempat menurun pada paruh pertama 2014, NDA masih memegang peran yang tinggi. Kontribusi NDA kembali meningkat pada paruh kedua 2014 didorong oleh peningkatan operasi pasar keuangan pemerintah sejalan dengan ekspansi fiskal yang tinggi pada akhir tahun.

Rata-rata pertumbuhan uang primer pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 15,5% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 13,1% dipengaruhi oleh kenaikan GWM di tengah moderasi ekonomi domestik (Grafik 8.30). Peningkatan tersebut ditopang oleh kenaikan rata-rata pertumbuhan SBI/SDBI dan giro positif perbankan di tengah melambatnya pertumbuhan uang kartal yang diedarkan (COB+CIV).⁴ Rata-rata pertumbuhan SBI/SDBI tercatat sebesar 67,3% atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 35,9% sejalan dengan kenaikan GWM Sekunder dari 2,5% menjadi 4% pada akhir tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan giro positif perbankan juga meningkat menjadi 12,1% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 9,3% sejalan dengan peningkatan DPK rupiah pada tahun 2014.

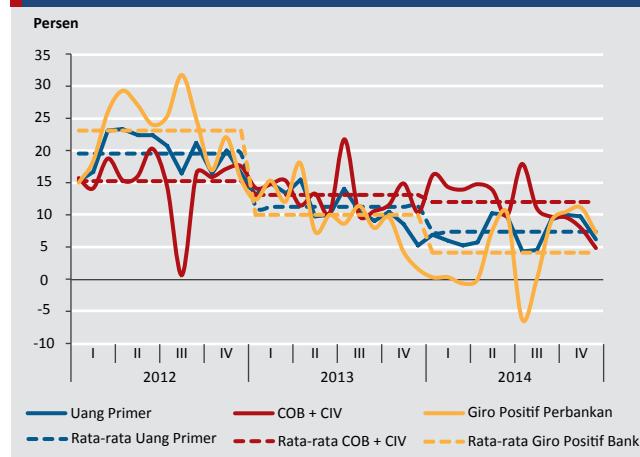
Rata-rata pertumbuhan uang kartal yang diedarkan (COB+CIV) melambat menjadi 12,1% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 13,9% sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Secara tahunan, pertumbuhan uang kartal yang diedarkan juga melambat menjadi 5,7% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 13,7%.

4 COB adalah *Currency Outside Bank* dan CIV adalah *Cash in Vault*.

Rata-rata pertumbuhan M1 pada tahun 2014 melambat seiring dengan moderasi pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan M1 mencapai 7,4%, atau lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 11,3% (Grafik 8.31). Berdasarkan komponennya, rata-rata pertumbuhan uang kartal dan giro rupiah juga melambat masing-masing menjadi 12,0% dan 4,2% dibandingkan dengan tahun 2013 masing-masing sebesar 13,2% dan 9,9%.

Meskipun secara rata-rata melambat, dinamika pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pertumbuhan M1 telah mengalami *rebound* dibandingkan dengan akhir tahun 2013. Pertumbuhan M1 pada tahun 2014 meningkat menjadi 6,2% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,4%. Pertumbuhan M1 pada tahun 2014 yang lebih tinggi ditopang oleh pertumbuhan giro rupiah yang

Grafik 8.31. Pertumbuhan M1 dan Komponennya



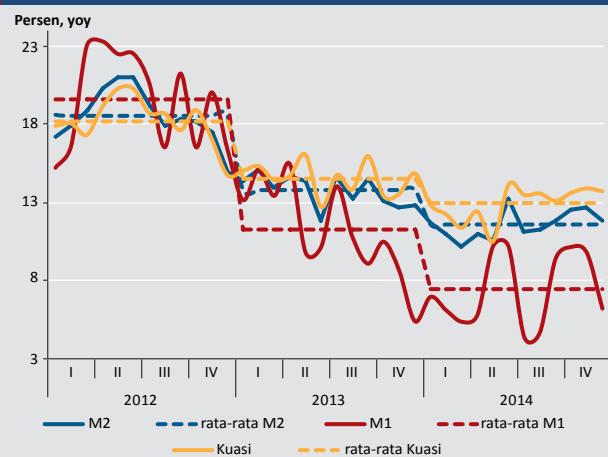
meningkat seiring peningkatan ekspansi Pemerintah pada paruh kedua 2014 (Grafik 8.32). Pertumbuhan giro rupiah meningkat menjadi 7,3% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,6%.

Likuiditas perekonomian dalam arti luas (M2) tetap terjaga pada tahun 2014. Sebagai respons dari perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, rata-rata pertumbuhan M2 tahun 2014 tercatat sebesar 11,6%, atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 13,8%. Berdasarkan komponennya, rata-rata pertumbuhan M1 dan uang kuasi juga melambat pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan uang kuasi pada tahun 2014 tercatat sebesar 12,9%, atau lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 14,5% (Grafik 8.33).

Secara tahunan, pertumbuhan M2 pada tahun 2014 melambat menjadi 11,8% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 12,8%. Pertumbuhan uang kuasi juga melambat menjadi sebesar 13,7% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 14,8%. Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M2 yang tetap terjaga tersebut ditopang oleh pertumbuhan NFA, ditengah melambatnya pertumbuhan NDA pada tahun 2014 (Grafik 8.34). Rata-rata pertumbuhan NDA pada tahun 2014 melambat menjadi sebesar 10,9% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 21,8%. Secara tahunan, pertumbuhan NDA pada tahun 2014 juga melambat menjadi 12,7% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 16,1%.

Perlambatan pertumbuhan NDA tersebut sejalan dengan perlambatan aktivitas perekonomian dan pertumbuhan kredit pada tahun 2014. Perlambatan NDA tersebut sedikit tertahan pada paruh kedua 2014 sejalan dengan

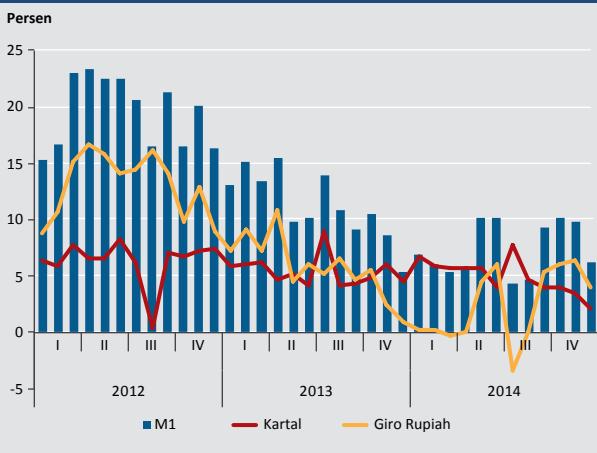
Grafik 8.33. Pertumbuhan M2 dan Komponennya



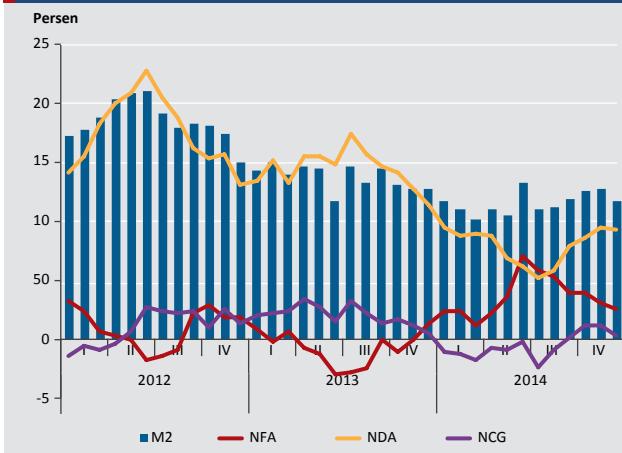
ekspansi operasi pasar keuangan Pemerintah pada akhir tahun di tengah moderasi pertumbuhan kredit yang cukup dalam. NDA masih memegang peran penting dalam likuiditas perekonomian, meskipun kontribusinya sempat menurun pada paruh pertama 2014. Kontribusi NDA kembali meningkat pada paruh kedua 2014 seiring dengan meningkatnya ekspansi fiskal pada akhir tahun.

Sementara itu, rata-rata pertumbuhan NFA pada tahun 2014 tercatat sebesar 13,9%, atau naik dibandingkan dengan kontraksi pada tahun 2013 sebesar 2,3%. Secara tahunan, pertumbuhan NFA pada tahun 2014 meningkat menjadi 9,3% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 4,8%. Peningkatan pertumbuhan NFA tersebut sejalan dengan arus masuk modal asing yang besar pada paruh pertama 2014. Pada paruh kedua, kontribusi NFA dalam

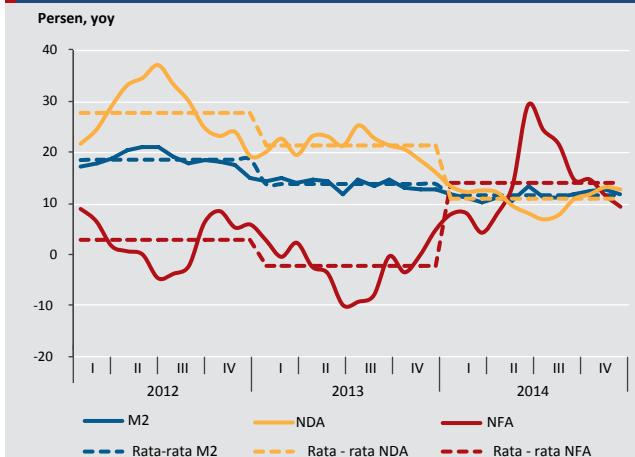
Grafik 8.32. Pertumbuhan M1 dan Kontribusi Pertumbuhan Komponennya



Grafik 8.34. Pertumbuhan M2 dan Kontribusi Pertumbuhan Faktor-Faktor yang Memengaruhi



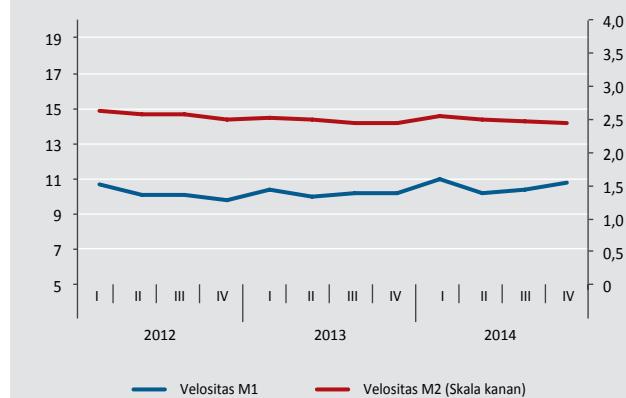
Grafik 8.35. Pertumbuhan M2 dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya



M2 melambat, sedangkan kontribusi NDA meningkat. Meskipun demikian, secara keseluruhan tahun 2014, kontribusi NFA dalam M2 mengalami peningkatan (Grafik 8.35).

Kebijakan moneter yang turut memengaruhi besaran moneter tercermin pula dalam perkembangan velositas

Grafik 8.36. Velositas Uang



uang selama tahun 2014. Velositas uang mencerminkan jumlah transaksi antarindividu dalam pembelian barang dan jasa. Velositas M1 dan M2 yang cenderung stabil pada tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan likuiditas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik tanpa menimbulkan tekanan tambahan di sisi harga (Grafik 8.36).



Keterangan gambar:

Alat pembayaran nontunai semakin berkembang termasuk di pusat perbelanjaan. Bank Indonesia turut mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai melalui program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).



BAB 9

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Sistem pembayaran pada tahun 2014 berjalan secara aman, efisien dan andal, baik sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri. Kondisi ini tergambar pada kinerja sistem pembayaran yang mampu mendukung kelancaran kegiatan ekonomi serta ketersediaan uang kartal dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar, guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Dengan dukungan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah tersebut, diharapkan dapat terwujud efisiensi perekonomian secara nasional serta terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran nontunai diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran nontunai agar dapat diselenggarakan dengan lebih aman, efisien, dan andal, sehingga mampu mendukung upaya untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta memperlancar aktivitas perekonomian nasional. Peran penting sistem pembayaran nontunai tersebut mendorong Bank Indonesia untuk senantiasa memperluas akses masyarakat terhadap layanan sistem pembayaran nontunai dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Selama 2014, Bank Indonesia menempuh kebijakan untuk melakukan penguatan infrastruktur untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem pembayaran nontunai, meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran nontunai, memperluas akses masyarakat, dan menerbitkan berbagai ketentuan sistem pembayaran nontunai yang memperhatikan peningkatan penerapan aspek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Dengan kebijakan tersebut, sistem pembayaran nontunai baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, dapat berjalan secara aman, efisien, dan andal.

Selama 2014, sistem pembayaran nontunai yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan industri mampu melayani 4,7 miliar transaksi dengan nilai Rp118,4 ribu triliun. Jumlah transaksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 16,3% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,0 miliar transaksi dengan nilai Rp97,5 ribu triliun.

Dari sisi sistem pembayaran nontunai yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, yang terdiri atas sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), pada 2014 tingkat keandalan ketiga sistem tersebut dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya tingkat ketersediaan (*availability*) sistem sesuai dengan tingkat layanan (*service level*) yang telah ditetapkan dan tidak adanya kegagalan sistem (*system down*). Sistem pembayaran nontunai yang diselenggarakan Bank Indonesia mampu melayani 125,4 juta transaksi dengan nilai Rp113,8 ribu triliun. Jumlah transaksi ini meningkat 2,8% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 121,9 juta transaksi dengan nilai Rp93,5 ribu triliun. Pencapaian tingkat keandalan sistem ini merupakan hasil dari upaya Bank Indonesia yang secara berkesinambungan melakukan penerapan manajemen risiko yang efektif guna menjaga infrastruktur sistem pembayaran nontunai dapat terpelihara dengan baik dan lancar.

Dari sisi sistem pembayaran nontunai yang diselenggarakan oleh industri, penyelenggarannya dapat dilaksanakan dengan aman. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penurunan *fraud Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu* (APMK) dan *non performing loan* (NPL) kartu kredit pada 2014 apabila dibandingkan dengan 2013. Penurunan *fraud* APMK dan NPL kartu kredit tersebut seiring dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang dituangkan melalui ketentuan Bank Indonesia. Penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh industri juga dibarengi dengan pengawasan secara efektif agar penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku. Selain itu, efisiensi dalam sistem pembayaran nontunai dapat dilihat antara lain dari perluasan interoperabilitas, perluasan *channel* pembayaran, peningkatan indeks sistem pembayaran nontunai, serta perluasan elektronifikasi instrumen pembayaran nontunai. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam upaya perluasan interoperabilitas dan perluasan *channel* adalah melalui interkoneksi *e-ticketing* dan peluncuran *Electronic Data Capture* (EDC) bersama antara tiga bank BUMN. Sementara itu, untuk perluasan elektronifikasi, dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah. Dengan berbagai upaya tersebut, nilai dan volume transaksi melalui sistem pembayaran nontunai yang diselenggarakan oleh industri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari sisi nilai, tercatat peningkatan sebesar 16,9% dari Rp4.023,6 triliun pada periode sebelumnya menjadi Rp4.703,5 triliun. Sementara itu, dari sisi volume, tercatat peningkatan sebesar 16,7% dari 3,9 miliar transaksi pada periode sebelumnya menjadi 4,5 miliar transaksi.

Kinerja pengelolaan uang rupiah yang andal terlihat dari kemampuan Bank Indonesia dalam menyediakan uang kartal dengan jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar, di tengah kebutuhan akan uang kartal yang meningkat. Kebutuhan uang kartal yang meningkat merupakan penopang bagi aktivitas perekonomian Indonesia yang terus tumbuh, meskipun melambat dibandingkan tahun 2013. Pada akhir tahun 2014, posisi uang kartal yang diedarkan (UYD) tercatat sebesar Rp528,5 triliun, meningkat 5,7% dibandingkan akhir tahun 2013 yang mencapai Rp500,0 triliun. Peningkatan kebutuhan uang kartal terutama terjadi pada hari besar keagamaan, antara lain bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, Natal dan liburan akhir tahun 2014. Permintaan uang kartal yang meningkat juga sebagai dampak dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang meningkatkan daya beli masyarakat. Kenaikan TTL dan harga BBM Bersubsidi juga mendorong

peningkatan kebutuhan uang kartal sejalan dengan inflasi yang meningkat.

Menyikapi peningkatan kebutuhan uang kartal tersebut, Bank Indonesia selalu mengantisipasi dengan melakukan seluruh tahapan kegiatan pengelolaan uang rupiah yakni perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, penarikan/pencabutan dan pemusnahan uang rupiah dengan baik. Sebagai otoritas yang mengeluarkan uang rupiah, Bank Indonesia juga terus berupaya menjaga kelayakan uang yang diedarkan dan mengoptimalkan upaya penanggulangan peredaran uang palsu. Dalam menjaga kelayakan uang yang diedarkan, Bank Indonesia menempuh langkah *clean money policy* melalui penarikan uang rupiah tidak layak edar (UTLE) untuk diganti dengan uang rupiah yang baru. Bank Indonesia juga secara konsisten dan berkelanjutan meminta kepada perbankan dan masyarakat untuk mengklarifikasi uang rupiah yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia.

9.1. Kinerja Sistem Pembayaran

Peningkatan volume pembayaran melalui sistem pembayaran nontunai pada 2014 didukung oleh keandalan sistem pembayaran nontunai tersebut, khususnya pada Sistem BI-RTGS sebagai sistem pembayaran nontunai nilai besar dan sistem setelen transaksi pembayaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem RTGS memegang peran yang sangat penting dalam setiap perekonomian suatu negara. Gangguan dalam sistem RTGS dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran transaksi, sehingga bisa merugikan perekonomian.¹

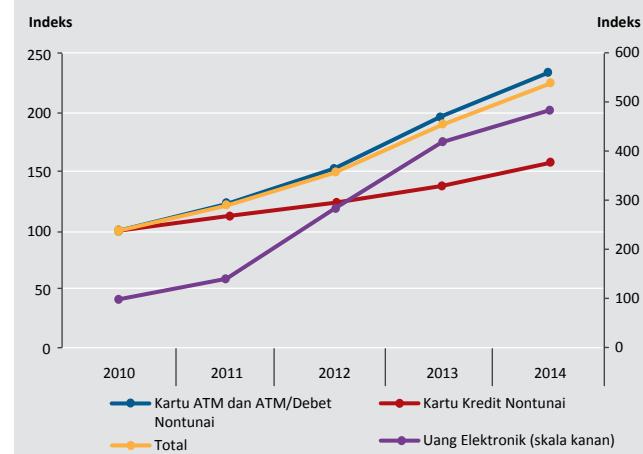
Di samping menjaga keandalan sistem pembayaran nontunai, Bank Indonesia juga mendorong peningkatan transaksi pembayaran dengan menggunakan instrumen pembayaran nontunai. Berdasarkan pengamatan empiris, transaksi nontunai berkorelasi positif terhadap konsumsi swasta sehingga dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut diupayakan Bank Indonesia karena penggunaan instrumen pembayaran nontunai di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara *peer ASEAN*, seperti Thailand dan Malaysia, serta negara

berkembang lainnya, seperti India. Meskipun demikian, transaksi pembayaran melalui penggunaan instrumen pembayaran nontunai pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 16,7%, apabila dibandingkan dengan tahun 2013.

Seiring dengan berbagai upaya Bank Indonesia untuk memperluas akses masyarakat dalam penggunaan instrumen pembayaran nontunai, indeks sistem pembayaran nontunai mengalami peningkatan, dari sebelumnya 190 pada tahun 2013 menjadi 225 pada tahun 2014, dengan tahun dasar adalah tahun 2010 (Grafik 9.1). Peningkatan indeks sistem pembayaran nontunai dari tahun ke tahun menggambarkan peningkatan penggunaan instrumen pembayaran nontunai di masyarakat. Indeks sistem pembayaran nontunai uang elektronik mengalami peningkatan yang paling signifikan selama periode 2010-2014. Indeks meningkat dari 142 pada tahun 2011 menjadi 486 pada tahun 2014. Sementara itu, indeks sistem pembayaran nontunai kartu kredit meningkat dari 138 pada tahun 2013, menjadi 158 pada tahun 2014 dan indeks sistem pembayaran nontunai dari kartu ATM dan ATM/debet meningkat dari 197 pada tahun 2013 menjadi 235 pada tahun 2014.

Selain ditunjukkan melalui peningkatan indeks sistem pembayaran nontunai, peran sistem pembayaran nontunai ritel dalam mendukung aktivitas perekonomian juga menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya nilai transaksi sistem pembayaran nontunai ritel. Nilai transaksi melalui sistem pembayaran nontunai ritel yang terdiri atas nilai transaksi SKNBI, APMK, dan uang elektronik dengan pangsa sebesar 6,4% dari total nilai transaksi sistem pembayaran nontunai, tercatat mencapai

Grafik 9.1. Indeks Sistem Pembayaran Nontunai



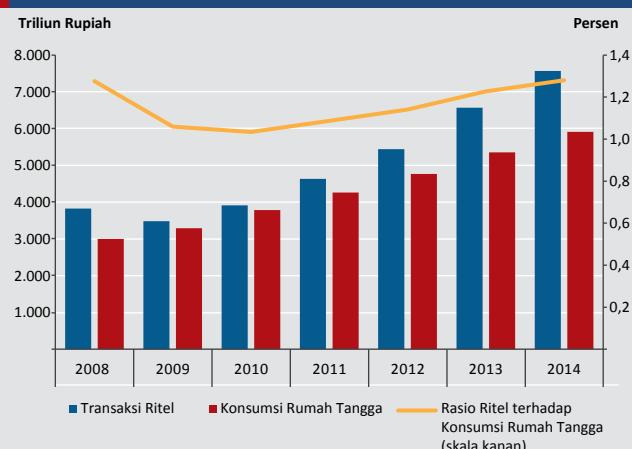
1 Gangguan sistem RTGS selama hampir 10 jam di Bank of England (BoE) pada tanggal 20 Oktober 2014 telah menyebabkan keterlambatan pembayaran 142.759 transaksi. BoE mengindikasikan permasalahan *system down* pada RTGS merupakan masalah teknis terkait pelaksanaan *maintenance* rutin sistem RTGS (Bank of England *press release*, 20 Oktober 2014).

Rp7.569,3 triliun. Nilai tersebut meningkat dari nilai transaksi tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp6.566,0 triliun. Peningkatan peran sistem pembayaran nontunai ritel dalam mendukung aktivitas perekonomian juga ditunjukkan oleh rasio nilai transaksi sistem pembayaran nontunai ritel terhadap PDB yang meningkat. Pada tahun 2014, rasio tersebut tercatat sebesar 0,72, meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 0,69 (Grafik 9.2).

Peningkatan nilai transaksi ritel tersebut sejalan dengan nilai konsumsi masyarakat tahun 2014 berdasarkan harga berlaku. Nilai transaksi ritel meningkat sebesar 15,3% dan nilai konsumsi masyarakat meningkat sebesar 10,7%. Rasio nilai transaksi sistem pembayaran nontunai ritel terhadap nilai konsumsi masyarakat berdasarkan harga berlaku mencapai 1,28 kali, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,23 kali (Grafik 9.3).²

Perkembangan transaksi ritel melalui sistem pembayaran nontunai sejalan dengan indeks penjualan eceran (IPE).³ Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan kegiatan konsumsi masyarakat, yang merupakan bagian terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, berhubungan signifikan dengan perkembangan transaksi ritel melalui sistem pembayaran nontunai. Pada periode

Grafik 9.3. Rasio Transaksi Ritel terhadap Konsumsi Rumah Tangga

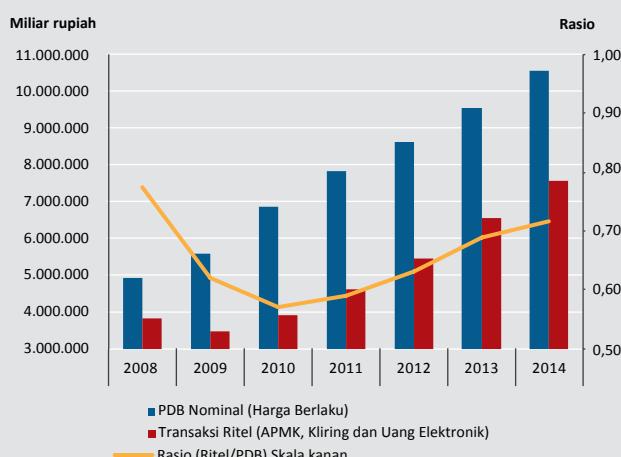


Sumber: BPS, diolah

hari raya keagamaan dan akhir tahun, transaksi ritel melalui sistem pembayaran nontunai dan IPE meningkat, terutama bersumber dari peningkatan penjualan kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok suku cadang dan aksesoris (Grafik 9.4). Tren kenaikan penjualan eceran tersebut sejalan dengan tren kenaikan transaksi melalui sistem pembayaran nontunai ritel dan instrumen pembayaran nontunai.

Peningkatan volume transaksi sistem pembayaran nontunai didorong oleh perkembangan sistem pembayaran nontunai ritel, yang meliputi transaksi melalui SKNBI, APMK, dan uang elektronik. Volume transaksi pembayaran melalui sistem pembayaran nontunai ritel pada tahun 2014 mencapai 4,6 miliar transaksi, meningkat sebesar 16,3% dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar

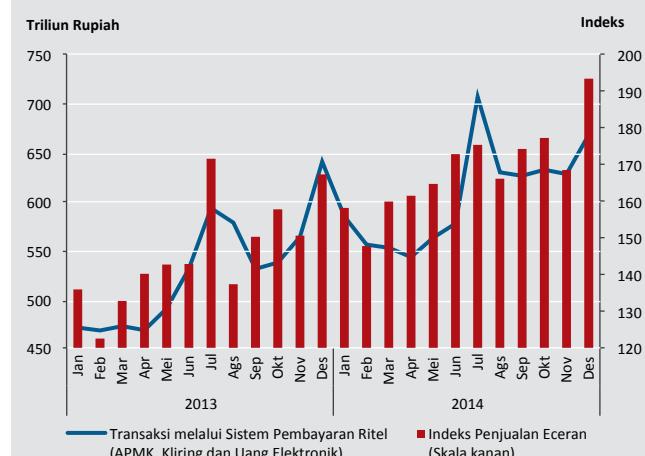
Grafik 9.2. Transaksi Ritel terhadap PDB



Sumber: BPS, diolah

- 2 Penurunan rasio transaksi sistem pembayaran ritel terhadap konsumsi masyarakat pada tahun 2009 seiring dengan penurunan rasio UYD terhadap konsumsi dan transaksi melalui BI-RTGS. Hal ini sebagai konsekuensi turunnya nilai konsumsi masyarakat pada periode tersebut.
- 3 Indeks Penjualan Eceran adalah angka indeks yang dihitung dari hasil survei terhadap sekitar 650 pengecer sebagai responden dengan metode *purposive sampling* di 10 kota yaitu Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Medan, Purwokerto, Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Denpasar.

Grafik 9.4. Indeks Penjualan Eceran dan Transaksi Ritel



3,9 miliar transaksi. Hal ini sebagai dampak kebijakan Bank Indonesia dalam meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran nontunai, antara lain melalui penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta penyempurnaan ketentuan terkait uang elektronik dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan konsumen.

Sistem Pembayaran Nontunai yang Diselenggarakan Bank Indonesia

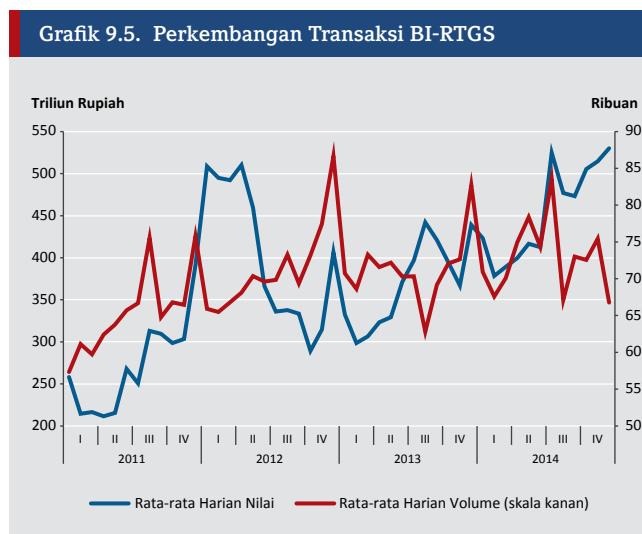
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)⁴

Sampai dengan Desember 2014, Sistem BI-RTGS sebagai sarana penyelesaian akhir transaksi pembayaran, telah memproses Rp110,9 ribu triliun atau meningkat 21,9% dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 90,9 ribu triliun⁵. Untuk rata-rata harian, nilai transaksi yang menggunakan Sistem BI-RTGS mencapai Rp454,4 triliun, meningkat sebesar 23,4% dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp368,5 triliun (Grafik 9.5). Sementara itu pada Desember 2014, volume rata-rata harian untuk tahun 2014 mengalami penurunan

sebesar 19,3% jika dibandingkan dengan Desember 2013. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penyesuaian batas nominal transaksi menggunakan Sistem BI-RTGS yang berlaku pada 15 Desember 2014.

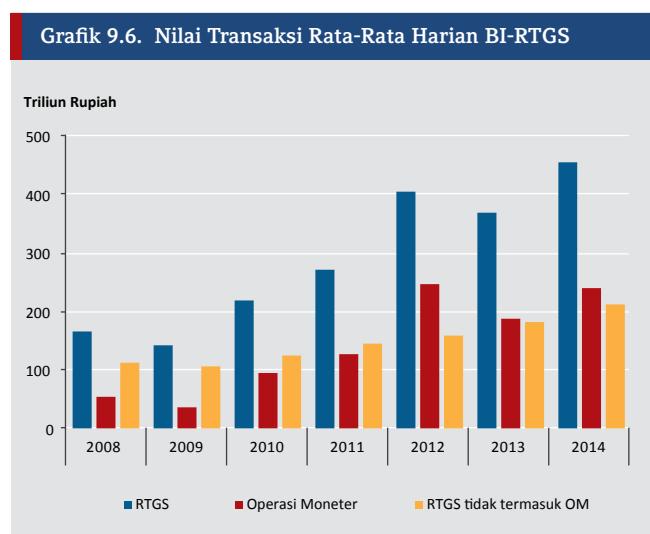
Kenaikan nilai transaksi sistem pembayaran nontunai yang diproses melalui Sistem BI-RTGS antara lain dipengaruhi oleh peningkatan nilai transaksi operasi moneter (OM) yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2014, rata-rata harian nilai transaksi OM tercatat sebesar Rp240,9 triliun, meningkat 28,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi nilai transaksi OM tercatat sebesar 53,0% dari total nilai transaksi Sistem BI-RTGS. Sejalan dengan peningkatan OM, rata-rata harian nilai transaksi sistem pembayaran nontunai melalui Sistem BI-RTGS (tanpa memperhitungkan OM) juga mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dari rata-rata harian nilai transaksi yang mencapai Rp213,6 triliun atau meningkat 17,9% dari tahun 2013 yang sebesar Rp181,2 triliun (Grafik 9.6).

Peningkatan volume pembayaran melalui Sistem BI-RTGS didukung oleh keandalan dan ketersediaan Sistem BI-RTGS, yang ditunjukkan dari keberhasilan Sistem BI-RTGS dalam memenuhi prasyarat *service level* yang ditetapkan. Selain itu, Sistem BI-RTGS juga menunjukkan kinerja yang baik dengan tidak adanya kegagalan sistem (*system down*) sampai dengan Desember 2014. Total volume transaksi sistem BI-RTGS sampai dengan Desember 2014 tercatat sebanyak 17,7 juta transaksi, dengan rata-rata harian 72,7 ribu transaksi dan volume transaksi terbanyak sebesar 104,9 ribu transaksi pada tanggal 24 Juli 2014, dua hari menjelang Libur Hari Raya Idul Fitri 1435H. Volume transaksi sampai dengan Desember 2014 tercatat



4 Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BI-RTGS berperan penting dalam proses aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp100 juta atau lebih.

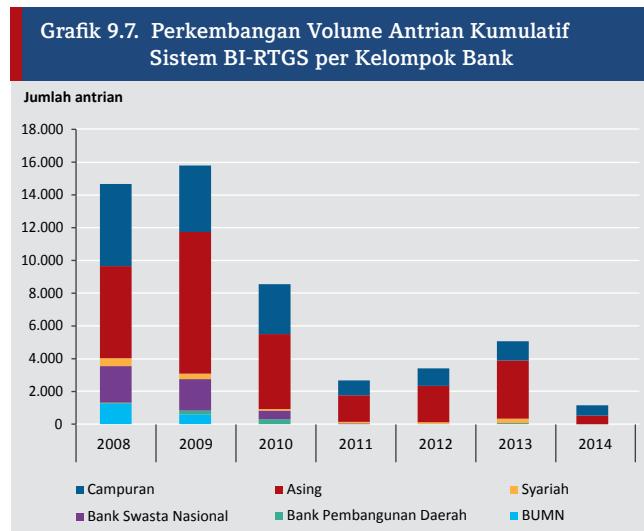
5 Aktivitas transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui BI-RTGS terdiri atas transaksi: operasi moneter, pemerintah, atas perintah nasabah, pasar modal, Pasar Uang Antar Bank (PUAB), penyelesaian jual beli valas antar bank dalam mata uang rupiah, penyelesaian transaksi valas antara bank dengan BI dalam mata uang rupiah dan lain-lain.



meningkat sebesar 0,6% dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 17,6 juta transaksi dan rata-rata harian tahun 2014 meningkat 1,9% dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 71,4 ribu transaksi.

Kondisi likuiditas dalam Sistem BI-RTGS yang terjaga merupakan salah satu faktor pendukung dalam menjaga kelancaran Sistem BI-RTGS. Dengan dana yang cukup untuk penyelesaian transaksi, mayoritas transaksi dapat diselesaikan seketika (*real time*). Hal ini tercermin dari penurunan jumlah antrian (*queue transactions*) pada tahun 2014 sebesar 3.881 antrian atau 76,5% menjadi 1.189 antrian dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar 5.070 antrian (Grafik 9.7). Apabila dibandingkan dengan total volume Sistem BI-RTGS pada tahun 2014 yang mencapai 17,7 juta transaksi, volume antrian tersebut memiliki porsi yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,022%. Penurunan volume antrian tersebut, menunjukkan tingginya likuiditas untuk menyelesaikan transaksi. Kondisi ini tercermin pada pergerakan saldo giro rata-rata peserta pada awal hari dalam Sistem BI-RTGS yang sampai dengan Desember 2014 meningkat sebesar 12,1% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013. Antrian transaksi pada Sistem BI-RTGS tidak memengaruhi kelancaran Sistem BI-RTGS mengingat sebagian besar antrian transaksi tersebut dapat diselesaikan pada akhir hari.

Kondisi likuiditas dalam Sistem BI-RTGS yang terjaga juga tercermin pada penurunan *unsettled transactions*.⁶ Sepanjang tahun 2014, tercatat 17 *unsettled transactions* pada sistem BI-RTGS dengan total nilai Rp542,7 miliar



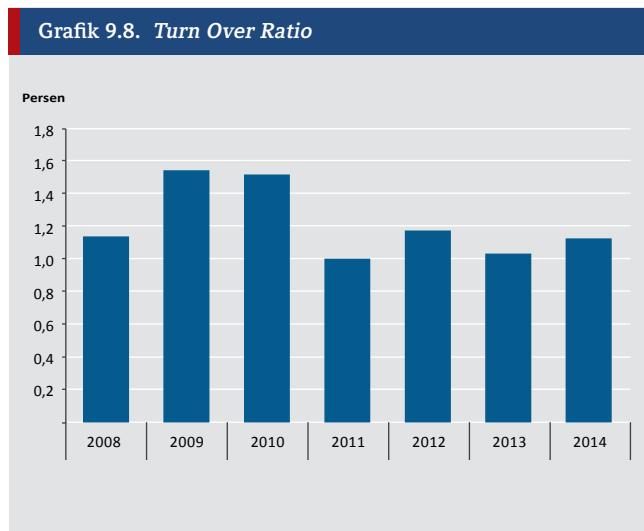
6 *Unsettled transactions* yaitu ada tidaknya transaksi yang tidak dapat diselesaikan *settlement*-nya karena sampai dengan akhir jam operasional tidak tersedia likuiditas yang cukup pada peserta.

atau masing-masing sebesar 0,000096% dan 0,00049% terhadap total volume dan nilai transaksi. Volume *unsettled transactions* selama 2014 tersebut menurun sebesar 76,4% dibandingkan dengan tahun 2013, yang tercatat sebesar 72 transaksi. Sementara itu dari sisi nilai, penurunan yang terjadi sebesar 72,7% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1,9 triliun. *Unsettled transactions* tidak berpengaruh terhadap kelancaran Sistem BI-RTGS mengingat porsinya yang relatif kecil dibandingkan dengan nilai dan volume transaksi secara keseluruhan.

Dari sisi *turn over ratio*, terdapat peningkatan *turn over ratio* industri, dari 1,03 menjadi 1,15 pada 2014. Nilai *turn over ratio* yang meningkat menunjukkan bahwa dalam memenuhi kewajibannya, bank juga memanfaatkan transaksi *incoming* yang ditujukan kepada bank tersebut (Grafik 9.8). Pemanfaatan transaksi *incoming* dalam memenuhi kewajiban merupakan hal yang lazim dilakukan oleh bank dalam rangka efisiensi penggunaan likuiditas.⁷

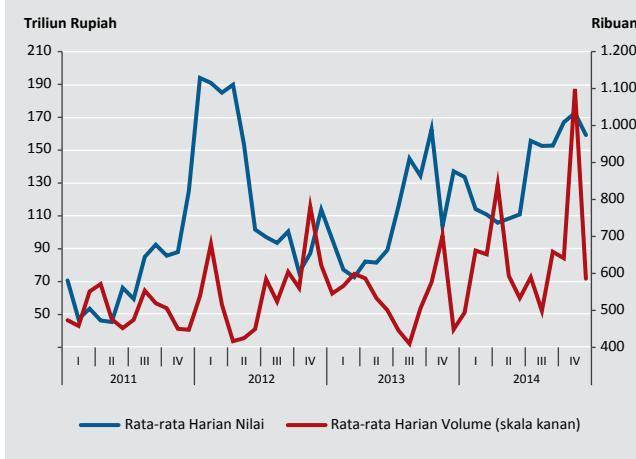
Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)

Transaksi jual beli surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan Bank Indonesia melalui BI-SSSS, sampai dengan Desember 2014 meningkat 21,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013. Nilai surat berharga yang ditransaksikan melalui BI-SSSS mencapai Rp33,6 ribu triliun, meningkat 26,2% dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar Rp26,6 ribu triliun. Nilai tersebut untuk selanjutnya diselesaikan melalui sistem BI-RTGS. Nilai rata-rata harian

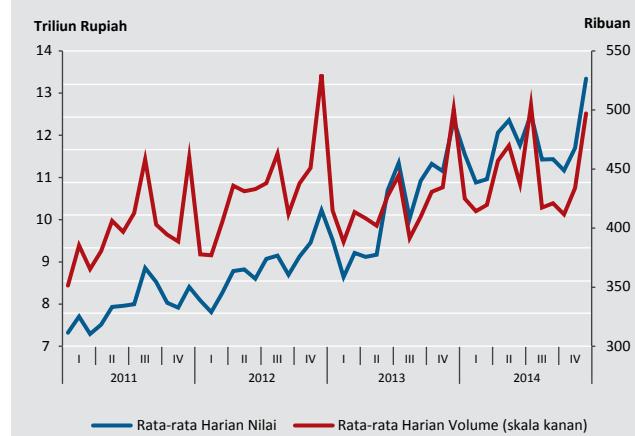


7 Indikator *turn over ratio* adalah perbandingan antara *outgoing transaction* dengan saldo rekening peserta yang disediakan pada awal hari.

Grafik 9.9. Perkembangan Transaksi BI-SSSS



Grafik 9.10. Perkembangan Transaksi SKNBI



transaksi yang dilakukan melalui BI-SSSS mencapai Rp137,6 triliun, meningkat 27,3% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp108,1 triliun. Volume transaksi surat berharga yang ditatausahakan melalui BI-SSSS mencapai 159,5 ribu transaksi, meningkat 21,1% dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 131,7 ribu transaksi. Untuk volume rata-rata harian tercatat sebesar 654 transaksi, meningkat 22,2% dari tahun 2013 sebesar 535 transaksi (Grafik 9.9).

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)⁸

Nilai transaksi melalui SKNBI, sebagai salah satu sarana sistem pembayaran nontunai ritel, meningkat 12,7% menjadi Rp2.865,8 triliun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp2.542,3 triliun. Secara rata-rata harian, nilai transaksi melalui SKNBI meningkat 14,1 % mencapai Rp11,7 triliun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp10,3 triliun.

Peningkatan nilai transaksi diiringi dengan peningkatan volume transaksi melalui SKNBI yang tumbuh 3,2% menjadi 107,6 juta transaksi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 104,3 juta transaksi. Volume rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui SKNBI meningkat 4,5% menjadi 441,2 ribu transaksi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 422,2 ribu transaksi (Grafik 9.10). Peningkatan volume transaksi melalui SKNBI merupakan kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan efisiensi yang diupayakan melalui kebijakan Bank Indonesia dengan menaikkan batas maksimum nilai kliring kredit dari sebesar

Rp100 juta menjadi Rp500 juta.⁹ Setelah diberlakukannya pembatasan nilai RTGS menjadi mulai dari Rp100 juta mulai 15 Desember 2014, terjadi peningkatan volume dan nilai transaksi kliring. Apabila dibandingkan dengan transaksi kliring pada Desember tahun 2013, transaksi kliring pada Desember 2014 mengalami peningkatan sebesar 4,2% untuk volume transaksi dan 13,3% untuk nilai transaksi.

Sistem Pembayaran Nontunai yang Diselenggarakan Industri

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

Nilai dan volume transaksi melalui APMK, yang terdiri atas Kartu ATM, Kartu ATM/Debet, dan Kartu Kredit, meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peningkatan nilai dan volume transaksi APMK didominasi oleh peningkatan nilai dan volume transaksi Kartu ATM dan Kartu ATM/Debet. Nilai transaksi melalui APMK meningkat 16,9% menjadi Rp4.700,1 triliun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp4.020,7 triliun. Nilai rata-rata harian transaksi melalui APMK meningkat 16,9% menjadi Rp12,9 triliun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp11,0 triliun. Peningkatan nilai transaksi melalui APMK sejalan dengan kegiatan ekonomi yang tetap tumbuh dan mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran nontunai.

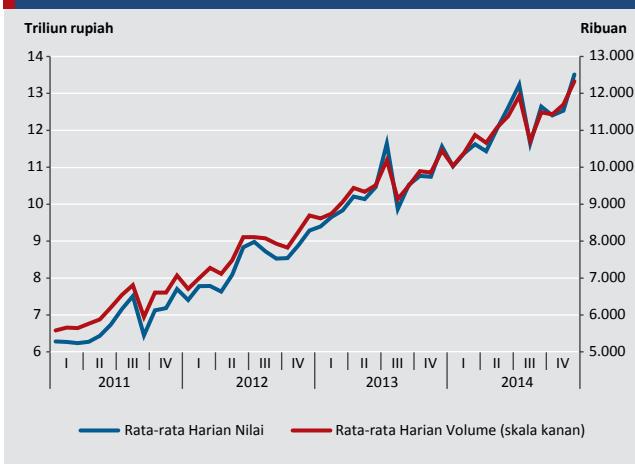
⁸ SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

⁹ Surat Edaran Bank Indonesia No.15/8/DASP tanggal 30 April 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.11/13/DASP tanggal 4 Mei 2009 perihal Batas Nominal Nota Debet dan Transfer Kredit dalam Penyelenggaraan SKNBI.

Grafik 9.11. Perkembangan Transaksi APMK



Grafik 9.12. Perkembangan Transaksi ATM dan ATM/Debet



Pada 2014, volume transaksi melalui APMK meningkat 15,5% menjadi 4,3 miliar transaksi dibandingkan dengan 2013 sebesar 3,7 miliar transaksi. Volume rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui APMK meningkat 15,5% menjadi 11,9 juta transaksi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 10,3 juta transaksi (Grafik 9.11). Peningkatan volume transaksi ini sejalan dengan peningkatan infrastruktur pendukung berupa ATM dan EDC oleh penyelenggara APMK, serta peluncuran EDC bersama tiga bank BUMN. Pada 2014 jumlah mesin ATM tercatat sebesar 89,1 ribu unit, meningkat 17,4% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 75,9 ribu unit. Mesin EDC yang digunakan untuk transaksi APMK pada 2014 tercatat sebesar 865,8 ribu unit, meningkat 36,4% dibandingkan dengan 2013 sebesar 634,7 ribu unit.

Kartu ATM dan Kartu ATM/Debet¹⁰

Upaya Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai berdampak pada peningkatan penggunaan Kartu ATM dan Kartu ATM/Debet sebagai instrumen pembayaran nontunai. Pada tahun 2014, nilai transaksi menggunakan Kartu ATM dan Kartu ATM/Debet mencapai Rp4.445,1 triliun, meningkat 17,1% dibandingkan dengan 2013 sebesar Rp3.797,4 triliun. Nilai rata-rata harian transaksi melalui Kartu ATM dan Kartu ATM/Debet mencapai Rp12,2 triliun, meningkat 17,1% dibandingkan dengan 2013 sebesar Rp10,4 triliun (Grafik

10 Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana. Kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu. Kartu ATM/debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian. Kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu.

9.12). Sejalan dengan peningkatan nilai transaksi, volume transaksi menggunakan Kartu ATM dan Kartu ATM/Debet tercatat 4,1 miliar transaksi, meningkat 7,4% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,7 miliar transaksi. Secara rata-rata harian, volume transaksi yang dilakukan melalui Kartu ATM dan Kartu ATM/Debet tercatat sebesar 11,2 juta transaksi, meningkat 16,2% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 9,6 juta transaksi.

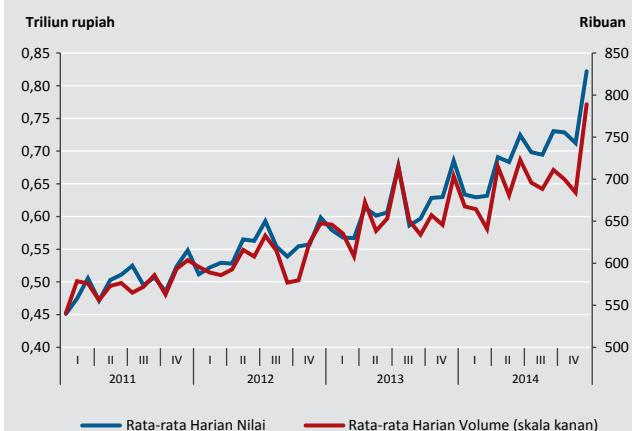
Selain itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah Kartu ATM dan Kartu ATM/Debet yang beredar di masyarakat. Pada 2014, jumlah Kartu ATM dan Kartu ATM/Debet yang beredar adalah sebanyak 105,8 juta kartu, meningkat 18,3% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebanyak 89,5 juta kartu. Dari sisi jumlah penerbit Kartu ATM dan Kartu ATM/Debet, selama 2014 terdapat penambahan tiga penerbit baru sehingga menjadi berjumlah 109 penerbit dari sebelumnya di tahun 2013 terdapat 106 penerbit. Bank penerbit kartu didominasi oleh Bank Umum Konvensional yang tercatat sebanyak 88 penerbit, diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat (11 penerbit), dan Bank Umum Syariah (10 penerbit).

Kartu Kredit¹¹

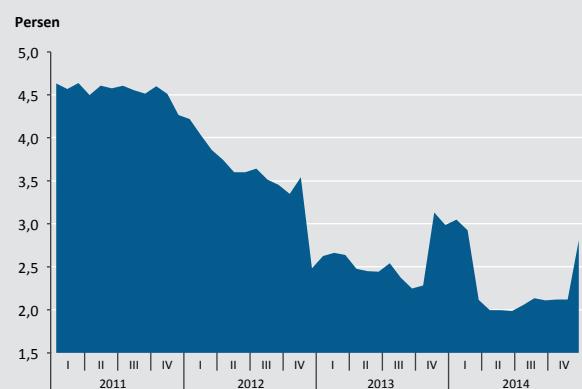
Pada 2014, nilai transaksi menggunakan kartu kredit mencapai Rp255,1 triliun, meningkat 14,2% dibandingkan dengan 2013 sebesar Rp223,4 triliun. Peningkatan

11 Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Grafik 9.13. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Grafik 9.14. Rasio NPL Kartu Kredit



transaksi ini seiring dengan adanya peningkatan konsumsi masyarakat. Secara rata-rata harian, nilai transaksi melalui kartu kredit pada 2014 mencapai Rp698,8 miliar, meningkat 14,2% dibandingkan dengan 2013 sebesar Rp611,6 miliar. Sejalan dengan peningkatan nilai transaksi, volume transaksi menggunakan kartu kredit pada 2014 tercatat 254,3 juta transaksi, meningkat 6,4% dibandingkan dengan 2013 sebesar 239,1 juta transaksi. Secara rata-rata harian, volume transaksi dengan menggunakan kartu kredit tercatat 696,8 ribu transaksi, meningkat 6,4% dibandingkan dengan 2013 sebesar 654,9 ribu transaksi (Grafik 9.13).

Peningkatan nilai dan volume transaksi tersebut juga didukung oleh peredaran jumlah kartu kredit yang meningkat 6,3% mencapai 16,0 juta kartu dibandingkan dengan 2013 sebanyak 15,1 juta kartu. Di samping itu, peningkatan volume dan transaksi ini merupakan dampak dari jumlah penerbit yang meningkat menjadi 23 penerbit dibandingkan dengan 2013 sebanyak 22 penerbit.

Rasio Non Performing Loan (NPL) kartu kredit yang turun menjadi 2,8% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 3,0% mengindikasikan bahwa penerbit kartu kredit terus berupaya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menilai calon nasabahnya (Grafik 9.14). Selain itu, penurunan rasio NPL kartu kredit juga mengindikasikan peningkatan pemahaman dan kedisiplinan masyarakat pengguna kartu kredit dalam memenuhi kewajibannya.

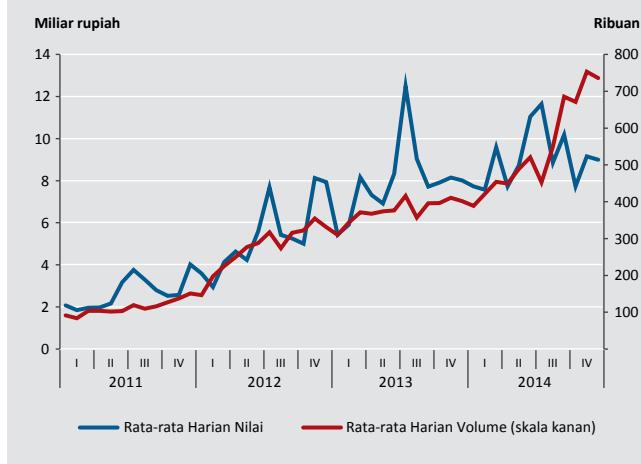
Uang Elektronik¹²

Upaya bersama Bank Indonesia dan industri untuk mendorong penggunaan uang elektronik sebagai salah satu alternatif dalam sistem pembayaran nontunai ritel terlihat pada peningkatan nilai transaksi menggunakan uang elektronik. Upaya yang telah ditempuh antara lain pengembangan kawasan nontunai, penyempurnaan ketentuan uang elektronik, serta interkoneksi *e-ticketing* pada TransJakarta dan kereta *commuter*. Pada 2014, dengan kebijakan tersebut, nilai transaksi menggunakan uang elektronik mencapai Rp3,3 triliun, meningkat 14,2% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp2,9 triliun. Secara rata-rata harian, nilai transaksi menggunakan uang elektronik mencapai Rp9,1 miliar, meningkat 14,2% dibandingkan dengan 2013 sebesar Rp7,9 miliar.

Sejalan dengan peningkatan nilai transaksi, volume transaksi menggunakan uang elektronik pada 2014 meningkat 47,5% menjadi 203,4 juta transaksi dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 137,9 juta transaksi. Secara rata-rata harian, volume transaksi menggunakan uang elektronik tercatat sebesar 557,2 ribu transaksi, meningkat 47,5% dibandingkan dengan 2013 sebesar 376,7 ribu transaksi (Grafik 9.15).

12 Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; (3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (4) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Grafik 9.15. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik



Dari sisi jumlah penerbit uang elektronik, selama 2014 terdapat penambahan dua penerbit, dari 17 penerbit pada tahun 2013 menjadi 19 penerbit pada tahun 2014. Peningkatan jumlah penerbit sejalan dengan peningkatan jumlah pemegang uang elektronik dan infrastruktur, khususnya alat *reader* atau EDC yang telah mencapai 206,8 ribu unit meningkat 48,6% dibandingkan dengan 2013 sebesar 139,2 ribu unit. Penerbit uang elektronik didominasi oleh lembaga selain bank sebanyak 10 penerbit diikuti oleh bank umum konvensional sebanyak 9 penerbit (Tabel 9.1).

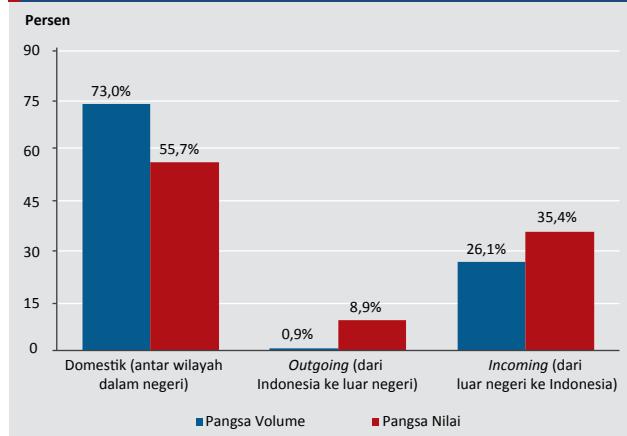
Penyelenggaraan Transfer Dana Bukan Bank¹³

Di tengah moderasi ekonomi domestik dan perbaikan ekonomi dunia yang lambat, volume dan nilai transaksi transfer dana mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 volume transaksi transfer dana tercatat sebanyak 12,5 juta transaksi dengan nilai transaksi transfer dana mencapai Rp34,1 triliun. Volume rata-rata harian transaksi transfer dana tercatat sebanyak 34,2 ribu transaksi dengan nilai rata-rata harian mencapai Rp93,3 miliar. Porsi terbesar transaksi transfer dana dari sisi volume dan nilai adalah transfer dana antar wilayah dalam negeri (domestik), yaitu 73,0% dari sisi volume dan 55,7% dari sisi nilai. (Grafik 9.16). Dalam upaya untuk melindungi transaksi transfer dana dari TKI di luar negeri, Bank Indonesia turut berperan serta mendorong penggunaan jasa

Tabel 9.1. Daftar Penerbit Uang Elektronik

No.	Nama Penerbit	Jenis Uang Elektronik	Nama Uang Elektronik
1	Bank Central Asia Tbk	<i>chip based</i>	Flazz
2	Bank Mandiri (Persero) Tbk	<i>chip based, server based</i>	Indomaret Card, Gaz card dan E-Toll
3	Bank Mega Tbk	<i>chip based</i>	Studio Pass Card dan Smart Card
4	Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk	<i>chip based</i>	Java Jazz Card dan Kartuku
5	Bank Rakyat Indonesia	<i>chip based, server based</i>	BRIZZI
6	B.P.D DKI Jakarta	<i>chip based</i>	Jak Card
7	PT. Indosat	<i>server based</i>	Dompetku
8	PT. Skye Sab Indonesia	<i>server based</i>	SkyeCard
9	PT. Telekomunikasi Indonesia	<i>chip based, server based</i>	Flexy Cash dan i-Vas Card
10	PT. Telekomunikasi Selular	<i>server based</i>	T-Cash
11	PT. XL Axiata	<i>server based</i>	XL Tunai
12	PT. Finnet Indonesia	<i>server based</i>	FinChannel
13	PT. Artajasa Pembayaran Elektronis	<i>server based</i>	MYNT
14	Bank Permata Tbk	<i>server based</i>	BBMMoney
15	PT. Nusa Satu Inti Artha	<i>server based</i>	DokuPay
16	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	<i>server based</i>	Rekening Ponsel
17	PT. Bank Nationalnobu	<i>server based</i>	Nobu E-Money
18	PT. Smartfren Telecom	<i>server based</i>	UangKu (2014)
19	PT. MVCommerce Indonesia	<i>server based</i>	PonselPay (2014)

Grafik 9.16. Pangsa Volume dan Nilai Transaksi Transfer Dana



13 Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

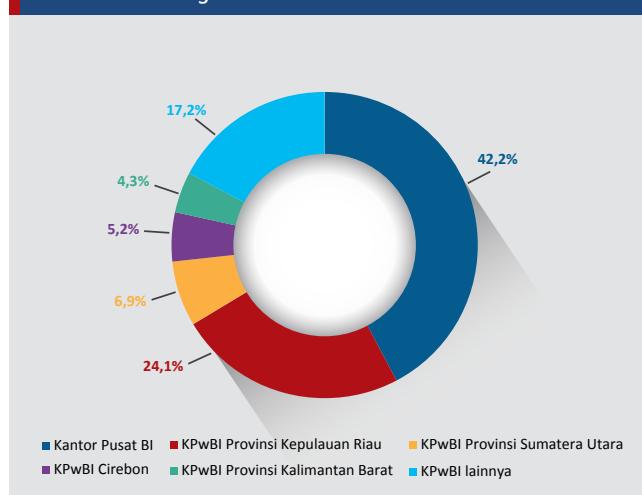
penyelenggara sistem pembayaran nontunai formal dan telah berizin.

Jumlah penyelenggara transfer dana oleh lembaga bukan bank yang telah berizin dan beroperasi serta dicantumkan dalam website Bank Indonesia tercatat sebanyak 116 penyelenggara, meningkat 1,7% dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 114 penyelenggara. Berdasarkan sebaran lokasi penyelenggara transfer dana bukan bank, terbanyak adalah di Jabodetabek yaitu 49 penyelenggara atau sebesar 42,2% dari total keseluruhan penyelenggara nasional (Grafik 9.17).

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank¹⁴

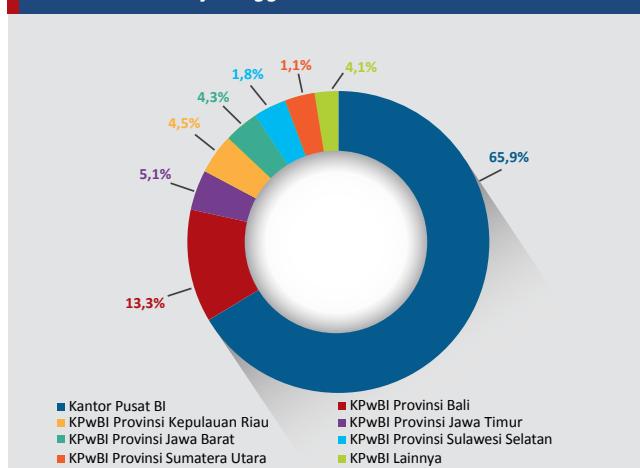
Pada 2014, transaksi jual beli Uang Kertas Asing (UKA) yang dilakukan oleh penyelenggara KUPVA bukan bank meningkat. Total nilai transaksi jual beli UKA mencapai Rp218,0 triliun, meningkat sebesar 15,7% dibandingkan dengan 2013 sebesar Rp188,3 triliun. Nilai transaksi jual beli UKA terbesar adalah di Jakarta, yaitu sebesar Rp143,8 triliun dengan pangsa 65,9% dari total nilai transaksi. Selanjutnya adalah di Denpasar dan Surabaya, dengan nilai transaksi masing-masing sebesar Rp28,9 triliun dengan pangsa 13,3% dan Rp11,1 triliun dengan pangsa 5,1% (Grafik 9.18). Adapun penyelenggara KUPVA bukan bank berizin di Indonesia masih terpusat di kota-kota besar yang merupakan pintu masuk bagi wisatawan.

Grafik 9.17. Pangsa Nilai Transaksi Transfer Dana



¹⁴ Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan perseroan melakukan kegiatan usaha jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian *Traveller's Cheque* (TC).

Grafik 9.18. Pangsa Nilai Transaksi Jual Beli UKA pada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank



Jumlah KUPVA bukan bank terbanyak masih berada di wilayah Jakarta sebesar 362 penyelenggara dengan porsi 39,1% dari total penyelenggara KUPVA bukan bank di seluruh Indonesia. Penyelenggara KUPVA bukan bank terbanyak kedua masih berada di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan pintu masuk bagi wisatawan dari Singapura dan Malaysia dan wilayah Bali & Nusa Tenggara sejalan dengan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebanyak 127 dan 117 penyelenggara KUPVA bukan bank. Hal ini menunjukkan bahwa industri penukaran valuta asing turut mendukung perekonomian Indonesia dari sektor pariwisata.

9.2. Kinerja Pengelolaan Uang Rupiah

Ketersediaan Uang Kartal

Secara umum, kebijakan Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang rupiah sepanjang tahun 2014 mampu memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat yang meningkat seiring dengan aktivitas perekonomian. Kebutuhan uang kartal masyarakat yang meningkat dipicu oleh kenaikan konsumsi rumah tangga, terutama pada periode hari raya keagamaan dan liburan akhir tahun. Berbagai kebijakan pemerintah terkait harga pada kelompok *administered prices* juga mendorong meningkatnya kebutuhan uang kartal masyarakat, meskipun tidak terlalu signifikan. Kebijakan tersebut antara lain kenaikan Upah Minimum Provinsi pada awal tahun 2014, Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada bulan Mei

dan September 2014, dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada bulan November 2014.

Peningkatan jumlah uang kartal yang diedarkan sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Posisi uang kartal yang diedarkan (UYD) pada akhir tahun 2014 mencapai Rp528,5 triliun, hanya meningkat 5,7% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp500,0 triliun. Pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 13,7% (Grafik 9.19). Sejalan dengan pertumbuhan posisi UYD, pertumbuhan rata-rata harian UYD selama tahun 2014 juga melambat menjadi 11,5% dibandingkan dengan rata-rata harian tahun 2013 sebesar 13,6%. Perlambatan ini sejalan dengan moderasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memengaruhi pertumbuhan jumlah UYD selama tahun 2014.

Secara harian, pergerakan UYD selama tahun 2014 selalu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Nilai UYD tertinggi terjadi pada tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp564,5 triliun, yakni pada hari kerja terakhir periode Ramadhan, ketika kebutuhan uang kartal masyarakat meningkat. Demikian pula pada periode Natal dan liburan akhir tahun 2014, nilai UYD yang tinggi tercatat sebesar Rp528,5 triliun pada tanggal 31 Desember 2014 (Grafik 9.20).

Peran penting uang kartal dalam aktivitas ekonomi tercermin pada rasio UYD terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam sepuluh tahun terakhir, rasio UYD terhadap PDB cenderung stabil dengan rata-rata mencapai 5,3% atau pada kisaran 4,9-5,6%, meskipun menurun pada tahun 2014 (Grafik 9.21). Hal ini juga terlihat dari

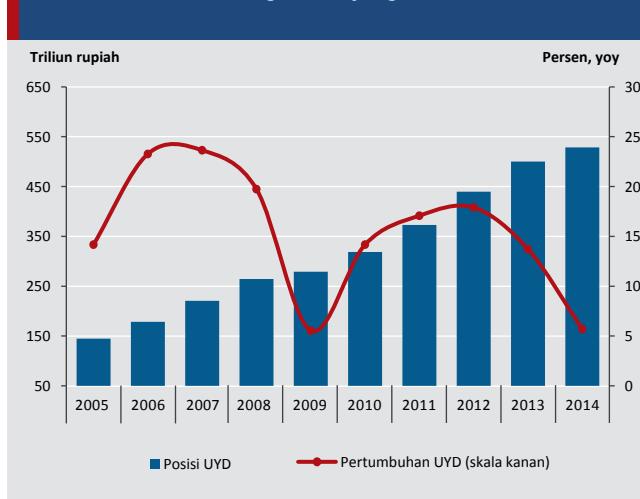
Grafik 9.20. Pergerakan Uang Kartal yang Diedarkan Secara Harian



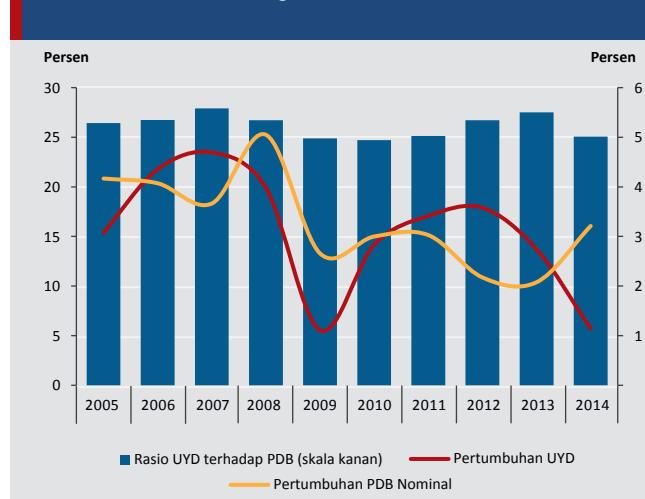
melambatnya pertumbuhan UYD pada tahun 2014, sebaliknya pertumbuhan PDB nominal sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Di samping itu, peran uang kartal juga dapat diukur dengan rasio UYD terhadap konsumsi rumah tangga. Dalam sepuluh tahun terakhir, rasio UYD terhadap konsumsi rumah tangga relatif meningkat dari 8,2% pada tahun 2005 menjadi 8,9% pada tahun 2014. Selanjutnya, peran uang kartal dalam sektor konsumsi rumah tangga juga tercermin dari pola pertumbuhan UYD yang sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Perkembangan ini menunjukkan peran uang kartal yang cukup tinggi untuk transaksi pembayaran, khususnya konsumsi rumah tangga (Grafik 9.22).

Grafik 9.19. Posisi Uang Kartal yang Diedarkan

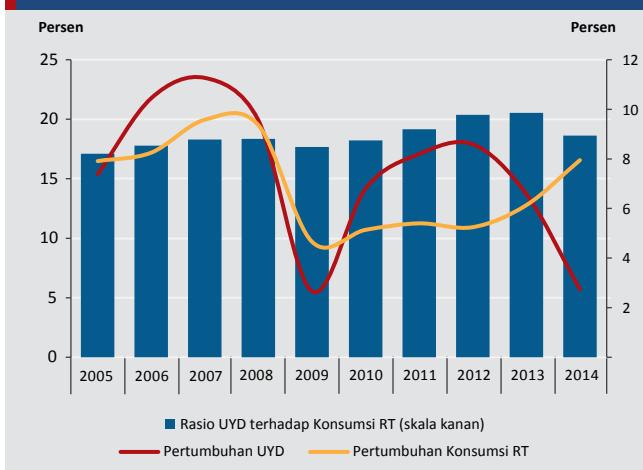


Grafik 9.21. Perkembangan UYD dan PDB Nominal



Sumber: Bank Indonesia dan BPS

Grafik 9.22. Perkembangan UYD dan Konsumsi Rumah Tangga berdasarkan Harga Berlaku



Sumber: Bank Indonesia dan BPS

Peran uang kartal dalam mendukung sektor konsumsi rumah tangga, juga tercermin dari pola pergerakan UYD yang searah dengan Indeks Penjualan Eceran (IPE) (Grafik 9.23). Pada awal triwulan I, posisi UYD yang menurun disebabkan oleh arus balik dana perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia paska Natal dan Liburan Akhir Tahun. Hal ini juga diindikasikan dengan IPE yang melambat antara lain pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi, suku cadang dan aksesori, kelompok bahan bakar kendaraan, dan kelompok barang budaya dan rekreasi, serta peralatan rumah tangga lainnya.

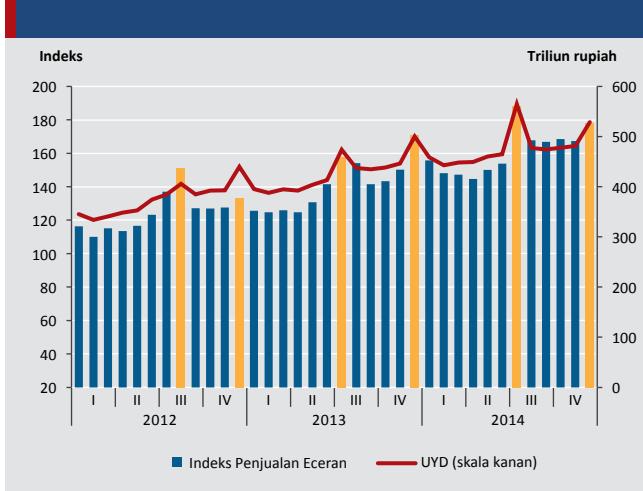
Memasuki awal triwulan II 2014 sampai dengan bulan Juli 2014, posisi UYD kembali meningkat. Hal ini juga tercermin dari kenaikan IPE, terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok suku

cadang dan aksesori, bersamaan dengan pola musiman bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2014. Arus balik dana perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia pada bulan Agustus-September sejalan dengan penurunan IPE terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta produk barang kerajinan. Pada triwulan IV 2014 posisi UYD kembali meningkat sesuai dengan pola musiman menjelang perayaan Natal dan liburan akhir tahun 2014. IPE juga meningkat pada hampir seluruh komoditas, kecuali kendaraan bermotor sebagai dampak kenaikan harga BBM Bersubsidi pada pertengahan bulan November 2014.

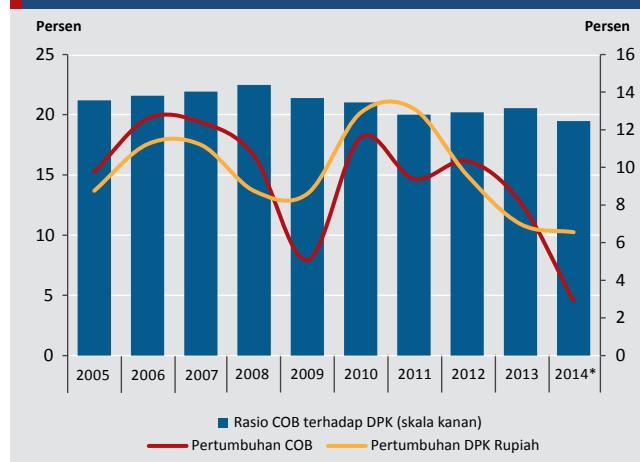
Peran uang kartal terhadap aktivitas ekonomi melalui sistem perbankan terlihat pada rasio uang kartal yang beredar di luar sistem perbankan (*Currency Outside Banks – COB*) terhadap simpanan masyarakat di perbankan yang cenderung stabil pada kisaran 13,4% selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan proses giralisasi dan penciptaan uang telah berjalan dengan baik. Sementara peran uang kartal untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran terlihat dari rasio uang kartal yang ada di khazanah perbankan dan mesin ATM (*cash in vault*) terhadap simpanan masyarakat di perbankan yang meningkat cukup signifikan dari 2,2% pada tahun 2005 menjadi 2,9% pada tahun 2014 (Grafik 9.24). Hal ini juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mesin ATM yang pada akhir tahun 2013 berjumlah 75.877 mesin menjadi 89.561 mesin pada akhir tahun 2014. Dengan demikian, maka perbankan harus menyediakan uang kartal yang lebih banyak di mesin ATM untuk penarikan nasabahnya.

Dari sisi denominasi UYD, penggunaan pecahan Rp100.000 terus meningkat selama beberapa tahun

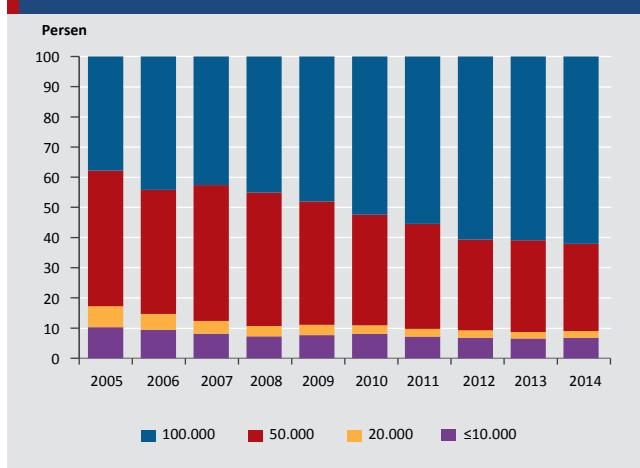
Grafik 9.23. Posisi UYD dan Indeks Penjualan Eceran



Grafik 9.24. Perkembangan *Currency Outside Banks* dan Dana Pihak Ketiga Perbankan



Grafik 9.25. Pangsa Nominal UYD Berdasarkan Denominasi



terakhir. Pada tahun 2014, pangsa nominal uang pecahan Rp100.000 terhadap total UYD mencapai 62,1% yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 35,4%. Disisi lain, pangsa uang pecahan Rp50.000 ke bawah, terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat yang lebih efisien dan faktor kepraktisan untuk memegang uang dengan pecahan terbesar (Grafik 9.25).

Dari sisi pertumbuhan UYD berdasarkan denominasi, pecahan Rp20.000 dan Rp10.000 ke bawah merupakan denominasi dengan pertumbuhan yang tinggi, yakni mencapai 12,1% dan 9,5%. Sementara itu pertumbuhan denominasi Rp100.000 mencapai 7,8% dan denominasi Rp50.000 sebesar 0,2% (Grafik 9.26). Perkembangan tersebut tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia

untuk meningkatkan kerjasama dengan perbankan dan instansi pemerintah untuk memperluas kegiatan Kas Keliling di berbagai wilayah Indonesia, terutama pada periode hari raya keagamaan.

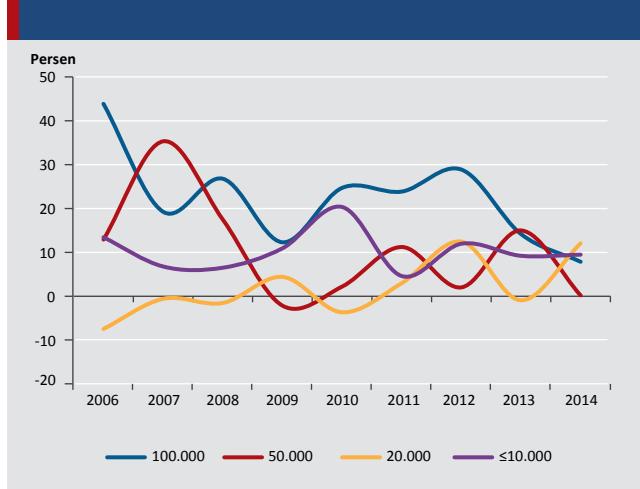
Aliran Uang Kartal Perbankan dan Masyarakat

Aliran Uang Kartal Melalui Bank Indonesia

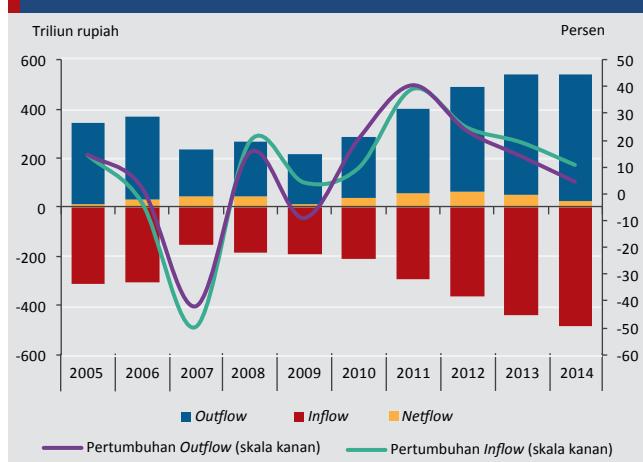
Pergerakan UYD juga tercermin dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam memberikan layanan kas kepada perbankan untuk melakukan penarikan (*outflow*) dan penyetoran (*inflow*). Selain itu, layanan kas Bank Indonesia juga mencakup kas titipan dan kas keliling secara langsung kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2014, Bank Indonesia berhasil menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat melalui perbankan di seluruh wilayah Indonesia.

Secara umum, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia mengalami *net outflow* sebesar Rp27,9 triliun. Aliran uang kartal keluar dari Bank Indonesia ke perbankan dan masyarakat tumbuh sebesar 4,5% dari Rp490,0 triliun menjadi Rp512,1 triliun. Sedangkan aliran uang kartal masuk ke Bank Indonesia tumbuh sebesar 10,8% dari Rp436,9 triliun menjadi Rp484,2 triliun (Grafik 9.27). Pertumbuhan aliran uang kartal melalui Bank Indonesia sejak tahun 2012 cenderung melambat sebagai dampak implementasi kebijakan *bye laws* nasional Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB). Dengan implementasi TUKAB, Bank Indonesia berperan sebagai *the last resort* dalam layanan kas kepada perbankan, setelah perbankan

Grafik 9.26. Pertumbuhan UYD Berdasarkan Denominasi



Grafik 9.27. Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia



memenuhi kebutuhan uang kartalnya dengan bertransaksi atau pertukaran antar bank di masing-masing wilayah atau antar wilayah yang berdekatan.

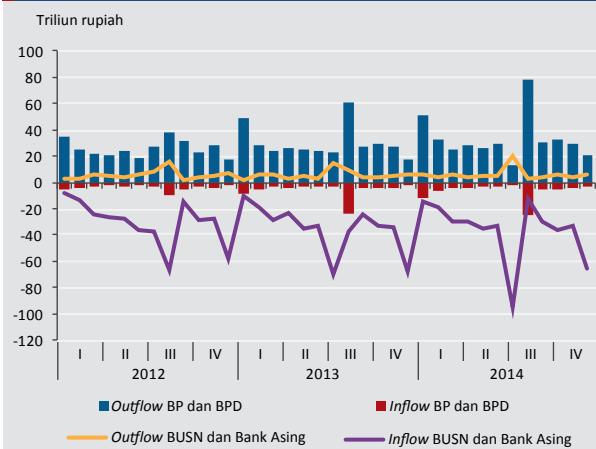
Pola siklikal pada tahun 2014 dicerminkan dari tingginya *outflow* pada periode hari raya keagamaan yaitu periode Ramadhan dan Idul Fitri yang jatuh pada bulan Juli dan periode Natal dan liburan akhir tahun pada bulan Desember. Kemudian pada 2 bulan selanjutnya terjadi *inflow* atau arus balik dana perbankan ke Bank Indonesia. Selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2014, jumlah *outflow* mencapai Rp124,8 triliun, sedangkan *outflow* pada periode Natal dan liburan akhir tahun 2014 mencapai Rp72,9 triliun (Grafik 9.28). Jumlah *outflow* pada kedua periode hari raya keagamaan tersebut merupakan jumlah yang tertinggi selama tahun 2014.

Aliran Uang Kartal Berdasarkan Kelompok Bank

Transaksi uang kartal melalui Bank Indonesia yang dilakukan oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah (BP dan BPD) menunjukkan pola yang bertolak belakang dengan Bank Umum Swasta Nasional dan Bank Asing (BUSN dan BA). Transaksi uang kartal BP dan BPD selalu menunjukkan *net outflow*. Sebaliknya, transaksi uang kartal BUSN dan BA selalu menunjukkan *net inflow* (Grafik 9.29).

Net outflow pada BP dan BPD mencerminkan perannya sebagai bank persepsi pemerintah dalam melakukan transaksi pembayaran dan penerimaan yang terkait dengan kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya pembiayaan proyek pemerintah dan

Grafik 9.29. Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Kelompok Bank

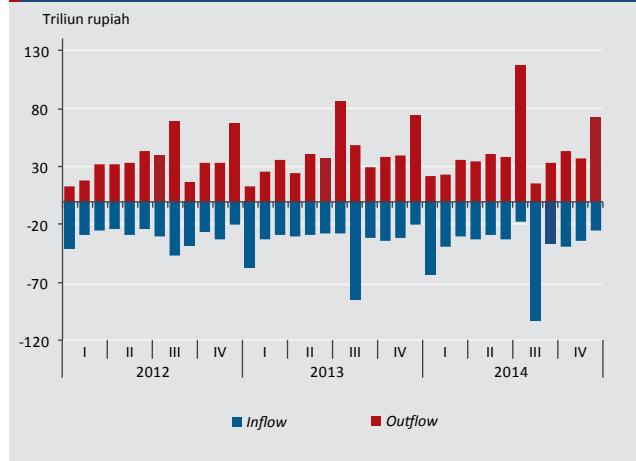


pembayaran gaji PNS/TNI. Di sisi lain, *net inflow* BUSN dan BA mencerminkan bahwa kelompok bank ini menjadi tempat bagi perusahaan swasta dan perorangan dalam menyimpan dananya. Di sisi lain, juga terdapat indikasi pergerakan dana dari BP dan BPD ke BUSN dan BA, yang ditengarai disebabkan oleh suku bunga dana pihak ketiga terutama di BUSN lebih besar dibandingkan dengan BP dan BPD.

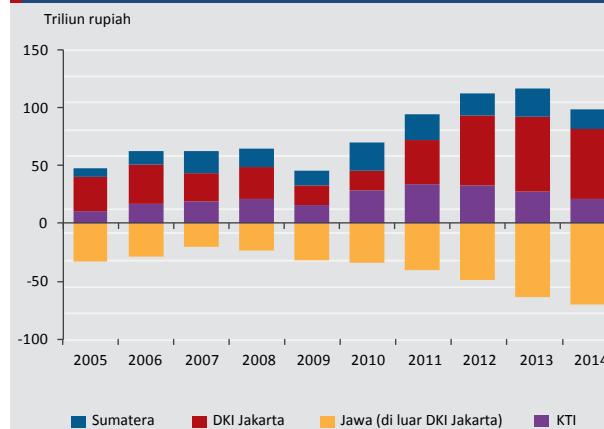
Aliran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah Ekonomi

Pola aliran uang kartal melalui Bank Indonesia juga dapat dilihat secara spasial di empat wilayah yakni Sumatera, DKI Jakarta, Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) selalu menunjukkan pola *net inflow* dalam beberapa tahun

Grafik 9.28. Pola Siklikal Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia



Grafik 9.30. Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah Ekonomi



terakhir. Sedangkan wilayah lainnya, yakni Sumatera, DKI Jakarta dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) menunjukkan pola *net outflow* (Grafik 9.30).

Pola *net inflow* yang terjadi di wilayah Jawa (di luar DKI Jakarta) dipengaruhi adanya aliran uang kartal yang masuk dari wilayah lainnya, terutama dari DKI Jakarta. Dengan kata lain, masyarakat menarik uang kartal dari perbankan di wilayah DKI Jakarta yang akan digunakan di wilayah Jawa. Uang kartal tersebut masuk ke sistem perbankan yang disetorkan kembali ke Bank Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Pola *net inflow* di Pulau Jawa juga didukung oleh mayoritas populasi penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, yakni mencapai 50% total penduduk Indonesia. Sementara itu, pola *net outflow* di DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor operasional kas perbankan yang mayoritas berkantor pusat di DKI Jakarta dan berperan sebagai *cash center* masing-masing bank. Pola aliran uang kartal di wilayah Sumatera dan KTI yang menunjukkan *net outflow* mengindikasikan bahwa ketersediaan uang kartal yang cukup sejalan dengan kapasitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut yang meningkat.

Outflow Uang Kartal melalui Layanan Kas Titipan pada Perbankan

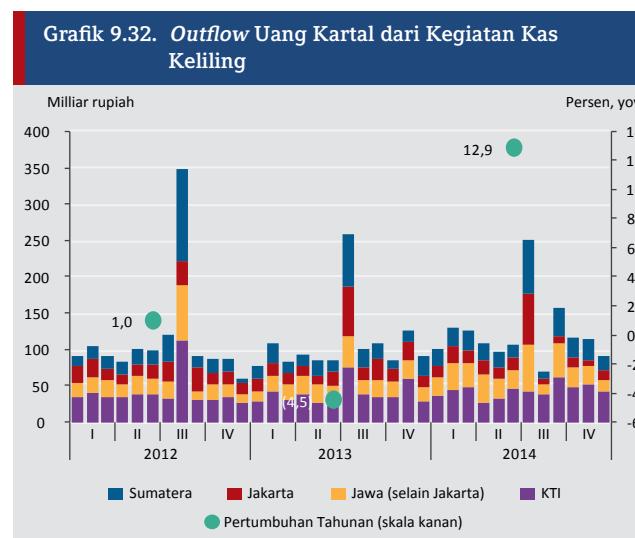
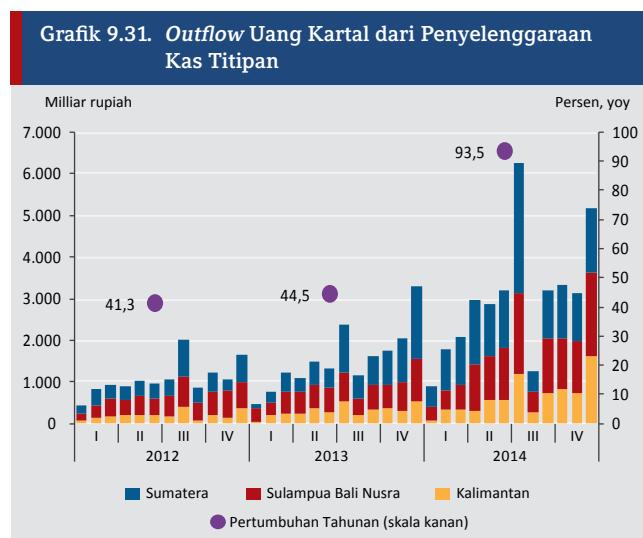
Pada tahun 2014, Bank Indonesia telah membuka 5 Kas Titipan baru di Pulau Kalimantan dan 1 Kas Titipan baru di Pulau Sumatera. Dengan demikian, jumlah Kas Titipan menjadi 30 yang mencakup 23 Kas Titipan di wilayah KTI dan 7 Kas Titipan di wilayah Sumatera. Dengan peluasan Kas Titipan tersebut, selama tahun 2014 jumlah penarikan uang kartal melalui Kas Titipan tercatat sebesar Rp36,1

triliun, atau naik 93,5% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp18,7 triliun. Dari sisi pola bulanan, kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Juli 2014 atau pada periode Ramadhan, dengan nilai penarikan sebesar Rp6,2 triliun dan bulan Desember 2014 atau pada periode Natal sebesar Rp5,2 triliun (Grafik 9.31).

Pada tahun 2014, jumlah penarikan uang kartal pada Kas Titipan yang tertinggi terjadi di wilayah timur Indonesia (Kalimantan dan Sulawesi Bali Nusra) sebesar Rp20,6 triliun atau 57% dari total penarikan melalui Kas Titipan. Tingginya penarikan uang kartal terutama di Provinsi Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, jumlah penarikan uang kartal di wilayah Sumatera sebesar Rp15,5 triliun atau 43% dari total penarikan melalui Kas Titipan yang didominasi oleh perbankan di Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Outflow Uang Kartal melalui Kas Keliling Bank Indonesia

Kegiatan layanan kas yang langsung dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat adalah Kas Keliling, berupa penukaran uang rupiah sesuai dengan denominasi yang dibutuhkan masyarakat, serta penukaran uang lusuh dan uang tidak layak edar dengan uang layak edar. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Bank Indonesia dengan perbankan dan instansi pemerintah. Kerjasama tersebut dilakukan baik selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2014, maupun di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan terdepan NKRI. Pada tahun 2014, jumlah penukaran uang rupiah melalui Kas Keliling tercatat sebesar Rp1,5 triliun, atau naik 12,9% dibandingkan dengan tahun 2013 (Grafik 9.32).

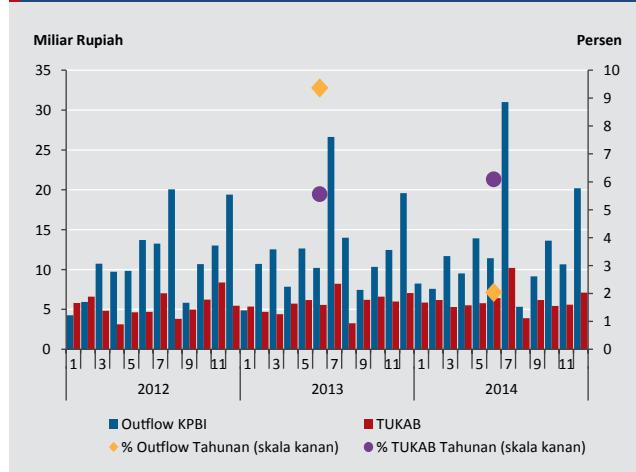


Berdasarkan sebaran wilayah, penukaran uang rupiah yang tertinggi pada tahun 2014 terjadi di wilayah timur Indonesia (Kalimantan dan Sulawesi Bali Nusra) sebesar Rp514,5 miliar atau 35,1% dari total penarikan melalui Kas Keliling. Sedangkan untuk wilayah Jawa (di luar DKI Jakarta) tercatat sebesar Rp383,2 miliar dengan pangsa 26,1% dari total. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera dan DKI Jakarta, jumlah penukaran uang melalui Kas Keliling, masing-masing tercatat sebesar Rp 338,2 miliar atau 23,1% dan Rp230,2 miliar atau 15,7% dari total.

Transaksi Uang Kartal Antar Bank di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

Sebagai dampak dari penerapan kebijakan *Bye Laws* Nasional Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB)¹⁵ sejak tahun 2012, peran TUKAB mencapai rata-rata 32% dari total penarikan uang kartal dari Bank Indonesia dan TUKAB. Peran TUKAB juga terlihat dari melambatnya pertumbuhan penarikan uang kartal dari Bank Indonesia dari 9,4% menjadi hanya 2,0% pada tahun 2014, sedangkan pertumbuhan TUKAB naik dari 5,5% menjadi 6,1% (Grafik 9.33). Dengan melambatnya pertumbuhan penarikan uang kartal tersebut berdampak pada terjadinya kecukupan posisi kas Bank Indonesia.

Grafik 9.33. TUKAB di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya



15 Transaksi Uang Kartal Antar Bank, yang selanjutnya disingkat TUKAB adalah kegiatan antar bank yang meliputi permintaan, penawaran dan penukaran uang rupiah yang masih layak edar dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan uang sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Posisi Kas Bank Indonesia

Di tengah kebutuhan uang kartal yang meningkat, posisi kas Bank Indonesia tetap terjaga. Berbagai kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia telah mendukung posisi kas Bank Indonesia yang tetap terjaga. Kebijakan tersebut terutama menjaga kualitas uang yang diedarkan dengan menetapkan standar kelusuhan uang, implementasi TUKAB dan *dropshots* dalam kegiatan penarikan dan penyetoran uang oleh perbankan, serta ketepatan jadwal pencetakan uang dan distribusi uang ke seluruh wilayah NKRI.

Pada akhir tahun 2014, rasio posisi kas Bank Indonesia mencapai 3,5 bulan *outflow* rata-rata. Sedangkan, rasio posisi kas tertinggi terjadi pada akhir bulan November 2014 yang mencapai 3,7 bulan *outflow* rata-rata. Tingginya rasio ini sebagai upaya Bank Indonesia menyediakan uang kartal menjelang periode Natal dan liburan akhir tahun. Demikian pula, dengan rasio posisi kas pada bulan Juni 2014 yang mencapai 3,4 bulan *outflow* rata-rata. Tingginya rasio ini sebagai upaya Bank Indonesia menyediakan uang kartal menjelang periode Ramadhan dan Idul Fitri (Grafik 9.34).

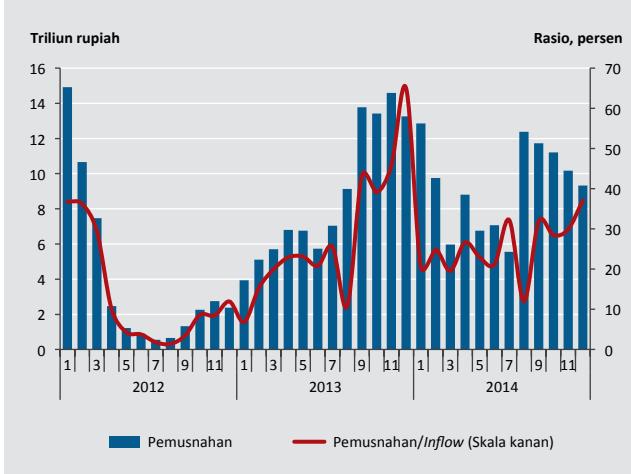
Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

Kegiatan pemusnahan uang rupiah dilakukan dalam rangka meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat (*clean money policy*). Pemusnahan uang rupiah tersebut dilakukan terhadap uang yang kondisinya sudah lusuh, cacat dan sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, yang berasal dari penyetoran perbankan dan masyarakat.

Grafik 9.34. Rasio Posisi Kas terhadap Rata-rata Jumlah Bulan *Outflow*



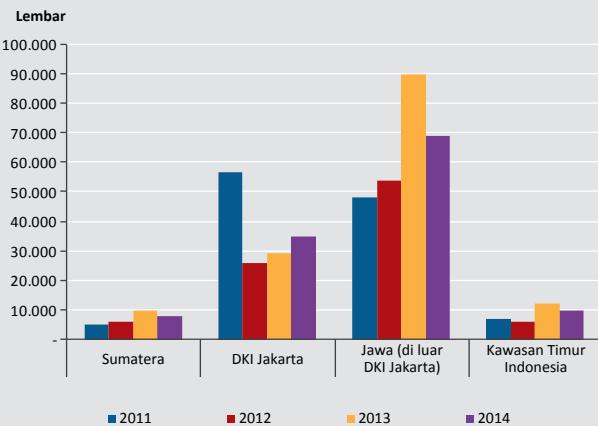
Grafik 9.35. Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar



Uang dengan kondisi tersebut (atau disebut UTLE) akan dimusnahkan dan diganti dengan uang rupiah baru dan uang layak edar yang berasal dari setoran perbankan.

Selama tahun 2014 jumlah pemusnahan UTLE mencapai Rp111,6 triliun atau meningkat 6,0% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp105,3 triliun. Jumlah pemusnahan UTLE yang meningkat sejalan dengan *inflow* yang meningkat lebih tinggi sebesar 10,8%. Dengan demikian, rasio pemusnahan UTLE terhadap *Inflow* mencapai 23,0%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 24,1%. Jumlah nominal pemusnahan UTLE tertinggi pada tahun 2014 terjadi pada bulan Agustus dan September 2014 terkait dengan arus balik dana perbankan pasca periode Idul Fitri 2014 (Grafik 9.35).

Grafik 9.37. Temuan Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Wilayah

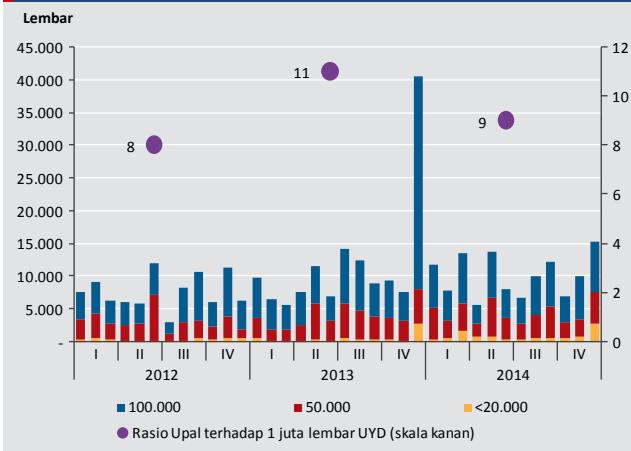


Sumber: Kepolisian RI

Perkembangan Temuan Uang Rupiah Palsu

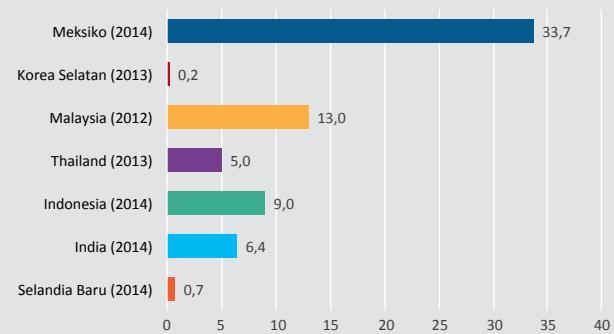
Jumlah temuan uang rupiah palsu pada tahun 2014 sebesar 122.091 lembar, turun 13,6% dari tahun 2013 yang mencapai 141.266 lembar. Rasio temuan uang rupiah palsu juga turun menjadi 9 lembar per satu juta lembar uang rupiah yang diedarkan dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 11 lembar per satu juta lembar uang rupiah yang diedarkan (Grafik 9.36). Jumlah temuan uang palsu yang menurun ditopang oleh kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai ciri keaslian uang rupiah kepada berbagai kelompok masyarakat dan khususnya kepada aparat penegak, sehingga semakin membatasi ruang gerak peredaran uang rupiah palsu. Di samping itu, mulai tahun 2014, program edukasi ciri keaslian uang rupiah

Grafik 9.36. Temuan Uang Rupiah Palsu dan Rasionalnya terhadap Uang yang Beredar



Sumber: Kepolisian RI

Grafik 9.38. Rasio Uang Palsu per 1 juta lembar Uang Yang Diedarkan di Negara Emerging Markets



Sumber: website bank sentral

telah menjadi salah satu materi ajar di tingkat SMA/MA di seluruh Indonesia.

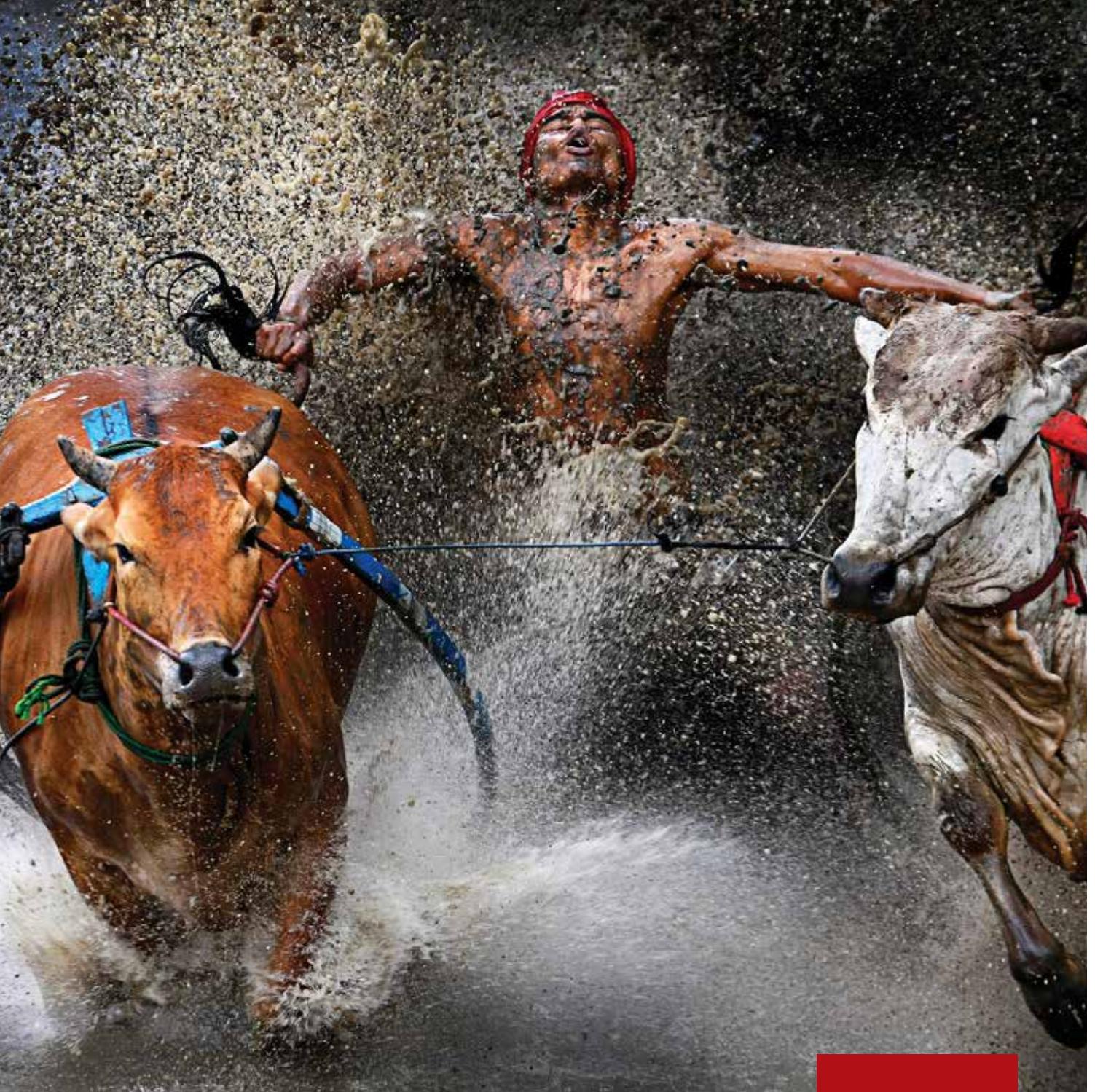
Temuan uang rupiah palsu didominasi oleh uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, masing-masing sebanyak 68.021 lembar (55,7% dari total uang palsu) dan Rp50.000 sebanyak 43.150 lembar (35,3%). Sementara itu, berdasarkan wilayah, temuan uang rupiah palsu terbesar terjadi di Pulau Jawa (69.726 lembar atau 56,7%) terutama di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Temuan uang rupiah palsu terbesar selanjutnya terjadi di Provinsi DKI Jakarta (35.123 lembar atau 28,8%) (Grafik 9.37).

Dibandingkan dengan beberapa negara *Emerging Market* (EM), rasio uang palsu di Indonesia relatif rendah. Rasio uang palsu di Meksiko yang juga digolongkan sebagai negara EM menunjukkan angka yang tinggi yakni 33,7 lembar per 1 juta lembar uang yang diedarkan. Demikian pula di Malaysia yang tercatat sebesar 13,0 lembar. Sementara itu, rasio uang palsu di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan India dan Thailand, yang masing-masing tercatat sebesar 6,4 dan 5,0. Bahkan di Korea Selatan dan Selandia Baru, rasio uang palsu tercatat sangat rendah, masing-masing hanya 0,2 dan 0,7 (Grafik 9.38).



Keterangan gambar:

Sebagaimana halnya Pacu Jawi yang mengedepankan pentingnya stabilitas dan kecepatan untuk mencapai tujuan menjadi pemenang, bauran kebijakan ekonomi diarahkan untuk tetap memprioritaskan stabilitas makroekonomi dan terus mendorong reformasi struktural. Hal ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



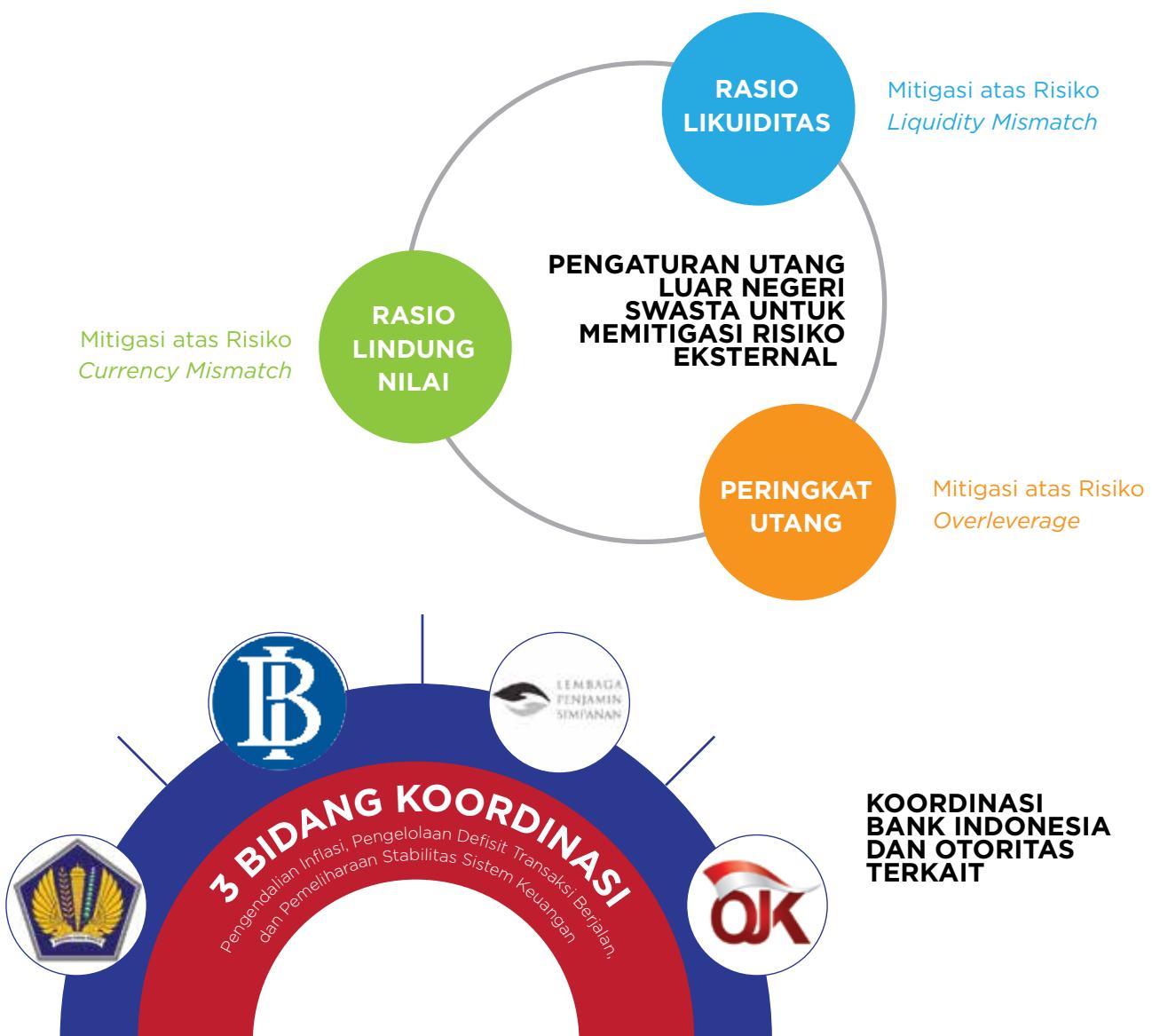
Respons Bauran Kebijakan

BAGIAN
3

INFOGRAFIS BAGIAN 3

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

BANK INDONESIA MENEMPUH BAURAN KEBIJAKAN



Bagian III

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

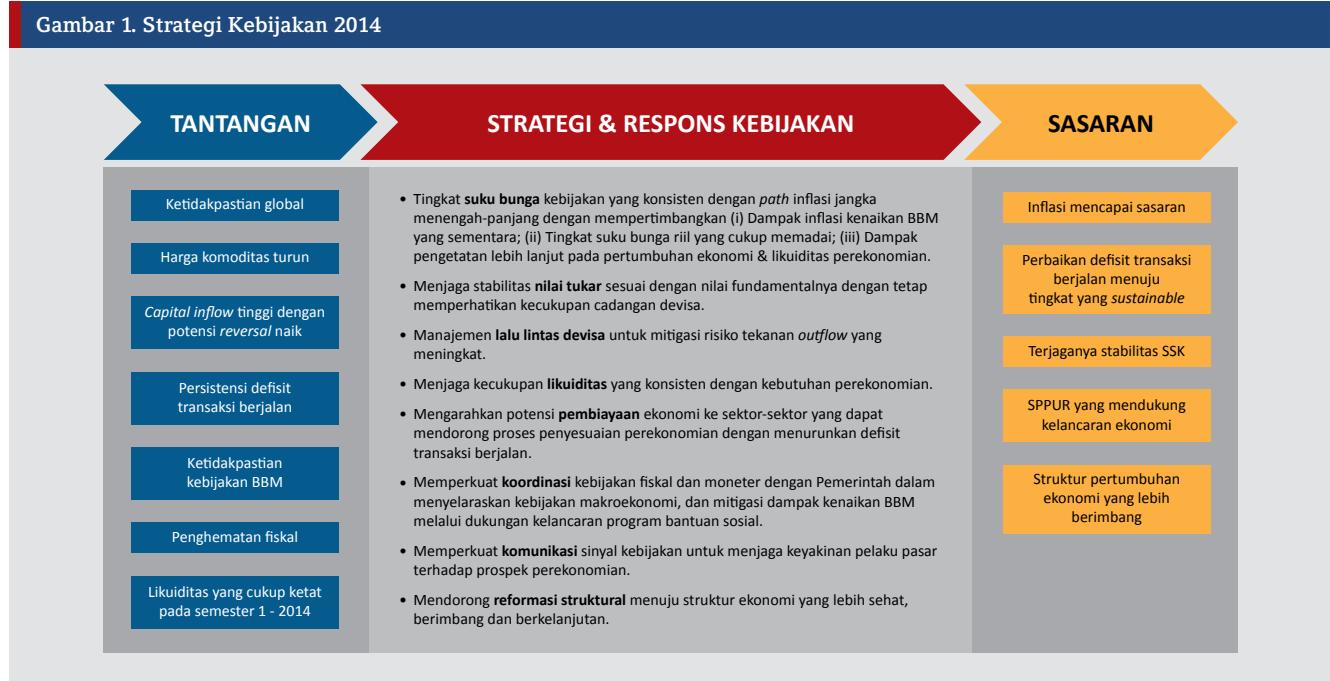
Perekonomian Indonesia pada tahun 2014 dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak ringan baik dari global maupun domestik. Dari sisi global, tantangan utama berupa proses perbaikan ekonomi dunia yang tidak merata dan tidak secepat yang diharapkan, penurunan harga komoditas internasional, ketidakpastian proses normalisasi kebijakan the Fed dan divergensi kebijakan moneter di berbagai negara-negara utama dunia. Sementara itu, dari sisi domestik perekonomian masih diwarnai oleh ekspektasi inflasi yang cukup tinggi, defisit neraca transaksi berjalan dan berbagai permasalahan yang bersifat struktural. Berbagai tantangan tersebut telah meningkatkan risiko ketidakseimbangan ekonomi Indonesia baik di sisi internal maupun eksternal.

Dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh berbagai bauran kebijakan untuk membawa kembali perekonomian kepada keseimbangannya. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial guna menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Bauran kebijakan tersebut juga didukung oleh upaya Bank Indonesia untuk melanjutkan pendalaman pasar keuangan, penguatan sistem pembayaran dan pengelolaan uang

rupiah sebagai suatu kesatuan Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang tersinergi. Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan kebijakan makroekonomi, bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut juga disinergikan dengan kebijakan fiskal melalui penguatan koordinasi kebijakan moneter dengan fiskal yang difokuskan pada upaya pengendalian inflasi, pengelolaan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dan penguatan stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran (Gambar 1). Berbagai upaya pengelolaan permasalahan siklikal tersebut juga ditopang oleh serangkaian kebijakan struktural guna memperbaiki fundamental perekonomian agar tercipta pondasi yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan suku bunga bias ketat yang telah ditempuh sejak pertengahan 2013 untuk menjangkar inflasi yang sesuai dengan lintasan sasaran inflasi dan mengarahkan defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat. Sejak awal tahun 2014 Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang bias ketat dengan mempertahankan BI Rate sebesar 7,50% selama 11 bulan hingga pertengahan November 2014. Tingkat BI Rate ini dipandang masih konsisten dengan upaya mencapai

Gambar 1. Strategi Kebijakan 2014



sasaran inflasi 2014 sebesar $4,5\pm1\%$ dan 2015 sebesar $4,0\pm1\%$ serta mengendalikan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Hasil asesmen tersebut didukung oleh perkembangan ekspektasi inflasi yang terus mengarah ke lintasan sasaran inflasi yang telah ditetapkan, inflasi inti yang terkendali, serta defisit transaksi berjalan yang menurun menjadi 3,0% PDB pada triwulan III 2014 dari 3,7% PDB pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, di tengah perbaikan stabilitas ekonomi makro yang berjalan, sejumlah risiko masih mengemuka antara lain terkait dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dan berakhirnya program *quantitative easing* dari the Fed pada Oktober 2014.

Menyikapi kenaikan ekspektasi inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan November 2014 dan meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah, Bank Indonesia pada tanggal 18 November 2014 telah menaikkan BI Rate menjadi 7,75%. Peningkatan risiko instabilitas ekonomi makro di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang melambat telah menghadapkan Bank Indonesia pada dilema kebijakan (*policy dilemma*). Di satu sisi, kenaikan ekspektasi perlu dikelola agar bersifat temporer dan tidak berlebihan, sementara di sisi lain respons yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Kenaikan BI Rate sebesar 25bps dipandang cukup untuk menjangkar ekspektasi inflasi agar inflasi dapat kembali ke kisaran sasaran jangka menengah panjang 2015-2017 sebesar $4\pm1\%$ tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Melengkapi kebijakan tersebut, pada saat yang bersamaan Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,75% dan menaikkan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 8% untuk menghindari tekanan yang berlebihan pada likuiditas pasar keuangan di samping untuk mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.

Upaya stabilisasi ekonomi makro juga didukung oleh kebijakan nilai tukar yang difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar bergerak sesuai kondisi fundamentalnya yang masih diwarnai oleh defisit transaksi berjalan. Dengan struktur pasar yang masih belum dalam, upaya stabilisasi diarahkan untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar rupiah agar tidak menimbulkan ekspektasi

depresiasi yang berlebihan. Upaya ini ditempuh dengan tetap memberikan ruang fleksibilitas yang cukup agar nilai tukar rupiah yang tercipta tetap merefleksikan kondisi fundamental pasar valas. Di samping melakukan intervensi valas, Bank Indonesia juga melakukan *dual intervention* manakala tekanan stabilitas nilai tukar bersumber dari arus modal keluar dari pasar SBN. Strategi *dual intervention* ini di samping ditujukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah juga untuk menjaga kecukupan likuiditas rupiah dan stabilitas pasar surat berharga negara (SBN). Rentannya arus masuk modal asing terhadap potensi pembalikan juga telah disikapi oleh Bank Indonesia dengan memperkuat cadangan devisa sebagai *first line of defense* yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memitigasi dampak pembalikan arus modal asing. Kebijakan tersebut juga didukung oleh penguatan jaring pengaman keuangan internasional yang diarahkan pada penambahan bantalan cadangan devisa secara berlapis (*second line of defense*) melalui kerjasama dengan bank sentral lain dan otoritas lain baik secara bilateral maupun multilateral.

Guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, Bank Indonesia terus melakukan penguatan operasi moneter baik rupiah maupun valas. Di pasar rupiah, Bank Indonesia melanjutkan strategi penyerapan ekses likuiditas dengan instrumen yang berjangka panjang (*lengthening*) seperti SDBI yang bertenor 3 dan 6 bulan. Terkait dengan upaya ini, Bank Indonesia juga menambah frekuensi lelang SDBI menjadi tiga kali sebulan untuk memberikan insentif bagi bank untuk menggeser penempatan ekses likuiditas dari instrumen moneter bertenor jangka pendek menjadi berjangka lebih panjang. Penguatan operasi moneter rupiah juga dilakukan dengan mengurangi penggunaan SBI secara bertahap dan mengoptimalkan penggunaan SBN melalui *Reverse Repo* SBN. Sementara itu, pengelolaan likuiditas valas diperkuat dengan menerbitkan instrumen baru yakni *Term Deposit Valas Syariah* yang ditujukan untuk mendukung pengelolaan likuiditas valas, meningkatkan ketersediaan instrumen valuta asing bagi bank syariah dan mendukung perkembangan pasar keuangan syariah domestik.

Berbagai kebijakan di atas juga diperkuat Bank Indonesia dengan terus melakukan berbagai upaya pendalaman pasar keuangan baik rupiah maupun valas. Sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar uang rupiah, Bank

Indonesia telah memfasilitasi perluasan keanggotaan Mini MRA (*Master Repurchase Agreement*) hingga secara total jumlah bank yang tergabung dalam Mini MRA menjadi 67 bank pada akhir 2014. Sejalan dengan implementasi Mini MRA ini, pasar repo antar bank menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yang tercermin pada peningkatan jumlah transaksi repo antar bank dan penurunan tingkat suku bunga repo hingga berada di bawah suku bunga PUAB yang *uncollateralized*. Di sisi pasar valas, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan transaksi valas terhadap rupiah dan transaksi lindung nilai kepada Bank Indonesia yang ditujukan untuk memberikan fleksibilitas dan acuan yang lebih jelas kepada pelaku pasar dalam melakukan transaksi valuta asing. Bank Indonesia bekerjasama dengan berbagai institusi lain juga telah menyusun Pedoman Penyusunan SOP Kegiatan Lindung Nilai (*hedging*) oleh perusahaan BUMN untuk mendorong perusahaan BUMN melakukan *hedging* guna mengurangi risiko nilai tukar dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga telah menerbitkan peraturan utang luar negeri korporasi nonbank yang diarahkan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri untuk memitigasi risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan. Upaya pendalaman pasar valas juga dilakukan melalui penguatan struktur kelembagaan di pasar keuangan dengan pembentukan Komite Pasar Valuta Asing Indonesia (*Indonesia Foreign Exchange Market Committee/IFEMC*) sebagai bagian penting dari upaya untuk menjaga integritas dan kredibilitas pasar keuangan Indonesia.

Guna memperkuat bauran kebijakan, pelaksanaan kebijakan makroprudensial selama 2014 yang ditujukan untuk mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan diwarnai oleh dinamika yang berbeda dari waktu ke waktu. Dalam rangka mendukung kebijakan moneter yang bias ketat, sampai dengan pertengahan November 2014 Bank Indonesia terus melanjutkan kebijakan makroprudensial yang difokuskan pada upaya memperkokoh stabilitas sistem keuangan (SSK) yang telah ditempuh sejak pertengahan 2013. Kebijakan tersebut tercermin dengan dipertahankannya GWM LDR dan GWM sekunder serta dilanjutkannya kebijakan *Loan to Value* (LTV) yang dipandang masih sesuai dengan upaya Bank

Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter dan mendukung stabilitas sistem keuangan antara lain dengan mengurangi risiko kredit dan meningkatkan daya tahan likuiditas perbankan. Dalam perjalannya, seiring dengan kebijakan kenaikan BI Rate pada pertengahan November 2014 di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kredit, Bank Indonesia mengkalibrasi ulang kebijakan makroprudensial yang sesuai dengan kebijakan moneter yang dipertahankan bias ketat guna mengurangi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan serta mendorong pembiayaan kepada sektor-sektor ekonomi produktif termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat memperkuat proses penyesuaian ekonomi lebih lanjut dan dapat membantu menurunkan defisit transaksi berjalan dengan tetap menjaga SSK.

Bauran kebijakan Bank Indonesia juga diperkokoh dengan penguatan koordinasi dengan Pemerintah baik Pusat dan Daerah serta dengan berbagai instansi lain yang terkait. Koordinasi dengan Pemerintah dalam mengelola dampak lanjutan dari kenaikan BBM bersubsidi terhadap inflasi dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi TPI dan TPID yang ditujukan pada pengendalian harga tarif angkutan dan harga pangan. Koordinasi di sisi permintaan domestik ini juga dilengkapi dengan koordinasi di bidang struktural dimana Bank Indonesia turut mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional melalui perluasan transaksi nontunai (*digital payment*) antara lain dengan mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Bauran kebijakan Bank Indonesia yang didukung oleh koordinasi yang kuat dengan Pemerintah telah berkontribusi positif terhadap perbaikan makro ekonomi. Pada penghujung 2014, laju inflasi meskipun berada di atas kisaran sasaran yang telah ditetapkan, namun tetap berada di *single digit* dan bergerak sesuai yang diprakirakan. Di sisi lain, defisit transaksi berjalan juga terus menunjukkan penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai sekitar 3% terhadap PDB selama tahun 2014. Terjadinya stabilitas makro ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural secara menyeluruh merupakan fondasi yang diperlukan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas, dan berkesinambungan.

Pengalaman krisis finansial global 2008-2009 telah memberikan pelajaran berharga bagi pelaksanaan kebijakan moneter di banyak negara khususnya mengenai pentingnya peranan stabilitas sistem keuangan dalam menopang stabilitas makroekonomi.¹ Krisis yang bersumber dari permasalahan *subprime mortgage* di Amerika Serikat tersebut tidak hanya berdampak pada penurunan kinerja sektor keuangan, namun juga berdampak negatif pada kinerja perekonomian secara makro. Belajar dari krisis, meskipun kestabilan harga tetap menjadi tujuan utama kebijakan moneter, pencapaian inflasi yang rendah tidaklah cukup untuk menjaga stabilitas makroekonomi, namun juga harus didukung sektor keuangan yang kuat dan stabil. Stabilitas sistem keuangan dicapai melalui penerapan kebijakan makroprudensial.

Salah satu poin penting dalam pembahasan mengenai pencapaian stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan moneter dan makroprudensial adalah terkait dengan ada/tidaknya *trade off* dalam implementasi kedua kebijakan. Terkait dengan hal ini, terdapat setidaknya dua pandangan, yaitu *conventional view* dan *the new environment view*. Pandangan konvensional berargumen bahwa tidak ada *trade off*, karena stabilitas inflasi merupakan salah satu syarat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.² Dengan demikian, kebijakan moneter yang difokuskan untuk menjaga stabilitas harga akan berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

-
- 1 Stabilitas makroekonomi banyak didefinisikan sebagai stabilitas harga, menyusul konsensus berbagai Bank Sentral sejak awal tahun 2000an untuk memfokuskan kebijakan moneter guna menjaga tingkat inflasi yang stabil dan rendah. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan belum memiliki definisi secara baku. Salah satu definisi yang banyak digunakan antara lain adalah suatu kondisi yang ditandai oleh harga aset yang stabil, tidak adanya krisis perbankan, tertransmisikannya suku bunga di pasar uang (Issing, 2003).
 - 2 Beberapa pandangan *conventional view* antara lain stabilitas harga merupakan *sufficient condition* untuk stabilitas keuangan (Schwartz, 1995). Sementara itu, pandangan lain lebih berhati-hati dan hanya menyatakan bahwa stabilitas harga akan cenderung mendorong terjaganya stabilitas sistem keuangan (Bordo and Wheelock, 1998).

Pandangan kedua, yaitu *the new environment view* mengisyaratkan adanya potensi *trade off* antara pencapaian stabilitas moneter dengan stabilitas sistem keuangan.³ Borio et al. (2007) mengindikasikan bahwa tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta harga aset yang terus meningkat dapat mendorong ekspektasi positif pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian ke depan. Dalam kondisi ini, kebijakan moneter meskipun berhasil menjaga stabilitas harga namun di sisi lain mendorong terciptanya *build up* risiko yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sektor keuangan yang dapat termaterialisasi menjadi krisis. Dengan potensi *trade off* tersebut, kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial perlu disinergikan dengan baik. Interaksi antara kedua kebijakan ini dapat memberikan dampak yang bersifat komplementer atau saling mendukung meskipun dalam kasus tertentu dapat digunakan secara terpisah.

Sifat yang saling melengkapi dapat juga diilustrasikan ketika terjadi pemanasan ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi disertai dengan pertumbuhan kredit yang terlampaui tinggi. Dalam kondisi ini, pengetatan kebijakan moneter sebagai kebijakan yang bersifat *broad based* dapat mengerem laju pertumbuhan yang terlalu cepat dan kebijakan makroprudensial yang menyasar penumpukan risiko di sektor tertentu dapat digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi. Penggunaan kedua kebijakan yang saling melengkapi ini dapat lebih efektif menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dibandingkan hanya menggunakan salah satu kebijakan saja. Penerapan kedua kebijakan menuntut strategi komunikasi yang prima agar pelaku ekonomi dapat menangkap sasaran masing-masing kebijakan dan sasaran kebijakan secara keseluruhan.

Contoh kasus di Indonesia yang dapat disimak adalah kejadian pada periode tahun 2009, dimana untuk menghadapi perlambatan kinerja perekonomian di tengah tekanan inflasi yang relatif rendah, Bank Indonesia menurunkan BI Rate dengan total 275 bps sepanjang tahun 2009 dan menurunkan rasio GWM dari sebesar 9,1% menjadi 7,5%, terdiri dari

3 Lihat Borio, English, dan Filardo (2003)

Bagan 1. Kombinasi Penggunaan Kebijakan Moneter dan Makroprudensial



5% GWM primer dan 2,5% GWM sekunder. Pada periode ini, kebijakan moneter dan makroprudensial berjalan searah serta berhasil berfungsi untuk saling menguatkan guna mendukung pemulihan perekonomian. Pada periode tahun 2010 – 2012 kinerja perekonomian domestik semakin membaik. Namun demikian, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang muncul dari derasnya aliran masuk modal asing, besarnya ekses likuiditas perbankan, dan kenaikan tekanan inflasi yang didorong bahan pangan. Untuk merespon kondisi ini, Bank Indonesia mengambil kebijakan moneter yang cenderung ketat dengan menaikkan BI Rate 25 bps pada periode 2010 – 2011 untuk memitigasi kenaikan ekspektasi inflasi.

Selanjutnya, sejalan dengan pertimbangan bahwa tekanan inflasi diperkirakan akan menurun dan terdapat potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, pada triwulan IV 2011 Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang cenderung akomodatif dengan menurunkan BI Rate. Kebijakan moneter tersebut dipertahankan oleh Bank Indonesia hingga akhir 2012 dengan BI Rate tetap. Namun demikian, tetap diambil langkah-langkah untuk memperkuat pengelolaan likuiditas dan lalu lintas arus modal melalui kenaikan GWM primer menjadi 8% dan penerapan *month holding period* SBI 6 bulan. Sementara itu, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial yang cenderung ketat guna memitigasi risiko pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi, kenaikan eksposur risiko valas dan tekanan kenaikan harga aset pada khususnya pada sektor properti sepanjang periode 2010-2012. Beberapa kebijakan makroprudensial yang ditempuh antara

lain pemberlakuan GWM – LDR, kenaikan GWM valas dari 1% menjadi 5% dan kemudian menjadi 8%, pemantauan suku bunga dasar kredit (SBDK), dan penerapan LTV untuk kredit kepemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor.

Sementara itu, perekonomian pada tahun 2013 dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, defisit transaksi berjalan cenderung persisten dan struktural, serta ketidakpastian global terkait dengan kebijakan *tapering off* oleh bank sentral Amerika (the Fed). Dari sisi domestik, kenaikan harga BBM telah menyebabkan inflasi melampaui sasarannya, sementara permintaan domestik masih tetap kuat, pertumbuhan kredit tetap tinggi dan defisit transaksi berjalan memburuk. Untuk menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan, Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan stabilisasi perekonomian melalui kebijakan moneter bias ketat dengan kenaikan BI Rate sebesar total 175 bps. Sejalan dengan itu, kebijakan makroprudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia, antara lain dengan menyempurnakan ketentuan LTV dan GWM LDR, menaikkan GWM sekunder dari 2,5% menjadi 4%, serta menerapkan *supervisory action*. Pada periode ini, kedua kebijakan berjalan searah dan bersinergi untuk mengelola stabilitas perekonomian dan mengembalikan kepercayaan pelaku ekonomi.

Tahun 2014 merupakan tahun penuh tantangan bagi upaya pengelolaan stabilitas ekonomi makro. Di sisi eksternal, kinerja perekonomian tertahan oleh berlanjutnya perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas, ketidakpastian normalisasi kebijakan the Fed serta divergensi kebijakan moneter di negara utama dunia. Di sisi domestik, sejalan dengan kebijakan stabilisasi perekonomian dan terbatasnya pemulihan ekonomi global, kinerja perekonomian tertekan terutama akibat terkontraknya kinerja ekspor dan melambatnya konsumsi pemerintah. Sementara itu, implementasi penyesuaian harga BBM bersubsidi dan TTL Rumah Tangga menyebabkan inflasi melampaui sasarannya. Sebagai langkah *preemptive* untuk menjangkar ekspektasi inflasi, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 bps, melanjutkan kebijakan moneter bias ketat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Sementara itu, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan serta mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif, termasuk UMKM.



Keterangan gambar:

Bank Indonesia merespon sejumlah tantangan yang kompleks, baik dari global maupun domestik, melalui kebijakan moneter yang konsisten untuk mencapai dan memelihara stabilitas Rupiah. Kebijakan tersebut didukung oleh komunikasi yang semakin efektif melalui berbagai media.



BAB 10

KEBIJAKAN MONETER

Bank Indonesia selama tahun 2014 menempuh kebijakan moneter bias ketat dengan mempertahankan BI Rate sebesar 7,5% sampai dengan November 2014 untuk membawa inflasi ke kisaran sasarnya dan menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Menyikapi kenaikan ekspektasi inflasi pascakebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan peningkatan tekanan rupiah, Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 7,75%. Bank Indonesia juga menempuh kebijakan nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya, melanjutkan upaya pendalaman pasar keuangan, memperkuat operasi moneter, kebijakan lalu lintas devisa, dan jaring pengaman keuangan internasional.

Perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif di tengah berbagai permasalahan domestik yang masih mengemuka telah mendorong peningkatan risiko ketidakstabilan makroekonomi pada tahun 2014. Untuk itu, bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada upaya memperkokoh stabilitas moneter dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut dilaksanakan melalui sinergi antara kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah serta pendalaman pasar keuangan. Berbagai kebijakan tersebut juga diperkuat oleh koordinasi yang erat dengan Pemerintah dan instansi yang lain serta strategi komunikasi yang baik untuk meningkatkan efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia.

Dalam upaya memperkokoh stabilitas moneter dan sistem keuangan, Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan dengan kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial bias ketat sampai dengan November 2014 . Strategi tersebut diejawantahkan dalam bentuk penetapan BI Rate sebesar 7,5% untuk menjangkar ekspektasi inflasi, sementara *Lending Facility* dan *Deposits Facility* masing-masing dipertahankan sebesar 7,5% dan 5,75%

(Gambar 10.1). Tingkat suku bunga tersebut dipandang masih konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi 2014, penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta tetap kondusif bagi terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan suku bunga tersebut didukung kebijakan nilai tukar yang mengarahkan nilai tukar rupiah agar konsisten dengan nilai fundamentalnya dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa. Kebijakan nilai tukar tersebut difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah derasnya arus masuk modal asing terutama pada semester I 2014 tanpa mengurangi fleksibilitas nilai tukar rupiah untuk bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Rentannya arus masuk modal asing terhadap potensi pembalikan telah disikapi oleh Bank Indonesia dengan memperkuat cadangan devisa sebagai *first line of defense* yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi pembalikan arus modal asing. Kebijakan tersebut dikombinasikan dengan strategi pengelolaan likuiditas rupiah yang diarahkan pada penyerapan ekses likuiditas melalui instrumen moneter berjangka panjang. Sementara itu, pengelolaan likuiditas valas diperkuat dengan menerbitkan instrumen baru

Gambar 10.1. Bauran Kebijakan 2014

FASE	FASE 1	
	Sampai dengan 17 November 2014	FASE 2
EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Harga komoditas turun. - Aliran modal masuk kuat. - Pertumbuhan global memburuk meskipun AS membaik. - Risiko dari perkiraan waktu normalisasi kebijakan The Fed. 	<ul style="list-style-type: none"> - Harga komoditas turun lebih besar dari prakiraan. - Aliran modal keluar karena sentimen global (pengaruh dolar AS dan ketidakpastian meningkat). - Pertumbuhan global lebih buruk dari perkiraan meskipun AS semakin solid.
DOMESTIK	<ul style="list-style-type: none"> - Defisit transaksi berjalan membaik namun cenderung persisten. - Inflasi cenderung melambat. Namun ekspektasi inflasi tinggi karena risiko kenaikan <i>administered prices</i>. - Nilai tukar relatif stabil. - PDB melambat karena belanja pemerintah dan investasi yang lemah di tengah ekspor yang tertekan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tekanan defisit transaksi berjalan berkurang. - Tekanan inflasi meningkat terkait kenaikan BBM subsidi. - Tekanan depresiasi nilai tukar meningkat karena fenomena <i>outflow</i> pada negara berkembang. - PDB membaik didukung investasi, belanja pemerintah dan ekspor yang membaik.
PERTIMBANGAN KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan untuk stabilisasi perekonomian. - Ekspektasi inflasi perlu dijangkar pada sasarnya. - Penyesuaian defisit transaksi berjalan menuju tingkat yang <i>sustainable</i> perlu didorong lebih cepat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya memberikan sinyal yang kuat dan konsisten ke pasar, mengenai komitmen BI dalam pengendalian inflasi sehingga kredibilitas tetap terjaga. - Respons kebijakan suku bunga harus memperhatikan takaran, <i>timing</i> dan bauran dengan kebijakan lainnya, yaitu Makroprudensial agar tidak memberikan tekanan berlebihan pada ekonomi yang pada tren melambat.
RESPON KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Moneter Ketat: Mempertahankan BI Rate (7,50%), DP (5,75%) dan LF (7,50%). - Kebijakan Nilai Tukar sejalan dengan fundamentalnya. - Makroprudensial: memperkokoh SSK, GWMLDR dan LTV tetap. <i>Supervisory action</i> untuk mitigasi pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi. - Kebijakan Pengawalan Operasi Moneter, Pengelolaan Lalu Lintas Devisa dan Pendalaman Pasar Keuangan. - Sistem Pembayaran: Pengawalan Infrastruktur, mendorong non-tunai. - Pengawalan Koordinasi untuk pengendalian inflasi, penurunan defisit transaksi berjalan dan reformasi struktural. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Moneter Ketat: Menaikkan BI Rate 25 bps 7,75% dan LF 50 bps ke 8,00%. DF tetap 5,75%. - Kebijakan Nilai Tukar sejalan dengan fundamentalnya. - Relaksasi Kebijakan Makroprudensial secara selektif. Penyiapan ketentuan makroprudensial yang lebih akomodatif secara selektif, lebih mendorong keuangan inklusif dan kredit UMKM. - Kebijakan Pengawalan Operasi Moneter, Pengelolaan Lalu Lintas Devisa dan Pendalaman Pasar Keuangan. - Sistem Pembayaran: LKD untuk penyaluran bantuan sosial, elektronifikasi transaksi pemerintah. - Pengawalan Koordinasi untuk pengendalian dampak <i>second round</i> kenaikan harga BBM dan optimalisasi realokasi belanja subsidi.

yakni *Term Deposit* Valas Syariah yang ditujukan untuk mendukung pengelolaan likuiditas valas, meningkatkan ketersediaan instrumen valuta asing bagi bank syariah dan mendukung perkembangan pasar keuangan syariah domestik. Sementara itu, guna mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan pembiayaan asing, Bank Indonesia terus mendorong dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang luar negeri. Penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan dapat mengurangi risiko *currency mismatch*, risiko *over leveraged* dan risiko likuiditas dari utang luar negeri.

Berbagai kebijakan di atas juga diperkuat Bank Indonesia dengan terus melakukan berbagai upaya pendalaman pasar keuangan baik rupiah maupun valas untuk meningkatkan ketahanan pasar keuangan domestik terhadap berbagai gejolak yang berasal dari kondisi global sekaligus meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar uang rupiah, Bank Indonesia telah memfasilitasi perluasan penggunaan Mini MRA (*Master Repurchase Agreement*) oleh 38 bank tambahan hingga secara total jumlah bank yang tergabung dalam Mini MRA menjadi 67 bank. Sejalan dengan implementasi Mini MRA ini, pasar repo antarbank menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yang tercermin pada peningkatan jumlah transaksi repo antar bank dan penurunan tingkat suku bunga repo hingga berada di bawah suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang tidak memiliki agunan. Di sisi pasar valas, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia antara lain dengan memperluas cakupan *underlying* transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia, memperpanjang tenor transaksi dan penegasan penyelesaian transaksi secara *netting* yang ditujukan untuk memberikan fleksibilitas dan acuan yang lebih jelas kepada pelaku pasar dalam melakukan transaksi valuta asing. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia dengan bekerjasama dengan berbagai institusi lain juga telah menyusun Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kegiatan Lindung Nilai (*Hedging*) oleh perusahaan BUMN yang diharapkan akan dapat mendorong perusahaan BUMN untuk melakukan *hedging* guna mengurangi risiko nilai tukar dalam pengelolaan keuangan perusahaan BUMN. Upaya pendalaman pasar valas juga dilakukan melalui penguatan struktur kelembagaan di pasar keuangan dengan pembentukan Komite Pasar Valuta Asing Indonesia (*Indonesia Foreign Exchange Market Committee*) yang kemudian diikuti oleh penerbitan *Market of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Market* yang merupakan bagian penting dari upaya untuk menjaga integritas dan kredibilitas pasar keuangan Indonesia.

Dalam perspektif kebijakan, berbagai bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia telah memungkinkan Bank Indonesia untuk mengelola *trilemma* kebijakan dengan baik.¹ Di tengah derasnya arus masuk modal asing terutama pada paruh pertama 2014, Bank Indonesia melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar sehingga tidak terjadi tekanan apresiasi yang berlebihan. Langkah ini selaras dengan upaya Bank Indonesia untuk menekan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dan memupuk cadangan devisa yang sangat diperlukan untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah penguatan cadangan devisa ditempuh pada saat yang tepat mengingat kondisi likuiditas rupiah di pasar uang relatif ketat sejalan dengan operasi keuangan Pemerintah yang masih kontraktif di semester I 2014. Kombinasi antara penguatan cadangan devisa dengan operasi keuangan pemerintah yang kontraktif serta operasi pasar terbuka berhasil menstabilkan rupiah agar sejalan dengan kondisi fundamentalnya tanpa mengganggu stabilitas pasar uang rupiah.

Bauran kebijakan yang ditempuh dapat membawa perekonomian ke kondisi yang lebih sehat hingga penghujung 2014. Inflasi terus menunjukkan tren menurun hingga November 2014 seiring dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan terkelolanya permintaan domestik. Dampak dari kebijakan stabilisasi makroekonomi juga terlihat pada perbaikan defisit transaksi berjalan, terutama neraca transaksi berjalan nonmigas yang terus menurun didorong penurunan impor sejalan dengan permintaan domestik yang lebih moderat.

Namun demikian, berbagai permasalahan struktural ekonomi termasuk ketahanan energi yang belum kuat, memberikan kendala pada proses perbaikan perekonomian lebih lanjut. Untuk itu, pada pertengahan November 2014 Pemerintah telah menyesuaikan harga BBM bersubsidi sebagai pijakan awal dari reformasi struktural secara menyeluruh. Meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong kenaikan inflasi dalam jangka pendek, Bank Indonesia menyambut baik kebijakan ini mengingat akan terciptanya ruang fiskal yang lebih besar. Ruang fiskal yang lebih leluasa ini akan memungkinkan Pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah yang dapat memberikan stimulus untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkesinambungan.

¹ Keseimbangan antara tiga tujuan yang memiliki hubungan saling menegaskan: nilai tukar tetap, mobilitas modal bebas dan independensi kebijakan moneter.

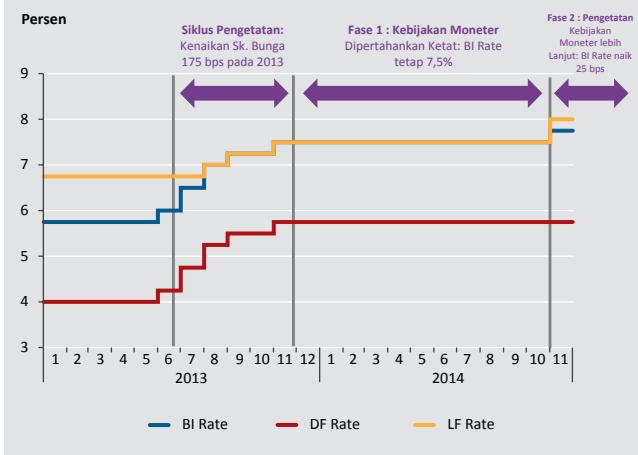
Menyusul langkah kebijakan Pemerintah tersebut, Bank Indonesia memandang perlu untuk secara konsisten tetap mengarahkan kebijakan moneter yang bias ketat guna menjangkar ekspektasi inflasi agar segera kembali ke lintasan sasarnya yaitu sebesar $4\% \pm 1\%$ pada 2015. Langkah ini ditempuh dengan menaikkan BI Rate menjadi 7,75% pada bulan November 2014. Bank Indonesia juga menyadari bahwa kebijakan moneter yang ketat memiliki dampak yang tak terhindarkan antara lain berupa tekanan pada pertumbuhan ekonomi dan kredit. Untuk itu, Bank Indonesia melengkapi kebijakan moneter bias ketat dengan menyiapkan kebijakan makroprudensial yang cenderung akomodatif. Kebijakan makroprudensial ini difokuskan untuk mengarahkan potensi pembiayaan ekonomi ke sektor-sektor tertentu yang dapat mendorong proses *rebalancing* perekonomian dan mendorong defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat. Selain kebijakan makroprudensial, bauran kebijakan juga didukung oleh kebijakan sistem pembayaran melalui implementasi Layanan Keuangan Digital dalam mendukung kelancaran dan perluasan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat oleh Pemerintah. Dengan strategi bauran kebijakan moneter bias ketat dan kebijakan makroprudensial yang cenderung akomodatif, serta dukungan kebijakan sistem pembayaran, inflasi diperkirakan akan kembali ke kisaran sasaran dengan tekanan ke pertumbuhan ekonomi yang minimal.

10.1. Kebijakan Suku Bunga

Respons kebijakan suku bunga tetap diarahkan guna menjaga konsistensi sinyal kebijakan moneter Bank Indonesia untuk menjangkar ekspektasi inflasi yang sesuai dengan pencapaian sasaran inflasi. Sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi makroekonomi, Bank Indonesia meneruskan kebijakan suku bunga ketat dengan mempertahankan BI Rate pada level 7,50% sementara suku bunga *Deposit Facility* (DF) dan *Lending Facility* (LF) juga tetap, masing-masing sebesar 5,75% dan 7,50% sampai dengan November 2014 (Grafik 10.1). Kebijakan suku bunga yang dipertahankan ketat selain ditujukan untuk memberikan sinyal mengenai komitmen Bank Indonesia dalam mengendalikan tekanan inflasi, juga merupakan bagian dari strategi bauran kebijakan Bank Indonesia untuk memastikan berlangsungnya penyesuaian defisit transaksi berjalan menuju tingkat yang lebih sehat di tengah masih rentannya proses perbaikan ekonomi terhadap ketidakpastian eksternal maupun domestik.

Meresppons langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 17 November 2014, Bank Indonesia telah

Grafik 10.1. Periodisasi Kebijakan Suku Bunga



menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,75%. Langkah menaikkan suku bunga BI Rate ini selain menegaskan kembali komitmen kebijakan moneter yang bias ketat, juga merupakan langkah *preemptive* Bank Indonesia untuk memitigasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM pada tekanan inflasi ke depan. Bank Indonesia ingin memastikan, bahwa tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM hanya bersifat sementara, dan laju inflasi serta ekspektasinya ke depan tetap terjangkar pada kisaran sasaran inflasi jangka menengah 2015-2017 sebesar $4\% \pm 1\%$. Kebijakan suku bunga ini juga merupakan bagian dari strategi bauran kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk memastikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan yang sudah berlangsung selama tiga tahun, tetap terkendali di sekitar 2,5-3% dari PDB dan tidak membesar. Defisit neraca transaksi berjalan yang terkendali sangatlah penting untuk memastikan perekonomian nasional dapat tumbuh kuat dan berimbang, serta penciptaan lapangan kerja dapat terus berlanjut.

Periode 1: Mempertahankan Kebijakan Bias Ketat

Di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan global yang sarat ketidakpastian dan menyimpan banyak risiko, Bank Indonesia sejak pertengahan 2013 secara konsisten telah menerapkan kebijakan moneter bias ketat. Kebijakan bias ketat ini menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi yang telah ditempuh sejak Juni 2013 ketika BI Rate naik sebesar 175 bps, serta suku bunga DF dan LF masing-masing naik sebesar 175 bps dan 75 bps. Kenaikan BI Rate yang cukup signifikan selama 2013 tersebut merupakan langkah penting

untuk mengendalikan peningkatan tekanan inflasi baik yang bersumber dari ekspektasi inflasi maupun dampak lanjutan (*second round effect*) dari kenaikan harga BBM pada 22 Juni 2013 terhadap peningkatan inflasi inti. Selain itu, *stance* kebijakan moneter bias ketat ini diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi, memitigasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM pada Juni 2013, menjaga kepercayaan pasar, serta mengendalikan defisit transaksi berjalan.

Konsistensi pelaksanaan kebijakan ketat tersebut mulai membuat hasil seperti tercermin pada tekanan inflasi yang bersifat sementara dan mulai kembalinya ke lintasan sasaran jangka menengahnya. Di samping itu, kredibilitas dari kebijakan ketat ini juga dapat mengelola ekspektasi inflasi sehingga tidak terakselerasi (Grafik 10.2). Memasuki tahun 2014, inflasi cenderung melambat. Inflasi IHK bulanan pada triwulan I 2014 tercatat rendah dan pada tren menurun. Bahkan, inflasi Februari dan Maret tercatat lebih rendah dibandingkan dari rata-ratanya dalam 5 tahun terakhir. Penurunan tekanan inflasi didukung inflasi inti yang menurun seiring apresiasi nilai tukar, moderasi permintaan domestik, dan ekspektasi inflasi yang masih terjaga. Selain itu, harga bahan pangan juga mengalami deflasi akibat pasokan yang meningkat. Lebih lanjut, sampai dengan triwulan III 2014, tingkat inflasi menunjukkan tren penurunan mencapai 4,53%, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2013 sebesar 7,90%. Ini berarti kebijakan moneter bias ketat yang diperkuat dengan jalinan koordinasi kebijakan dengan pemerintah berhasil meredam dampak lanjutan kenaikan harga BBM pada Juni 2013.

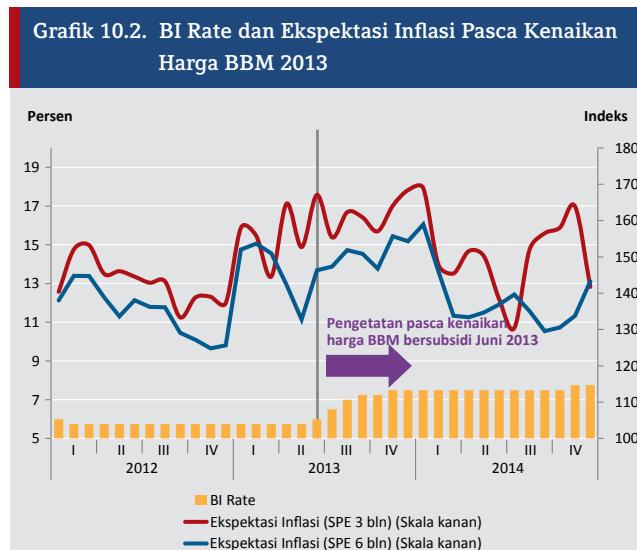
Meskipun tekanan inflasi sudah mulai mereda, berbagai faktor risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran

inflasi 2014 masih mengemuka. Risiko tersebut terutama bersumber dari kemungkinan penyesuaian *administered prices* terkait dengan tingginya konsumsi BBM bersubsidi di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Selain itu, risiko naiknya harga pangan akibat musim kemarau di beberapa daerah serta kemungkinan terjadinya El Nino terus dicermati oleh Bank Indonesia.

Di samping risiko inflasi, risiko melebarnya defisit transaksi berjalan juga mengemuka pada awal tahun. Tekanan terhadap transaksi berjalan antara lain bersumber dari penurunan ekspor komoditas utama yang disebabkan oleh penurunan permintaan dunia. Selain itu, penurunan ekspor bahan tambang seiring dengan penerapan Undang-Undang Mineral dan Batubara juga turut memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia. Pada sisi impor, permintaan impor terutama migas masih besar sejalan dengan konsumsi BBM bersubsidi yang masih tinggi. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan tekanan pada kinerja transaksi berjalan.

Pada sisi eksternal, risiko yang mengemuka adalah ketidakpastian normalisasi kebijakan bank sentral Amerika, the Fed, yang dapat mengganggu prospek aliran modal asing. Aliran modal asing masih diperlukan untuk membiayai defisit transaksi berjalan dan fiskal. Risiko global yang lain adalah pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat, tidak merata dan sarat ketidakpastian. Amerika Serikat relatif menjadi motor tunggal pertumbuhan ekonomi global, sementara pertumbuhan negara maju utama lainnya cenderung tertahan atau menurun. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara *emerging market* khususnya Tiongkok cenderung melambat. Pertumbuhan ekonomi global khususnya Tiongkok yang melambat ini dapat mengganggu kinerja ekspor Indonesia karena struktur ekspor yang masih tergantung pada sumber daya alam yang pada gilirannya dapat menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko tersebut, Bank Indonesia memandang bahwa stabilitas makroekonomi merupakan kunci dari terus berlanjutnya proses perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga sejak awal 2014 hingga pertengahan November secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarnya dan mendorong penyesuaian defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dengan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga. Strategi kebijakan suku bunga ketat ini diwujudkan dengan dipertahankannya tingkat suku bunga kebijakan, BI Rate sebesar 7,50%, suku bunga *Deposit*



Facility (DF) dan *Lending Facility* (LF) masing-masing tetap sebesar 5,75% dan 7,50%.

Konsistensi pelaksanaan kebijakan suku bunga ketat telah membawa hasil sesuai yang diharapkan. Inflasi IHK terus menurun kembali ke kisaran sasarannya hingga mencapai 4,83% (yoy) di bulan Oktober 2014. Demikian pula dengan inflasi inti di bulan yang sama tercatat sebesar 4,02% (yoy) lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2013 sebesar 4,73% (yoy). Ekspektasi inflasi untuk tahun 2014 juga relatif terkendali seperti yang tercermin pada ekspektasi *Consensus Forecast* dan ekspektasi harga konsumen jangka pendek. Perbaikan juga terlihat pada defisit transaksi berjalan yang menurun. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2014 tercatat sebesar 7,0 miliar dolar AS lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,6 miliar dolar AS. Dalam konteks kebijakan stabilisasi makroekonomi, perbaikan transaksi berjalan yang lebih besar terlihat pada defisit neraca transaksi berjalan nonmigas yang menurun dari 3,8 miliar dolar AS pada triwulan III 2013 menjadi 1,7 miliar dolar AS pada triwulan III 2014 yang bersumber dari penurunan impor sejalan dengan moderasi pertumbuhan perekonomian domestik.

Meski demikian, proses perbaikan perekonomian lebih lanjut terhambat oleh belum kuatnya ketahanan energi. Sebagai negara net importir minyak, konsumsi BBM yang terus naik menyebabkan impor BBM meningkat. Naiknya impor minyak pada gilirannya semakin membebani neraca transaksi berjalan. Kondisi ini tercermin pada defisit neraca transaksi berjalan untuk komoditas migas yang meningkat dari 4,8 miliar dolar AS pada triwulan III 2013 menjadi 5,3 miliar dolar AS pada triwulan III 2014. Konsumsi BBM bersubsidi yang tinggi juga memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal. Tekanan terhadap kondisi fiskal ini yang mendorong menguatnya ekspektasi bahwa pemerintah akan mengambil langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi, yang pada akhirnya memicu kenaikan ekspektasi inflasi.

Periode 2: Kenaikan BI Rate November 2014

Rencana Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, direspon oleh pelaku ekonomi baik di pasar keuangan maupun sektor riil dengan menaikkan ekspektasi inflasi. Meningkatnya ekspektasi ini perlu dikendalikan agar tidak terus bergulir membesar. Menyikapi kondisi ini, fokus kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mengendalikan kenaikan ekspektasi inflasi.

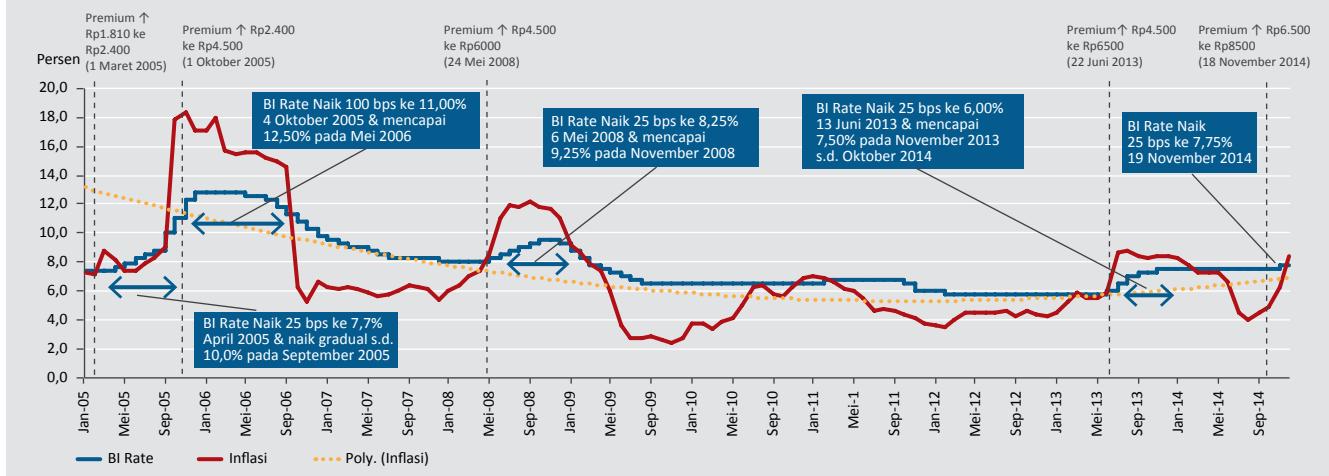
Memasuki bulan November 2014, ekspektasi inflasi terus meningkat. Di satu sisi, Bank Indonesia perlu mengendalikan ekspektasi inflasi agar tidak terakseserasi, di sisi yang lain, Bank Indonesia tidak ingin mengambil kebijakan yang kurang tepat yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan atau mengurangi kredibilitas kebijakan Bank Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka pada Rapat Dewan Gubernur tanggal 13 November 2014 Bank Indonesia memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan moneter bias ketat dengan mempertahankan suku bunga BI Rate tetap sebesar 7,50% dan suku bunga *Lending Facility* dan *Deposit Facility* masing-masing tetap sebesar 7,50% dan 5,75%.

Selain mempertahankan kebijakan bias ketat, Bank Indonesia mempersiapkan langkah-langkah dalam rangka mitigasi kenaikan tekanan inflasi jika kenaikan harga BBM bersubsidi terjadi, dengan melibatkan Tim Pengendali Inflasi di tingkat pusat (TPI) dan daerah (TPID). Penyiapan langkah-langkah pengendalian inflasi dikoordinasikan dengan Pemerintah melalui forum *High Level Meeting* TPI/TPID. Langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah disiapkan ini dikomunikasikan kepada masyarakat untuk menegaskan bahwa Bank Indonesia akan mendukung reformasi subsidi yang dilakukan Pemerintah dan siap mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan.

Pada tanggal 17 November 2014, Pemerintah mengambil langkah strategis reformasi struktural berupa kenaikan harga BBM premium dan solar sebesar Rp2.000 per liter yang diiringi dengan pengalihan anggaran subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur dan sosial. Meskipun dalam jangka pendek kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan meningkatkan tekanan inflasi, namun Bank Indonesia mendukung kebijakan tersebut mengingat bahwa langkah penting ini sangat diperlukan agar tersedia ruang fiskal bagi Pemerintah untuk meningkatkan belanja modal yang dapat memperkuat laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Menyusul langkah Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 18 November 2014, menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,75% guna menjangkar ekspektasi inflasi. Seiring dengan hal tersebut suku bunga *Lending Facility* (LF) naik sebesar 50 bps menjadi 8%. Sementara itu, suku bunga *Deposit Facility* (DF) tetap 5,75%. Pelebaran koridor suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia ditujukan untuk menghindari tekanan yang berlebihan pada likuiditas pasar keuangan dan mendukung kebijakan pendalaman pasar keuangan.

Grafik 10.3. Event Analysis Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Respons Kenaikan BI Rate



Bank Indonesia memandang perlu untuk menaikkan suku bunga kebijakan sebagai langkah *preemptive* guna memitigasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM terhadap tekanan inflasi ke depan. Meskipun peningkatan ekspektasi inflasi ini lebih merupakan *supply side shock* terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ketimbang *demand side shock*, kenaikan ekspektasi inflasi tetap perlu dikelola dengan baik. Guliran ekspektasi inflasi, jika tidak dikendalikan akan dapat menyebabkan semakin membesarnya dampak lanjut (*second round effect*) dari kenaikan harga BBM bersubsidi berupa kenaikan inflasi inti. Dengan kebijakan kenaikan suku bunga ini, tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM diharapkan hanya bersifat sementara, dan laju inflasi serta ekspektasinya ke depan tetap terjangkar pada kisaran sasarnya (Grafik 10.3). Di samping itu, kebijakan kenaikan suku bunga ini juga ditempuh untuk memastikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan tetap terkendali pada kisaran 2,5% sampai dengan 3% persen dari PDB melalui pengendalian permintaan domestik.

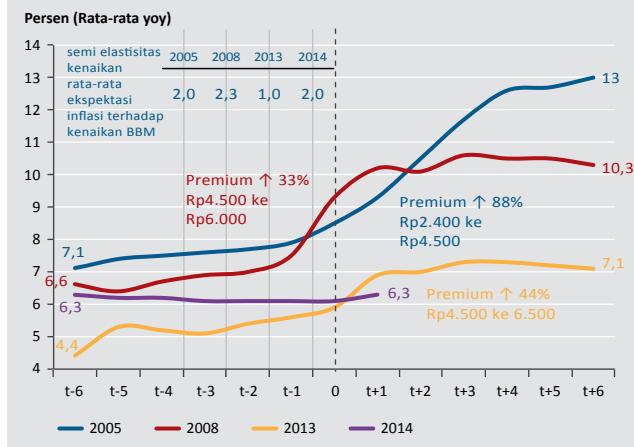
Kebijakan kenaikan suku bunga dapat meningkatkan kredibilitas pengelolaan ekonomi makro Indonesia. Respons kebijakan kenaikan suku bunga yang diambil lebih awal atau "*ahead of the curve*" ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Bank Indonesia untuk secara konsisten menjaga stabilitas kondisi ekonomi makro. Terciptanya kredibilitas yang baik ini merupakan modal dasar untuk meningkatkan kepercayaan investor tentang konsistensi dan kualitas pengelolaan kebijakan ekonomi makro Indonesia. Dalam kondisi semakin tingginya ketidakpastian global, peranan persepsi risiko investor menjadi semakin penting dalam menentukan aliran modal asing ke Indonesia. Aliran modal asing tersebut saat ini masih menjadi sumber pembiayaan yang penting bagi perekonomian Indonesia.

Kredibilitas kebijakan yang kuat juga diperlukan dalam menjangkar ekspektasi inflasi. Kebijakan Bank Indonesia yang dipandang kredibel oleh pelaku ekonomi dapat menjangkar ekspektasi inflasi pada sasarnya. Lebih lanjut, kredibilitas kebijakan yang tinggi akan mendorong pelaku ekonomi untuk lebih mengaitkan ekspektasi inflasi ke sasaran inflasi (*forward looking*).

Dari sisi besaran, kenaikan suku bunga kali ini tidak setinggi respons pada kenaikan harga BBM yang pernah terjadi karena kenaikan ekspektasi yang juga tidak setinggi sebelumnya. Kondisi ini didukung kredibilitas kebijakan moneter yang semakin kuat dan komunikasi kebijakan yang lebih efektif dari tahun ke tahun. Kredibilitas yang semakin kuat, selain menyebabkan ekspektasi lebih terkendali, juga mendorong proses penyesuaian ekspektasi inflasi menjadi semakin lebih cepat. Pada episode kenaikan harga BBM tahun 2005, butuh 6 bulan sebelum ekspektasi inflasi melambat, sementara pada 2013 hanya butuh 3 bulan (Grafik 10.4).

Kebijakan kenaikan suku bunga harus tetap diletakkan dalam konteks bauran kebijakan, mengingat respons kebijakan tidak dapat hanya bertumpu pada suku bunga. Apabila respons kebijakan terlalu bertumpu pada suku bunga maka akan diperlukan penyesuaian yang lebih besar, dengan konsekuensi terjadinya *trade-off* yang lebih besar dalam bentuk tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Langkah pengetatan kebijakan moneter yang ditempuh telah dikalibrasi dengan berhati-hati setelah menimbang dampak negatif yang dapat ditimbulkan terutama tekanan tambahan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Untuk memitigasi dampak kenaikan suku bunga ke perekonomian, Bank Indonesia memanfaatkan bauran

Grafik 10.4. Periodogram Ekspektasi Inflasi (CF) pada Periode Kenaikan Harga BBM



kebijakan secara optimal berupa kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial, kebijakan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan, kebijakan kehati-hatian terkait utang luar negeri dan dukungan sistem pembayaran yang inovatif dan handal. Dengan langkah *preemptive* yang telah ditempuh melalui kenaikan suku bunga yang diperkuat dengan kebijakan lainnya, dampak kenaikan harga BBM diperkirakan akan berlangsung secara terkendali dan temporer sekitar tiga bulan, dengan puncaknya pada bulan Desember 2014.

Passa kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan suku bunga kebijakan, inflasi meningkat sesuai dengan prakiraan. Pada November 2014, inflasi IHK mencapai 6,23% (yoy), meningkat dari 4,83% (yoy) pada bulan sebelumnya. Selain kenaikan harga BBM bersubsidi, penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) turut mendorong kenaikan inflasi dari sisi *administered prices*. Sementara itu, inflasi *volatile food* juga meningkat terkait dengan kenaikan harga aneka cabai yang tinggi. Namun demikian, inflasi inti relatif terjaga sebesar 4,21% (yoy). Mempertimbangkan hal tersebut, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) terakhir di tahun 2014, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 7,75%, dengan suku bunga *Lending Facility* dan suku bunga *Deposit Facility* masing-masing tetap pada level 8% dan 5,75%. Tingkat suku bunga tersebut dipandang masih cukup guna memastikan tekanan inflasi jangka pendek pascakebijakan realokasi subsidi BBM yang ditempuh Pemerintah tetap terkendali dan temporer sehingga akan kembali menuju ke sasaran 4±1% pada 2015. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh selama ini untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.

Di tengah perkembangan inflasi yang terkendali dan defisit transaksi berjalan yang menurun, Bank Indonesia tetap mencermati berbagai faktor risiko yang dapat mendorong inflasi melewati sasaranannya, risiko melebaranya defisit transaksi berjalan dan risiko perlambatan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi domestik. Di samping itu, Bank Indonesia juga berpendapat bahwa pengelolaan sisi permintaan ekonomi melalui kebijakan stabilisasi makro ekonomi tidaklah cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Untuk itu, kebijakan stabilisasi makroekonomi perlu didukung oleh kebijakan struktural guna menjaga pertumbuhan ekonomi tetap kuat, seimbang dan berkelanjutan dalam jangka menengah panjang.

10.2. Kebijakan Nilai Tukar

Penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia juga ditempuh melalui kebijakan nilai tukar yang ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Dalam konteks ini, Bank Indonesia menjaga perkembangan nilai tukar yang konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan serta sejalan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan valas yang terjadi di pasar berdasarkan oleh kondisi fundamental perekonomian dan pasar keuangan. Dengan demikian, menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya sangat penting untuk mendorong penyesuaian dalam perekonomian agar berjalan baik menuju arah yang lebih sehat dan *sustainable*.

Dalam rangka mengarahkan perkembangan nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya, Bank Indonesia berupaya meminimalkan volatilitas nilai tukar rupiah sehingga tidak menimbulkan tekanan lanjutan pada rupiah dalam jangka pendek. Volatilitas rupiah yang berlebihan memiliki potensi risiko dampak lanjutan pembentukan ekspektasi depresiasi dan inflasi pelaku ekonomi. Hal ini pada gilirannya dapat berisiko memberikan tekanan kepada stabilitas ekonomi dan upaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.²

Upaya Bank Indonesia tersebut menghadapi sejumlah tantangan pada tahun 2014, baik dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, kekhawatiran dampak normalisasi kebijakan the Fed, divergensi

² Pembahasan lengkap mengenai perkembangan nilai tukar rupiah terdapat pada Bab 5 Nilai Tukar.

kebijakan moneter negara maju, pemulihan ekonomi global yang tidak merata dan berjalan lambat serta menurunnya harga komoditas global yang mendorong berlanjutnya tekanan defisit transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial merupakan faktor utama tekanan terhadap rupiah. Sementara itu, dari sisi domestik, sentimen yang bersumber dari dinamika kondisi politik dalam negeri dan perkembangan kondisi fundamental ekonomi domestik yang dinilai masih memiliki kerentanan juga berdampak pada dinamika nilai tukar rupiah.

Sejumlah tantangan tersebut mewarnai pergerakan nilai tukar selama tahun 2014. Setelah mengalami penguatan pada triwulan I 2014, rupiah mengalami pelemahan pada triwulan II sampai dengan triwulan IV 2014. Pada bulan Desember 2014, tekanan terhadap rupiah dan negara kawasan meningkat tajam seiring dengan meningkat tajamnya indeks dolar. Kondisi ini disebabkan ekonomi AS terus membaik di tengah pertumbuhan negara maju lainnya atau negara berkembang yang cenderung terbatas atau bahkan melambat. Prospek AS yang membaik ini menyebabkan investor berbondong-bondong membeli aset-aset keuangan dalam denominasi dolar AS. Selain itu, ekspektasi akan ketidakpastian pasar keuangan yang cenderung meningkat seiring rencana normalisasi kebijakan the Fed, depresiasi signifikan yang dialami mata uang Rusia serta harga minyak dan komoditas lainnya yang terus turun juga mendorong investor mengalihkan investasinya ke aset-aset yang dianggap lebih aman, terutama dolar AS.

Meskipun melemah terhadap dolar AS, namun rupiah cenderung mengalami apresiasi terhadap mata uang utama lainnya termasuk mata uang negara mitra dagang utama. Rupiah menguat terhadap yen Jepang dan euro Eropa, serta terhadap mata uang negara kawasan seperti won Korea, rupee India dan ringgit Malaysia.

Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pelemahan meningkat, salah satu strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melakukan *dual intervention*, yaitu Bank Indonesia menempuh kebijakan stabilisasi rupiah melalui intervensi jual di pasar valas yang disertai dengan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi *dual intervention* ini akan mendukung kestabilan nilai tukar, likuiditas rupiah dan juga sekaligus kestabilan harga SBN. Langkah ini sekaligus menambah kepemilikan SBN Bank Indonesia yang akan digunakan sebagai *underlying instrument* dalam operasi moneter *reverse repo*. Pelaksanaan *dual intervention* dapat dilakukan secara bertahap ataupun secara simultan melalui skema transaksi pembelian valas terhadap SBN.

Langkah Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya dilakukan selaras dengan upaya Bank Indonesia untuk mendorong percepatan proses penyesuaian eksternal. Dalam konteks ini, langkah Bank Indonesia tersebut dilakukan dengan memberikan ruang penyesuaian nilai tukar yang lebih besar untuk mendorong percepatan proses penyesuaian eksternal dalam mendukung penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dan *sustainable*. Namun demikian, penyesuaian nilai tukar tersebut tetap diarahkan untuk tidak menimbulkan volatilitas berlebihan yang dapat meningkatkan ekspektasi depresiasi dan inflasi. Dalam kaitan ini maka kebijakan intervensi di pasar valas dilakukan secara terukur untuk mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valas.

Arah kebijakan nilai tukar ini tetap ditopang dengan pertimbangan tetap menjaga kecukupan cadangan devisa yang berperan sebagai *first line of defense*. Upaya memperkuat cadangan devisa ini cukup penting guna tetap memberikan keyakinan terhadap ketahanan sektor eksternal merespons ketidakpastian global yang meningkat.

Dengan dinamika nilai tukar rupiah selama 2014 tersebut, secara rata-rata, rupiah terdepresiasi 12% (yoY), dibandingkan tahun sebelumnya yang juga melemah 10,4% (yoY). Sementara itu, secara *point-to-point* atau akhir tahun 2014 dibandingkan dengan akhir tahun 2013, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 1,74%, dibandingkan tahun sebelumnya yang melemah 20,8%. Namun demikian, volatilitas rupiah menunjukkan tren penurunan. Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai 15,3% pada triwulan IV 2013, setelah itu volatilitas terus menunjukkan tren penurunan menjadi 11,5% (triwulan I 2014) hingga mencapai 8,98% (triwulan IV 2014). Volatilitas terus menurun hingga akhir tahun tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Langkah stabilisasi nilai tukar yang sejalan dengan fundamentalnya dan volatilitas yang menurun membantu mendorong perbaikan transaksi berjalan. Dilihat secara riil dan dibandingkan dengan negara mitra dagang, nilai tukar rupiah dinilai cukup kompetitif untuk mendorong ekspor di satu sisi, dan mengendalikan impor di sisi lain. Dengan harga barang impor yang relatif lebih tinggi, impor menunjukkan penurunan yang cukup membantu perbaikan defisit transaksi berjalan. Sementara itu, meskipun secara relatif harga barang ekspor menjadi lebih murah, namun permintaan global yang terbatas

menyebabkan ekspor belum terangkat signifikan. Secara keseluruhan, defisit transaksi berjalan pada tahun 2014 tercatat sebesar 3,0% dari PDB, menurun dari tahun 2013 sebesar 3,2% dari PDB.

Dengan capaian tersebut, Bank Indonesia meyakini proses penyesuaian ekonomi telah berjalan sesuai jalurnya. Meskipun demikian, dalam jangka yang lebih panjang, pembenahan struktural tetap diperlukan untuk dapat menjaga stabilitas pasar keuangan dan mengurangi risiko gejolak nilai tukar. Pembenahan tersebut antara lain mencakup struktur neraca perdagangan dan pendalamannya pasar valas.

10.3. Penguatan Operasi Moneter

Pengelolaan operasi moneter selama tahun 2014 dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu masih besarnya ekses likuiditas yang dominan ditempatkan pada instrumen berjangka waktu (tenor) pendek dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat sentimen global terkait ekspektasi *tapering* the Fed dan membaiknya indikator kondisi perekonomian AS pada akhir tahun.

Penguatan operasi moneter tahun 2014 diimplementasikan dengan melanjutkan penyerapan ekses likuiditas melalui instrumen operasi moneter bertenor lebih panjang (*lengthening*), mengurangi penggunaan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara bertahap, memaksimalkan penggunaan Surat Berharga Negara (SBN) milik Bank Indonesia melalui *Reverse Repo* SBN dan memperkuat peran Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI). Selanjutnya, untuk memperkuat pengelolaan likuiditas valas melalui operasi moneter syariah, Bank Indonesia menerbitkan instrumen baru berupa *Term Deposit Valas Syariah*.

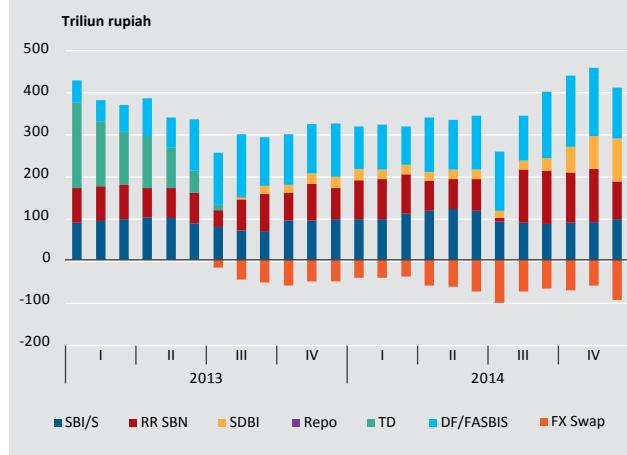
Pada semester I 2014, pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah melalui operasi moneter rupiah dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan kecukupan likuiditas rupiah dan menjaga pergerakan suku bunga PUAB O/N sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Kondisi likuiditas secara harian selama semester I 2014 menunjukkan surplus likuiditas, sehingga Bank Indonesia secara net cenderung melakukan operasi moneter yang bersifat penyerapan (absorpsi). Optimalisasi penyerapan likuiditas dilakukan dengan menerbitkan SBI/Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), SDBI serta *Reverse Repo* SBN. Dengan pengelolaan likuiditas rupiah tersebut, sepanjang semester I 2014 rata-rata harian suku bunga

PUAB O/N berada pada kisaran 5,87% atau naik 43 bps dari sebelumnya 5,44% di semester II 2013.

Posisi instrumen operasi moneter pada akhir semester I 2014 secara net tercatat sebesar Rp266,62 triliun atau menurun 2,5% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2013 sebesar Rp273,51 triliun (Grafik 10.5). Instrumen operasi moneter yang dominan menyerap kelebihan likuiditas adalah SBI-SBIS dan *Reverse Repo* SBN, dengan proporsi masing-masing sebesar 34,0% dan 21,8% dari total posisi operasi moneter. Sementara itu proporsi SDBI hanya sebesar 6,8%. Sedangkan *Term Deposit* rupiah (TD rupiah) tidak memiliki data posisi setelah dinonaktifkan sejak Juli 2013 seiring dengan kebijakan optimalisasi *Reverse Repo* SBN, SDBI dan SBI sebagai instrumen operasi moneter utama. Pada posisi yang sama, *Deposit Facility* (DF) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) secara keseluruhan memiliki proporsi 37,3% dari total posisi operasi moneter atau menurun dibandingkan dengan proporsi pada akhir tahun 2013 sebesar 39,2%.

Pada semester II 2014 pengelolaan operasi moneter masih dilakukan dengan pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah untuk menjaga pergerakan suku bunga PUAB O/N di tingkat yang wajar dan stabil, sekaligus memenuhi likuiditas perbankan secara seimbang. Likuiditas di sistem perbankan pada semester ini mengalami surplus, antara lain ditandai dengan aliran masuk likuiditas ke perbankan setelah pada akhir Juli 2014 dan adanya ekspansi keuangan pemerintah yang meningkatkan aliran masuk likuiditas ke perbankan sejak Agustus 2014. Pergerakan suku bunga PUAB O/N pada paruh kedua tahun 2014 ini menunjukkan rata-rata harian suku bunga PUAB O/N berada pada

Grafik 10.5. Posisi Instrumen Operasi Moneter



kisaran 5,84% atau turun 3 bps dari sebelumnya 5,87% di semester I 2014.

Pengelolaan likuiditas melalui operasi moneter pada semester II 2014 masih dengan mengoptimalkan pengelolaan likuiditas melalui instrumen bertenor panjang berupa SBI/SBIS, penguatan peran SDBI dan penggunaan SBN dalam *Reverse Repo* SBN. SBI/SBIS diterbitkan dengan tenor 9 bulan dengan frekuensi lelang sebanyak 1 kali sebulan. Penguatan peran SDBI dilakukan dengan menambah tenor lelang SDBI dan menambah frekuensi lelang SDBI. Tenor lelang SDBI ditambah sehingga mencakup tenor 3 bulan dan 6 bulan. Sementara itu, frekuensi lelang SDBI ditambah dari 1 kali sebulan menjadi 3 kali sebulan. Penggunaan SBN milik Bank Indonesia telah dioptimalkan dan digunakan sebagai *underlying* transaksi *Reverse Repo* SBN dengan lelang difokuskan pada tenor 1 bulan dan 2 bulan untuk mendorong pergeseran penempatan bank ke instrumen dengan tenor yang lebih panjang di SDBI dan SBI.

Posisi instrumen operasi moneter pada akhir semester II 2014 meningkat 17,6% menjadi sebesar Rp313,44 triliun dibandingkan dengan posisi semester I 2014 sebesar Rp266,62 triliun. Meskipun pada akhir semester II 2014 mengalami peningkatan, posisi instrumen operasi moneter sempat menurun menjadi sebesar Rp155,1 triliun pada bulan Juli 2014 yang dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan likuiditas pada masa libur lebaran Idul Fitri. Penurunan posisi operasi moneter terjadi pada *Reverse Repo* SBN yang hanya memiliki posisi sebesar 3,0% dari total posisi operasi moneter. Penurunan tersebut disebabkan oleh jauh lebih rendahnya jumlah penyerapan likuiditas rupiah dengan *Reverse Repo* SBN dibandingkan dengan tambahan likuiditas rupiah yang berasal dari jatuh waktu *Reverse Repo* SBN pada bulan Juli 2014.

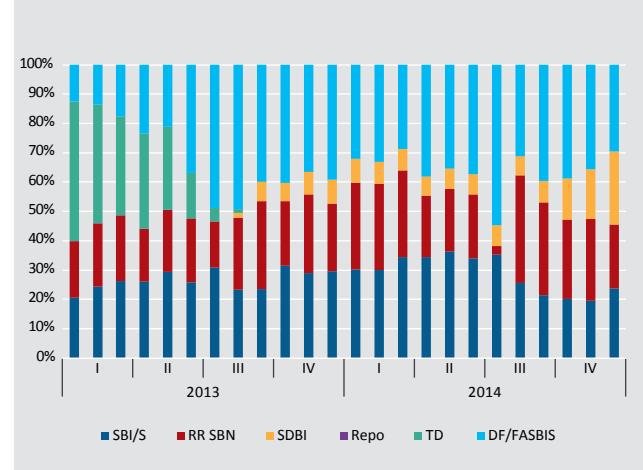
Upaya penguatan operasi moneter untuk mengurangi penggunaan SBI secara bertahap, memaksimalkan penggunaan SBN milik Bank Indonesia melalui *Reverse Repo* SBN dan memperkuat peran SDBI telah menunjukkan hasilnya pada akhir semester II 2014. Hal ini terlihat dari pergeseran proporsi posisi SBI/SBIS, SDBI dan *Reverse Repo* pada semester II 2014 dibandingkan dengan semester I 2014 sesuai arah yang diinginkan. Proporsi SBI/SBIS menurun menjadi 23,7% dari sebelumnya 34,0%. Proporsi SDBI meningkat menjadi 25,0% dari sebelumnya 6,8%. Proporsi *Reverse Repo* SBN meningkat menjadi 21,9% dari sebelumnya 21,8%. Sementara itu proporsi DF/FASBIS menurun menjadi 29,5% dari sebelumnya 37,3% (Grafik 10.6).

Selain itu, penguatan SDBI dan optimalisasi *Reverse Repo* SBN terlihat pula dari signifikannya peningkatan posisi instrumen tersebut pada akhir tahun 2014 dibandingkan dengan akhir tahun 2013. Pada akhir 2014, posisi SDBI tercatat sebesar Rp102,50 triliun atau meningkat 286,5% dari Rp26,52 triliun. Posisi *Reverse Repo* SBN sebesar Rp89,84 triliun atau meningkat 19,6% dari Rp75,15 triliun. Sementara posisi SBI/SBIS sebesar Rp97,03 triliun atau meningkat 1,0% dari Rp96,10 triliun. Sedangkan posisi DF/FASBIS sebesar Rp120,83 triliun atau menurun 5,2% dari Rp127,4 triliun.

Optimalisasi penggunaan SBN pada tahun 2014, selain dengan memaksimalkan penggunaan SBN milik Bank Indonesia melalui transaksi *Reverse Repo* SBN juga dilakukan dengan memperluas ruang pengelolaan likuiditas dengan pembelian SBN di pasar sekunder dan di pasar primer. Pembelian SBN dimaksudkan untuk menambah portfolio SBN milik Bank Indonesia (*building stock*) yang dapat digunakan sebagai *underlying* dalam *Reverse Repo* SBN. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan dengan jumlah yang terukur. Sementara itu, pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN) di pasar primer terus diupayakan oleh Bank Indonesia pada setiap pelaksanaan lelang penerbitan SPN.

Di sisi lain, upaya Bank Indonesia dalam stabilisasi nilai tukar dilakukan dengan strategi pengelolaan yang mendorong pasar bergerak sesuai dengan mekanisme pasar yang merefleksikan fundamental perekonomian Indonesia. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah antara lain stabilisasi di pasar valas domestik untuk menjaga *market confidence* dan mendorong bekerjanya mekanisme pasar dalam pemenuhan kebutuhan valas.

Grafik 10.6. Komposisi Instrumen Operasi Moneter³



³ Tidak termasuk FX Swap.

Untuk mengelola likuiditas valas perbankan, Bank Indonesia menggunakan instrumen operasi moneter valas berupa lelang *FX Swap* dan *Term Deposit Valas* (TD Valas). Lelang *FX Swap* dilakukan melalui *FX Swap jual* yang merupakan instrumen untuk menyerap likuiditas valas perbankan sekaligus menambah likuiditas rupiah. Sementara TD Valas merupakan instrumen untuk menyerap likuiditas valas perbankan. Penguatan operasi moneter valas dilakukan dengan mengeluarkan instrumen Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) Syariah dalam Valuta Asing (TD Valas Syariah) pada tanggal 24 Juli 2014.⁴ Instrumen ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan instrumen valas bagi perbankan syariah; mendukung pengelolaan likuiditas valas; membantu ketersediaan pasokan valas di pasar domestik sehingga dapat mendukung pelaksanaan operasi moneter terkait dengan stabilisasi nilai tukar; dan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung perkembangan pasar keuangan syariah domestik. Bagi Bank Indonesia, TD Valas Syariah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan likuiditas di pasar uang valas.

Penguatan operasi moneter juga dilakukan dengan memperluas surat berharga (*eligible securities*) yang dapat ditransaksikan dalam operasi moneter, khususnya dalam masa krisis. Pada tanggal 24 Desember 2014 Bank Indonesia menerbitkan penyempurnaan ketentuan operasi moneter dengan memasukkan surat berharga dalam denominasi valas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai *eligible securities* dalam transaksi repo dengan Bank Indonesia untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas perbankan pada saat krisis.⁵ Surat berharga tersebut adalah surat berharga dalam denominasi valas yang diterbitkan oleh negara lain yang bank sentralnya memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia, antara lain dalam bentuk *Cross Border Collateral Arrangement* (CBCA).

4 Ketentuan TD Valas Syariah dituangkan dalam PBI No. 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah dan Surat Edaran No. 16/13/DPM perihal Tata Cara Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) Syariah dalam Valuta Asing. *Term Deposit* Valas Syariah memiliki fitur antara lain : (i) menggunakan akad *ju'alah*, yaitu janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu ('*iwadh/ju'l*') atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan; (ii) dilakukan melalui mekanisme lelang; (iii) diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat; (iv) peserta lelang adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah memiliki ijin devisa; (v) dapat diterbitkan untuk jangka waktu 1 hari sampai dengan 12 bulan; (vi) terhadap instrumen tersebut Bank Indonesia memberikan imbalan; (vii) dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (*early redemption*).

5 Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/22/DPM perihal Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/23/DPM perihal Operasi Pasar Terbuka.

10.4. Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Di tengah upaya Bank Indonesia melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, data rata-rata harian pasar valas Indonesia tahun 2013 menunjukkan bahwa upaya tersebut memiliki tantangan berupa masih dominannya transaksi *spot* sebesar 68% di pasar valas Indonesia.⁶ Sementara itu komposisi transaksi *forward* hanya sebesar 4% dan transaksi *swap* sebesar 28%.^{7,8} Kondisi ini berbeda dengan komposisi instrumen valas di beberapa negara *emerging market* yang menunjukkan transaksi derivatif (*forward* dan *swap*) memiliki proporsi lebih tinggi (Tabel 10.1). Dengan komposisi transaksi valas seperti di Indonesia yang dominan pada transaksi *spot*, stabilitas nilai tukar rupiah sangat rentan dipengaruhi oleh mekanisme harga di pasar *spot* (*cash market*). Di sisi lain, pelaku pasar yang memiliki *exposure* terhadap valas akan menghadapi risiko nilai tukar (*exchange risk*) yang sangat tinggi.

Pada tahun 2014 Bank Indonesia melanjutkan upaya stabilisasi nilai tukar yang didukung dengan upaya pendalaman pasar valas domestik dengan mendorong pelaku pasar untuk lebih banyak melakukan transaksi valas dengan tenor yang lebih panjang dari transaksi *spot*, yaitu transaksi derivatif baik dalam bentuk transaksi *forward* atau transaksi *swap*. Hal ini dilakukan dengan melakukan relaksasi dan harmonisasi peraturan, namun tetap dengan meminimalkan spekulasi pada transaksi valas. Termasuk di dalamnya adalah mendorong pelaku pasar untuk melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*), baik *hedging* kepada bank atau *hedging* kepada Bank Indonesia.⁹

Sejalan dengan hal di atas, pada tahun 2014 Bank Indonesia juga melakukan pendalaman pasar keuangan di pasar uang dengan memperluas penggunaan *Mini Master Repo Agreement* (Mini MRA) yang telah dimulai dan ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2013.

6 Transaksi *spot* adalah transaksi jual atau beli antara dua valuta dengan penyerahan dananya dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

7 Transaksi *forward* adalah transaksi jual atau beli antara dua valuta dengan penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

8 Transaksi *swap* adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

9 Lindung nilai (*hedging*) merupakan cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.

**Tabel 10.1. Perbandingan Komposisi Instrumen Valas
Emerging Market**

Negara	Spot	Forward	Swap
Indonesia	68%	4%	28%
Korea	43%	16%	41%
Malaysia	46%	26%	28%
Meksiko	22%	6%	71%
Filipina	43%	8%	49%
Singapura	31%	18%	51%

Sumber: *Bank for International Settlements, 2013*

Sementara itu, dari sisi struktur kelembagaan pasar keuangan, Bank Indonesia menginisiasi pembentukan *Indonesia Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC) yang akan menjadi mitra strategis Bank Indonesia dalam pendalaman pasar keuangan Indonesia.

Penyempurnaan Ketentuan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

Dalam rangka meningkatkan pendalaman pasar valas domestik untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar Rupiah, khususnya untuk lebih mendorong transaksi lindung nilai (*hedging*), pada tahun 2014 Bank Indonesia mengeluarkan serangkaian penyempurnaan ketentuan terkait transaksi valas terhadap rupiah. Pada tanggal 8 April 2014 Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 16/9/PBI/2014 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank. Penyempurnaan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya lindung nilai (*hedging*) atas penghasilan investasi di Indonesia.

Penyempurnaan ketentuan mencakup dapat dilakukannya lindung nilai (*hedging*) oleh pihak asing atas penghasilan yang akan diterima (*future income*) dalam bentuk dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimanya. Lindung nilai atas dividen dimaksud hanya dapat dilakukan melalui transaksi *outright forward* jual valas terhadap rupiah bank dengan pihak asing. Dalam transaksi ini pihak asing dapat menggunakan dividen dalam rupiah yang akan diterimanya sebagai *underlying* transaksi *forward* beli valas terhadap rupiah kepada bank (dari sisi bank adalah transaksi *forward* jual valas terhadap rupiah).

Nilai lindung nilai paling banyak sebesar nilai estimasi dividen yang akan diterima pihak asing berdasarkan dokumen pendukung. Jangka waktu transaksi *hedging* paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sampai dengan jangka waktu penerimaan dividen. Dalam hal selama periode *hedging* terdapat keputusan manajemen perusahaan yang memberikan kepastian atas jumlah dan waktu penerimaan dividen yang akan diterima pihak asing, maka bank yang melakukan transaksi dengan pihak asing dimaksud wajib melakukan penyesuaian atas transaksi *hedging* tersebut. Penyesuaian transaksi *hedging* dapat dilakukan melalui transaksi *forward*, *swap*, dan/atau pengakhiran lebih awal (*early termination*) dengan setelmen dapat dilakukan secara *netting*.¹⁰

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Bank Indonesia menerbitkan 3 (tiga) PBI terkait transaksi valas terhadap rupiah yaitu (i) PBI No. 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik; (ii) PBI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing; dan (iii) PBI No. 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No. 15/8/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank. Ketiga ketentuan tersebut berlaku sejak tanggal 10 November 2014 dan secara keseluruhan dimaksudkan untuk memberikan relaksasi dan penegasan mengenai *underlying* transaksi valas terhadap rupiah dan penegasan dapat dilakukannya penyelesaian secara *netting* pada transaksi valas terhadap rupiah. Dengan penerbitan 3 (tiga) PBI tersebut, dilakukan juga pencabutan atas 6 (enam) PBI terkait.¹¹

Penyempurnaan ketentuan *underlying* transaksi valas terhadap rupiah dilakukan dengan memperluas sekaligus menyederhanakan cakupan *underlying* transaksi transaksi valas terhadap rupiah, yaitu mencakup seluruh kegiatan perdagangan dan jasa di dalam negeri dan di luar negeri, serta seluruh kegiatan investasi berupa *direct investment*, *foreign direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman modal dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri, dengan beberapa pengaturan pengecualian. Dokumen

10 *Netting* merupakan cara penyelesaian/setelmen transaksi valas yang melibatkan dua pihak dengan hanya menyerahkan dana sebesar selisih kewajiban masing-masing pihak.

11 Enam PBI yang dicabut mencakup PBI No. 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank; PBI No. 10/37/PBI/2008 dan PBI No. 11/14/PBI/2009 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah; PBI No. 7/14/PBI/2005, PBI No. 14/10/PBI/2012 dan PBI No. 16/9/PBI/2014 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

underlying transaksi valas terhadap rupiah dapat berupa dokumen yang bersifat final atau yang bersifat perkiraan. Penyelesaian transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang didukung oleh *underlying* juga dapat dilakukan secara *netting* untuk perpanjangan (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) dan pengakhiran transaksi (*unwind*). Selain itu, ditegaskan pula bahwa transaksi valas terhadap rupiah antar bank tidak perlu disertai dengan *underlying* transaksi.

Terdapat juga pengaturan atas batas nilai nominal (*threshold*) transaksi valas terhadap rupiah. Transaksi valas terhadap rupiah dengan nilai di atas *threshold* wajib disertai dengan dokumen *underlying*. Untuk transaksi antara bank dengan pihak domestik, nilai *threshold* pembelian valas adalah sebesar 100.000 (seratus ribu) dolar AS per bulan per nasabah atau ekuivalennya, baik pada transaksi *spot* maupun derivatif. Sedangkan nilai *threshold* penjualan valas adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) dolar AS per transaksi.

Untuk transaksi antara bank dengan pihak asing, nilai *threshold* pembelian valas asing adalah sebesar 100.000 (seratus ribu) dolar AS per bulan per pihak asing atau ekuivalennya yang dilakukan melalui transaksi *spot*. Sedangkan nilai *threshold* untuk pembelian valas melalui transaksi derivatif adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) dolar AS per transaksi pihak asing atau per posisi per bank atau ekuivalennya. Untuk nilai *threshold* penjualan valas adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) dolar AS per transaksi per pihak asing atau per posisi per bank, atau ekuivalennya, untuk transaksi derivatif. Dengan penyempurnaan ketentuan ini diharapkan pasar valas domestik akan semakin dalam yang ditandai oleh ketersediaan likuiditas yang memadai, kemudahan dalam pelaksanaan transaksi, harga yang wajar dan risiko yang minimal guna menjaga stabilitas perekonomian.

Penyempurnaan Ketentuan *Swap Lindung Nilai* kepada Bank Indonesia

Selain menyempurnakan pengaturan pada transaksi valas terhadap rupiah antara bank dengan nasabah (domestik dan pihak asing) dan transaksi lindung nilai kepada bank, Bank Indonesia juga menyempurnakan pengaturan transaksi *swap lindung nilai* kepada Bank Indonesia. Pada tanggal 28 Januari 2014 Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 16/2/DPM perihal Transaksi *Swap Lindung Nilai* kepada Bank Indonesia yang merupakan aturan pelaksanaan dari PBI No. 15/17/PBI/2013 tentang

Transaksi *Swap Lindung Nilai* kepada Bank Indonesia yang ketentuannya mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2014.

Instrumen *swap lindung nilai* kepada Bank Indonesia ini berupa transaksi *swap beli bank* dalam valas terhadap rupiah untuk meminimalkan risiko nilai tukar dan meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia. Melalui transaksi tersebut, bank dapat melakukan aktivitas lindung nilai (*hedging*) atas kegiatan ekonomi baik atas nama nasabah maupun atas nama bank. Cakupan kedua ketentuan di atas meliputi perluasan cakupan *underlying* transaksi (mencakup *underlying* transaksi milik nasabah dan *underlying* transaksi milik bank), perpanjangan tenor transaksi, penegasan bahwa setelmen perpanjangan transaksi *swap lindung nilai* kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara *netting*, dan pengaturan mekanisme dan dokumentasi transaksi.

Kemudian pada tanggal 17 September 2014, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 16/19/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No. 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap Lindung Nilai* kepada Bank Indonesia. Penyempurnaan pengaturan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi *swap lindung nilai* kepada Bank Indonesia yang selanjutnya diharapkan memberikan dampak positif bagi upaya percepatan pendalamannya pasar valas domestik.

Penyempurnaan ini semakin meningkatkan fleksibilitas dalam transaksi lindung nilai kepada Bank Indonesia. Fleksibilitas terlihat dari penambahan *underlying* transaksi yang dimiliki oleh bank yang dapat digunakan dalam transaksi *swap lindung nilai* kepada Bank Indonesia, yaitu dalam bentuk dana usaha yang dinyatakan (*declared dana usaha*).¹² Hal ini melengkapi *underlying* transaksi milik bank yang sebelumnya hanya berupa pinjaman luar negeri bank dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang. Tenor perpanjangan transaksi juga diperluas dengan menambahkan perpanjangan sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai, dengan perpanjangan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Selain itu, terdapat penegasan bahwa setelmen perpanjangan transaksi *swap lindung nilai* kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara *netting* dan penegasan bahwa transaksi *swap lindung nilai* kepada Bank Indonesia dapat dianggap sebagai penerusan

¹² Dana usaha yang dinyatakan (*declared dana usaha*) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

(*pass-on*) posisi transaksi derivatif bank dengan pihak terkait bank.

Perluasan Penggunaan Mini MRA

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan bersama antara 8 bank pionir pada tanggal 18 Desember 2013, Bank Indonesia memfasilitasi upaya perluasan penggunaan *Mini Master Repo Agreement* (Mini MRA) oleh 38 bank lainnya yang ditandatangani tanggal 13 Februari 2014. Implementasi Mini MRA dimaksudkan untuk mendukung pendalaman pasar uang rupiah dengan cara mendorong penggunaan kontrak standar dalam transaksi repo antar bank, sehingga mempermudah, mempersingkat waktu dan meminimalkan potensi risiko pelaksanaan transaksi repo antar bank. Penandatanganan penggunaan Mini MRA yang difasilitasi oleh Bank Indonesia tersebut, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian bilateral antar sesama bank oleh masing-masing bank.

Hingga akhir tahun 2014 jumlah bank yang menyepakati penggunaan Mini MRA dalam bertransaksi *interbank Repo* telah mencapai 67 bank. Selain bertambah jumlahnya, bank pengguna Mini MRA juga semakin luas dan telah mewakili seluruh kelompok bank BUKU 1 sampai dengan BUKU 4 dan telah mencakup bank pembangunan daerah (BPD), bank umum swasta nasional, bank asing/campuran dan bank persero. Dengan penggunaan Mini MRA sebagai perjanjian standar, pelaksanaan transaksi menjadi lebih praktis karena bank pengguna hanya perlu sekali saja untuk menandatangani perjanjian. Pelaksanaan transaksi repo selanjutnya dapat mengacu pada MRA sebagai payung dalam melakukan transaksi.

Seiring dengan terbentuknya kesepakatan penggunaan perjanjian standar dalam bertransaksi repo, perkembangan transaksi repo pasca Mini MRA tercatat meningkat signifikan, yaitu dari rata-rata harian Rp132 miliar pada periode Januari–November 2013 menjadi Rp5.513 miliar pada periode Januari–November 2014. Suku bunga pada transaksi repo juga telah cenderung berada di bawah suku bunga transaksi *uncollateralized* di PUAB pada tenor yang sama.¹³

¹³ Selama tahun 2014 rata-rata suku bunga tenor 1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan di transaksi repo sebesar 6,30%, 6,43% dan 7,11%, sedangkan di transaksi *uncollateralized* di PUAB sebesar 6,34%, 6,29% dan 7,53%.

Rekomendasi ABS dan SFEMC (Singapura) menggunakan JISDOR sebagai Referensi Harga

Kebijakan Bank Indonesia untuk mempublikasikan kurs referensi *spot* rupiah/USD yaitu Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada Mei 2013 telah mendapat respons positif dari pelaku pasar di luar negeri, khususnya di Singapura. Pada tanggal 18 Februari 2014, ABS *Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (ABS Co)* dan *The Singapore Foreign Exchange Markets Committee (SFEMC)* merekomendasikan kepada pelaku pasar keuangan di Singapura untuk menggunakan JISDOR sebagai referensi harga sejak 28 Maret 2014. JISDOR merupakan harga *spot* USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi valas terhadap rupiah antar bank di pasar valas domestik.

JISDOR dimaksudkan untuk memberikan referensi harga pasar yang representatif untuk transaksi *spot* USD/IDR pasar domestik. Penggunaan JISDOR sebagai referensi harga USD/IDR di pasar keuangan Singapura, menunjukkan pengakuan terhadap kredibilitas JISDOR sebagai referensi harga yang terbentuk dari transaksi USD/IDR di pasar valas domestik. Dengan demikian, transaksi di pasar keuangan internasional yang terkait dengan USD/IDR dapat sejalan dengan perkembangan harga USD/IDR di pasar valas domestik. Selain itu, penggunaan JISDOR sebagai referensi juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar keuangan internasional guna mendorong proses pendalaman pasar keuangan domestik.

Pembentukan *Indonesia Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC)

Upaya pendalaman pasar keuangan dilakukan pula oleh Bank Indonesia dengan penguatan struktur kelembagaan di pasar keuangan. Bank Indonesia menginisiasi pembentukan Komite Pasar Valuta Asing Indonesia atau *Indonesia Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (SK GBI) No. 16/1/KEP.GBI/2014 tanggal 1 April 2014.

Pembentukan IFEMC bertujuan untuk mendorong perkembangan pasar keuangan yang dalam dan efisien, memperkuat integritas dan reputasi pasar keuangan Indonesia serta mendukung perekonomian nasional. Pada tahap awal, pembentukan IFEMC adalah untuk mendukung perkembangan pasar valas Indonesia dan secara bertahap akan diperluas ke pasar keuangan lainnya. Selama tahun 2014, Bank Indonesia telah melibatkan IFEMC sebagai

mitra aktif dalam upaya pendalaman pasar keuangan di Indonesia.

IFEMC mempunyai kewenangan untuk (i) menyusun atau menetapkan *code of conduct* yang berlaku bagi seluruh pelaku pasar keuangan Indonesia; (ii) menyusun dan menetapkan mekanisme *enforcement* pelaksanaan *code of conduct* dalam bertransaksi di pasar keuangan; (iii) menyediakan forum diskusi dan pertukaran informasi di pasar keuangan dan pasar keuangan internasional terkait lainnya; (iv) melakukan mediasi atas perselisihan yang ada di pasar keuangan Indonesia; dan (v) membentuk Sub-Committee dan/atau *Working Group* yang menjalankan suatu fungsi spesifik atau yang bersifat *ad hoc*.

Susunan kepengurusan IFEMC terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi *dealer (Association Cambiste Internationale (ACI) Indonesia)*, asosiasi bankir (Ikatan Bankir Indonesia) dan perbankan. Anggota kepengurusan IFEMC mempunyai tanggung jawab untuk menghadiri pertemuan dan tidak dapat diwakilkan; memberikan kontribusi dan pendapat dalam setiap pertemuan; mengutamakan kepentingan pasar valas Indonesia; dan menjaga reputasi dan nama baik IFEMC.

Sebagai langkah awal dalam rangka meningkatkan kredibilitas pasar keuangan Indonesia, Bank Indonesia telah mendorong dan memberikan masukan kepada IFEMC untuk menyusun suatu acuan dalam bentuk *market conduct* bagi pelaku pasar keuangan Indonesia, terutama di pasar valas dan pasar uang. Pada tanggal 26 Mei 2014, IFEMC telah meluncurkan *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in the Financial Market* dan secara simbolik telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai wujud kesepakatan para pelaku pasar kepada otoritas untuk turut serta membangun pasar keuangan Indonesia yang kredibel, resilien, terjaga stabilitasnya, terus berkembang dan kondusif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, serta mampu bersaing di pasar internasional.

Penerbitan Pedoman Penyusunan SOP Kegiatan Lindung Nilai BUMN

Belajar dari pengalaman krisis keuangan 1997-1998, Bank Indonesia secara berkesinambungan berupaya mendorong agar pelaku ekonomi dapat mengelola kebutuhan valasnya dan risiko nilai tukar yang dihadapi. Selain sejalan dengan upaya mendukung stabilitas nilai tukar, pengelolaan risiko nilai tukar (antara lain melalui transaksi derivatif) juga

berguna dalam melindungi kondisi keuangan korporasi, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Upaya mendorong kegiatan lindung nilai oleh Bank Indonesia dilakukan melalui penyempurnaan berbagai ketentuan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perbankan dalam memenuhi kebutuhan transaksi valas nasabah, khususnya yang dilakukan dalam rangka lindung nilai.

Sejalan dengan meningkatnya urgensi agar BUMN dapat melakukan lindung nilai, Bank Indonesia melakukan upaya koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendorong hal tersebut. Hasil dari forum koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, bank BUMN, dan beberapa BUMN besar telah ditindaklanjuti dengan penerbitan ketentuan¹⁴ baik oleh Bank Indonesia maupun Kementerian BUMN untuk mendorong kegiatan lindung nilai.

Menindaklanjuti berbagai upaya tersebut, beberapa BUMN besar telah melakukan persiapan infrastruktur pendukung pelaksanaan kegiatan lindung nilai antara lain: SDM, sistem, dan kebijakan transaksi lindung nilai termasuk di dalamnya penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)*. Akan tetapi, masih terdapat kekhawatiran BUMN untuk melaksanakan lindung nilai akibat risiko hukum yang mungkin timbul dari adanya selisih kurs. Kekhawatiran tersebut umumnya terkait potensi timbulnya selisih kurs negatif yang dapat dianggap sebagai kerugian negara dan digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Kekhawatiran terkait risiko di atas disebabkan masih terbatasnya pemahaman pemegang saham, auditor, dan penegak hukum terkait esensi dari kegiatan lindung nilai melalui transaksi derivatif, terutama terkait selisih kurs negatif yang sering dianggap sebagai kerugian. Padahal, selisih kurs negatif merupakan biaya yang harus dibayar oleh BUMN untuk mengurangi ketidakpastian usaha (*business uncertainty*).

Bertolak dari permasalahan tersebut, Bank Indonesia, penegak hukum, auditor, dan lembaga terkait lainnya sepakat untuk bersama-sama mengeliminasi kekhawatiran tersebut. Untuk itu, pimpinan 8 (delapan) lembaga tinggi/auditor/penegak hukum, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian

14 Ketentuan tersebut antara lain: PBI No. 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank sebagaimana diubah oleh PBI No. 16/18/PBI/2014; PBI No. 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap Lindung Nilai* kepada Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan PBI No. 16/19/PBI/2014; dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN.

Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara BUMN, melakukan pertemuan dalam rangka membahas upaya meredam gejolak nilai tukar serta mewujudkan pasar valas yang maju dan sehat. Tindak lanjut pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepahaman. Pertama, terdapat konsekuensi biaya atas selisih kurang yang timbul dari transaksi lindung nilai. Biaya tersebut bukan merupakan kerugian negara sepanjang transaksi dilakukan secara konsisten, konsekuen, dan akuntabel serta tidak terdapat unsur melanggar peraturan/hukum yang berlaku. Kedua, belum terdapat pedoman pelaksanaan transaksi lindung nilai sebagai acuan bagi BUMN dalam pelaksanaan transaksi lindung nilai sehingga tidak terdapat referensi bagi penegak hukum dan auditor dalam pemeriksaan pelaksanaan transaksi lindung nilai. Ketiga, perlunya membentuk sebuah Tim Teknis (Tim Kerja) yang bertugas melakukan *review* ketentuan dan memperjelas aturan pelaksanaannya, serta selanjutnya melakukan sosialisasi secara luas. Sebagai tindak lanjut, Tim Teknis sepakat untuk membuat Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)* Kegiatan Lindung Nilai untuk dapat mendukung pelaksanaan transaksi lindung nilai secara konsisten, konsekuen, dan akuntabel.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Tim Teknis menyusun Pedoman Penyusunan SOP Kegiatan Lindung Nilai yang dinilai telah lengkap dan disetujui oleh auditor dan penegak hukum, dan telah di-*launching* secara resmi pada tanggal 16 Oktober 2014 dan dihadiri oleh pimpinan dari lembaga tinggi, auditor, penegak hukum, serta lembaga terkait lainnya.

Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat/anggota di masing-masing institusi, sosialisasi dan internalisasi akan dilakukan secara intensif di masing-masing lembaga terkait. Tidak berhenti sampai di sini, Bank Indonesia bersama-sama lembaga terkait akan terus berkoordinasi untuk mendorong pelaksanaan transaksi lindung nilai baik oleh BUMN, Kementerian, lembaga negara lainnya, hingga pelaku usaha non BUMN yang memiliki *exposure* yang cukup besar terhadap nilai tukar.

10.5. Kebijakan Pengelolaan Lalu Lintas Devisa

Untuk mendukung upaya stabilisasi nilai tukar, bauran kebijakan Bank Indonesia juga diperkuat dengan kebijakan di bidang pengelolaan lalu lintas devisa yang difokuskan pada upaya memperkuat resiliensi perekonomian domestik terhadap risiko tingginya utang luar negeri di

tengah meningkatnya ketidakpastian global. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan struktur pasar valas domestik dengan *supply-demand* di pasar valas domestik yang relatif berimbang selama 2014.

Selama 2014, *net demand* pelaku dalam negeri dapat diimbangi oleh pasokan dari pelaku nonresiden. Terdapat tekanan permintaan valas terutama terjadi pada triwulan III dan IV seiring meningkatnya kebutuhan valas pelaku dalam negeri. Secara keseluruhan 2014, pasar valas mencatat *net demand* tipis sebesar 1,1 miliar dolar AS setelah mengalami *net demand* 34,9 miliar dolar AS pada 2013. Pelaku dalam negeri sendiri melakukan *net demand* 19,2 miliar dolar AS (relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2013) namun mampu diimbangi oleh pasokan pelaku nonresiden yang mencapai 18,2 miliar dolar AS. Penurunan *net demand* dalam negeri pada tahun 2014 tersebut seiring dengan membaiknya kondisi neraca transaksi berjalan dan meningkatnya pasokan valas.

Sepanjang tahun 2014, peningkatan pasokan valas muncul terutama dari sektor swasta dalam bentuk utang luar negeri (ULN). Peningkatan jumlah ULN swasta yang pesat ini dilatarbelakangi oleh permintaan domestik yang tinggi untuk menopang aktivitas ekonomi domestik di tengah melimpahnya dana asing. Dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun, jumlah ULN sektor swasta meningkat tiga kali lipat, yaitu dari 54,3 miliar dolar AS pada akhir 2005 menjadi 163,2 miliar dolar AS pada Oktober 2014. Posisi ULN swasta pada akhir 2014 ini bahkan telah mencapai 55,7% dari total ULN Indonesia yang sebesar 293 miliar dolar AS. Dari ULN swasta tersebut sekitar 30% merupakan ULN jangka pendek.

Peningkatan ULN swasta terutama dalam bentuk jangka pendek memunculkan beberapa risiko, yaitu risiko nilai tukar (*currency risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), dan risiko beban utang yang berlebihan (*overleverage risk*). Pertama, risiko nilai tukar cukup tinggi karena sebagian besar ULN digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang berorientasi domestik dengan pendapatan dalam rupiah. Risiko nilai tukar juga semakin tinggi karena minimnya penggunaan instrumen lindung nilai (*hedging*) di kalangan korporasi. Kedua, peningkatan ULN yang signifikan memunculkan risiko likuiditas juga cukup tinggi karena jumlah dan pangsa ULN swasta berjangka pendek terus meningkat. Sementara itu, sumber pembiayaan jangka pendek tersebut digunakan untuk kegiatan operasional yang cenderung kurang likuid. Ketiga, munculnya peningkatan risiko *overleverage* yang terlihat dari semakin meningkatnya rasio utang terhadap pendapatan.

Risiko ULN swasta juga semakin tinggi sejalan dengan prospek perekonomian global yang masih diliputi oleh berbagai ketidakpastian. Likuiditas global diperkirakan akan mengetat dengan tingkat suku bunga yang meningkat seiring berakhirnya kebijakan moneter akomodatif di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat. Pada saat yang bersamaan, ekonomi negara-negara *emerging market* yang menjadi mitra dagang utama Indonesia diperkirakan masih akan mengalami perlambatan disertai dengan harga komoditas ekspor di pasar internasional yang masih rendah sehingga potensi pendapatan ekspor dalam negeri akan menurun. Kondisi ini menyebabkan beban pembayaran ULN berpotensi meningkat, sebaliknya kapasitas membayar ULN berpotensi menurun.

Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/20/PBI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Boks 10.1.). Selanjutnya, Bank Indonesia juga menerbitkan PBI No. 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dan Surat Edaran (SE) Ekstern No. 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank yang merupakan penyempurnaan ketentuan PBI No. 16/20/PBI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tersebut. Penerbitan ketentuan dimaksud untuk menyelaraskan dengan praktek umum kegiatan usaha, upaya mendorong pembangunan infrastruktur serta menyelaraskan dengan ketentuan Bank Indonesia lainnya yang akan dikeluarkan.

Sementara itu, untuk lebih mendukung struktur pasokan valas yang lebih kuat, Bank Indonesia melanjutkan relaksasi ketentuan pembelian valas bagi eksportir yang telah melakukan penjualan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi eksportir melakukan pembelian valas dengan menggunakan bukti (*underlying*) dokumen penjualan valas yang pernah dilakukan sebelumnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi eksportir melakukan pembelian valas dengan menggunakan bukti dokumen penjualan valas yang pernah dilakukan sebelumnya.

Dalam rangka penyempurnaan ketentuan terkait DHE, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 16/10/PBI/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. Ketentuan tersebut menyempurnakan ketentuan terkait yang diatur

melalui PBI sebelumnya No. 14/25/PBI/2012. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri melalui perbankan di Indonesia guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri.

Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan memperpendek *month holding period* (MHP) SBI menjadi 1 bulan yang mulai berlaku sejak September 2013. Kebijakan ini merupakan bagian dari *capital flow management*, yaitu dengan memberikan insentif bagi masuknya aliran modal asing ke dalam pasar keuangan domestik. Selain merupakan bagian dari pengelolaan lalu lintas devisa, kebijakan tersebut juga memperkuat pengelolaan likuiditas, meningkatkan efektivitas operasi moneter dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Seluruh kebijakan pengelolaan lalu lintas devisa yang ditempuh Bank Indonesia selama tahun 2014 pada akhirnya mendorong pasokan dan permintaan yang lebih seimbang pada pasar valas. Dipertahankannya kebijakan MHP selama 1 bulan dapat menahan *outflow* nonresiden pada SBI yang terjadi sejak pertengahan 2014. Setelah mengalami *net inflow* pada paruh pertama 2014 sebesar 0,93 miliar dolar AS, nonresiden mencatat *net outflow* pada paruh kedua 2014 sebesar 1,06 miliar dolar AS. Secara total, pada instrumen SBI, nonresiden mencatat *net outflow* tipis sebesar 135,9 juta dolar AS sejalan dengan beberapa SBI yang telah jatuh tempo. Sementara itu, pasokan dari penarikan DHE ke perbankan domestik sudah meningkat. Porsi DHE ke perbankan domestik terhadap transaksi ekspor pada tahun 2014 tercatat sekitar 89%, meningkat dari 84% pada 2013.

Untuk lebih memperkuat keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar valas domestik, pendalaman pasar valas terus dilakukan dengan memperkaya instrumen, memperluas basis investor dan mendorong investasi ke jangka waktu yang lebih panjang. Dalam jangka yang lebih panjang, keseimbangan pasokan dan permintaan valas juga diperkuat dengan kebijakan struktural antara lain dengan menciptakan insentif untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat industri substitusi impor.

10.6. Penguatan Jaring Pengaman Keuangan Internasional

Dalam rangka memperkuat strategi bauran kebijakan Indonesia, sepanjang tahun 2014, Bank Indonesia terus

melakukan upaya penguatan jaringan pengaman keuangan internasional melalui peningkatan kerjasama antar otoritas di bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan. Upaya dilakukan melalui penguatan *Regional Financial Arrangement* (RFA) dalam skema *Chiang-Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) dan kerjasama dalam bentuk transaksi *swap* secara bilateral dengan negara-negara mitra ASEAN dalam ASEAN+3 (Tabel 10.2). Keberadaan kerjasama tersebut diharapkan dapat menjadi *second line of defense* dalam menghadapi fenomena ekonomi global yang masih tidak menentu.

CMIM merupakan inisiatif kerjasama keuangan dalam bentuk *pool of commitment* yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral antar negara ASEAN+3. Pada tahun 2014, kerjasama tersebut telah mencatat momentum penting dengan ditandatangannya Amandemen Perjanjian CMIM sehingga peningkatan kapasitas CMIM yang disepakati berlaku efektif sejak 17 Juli 2014. Elemen penguatan kapasitas CMIM yang tercakup dalam Amandemen Perjanjian itu mencakup sejumlah aspek, yaitu peningkatan volume fasilitas kerjasama dari 120 miliar dolar AS menjadi 240 miliar dolar AS, tersedianya fasilitas CMIM *Precautionary Line* (PL) untuk mencegah krisis sebagai tambahan atas fasilitas resolusi krisis yang telah ada, dan peningkatan IMF *de-linked portion*¹⁵ dari 20% menjadi 30%. Dengan adanya peningkatan volume fasilitas kerja sama CMIM, hak akses masing-masing negara ASEAN+3 terhadap fasilitas CMIM juga meningkat. Untuk Indonesia, akses pada fasilitas bantuan likuiditas ini mengalami peningkatan dari semula 11,38 miliar dolar AS menjadi sebesar 22,76 miliar dolar AS (dari total 240 miliar dolar AS).

Selain langkah-langkah penguatan tersebut di atas, negara-negara ASEAN+3 selama tahun 2014 juga melakukan upaya penguatan untuk menjamin kelancaran implementasi CMIM. Upaya itu termasuk penyelesaian penyusunan *Operational Guideline* Perjanjian CMIM dengan bantuan ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO). Panduan operasional tersebut ditujukan untuk mendukung efisiensi dan kecepatan pemenuhan bantuan kepada negara anggota guna mencegah pemburukan kondisi ekonomi manakala dihadapkan pada ancaman krisis. Di samping itu, sebuah set indikator kerentanan juga terus digarap dan disempurnakan oleh AMRO bersama negara anggota ASEAN+3 guna menentukan kualifikasi bagi

negara anggota yang mendapatkan fasilitas pendanaan pencegahan krisis CMIM.

Status kelembagaan AMRO pun telah ditingkatkan. Semula berbentuk perseroan terbatas, lembaga yang berbadan hukum Singapura itu kini menjadi sebuah organisasi internasional setelah seluruh negara anggota ASEAN+3 membubuhkan penandatanganan *AMRO Agreement* pada 10 Oktober 2014. Status AMRO sekarang sudah setara dengan lembaga keuangan internasional lain seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *Asian Development Bank* (ADB). Dengan peningkatan status ini, AMRO diharapkan dapat lebih efektif menjalankan peran sebagai lembaga *surveillance* regional yang independen di kawasan.

Selain penguatan skema CMIM, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama dalam bentuk transaksi *swap* secara bilateral dengan negara-negara mitra ASEAN dalam ASEAN+3, baik dalam bentuk *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) maupun *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) (Tabel 10.2). BSA merupakan salah satu fasilitas pemupukan cadangan devisa dengan menggunakan metode transaksi *swap* USD dengan rupiah yang bertujuan untuk mengatasi masalah neraca pembayaran dan kesulitan likuiditas jangka pendek. Sementara itu, BCSA adalah kerja sama bilateral dalam bentuk *swap* mata uang domestik masing-masing negara yang bertujuan untuk mendorong perdagangan dan/atau investasi antara kedua negara. Dalam konteks ini, BCSA dapat dipandang sebagai alternatif instrumen kebijakan dalam memelihara ketebalan nilai rupiah dengan cara mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap penggunaan USD untuk setelmen transaksi perdagangan.

Melengkapi BSA dengan Bank of Japan (BOJ) dan BCSA dengan People Bank of China (PBOC) yang telah disepakati pada waktu sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia dan Bank of Korea (BOK) bersepakat menandatangani perjanjian kerja sama *swap KRW/IDR* pada 6 Maret 2014. Kerjasama *swap KRW/IDR* senilai KRW10,7 triliun/Rp115 triliun (setara 10 miliar dolar AS) ini berlaku efektif selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. BCSA tersebut bertujuan untuk mempromosikan kegiatan perdagangan dan investasi serta memperkuat kerjasama keuangan yang bermanfaat bagi Indonesia dan Korea. Kesepakatan BCSA yang dijalin kedua bank sentral tersebut juga telah memberikan *announcement effect* positif ke pasar keuangan domestik dan internasional.

15 IMF *de-linked portion* adalah batas maksimal akses fasilitas bantuan likuiditas dari CMIM yang tidak disertai kewajiban untuk mengaktifkan program IMF.

Tabel 10.2. Kerjasama Swap Arrangement

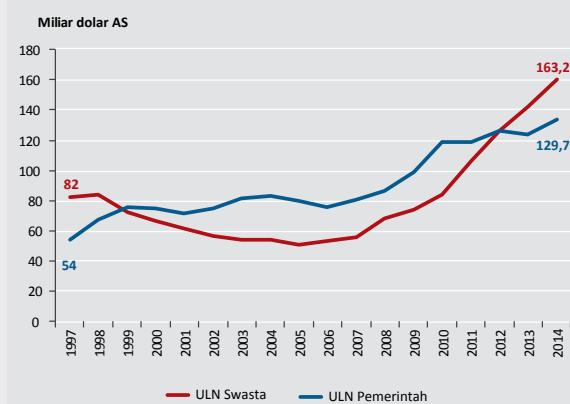
No.	Jenis Fasilitas	Tujuan Fasilitas	Nilai Fasilitas	Penandatanganan Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan
1.	ASEAN Swap Arrangement	Kerjasama multilateral dalam bentuk <i>swap</i> antara USD/Yen/Euro dengan mata uang domestik sepuluh negara ASEAN, yang bertujuan untuk menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek (maksimum 1 tahun) bagi negara anggota yang mengalami permasalahan neraca pembayaran	USD 2 miliar (maksimum fasilitas yang dapat ditarik Indonesia sebesar Rp 600 juta)	17 November 2013	2 tahun	Perpanjangan beberapa kali sejak penandatanganan pertama November 2005
2.	CMIM	Kerjasama multilateral dalam bentuk <i>swap</i> antara USD dengan mata uang domestik negara anggota ASEAN+3 yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan	USD 240 miliar (maksimum fasilitas yang dapat ditarik Indonesia sebesar USD 22,76 miliar)	17 Juli 2014	Tidak terbatas	Amandemen Perjanjian untuk penguatan fasilitas CMIM. Perjanjian awal ditandatangani Maret 2010
3.	Bilateral Swap Arrangement Indonesia - Jepang	Kerjasama bilateral dalam bentuk <i>swap</i> USD dengan rupiah yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas valas akibat permasalahan neraca pembayaran dan kesulitan likuiditas jangka pendek dalam valas	USD 22,76 miliar	12 Desember 2013	3 tahun	Perpanjangan beberapa kali sejak penandatanganan pertama Februari 2003, dengan peningkatan nilai dan jenis fasilitas
4.	Bilateral Currency Swap Arrangement BI - PBOC	Kerjasama bilateral keuangan dalam bentuk <i>swap</i> CNY dan rupiah, yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia dan Tiongkok, dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak	CNY 100 miliar (ekuivalen Rp 150 triliun)	1 Oktober 2013	3 tahun	Perpanjangan, penandatanganan pertama Maret 2009
5.	Bilateral Currency Swap Arrangement BI - BOK	Kerjasama bilateral keuangan dalam bentuk <i>swap</i> KRW dan rupiah, yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea dan memperkuat kerjasama keuangan yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi kedua negara	KRW 10,7 triliun / Rp 115 triliun (ekuivalen USD 10 miliar)	16 Maret 2014	3 tahun	

Utang Luar Negeri (ULN) swasta di Indonesia berada dalam tren meningkat sejak tahun 2007 sehingga porsi ULN swasta menjadi lebih tinggi dari ULN Pemerintah. Pada akhir 2014, ULN swasta mencapai 163,2 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dari jumlah ULN Pemerintah sebesar 129,7 miliar dolar AS (Grafik 1). ULN swasta meningkat tajam sejalan dengan permintaan pendanaan yang tinggi untuk menopang aktivitas perekonomian. Selain itu, ketersediaan dana luar negeri yang melimpah dengan biaya yang lebih murah dibandingkan pendanaan dalam negeri, semakin mendorong sektor swasta untuk menambah posisi ULN.

Peningkatan ULN swasta tersebut memberikan potensi risiko makroekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Di sisi eksternal, kemungkinan pengetatan likuiditas global dan tren penurunan harga komoditas ekspor dapat mengurangi kemampuan membayar perusahaan-perusahaan terutama eksportir, sehingga dapat menimbulkan risiko *currency mismatch* dan risiko *liquidity*. Sementara itu di sisi domestik, peningkatan ULN disertai dengan peningkatan indikator *debt service ratio* (DSR) yang menunjukkan potensi risiko *overleverage* (Grafik 2).

Untuk memitigasi munculnya ketiga risiko tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 16/20/PBI/2014 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan ULN Korporasi Nonbank pada tanggal 28 Oktober 2014

Grafik 1. ULN Swasta dan Pemerintah

Grafik 2. *Debt Service Ratio* dan *Debt to GDP* Indonesia

yang disempurnakan melalui PBI No.16/21/PBI/2014 dan SE No.16/24/DKEM. Ketentuan tersebut secara umum terdiri dari pengaturan rasio lindung nilai, rasio likuiditas, dan kewajiban pemenuhan peringkat utang bagi perusahaan pelaku ULN. Pengaturan rasio lindung nilai dan likuiditas diterapkan mulai 1 Januari 2015. Sementara itu, pengaturan pemenuhan peringkat utang diterapkan mulai 1 Januari 2016. Ketiga jenis pengaturan tersebut bukan ditujukan untuk membatasi ULN, melainkan untuk mempersiapkan manajemen risiko korporasi nonbank yang lebih baik dengan tujuan akhir menghasilkan ketabilan nilai tukar dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pokok-pokok Pengaturan

Dalam rangka memitigasi risiko *currency mismatch*, Bank Indonesia menetapkan rasio lindung nilai minimum bagi pelaku ULN korporasi nonbank. Dengan ketentuan ini, korporasi nonbank harus melakukan lindung nilai minimal sebesar 20%¹ dari selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing yang akan jatuh waktu hingga 6 bulan ke depan. Sementara untuk memitigasi risiko likuiditas, Bank

¹ Menjadi 25% mulai 1 Januari 2016.

Indonesia menetapkan rasio likuiditas minimum. Pelaku ULN diwajibkan memiliki aset valuta asing minimum sebesar 50%² dari kewajiban valuta asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 bulan ke depan. Sedangkan penetapan peringkat utang minimum yang ditujukan untuk memitigasi risiko *overleverage*, bagi korporasi yang akan melakukan ULN baru per 1 Januari 2015 harus memiliki peringkat utang³ minimum BB- dari lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia⁴.

Periodisasi Penerapan Aturan dan Sanksi

Ketentuan ini diberlakukan secara bertahap untuk memberikan waktu yang cukup bagi korporasi nonbank dalam penerapannya. Pada tahap pertama di tahun 2015, pelaku ULN wajib memenuhi rasio lindung nilai sebesar 20% dan rasio likuiditas minimal

50%. Sementara itu, peringkat utang minimum belum diterapkan untuk sementara. Pada tahap kedua, pelaku ULN wajib memenuhi rasio lindung nilai sebesar 25% dan rasio likuiditas minimal 70%, serta penerapan peringkat utang minimum BB- untuk setiap korporasi nonbank yang akan menerbitkan ULN baru. Pada tahap ketiga, selain seluruh pokok pengaturan pada tahap kedua diberlakukan, pelaku ULN juga wajib melakukan transaksi lindung nilai dengan perbankan Indonesia.

Sanksi administratif akan diterapkan bagi korporasi nonbank yang melanggar ketentuan ini berupa surat teguran mulai periode laporan triwulan IV 2015. Informasi pelanggaran tersebut juga akan disampaikan kepada kreditur yang bersangkutan di luar negeri, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia bagi korporasi yang tercatat di BEI.

2 Menjadi 70% mulai 1 Januari 2016.

3 Peringkat utang adalah penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

4 Lembaga pemeringkat dalam negeri meliputi: PT. Pemerikat Efek Indonesia (PEFINDO), *Fitch Rating* Indonesia, PT. ICRA Indonesia. Lembaga pemeringkat luar negeri meliputi: *Moody's Investor Service*, *Standard & Poor's*, *Fitch Ratings*, *Japan Credit Rating Agency*, *Rating and Investment Information Inc.*

Halaman ini
sengaja dikosongkan



Keterangan gambar:

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh sejak pertengahan tahun 2013 dengan mempertahankan kebijakan LTV terkait properti dan kendaraan bermotor.



BAB 11

KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Pada 2014, Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan makroprudensial untuk memperkokoh stabilitas sistem keuangan antara lain meliputi penguatan dasar hukum pengaturan dan *framework* pengawasan makroprudensial, peningkatan kehati-hatian dalam menyalurkan kredit properti dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pertumbuhan kredit sesuai dengan kebutuhan ekonomi, menjaga likuiditas perbankan serta mendorong pendalaman pasar keuangan

Kondisi sistem keuangan Indonesia tidak terlepas dari dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik. Perkembangan global yang kurang kondusif yang diikuti oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik telah meningkatkan potensi risiko instabilitas sistem keuangan. Di samping itu, peningkatan harga di sektor properti yang cukup progresif juga turut memberikan tambahan tekanan risiko instabilitas sistem keuangan. Dihadapkan pada tantangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Kebijakan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia bersifat proaktif untuk mencegah timbulnya risiko yang lebih luas dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Selama tahun 2014, sebagai bagian dari penguatan kebijakan makroprudensial yang proaktif, Bank Indonesia telah memperkuat landasan hukum kebijakan makropudensial. Di samping itu, melalui kegiatan asesmen dan *surveillance* makroprudensial, Bank Indonesia terus berupaya memitigasi risiko-risiko utama yang berpotensi sistemik (risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar). Bank Indonesia juga terus melakukan evaluasi ketentuan *loan to value* (LTV) guna meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan melalui peningkatan transparansi perluasan jangkauan perbankan pada semua lapisan masyarakat (keuangan inklusif) dan peningkatan persaingan yang sehat. Di samping berbagai kebijakan yang bersifat internal, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi baik dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun instansi lain yang terkait di berbagai forum seperti Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dan Forum Koordinasi Makro-Mikroprudensial (FKMM).

Berbagai kebijakan makropudensial yang telah ditempuh tersebut telah mampu mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan sepanjang tahun 2014. Stabilitas sistem keuangan sepanjang 2014 masih terjaga tercermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) 2014 yang berada pada level normal yaitu 0,65 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 1,10. Ketahanan sistem keuangan ditopang oleh kinerja positif sektor perbankan terutama meningkatnya likuiditas perbankan pada akhir tahun seiring dengan net ekspansi keuangan Pemerintah

dan terjaganya pasar keuangan. Industri perbankan masih mampu tumbuh disertai dengan meningkatnya ketahanan perbankan dalam memitigasi risiko kredit dan likuiditas pada saat kondisi moneter yang ketat. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) dan terjaganya rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) pada level rendah. Pada 2014, kinerja pasar keuangan Indonesia membaik dengan risiko yang masih cukup terjaga. Membuktikannya kinerja pasar keuangan antara lain ditunjukkan dengan naiknya IHSG dan meningkatnya transaksi Pasar Uang Antar Bank .

11.1. Kebijakan Makroprudensial

Perkembangan produk keuangan yang semakin kompleks, perilaku pelaku usaha yang cenderung ambil risiko (*risk taking*) untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (*searching for yield*), serta sistem keuangan global yang semakin terintegrasi menyadarkan pentingnya kebijakan makroprudensial yang terfokus pada sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung terjaganya keseimbangan internal dan eksternal. Kebijakan makroprudensial juga mempertimbangkan dampak lanjutan dari perilaku yang dideteksi pada sistem keuangan. Lebih lanjut, instrumen makroprudensial merupakan pendukung instrumen moneter dalam mencapai stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial menawarkan langkah-langkah yang dapat diarahkan kepada pelaku pasar atau sektor tertentu (*targeted*) yang memang memerlukan insentif ataupun disincentif.

Di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan global yang berdampak pada perlambatan ekonomi domestik, Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia dalam rangka merespons tantangan ekonomi tersebut. Pada 2014, Bank Indonesia telah menempuh beberapa kebijakan makroprudensial yang meliputi penguatan dasar hukum pengaturan dan *framework* pengawasan makroprudensial, peningkatan kehati-hatian dalam menyalurkan kredit properti dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pertumbuhan kredit sesuai dengan kebutuhan ekonomi, menjaga likuiditas perbankan serta mendorong pendalamannya pasar keuangan terutama untuk perbankan syariah.

Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Sebagai tindak lanjut dari mandat di bidang makroprudensial sebagaimana Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pada pertengahan 2014 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.¹ Pengaturan dan pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya potensi risiko sistemik; mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas; serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.

Instrumen makroprudensial memiliki *concern* dan target yang berbeda dengan instrumen mikroprudensial. Instrumen pengaturan makroprudensial bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang berpotensi berdampak terhadap sistem keuangan secara keseluruhan baik dari pendekatan *cross-section* maupun pendekatan *time series*.^{2,3} Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk: (i) mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, seperti *loan to value ratio* (LTV) dan giro wajib minimum berdasarkan *loan to deposit ratio* (LDR); (ii); membatasi konsentrasi eksposur (*exposure concentration*), seperti pengaturan batasan pemberian kredit kepada sektor tertentu; (iii) memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan; (iv) meningkatkan efisiensi sistem keuangan serta akses keuangan, antara lain melalui pengaturan terhadap persyaratan transparansi suku bunga kredit, rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan pengaturan Layanan Keuangan Digital (LKD); serta (v) memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan, seperti *countercyclical capital buffer* (CCB).

Selain di bidang pengaturan, PBI yang diterbitkan juga menjabarkan mengenai kerangka kerja pengawasan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan makroprudensial dilaksanakan melalui *surveillance* sistem keuangan untuk menilai risiko sistemik dan apabila diperlukan melakukan pemeriksaan terhadap bank dan lembaga lainnya yang memiliki

1 PBI No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial tanggal 1 Juli 2014.

2 *Cross section* adalah pendekatan yang menekankan bagaimana risiko terdistribusi dalam sistem keuangan pada satu periode tertentu yang disebabkan oleh kesamaan eksposur (risiko konsentrasi) dan penularan dalam sistem keuangan (*contagion risk*).

3 Pendekatan *time-series* adalah pendekatan yang menekankan pada bagaimana risiko dalam sistem keuangan berevolusi sepanjang waktu, termasuk evolusi dengan sektor ekonomi institusi keuangan dan pelaku pasar keuangan.

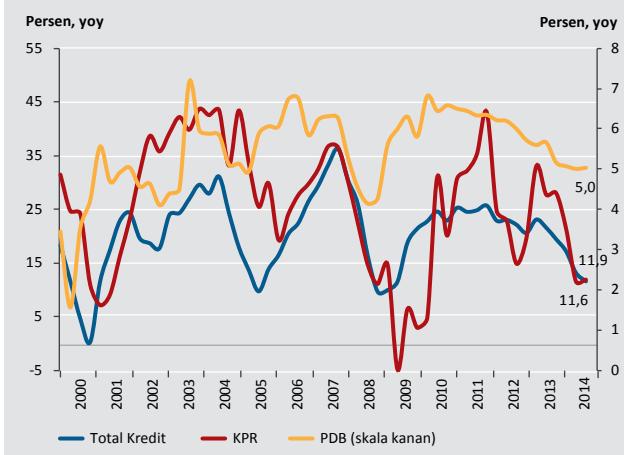
keterkaitan. Dalam melakukan *surveillance*, Bank Indonesia memantau perkembangan kondisi sistem keuangan, mengidentifikasi dan menganalisis risiko sistem keuangan, serta melakukan penilaian risiko sistem keuangan. Berbeda dengan pengawasan mikroprudensial, pengawasan makroprudensial difokuskan pada sumber risiko sistemik dan pemicunya melalui pemantauan terhadap komponen-komponen di dalam sistem keuangan yang antara lain terdiri dari lembaga keuangan (diutamakan pada bank-bank besar dan konglomerasinya), pasar keuangan, sektor riil (korporasi dan rumah tangga), infrastruktur sistem keuangan, serta kondisi makroekonomi. Melalui kegiatan ini Bank Indonesia dapat mendeteksi ketidakseimbangan (*imbalances*) dan kerawanan (*vulnerabilities*) yang mungkin berdampak sistemik terhadap sistem keuangan.

Bank Indonesia juga memiliki kewenangan dalam bidang makroprudensial untuk melakukan pemeriksaan kepada bank yang ditengarai berpotensi risiko sistemik termasuk perusahaan induk, perusahaan afiliai dan perusahaan anak dari bank. Hasil pemeriksaan makroprudensial selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain yang turut berwenang terhadap kestabilan sistem keuangan. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat dan mendorong stabilitas sistem keuangan, termasuk mewujudkan pengawasan makroprudensial yang efektif dalam menjaga ketahanan, intermediasi, dan efisiensi sistem keuangan nasional, Bank Indonesia juga telah melakukan pengembangan sistem informasi sektor keuangan, meliputi bank, industri keuangan non-bank, dan pasar keuangan dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait antara lain OJK dan lembaga lain yang berwenang terhadap stabilitas sistem keuangan.

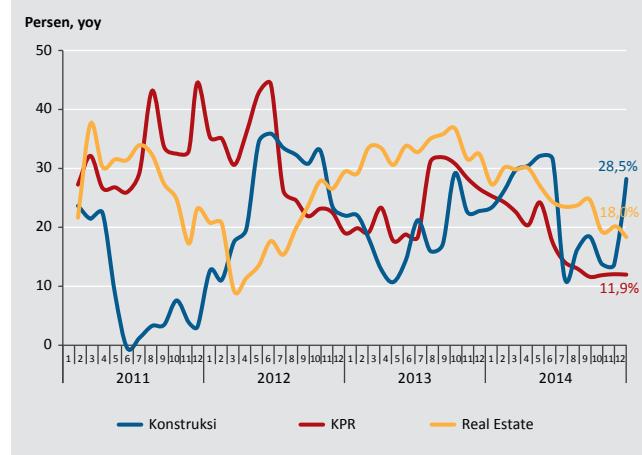
Evaluasi Ketentuan *Loan to Value* (LTV)

Pada September 2013, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan LTV yang memperluas cakupan dari ketentuan LTV sebelumnya pada tahun 2012. Pada ketentuan LTV saat ini, Bank Indonesia tidak hanya mengatur mengenai rumah tinggal dan rumah susun, namun juga mengatur kredit untuk rumah toko dan rumah kantor. Selain itu, aturan uang muka KPR juga dibedakan untuk fasilitas kredit pertama, kedua dan seterusnya. Di samping mengatur pembiayaan perbankan terhadap konsumen, aturan LTV tahun 2013 juga mengatur pembiayaan bagi pengembang di sektor properti. Tambahan cakupan ketentuan tersebut antara lain meliputi persyaratan pemberian kredit yang berlaku

Grafik 11.1. Pertumbuhan Kredit dan PDB



Grafik 11.2. Pertumbuhan Kredit Properti



baik kepada bank, debitur/calon debitur dan pengembang yang bekerjasama dengan bank. Lebih jauh, ketentuan LTV 2013 juga mengatur kredit yang bersifat inden kepada bank. Aturan ini bertujuan untuk mendorong pengembang melakukan proses bisnis yang sehat dan lebih berhati-hati dalam membiayai bisnis properti yang pada akhirnya akan melindungi perbankan terhadap risiko kredit bermasalah dan melindungi konsumen dari pengembang yang tidak berkualitas, serta pemerataan kesempatan memperoleh pembiayaan.

Sejalan dengan semangat penyempurnaan LTV 2012, evaluasi terhadap ketentuan LTV 2013 diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran kebijakan LTV yaitu mendorong peningkatan kualitas manajemen risiko, meningkatkan upaya perlindungan hak-hak konsumen, dan keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

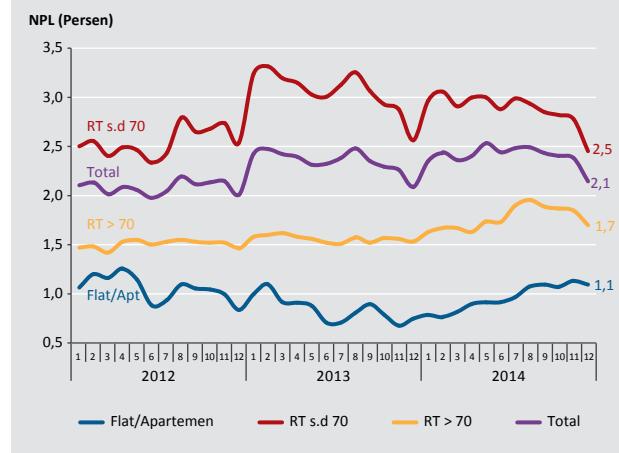
Selama satu tahun sejak ketentuan diterbitkan, hasil asesmen menunjukkan bahwa kebijakan LTV mampu mengendalikan laju pertumbuhan KPR. Hal ini ditunjukkan dengan melambatnya pertumbuhan kredit properti antara lain KPR menjadi 11,9% pada Desember 2014 dari 26,5% (Desember 2013) dan kredit real estate menjadi 18,0% (Desember 2014) dari 33,7% pada Desember 2013 (Grafik 11.1 dan 11.2). Sejalan dengan perlambatan kredit KPR tersebut, kenaikan harga properti cenderung melambat.⁴

Meski secara nominal dan proporsi kredit di sektor properti relatif kecil terhadap total kredit perbankan, seiring

dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, sektor ini merupakan salah satu titik rawan yang tetap menjadi perhatian Bank Indonesia seiring dengan meningkatnya harga perumahan yang cukup progresif. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa peningkatan harga perumahan sering menyebabkan terjadinya *risks build-up* yang akan berdampak terhadap perbankan, sistem keuangan dan bahkan perekonomian secara keseluruhan.

Berdasarkan aspek manajemen risiko yang diindikasikan dalam angka *non-performing loans* (NPL) KPR diketahui bahwa risiko KPR relatif tidak banyak mengalami penurunan. Jika dilihat berdasarkan tipe rumah, NPL untuk rumah tipe 21m² yang umumnya dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah memiliki risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tipe menengah dan besar (Grafik 11.3).

Grafik 11.3. Perkembangan Rasio NPL KPR



4 Kredit real estate dan kredit konstruksi yang digunakan untuk pembangunan properti.

Hasil asesmen selanjutnya menunjukkan perlambatan pertumbuhan KPR tercermin dari turunnya penambahan debitur yang memiliki KPR ganda.⁵ Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan dikeluarkannya ketentuan LTV antara lain (i) memitigasi risiko perbankan (ii) meningkatkan peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah (iii) perlindungan konsumen. Ketatnya rasio LTV telah berpengaruh terhadap pertumbuhan semua segmen KPR dengan dampak terbesar terjadi pada KPR untuk tipe rumah lebih besar dari 70m². Hal ini berdampak pada pertumbuhan rumah tipe menengah dengan luas antara 22m² sampai dengan 70m² melebihi rumah tipe besar (lebih dari 70m²). Sejalan dengan menurunnya pertumbuhan KPR, secara umum kenaikan harga properti juga mengalami perlambatan.

Meski penerapan ketentuan LTV secara umum berhasil mencapai beberapa sasaran yang diinginkan, perlu dicermati dampak lain yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya, kemungkinan terjadinya pergeseran motif spekulasi yang semula pada rumah dengan tipe besar (> 70 m²) menjadi spekulasi pada rumah tipe menengah – kecil. Hal ini antara lain tercermin dari tingginya pertumbuhan harga pada kelompok tipe rumah tersebut. Pergeseran pertumbuhan dari rumah tipe besar menjadi rumah tipe menengah menyebabkan naiknya harga rumah tipe menengah. Hal ini terindikasi juga oleh indikator *price to rent ratio* yang lebih tinggi untuk rumah tipe menengah dibandingkan dengan rumah tipe besar, terutama di beberapa kota besar.

Faktor lain yang juga dicermati adalah berkembangnya pembiayaan langsung (*developer financing scheme*) dari pengembang melalui pembayaran tunai secara bertahap. Kondisi tersebut ditengarai merupakan respons atas ketatnya aturan kredit yang bersifat inden yang menyebabkan penurunan yang cukup signifikan terhadap kredit perumahan. Disadari bahwa ketentuan LTV hanya dapat memengaruhi permintaan properti melalui kredit/pembiayaan, namun relatif kurang efektif memengaruhi pembelian properti secara tunai atau tunai bertahap.

Kebijakan Pendalamkan Pasar Uang Syariah Melalui Pengembangan Transaksi Repo Syariah

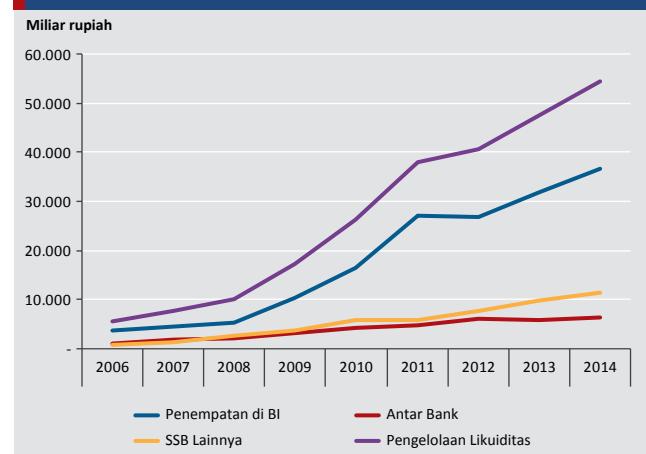
Berdasarkan perkembangan terakhir, transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) masih relatif kecil jika dibandingkan dengan transaksi PUAB konvensional.

Secara volume rata-rata harian (RRH) transaksi PUAS adalah sebesar Rp617 miliar per hari (2014) meningkat tajam dibanding dengan tahun 2008 sekitar Rp113 miliar per hari. Meskipun meningkat tajam, volume rata-rata harian tersebut jauh di bawah transaksi PUAB konvensional sebesar Rp12 triliun per hari. Perbedaan volume transaksi yang signifikan tersebut selain dipengaruhi oleh perbedaan nilai aset bank secara keseluruhan, juga dipengaruhi oleh kebijakan bank syariah dalam memaksimalkan penempatan dananya pada pembiayaan dan bukan dalam bentuk penempatan di pasar uang.

Dalam lima tahun terakhir, penempatan dana perbankan syariah pada pasar keuangan syariah rata-rata sebesar 24% dari total aset yang dimiliki. Kendati demikian, komposisi penempatan dana di pasar keuangan masih didominasi oleh penempatan pada instrumen Bank Indonesia, dengan porsi 66% dari total transaksi pasar uang perbankan syariah. Selebihnya, likuiditas bank ditempatkan pada surat-surat berharga (SBSN, sukuk korporasi) sebesar 20%, serta penempatan dana antarbank di PUAS sebesar 14% (Grafik 11.4).

Transaksi di PUAS lebih didorong oleh pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek. Preferensi perbankan syariah, baik dalam melakukan penempatan dana maupun mencari akses sumber dana jangka pendek di PUAS sangat dipengaruhi oleh status bank tersebut, yaitu sebagai bank dengan *subsidiary* atau induk, serta bank yang berdiri sendiri (tanpa induk/*stand alone bank*). Untuk bank syariah yang memiliki induk atau *subsidiary* bank konvensional, umumnya pola hubungan induk-anak masih dominan dalam melakukan manajemen likuiditas. Dalam kondisi likuiditas yang ketat, kelompok bank syariah ini akan

Grafik 11.4. Porsi Pengelolaan Likuiditas Perbankan Syariah



5 KPR ganda terjadi ketika 1 (satu) debitur memiliki 2 (dua) atau lebih KPR

memprioritaskan penggunaan akses sumber dana kepada bank konvensional induknya untuk memperoleh pinjaman dana jangka pendek. Sebaliknya, bagi perbankan syariah yang berdiri sendiri, pemanfaatan PUAS menjadi strategi utama yang dilakukan dalam kondisi keketatan likuiditas terkait dengan karakteristik bank syariah yang memiliki *financing to deposit ratio* (FDR) yang cukup tinggi.

Berbeda dengan karakteristik bank konvensional dimana rasio penyaluran kredit secara industri masih di bawah 90%, rasio penyaluran pembiayaan (FDR) oleh bank syariah mencapai kisaran 100%. Aktivitas pembiayaan perbankan syariah yang intensif tersebut menuntut dukungan pengelolaan likuiditas yang semakin baik. Dengan tingkat pembiayaan industri yang tinggi, perbankan syariah memerlukan dukungan alternatif sumber pendanaan jangka pendek yang memadai guna mengurangi risiko gangguan likuiditas (*mismatch*), yang pada gilirannya dapat mengganggu keberlangsungan industri itu sendiri (Grafik 11.5).

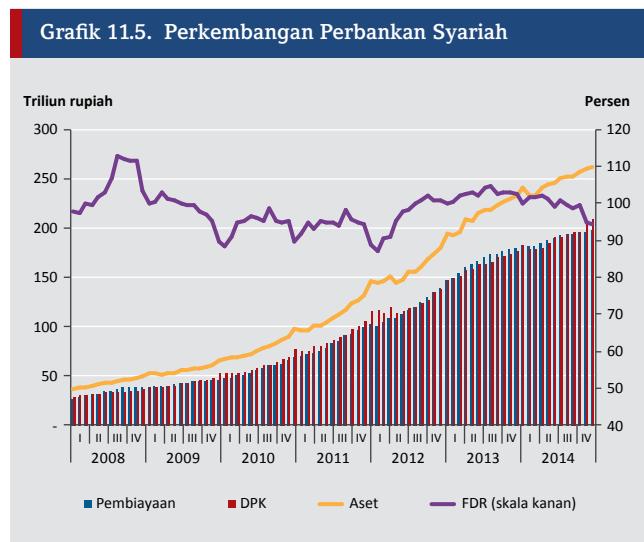
Dalam praktiknya, perbankan syariah seringkali memperoleh dana mahal dari PUAS pada saat kondisi likuiditas di pasar tersebut semakin ketat, terutama untuk bank yang tidak memiliki induk ataupun memiliki *credit line* dan *credit limit* terbatas. Dalam bertransaksi dengan bank konvensional, bank syariah seringkali terkendala oleh alternatif instrumen yang terbatas (bank konvensional umumnya menginginkan instrumen dengan tingkat imbalan tetap), tingkat imbalan yang relatif tinggi, serta belum tersedianya standar perjanjian yang dapat dijadikan sebagai acuan. Selain itu, transaksi antarbank masih memiliki porsi yang rendah dimana untuk pengelolaan

likuiditas masih didominasi transaksi dengan BI yang seharusnya merupakan pilihan terakhir (*last resort*).

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pendalaman pasar uang syariah adalah melalui penambahan keragaman instrumen pasar uang. Dengan adanya penambahan jenis instrumen pasar uang syariah, bank syariah memiliki berbagai alternatif penempatan dan pengelolaan dana yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank. Dengan tersedianya berbagai alternatif instrumen pasar uang, pengelolaan likuiditas perbankan syariah bisa lebih efisien serta dapat mengurangi porsi transaksi dengan BI yang seharusnya menjadi pilihan terakhir.

Menjawab tantangan tersebut, BI melakukan pengembangan PUAS melalui pengembangan alternatif instrumen atau mekanisme untuk pemenuhan likuiditas dengan prinsip syariah yang tidak dibatasi oleh *credit limit* dan *credit line*. Alternatif pengembangan tersebut adalah melalui mekanisme repo syariah antarbank. Keberadaan mekanisme repo syariah antarbank dapat menjadi salah satu alternatif solusi, di tengah keterbatasan instrumen yang ada dan juga untuk memperkuat kemampuan perbankan syariah dalam melakukan pengelolaan likuiditasnya. Terlebih dalam kondisi perekonomian global dan domestik ke depan yang diliputi oleh faktor ketidakpastian yang tinggi. Selain itu, instrumen repo juga dapat menjembatani pemenuhan kebutuhan dana berjangka lebih panjang dengan risiko yang lebih rendah (*secured lending*).

Upaya pendalaman pasar yang dilakukan BI melalui repo syariah antarbank tersebut melengkapi repo syariah bank kepada BI yang telah berlaku sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan repo syariah antarbank, BI berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam menyusun dan menerbitkan fatwa yang mendukung transaksi repo antar bank syariah.⁶ Beberapa cakupan fatwa DSN-MUI tersebut antara lain: (i) Transaksi Repo Surat Berharga Syariah (SBS) dilakukan dengan akad *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'* (jual beli dengan janji untuk membeli kembali); (ii) Akad Jual beli atas SBS harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan berikut segala hak dan akibat hukum lain yang melekat padanya; (iii) Penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang; dan Pembeli juga berjanji



6 Fatwa No.94/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.

untuk menjual kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang (saling berjanji/*muwa'adah*); (iv) Jual-beli SBS yang dilakukan lembaga keuangan harus menggunakan atau mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati; (v) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) boleh menjadi penjual dan/atau pembeli repo SBS.

Dalam rangka mendukung terjaganya risiko likuiditas di pasar uang antarbank khususnya yang berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia perlu untuk mengatur dan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan PUAS. Adapun salah satu upaya untuk memastikan implementasi aktivitas PUAS dimaksud, Bank Indonesia mengatur mengenai pemeriksaan kepada bank. Seiring dengan pengalihan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK sejak 31 Desember 2014, maka pelaksanaan pemeriksaan transaksi PUAS terhadap bank syariah dapat dilakukan secara langsung oleh Bank Indonesia, pemeriksaan bersama OJK, atau berdasarkan data hasil pemeriksaan OJK.

Kebijakan Lainnya pada Tahun 2014

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga melakukan penguatan *surveillance* dan *moral suasion* kepada perbankan. Salah satunya berupa *stress test* yang dilakukan guna mengidentifikasi potensi risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar yang mungkin timbul lebih dulu apabila terjadi perubahan kebijakan ataupun *shock* dalam perekonomian yang bersumber dari internal maupun eksternal. Sementara penguatan asesmen dan *surveillance* yang dilakukan melalui kerjasama dengan Otoritas Pengawas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi intermediasi yang dilakukan industri perbankan telah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas perekonomian. Kegiatan ini juga untuk memastikan perbankan memiliki ketahanan likuiditas yang memadai dan memiliki permodalan yang cukup untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi.

Kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan yang ditempuh Bank Indonesia tahun 2014 juga mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan stabilitas sistem keuangan Indonesia masih mendapat tantangan dari proses pemulihan ekonomi global dan penyesuaian keseimbangan ekonomi domestik. Beberapa isu global

tahun 2013 seperti pemulihan ekonomi global yang tidak merata dan tidak setinggi yang diharapkan, rencana kebijakan *tapering off* oleh Federal Reserve AS dan penurunan harga komoditas dunia telah mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia yang tumbuh tinggi pada tahun 2013 dipandang masih rentan terhadap koreksi dengan pertumbuhan kredit yang dianggap masih terlalu tinggi yaitu selalu berada pada level di atas 20 persen selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan agar struktur ekonomi menjadi lebih seimbang, sehat dan berkelanjutan ditempuh kebijakan makroprudensial yang mengarah pada upaya untuk meredam pertumbuhan kredit pada kisaran yang lebih rendah dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada akhir tahun 2013, Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit 2014 pada kisaran 15-17% dengan ditopang oleh pertumbuhan DPK pada kisaran yang sama. Pertumbuhan kredit tersebut cukup konsisten dengan upaya Bank Indonesia dalam menyeimbangkan kembali perekonomian ke arah yang lebih sehat. Target pertumbuhan kredit tersebut tentunya harus dibarengi dengan langkah-langkah yang mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang berorientasi ekspor dan menyediakan barang substitusi impor serta mendukung upaya peningkatan kapasitas perekonomian.

Dalam perjalannya, pertumbuhan ekonomi 2014 lebih lambat dari proyeksi awal yang pada akhirnya memicu perlambatan kegiatan intermediasi perbankan. Melambatnya pertumbuhan kredit, dari sisi *supply* antara lain ditengarai oleh perilaku bank-bank besar yang cenderung menahan ekspansi kreditnya antara lain tercermin dari menurunnya pertumbuhan kredit bank besar dari 20,8% (yoY) pada akhir tahun 2013 menjadi 11,0% (Desember 2014). Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga mendorong peningkatan risiko kredit. Untuk menjaga risiko kreditnya tetap di bawah batas aman, bank menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit sehingga mendorong perlambatan pertumbuhan kredit perbankan yang lebih dalam dari target yang diperkirakan Bank Indonesia. Pada akhir 2014, kredit perbankan tumbuh sebesar 11,6%, melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 21,6%. Meskipun demikian, perlambatan kredit tersebut tidak berimbas pada penurunan peran perbankan dalam pembangunan nasional. Hal ini tercermin dari rasio kredit terhadap PDB pada 2014 yang masih berada pada kisaran 36%. Selain itu, kebijakan lain yang dikeluarkan di penghujung 2013 turut mempengaruhi perkembangan

kredit perbankan di tahun 2014. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan untuk meningkatkan GWM sekunder dari 2,5% menjadi 4% DPK.

Dari sisi sumber pendanaan, perlambatan ekonomi 2014 juga berimbas kepada melambatnya pertumbuhan DPK perbankan yang lebih dalam dari perkiraan Bank Indonesia. Perlambatan DPK yang mendalam terutama terjadi pada paruh pertama 2014. Pada akhir 2014, DPK perbankan tercatat sebesar Rp4.011,4 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 12,3%, sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 13,6%. Perkembangan DPK tersebut dirasa masih memadai untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan perbankan pada tahun 2014.

11.2. Kebijakan Keuangan Inklusif

Kebijakan keuangan inklusif merupakan kebijakan untuk memperluas akses keuangan bagi seluruh masyarakat melalui model layanan yang sesuai, produk yang cocok dan mekanisme yang mudah.⁷ Adanya layanan keuangan tersebut, selain berdampak positif terhadap peningkatan keuangan inklusif juga membantu perbankan dalam melakukan diversifikasi risiko likuiditas dan risiko kredit, peningkatan kapabilitas dan peningkatan persaingan di *retail banking*.⁸

Diversifikasi likuiditas terjadi karena adanya sumber dana baru yang dihimpun dari masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, sedangkan diversifikasi kredit terjadi karena terbukanya pasar calon debitur baru yaitu penyaluran kredit mikro. Peningkatan kapabilitas ditunjukkan dengan meningkatnya literasi keuangan karena adanya program edukasi keuangan yang berkelanjutan. Edukasi keuangan yang efektif dan terus menerus termasuk aspek bagaimana *savings* dan *spending* yang benar, akan mampu meningkatkan kemampuan mengelola keuangan masyarakat. Budaya ini dalam jangka panjang dapat membantu menurunkan tendensi risiko

7 Keuangan Inklusif adalah Hak setiap individu untuk memiliki akses penuh terhadap berbagai layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, jelas, dan dengan biaya terjangkau sebagai penghormatan penuh atas martabat pribadinya (Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2012)

8 Khan (2011) menyatakan bahwa keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan bukan lagi menjadi suatu pilihan kebijakan namun menjadi kebijakan yang harus dilakukan. Secara eksplisit keduanya ibarat dua sisi dari mata uang yang sama (*two sides of the same coin*). Keuangan inklusif akan sulit dilakukan dalam kondisi adanya instabilitas, bahkan *financial exclusion* justru dapat memperparah instabilitas tersebut.

default kredit karena masyarakat mampu mengelola anggaran dan arus kas. Pada akhirnya, literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk lembaga keuangan dan sistem pembayaran termasuk layanan keuangan tanpa kantor.

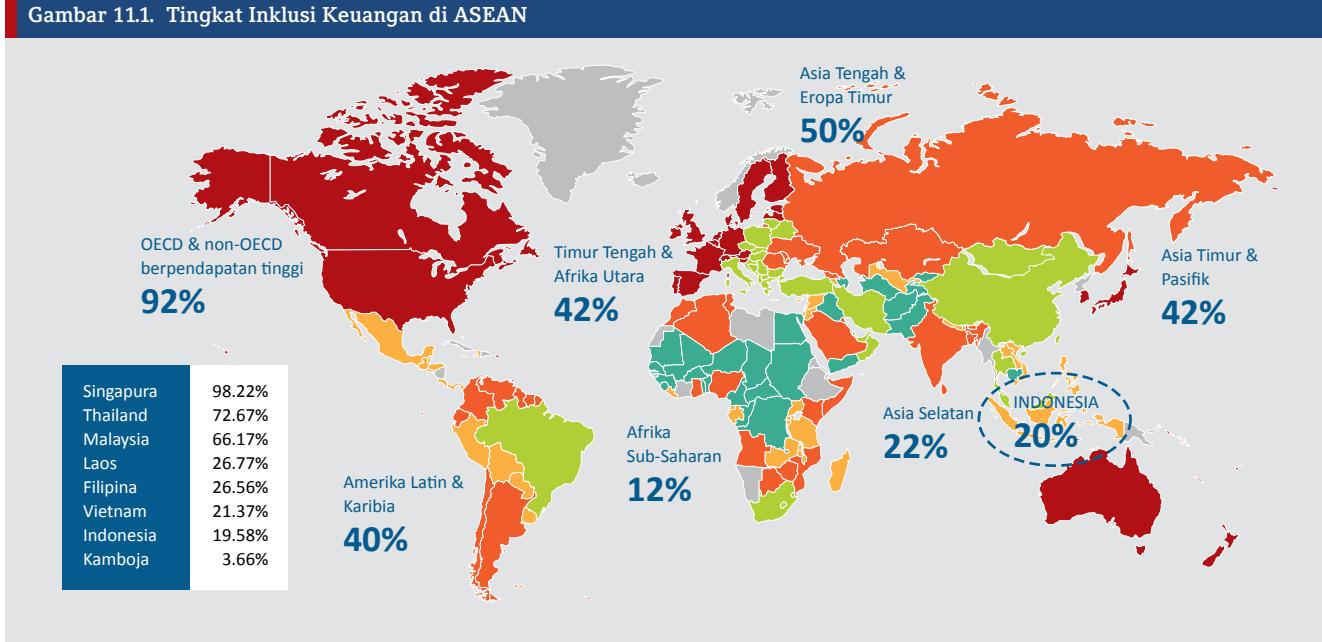
Terdapat hubungan antara keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan Inklusif dapat menciptakan stabilitas sistem keuangan melalui 3 *channel* yaitu (1) ketahanan institusi keuangan terhadap guncangan perekonomian melalui diversifikasi basis kredit dan basis simpanan, (2) proses intermediasi keuangan yang lebih baik dengan meningkatkan jangkauan akses keuangan terhadap masyarakat, dan (3) peningkatan penggunaan jasa keuangan formal yang menciptakan proses intermediasi yang lebih efisien. Dengan bertambahnya masyarakat yang terlayani lembaga keuangan dengan produk dan harga yang cocok diimbangi dengan peningkatan pengelolaan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah tangga. Hal ini akan mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan baik di tingkat mikro maupun makro, khususnya penurunan risiko likuiditas dan kredit.

Namun, tingkat inklusi keuangan Indonesia tercatat masih cukup rendah. Berdasarkan survei World Bank tahun 2012, penduduk dewasa (15 tahun ke atas) yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal tercatat 20%, jauh lebih rendah dari rata-rata tingkat inklusi keuangan di dunia sebesar 50%. Apabila dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN, tingkat inklusi keuangan Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja yang hanya 3,7% (Gambar 11.1).

Dilihat dari dimensi akses menggunakan indikator jumlah kantor layanan bank dan jumlah ATM per 100 ribu penduduk dewasa, pada Desember 2014, tercatat jumlah kantor layanan bank per 100 ribu penduduk dewasa sebesar 22 dan jumlah ATM per 100 ribu penduduk dewasa sebesar 50.⁹ Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 ribu penduduk dewasa dilayani oleh 22 kantor layanan bank dan 50 ATM. World Bank memperkirakan pelayanan sektor keuangan kepada masyarakat hanya mencapai

9 Dimensi akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dll.). Formula penghitungan indikator dimensi akses mengacu pada pada *Core Set of Financial Inclusion Indicators* dari The Alliance for Financial Inclusion (AFI) dan IMF dalam pengukuran keuangan inklusif.

Gambar 11.1. Tingkat Inklusi Keuangan di ASEAN



Sumber: Global Findex – World Bank, 2011

rata-rata 41%, bahkan di negara berkembang lebih rendah. Secara umum, minimnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan disebabkan adanya hambatan yang dapat dikelompokkan menjadi 4 hambatan utama, yaitu hambatan atas harga yang dipersepsikan mahal (*price barriers*), kurangnya informasi (*information barriers*), desain produk dan jasa yang kurang sesuai (*product and service design barriers*), dan keterbatasan saluran distribusi (*distribution channel barriers*).

Melihat fakta di atas dan menyadari pentingnya perluasan akses keuangan, Bank Indonesia sejak 2010 menginisiasi kebijakan keuangan inklusif.¹⁰ Upaya pertama yang menjadi prioritas adalah memperluas akses keuangan agar masyarakat mudah mengakses dan menggunakan produk layanan sistem pembayaran dan keuangan, diikuti dengan edukasi keuangan. Bersinergi dengan kebijakan UMKM yang difokuskan pada upaya mendorong penggunaan jasa keuangan, terutama intermediasi, diharapkan dimensi penggunaan layanan sistem pembayaran dan keuangan semakin meningkat. Pada gilirannya, kebijakan tersebut berkontribusi dalam mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dalam bidang sistem pembayaran.

Dalam kerangka kebijakan makroprudensial, kebijakan keuangan inklusif lebih bersifat *preventif*, mencegah terganggunya stabilitas sistem keuangan. Dari sisi *supply*

(penyedia jasa), program diarahkan melalui penguatan infrastruktur sistem pembayaran keuangan. Dari sisi *demand* (masyarakat), program difokuskan melalui penguatan kapabilitas pengelolaan keuangan masyarakat dengan edukasi keuangan.

Selama tahun 2014, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan keuangan inklusif berupa:

a. Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) melalui Agen LKD Individu.¹¹

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. SE BI ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/8/PBI/2014 tanggal 8 April 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Dengan diterbitkannya ketentuan ini, masyarakat dapat menikmati layanan sistem pembayaran dan keuangan di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini dilakukan bank dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga berupa agen individu yang bertindak atas nama bank memfasilitasi pembukaan rekening, melayani tarik

10 Kebijakan keuangan inklusif yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dilandaskan atas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

11 Layanan Keuangan Digital adalah layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif

dan setor tunai, serta pembayaran tagihan dan *billing*. Dalam tahap awal, bank yang dapat ikut serta dalam kegiatan ini adalah Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian periode terakhir oleh otoritas pengawasan Bank.

Dalam rangka penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu, telah dilaksanakan Uji Coba Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat kepada Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Menggunakan Uang Elektronik penyelenggara LKD, Bank Mandiri dan BRI menyalurkan bantuan pemerintah di wilayah uji coba DKI Jakarta di Kota Jakarta Utara, Jawa Barat di Kabupaten Cirebon, Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan, dan Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang. Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersyarat kepada Peserta PKH dalam uji coba ini sebanyak 1.860 Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Hasil uji coba mengkonfirmasi terdapatnya keinginan masyarakat untuk menikmati layanan perbankan formal yang selama ini jauh dari *mindset* mereka. Kemudahan, fleksibilitas dan informalitas sangat disukai oleh kelompok ini. Agen LKD yang ikut serta dalam pelaksanaan uji coba ini juga mendapatkan *capacity building* dari bank, sehingga dalam operasionalnya, Agen LKD memiliki kemampuan yang baik dalam melayani penerima PKH dan memandu setiap penerima bantuan dalam mengoperasionalkan *handphone* sebagai sarana untuk transaksi uang elektronik, dimulai dari registrasi nomor *handphone* sampai penarikan dana bantuan.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Bank Indonesia terkait pelaksanaan uji coba tersebut pada bulan Oktober 2014 diperoleh hal positif antara lain: i) masyarakat penerima PKH antusias dengan cara penarikan dana bantuan PKH menggunakan uang elektronik melalui Agen LKD, karena memberikan kemudahan dalam bertransaksi, ii) biaya transaksi lebih murah, dan dapat dilayani kapan saja oleh agen LKD, iii) mengurangi biaya transportasi, iv) dari sisi waktu, transaksi menggunakan uang elektronik melalui Agen LKD sangat efisien, rata-rata transaksi misalnya penarikan dana bantuan adalah 5 menit per orang.

Selain hal positif dalam survei tersebut juga ditemukan kekurangan yang perlu diperbaiki antara lain: 1) adanya permasalahan jaringan yang dapat mengganggu dalam proses penarikan dana bantuan, dan 2) rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai uang elektronik, LKD, teknis proses penarikan dana menggunakan HP, biaya yang timbul serta pengelolaan keuangan yang baik.

b. Program Edukasi Keuangan

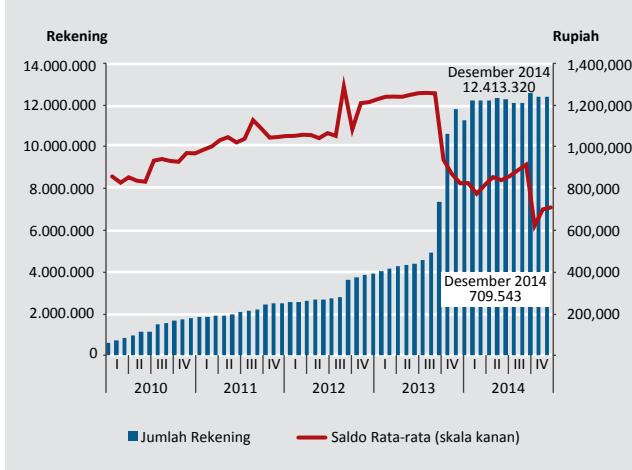
Edukasi keuangan oleh Bank Indonesia merupakan pelaksanaan dari salah satu pilar dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Masyarakat yang menjadi target edukasi keuangan Bank Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu masyarakat *unbanked* dan masyarakat *underbanked*.¹² Materi edukasi keuangan kepada masyarakat lebih ditekankan pada aspek-aspek dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan. Selain materi tersebut, masyarakat juga diperkenalkan tentang lembaga keuangan dan cara memanfaatkan produk serta jasa layanan keuangan, seperti cara menyimpan uang (menabung), meminjam uang (kredit), melakukan transaksi keuangan (transfer), dan investasi. Dalam edukasi keuangan, masyarakat juga diperkenalkan mengenai Layanan Keuangan Digital.

Strategi edukasi keuangan yang dilakukan lebih ditekankan pada bentuk *Training of Trainers* (ToT), dengan tujuan pelatih (*Trainers*) yang telah mendapatkan pembekalan tentang pengelolaan keuangan dapat mengajarkan dan menyebarluaskan ilmu keuangan yang diperoleh selama mengikuti ToT kepada masyarakat. Edukasi keuangan Bank Indonesia diprioritaskan kepada segmen tertentu seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pelajar (SD dan SMP setingkat), serta petani dan nelayan. Pelaksanaan edukasi keuangan oleh Bank Indonesia tidak hanya di daerah perkotaan, akan tetapi juga menjangkau wilayah perbatasan dan kepulauan terluar Indonesia. Selain dalam bentuk ToT, strategi edukasi keuangan Bank Indonesia juga dilakukan dalam bentuk *Training of Beneficiary* (ToB) kepada buruh pabrik atau pedagang pasar.

Dalam rangka memperluas jangkauan edukasi keuangan, Bank Indonesia telah menyusun modul edukasi yang disesuaikan dengan masing-masing target atau segmen. Beberapa materi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum pengajaran atau bahan ajar nasional, seperti modul untuk TKI dan pelajar (SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah). Kegiatan edukasi keuangan juga dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kampanye Gerakan Indonesia Menabung (GIM), dengan segmen yang

12 Masyarakat *unbanked* adalah masyarakat yang sama sekali belum terakses kepada lembaga keuangan. Masyarakat *underbanked* adalah masyarakat yang sudah menjadi nasabah bank, namun dalam layanan yang terbatas, contohnya hanya sebagai nasabah penabung, belum dapat menikmati layanan kredit, *internet banking* atau layanan perbankan lainnya secara optimal, atau masih mengandalkan jasa keuangan non formal.

Grafik 11.6. Perkembangan TabunganKu



lebih heterogen. Dalam pelaksanaan kegiatan GIM juga diperkenalkan produk TabunganKu.¹³

Keberhasilan pelaksanaan edukasi keuangan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia memang tidak secara langsung dapat terlihat hasilnya. Namun demikian, materi pengelolaan keuangan yang telah diajarkan diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang arti pentingnya mengelola keuangan secara benar dan teratur. Tujuan lebih jauh adalah masyarakat dapat menyisihkan uangnya untuk ditabung di perbankan, sehingga akses masyarakat kepada lembaga keuangan semakin tinggi. Edukasi keuangan yang dilakukan juga turut berperan dalam peningkatan rekening TabunganKu. Sampai dengan Desember 2014 tercatat jumlah rekening TabunganKu sebanyak 12,41 juta rekening meningkat 16,9% dibandingkan dengan bulan Desember 2013 sebanyak 10,62 juta rekening (Grafik 11.6).

c. Financial Identity Number (FIN)

Kegiatan keuangan inklusif lainnya yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah mengembangkan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan informasi antara perbankan dan masyarakat melalui pengumpulan database *Financial Identity Number* (FIN).¹⁴ Pengumpulan database

FIN telah dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2012 melalui kegiatan survei.

Pengembangan FIN dilakukan untuk lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses kepada lembaga keuangan. Dengan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan data pokok, pribadi, demografi, dan keuangan dasar dalam *database* FIN, maka akan memudahkan lembaga keuangan untuk melakukan *mapping* terhadap potensi masyarakat *unbanked*, sehingga lembaga keuangan dapat memperoleh data yang komprehensif untuk menciptakan produk dan layanan jasa sistem pembayaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang akan disasar. Dari sisi masyarakat, masyarakat akan dikenal oleh lembaga keuangan.

Pada tahun 2014, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap model pengumpulan database FIN yang tidak lagi dilakukan melalui survei, akan tetapi pengumpulan database FIN dilakukan melalui agen LKD Individu dengan menambahkan aplikasi khusus. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyesuaian terhadap kuesioner, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi baik terkait data pokok, pribadi, demografi dan keuangan dasar (antara lain: pendapatan, pengeluaran, keuntungan dan aset pribadi).

d. Sistem Informasi bagi Petani dan Nelayan

Pengembangan infrastruktur keuangan oleh Bank Indonesia juga dilakukan kepada petani dan nelayan. Sebagaimana diketahui peran sektor pertanian dalam perekonomian masih terbatas di tengah potensinya yang cukup besar. Dilihat dari panjang pantai yang dimiliki, Indonesia memiliki panjang pantai 95.181 m² atau terbesar ke empat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada dan Rusia. Sektor pertanian dan perikanan juga baru menyumbang 15% dalam PDB atau urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 35% dari total tenaga kerja (BPS, 2014). Besarnya peran sektor pertanian belum berbanding lurus dengan kondisi kehidupan dan kapabilitas petani, peternak dan nelayan Indonesia yang sebagian besar (53%) masuk dalam kelompok masyarakat miskin (BPS, 2013).

Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi petani belum baik adalah kurangnya informasi terkini mengenai harga jual produk pertanian, cara bercocok tanam yang tepat, cuaca, *supplier* dan *buyer* yang dapat diakses oleh petani sehingga menyebabkan produktivitas rendah dan posisi tawar lemah. Melihat fakta tersebut Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Pertanian,

13 TabunganKu adalah tabungan dengan persyaratan mudah dan ringan, antara lain tidak dibebani dengan biaya administrasi

14 FIN merupakan nomor yang bersifat unik, *simple*, dan melekat yang diberikan kepada masyarakat umum yang memiliki keterbatasan akses keuangan, misalnya diberikan dalam bentuk kartu, yang dapat ditunjukkan kepada lembaga keuangan untuk mengakses database FIN melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Daerah, saat ini sedang mengembangkan sistem informasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petani. Aplikasi ini dilakukan dengan media *handphone*, dengan pertimbangan telah banyak petani yang memiliki *handphone*, namun pemanfaatannya belum optimal. Sistem aplikasi ini dikenal dengan nama Sistem Informasi bagi Petani (SIP).¹⁵ Dalam rangka memperkenalkan SIP ini, ke depan program ini akan disinergikan dengan program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan program SIP, akan dikembangkan model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan harga layanan yang terjangkau dan *sustain*, khususnya bagi penyedia layanan informasi. Dalam rangka penyiapan model bisnis, perlu dilakukan *pilot project* paling tidak di satu wilayah sehingga dapat memberikan masukan atas model bisnis yang telah dikembangkan. Penyiapan *pilot project* tersebut dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian setempat, Pemerintah Daerah, perusahaan telekomunikasi yang akan menyediakan layanan, dan Bank Indonesia Kantor Pusat dan Perwakilan di Daerah.

Sebagai langkah awal telah dilakukan survei mengenai identifikasi kebutuhan informasi yang nantinya akan diujicobakan dalam *pilot project* SIP. Sebanyak 294 petani di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Jawa Barat, dan Yogyakarta menjadi responden. Dari hasil identifikasi awal tersebut diperoleh informasi antara lain mayoritas petani (93%) telah memiliki *handphone*, sebagian besar (83%) responden yang memiliki *handphone* menyatakan bersedia untuk berlangganan informasi pertanian. Terkait dengan kebutuhan akan informasi pertanian, mayoritas responden (99%) menyatakan bahwa jenis informasi yang dibutuhkan mencakup informasi harga jual produk, prakiraan cuaca, bahan input, dan *tips* pertanian. Mayoritas responden (91%) menyatakan preferensi penggunaan *handphone* untuk transaksi keuangan. Dari hasil identifikasi awal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keinginan petani untuk mendukung usaha pertanian dan melakukan transaksi keuangan. Informasi tersebut akan menjadi pertimbangan Bank Indonesia dan kementerian/lembaga terkait dalam mengembangkan SIP.

¹⁵ Tujuan SIP adalah untuk mendukung tumbuhnya ekosistem LKD dalam rangka memperluas akses keuangan bagi petani. SIP memiliki manfaat untuk mendorong pengembangan Keuangan Inklusif, mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), meningkatkan kesejahteraan petani, pengendalian inflasi, dan meningkatkan perekonomian daerah.

11.3. Kebijakan Mendorong Pengembangan UMKM

Dukungan kebijakan untuk mendorong peningkatan kredit UMKM sesuai dengan PBI No.14/22/PBI/2012 terus diupayakan, antara lain melalui implementasi program yang mendukung peningkatan kapabilitas UMKM serta mengatasi kendala pembiayaan kepada UMKM, seperti terbatasnya informasi mengenai UMKM potensial, tidak adanya atau keterbatasan agunan, dan terbatasnya pola pembiayaan kepada sektor pertanian. Berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dilakukan melalui beberapa program atau kegiatan yang mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM dan untuk meningkatkan eligibilitas UMKM.

Salah satu program tersebut adalah pengembangan UMKM. Sebagai kelanjutan dari program pengembangan klaster di tahun 2013 yang berbasis komoditi unggulan daerah, pada tahun 2014 program peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM melalui klaster lebih difokuskan pada tujuan ketahanan pangan. Bank Indonesia berperan memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan, fasilitasi akses bahan baku, pasar dan pembiayaan, penguatan budidaya dan kelembagaan serta penyediaan informasi lain yang dibutuhkan. Bantuan teknis yang diberikan berdampak pada meningkatnya kemampuan UMKM dalam melakukan akses pasar, akses kepada bahan baku dan *supplier* sarana produksi yang lebih menguntungkan dan efisien, penerapan teknologi baru dan tepat guna baik dalam budidaya maupun pasca panen, serta berdirinya kelembagaan formal sebagai wadah UMKM yang pada akhirnya membantu UMKM dalam klaster untuk melakukan akses kepada pembiayaan dari lembaga keuangan.

Program lainnya adalah melalui pemeringkatan Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam rangka meminimalisir *asymmetric information* antara bank dengan pelaku UKM, Bank Indonesia melakukan upaya pemeringkatan kredit UKM sejak tahun 2009. Pemeringkatan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan, prospek usaha, dan manajemen UKM. Selama tahun 2014, Bank Indonesia memfasilitasi *pilot project* yang dilaksanakan di Semarang antara BPD dan 1 (satu) lembaga pemeringkat dalam upaya peningkatan penyaluran kredit BPD dimaksud. Program pemeringkatan kredit untuk UKM ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan UKM Indonesia dalam menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015. Peran Bank Indonesia dalam hal ini adalah menyusun konsep pemeringkatan kredit untuk UKM dari

aspek Kelembagaan, Regulasi, Pembiayaan, Proses Bisnis dan Metodologi yang tepat bagi Indonesia sekaligus dapat diterima menjadi *benchmark* bagi negara-negara ASEAN lainnya.

Selain itu, terdapat pula program dengan terkait pemanfaatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT). Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan BPN No.14/1/GBI/DKBU/NK tanggal 27 Juni 2012, pada tahun 2013 Bank Indonesia melakukan *pilot project* bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam bentuk fasilitasi UMKM (dalam hal ini nelayan) untuk memanfaatkan sertifikat tanah yang telah diperoleh dari BPN untuk digunakan dalam permohonan kredit. Pada tahun 2014 dilaksanakan *pilot project* lanjutan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. Pada *pilot project* kali ini, Bank Indonesia memfasilitasi petani yang telah memperoleh sertifikat tanah dari BPN untuk dihubungkan dengan perbankan. Selain itu, pada tahun 2014 juga telah disusun Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Bank Indonesia Dalam Rangka Pemanfaatan SHAT (Juknis) dan kegiatan diseminasi Juknis kepada seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Juknis dimaksud disusun oleh Bank Indonesia, bekerja sama dengan BPN, KKP dan Kementerian.

Untuk mengatasi salah satu kendala yang menyebabkan terbatasnya akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada sumber pembiayaan perbankan, yaitu ketidadaan informasi keuangan yang memadai bagi perbankan, pada tahun 2014 Bank Indonesia menginisiasi program Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) bagi UMK. Program kerja tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran UMK akan pentingnya melakukan pencatatan keuangan sekaligus memberikan pengetahuan bagi UMK dalam melakukan pencatatan keuangan. Pada tahun ini Bank Indonesia telah menyusun kajian mengenai PTK serta bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK, dahulu Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) melaksanakan *pilot project* di Semarang dengan target peserta adalah penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan menggunakan modul Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Bank Indonesia juga memiliki program pengembangan wirausaha Bank Indonesia dengan *refocusing* pada konsep trilogi program yaitu terfokus, berkelanjutan, dan koordinatif. Program ini memfokuskan pada peningkatan

jumlah wirausaha di sektor agribisnis dan berorientasi ekspor dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan perbaikan struktur neraca perdagangan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketergantungan impor beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang akan berdampak pada kenaikan harga (*imported inflation*), kinerja ekspor yang cenderung turun, dan eksport nonmigas yang masih didominasi oleh produk primer (*food and raw materials*).

Di samping program yang telah dilakukan di atas, Bank Indonesia juga telah menyusun beberapa kajian, antara lain kajian mengenai pembiayaan rantai nilai (*Value Chain Financing – VCF*) dan kajian mengenai sektor Industri Kreatif. Kajian VCF didasari pemahaman bahwa peningkatan pembiayaan kepada UMKM juga harus diupayakan melalui pendekatan sektor ekonomi. Sebagai sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia, peningkatan pembiayaan kepada sektor pertanian dilakukan melalui pendekatan rantai nilai (*value chain*). VCF dapat didefinisikan sebagai aliran pembiayaan dalam subsektor antara pelaku rantai nilai, untuk tujuan memasarkan produk. Pembiayaan rantai nilai, menurut definisi ini, memerlukan hubungan dan pertukaran produk, informasi dan arus uang/dana antara para pelaku rantai nilai. Hal ini berbeda dengan pembiayaan kepada masing-masing pelaku, dimana akses layanan keuangan oleh satu pelaku adalah independen atau tidak terkait dengan pelaku rantai nilai lainnya.

Selain itu, sektor industri yang juga memperoleh perhatian cukup besar adalah sektor Industri Kreatif. Hal tersebut didasari oleh peran sektor dimaksud dari sisi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, dan sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari sisi jumlah unit usaha, Industri Kreatif memiliki pangsa 9,7% dibandingkan dengan total industri. Peran industri tersebut dalam penyerapan tenaga kerja juga tak kalah pentingnya, yaitu sebesar 10,7%, sedangkan dilihat dari sumbangannya terhadap PDB, sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 merupakan penyumbang PDB ke 7 terbesar dan semakin bertambah setiap tahunnya, yaitu sebesar 7,1% pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 (7,0%). Hal tersebut mendasari disusunnya kajian “Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Industri Kreatif di Indonesia – Sektor Industri Kerajinan” oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan The World Bank. Kajian dimaksud merupakan tindak lanjut atas kajian yang dilakukan di tahun 2013 mengenai Pemetaan Geografis Daya Saing Industri Kreatif di Indonesia.



Keterangan gambar:

Bank Indonesia memberikan layanan penukaran uang kepada masyarakat sebagai upaya untuk memelihara kondisi uang kertas agar tetap layak edar. Layanan ini diberikan secara cuma-cuma oleh Bank Indonesia dan dilakukan di berbagai wilayah di pelosok Nusantara termasuk melalui Kas Keliling Terapung.



BAB 12

KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah diarahkan untuk dapat menjamin terselenggaranya sistem pembayaran aman, efisien, dan andal sehingga mampu menopang kelancaran kegiatan transaksi ekonomi, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan Sistem Pembayaran difokuskan pada penguatan infrastruktur dan perluasan transaksi nontunai. Sementara itu, Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah ditujukan menjaga kecukupan uang kartal yang diperlukan oleh masyarakat dalam kuantitas dan kualitas yang baik.

Selama 2014, kebijakan di bidang sistem pembayaran ditujukan untuk menjamin terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal guna mendukung tercapainya stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kebijakan tersebut ditempuh melalui penguatan infrastruktur sistem pembayaran dan perluasan akses masyarakat terhadap penggunaan jasa sistem pembayaran, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Keseluruhan kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbiasa menggunakan sistem dan instrumen pembayaran nontunai (*less cash society/LCS*) serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan penguatan infrastruktur sistem pembayaran dilakukan baik pada sistem pembayaran nilai besar maupun ritel. Penguatan infrastruktur sistem pembayaran nilai besar dilakukan dengan melanjutkan pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II (BI-RTGS dan BI-SSSS Gen II). Pengembangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyelesaian transaksi nilai besar. Di sisi sistem pembayaran ritel, penguatan infrastruktur dilakukan melalui pengembangan SKNBI Generasi II (SKNBI Gen II) dan inisiasi pengembangan *National Payment Gateway* (NPG) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menata infrastruktur penyelenggaraan sistem pembayaran ritel. Penguatan infrastruktur juga dilakukan untuk memperlancar kegiatan transaksi pemerintah melalui implementasi interkoneksi Bank Indonesia *Government Electronic Banking* (BIG-eB) dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Dari sisi upaya memperluas akses masyarakat, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan uang elektronik yang mendukung keuangan inklusif melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD), pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), serta pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui uang elektronik. Upaya perluasan akses menjadi penting agar sistem pembayaran dapat lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Melalui pencanangan GNNT pada 14 Agustus 2014, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan keinginan (*willingness*) masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai. Harapannya secara bertahap akan terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang terbiasa menggunakan instrumen pembayaran nontunai (LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.

Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia senantiasa memperhatikan aspek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan instrumen pembayaran nontunai. Kebijakan dalam rangka peningkatan aspek perlindungan konsumen ditempuh melalui penerbitan ketentuan, pelaksanaan kegiatan edukasi, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan antara pengguna dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Dari sisi pengelolaan uang rupiah, kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia tetap berlandaskan pada tiga pilar pengelolaan uang rupiah, yaitu tersedianya uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta layanan kas prima. Bank Indonesia senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam kondisi layak edar, untuk mendukung kegiatan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan yang ditempuh selama tahun 2014 adalah tetap menjaga kecukupan posisi kas Bank Indonesia dan menerbitkan uang kertas pecahan Rp100.000 sesuai amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Kebijakan lain yang ditempuh adalah perluasan pembukaan Kas Titipan pada perbankan di wilayah timur Indonesia dan Sumatera. Bank Indonesia juga meningkatkan kerjasama dengan perbankan dan instansi pemerintah dalam memberikan layanan kas secara langsung kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Kas Keliling di tempat keramaian selama periode hari raya keagamaan, wilayah perbatasan, daerah terpencil dan pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai bentuk peran Bank Indonesia untuk ikut menjaga kedaulatan Negara.

Dari sisi infrastruktur sistem informasi pengelolaan uang, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas (BISILK) secara nasional. Hal ini bertujuan untuk optimalisasi dan efisiensi kegiatan penarikan dan penyetoran uang kartal oleh perbankan melalui Bank Indonesia. Demikian pula, melalui sistem Bank Indonesia-*Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC), Bank Indonesia terus berupaya mendukung tugas Kepolisian RI dalam pemberantasan uang rupiah palsu.

Berbagai kebijakan di bidang sistem pembayaran yang ditempuh oleh Bank Indonesia, didukung oleh sinergi dengan Pemerintah dan kerjasama dengan perbankan, telah mampu menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagai infrastruktur utama dalam menopang tercapainya stabilitas moneter dan sistem keuangan selama tahun 2014. Dengan kata lain, sistem pembayaran yang lancar, aman dan andal, mampu menopang kegiatan perekonomian nasional.

12.1. Kebijakan Sistem Pembayaran

Inovasi dalam sistem pembayaran bergerak dengan sangat cepat. Berbagai inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan keamanan. Selain itu, inovasi juga dimaksudkan untuk menurunkan biaya pemrosesan, meningkatkan kenyamanan dan memperluas akses bagi masyarakat. Sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa menempuh kebijakan yang mendukung inovasi agar dapat berjalan seiring dengan peningkatan keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem pembayaran itu sendiri. Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan nyaman bertransaksi menggunakan sistem dan instrumen pembayaran nontunai.

Penguatan Infrastruktur Sistem Pembayaran di Bank Indonesia

Dalam rangka penguatan infrastruktur Sistem Pembayaran di Bank Indonesia, telah dilakukan pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Gen II. Sistem BI-RTGS merupakan infrastruktur sistem keuangan untuk setelmen dana, sedangkan BI-SSSS merupakan infrastruktur sistem keuangan untuk penatausahaan dan setelmen surat berharga. Kegiatan pengembangan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional sistem melalui penggunaan teknologi dan sistem informasi yang terkini, penggunaan *international standard platform*, dan pengembangan fitur *liquidity management* serta *liquidity saving* dalam sistem yang memungkinkan peserta dapat mengelola likuiditasnya dengan lebih optimal. Sepanjang 2014, Bank Indonesia melanjutkan kegiatan pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Gen II yang difokuskan pada penyelesaian kegiatan uji coba aplikasi, pelaksanaan *System Integration Test* (SIT), penyiapan peserta dari sisi bisnis melalui kegiatan *change management*, serta penyusunan ketentuan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan sistem.

Di sisi sistem pembayaran ritel, penguatan infrastruktur dilakukan melalui pengembangan SKNBI Gen II. Pengembangan SKNBI Gen II ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran dan menyempurnakan sistem kliring saat ini, antara lain dilakukan pada sisi kepesertaan. Berbeda dengan SKNBI saat ini, yang kepesertanya bersifat desentralisasi (*one bank many members*), kepesertaan SKNBI Gen II bersifat sentralisasi (*one institution one member*, dengan

pengiriman transaksi melalui kantor pusat). Hal ini akan meningkatkan efisiensi dari sisi kapasitas yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja infrastruktur secara keseluruhan. Lebih lanjut, SKNBI Gen II juga dikembangkan dengan menggunakan prinsip lebih luas, lebih cepat, dan lebih fleksibel. Pengembangan SKNBI Gen II selama 2014 difokuskan pada penyusunan kajian pendukung, penyiapan infrastruktur, dan pengembangan aplikasi. Kajian pendukung yang disusun Bank Indonesia, antara lain terkait dengan *access policy*, peran penyelenggara kliring lokal, minimum *prefund*, dan *pricing policy*.

Pengembangan National Payment Gateway (NPG)

Dengan perkembangan teknologi dan inovasi sistem pembayaran, penggunaan sistem pembayaran ritel saat ini semakin besar seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat. Namun demikian, tren peningkatan penggunaan sistem pembayaran ritel belum didukung sepenuhnya oleh ketersediaan infrastruktur yang sesuai kebutuhan masyarakat. Masih adanya fragmentasi pada sistem pembayaran ritel menimbulkan berbagai masalah baik bagi masyarakat sebagai pengguna, penyelenggara sebagai penyedia jasa sistem pembayaran maupun Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran. Faktor utama penyebab terjadinya fragmentasi pada sistem pembayaran adalah pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing penyelenggara tidak memperhatikan aspek efisiensi secara nasional. Fragmentasi pada sistem pembayaran ritel yang tidak memiliki interoperabilitas berdampak pada keterbatasan akses dan penggunaan infrastruktur yang belum efisien. Di sisi lain, belum efektifnya interoperabilitas dan interkoneksi jaringan pembayaran menyebabkan pemanfaatan infrastruktur sistem pembayaran secara bersama dalam rangka efisiensi menjadi terkendala. Dari sisi Bank Indonesia, fragmentasi ini berdampak pada adanya kegiatan setelmen transaksi melalui sistem pembayaran yang tidak dilakukan di Bank Indonesia sebagai penyelenggara setelmen dana secara nasional. Selain itu, dengan adanya fragmentasi tersebut, data dan informasi transaksi sistem pembayaran ritel yang disampaikan kepada Bank Indonesia belum lengkap dan komprehensif. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya potensi bias dalam pengambilan kebijakan di bidang sistem pembayaran, mengingat data dan informasi merupakan sumber utama yang digunakan dalam melakukan analisis pengambilan kebijakan tersebut.

Dengan adanya program transformasi Arsitektur Fungsi Strategis BI (AFSBI) 2014, yang di dalamnya termasuk pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap pengembangan NPG. Pengembangan NPG dilakukan dalam empat tahapan. Pada tahap pertama melalui pengembangan *domestic switch*, tahap kedua melalui pengembangan *domestic scheme*, tahap ketiga melalui pengembangan *payment hub*, dan selanjutnya menjadi suatu infrastruktur sistem pembayaran secara utuh.^{1,2}

Pada tahap pertama, pengembangan *domestic switch* akan mengintegrasikan berbagai *switching* yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, pemrosesan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara internasional melalui prinsipal internasional, akan diproses secara nasional oleh *domestic switch*. Pada tahap kedua dengan pengembangan *domestic scheme*, Bank Indonesia akan membentuk suatu *brand* nasional untuk dapat dipergunakan di dalam negeri. Keberadaan *brand* nasional tersebut dapat menurunkan skema biaya pemrosesan transaksi yang dikenakan pada pedagang (*merchant*) maupun pemegang kartu. Tahap ketiga pengembangan *payment hub* untuk menghubungkan *domestic switch* dengan layanan pembayaran lainnya seperti kartu ATM/debet, uang elektronik, *e-commerce*, remitansi, dan sebagainya. Pada tahapan akhir, saat NPG menjadi suatu infrastruktur sistem pembayaran yang utuh, akan dilakukan pemindahan proses setelmen yang selama ini masih dilaksanakan melalui bank umum menjadi melalui sistem BI-RTGS. Dengan setelmen melalui sistem BI-RTGS diharapkan akan menurunkan risiko setelmen.

Implementasi Interkoneksi Bank Indonesia *Government electronic Banking (BIG-eB)* dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Sejak pertengahan tahun 2013, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Keuangan mempersiapkan interkoneksi antara BIG-eB dengan SPAN.

1 *Domestic switch* merupakan sebuah lembaga atau instansi di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti mesin ATM atau EDC dalam rangka memperoleh otorisasi Penerbit APMK.

2 *Domestic scheme* merupakan sebuah skema (*brand*) kartu kredit atau kartu debet domestik yang akan bersaing dengan skema internasional.

BIG-eB, yang merupakan bagian dari sistem *core banking* Bank Indonesia, adalah sarana elektronik yang disediakan Bank Indonesia untuk Kementerian Keuangan dalam rangka pengelolaan rekening pemerintah (antara lain memonitor saldo dan mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening dan nilai tukar, melakukan tata usaha pengguna, serta melakukan transaksi secara elektronik dan *online*). Sementara itu, SPAN merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan ke dalam satu sistem terintegrasi (meliputi fungsi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan negara).

Pada Januari 2014, aplikasi BIG-eB telah terhubung (interkoneksi) secara *host to host* dengan SPAN. Interkoneksi BIG-eB dan SPAN akan meningkatkan keandalan serta efisiensi penyelesaian transaksi Pemerintah dan pemenuhan informasi terkait rekening pemerintah di Bank Indonesia. Manfaat interkoneksi itu sendiri antara lain adalah mempercepat penyampaian perintah pembukuan, penyampaian informasi rekening, serta mempermudah proses rekonsiliasi transaksi dan rekapitulasi penerimaan negara secara otomatis. Semua kegiatan input data transaksi, proses pengecekan data transaksi, serta persetujuan atas transaksi akan dilakukan melalui SPAN.

Secara umum pelaksanaan interkoneksi tersebut telah berlangsung dengan baik. Selama tahun 2014, tingkat ketersediaan sistem BIG-eB telah sesuai dengan tingkat ketersediaan yang ditetapkan. Namun demikian, monitoring dan evaluasi terus dilakukan dari berbagai aspek untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem BIG-eB guna meminimalisir gangguan interkoneksi dan mengakomodir kebutuhan SPAN. Selanjutnya, akan dilakukan pengembangan sistem BIG-eB, antara lain meliputi penambahan berbagai fitur transaksi valuta asing dan *future date*, serta penyesuaian kapasitas pemrosesan transaksi untuk mengakomodasi peningkatan volume transaksi karena kebutuhan *stakeholders*.

Penyempurnaan Ketentuan Uang Elektronik

Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri uang elektronik dan memperluas akses masyarakat untuk memperoleh layanan jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia terus berupaya melakukan penyempurnaan kebijakan terkait uang elektronik. Beberapa kebijakan yang ditempuh melalui penyempurnaan dan penerbitan

ketentuan uang elektronik antara lain meliputi kebijakan perizinan, biaya yang dapat dikenakan, dan kerjasama dengan agen LKD.

Kebijakan perizinan meliputi pemberlakuan jangka waktu perizinan bagi penerbit uang elektronik, yaitu paling lama lima tahun sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang kembali dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Selain itu, kebijakan perizinan juga mencakup penyempurnaan perizinan bagi penerbit uang elektronik yang mempunyai fitur transfer dana antar pemegang dan tarik tunai, serta adanya evaluasi perizinan bagi penyelenggara uang elektronik.

Dari aspek pengenaan biaya kepada pemegang uang elektronik, telah diatur bahwa biaya yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang antara lain meliputi biaya penggantian media uang elektronik, biaya pengisian ulang (*top up*) dan tarik tunai melalui pihak lain, dan biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, diatur juga bahwa dalam pengenaan biaya harus menerapkan prinsip transparansi.

Selanjutnya, terkait dengan upaya mendukung program keuangan inklusif, telah diatur bahwa penerbit uang elektronik dapat bekerjasama dengan agen LKD dalam penyelenggaraan uang elektroniknya. Agen LKD tersebut dapat berupa penyelenggara transfer dana, badan usaha berbadan hukum Indonesia, dan individu.

Pelaksanaan Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

Pencanangan GNNT pada 14 Agustus 2014 merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Hal ini mengingat penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran yang bersifat ritel masih tinggi, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Dengan masih tingginya penggunaan uang tunai dalam pembayaran ritel, kondisi geografis, dan jumlah populasi yang cukup besar, maka potensi penggunaan instrumen pembayaran berbasis elektronik sangat besar.

Dengan program GNNT, peningkatan penggunaan instrumen pembayaran nontunai diharapkan dapat tercapai sehingga mendorong transparansi, efisiensi, perencanaan perekonomian yang lebih akurat, dan peningkatan akses masyarakat. Selanjutnya, untuk

mendukung program GNNT, Bank Indonesia terus berupaya melalui berbagai kegiatan koordinasi dan fasilitasi baik dengan institusi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat maupun dengan industri sistem pembayaran. Dukungan pemerintah dalam program GNNT terutama untuk mendorong penggunaan sistem dan instrumen pembayaran nontunai dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, peran industri sistem pembayaran lebih difokuskan untuk penyediaan layanan dan infrastruktur sistem pembayaran secara merata kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri. Sementara itu, dukungan dunia usaha dan masyarakat lebih diarahkan pada kesadaran untuk menggunakan sistem dan instrumen pembayaran nontunai mengingat manfaatnya yang besar dalam peningkatan efisiensi perekonomian secara nasional.

Peran penting Bank Indonesia dalam program GNNT adalah mengawal perbankan sebagai pemain utama dalam industri sistem pembayaran dengan menyediakan layanan sistem pembayaran yang efisien, aman dan andal serta tetap menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan dengan menempuh kebijakan di bidang sistem pembayaran yang antara lain memperhatikan penerapan aspek manajemen risiko, perluasan akses, perlindungan konsumen, serta kepentingan nasional. Sistem pembayaran yang semakin efisien, aman, dan andal akan menumbuhkan rasa percaya dan nyaman bagi masyarakat terhadap penggunaan sistem dan instrumen pembayaran nontunai. Masyarakat akan terbiasa menggunakan sistem dan instrumen pembayaran nontunai yang pada gilirannya akan mewujudkan LCS.

Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan Uang Elektronik

Dalam rangka mendorong program perluasan akses keuangan (*financial inclusion*) dan mendukung GNNT yang telah dicanangkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014, Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial PKH menggunakan uang elektronik. Tujuan program ini adalah agar masyarakat dapat menerima bantuan secara penuh, membiasakan masyarakat dalam penggunaan uang elektronik, dan tidak serta merta menggunakan bantuan tersebut untuk kegiatan konsumtif.

Program penyaluran bantuan sosial PKH menggunakan uang elektronik pada dasarnya mengubah metode penyaluran bantuan pemerintah (*Government to People – G to P*) dari semula secara tunai melalui kantor pos menjadi menggunakan media uang elektronik. Uang elektronik yang digunakan berbasis server (*server based*) dengan perangkat telepon seluler (ponsel). Uang elektronik tersebut dapat diuangkan melalui penerbit atau agen LKD yang bekerjasama dengan penerbit sehingga penguangannya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Di sisi lain, penyaluran bantuan melalui uang elektronik juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyaluran PKH baik dari sisi waktu maupun biaya.

Penyaluran bantuan sosial PKH menggunakan uang elektronik telah dilaksanakan pada periode 8 - 22 Oktober 2014 kepada 1.860 Keluarga Sangat Miskin (KSM) di empat daerah *pilot project*, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTT. Penyaluran bantuan PKH tersebut merupakan penyaluran bantuan PKH tahap III pada 2014. Dalam satu tahun, KSM penerima PKH menerima bantuan sebanyak empat kali. Dalam penyaluran bantuan tersebut melibatkan dua bank penerbit uang elektronik, yaitu Bank Mandiri dan BRI serta 19 Agen LKD Individu (10 dari Bank Mandiri dan 9 dari BRI).

Secara umum, KSM penerima bantuan sosial PKH merespons positif penyaluran bantuan sosial PKH menggunakan uang elektronik. Beberapa hal positif yang dirasakan KSM penerima PKH antara lain kemudahan penarikan bantuan melalui agen LKD yang lokasinya lebih dekat, biaya transportasi yang lebih murah, serta tempat menunggu yang lebih nyaman. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa terdapat kendala selama pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH tahap III pada 2014 menggunakan uang elektronik yang dapat diatasi oleh penerbit uang elektronik.

Penguatan Aspek Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran

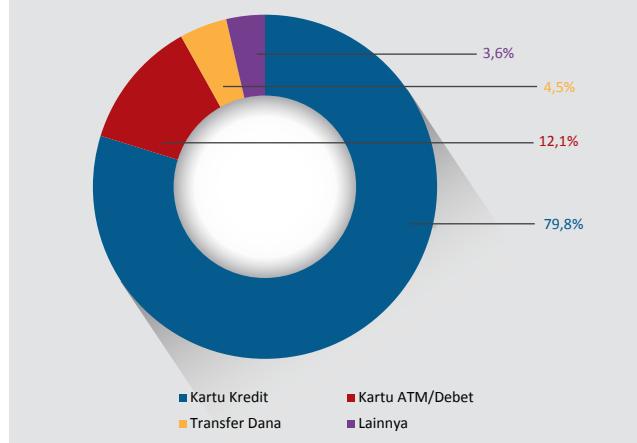
Peningkatan transaksi dalam sistem pembayaran dari tahun ke tahun membawa konsekuensi tidak saja bagi penyelenggara namun juga bagi otoritas di bidang sistem pembayaran. Dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia senantiasa berupaya menempuh kebijakan agar penerapan aspek perlindungan konsumen oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran dapat dilakukan secara efektif. Hal ini mengingat ketika masyarakat merasa terlindungi akan meningkatkan rasa nyaman dalam menggunakan sistem

dan instrumen pembayaran nontunai. Kebijakan Bank Indonesia juga ditujukan untuk mendukung penerapan aspek perlindungan konsumen melalui pemberian pemahaman mengenai produk sistem dan instrumen pembayaran nontunai kepada masyarakat termasuk manfaat dan risikonya, menerima konsultasi mengenai permasalahan penggunaan produk sistem pembayaran, serta fasilitasi terhadap sengketa antara konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran.

Guna memperkuat aspek perlindungan konsumen tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan yang terkait dengan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai kesetaraan akses, transparansi produk dan biaya, perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Adapun cakupan dari penerapan aspek perlindungan konsumen meliputi penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana, kegiatan transfer dana, kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, kegiatan uang elektronik, kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang rupiah, serta penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Selama 2014, Bank Indonesia telah menerima pengaduan dari nasabah sebanyak 1.766 pengaduan. Selanjutnya, Bank Indonesia telah melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut, yaitu 1.671 pengaduan telah selesai (94,6%) dan sisanya sebanyak 95 pengaduan sedang dalam proses (5,4%). Dari 1.766 pengaduan, pengaduan nasabah terbesar adalah terkait dengan kartu kredit, kartu ATM/debet dan transfer dana, masing-masing sebesar 1.409

Grafik 12.1. Penyelesaian Pengaduan Nasabah Jasa Sistem Pembayaran



pengaduan atau 79,8%, 214 pengaduan atau 12,1%, dan 79 pengaduan atau 4,5% (Grafik 12.1).

Selain menerima pengaduan nasabah, Bank Indonesia juga menerima permintaan informasi terkait berbagai produk dalam sistem pembayaran. Pada 2014, Bank Indonesia telah menindaklanjuti semua permintaan informasi, yaitu sebanyak 5.720 permintaan. Permintaan informasi yang terbesar adalah permintaan informasi terkait penyediaan dan penyetoran uang, yaitu sebanyak 3.904 permintaan atau 68,3%. Selanjutnya, diikuti dengan permintaan informasi terkait transfer dana, yaitu sebanyak 352 permintaan atau 6,2% dan uang elektronik sebanyak 224 permintaan atau 3,9% (Grafik 12.2).

Penyesuaian Batas Nominal Transaksi Menggunakan Sistem BI-RTGS

Mulai 15 Desember 2014, Bank Indonesia memberlakukan kebijakan terkait penyesuaian batas nominal transaksi dengan menggunakan Sistem BI-RTGS. Kebijakan ini antara lain bertujuan untuk mendorong terciptanya keseimbangan pemanfaatan infrastruktur layanan sistem pembayaran nasional nontunai, meningkatkan efisiensi biaya transaksi yang harus dibayarkan oleh nasabah, dan meningkatkan efisiensi likuiditas bagi perbankan.

Ketentuan tersebut mengatur jumlah nominal transaksi antarbank untuk kepentingan nasabah yang dapat diproses melalui Sistem BI-RTGS yaitu lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sementara itu,

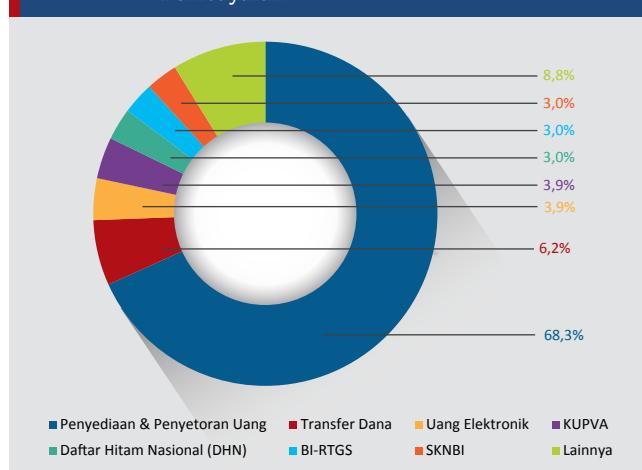
Tabel 12.1. Nominal Transaksi BI-RTGS dan SKN-BI

No	Nominal	Jenis Layanan SP Bank Indonesia	
		SKNBI	BI-RTGS
1	< Rp 100 juta	✓	
2	Rp 100 juta s.d. Rp 500 juta	✓	✓
3	> Rp 500 juta		✓

transaksi antarbank untuk kepentingan nasabah dengan nilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke bawah dilakukan melalui SKNBI. Dengan diberlakukannya ketentuan dimaksud maka nominal transaksi yang dapat dilayani oleh SKNBI dan Sistem BI-RTGS adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 12.1.

Penerapan kebijakan penetapan nominal transaksi antarbank untuk kepentingan nasabah yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS tidak akan mengurangi kecepatan layanan transfer dana kepada masyarakat. Hal ini mengingat bahwa sejak 7 Januari 2013 Bank Indonesia telah meningkatkan layanan bagi pengguna transfer dana melalui SKNBI, yakni melalui penyediaan layanan transfer dana yang lebih murah dan cepat. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat dapat menerima hasil transfer secara lebih cepat yang dimungkinkan dengan pelaksanaan setelmen transfer dana melalui SKNBI yang dilakukan setiap dua jam sekali, yaitu pada pukul 10.00 WIB, 12.00 WIB, 14.00 WIB, dan 16.00 WIB.

Grafik 12.2. Pengaduan Nasabah per Produk Sistem Pembayaran



Persiapan Implementasi Penggunaan Personal Identification Number (PIN) Online 6 Digit dalam Kartu Kredit

Sebagai salah satu bentuk pengamanan transaksi dengan menggunakan kartu kredit, Bank Indonesia telah menempuh kebijakan terkait sarana verifikasi dan autentikasi kartu kredit dalam transaksi melalui penggunaan PIN online 6 digit. Kebijakan penggunaan PIN online 6 digit ini akan menggantikan kebijakan otorisasi kartu kredit saat ini yang menggunakan tanda tangan. Penggunaan PIN lebih aman dari tandatangan mengingat PIN adalah angka rahasia yang hanya diketahui pemiliknya dan terenkripsi, sehingga lebih sulit untuk dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan transaksi kartu kredit dengan PIN online 6 digit meliputi transaksi belanja di *merchant* dan transaksi penarikan tunai (*cash*

advance) pada ATM. Dalam melaksanakan kebijakan ini, berbagai upaya telah dilakukan industri sistem pembayaran, antara lain meliputi persiapan infrastruktur dan edukasi kepada masyarakat pengguna kartu kredit, serta sosialisasi kepada sumber daya di *merchant*.

Dengan mempertimbangkan kesiapan penyelenggara kartu kredit (*penerbit* dan *acquirer*), pemegang kartu kredit, dan *merchant* dalam penerapan teknologi PIN *online* 6 digit sebagai sarana verifikasi dan autentikasi pada transaksi kartu kredit yang diterbitkan oleh penerbit kartu kredit di Indonesia, Bank Indonesia menerbitkan perubahan ketentuan terkait implementasi PIN *online* 6 digit kartu kredit. Terhitung sejak 1 Juli 2015, seluruh penerbitan kartu baru dan kartu perpanjangan (*renewal*) oleh penerbit kartu kredit di Indonesia wajib menggunakan PIN *online* 6 digit. Kartu lama yang belum jatuh waktu, tetap dapat digunakan oleh pemegang, namun pada saat jatuh waktu harus digantikan dengan kartu yang telah menggunakan sarana verifikasi dan autentikasi berupa PIN *online* 6 digit. Seluruh kartu kredit wajib telah mengimplementasikan PIN *online* 6 digit paling lambat 30 Juni 2020. Dengan demikian, terhitung sejak 1 Juli 2020, seluruh transaksi kartu kredit harus sudah menggunakan PIN *online* 6 digit. Selain itu, seluruh *acquirer* kartu kredit diwajibkan mengganti atau meningkatkan standar keamanan pada seluruh *Electronic Data Capture* (EDC) dan *host system*, sehingga dapat memproses transaksi kartu kredit dengan PIN *online* 6 digit. Kewajiban tersebut harus dipenuhi paling lambat pada 30 Juni 2015.

Kebijakan penggunaan PIN *online* 6 digit dalam kartu kredit ini wajib diterapkan pada kartu kredit yang diterbitkan di Indonesia dan untuk bertransaksi di Indonesia. Sementara itu, untuk transaksi kartu kredit yang diterbitkan di luar negeri dan negara tersebut belum menggunakan PIN untuk sarana verifikasi dan autentikasi, masih diperkenankan menggunakan tandatangan untuk bertransaksi di Indonesia. Penggunaan tanda tangan juga diperkenakan pada kartu kredit yang diterbitkan di Indonesia untuk bertransaksi di luar negeri, sepanjang negara tempat bertransaksi tersebut belum menggunakan PIN sebagai sarana verifikasi dan autentikasi dalam transaksi kartu kredit.

Uang mengatur tahapan pengelolaan rupiah meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, serta pencabutan dan penarikan. Sedangkan kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah. Pada tahapan perencanaan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam memproyeksikan kebutuhan uang kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar (*clean money policy*) dengan mempertimbangkan berbagai indikator makroekonomi dan keuangan antara lain tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan suku bunga di samping perilaku masyarakat Indonesia dalam memegang uang kartal yang masih kuat. Kebijakan pengelolaan uang rupiah juga telah mempertimbangkan implikasi dari berbagai kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan sektor riil, serta isu strategis di bidang pengelolaan uang rupiah. Pada tahun 2014, kebijakan Pemerintah yang berkontribusi dalam perumusan kebijakan pengelolaan uang rupiah antara lain adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Selain itu, isu mengenai perlunya peningkatan pemerataan ketersediaan uang layak edar di seluruh Indonesia, peningkatan kualitas dan unsur pengaman uang, dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak di luar bank sentral dalam pengelolaan uang rupiah, juga menjadi perhatian.

Selama 2014, Bank Indonesia secara garis besar menempuh lima kebijakan pengelolaan uang rupiah. Pertama, menjaga kecukupan posisi kas Bank Indonesia untuk memenuhi penarikan uang kartal masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, mengeluarkan dan menerbitkan uang kertas pecahan Rp100.000 dengan ciri-ciri sesuai UU Mata Uang. Ketiga, mengembangkan dan memperluas layanan kas kepada perbankan dan masyarakat. Keempat, memperkuat infrastruktur sistem informasi pengelolaan uang rupiah. Kelima, meningkatkan kegiatan edukasi publik mengenai ciri keaslian uang rupiah dan cara memperlakukan uang rupiah dengan baik.

12.2. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan situasi makroekonomi dan pasar keuangan menjadi faktor penting bagi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan pengelolaan uang rupiah. UU Mata

Menjaga Kecukupan Posisi Kas Bank Indonesia

Dalam rangka memenuhi penarikan uang kartal oleh perbankan dan masyarakat, Bank Indonesia menempuh kebijakan untuk menjaga kecukupan posisi kas Bank Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tahun 2014,

Bank Indonesia menetapkan tingkat kecukupan posisi kas dengan indikator jumlah *Iron Stock* Nasional sebesar 15% dari proyeksi Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) dan Kas Minimum sebesar 1,5 bulan penarikan bank (*outflow*).^{3,4}

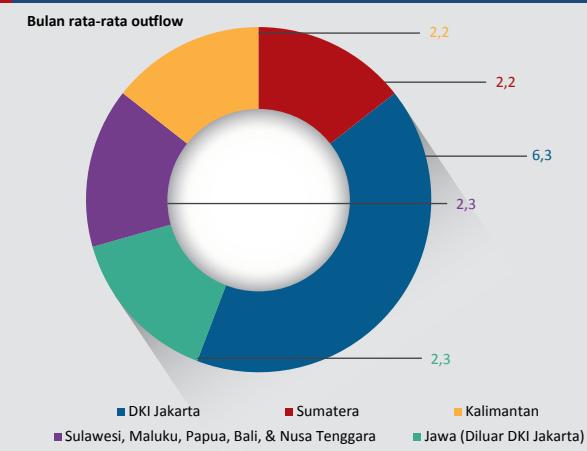
Pada tahun 2014, Bank Indonesia mampu menjaga kecukupan posisi kas secara nasional dengan pencapaian sebesar 3,50 *outflow* bulanan rata-rata setahun.

Berdasarkan wilayah, rasio posisi kas tertinggi di Kantor Pusat Bank Indonesia yang mencapai 6,3 *outflow* bulanan rata-rata karena juga mencakup *Iron Stock* Nasional yang harus dijaga (Grafik 12.3).

Untuk menjaga kecukupan posisi kas Bank Indonesia ditempuh beberapa kebijakan. Pertama, menjaga kualitas uang yang diedarkan dengan menetapkan standar kelulusan uang pada tingkat tertentu (*soil level*).

Kedua, implementasi *bye laws* nasional Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) sejak bulan Juni 2012 yang mewajibkan penarikan dan penyetoran uang kartal melalui Bank Indonesia dilakukan setelah bank melakukan pertukaran uang kartal antar bank.⁵ Kebijakan *bye laws* nasional TUKAB disertai dengan kebijakan *dropshot*.⁶ Kebijakan ini berdampak pada menurunnya pertumbuhan jumlah penarikan uang rupiah oleh perbankan dari Bank Indonesia. Ketiga, menjaga dan memastikan ketepatan jadwal pengiriman bahan uang, baik bahan kertas uang maupun bahan logam uang, dari perusahaan pemasok bahan uang. Keempat, koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar pemeriksaan bahan kertas uang yang diimpor oleh Bank Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok dapat dilakukan melalui Jalur Hijau dengan waktu pemeriksaan yang lebih cepat. Kelima, menjaga dan memastikan jadwal pencetakan uang rupiah dalam berbagai denominasi dapat diselesaikan oleh Perusahaan

Grafik 12.3. Rasio Posisi Kas Bank Indonesia terhadap *Outflow* Bulanan Rata-rata



Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Keenam, kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia, PT. Pelayaran Nasional Indonesia dan PT. Silkargo untuk menjaga kelancaran distribusi uang ke seluruh wilayah Indonesia.

Selama 2014, Bank Indonesia telah mendistribusikan uang rupiah ke seluruh wilayah Indonesia sebesar Rp166,5 triliun. Distribusi uang rupiah tertinggi untuk Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) yang mencapai Rp76,2 triliun, kemudian diikuti oleh KPwDN-BI di wilayah Sumatera sebesar Rp51,8 triliun dan wilayah timur Indonesia sebesar Rp46,5 triliun. Sementara itu, distribusi uang ke KPwDN-BI di wilayah Jawa sebesar Rp7,9 triliun untuk Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan pola aliran uang melalui Bank Indonesia di wilayah Pulau Jawa adalah *net inflow*, sehingga terdapat retur atau pengembalian uang rupiah dari KPwDN-BI Provinsi Jawa Barat dan KPwDN-BI Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp15,9 triliun.

Ketersediaan uang rupiah juga tercermin dari terpenuhinya penarikan uang kartal selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2014 yang mencapai Rp124,8 triliun atau 105,3% dari proyeksi kebutuhan uang perbankan dan masyarakat. Dari sisi denominasi, realisasi penarikan pecahan Rp100.000, Rp20.000 dan Rp10.000 lebih tinggi dari proyeksi. Selanjutnya, periode Natal dan liburan akhir tahun 2014, jumlah penarikan perbankan dan masyarakat selama bulan Desember 2014 mencapai Rp72,9 triliun atau 88,2% dari proyeksi kebutuhan uang perbankan dan masyarakat. Dari sisi denominasi, realisasi penarikan pecahan Rp100.000, dan uang logam Rp500 lebih tinggi dari proyeksi. (Tabel 12.2).

3 *Iron Stock* Nasional merupakan persediaan siaga untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan permintaan uang kartal yang tidak diprediksi pada saat penyusunan Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) tahunan, misalnya kenaikan BBM dan TTL pada periode tahun berjalan.

4 Kas Minimum merupakan jumlah persediaan kas minimum yang harus dijaga di seluruh Kantor Bank Indonesia dengan asumsi tidak ada penyetoran bank ke Bank Indonesia. Kas Minimum dijaga karena faktor distribusi dan transportasi, serta pasokan uang Hasil Cetak Sempurna (HCS) dari Perum Peruri.

5 TUKAB adalah kegiatan antarbank yang meliputi permintaan, penawaran, dan penukaran uang rupiah yang masih layak edar dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan uang sesuai ketentuan Bank Indonesia.

6 *Dropshot* adalah kebijakan pembayaran uang rupiah layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan penghitungan rinci dan penyortiran. Pembayaran oleh Bank Indonesia kepada bank dilakukan dalam 1 kemasan plastik transparan (10 brood) yang masih utuh, tersegel, dan terdapat label bank penyetor.

Tabel 12.2. Proyeksi dan Realisasi Penarikan Uang Rupiah Periode Hari Raya Keagamaan

Denominasi	Outflow Periode Ramadhan & Idul Fitri (30 Juni - 25 Juli 2014)			Outflow Periode Natal & Liburan Akhir Tahun 2014			Miliar rupiah
	Proyeksi	Realisasi	Pencapaian	Proyeksi	Realisasi	Pencapaian	
	Uang Kertas	118.373,2	124.703,5	105,3%	82.557,1	72.807,7	88,2%
100.000	60.119,7	71.772,9	119,4%	44.732,4	46.490,9	103,9%	
50.000	45.354,7	39.836,5	87,8%	33.757,6	24.023,3	71,2%	
20.000	3.395,6	3.480,6	102,5%	1.697,1	858,6	50,6%	
10.000	3.668,4	4.188,1	114,2%	1.217,0	743,7	61,1%	
< 10.000	5.834,8	5.425,5	93,0%	1.152,94	691,32	60,0%	
Uang Logam	146,0	93,3	63,9%	76,1	59,8	78,5%	
1.000	84,1	47,1	56,0%	44,7	15,2	34,1%	
500	49,1	36,5	74,2%	22,9	36,8	161,0%	
< 500	12,81	9,78	76,4%	8,6	7,7	90,0%	
Jumlah	118.519,2	124.796,8	105,3%	82.633,2	72.867,5	88,2%	

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014

Sesuai amanat Pasal 42 UU Mata Uang, uang rupiah kertas dengan ciri umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) mulai diberlakukan, dikeluarkan, dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014. Ciri-ciri umum tersebut secara garis besar adalah penggunaan frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan penandatanganan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, yang mewakili Pemerintah. Hal ini menegaskan makna filosofis rupiah sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan uang rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI termasuk di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan pulau terdepan NKRI. Penghargaan warga negara Indonesia pada mata uangnya sendiri akan mendorong berdaulatnya rupiah di negeri sendiri.

Pada tanggal 24 Juli 2014 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014. Adapun ciri-ciri Uang Kertas Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014 tersebut adalah sebagai berikut (Gambar 12.1).

Selain itu, dalam rangka mendorong perkembangan numismatika atau koleksi uang di Indonesia, pada tanggal 24 Juli 2014 Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/14/PBI/2014 tentang

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014 Dalam Bentuk Uang Rupiah Kertas Bersambung. Dalam setiap lembar Uang Rupiah Kertas Bersambung pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014 ini terdiri dari dua lembar bilyet, empat lembar bilyet dan 45 lembar bilyet, yang merupakan satu kesatuan, serta dikeluarkan dan diedarkan secara terbatas.

Pengembangan dan Perluasan Layanan Kas Kepada Perbankan dan Masyarakat

Dalam rangka perluasan layanan kas kepada masyarakat, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan perbankan untuk membuka layanan Kas Titipan.⁷ Layanan Kas Titipan mengambil lokasi di daerah tertentu yang berada di luar jangkauan layanan kas Bank Indonesia (*blank spot area*), dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Adanya Kas Titipan pada satu kantor bank sebagai bank pengelola akan semakin meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transportasi, baik bagi bank pengelola maupun bagi bank-bank lain yang menjadi anggota. Bank tidak perlu lagi melakukan kegiatan penarikan uang ke kantor Bank Indonesia yang berlokasi jauh dari lokasi bank tersebut, atau kantor bank tidak perlu lagi melakukan kegiatan penarikan uang dari kantor cabang bank di wilayah

⁷ Kas Titipan adalah kegiatan penyediaan uang rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada salah satu bank umum untuk mencukupi kebutuhan kas bank-bank dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah atau daerah tertentu.

Gambar 12.1. Uang Kertas Bank Indonesia Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014

Uang Kertas Bank Indonesia Pecahan Rp100.000	
	Nama Uang Kertas: Uang Kertas Bank Indonesia
Muka	Seri/Emisi: Tahun 2014
	Pecahan: Rp100.000
Muka	Zaman/Masa: Zaman RI Kesatuan
	Tgl. Penerbitan: 17 Agustus 2014
	Tgl. Penarikan Kembali:
	Penandatangan: Gubernur Bank Indonesia Menteri Keuangan
	Tanda Air: W.R. Soepratman
	Bahan: Serat Kapas
	Ukuran: 151x65 mm
	Warna Dominan
	- Depan: Merah
	- Belakang: Merah
	Desain Utama
	- Depan: Gambar Pahlawan Proklamasi Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta
	- Belakang: Gambar Gedung MPR/DPR/DPD RI
	Lain-lain: -

Belakang

lain. Pada akhirnya, layanan kepada masyarakat sebagai nasabah perbankan di wilayah tersebut menjadi lebih cepat dan memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat.

Selama 2014, Bank Indonesia telah membuka lima Kas Titipan baru di Pulau Kalimantan dan satu Kas Titipan baru di Pulau Sumatera. Di samping itu, Bank Indonesia menutup satu Kas Titipan di Pangkal Pinang karena telah dibuka KPwDN Provinsi Bangka Belitung. Bank Indonesia juga membuka KPwDN Provinsi Papua Barat. Kedua KPwDN tersebut menjalankan fungsi perkasan, mulai dari layanan setoran, bayaran, penukaran, pengolahan uang, dan kas keliling. Dengan demikian, pada tahun 2014 Bank Indonesia telah bekerjasama dengan 12 Bank Umum untuk membuka 30 Kas Titipan (Tabel 12.3 dan Gambar 12.2). Jumlah penarikan uang rupiah oleh bank pengelola Kas Titipan pada tahun 2014 mencapai Rp36,1 triliun atau tumbuh sebesar 93,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp18,7 triliun. Penarikan uang terbesar dilakukan oleh perbankan di wilayah Sumatera (43,0%), kemudian diikuti Sulawesi Bali Nusra (36,1%), dan Kalimantan (20,9%).

Di samping membuka Kas Titipan, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan instansi pemerintah, BUMN, dan perbankan untuk melakukan layanan Kas Keliling.⁸ Kebijakan peningkatan frekuensi Kas Keliling ditujukan

Tabel 12.3. Bank Umum Sebagai Pengelola Kas Titipan Bank Indonesia

No	Nama Bank Pengelola	Jumlah Kas Titipan	Lokasi dan Jumlah Bank Anggota
1	Bank Mandiri	8	Rantau Prapat (12 bank anggota), Toli-Toli (4), Tahuna (4), Gorontalo (14), Sorong (10), Timika (7), Biak (4), dan Tanjung Pinang (13)
2	Bank Negara Indonesia	5	Gunung Sitoli (4), Luwu (8), Muaro Bungo (15), Bau-Bau (7), dan Padang Sidempuan (12)
3	Bank Rakyat Indonesia	3	Lubuk Linggau (9), Sampit (7), Waingapu (3)
4	BPD Sulawesi Utara	1	Kotamobagu (6)
5	BPD Sumsel Babel	1	Prabumulih (17)
6	BPD Kalimantan Barat	3	Sintang (14), Ketapang (12), Singkawang (10)
7	BPD Kalimantan Tengah	2	Muara Teweh (6) dan Pangkalan Bun (12)
8	BPD Kalimantan Timur	1	Sangatta (11)
9	BPD Nusa Tenggara Barat	1	Bima (6)
10	BPD Nusa Tenggara Timur	2	Maumere (4) dan Atambua (4)
11	BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	2	Palopo (13) dan Mamuju (13)
12	BPD Papua & Papua Barat	1	Merauke (6)
		30 Kantor Bank	267 kantor bank anggota

⁸ Kas keliling adalah kegiatan layanan penukaran uang oleh unit kerja kas di Kantor Pusat maupun KPwDN-BI kepada masyarakat, bank dan pihak lain dengan menggunakan sarana transportasi tertentu.

Gambar 12.2. Peta Penyebaran Kas Titipan



untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, terutama untuk pembayaran barang dan jasa bernilai kecil (ritel) atau pengembalian uang. Di samping itu, keberadaan layanan kas keliling mempermudah masyarakat untuk menukar uang yang sudah lusuh, rusak atau uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran sejalan dengan upaya mewujudkan *clean money policy*.

Kegiatan Kas Keliling dilakukan secara reguler di pusat-pusat keramaian (antara lain pasar dan stasiun kereta api), pada hari besar keagamaan, serta di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan pulau terdepan NKRI, melalui kerjasama dengan perbankan dan instansi pemerintah. Pada tahun 2014, Bank Indonesia memperluas kerjasama Kas Keliling dengan PT. Pegadaian (Persero) dengan membuka layanan penukaran pada 15 Kantor Pegadaian di wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang dilakukan selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2014. Bank Indonesia juga melanjutkan kerjasama dengan TNI-AL untuk melakukan kegiatan Kas Keliling di pulau-pulau terdepan, baik di wilayah barat maupun timur Indonesia. Selama tahun 2014, jumlah penukaran uang pada Kas Keliling mencapai Rp1,5 triliun atau meningkat 12,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,3 triliun. Pangsa tertinggi terdapat di wilayah Jawa (26,1%), Sumatera (23,1%) dan Sulampua Bali Nusra (21,4%)

Tingginya pangsa penarikan uang rupiah pada Kas Titipan dan Kas Keliling di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan transportasi dan jumlah kantor Bank Indonesia seperti Kalimantan dan Sulampua Bali Nusra, serta Sumatera mengindikasikan keberhasilan kebijakan Bank Indonesia untuk memperluas layanan kas dalam

menopang kelancaran tumbuh kembangnya kapasitas ekonomi masyarakat.

Implementasi Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas (BISILK) secara Nasional

Sebelum implementasi BISILK, penyampaian laporan terkait pelaksanaan kegiatan penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank masih menggunakan sarana komunikasi publik.⁹ Dalam perkembangannya, dibutuhkan sistem informasi yang akuntabel agar seluruh kegiatan terkait penyampaian laporan penyetoran dan penarikan uang oleh bank dapat difasilitasi dengan optimal. Proses penyampaian laporan dengan menggunakan sarana umum tersebut memiliki beberapa kelemahan proses penyampaian laporan yang tidak *real-time*, risiko *human error* yang cukup tinggi, dan tingkat *security* yang tidak andal.

Pada tanggal 18 Agustus 2014, sistem BISILK secara resmi telah diimplementasikan di seluruh Indonesia. BISILK merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan penyetoran dan penarikan uang oleh bank, yang meliputi: (i) posisi likuiditas bank, (ii) kegiatan TUKAB, (iii) rencana penyetoran atau penarikan uang (ULE dan UTLE), (iv) laporan proyeksi dan laporan TUKAB, dan (v) laporan proyeksi *cash flow*, dan fasilitas penunjang lainnya, yang diproses secara elektronik, *on-line* dan tersentralisasi.

⁹ Surat Edaran BI No. 16/6/DPU perihal Penyelenggaraan Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas.

Dengan implementasi BISILK, kegiatan setoran dan penarikan bank akan lebih optimal, proses pengiriman/penerimaan serta penyimpanan data kegiatan setoran/penarikan bank akan lebih aman (*secure*), kecepatan proses data meningkat (*speed*), tingkat *error* diminimalisir, dan akurasi data menjadi lebih baik. Bagi Bank Indonesia, sistem ini mempermudah proses monitoring pelaksanaan penarikan dan penyetoran uang rupiah secara *real time*.

Edukasi Ciri Keaslian Uang Rupiah dan Cara Memperlakukan Uang Rupiah dengan Baik

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah dan menjaga kredibilitas uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI, Bank Indonesia secara berkelanjutan melakukan sosialisasi mengenai ciri keaslian uang rupiah dan cara memperlakukan uang rupiah dengan baik. Kegiatan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ciri keaslian uang rupiah yang pada akhirnya melindungi masyarakat dari peredaran uang rupiah palsu, serta mendorong masyarakat menjadi lebih teliti dalam transaksi yang menggunakan uang rupiah. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif menyampaikan laporan adanya dugaan peredaran uang rupiah palsu kepada Kepolisian RI atau Bank Indonesia.

Pada tahun 2014, Bank Indonesia melakukan kegiatan sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat, antara lain masyarakat umum, pelajar, ibu rumah tangga, dan pelaku usaha, terutama pada daerah-daerah yang cukup banyak mengalami peredaran uang rupiah palsu. Bank Indonesia juga melakukan *training for trainers* kepada kasir perbankan dan kasir usaha ritel. Kegiatan ini sangat penting karena pelaksanaan tugas kasir selalu berkaitan dengan fisik uang rupiah dengan kualitas atau tingkat kelulusan uang rupiah yang berbeda-beda. Kegiatan *training for trainers* juga dilakukan kepada perusahaan *cash in transit* yang melakukan pengolahan uang rupiah milik perbankan.

Bank Indonesia juga melakukan kegiatan edukasi publik melalui jalur pendidikan menengah. Pengelolaan uang rupiah dan ciri keaslian uang rupiah menjadi salah satu bagian dari materi kebanksentralan yang menjadi materi ajar pada kurikulum 2013 bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Bank Indonesia juga meluncurkan program "*BI goes to school*" mengenai peran dan tugas Bank Indonesia, termasuk ciri keaslian uang rupiah kepada SMA di wilayah Jakarta. Kegiatan edukasi juga dilakukan

kepada aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana kejahatan uang rupiah palsu. Untuk jalur pendidikan tinggi, materi pengelolaan uang rupiah dan ciri keaslian uang menjadi bagian dari materi "Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik".

Pertukaran Data dan Informasi Uang Rupiah Palsu antara Bank Indonesia dan Kepolisian RI

Bank Indonesia memiliki laboratorium analisis uang rupiah palsu dan sistem informasi Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Laboratorium analisa uang rupiah palsu merupakan bantuan dari *Deutsche Bundesbank* yang memiliki fungsi menganalisis uang palsu baik dari sisi jenis kertas, jenis tinta, maupun teknik cetak yang digunakan. Sementara itu BI-CAC merupakan pusat *database* uang rupiah palsu yang terintegrasi di seluruh kantor Bank Indonesia. Perbankan dan masyarakat dapat meminta klarifikasi uang rupiah yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia. Demikian pula, pihak Kepolisian RI dapat meminta Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan laboratorium atas barang bukti uang rupiah yang diduga palsu.

Selama tiga tahun terakhir, Bank Indonesia telah melakukan 120 pemeriksaan laboratorium terhadap uang rupiah yang diduga palsu. Jumlah pemeriksaan laboratorium tertinggi pada tahun 2012 sebanyak 55 kali, selanjutnya tahun 2013 sebanyak 34 kali, dan pada tahun 2014 sebanyak 31 kali. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut menjadi salah satu bukti pada tahapan penyidikan Kepolisian RI dan pada persidangan tindak pidana uang rupiah palsu.

Bank Indonesia juga memberikan keterangan ahli uang rupiah dalam persidangan kasus tindak pidana kejahatan uang rupiah palsu. Selama tiga tahun terakhir, Kantor Pusat Bank Indonesia telah memberikan 102 kali keterangan ahli, dengan rincian 43 keterangan ahli pada tahun 2012, 29 keterangan ahli pada tahun 2013, dan 30 keterangan ahli pada tahun 2014. KPwDN-BI juga telah memberikan 106 keterangan ahli dalam kasus tindak pidana uang rupiah palsu.

Laboratorium BI-CAC juga sangat bermanfaat untuk melakukan identifikasi dan analisis ciri uang rupiah palsu, baik dari sisi jenis kertas dan jenis tinta yang digunakan, maupun dari sisi teknik cetak. Hasil identifikasi dan analisis

uang palsu tersebut menjadi bahan masukan penting bagi Bank Indonesia dalam meningkatkan kualitas uang rupiah saat ini, perencanaan penerbitan uang rupiah baru, terutama untuk meningkatkan kualitas fitur keamanan (*security features*) dan bahan kertas yang digunakan.

Sementara itu, Kepolisian RI juga memberikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai hasil penanganan tindak

pidana uang rupiah palsu yang telah meperoleh keputusan dari majelis hakim di tingkat pengadilan di seluruh Indonesia. Informasi tersebut secara garis besar mencakup jumlah lembar uang rupiah palsu, modus operandi kejahatan uang palsu, dan sanksi hukum.

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

Kendati penggunaan instrumen pembayaran nontunai terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut masih belum mampu menurunkan porsi penggunaan uang kartal dalam transaksi keseharian masyarakat. Kajian McKinsey (2013) menunjukkan bahwa porsi transaksi ritel yang pembayarannya dilakukan secara tunai di Indonesia sangat tinggi mencapai 99,4% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan *peer* negara-negara ASEAN (Tabel 1). Analisa MasterCard (2013) juga memberikan kesimpulan yang sama dimana penggunaan instrumen pembayaran nontunai di Indonesia masih kurang dari 1%. Rendahnya penggunaan instrumen pembayaran nontunai oleh masyarakat dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen nontunai dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur transaksi nontunai.

Disadari bahwa tingginya porsi penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran memiliki beberapa kelemahan, seperti masalah kekurangpraktisan, tingginya biaya pengelolaan uang, dan peluang terjadinya tindak kriminal (perampasan dan tindak pidana pencucian uang). Bank Indonesia terus berupaya mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Untuk itulah Bank Indonesia mengaggas dan mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 sebagai suatu terobosan untuk mengakselerasi penggunaan instrumen pembayaran nontunai. GNNT diawali dengan membuat Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang

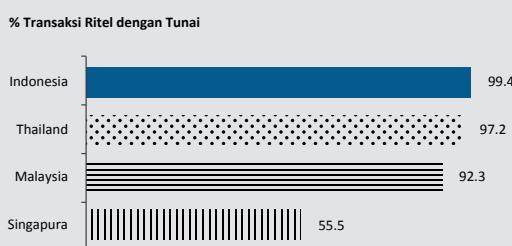
Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia. Pemerintah menyambut baik pencanangan GNNT karena dapat memberikan dampak positif dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan peningkatan akses masyarakat.

Melalui GNNT diharapkan dapat mengakselerasi penggunaan instrumen pembayaran nontunai yang telah diupayakan oleh Bank Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai, antara lain kegiatan fasilitasi penggunaan uang elektronik pada sektor transportasi publik, seperti TransJogja, TransSolo, dan TransJakarta. Selain itu juga dilakukan kegiatan fasilitasi perluasan ketersediaan sarana, jaringan dan instrumen pembayaran nontunai di masyarakat, seperti sarana *e-Ticketing* kereta Bandara Kuala Namu dan Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ), serta pengembangan *person to person (P2P)* transfer antar operator selular dan Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam rangka mendukung keuangan inklusif. Adapun beberapa strategi GNNT yang akan digalakkan ke depan adalah sebagai berikut:

Pembentukan Kawasan Nontunai di Lingkungan Kampus

Pemilihan kampus menjadi kawasan nontunai karena kampus diharapkan dapat menjadi *agent of change* untuk memperkenalkan instrumen pembayaran nontunai, khususnya uang elektronik kepada masyarakat. Selain itu, populasi di lingkungan kampus juga tinggi dan memiliki aktivitas transaksi ritel yang tinggi, sudah akrab dengan bank, banyak orang muda yang menjadi *trendsetter* pada komunitasnya, dan memiliki infrastruktur yang baik (akses listrik dan sinyal telepon seluler). Kegiatan ini telah dilakukan pada beberapa kampus di 10 kota di Indonesia, antara lain: Universitas Negeri Makassar, IAIN Antasari, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Koperasi Indonesia, Universitas

Tabel 1. Transaksi Retail di Berbagai Negara ASEAN



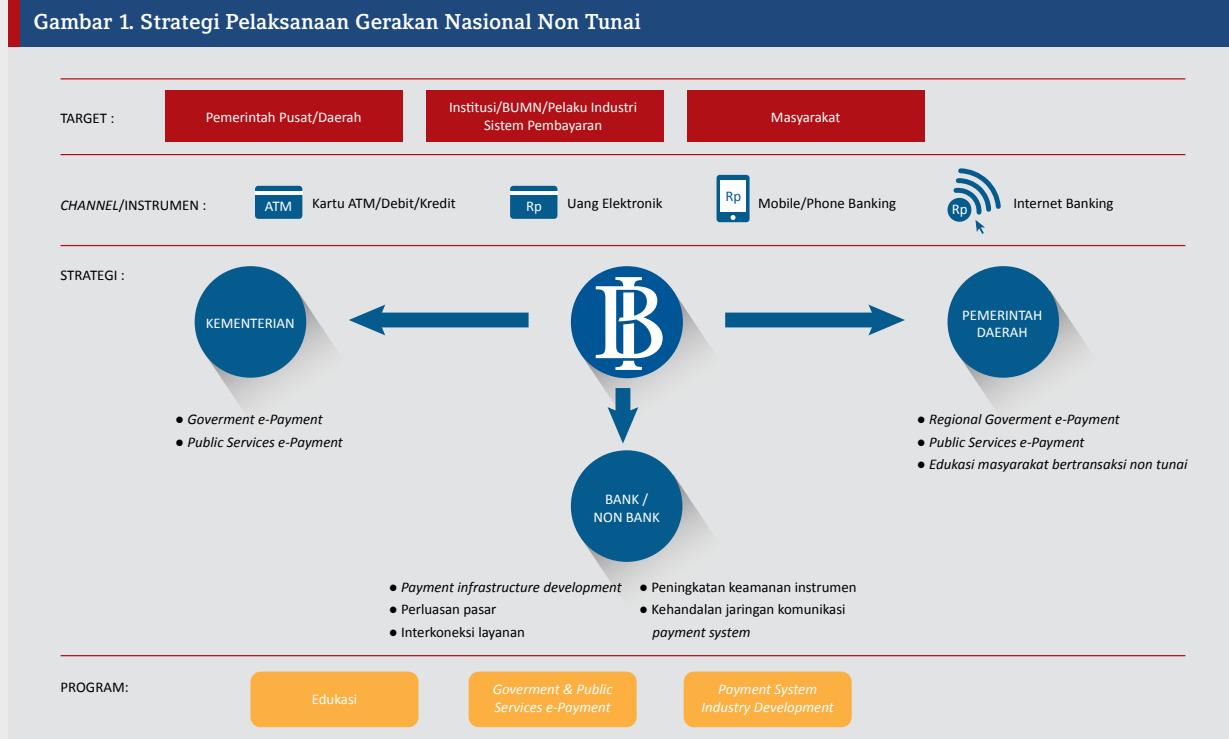
Penggunaan Instrumen Pembayaran Nontunai untuk Layanan Keuangan Pemerintah

Perluasan penggunaan instrumen nontunai untuk layanan keuangan Pemerintah diimplementasikan melalui *e-payment* dan *e-budgeting*. Dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mendorong implementasi pembayaran nontunai di areanya masing-masing akan mempercepat penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Elektronifikasi transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk pembayaran pengeluaran rutin, pemberian subsidi, maupun pembayaran biaya lainnya akan berdampak signifikan dalam mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Potensi penggunaan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah semakin terbuka mengingat potensi APBN yang dapat dilaksanakan menggunakan instrumen pembayaran nontunai mencapai sekitar Rp1.800 triliun pada 2013 dan akan terus meningkat. Program ini diimplementasikan secara bertahap sampai dengan 2016.

Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah

Salah satu terobosan untuk meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran nontunai dilakukan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan uang elektronik melalui agen Layanan Keuangan Digital (LKD). Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama Bank Indonesia dengan berbagai lembaga, yakni Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Metode penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan uang elektronik bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Terobosan tersebut juga meningkatkan edukasi dan penetrasi penggunaan alat pembayaran nontunai kepada masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan (*unbanked* dan *underbanked*). Lebih lanjut, Bank Indonesia juga turut mendukung program uji coba penyaluran bantuan pemerintah di lima lokasi di Jakarta melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Sosial, Bank Indonesia, Bank Mandiri, PT. Pos Indonesia, dan instansi terkait lainnya.

Gambar 1. Strategi Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai



Sumber: Dirjen Migas, ESDM

Penggunaan mata uang rupiah (Rp) dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewajiban setiap penduduk dan pelanggarannya akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). UU ini sejalan dengan praktek di berbagai negara (*best practices*) yang menggunakan mata uang masing-masing. Penerapan UU Mata Uang perlu didukung karena masih terdapat praktek-praktek transaksi keuangan menggunakan mata uang asing di wilayah NKRI, seperti: (i) transaksi antar penduduk dalam perdagangan batubara, kimia, tekstil, alat berat, dan gas; (ii) kuotasi harga dan tarif hotel, sewa apartemen, agen perjalanan, penjualan komputer dan barang elektronik; (iii) Penggunaan tarif di beberapa instansi, seperti imigrasi (*visa on arrival*), jasa-jasa di pelabuhan (*terminal handling*), dan jasa-jasa di bandar udara (*ground handling*); serta (iv) transaksi di wilayah perbatasan dengan negara lain.

Secara garis besar, ada tiga alasan kewajiban penggunaan Rupiah dalam berbagai transaksi di wilayah NKRI. Pertama, Dimensi Hukum, yakni UU Mata Uang telah mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI, sehingga upaya hukum diperlukan agar UU tersebut dapat diimplementasikan. Kedua, Dimensi Kebangsaan, dimana Rupiah merupakan simbol kedaulatan NKRI, sehingga penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI merupakan hal yang mutlak bagi setiap penduduk. Ketiga, Dimensi Ekonomi/Bisnis, dimana kebutuhan mata uang asing yang tinggi untuk transaksi kegiatan ekonomi berpotensi meningkatkan kerentanan ekonomi nasional karena mudah terimbas oleh gejolak ekonomi global. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi di wilayah NKRI diperkirakan akan menurunkan permintaan mata uang asing, sehingga dapat menurunkan tekanan terhadap Rupiah.

Terkait dengan itu, BI telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, serta Kepolisian Negara RI (KNRI). Hasil koordinasi tersebut diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara Gubernur BI dan Kepala KNRI Nomor

16/33/GBI/DPU/NK – B/29/VIII/2014 pada tanggal 1 September 2014, tentang Kerjasama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ruang lingkup NK meliputi tukar menukar data dan/atau informasi, pengamanan dan pengawalan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan SDM, dan sosialisasi. Sementara itu, area kerjasama penegakan hukum mencakup penegakan hukum bagi pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, dugaan tindak pidana uang Rupiah, dan dugaan adanya tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

Sebagai tindak lanjut atas NK tersebut, telah disusun Pedoman kerja tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah NKRI dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah oleh BI dan KNRI, pada tanggal 20 November 2014. Kerja sama tersebut secara bertahap akan ditindaklanjuti pada tingkat daerah dalam bentuk Pokok-Pokok Kesepahaman oleh Kepala Kantor Perwakilan BI dan Kepala Kepolisian Daerah. Hingga akhir 2014, telah dilakukan penandatanganan Pokok-Pokok Kesepahaman di empat provinsi, yakni Kepulauan Riau, Bali, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Untuk lebih mendorong kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, BI juga melakukan kerjasama dengan beberapa asosiasi di sektor swasta dan kegiatan edukasi publik. Kerjasama dilakukan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) melalui penandatanganan NK terkait kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi penjualan tiket penerbangan, perhotelan, dan restoran. Ruang lingkup NK tersebut mencakup implementasi kewajiban penggunaan Rupiah, tukar menukar data dan/atau informasi, peningkatan SDM, dan sosialisasi. Sementara kegiatan edukasi publik dilakukan melalui seminar dan lokakarya nasional yang melibatkan berbagai instansi terkait, baik di pemerintahan maupun swasta, serta melalui penayangan iklan layanan masyarakat dengan tema “Penggunaan Rupiah di Dalam Negeri” pada beberapa media televisi nasional, yang diharapkan dapat menggugah masyarakat agar Rupiah dapat berdaulat dan menjadi ‘tuan rumah’ di negeri sendiri.



Keterangan gambar:

Untuk mendukung efektivitas bauran kebijakan, Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi dan menjalin kerjasama yang intensif dengan pemerintah dan otoritas terkait.



BAB 13

KOORDINASI KEBIJAKAN

Bank Indonesia terus memperkokoh koordinasi kebijakan, baik dengan Pemerintah dan otoritas domestik terkait, maupun dengan bank sentral dan otoritas keuangan negara mitra. Penguatan koordinasi kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia, guna mendukung stabilitas ekonomi makro dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan perekonomian global yang meningkat dan kerentanan perekonomian domestik yang masih cukup tinggi. Penguatan koordinasi kebijakan tersebut terutama mencakup area pengendalian inflasi, bauran kebijakan, sektor keuangan serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Perekonomian dan pasar keuangan domestik menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat pada tahun 2014, baik yang bersumber dari faktor global maupun domestik. Dari sisi global, tantangan bersumber dari perbaikan ekonomi global yang tidak merata dan tidak setinggi yang diharapkan, penurunan harga komoditas dunia, ketidakpastian normalisasi kebijakan the Fed dan divergensi kebijakan moneter negara-negara maju yang telah meningkatkan kerentanan dan volatilitas di pasar keuangan internasional. Di tengah berbagai permasalahan struktural domestik yang masih ada, perkembangan global yang kurang kondusif tersebut telah meningkatkan risiko ketidakstabilan makroekonomi. Berbagai faktor risiko yang bersifat multidimensi tersebut menuntut koordinasi kebijakan yang lebih erat untuk menjaga kepercayaan dan ekspektasi pelaku ekonomi guna mempertahankan stabilitas perekonomian yang diperlukan bagi proses pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berbagai faktor risiko tersebut juga semakin menuntut suatu bauran kebijakan, yaitu sinergi dan sifat saling mendukung dari kebijakan di berbagai bidang. Terkait hal ini, koordinasi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan bauran kebijakan Bank Indonesia yang efektif, mencakup bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, bauran kebijakan moneter dan fiskal, serta kebijakan yang mendorong program reformasi struktural di bidang perekonomian. Untuk itu, Bank Indonesia secara aktif terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan berbagai lembaga/otoritas terkait, khususnya menyangkut pengendalian inflasi, kebijakan makro dan mikroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta manajemen pencegahan/penanganan krisis.

Bank Indonesia melakukan koordinasi baik dengan Pemerintah dan otoritas domestik terkait, maupun di lingkup internasional guna mendukung stabilitas ekonomi makro dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Koordinasi kebijakan untuk pengendalian inflasi ditujukan untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi penawaran, khususnya menyangkut *volatile food* dan untuk mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan *administered prices*, agar ekspektasi inflasi terjaga pada kisaran sasaran inflasi. Sementara itu, penguatan koordinasi juga dilakukan untuk mendorong percepatan program reformasi struktural, termasuk dalam memperbaiki postur fiskal. Demikian pula koordinasi kebijakan pada sektor keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, melalui kebijakan makro dan mikroprudensial dan koordinasi kebijakan untuk pencegahan/penanganan krisis, serta kebijakan terkait upaya mendorong *financial inclusion*. Bank Indonesia juga terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan

sistem pembayaran nontunai yang aman dan efisien guna meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran nontunai, serta mendukung kelancaran pengelolaan uang rupiah. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dalam rangka mendukung komitmen Indonesia di berbagai fora Internasional.

Secara umum, berbagai koordinasi kebijakan tersebut berjalan efektif sepanjang tahun 2014. Berbagai koordinasi kebijakan Bank Indonesia tersebut akan terus diperkuat ke depan, selain untuk mempertahankan efektivitas kebijakan dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, juga untuk merespons tantangan dan potensi risiko pada perekonomian dan pasar keuangan yang diperkirakan masih tinggi.

13.1. Koordinasi Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah untuk mengendalikan inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan. Tekanan inflasi pada awal tahun relatif moderat, namun meningkat menjelang akhir tahun 2014. Peningkatan tekanan inflasi ini bersumber dari *administered prices* terkait kenaikan TTL rumah tangga, tarif angkutan udara, dan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan inflasi tersebut, Bank Indonesia selain mengambil kebijakan dari sisi permintaan melalui respons kebijakan suku bunga, juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk menyentuh sisi penawaran yang di luar jangkauan pengendalian Bank Indonesia. Penguatan koordinasi ini dilakukan secara berkesinambungan termasuk dalam mengantisipasi risiko banjir terhadap harga pangan dan risiko *administered prices* yang meningkat terkait reformasi subsidi energi. Koordinasi kebijakan yang intensif antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dimaksudkan agar simpul permasalahan yang memicu tekanan inflasi dari sisi penawaran dapat ditangani bersama dengan baik.

Koordinasi kebijakan untuk pengendalian inflasi di tingkat pusat ditempuh melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI).¹ Sementara itu, pada tingkat daerah, Bank

¹ TPI dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menkeu dan GBI No.88/KMK.02/2005 dan No.7/9/KEP.GBI/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi. TPI beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BULOG, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.

Indonesia melalui seluruh jaringan kantor perwakilan di daerah, melakukan koordinasi yang intensif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi pada tingkat daerah ini terus diperkuat melalui Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID, yang merupakan komitmen bersama antara BI dan Pemerintah untuk mendorong peningkatan efektivitas peran TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah.² Koordinasi melalui TPI dan TPID diarahkan untuk dapat menghasilkan rumusan program dan rekomendasi kebijakan guna memitigasi potensi risiko inflasi dari kenaikan harga pangan dan energi, serta berbagai kebijakan *administered prices* yang ditempuh oleh Pemerintah. Di samping itu, isu pemberahan struktural juga menjadi fokus TPI dan TPID guna lebih menjamin terjaganya stabilitas harga dalam jangka panjang.

TPI mendorong penyelesaian permasalahan struktural melalui berbagai rekomendasi penting, seperti rekomendasi kebijakan stabilisasi harga pangan dan energi, sejalan dengan tingginya risiko *volatile food* dan *administered prices*. Rekomendasi tersebut disertai dengan penyusunan sasaran inflasi 2016 – 2018 yang menetapkan sasaran inflasi dengan pola menurun secara bertahap guna mengarahkan ekspektasi inflasi ke depan agar setara dengan inflasi negara-negara di kawasan. Sasaran inflasi tahun 2016 dan 2017 ditetapkan sebesar $4\pm1\%$ dan tahun 2018 sebesar $3,5\pm1\%$ sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 093/011/PMK/2014, tanggal 14 Mei 2014. Dalam konteks stabilisasi harga pangan, TPI memberikan rekomendasi mengenai aspek kelembagaan, cakupan komoditas, instrumen, dan pembiayaan. Sementara di bidang energi, TPI telah menyusun kajian rekomendasi kebijakan energi untuk memitigasi ketergantungan penggunaan migas beserta langkah pengendalian dampak dari ketergantungan tersebut terhadap inflasi dan kemiskinan.

Koordinasi pengendalian inflasi di daerah melalui TPID juga semakin intensif dengan dukungan bertambahnya daerah yang membentuk TPID. Sampai akhir 2014, jumlah TPID mencapai 359 (33 TPID Provinsi dan 326 TPID kabupaten/kota). Jumlah TPID tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 136 TPID (33 TPID Provinsi dan 103 TPID kabupaten/kota). Pertambahan jumlah TPID yang pesat tersebut tidak terlepas dari Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 027/1696/

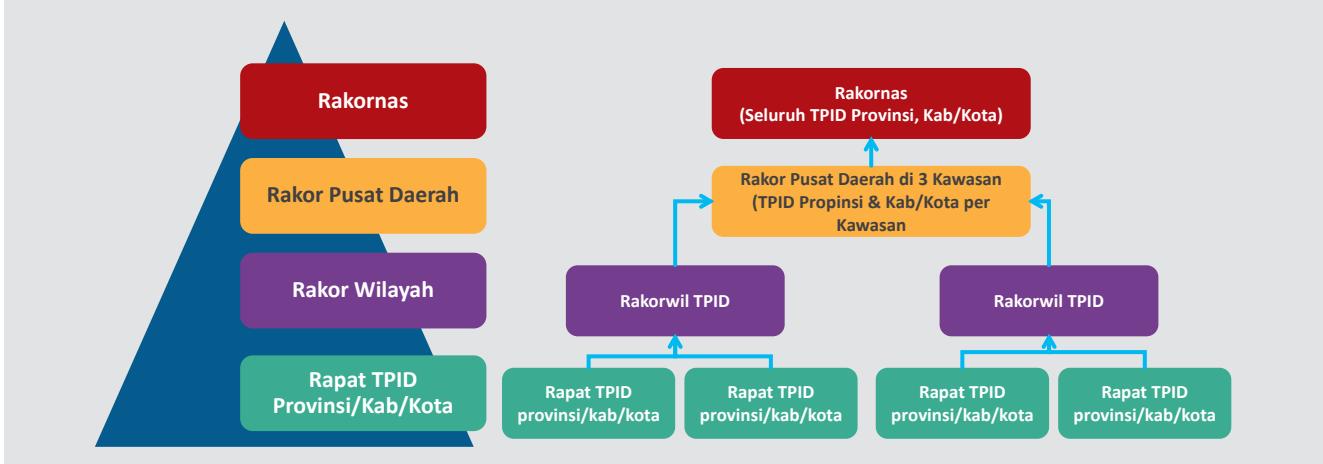
SJ tahun 2013 yang menegaskan perlunya peran aktif daerah dalam menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah. Keberadaan TPID diharapkan dapat berperan aktif merumuskan solusi yang komprehensif dalam mengatasi risiko harga dalam jangka pendek dan berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti tingginya ketergantungan produksi pangan terhadap faktor cuaca, keterbatasan akses informasi harga dan pasokan pangan, serta belum memadainya infrastruktur logistik yang menyebabkan besarnya disparitas harga antar daerah.

Di sisi kelembagaan, peningkatan jumlah TPID yang cukup pesat menandai perkembangan TPID mulai memasuki fase “*fostering commitment*” (2013-2018), meningkat dari fase “*building awareness*” (2008-2013). Pada fase sebelumnya penekanan TPID adalah untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah maupun *stakeholders* terkait terminologi “inflasi yang rendah dan stabil” melalui pertemuan secara langsung. Sedangkan dalam fase “*fostering commitment*”, kontribusi *stakeholders* terkait di daerah dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPx DN) kepada TPID diharapkan semakin besar terutama dalam mempersiapkan data/informasi, serta asesmen inflasi terkini maupun risiko ke depan. Peran Pemerintah Daerah semakin besar bukan hanya mengidentifikasi permasalahan namun juga menghasilkan rumusan rekomendasi pengendalian inflasi dan lebih jauh lagi pada tahap memonitor implementasi dari rekomendasi kebijakan tersebut. Selain itu, jumlah TPID pada fase ini semakin meningkat dan akan terus bertambah ke depannya. Aspek kelembagaan juga akan diperkuat dengan memperkuat peran TPID di tingkat provinsi untuk menyelaraskan kebijakan melalui mekanisme Rakor Pusat Daerah dan *High Level Meeting* (HLM) hingga di tingkat nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID. Lebih lanjut, Pokjanas TPID telah menyusun mekanisme koordinasi antar TPID untuk mendorong terbangunnya kerja sama dan koordinasi yang baik lintas TPID atau lintas daerah (Gambar 13.1).

Untuk mendukung penguatan koordinasi dalam fase “*fostering commitment*”, TPID melakukan langkah strategis dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID. Sebagai upaya penguatan TPID, pada 21 Mei 2014 di Jakarta dilaksanakan Rakornas TPID V yang menghasilkan tiga pokok kesepakatan yang menjadi panduan bagi pelaksanaan program TPID. *Pertama*, memperkuat komitmen Kepala Daerah untuk menjalin kerja sama, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan melalui Perencanaan Program Kerja Daerah (RKPD) dan dukungan anggaran yang sesuai (APBD). *Kedua*, TPID berkomitmen

² Pokjanas TPID dibentuk berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 027/1696/SJ tahun 2013, beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia.

Gambar 13.1. Mekanisme Koordinasi Pengendalian Inflasi



untuk mempercepat penyediaan data dan informasi neraca pangan oleh masing-masing daerah secara berkesinambungan untuk menjadi acuan dalam melakukan kerja sama antar daerah. Ketiga, memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan kerja sama antar daerah oleh Pokjanas TPID antara lain melalui bimbingan dan konsultasi bagi TPID. Pada Rakornas TPID V dimaksud juga disepakati program “4K” untuk mengantisipasi tekanan inflasi yang disebabkan oleh faktor musiman, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi ekspektasi.

Bersamaan dengan penyelenggaraan Rakornas TPID V, Pokjanas TPID memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja TPID terbaik. Pemberian penghargaan ini dilakukan setiap tahun sejak 2012 sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada daerah atas peran aktifnya di dalam upaya menjaga stabilitas harga dan untuk lebih mendorong perbaikan kinerja TPID ke depan. Dengan adanya pemberian penghargaan TPID ini, diharapkan daerah semakin termotivasi untuk semakin meningkatkan perannya dalam mendukung tercapainya stabilitas harga serta mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Penghargaan tersebut terdiri dari dua kategori, yaitu TPID terbaik dan TPID berprestasi. TPID terbaik diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID dan menjadi

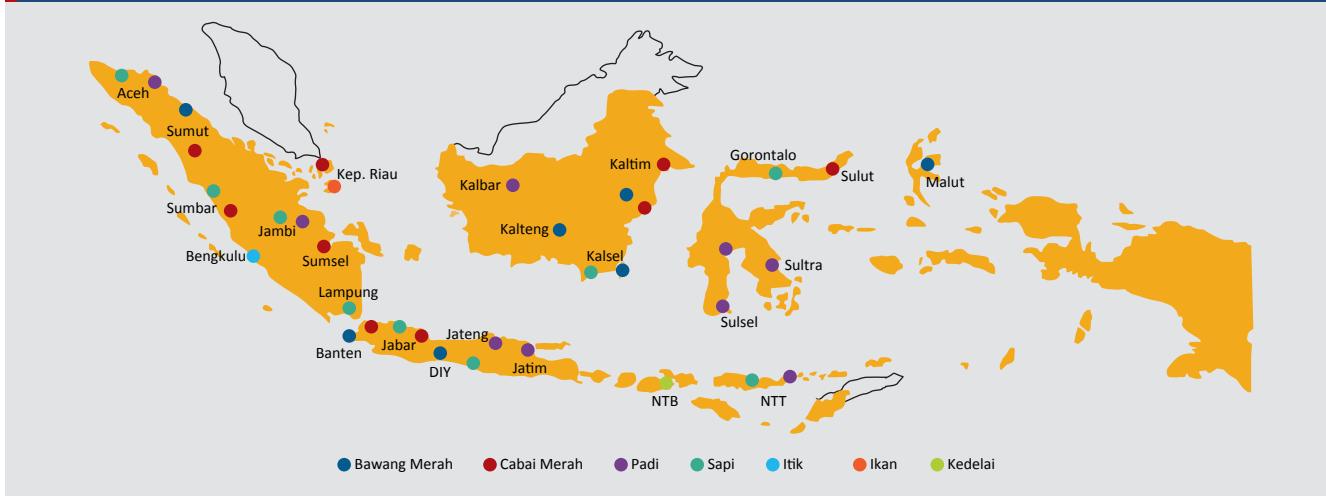
sampel perhitungan inflasi indeks harga konsumen (IHK) oleh BPS. Sementara itu, TPID berprestasi diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID namun masih belum menjadi sampel perhitungan inflasi. TPID terbaik tahun 2013 diberikan kepada Provinsi maupun Kab/Kota sebagaimana pada Tabel 13.1.

Kualitas koordinasi juga semakin baik tercermin dari inovasi yang dilakukan sejumlah TPID untuk mengatasi gejolak pangan dan dampak lanjut tekanan harga pada kelompok *administered prices*. Hal tersebut menunjukkan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap upaya pengendalian inflasi. TPID yang berada di bawah koordinasi Pokjanas TPID memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi hasil pertanian, khususnya bahan pokok. TPID juga mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung serta mendorong terbentuknya kerja sama antardaerah dan struktur pasar serta tata niaga yang kompetitif dan efisien. Secara umum program kerja TPID dan Pokjanas TPID pada tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik. Berbagai usulan rekomendasi kebijakan telah menjadi opsi kebijakan Pemerintah khususnya dalam pengendalian harga pangan dan kebijakan BBM bersubsidi.

Tabel 13.1. TPID Terbaik 2013

Kawasan	TPID Terbaik		TPID Berprestasi
	Tingkat Provinsi	Tingkat Kab/Kota	
Sumatera	TPID Sumatera Selatan	TPID Padang	TPID Kota Bukit Tinggi
Jawa	TPID DIY	TPID Jember	TPID Malang
Kawasan Timur Indonesia	TPID Kalimantan Tengah	TPID Pontianak	TPID Sinjai

Gambar 13.2. Sebaran Program Pengembangan Klaster Bank Indonesia untuk Komoditi Ketahanan Pangan



Sejalan dengan hal tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat pengelolaan ekonomi daerah. Beberapa kesepakatan penting telah dihasilkan dari Rakor Pusat Daerah TPID yang dilaksanakan pada 28 Agustus 2014 untuk kawasan Jawa-Sumatera dan pada 18 September 2014 untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kesepakatan tersebut melibatkan Pemerintah Daerah, TPID dan Pokjanas TPID. Dalam Jangka pendek, TPID perlu melakukan beberapa kegiatan yaitu melengkapi data/informasi potensi dan kebutuhan komoditas pokok di daerahnya (surplus/defisit pangan), serta mulai menjajaki peluang kerja sama dengan daerah lain. Inisiatif kerja sama antardaerah yang telah dilakukan seperti antara Jakarta dan Lampung, Jakarta dan NTT, serta Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, akan terus diperkuat. Hal tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan inflasi daerah terkait struktur pasar yang tidak efisien serta terbatasnya infrastruktur khususnya di KTI.

Untuk mengatasi adanya kesenjangan produksi pangan antar daerah, Pokjanas TPID mendorong kerja sama antar daerah (KAD) yang antara lain telah dilaksanakan antara Jakarta dan Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut, TPID terus mengkinikan peta surplus defisit komoditas pangan di daerah masing-masing sebagai basis dalam mewujudkan perdagangan antara daerah yang mengalami surplus dengan daerah yang mengalami defisit. Selain itu, dalam rangka mengendalikan inflasi dan mendukung ketahanan pangan, program pengembangan UMKM melalui program klaster Bank Indonesia pun disinergikan untuk komoditas tertentu penyumbang inflasi dan komoditas berorientasi ekspor, yang meliputi padi, daging sapi, ayam dan produknya, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah, yang

lazim disebut sebagai klaster ketahanan pangan. Hingga akhir tahun 2014, telah dikembangkan 133 klaster di seluruh Indonesia, dimana 62 klaster diantaranya telah mandiri, sementara 71 klaster lainnya masih dalam tahap pembinaan dan pengembangan. Dari 71 klaster ini, 61 klaster diantaranya merupakan klaster komoditas pangan (32 komoditas pertanian, 10 komoditas peternakan, dan 19 komoditas perikanan) dan 10 klaster non pangan, dengan peta sebaran klaster ketahanan pangan diarahkan pada klaster-klaster yang selama ini mengalami gejolak harga pangan yang besar (Gambar 13.2). Dengan pengembangan klaster tersebut, bisnis model yang telah dikembangkan Bank Indonesia bersama *stakeholders* setempat diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain atau komoditas lain, sehingga dampak yang dihasilkan menjadi besar.

Selain menjaga kesinambungan pasokan, pembentukan harga yang selama ini belum efisien karena adanya *asymmetric information* dieliminir dengan pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di berbagai daerah. Pengembangan PIHPS tersebut selain membuka akses informasi harga yang lebih luas kepada publik juga memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkontribusi terhadap stabilisasi harga. Pada tahun 2014, tahap pengembangan PIHPS memasuki fase baru dengan dimulainya integrasi PIHPS Daerah ke dalam PIHPS Nasional. Proses integrasi PIHPS secara nasional dimulai pada triwulan IV 2014 dan mencakup 17 provinsi (Gambar 13.3). Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pada 26 Juni 2014 diresmikan PIHPS yang diberi nama Informasi Pangan Jakarta (IPJ) yang mencakup informasi harga komoditas pangan strategis pada 13 pasar di Jakarta dengan

Gambar 13.3. Pusat Informasi Harga Pangan Nasional



alamat website <http://infopangan.jakarta.go.id>. Jakarta berkontribusi dalam pembentukan angka inflasi nasional hingga mencapai 20,15% sehingga pembentukan IPJ dirasakan sangat strategis dalam mengatasi ketimpangan informasi pangan yang dapat memengaruhi ekspektasi pembentukan harga di tingkat produsen dan konsumen.

Memasuki penghujung 2014, TPI dan TPID mendorong dilakukannya berbagai langkah antisipasi sekaligus mitigasi dari kebijakan energi yang ditempuh oleh Pemerintah. Pemerintah menilai ketahanan fiskal terganggu dengan adanya konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota APBN-P 2014 sebesar 46 juta kilo liter. Untuk memitigasi hal tersebut, pada 17 November 2014, Pemerintah mengurangi subsidi BBM untuk memperluas ruang fiskal sehingga dapat dialihkan ke pembangunan infrastruktur dan sosial. TPI dan TPID secara aktif ikut mengkomunikasikan kepada masyarakat luas mengenai langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. TPI bersama Pemerintah menyiapkan beberapa antisipasi kebijakan untuk meredam dampak kenaikan harga BBM tersebut, seperti pengendalian tarif angkutan darat yang dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: pertama, pembahasan kenaikan tarif angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) maksimal sebesar 14% agar dampaknya terhadap inflasi tidak terlalu berlebihan; kedua, penyampaian surat edaran yang antara lain berisi himbauan kepada kepala daerah agar dalam penetapan kenaikan tarif angkutan dalam kota mempertimbangkan kenaikan yang wajar dan mengacu pada besaran kenaikan tarif AKAP; ketiga, merumuskan program kompensasi yang implementatif bagi sektor transportasi terutama yang yangkut aspek dan mekanisme pembiayaannya.

Di samping itu, untuk meminimalkan dampak lanjutan kenaikan harga BBM ditempuh beberapa langkah koordinasi yaitu penyampaian himbauan kepada Pemda agar dalam pembahasan penetapan upah minimum daerah kenaikan maksimal sebesar 15% sebagaimana tahun sebelumnya. Selain itu, Pemda juga diimbau untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, antara lain dengan penyediaan subsidi ongkos angkut komoditas strategis dari sentra produksi ke pasar (Pasar Penyeimbang) seperti yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, dan menyediakan alternatif pasar yang menjual komoditas strategis sebagaimana dilakukan oleh Pemda Kalimantan Tengah.

Pengendalian inflasi juga melibatkan program komunikasi secara berkelanjutan untuk menjangkar ekspektasi agar selaras dengan lintasan sasaran inflasi yang ditetapkan. Tingkat inflasi yang fluktuatif akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan konsumsi, investasi dan produksi yang menghambat kegiatan usaha. Untuk memitigasi hal tersebut, Bank Indonesia melaksanakan program komunikasi untuk memberikan wawasan kepada pelaku ekonomi mengenai seluk beluk inflasi dan perkembangan inflasi. Selain dalam bentuk siaran pers dan konferensi pers, Bank Indonesia bersama dengan TPI dan Pokjanas TPID menyampaikan informasi terkait inflasi secara intensif melalui program wawancara di stasiun TV, *media briefing* dan wawancara di Radio. Berdasarkan 2014 Survey of Central Bank Communication yang dilakukan oleh Barclays kepada pelaku pasar, Indonesia menjadi salah satu negara yang diikutsertakan menjadi responden.³

³ 2014 Survey of Central Bank Communication sebelumnya telah

Dalam skala 1 (terendah) - 10 (tertinggi), Indonesia memperoleh nilai 5 untuk komunikasi secara keseluruhan, 5,5 untuk komunikasi dengan pelaku pasar, dan 5 untuk komunikasi dengan publik secara umum. Hasil ini lebih baik dibandingkan negara *peer* lainnya seperti Brasil (BCB), Tiongkok (PBoC), Rusia (CBR), dan Turki (CBRT).

Sebagai bentuk koordinasi yang lebih solid antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pokjanas TPID mendorong penguatan peran daerah untuk mampu memprakirakan dinamika makroekonomi ke depan. Pokjanas TPID terus menekankan pada pentingnya keselarasan arah besaran sasaran makroekonomi daerah yang tertuang di dalam rencana kerja pemerintah daerah dengan besaran makroekonomi yang menjadi landasan arah kebijakan pemerintah pusat. Guna mendukung hal tersebut, Bank Indonesia mengembangkan model makro ekonomi regional (*Regional Macroeconomic Model* Bank Indonesia – REMBI). Model tersebut dibentuk untuk mendukung peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah (KPwDN) dalam melakukan peran *advisory* kepada Pemerintah Daerah. Hingga saat ini model tersebut telah dibentuk di 18 provinsi dari sebelumnya 9 model berbasis wilayah yang dikembangkan pada tahun 2013. Selain itu, telah dilaksanakan *workshop* bagi anggota TPI dan Pokjanas TPI dengan mengundang BPS mengenai perhitungan inflasi di kota non inflasi pada 10 Desember 2014 untuk memperkuat kapasitas SDM.

Secara umum koordinasi pengendalian inflasi di atas turut berperan besar dalam meredam gejolak inflasi pada tahun 2014. Sampai dengan triwulan IV 2014, meskipun inflasi melampaui sasaran namun masih terkendali di *single digit* dengan angka realisasi sedikit lebih rendah sebesar 8,36% atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8,38%. Penurunan inflasi tersebut didukung oleh lebih rendahnya tekanan pada inflasi inti dan *volatile food* di tengah penyesuaian *administered prices* seiring dengan adanya kebijakan energi. Sementara itu, kawasan yang memiliki kontribusi tinggi dalam pembentukan inflasi nasional seperti Sumatera mampu menurunkan inflasi ke tingkat yang lebih baik. Inflasi kawasan Sumatera turun dari 8,9% pada 2013 ke 8,6% pada tahun 2014.

dilakukan pada tahun 2007, 2008, dan 2013 untuk Federal Reserve (Fed), the European Central Bank (ECB), the Bank of England (BoE), dan the Bank of Japan (BoJ). Pada tahun 2014, Barclays menambah bank sentral lainnya seperti Australia (RBA), Brasil (BCB), Tiongkok (PBoC), India (RBI), Indonesia (BI), Mexico (Banxico), Russia (CBR), South Africa (SARB), South Korea (BoK), Turkey (CBRT).

13.2. Koordinasi Sektor Moneter, Rill, dan Fiskal

Koordinasi kebijakan sektor moneter, riil, dan fiskal ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan agenda reformasi struktural di bidang perekonomian. Kondisi defisit ganda, fiskal dan neraca pembayaran, di tengah masih besarnya potensi risiko eksternal berupa ketidakpastian pemulihan ekonomi dan rentannya pasar keuangan global terhadap perubahan sentimen semakin menekankan pentingnya koordinasi kebijakan guna memperbaiki struktur fundamental perekonomian yang lebih sehat. Beberapa hambatan yang mengakibatkan masih tingginya ketidakefisienan perekonomian, seperti terbatasnya infrastruktur, kualitas sumber daya manusia dan institusi, serta rendahnya ketahanan pangan dan energi nasional semakin krusial untuk segera diperbaiki.

Berbagai kendala struktural (*enabling factors*) yang menghambat laju perekonomian tumbuh lebih tinggi perlu segera dicari solusi yang lebih efektif, guna memastikan pencapaian sasaran perekonomian dalam jangka panjang. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia memandang bahwa upaya mengatasi kendala struktural tersebut perlu dilakukan dengan mencakup dua hal pokok, yakni reformasi di sektor rill dan reformasi di sektor keuangan. Reformasi di sektor riil difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan, termasuk di dalamnya infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan institusi, serta upaya pencapaian kedaulatan pangan dan energi. Sementara itu, reformasi di sektor keuangan diarahkan pada upaya untuk melakukan pendalaman pasar keuangan, termasuk modernisasi sistem pembayaran dan inklusi keuangan.

Dalam agenda reformasi struktural tersebut, perbaikan defisit neraca transaksi berjalan harus tetap menjadi prioritas dan dilaksanakan secara konsisten. Hal ini termasuk dengan mencari jalan keluar terhadap tantangan struktural di sektor rill terutama berupa lemahnya struktur produksi domestik (*supply-side*) sehingga sangat bergantung kepada ekspor berbasis sumber daya alam bernilai tambah rendah. Dalam hal ini, upaya untuk memperbaiki struktur produksi domestik, yaitu dengan meningkatkan nilai tambah produk mineral antara lain dilakukan Pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan terkait ekspor mineral dalam Peraturan Menteri (PerMen) ESDM Nomor 1/2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan PerMen Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Meskipun demikian, disadari bahwa dalam jangka pendek,

implementasi kebijakan ini berimplikasi pada kinerja perekonomian beberapa daerah yang memiliki basis produksi tambang karena cukup besarnya ketergantungan terhadap ekspor berbasis sumber daya alam primer. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan pengenaan pajak barang mewah yang berasal dari impor seperti mobil CBU, *branded product* sebesar tambahan 25% sampai dengan 50% sebagaimana diatur dalam PMK No.64/PMK.011/2014 tentang jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pemberian pembebasan dari pengenaan pajak penjualan atas barang mewah.

Sementara itu, dalam kerangka strategi percepatan pembangunan di bidang infrastruktur, Pemerintah terus mendorong implementasi *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia* (MP3EI). Melanjutkan apa yang sudah dicapai pada 2013, sepanjang Januari-Agustus 2014 proyek MP3EI yang telah berjalan tercatat sebanyak 208 proyek dengan nilai investasi Rp 412,3 triliun. Selain itu, 132 proyek infrastruktur strategis memasuki fase *groundbreaking* pada Juli sampai dengan Desember 2014 dengan nilai investasi Rp 443,5 triliun. MP3EI diharapkan dapat menciptakan efisiensi pada infrastruktur dan perangkat pendukungnya dalam menjawab tantangan global untuk menjadi basis produksi bagi perusahaan internasional.⁴ Kebijakan ini juga didukung oleh penguatan konektivitas fisik untuk menurunkan biaya logistik sehingga pelaku usaha dapat lebih memiliki daya saing di pasar global.

Di samping itu, untuk membangun lingkungan pendukung yang positif dalam mendorong investasi, Pemerintah berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan berbagai pemberian. Berbagai permasalahan yang kerap menjadi hambatan bagi pelaku usaha dan investor seperti lambatnya perizinan karena tata kelola birokrasi yang lemah dan infrastruktur yang belum mendukung menjadi perhatian utama Pemerintah beserta instansi terkait. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memperpendek proses pelayanan menjadi cepat, mudah, dan transparan. Perpres tersebut menggantikan Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Implementasi PTSP menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) sehingga waktu pelayanan lebih cepat, paling lama 7 hari kerja. Selain itu, langkah lain yang telah ditempuh

4 Peletakan batu pertama atau pembangunan awal proyek.

adalah melakukan penerbitan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Revisi Perpres tersebut dituangkan dalam Perpres 39 Tahun 2014 yang mencakup daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Untuk mendukung agenda reformasi struktural tersebut, Bank Indonesia secara konsisten merumuskan berbagai langkah strategis dan mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah. Pada Rapat Koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah pada 11 Agustus 2014 di Manado, dirumuskan beberapa hal penting yang perlu menjadi prioritas untuk dilakukan dalam kerangka reformasi struktural, yakni perlunya dilakukan reformasi fiskal guna memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pengembangan pembangunan berwawasan maritim, penguatan lingkungan pendukung (*enabling environment*) di Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta mendorong pengembangan *Regional Investor Relation Unit* (RIRU) sebagai mitra strategis di daerah dalam mendukung investasi dan kerja sama perdagangan antardaerah. Hasil pembahasan Rakor diharapkan menjadi landasan penting bagi upaya reformasi struktural yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam koridor kewenangan yang dimilikinya.

Pada pertemuan koordinasi lanjutan Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah di Bandung pada 11 November 2014 disepakati bahwa agenda reformasi struktural perlu juga difokuskan pada tiga hal penting. Pertama, pada peningkatan daya saing dan iklim investasi di daerah; kedua, pencapaian kedaulatan pangan melalui peningkatan infrastruktur sektor pertanian serta penguatan kelembagaan; ketiga, perluasan akses keuangan. Dalam pertemuan itu juga kembali ditekankan pentingnya upaya reformasi fiskal yang telah disepakati sebelumnya di Manado, dengan mengalihkan subsidi ke sasaran yang lebih tepat guna seperti pembangunan infrastruktur dan *human development*.

Koordinasi kebijakan semakin diperkuat setelah pada 12 November 2014 Gubernur Bank Indonesia bersama dengan Gubernur Jawa Barat meresmikan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (*West Java Incorporated*). Forum tersebut bertujuan untuk menyinergikan peran Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, KADIN, OJK, Perbankan, dan sektor Swasta dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian serta meningkatkan daya saing daerah. Sejumlah agenda yang akan direalisasikan ke depan yaitu antara lain mendorong terbukanya akses pasar bagi pengusaha Jawa Barat melalui diseminasi poin

international trade agreement and commitment dengan negara lain serta menjadi media solusi atas permasalahan bisnis dan investasi. *Website West Java Incorporated* pun telah dibangun dan dapat diakses melalui www.westjavainc.org.

Sebagai bagian program penciptaan wirausaha dan untuk menunjang program kegiatan ketahanan pangan, upaya yang baru-baru ini digagas oleh Bank Indonesia adalah kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Peningkatan Kemandirian Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Tujuan jangka pendek dari kerja sama tersebut adalah agar narapidana dan klien pemasyarakatan yang saat ini dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diberdayakan dan dibekali dengan pengetahuan mengenai dasar-dasar memulai usaha agar setelah bebas nanti dapat hidup mandiri dan merintis usaha menjadi wirausaha. Sedangkan tujuan jangka panjang dari kerja sama tersebut adalah untuk menjadikan Lapas sebagai sentra berbagai komoditas tanaman pangan sehingga dapat membantu dalam meningkatkan pasokan *volatile food* untuk mencapai sasaran inflasi. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16/1/GBI/DPAU/NK dan Nomor M.HH-06.HM.0502 tanggal 18 September 2014 tentang Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Kemandirian Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

Sementara itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan keterampilan lembaga pondok pesantren agar memiliki kemandirian ekonomi, mendukung penguatan ketahanan pangan dan keuangan inklusif, mendukung peningkatan kemampuan kewirausahaan di lembaga pondok pesantren, meningkatkan kapabilitas dan keterampilan lembaga pondok pesantren melalui pemberian bantuan teknis antara lain pelatihan dan/atau pendampingan kelembagaan, pencatatan dan pengelolaan keuangan serta kemampuan kewirausahaan para santri, serta meningkatkan akses keuangan pada lembaga pondok pesantren antara lain melalui kegiatan edukasi. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam suatu Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Agama RI No.19 Tahun 2014 dan No.16/2/GBI/DPAU/NK tanggal 5 November 2014 tentang Pengembangan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pondok Pesantren.

Dalam rangka mendukung kesiapan UMKM menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015, Bank Indonesia berpartisipasi dalam sosialisasi bersama *stakeholders*

terkait. Sosialisasi dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta mendorong KPwDN di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung upaya peningkatan kesiapan UMKM di daerah menghadapi KEA 2015. Selain itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah mendorong kemitraan strategis antara KPwDN BI dengan Pemda dalam pengembangan UMKM sehingga dapat meningkatkan kapabilitas UMKM dalam memperoleh pembiayaan perbankan.

Koordinasi kebijakan di sektor riil berimplikasi cukup positif dalam memitigasi dampak dari permasalahan struktural meskipun belum sepenuhnya efektif. Ekspor komoditas primer mengalami penurunan seiring dengan penetapan pembatasan ekspor mineral tambang mentah serta perlambatan permintaan dan faktor harga, sementara ekspor manufaktur membaik. Kondisi tersebut dapat memperbaiki struktur ekspor keseluruhan, sementara penurunan kinerja ekspor-impor hanya bersifat jangka pendek. Dengan perkembangan tersebut, kinerja transaksi berjalan membaik yang ditunjukkan oleh menurunnya defisit transaksi berjalan sampai dengan triwulan IV 2014, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013. Kecukupan cadangan devisa pun terjaga pada level yang mampu mencukupi 6,4 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Pada sisi fiskal, Bank Indonesia secara konsisten melakukan koordinasi dan mendukung agenda reformasi yang terus dilakukan Pemerintah. Dalam berbagai kesempatan Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap reformasi energi yang merupakan salah satu *milestone* reformasi struktural. Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam membahas berbagai alternatif kebijakan energi dan dampaknya terhadap perekonomian berlangsung sangat intensif dan terjadi pada berbagai kesempatan sepanjang tahun 2014. Ketika Pemerintah menempuh kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada tanggal 17 November 2014, koordinasi terus diintensifkan guna mengendalikan dampak inflasi dari kenaikan tersebut. Hasil dari berbagai kegiatan koordinasi tersebut antara lain tampak pada terkendalinya inflasi tahun 2014 yang hanya mencapai *single digit* dan sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi tahun lalu. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah sepanjang tahun 2014 juga berlangsung antara lain dalam berbagai forum diskusi terbatas mengenai berbagai dampak kebijakan Pemerintah lainnya terhadap perekonomian dan terhadap likuiditas. Salah satu topik koordinasi yang intensif dibahas adalah dampak kuantitas dan kualitas belanja Pemerintah non subsidi terhadap perekonomian.

Topik ini sangat relevan dengan kebijakan reformasi struktural yang dijalankan Pemerintah melalui realokasi subsidi BBM kepada belanja infrastruktur dan penguatan perlindungan sosial.

Koordinasi kebijakan juga dilakukan dalam rangka memitigasi risiko Utang Luar Negeri, terutama terkait *currency mismatch* serta *liquidity mismatch*. Dalam konteks pendalaman pasar, diperlukan instrumen untuk memitigasi risiko tersebut dalam bentuk Transaksi Lindung Nilai. Pada tanggal 16 Oktober 2014, telah dilakukan peluncuran Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Transaksi Lindung Nilai yang dihadiri oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan BPKP, serta Kementerian terkait lainnya dan BUMN yang diharapkan akan menerapkan transaksi lindung nilai, seperti PT. Pertamina dan PT. PLN. Kebijakan transaksi lindung nilai oleh BUMN ini merupakan buah dari pertemuan koordinasi awal antar lembaga negara penegak hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, KPK), lembaga negara audit (BPK, BPKP) dan lembaga terkait lainnya (BI, Kemenkeu, Kemeneg BUMN) yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014. Pertemuan tersebut berhasil menyepakati bahwa kerugian (biaya) yang ditimbulkan dari transaksi lindung nilai BUMN bukan merupakan kerugian negara, sepanjang transaksi tersebut dilakukan secara konsisten, konsekuensi, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Bank Indonesia memandang bahwa transaksi lindung nilai merupakan langkah yang sangat penting untuk ditempuh dalam memperkuat stabilitas nilai tukar dan mengurangi tekanan di pasar valas domestik. Melalui kesepakatan ini dan implementasi SOP nantinya, diharapkan terjadi peningkatan kegiatan transaksi lindung nilai oleh BUMN/kementerian/lembaga negara lainnya terutama didorong oleh hilangnya persepsi bahwa kerugian (biaya) yang timbul dari kegiatan *hedging* merupakan kerugian negara.

13.3. Koordinasi Sektor Keuangan

Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial

Koordinasi antara BI dan OJK pasca beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK sejak 31 Desember 2013 semakin diperkuat. Sebagai bagian upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, BI melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, efektifitas kebijakan makroprudensial dalam memitigasi risiko sistemik pada sistem keuangan perlu didukung oleh kondisi perbankan yang sehat. Menyadari besarnya keterkaitan antara makroprudensial dan mikroprudensial serta untuk mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter dan sistem pembayaran, maka koordinasi yang efektif dan efisien dengan OJK terus diperkuat.

Sebagai landasan bagi Bank Indonesia dan OJK untuk melakukan kerja sama dan koordinasi, pada 18 Oktober 2013, pimpinan kedua lembaga telah menyepakati Keputusan Bersama tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas BI dan OJK. Ruang lingkup Keputusan Bersama meliputi kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing, pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK, penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan BI oleh OJK dan pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.

Untuk memperkuat koordinasi, telah dibentuk suatu protokol untuk mekanisme koordinasi BI-OJK yaitu Petunjuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Makro-Mikroprudensial (FKMM). FKMM adalah forum koordinasi dan kolaborasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang BI dan OJK.

Perangkat koordinasi disusun untuk memperlancar kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang BI dan OJK. Salah satu diantaranya melalui penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Bersama (Mekanisme Kerja) Makroprudensial-Mikroprudensial untuk cakupan koordinasi dalam bidang: (a) pertukaran informasi hasil pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan *macro-surveillance* (b) pelaksanaan pemeriksaan bank (c) sistem pembayaran (d) penyusunan kajian dan/atau penelitian bersama (e) penyusunan *stance* Indonesia atau isu-isu di fora internasional (f) sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat (g) pengelolaan rekening OJK di BI, serta (h) koordinasi KPwDN dengan Kantor Regional/Kantor Cabang OJK.

Selain itu, dalam rangka pertukaran informasi serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan, sebagaimana amanat Keputusan Bersama BI-OJK tanggal 18 Oktober 2013, telah dibentuk Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP) Lembaga Jasa Keuangan. Forum ini telah

berkoordinasi antara lain untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bersama Pertukaran Informasi BI-OJK dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Hak Akses Aplikasi Pelaporan dan Aplikasi Olahan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pertukaran informasi tersebut dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk lebih meningkatkan kualitas data. Dengan demikian, pengawasan makroprudensial-mikroprudensial dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, dengan berubahnya konstelasi institusi di sistem keuangan, edukasi dan sosialisasi antar institusi terkait dilakukan secara luas. Edukasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di bidang makroprudensial di internal Bank Indonesia dan juga lembaga terkait guna memenuhi standar kompetensi yang berkualitas. Untuk meningkatkan pengetahuan di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan, dilaksanakan pelatihan kepada para Hakim oleh Bank Indonesia, Mahkamah Agung, dan OJK berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Kerja Sama Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan pada 5 Juni 2014. Pelatihan tersebut mencakup isu-isu spesifik di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan agar dapat membantu dalam menangani berbagai tindak pidana di sektor keuangan. Selain itu, untuk memperkuat kompetensi di bidang makroprudensial, diselenggarakan Program Pendidikan Pengawasan Makroprudensial oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan OJK yang dibuka pertama kali pada 27 Oktober 2014. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengawasan makroprudensial sehingga pegawai memiliki kompetensi dan wawasan yang memadai mengenai isu-isu stabilitas keuangan dan potensi risiko sistemik.

Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Krisis

Koordinasi di dalam Protokol Manajemen Krisis (PMK) terus disempurnakan agar lebih siap dalam menghadapi ancaman, baik yang bersumber dari tingginya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global maupun kerentanan perekonomian domestik. Penguatan PMK dilakukan melalui koordinasi intensif dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS (Gambar 13.4). FKSSK yang berwenang dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) memiliki tugas yang mencakup berbagai kegiatan, yaitu melakukan evaluasi kondisi SSK, menetapkan status SSK, membuat rekomendasi kepada masing-masing anggota untuk

Gambar 13.4. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)



melakukan tindakan dan/atau menetapkan kebijakan dalam rangka menjaga SSK dan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sesuai dengan kewenangan masing-masing anggota FKSSK.

Selama tahun 2014, FKSSK secara rutin melakukan pembahasan asesmen pemantauan kondisi SSK dalam Rapat Koordinasi Tingkat Deputi dan Rapat FKSSK. Berdasarkan hasil pemantauan (*surveillance*) dari masing-masing anggota FKSSK, kondisi SSK dapat terjaga dengan baik yang ditunjukkan oleh relatif normalnya indikator tekanan di nilai tukar, pasar saham, pasar surat berharga negara, perbankan, dan LKNB serta penjaminan simpanan, meskipun indikator ketahanan fiskal dinilai perlu diwaspadai. FKSSK memandang bahwa risiko ke depan masih cukup tinggi memasuki tahun 2015, terkait dengan ketidakpastian waktu dan kecepatan normalisasi kebijakan bank sentral Amerika Serikat (the Fed), melambatnya perekonomian Tiongkok, berlanjutnya penurunan harga komoditas, menguatnya kekhawatiran terhadap pelemahan perekonomian Eropa, di tengah permasalahan struktural yang masih ada pada perekonomian domestik.

Seperangkat mekanisme kerja telah disusun sebagai panduan dan memastikan *governance* bagi koordinasi antar lembaga. Sebagai pengejawantahan amanah Nota Kesepahaman FKSSK tanggal 7 Juni 2012 yang kemudian diperbarui pada 3 Desember 2012, telah disusun Prosedur Operasional FKSSK yang terdiri dari Prosedur Operasional Pertukaran Data dan Informasi FKSSK, Prosedur Operasional Pelaksanaan Rapat dan Pengambilan Keputusan FKSSK, serta Prosedur Operasional Komunikasi Publik. Prosedur tersebut kemudian ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat FKSSK pada 7 November 2014

berdasarkan persetujuan Rapat FKSSK pada 17 Juli 2014. Prosedur Operasional tersebut telah diimplementasikan oleh masing-masing institusi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing. Terkait pertukaran data dan informasi, Bank Indonesia secara rutin telah berkontribusi dalam menyampaikan data dan informasi indikator pemantauan nilai tukar sejak Agustus 2014.

Penguatan payung hukum kelembagaan pun menjadi prioritas yang mendesak. Saat ini Indonesia belum memiliki landasan hukum yang kuat dalam penanganan kondisi krisis, khususnya terkait penanganan perbankan dan sistem keuangan. Undang-undang JPSK diharuskan tersedia paling lambat akhir tahun 2014 sebagaimana amanat pasal 11 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia, namun hingga saat ini belum terwujud. Untuk itu, Bank Indonesia beserta anggota FKSSK lainnya melakukan pembahasan secara intensif substansi RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Sebagai upaya mendorong percepatan penyelesaian UU JPSK, Bank Indonesia berinisiatif menyampaikan surat ke Presiden mengenai urgensi UU JPSK mengingat masih tingginya ancaman risiko akibat ketidakpastian perkembangan perekonomian global maupun gejolak politik domestik. Di samping itu, dengan beralihnya fungsi pengawasan perbankan ke OJK sejak 31 Desember 2013, dilakukan pembaruan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar anggota FKSSK dengan menyempurnakan struktur formasi Sekretariat FKSSK pada 19 Februari 2014.

Selain itu, untuk menyempurnakan tata kelola mekanisme pengambilan keputusan FKSSK, pada awal tahun 2014 dibentuk *Working Group* FKSSK. *Working Group* FKSSK ini merupakan bagian langkah koordinasi dan kerja sama anggota FKSSK yang mencakup kerangka analisis dampak sistemik, indikator *surveillance* kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), penyusunan mekanisme koordinasi Jaring Pengaman Sistem Keuangan Internasional (*International Financial Safety Net*), serta penyempurnaan aspek legal. Pembahasan secara intensif juga dilakukan dengan praktisi maupun mengacu kepada *best practices* internasional dengan dukungan World Bank dan Toronto Centre.⁵ Sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan *Working Group*, pada 18 Desember 2014 telah dilakukan simulasi pencegahan/penanganan krisis untuk menguji kesiapan anggota FKSSK dalam kondisi krisis. Dari simulasi yang

5 Toronto Centre merupakan organisasi nonprofit yang memberikan jasa konsultansi atau pelatihan bagi regulator lembaga/institusi keuangan untuk mendorong stabilitas sistem keuangan.

dilaksanakan, telah dapat diidentifikasi beberapa aspek yang perlu diperkuat agar PMK di masing-masing anggota FKSSK dan di FKSSK dapat lebih efektif.

Upaya penguatan PMK internal Bank Indonesia juga ditingkatkan, baik pada aspek hukum maupun pemantauan (*surveillance*) risiko. Bank Indonesia melakukan pembaruan perangkat hukum organisasi dalam bentuk amandemen Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No.14/1/PDG/2012 tentang Protokol Manajemen Krisis tanggal 11 Januari 2012 dan Surat Edaran (SE) Intern No.14/11/INTERN tanggal 9 April 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Krisis. Penyempurnaan ketentuan ini masih dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perubahan organisasi terkait program transformasi Arsitektur Fungsi Strategis BI (AFSBI) 2014. Penyempurnaan tersebut juga disertai dengan penguatan mekanisme pemantauan risiko, termasuk melalui proses *review* secara berkala terhadap pendekatan dan alat analisis yang digunakan agar lebih dapat menangkap secara dini peningkatan potensi risiko sesuai dengan dinamika yang terjadi di pasar keuangan dan perekonomian.

Pencegahan/penanganan krisis juga memerlukan jalinan koordinasi dengan bank sentral lain. Di tingkat regional, Bank Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam penyiapan *Crisis Management and Resolution Framework* (CMRF) EMEAP. CMRF merupakan salah satu inisiatif kerja sama dalam sistem keuangan sebagai pelajaran akan pentingnya koordinasi dengan otoritas negara lain pasca krisis finansial global 2008. CMRF mencakup 4 (empat) elemen kerangka kerja dalam pencegahan/penanganan krisis yaitu: (1) proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas (2) mekanisme pemberitahuan dan aktivasi (3) mekanisme komunikasi secara *cross-border*, serta (4) *policy toolkits* regional. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014 adalah EMEAP *Crisis Communication Test* (CCT) yang merupakan simulasi untuk menguji komunikasi, sebagai aspek penting dalam manajemen krisis antar negara anggota EMEAP. Secara umum simulasi menunjukkan bahwa koordinasi dan aliran informasi antar negara anggota EMEAP berjalan cukup baik.

Untuk memitigasi potensi risiko dan tantangan ke depan yang masih tinggi, penguatan koordinasi terkait PMK terus dilakukan. Bank Indonesia sebagai bagian FKSSK terus aktif dalam upaya memperkuat mekanisme pemantauan risiko yang lebih komprehensif beserta penyiapan alternatif respon kebijakan yang diperlukan, baik secara internal maupun dalam konteks FKSSK. Salah satu prioritas yang sudah mulai intensif disiapkan tahun 2014 di FKSSK, yaitu mendorong tersedianya RUU JPSK agar menjadi

prioritas dalam jangka pendek mengingat hal ini krusial untuk memperkuat landasan dan kepastian hukum bagi implementasi PMK yang efektif.

Koordinasi dalam rangka Keuangan Inklusif

Bank Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga serta pihak terkait untuk memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Sasaran perluasan akses tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat berpendapatan menengah bawah diantaranya melalui kegiatan edukasi dan penyaluran bantuan pemerintah menggunakan uang elektronik melalui Layanan Keuangan Digital (LKD).

Kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan. Kelompok masyarakat yang menjadi target edukasi terdiri dari pelajar, calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan kelompok masyarakat tertentu yaitu petani, nelayan, pedagang pasar, buruh pabrik dan masyarakat di daerah perbatasan dan terpencil. Materi yang diberikan antara lain mencakup perencanaan keuangan, pengenalan uang elektronik, Layanan Keuangan Digital (LKD), dan kewirausahaan. Koordinasi kegiatan edukasi dimaksud dilakukan bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga terkait seperti Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), World Bank, International Labour Organization (ILO) dan Yayasan TIFA dalam rangka meningkatkan akses keuangan, menggunakan transaksi keuangan nontunai, memberdayakan TKI, dan menyusun modul TKI. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Agama diperkuat dalam rangka meningkatkan akses keuangan dan menggunakan layanan nontunai bagi transaksi keuangan yang dilakukan di pondok pesantren oleh para santri.

Koordinasi juga dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penyaluran bantuan pemerintah menggunakan uang elektronik melalui Layanan Keuangan Digital (LKD). Selama tahun 2014 terdapat 2 jenis bantuan pemerintah yang penyalurannya menggunakan uang elektronik melalui LKD yaitu penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tunai Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan PKH menggunakan uang elektronik melalui LKD, Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dengan program ini, Bank Indonesia mengharapkan agar penerima PKH mendapatkan akses kepada lembaga keuangan formal, meningkatkan aktivitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, koordinasi penyaluran bantuan tunai PSKS menggunakan uang elektronik dilakukan dengan berbagai kementerian terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah. Penyaluran bantuan tunai PSKS telah diluncurkan oleh Presiden RI pada 3 November 2014. Sasaran penerima bantuan tunai adalah 15,5 juta keluarga kurang mampu di 19 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam program ini penerima bantuan menerima 3 jenis kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pada tahap awal, penyaluran bantuan Program Keluarga Produktif melalui uang elektronik ditargetkan terhadap satu juta keluarga. Sedangkan 14,5 juta keluarga lainnya diberikan dalam bentuk simpanan giro pos. Program ini bermanfaat bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Bagi masyarakat program ini akan membantu dalam mengakses kepada lembaga keuangan formal. Sementara bagi lembaga keuangan formal akan memperoleh *market* nasabah baru.

Selain di lingkup nasional, Bank Indonesia juga berperan aktif di fora internasional dalam meningkatkan keuangan inklusif. Bank Indonesia menjadi anggota *The Alliance for Financial Inclusion (AFI)* dan berkomitmen dalam *Sasana Accord* untuk melakukan pengukuran pencapaian komitmen keuangan inklusif. Bank Indonesia juga terlibat dan aktif dalam G20 khususnya pada *Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI)* dan *Development Working Group (DWG)* pada bidang keuangan inklusif dan remitansi. Di samping itu, Bank Indonesia menjadi anggota *Organization for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE)* yaitu organisasi internasional di bidang edukasi keuangan.

13.4. Koordinasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Koordinasi Bank Indonesia dengan berbagai instansi, baik Pemerintah maupun dunia usaha merupakan hal yang penting dilakukan untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia pada bidang sistem pembayaran sehingga dapat terlaksana dengan baik. Koordinasi kebijakan tersebut dimaksudkan agar sistem pembayaran dapat berjalan secara aman, efisien, dan andal. Untuk mencapai tujuan tersebut, selama 2014, Bank Indonesia berkoordinasi antara lain dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Pemerintah Daerah, OJK, serta perguruan tinggi. Selain melakukan koordinasi di dalam negeri, Bank Indonesia juga berperan aktif di kancah internasional sebagai anggota *working group* dalam *Working Committee on Payment and Settlement Systems* (WCPSS).

Dalam upaya meningkatkan keamanan bagi pengguna jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penanganan dugaan tindak pidana di bidang sistem pembayaran. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, Bank Indonesia dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menandatangani Pedoman Kerja “Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)”. Pedoman Kerja ini meliputi penanganan dugaan tindak pidana di bidang sistem pembayaran (transfer dana, transaksi melalui Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), uang elektronik dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah) serta KUPVA. Kerja sama ini akan berlangsung di seluruh wilayah Indonesia untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana sistem pembayaran dan KUPVA.

Selain peningkatan keamanan, Bank Indonesia juga terus melakukan upaya koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendorong peningkatan penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Upaya tersebut diawali dengan pencanangan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Sebagai komitmen untuk mendukung GNNT, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia. Pemerintah menyambut baik pencanangan GNNT seiring dengan kesadaran akan manfaat penggunaan instrumen nontunai, seperti mendorong transparansi, efisiensi, perencanaan perekonomian yang lebih akurat, dan peningkatan akses masyarakat. Beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah adalah penggunaan nontunai untuk layanan keuangan Pemerintah, implementasi *e-payment* dan *e-budgeting* Pemerintah Provinsi termasuk transaksi kepada UMKM, serta memperluas akses layanan keuangan dan edukasi kepada masyarakat.

Pada level pemerintah pusat, BI telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dalam hal memfasilitasi penggunaan uang elektronik terkait penerapan *e-ticketing* di semua rute kereta *commuter line* antar kota di Jabodetabek dan memfasilitasi penggunaan uang elektronik di 23 lokasi parkir stasiun yang dikelola oleh PT KAI *Commuter Jabodetabek*.

Pada tingkat pemerintah daerah, BI berkoordinasi dengan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) terkait penerapan *e-government* di tiap provinsi. Selain itu, BI juga sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penerapan *e-ticketing* Transjakarta serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nontunai.

Selain dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BI juga telah berkoordinasi dengan 12 perguruan tinggi di 10 kota dalam rangka menciptakan *less cash society* di lingkungan kampus. Adapun 12 perguruan tinggi yang didaulat menjadi pelopor GNNT yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Koperasi Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Negeri Makassar dan IAIN Antasari. Pemilihan kampus sebagai pelopor GNNT dilatarbelakangi oleh peran mahasiswa di masyarakat, yaitu sebagai agen perubahan yang diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menciptakan masyarakat nontunai.

Dalam upaya melakukan perbaikan layanan dan perlindungan terhadap TKI, telah disusun dokumen rencana aksi (renaksi) untuk diterapkan di berbagai

Kementerian maupun Lembaga (K/L). Penyusunan dokumen renaksi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melainkan juga kontribusi aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 13 K/L yang terkait dengan TKI termasuk salah satunya Bank Indonesia. Dalam kerja sama ini, Bank Indonesia berperan dalam menyampaikan daftar penyelenggara transfer dana nonbank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, serta menyampaikan materi kepada calon TKI terkait pengiriman uang melalui *formal remittance* pada saat pembekalan akhir sebelum pemberangkatan. Selanjutnya, bersama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan perbankan akan dilaksanakan integrasi Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dari BNP2TKI dengan layanan nontunai dari perbankan.

Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan OJK untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia khususnya di bidang sistem pembayaran. Bank Indonesia bersama OJK melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi di beberapa kota. Sosialisasi bersama Bank Indonesia dan OJK bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif baik dari sisi Bank Indonesia maupun OJK sehingga diharapkan masing-masing perwakilan dari KPwDN Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan OJK dapat memahami secara utuh mengenai tugas-tugas pada masing-masing institusi, termasuk mengenai pentingnya koordinasi pelaksanaan antara tugas BI dengan OJK dan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran.

Selain itu, pada 2014, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait mekanisme penggunaan *central bank money* untuk setelman dana atas transaksi efek di pasar modal. Inisiatif ini dilakukan dalam rangka mitigasi risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam mekanisme saat ini, dimana setelman dana atas transaksi efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan *commercial bank money* melalui lima bank komersial sebagai bank pembayaran (*payment bank*). Sampai dengan akhir 2014, telah dilakukan pembahasan teknis termasuk isu-isu dalam penyiapan mekanisme serta usulan strategi dan *roadmap* implementasinya.

Di samping koordinasi dengan berbagai pihak di dalam negeri, Bank Indonesia juga berperan sebagai anggota *working group* dalam *Working Committee on Payment and Settlement Systems* (WCPSS). Melalui *task force* WCPSS, telah dilakukan pembahasan antara lain terkait dengan *trade settlement, money remittance, retail payment*

system, serta penggunaan *international message standard* untuk setelman transaksi di kawasan ASEAN. Selain itu, sebagai anggota G20, Bank Indonesia turut mendukung penggunaan teknologi dalam remitansi dan interkoneksi ATM antar negara. Melalui inovasi dalam teknologi diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam melakukan transaksi internasional, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan efisiensi.

Selain koordinasi kebijakan sistem pembayaran nontunai, Bank Indonesia juga terus menjalin dan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan pengelolaan uang rupiah (tunai). Selama 2014, Bank Indonesia berkoordinasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga Negara, serta kerja sama dengan beberapa asosiasi usaha terkait dengan kegiatan pengelolaan uang rupiah dan mendorong penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI. Koordinasi dan kerja sama tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta layanan kas yang prima.

Dalam kaitan pengelolaan uang rupiah, Undang Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) mengamanatkan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pencetakan serta pemusnahan dilakukan Bank Indonesia melalui koordinasi dengan Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, UU tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Rupiah. Koordinasi kebijakan terkait kegiatan perencanaan uang rupiah berupa pembahasan Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) dan Rencana Cetak Uang (RCU) 2015 oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Pembahasan EKU tersebut berlandaskan asumsi makroekonomi yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. RAPBN 2015 tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) tanggal 15 Agustus 2014 dan disahkan oleh DPR-RI tanggal 29 September 2014. Dalam penyusunan EKU 2015, Bank Indonesia juga memperhitungkan rencana tentang macam dan harga rupiah, proyeksi jumlah rupiah yang perlu dicetak, serta jumlah rupiah yang rusak dan yang ditarik dari peredaran. Selanjutnya, hasil EKU 2015 menjadi dasar bagi Bank Indonesia melakukan pengadaan bahan uang

dan penyusunan Rencana Cetak Uang (RCU) 2015. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menyepakati jumlah rencana pencetakan uang tahun 2015 sebesar Rp232,05 triliun terdiri dari uang kertas Rp230,92 triliun dan uang logam sebesar Rp1,13 triliun. Selanjutnya, Perum Peruri telah berkomitmen untuk melakukan optimalisasi kapasitas cetak uang rupiah, sehingga diharapkan jumlah pencetakan uang rupiah pada tahun 2015 sesuai dengan RCU Bank Indonesia.

Terkait dengan upaya meningkatkan kelancaran pasokan bahan kertas uang yang sebagian diimpor dari luar negeri, Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Koordinasi dilakukan terkait upaya untuk memberikan perlakuan pemeriksaan impor bahan kertas uang dari Jalur Merah sejak beberapa tahun lalu menjadi Jalur Hijau pada tahun 2014.⁶⁷ Penetapan Jalur Merah tersebut telah berdampak secara langsung terhadap lamanya pengeluaran barang menjadi rata-rata 10 hari sejak kapal datang dari waktu normal selama 3 hari. Relatif lamanya waktu pengeluaran barang di Pelabuhan Tanjung Priok dapat menyebabkan perubahan suhu tumpukan uang kertas, tingkat keasaman (pH), tingkat resolusi (Rh) dan kelembaban bahan kertas uang. Di sisi lain, hal tersebut juga menimbulkan ketidakpastian estimasi jumlah bahan uang di Bank Indonesia pada periode tertentu dan dapat mengakibatkan gangguan pada saat proses pencetakan uang di Perum Peruri sebagai dampak perubahan kondisi bahan kertas uang. Sejak dikeluarkannya Instruksi DJBC Nomor INS-02/BC/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Penetapan Jalur Hijau Khusus Impor Kertas Uang yang Dilakukan oleh Bank Indonesia, mulai tanggal 16 Juli 2014 impor bahan kertas uang telah mendapatkan penetapan Jalur Hijau. Dengan demikian, waktu pemeriksaan bahan kertas uang di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lebih cepat yang memberikan pengaruh positif bagi terjaganya kualitas bahan kertas uang.

6 Jalur merah (*red channel*) adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dengan kriteria importir baru, importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (*high risk importir*), barang impor sementara, Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II; barang re-impor, terkena pemeriksaan acak, barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi (Sumber Ditjen Bea dan Cukai).

7 Jalur hijau (*green channel*) adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dengan kriteria importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah (Sumber Ditjen Bea dan Cukai).

Dalam rangka pengeluaran dan penerbitan uang rupiah kertas pecahan Rp100.000 sebagai amanat UU Mata Uang, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan Sekretariat Kabinet. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan desain uang rupiah kertas pecahan Rp100.000 yang sesuai dengan ciri-ciri umum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Mata Uang. Sedangkan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penggunaan gambar dan penulisan pahlawan nasional dalam uang rupiah kertas pecahan Rp100.000. Selanjutnya, koordinasi dengan Sekretariat Kabinet terkait dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta dalam Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya melakukan distribusi uang yang aman dan optimal, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI), PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI), dan PT. Silkargo Indonesia. Kerja sama dengan PT. KAI dimaksudkan untuk penyediaan moda transportasi kereta api terjadwal untuk distribusi uang rupiah ke wilayah Indonesia melalui jalan darat. Kerja sama dengan PT. PELNI dimaksudkan untuk penyediaan moda transportasi kapal penumpang terjadwal yang menjadi alternatif bagi Bank Indonesia. Distribusi uang rupiah dengan menggunakan kapal penumpang menjadi alternatif, jika perusahaan pengangkutan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) tidak mempunyai jalur distribusi uang rupiah Bank Indonesia atau tidak dapat melayani permintaan distribusi uang pada waktu yang diperlukan. Sementara itu, kerja sama dengan PT. Silkargo Indonesia sebagai salah satu perusahaan EMKL untuk menyediakan dan menyewakan kapal laut dan truk untuk distribusi uang rupiah ke daerah. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kepolisian RI untuk memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap kegiatan distribusi uang ke seluruh Indonesia.

Dalam rangka menjaga kualitas uang rupiah yang diedarkan, Bank Indonesia secara rutin melakukan pemusnahan uang rupiah tidak layak edar yang dikoordinasikan dengan Pemerintah. Bentuk koordinasi adalah penyampaian informasi uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan setiap tiga bulan dan kepada Kementerian Hukum dan HAM setiap satu tahun sekali. Informasi ini kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk data pemusnahan periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk memberikan rasa aman dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah, Bank Indonesia terus melakukan upaya penanggulangan peredaran uang rupiah palsu. Melalui koordinasi dengan unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), Bank Indonesia turut serta dalam koordinasi teknis Botasupal untuk melakukan sinkronisasi kebijakan nasional pemberantasan uang rupiah palsu.⁸ Botasupal juga telah menyiapkan Nota Kesepahaman mengenai Koordinasi Dalam Rangka Pemberantasan Uang Rupiah Palsu sebagai upaya memperlancar pelaksanaan koordinasi di masa mendatang.

Bank Indonesia juga secara berkesinambungan bekerjasama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk memberikan edukasi kepada peserta Pendidikan Kejuruan Reserse - Bareskrim Polri. Kerja sama lainnya adalah peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan uang rupiah bagi calon anggota Polisi pada Sekolah Polisi Negara (SPN) di seluruh Indonesia. Peningkatan kompetensi diberikan bagi calon anggota Polisi dengan pangkat Bintara, yang nantinya akan menjadi garda terdepan Polri di seluruh daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Melalui materi pendidikan UU Mata Uang, Manajemen Pengelolaan Uang Rupiah dan Ciri Keaslian Uang Rupiah, serta didukung materi Tindak Pidana Kejahatan Uang Rupiah Palsu dari Bareskrim Polri, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan calon Bintara Polri sebelum terjun ke masyarakat. Selama tahun 2014, telah dilakukan *pilot project* pada empat SPN yang berlokasi di Purwokerto, Balikpapan, Denpasar, dan Jabodetabek. Jumlah calon Bintara Polri yang diberikan materi ajar tersebut mencapai sekitar 3.500 calon Bintara.

Edukasi dan sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk penyiapan materi ajar kebanksentralan pada kurikulum SMA/MA sebagai bagian dari materi pendidikan Ekonomi. Melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) pada tahun sebelumnya, pada tahun 2014 Bank Indonesia telah mendistribusikan Buku Pedoman Guru SMA/MA tentang Kebanksentralan kepada 15.483 SMA dan MA di Indonesia pada bulan Juni-Juli 2014. Salah satu modul Buku Pedoman Guru tersebut adalah modul sistem pembayaran, baik mengenai pengelolaan uang rupiah, ciri keaslian uang rupiah,

maupun alat pembayaran nontunai. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan materi ajar Kebanksentralan untuk tingkat SMA/MA sesuai Kurikulum 2013 dapat dilakukan oleh SMA/MA di seluruh wilayah Indonesia.

Terkait dengan kebijakan layanan kas yang prima, pada tahun 2014 Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) untuk melakukan kegiatan kas keliling di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan pulau terdepan NKRI. Pada Juni 2014, Bank Indonesia berpartisipasi dalam ekspedisi Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara (Bhakesra) IV di Pulau Buton, Pulau Obi, Sorong, Pulau Waisei, dan Kepulauan Raja Ampat. Salah satu kegiatan Bhakesra IV berupa penukaran uang rupiah yang sudah tidak layak edar (Gambar 13.5). Bank Indonesia bersama TNI-AL melakukan kegiatan kas keliling di wilayah timur Indonesia pada bulan November 2014 dengan mengunjungi Kupang, Pulau Pantar, Pulau Moa, Pulau Tempa, dan Ambon. Sementara itu, kegiatan kas keliling di wilayah barat Indonesia dilakukan pada bulan November 2014 dengan mengunjungi Batam, Pulau Buku Limau, Pulau Lepar dan Sungsang. Dalam kegiatan kas keliling tersebut, juga dilakukan sosialisasi ciri keaslian uang rupiah dan kewajiban penggunaan uang rupiah untuk transaksi di wilayah NKRI. Di samping itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan Polisi Perairan Indonesia melakukan kas keliling di tujuh pulau di Kepulauan Seribu.

Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka mendorong penggunaan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI. Hal ini merupakan amanat pasal 21 UU Mata Uang yang wajibkan penggunaan uang rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI. Pada tahun 2014, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16/33/GBI/DPU/NK – B/29/VIII/2014 pada tanggal 1 September 2014, tentang Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman tersebut, telah disusun Pedoman Kerja tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah pada tanggal 20 November 2014.

⁸ Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) terdiri dari unsur Badan Intelijen Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. BOTASUPAL dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012.

Gambar 13.5. Rute Ekspedisi Bhakti Kesejahteraan Sosial IV



Dari sisi Pemerintah, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan No. 3 Tahun 2014 pada tanggal 7 Juli 2014 yang mengatur penyelesaian kewajiban kegiatan di bidang transportasi wajib menggunakan rupiah. Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. HK 103/2/13/DJPL-14 pada tanggal 26 Agustus 2014 yang mengatur bahwa operator terminal/pelabuhan dan badan usaha terkait di bidang transportasi laut wajib menggunakan uang rupiah dan terhadap transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan kurs yang disepakati pada saat transaksi.

Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan) untuk memperoleh kesamaan pemahaman serta komitmen akan pentingnya kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI. Bank Indonesia juga menyusun Nota Kesepahaman dengan Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tentang Kerja Sama dalam rangka Mendorong Penerapan Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah dalam Setiap Transaksi di Wilayah NKRI.

13.5. Koordinasi Guna Mendukung Komitmen Internasional

Bank Indonesia berperan aktif dalam koordinasi nasional yang melibatkan berbagai instansi terkait dalam rangka mendukung komitmen Indonesia di berbagai forum Internasional. Sepanjang tahun 2014, Bank Indonesia semakin memperkuat koordinasinya bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan jajaran Kementerian lainnya, baik dalam merumuskan posisi Indonesia yang sejalan dengan kepentingan nasional maupun dalam memastikan kelancaran implementasi komitmen dimaksud. Koordinasi tersebut tidak terlepas dari upaya untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi global serta untuk menjaga stabilitas di kawasan dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam mendukung upaya pemulihan global, koordinasi nasional dilakukan dalam kerangka keanggotaan Indonesia pada forum G20. G20 di bawah Presidensi Australia mengusung tema besar pada tahun 2014 untuk memprioritaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui penyusunan *Comprehensive Growth Strategy* (CGS). Melalui CGS, pertumbuhan ekonomi G20 dalam rentang lima tahun ke depan ditargetkan setidaknya 2% di atas skenario *baseline* pertumbuhan saat ini. Selain itu, terdapat 4 (empat) area reformasi kebijakan yang harus dilakukan seluruh anggota, yakni kebijakan investasi infrastruktur, tenaga kerja, persaingan usaha, dan perdagangan. Melalui pendekatan ini, perumusan strategi kebijakan di setiap negara dimaksudkan agar respons kebijakan negara-negara lebih bersifat bersama (*concerted*) dan menghindari pendekatan yang parsial.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lainnya telah merumuskan prioritas kebijakan Indonesia untuk mendukung CGS tersebut. Lima prioritas telah dicanangkan, yaitu meliputi (i) paket kebijakan makroekonomi untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal serta stabilitas makroekonomi dan keuangan; (ii) kerangka kebijakan investasi infrastruktur untuk memperbaiki lingkungan usaha dan menciptakan kesempatan serta meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur; (iii) reformasi kebijakan ketenagakerjaan; (iv) efisiensi dan sustainabilitas energi; dan (v) kebijakan untuk mempromosikan UMKM. Prioritas kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sejumlah langkah-langkah konkret yang menjadi komitmen Indonesia pada keempat area reformasi kebijakan dimaksud.

Sesuai kewenangannya, Bank Indonesia telah merumuskan kebijakan dan mencanangkan sejumlah komitmen. Pada area investasi, Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan KADIN mendukung penuh kegiatan promosi investasi di daerah melalui fungsi hubungan investor yang akan dilaksanakan oleh sejumlah Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan tabungan domestik melalui program "Tabunganku" dan memperluas akses di sektor keuangan. Pada area persaingan usaha, Bank Indonesia mencanangkan komitmen untuk melakukan pendalaman pasar valuta asing, pasar rupiah, dan pasar uang syariah melalui relaksasi regulasi dan pengembangan instrumen keuangan. Selain itu, Bank Indonesia mempromosikan Layanan Keuangan Digital (*Digital Financial Services*) agar ke depan dapat menekan biaya transaksi, memperluas akses keuangan, dan meningkatkan layanan sistem pembayaran khususnya untuk UMKM. Sementara itu, pada area tenaga kerja, melalui Gerakan Kewirausahaan, Bank Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan teknis dan manajerial kepada wirausaha nasional dengan fokus pada agribisnis dan komoditi ekspor.

Ke depan, Indonesia akan terus menyempurnakan *Growth Strategy* Indonesia dan menyelaraskannya dengan prioritas kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah. Melalui upaya tersebut, pertumbuhan PDB Indonesia diharapkan dapat meningkat sejalan dengan target pertumbuhan global dalam CGS.

Selanjutnya, dalam mendukung upaya menjaga stabilitas di kawasan, Bank Indonesia juga secara intensif telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan khususnya terkait penyiapan infrastruktur yang diperlukan untuk implementasi fasilitas Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI). Dengan telah ditandatangannya amandemen perjanjian *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) dan perjanjian *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) Indonesia-Jepang, saat ini Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tengah menyiapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai panduan operasional guna memastikan efektivitas implementasi kedua fasilitas JPKI dimaksud.

Selain itu, Bank Indonesia bersama kementerian terkait juga terus berkoordinasi untuk merumuskan posisi Indonesia dalam perundingan kerjasama perdagangan jasa dan investasi antara ASEAN dengan negara mitra dalam konteks *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Disadari bahwa kerja sama RCEP memang diperlukan mengingat keterkaitan perdagangan yang kuat antara ASEAN dengan negara-negara mitra seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India, serta pentingnya RCEP sebagai salah satu motor perekonomian dunia. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga agar perjanjian RCEP ini tetap mengedepankan kepentingan Indonesia, serta tidak mengurangi ruang kebijakan (*policy space*) bagi Indonesia dalam menerapkan kebijakan domestik di yurisdiksi Indonesia sendiri.

Pembangunan ekonomi secara garis besar bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dimana dalam jangka panjang diwujudkan melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Untuk mewujudkannya diperlukan kebijakan makroekonomi seperti kebijakan moneter dan fiskal. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mencapai inflasi yang rendah, sedangkan salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mengingat tujuan kedua kebijakan tersebut berbeda, paling tidak dalam jangka pendek, maka koordinasi antara keduanya sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal. Beberapa studi (Petit, 1989; Laurens dan Piedra, 1998; Javed dan Sahinov, 2005) menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan berdampak positif bagi perekonomian.

Salah satu alat untuk mengamati efektivitas atau bekerjanya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal adalah teori permainan (*game theory*). Dari tinjauan konsep teori permainan, otoritas fiskal dan otoritas moneter masing-masing berperan sebagai pemain.¹ Kedua pemain tersebut memiliki strategi berupa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Secara garis besar, kedua strategi kebijakan tersebut masing-masing dapat dibagi dalam dua kategori yaitu strategi kebijakan ketat dan strategi kebijakan longgar. Bennet dan Loayza (2002) menggambarkan hubungan otoritas moneter dan otoritas fiskal dengan pendekatan teori permainan dalam bentuk *prisoners' dilemma*. Mereka menjelaskan tujuan utama otoritas fiskal adalah kesempatan kerja yang tinggi, atau dapat diartikan juga sebagai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan tujuan utama dari otoritas moneter adalah inflasi yang rendah. Hasil dari masing-masing interaksi antara kedua strategi otoritas tersebut dijabarkan dalam Bagan 1.

Imbalan (*payoff*) permainan tersebut ditentukan oleh hasil interaksi dari strategi kedua pemain. Secara ilustratif, ketika hasil yang terjadi berupa inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang

Bagan 1. Hasil dari Permainan Fiskal dan Moneter

		Otoritas Moneter	
		Kebijakan Ketat	Kebijakan Longgar
Otoritas Fiskal	Kebijakan Ketat	Inflasi yang rendah Pertumbuhan ekonomi yang rendah	Inflasi yang sedang Pertumbuhan ekonomi yang sedang
	Kebijakan Longgar	Inflasi yang sedang Pertumbuhan ekonomi yang sedang	Inflasi yang tinggi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

juga rendah, maka imbalan bagi otoritas moneter adalah 7, lebih tinggi dibandingkan imbalan bagi otoritas fiskal (sebesar 4). Hal ini mengingat inflasi yang rendah merupakan tujuan utama dari otoritas moneter. Sebaliknya, ketika hasil yang terjadi berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang merupakan tujuan utama otoritas fiskal, maka imbalan bagi otoritas tersebut sebesar 7, sedangkan imbalan bagi otoritas moneter hanya sebesar 4. Imbalan keduanya akan sama (masing-masing sebesar 6) ketika hasil yang terjadi berupa inflasi yang sedang dan pertumbuhan ekonomi yang sedang.²

Dalam konteks perekonomian Indonesia, pada tahun 2014, pengamatan terhadap koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dapat dibagi dalam dua episode yaitu episode pertama (Januari-Oktober) dan episode kedua (November-Desember). Dalam episode pertama, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter menerapkan kebijakan moneter bias ketat dengan suku bunga BI Rate sebesar 7,50%. Dampak dari kebijakan moneter bias ketat tersebut adalah relatif terkendalinya tekanan inflasi dan secara bertahap menurun (Grafik 1). Sementara itu, Pemerintah sebagai otoritas fiskal menerapkan kebijakan ketat. Dampak dari bauran kebijakan moneter dan fiskal yang bias ketat menyebabkan PDB termoderasi dari 5,14%

¹ Persyaratan dalam teori permainan (*game theory*), terdapat minimal dua pemain dengan masing-masing dua strategi dengan *payoff* dan *outcome* sebagai hasil interaksi dari kedua pemain (Rasmusen, 1994).

² Selengkapnya lihat Bennet, H. dan Loayza, N., 2002, "Policy Biases When the Monetary and Fiscal Authorities Have Different Objectives", dalam Monetary Policy: Rules and Transmission Mechanisms, eds. Loayza, N. dan Schmidt-Hebbel, K., Santiago, Chile, Central Bank of Chile.

Grafik 1. Episode Inflasi



Sumber: BPS

pada triwulan I 2014 menjadi 5,03% pada triwulan II 2014 (Grafik 2).

Pada episode pertama, ditinjau dari teori permainan, kebijakan bias ketat oleh BI merupakan strategi utama (*dominant strategy*), dengan imbalan bagi BI sebagai pemain pertama adalah 7 bila Pemerintah melakukan kebijakan ketat dan 6 bila Pemerintah melakukan kebijakan longgar. Mengingat respons dari Pemerintah berupa kebijakan ketat, maka imbalan yang diperoleh sebesar (7,4), dengan imbalan bagi BI sebesar 7 dan Pemerintah sebesar 4 (Bagan 2.a). Sedangkan kondisi keseimbangan yang paling baik atau Nash *equilibrium* terjadi bila strategi kebijakan moneter yang ketat direspon dengan kebijakan fiskal yang longgar (imbalan masing-masing sebesar 6). Dengan begitu, pada episode pertama ini tidak tercapai kondisi keseimbangan yang paling baik.

Pada episode kedua, Pemerintah mengawali langkah dengan mengeluarkan kebijakan BBM bersubsidi pada November 2014 dengan menaikkan harga premium menjadi Rp8.500 dan solar menjadi Rp6.500. Kebijakan pelonggaran yang dilakukan Pemerintah tersebut telah meningkatkan ruang fiskal dan berhasil menjaga defisit fiskal sebesar 2,2% dari PDB. Sementara itu, BI merespons kebijakan fiskal tersebut dengan menaikkan BI *Rate* dari 7,5% menjadi 7,75%. Kenaikan BI Rate ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi setelah kenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasaran yaitu 4±1% pada tahun 2015.

Grafik 2. Episode PDB



Sumber: BPS

Pada episode kedua ini, pemain pertama adalah Pemerintah dan pemain kedua adalah BI. Kebijakan pelonggaran yang ditempuh Pemerintah dan direspon BI dengan menerapkan kebijakan moneter bias ketat merupakan strategi terbaik (*best strategy*). Strategi ini menghasilkan imbalan yang optimal dan keseimbangan yang paling baik, yaitu (6,6), dengan masing-masing otoritas memperoleh 6. Dari teori permainan ini, diperoleh kesimpulan bahwa “koordinasi” (*cooperative game*) akan menghasilkan keseimbangan yang paling baik, sehingga koordinasi perlu diperkuat.³

Bagan 2. Imbalan dari Permainan Moneter dan Fiskal

		Episode 1		Episode 2	
		Otoritas Fiskal	Otoritas Moneter	Otoritas Fiskal	Otoritas Moneter
		A	B	A	B
Otoritas Moneter	A	(7 , 4)	(6 , 6)	(4 , 7)	(6 , 6)
	B	(6 , 6)	(4 , 7)	(6 , 6)	(7 , 4)

2.a 2.b

A=Kebijakan Ketat B=Kebijakan Longgar

3 Goeltom (2007) mengemukakan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia untuk mendukung perekonomian makro. Simorangkir (2007) juga menemukan bahwa kerjasama antara otoritas fiskal dan otoritas moneter memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa kerjasama.



Keterangan gambar:

Ke depan, perekonomian nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Laksana joki kuda Gayo, berbagai tantangan tersebut akan terus dihadapi melalui strategi bauran kebijakan, termasuk percepatan reformasi struktural, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



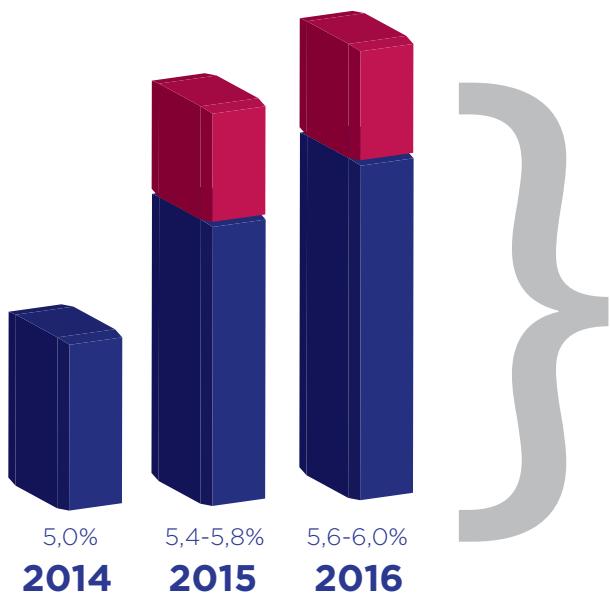
Tantangan, Arah Kebijakan dan Prospek Perekonomian Indonesia

BAGIAN

4

INFOGRAFIS BAGIAN 4

TANTANGAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROSPEK



PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2015-2016

Inflasi tahun 2015 dan 2016 diperkirakan dalam kisaran bawah sasaran inflasi $4\pm1\%$

Defisit transaksi berjalan terkendali sekitar 3% dengan struktur yang lebih sehat

Pertumbuhan Kredit 2015 diperkirakan 15-17%

PROSPEK JANGKA MENENGAH



Bagian IV

PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan perbaikan perekonomian global yang terus berlanjut, perekonomian Indonesia tahun 2015 diprakirakan akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Perbaikan ekonomi dunia ke depan masih akan dimotori oleh negara-negara maju terutama AS sementara negara *emerging market* masih tumbuh terbatas. Masih terbatasnya perbaikan perekonomian global tersebut akan berdampak pada berlanjutnya penurunan harga komoditas utama dunia termasuk minyak. Di sisi domestik, kebijakan reformasi energi yang ditempuh Pemerintah pada bulan November 2014 disamping memberikan ruang fiskal bagi Pemerintah untuk meningkatkan belanja modal juga akan mendorong penurunan impor migas. Dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia memprakirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 akan berkisar pada 5,4-5,8%. Pertumbuhan ekonomi 2015 diprakirakan terutama ditopang oleh belanja Pemerintah dan investasi. Seiring dengan peningkatan investasi, pertumbuhan impor juga akan meningkat. Dengan perkembangan tersebut, defisit transaksi berjalan diprakirakan akan berada di sekitar 3% PDB dengan struktur yang lebih sehat, sementara inflasi diprakirakan kembali pada kisaran sasaran inflasi 2015 sebesar $4\pm 1\%$.

Namun demikian, prospek perbaikan ekonomi jangka pendek tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, salah satu tantangan yang mengemuka pada tahun 2015 adalah ketidakpastian di pasar keuangan global sejalan dengan divergensi kebijakan moneter di negara-negara maju. Divergensi kebijakan moneter tersebut tercermin pada kemungkinan Amerika Serikat menaikkan suku bunga FFR, sementara Euro dan Jepang menempuh kebijakan QE. Bagi Indonesia, ketidakpastian kondisi pasar keuangan global berimplikasi pada semakin terbatasnya aliran modal masuk yang selama ini telah memberi manfaat bagi pembiayaan fiskal dan defisit neraca transaksi berjalan. Di sisi domestik, tantangan utama yang mengemuka bersumber pada inflasi, terutama inflasi *administered prices*. Reformasi energi yang merupakan pijakan awal dimulainya reformasi struktural secara menyeluruh memang merupakan suatu keharusan dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkesinambungan. Namun demikian, dampak inflasi

dari reformasi energi patut dicermati karena berpotensi mendorong tingkat inflasi melampaui kisaran sasaran inflasi 2015.

Mempertimbangkan berbagai risiko terhadap perekonomian tersebut, Bank Indonesia berkomitmen untuk konsisten mengimplementasikan kebijakan berorientasi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Strategi kebijakan suku bunga yang akan ditempuh adalah menetapkan tingkat suku bunga kebijakan yang konsisten dengan upaya untuk menjaga inflasi pada lintasan jangka menengah-panjang sejalan dengan sasarnya. Penetapan tingkat suku bunga tersebut mempertimbangkan dampak terhadap pertumbuhan dan likuiditas perekonomian. Sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, kebijakan suku bunga ini akan didukung oleh pengelolaan rupiah yang sesuai dengan fundamentalnya dan relaksasi ketentuan makroprudensial secara selektif untuk mengurangi risiko *hard landing* perekonomian dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut akan diperkuat dengan koordinasi yang erat dengan Pemerintah baik pusat maupun daerah serta institusi terkait lainnya guna meningkatkan efektivitasnya.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan akan terus membaik yang dibarengi dengan penurunan defisit transaksi berjalan dan inflasi yang tetap berada dalam lintasan sasarnya. Namun demikian, perkiraan tersebut akan dihadapkan pada ketidakpastian global yang masih tinggi dan meningkatnya kelas menengah Indonesia yang berimbas pada peningkatan impor. Di sisi suplai, perekonomian yang masih diselimuti dengan berbagai hambatan rigiditas dan ketidakefisienan telah membentuk sisi produksi yang kurang responsif. Akibatnya, perekonomian sangat rentan terhadap tekanan dari sisi permintaan. Oleh karena itu, Pemerintah harus dapat memanfaatkan momentum reformasi energi sebagai pijakan untuk mempercepat reformasi struktural dengan memperkuat *factor enablers* seperti infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi dan institusi serta pembangunan kedaulatan pangan dan energi. Bank Indonesia akan mendukung percepatan reformasi struktural dengan menjalankan mandat pokok untuk menyediakan tiga

elemen penyambung pembangunan ekonomi yakni stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan terselenggaranya sistem pembayaran yang handal.

Dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia memprakirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,5% dengan defisit transaksi berjalan yang menurun dan lebih seimbang di kisaran 2,5-3% dari PDB serta inflasi yang terkendali di kisaran $3,5\pm1\%$ pada tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi bahkan akan dapat melebihi 7% pada tahun 2019 apabila Pemerintah berhasil memaksimalkan belanja infrastruktur serta mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perekonomian yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkesinambungan.

Halaman ini
sengaja dikosongkan



Keterangan gambar:

Pendakian menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan masih dihadapkan pada jalan berliku dan tebing terjal serta berbagai tantangan yang tidak ringan. Namun, berbagai tantangan tersebut akan dapat diatasi dengan strategi dan arah bauran kebijakan yang semakin sinkron serta diimplementasikan secara terintegrasi, tepat waktu, dan dengan takaran yang terukur.



BAB 14

TANTANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Ke depan, perekonomian nasional masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan global dan regional. Selain itu, dari domestik, perekonomian masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural terutama terkait kedaulatan pangan dan energi, daya saing industri dan perdagangan, sumber-sumber pembiayaan pembangunan, dan inklusi ekonomi yang perlu ditopang oleh stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta modal dasar pembangunan yang kuat. Merespons berbagai tantangan tersebut Bank Indonesia dan Pemerintah akan memperkuat koordinasi melalui bauran kebijakan moneter-makroprudensial, moneter-fiskal, dan kebijakan reformasi struktural guna memperkokoh stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Pada masa mendatang, perekonomian domestik masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik yang bersumber dari global, regional maupun domestik. Dari sisi global masih terdapat risiko pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya merata dan divergensi kebijakan moneter di negara maju, sehingga volume perdagangan dunia diprakirakan masih tumbuh moderat dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih cukup tinggi. Dari sisi regional, terdapat peluang bagi Indonesia untuk mengambil manfaat dari implementasi Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015. Namun, kemampuan memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kecepatan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai basis produksi untuk ekspor dalam rantai nilai ASEAN dan rantai nilai global.

Sementara itu dari domestik, terdapat sejumlah permasalahan struktural terkait fundamental ekonomi yang masih belum terselesaikan yang memengaruhi kemampuan perekonomian untuk dapat melaju ke lintasan yang lebih tinggi secara berkesinambungan. Pertama adalah tantangan untuk mencukupi dua input penting bagi proses industrialisasi dan percepatan transformasi ekonomi Indonesia ke tingkat perekonomian yang lebih maju, yaitu pangan dan energi. Kedua adalah tantangan untuk memperkuat laju industrialisasi dan daya saing sektor industri dalam jaringan produksi global. Kemampuan untuk melanjutkan proses industrialisasi, termasuk untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dalam rantai nilai global (*moving up the value chain*), akan sangat memengaruhi kemampuan Indonesia untuk bermigrasi ke negara industri. Kemampuan tersebut akan sangat bergantung setidaknya pada kemampuan mempertahankan surplus pangan untuk mendukung industrialisasi. Ketiga adalah tantangan memperkuat basis pembiayaan jangka panjang untuk aktivitas investasi swasta yang berkesinambungan dan mendukung implementasi program pembangunan oleh Pemerintah. Keempat adalah tantangan untuk terus membuka akses yang lebih merata bagi semua warga negara agar dapat memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. Keempat tantangan tersebut memerlukan dukungan tersedianya modal dasar pembangunan yang berkualitas dan memadai serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang kokoh.

Dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks tersebut, Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui tiga bauran kebijakan. Bauran kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Pertama, kebijakan Bank Indonesia akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kedua, koordinasi bauran kebijakan moneter dan fiskal akan diperkuat. Dalam hal ini, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan sustainabilitas fiskal melalui reformasi subsidi dan reformasi pajak. Ketiga, kebijakan reformasi struktural untuk memperkokoh kedaulatan pangan dan energi, meningkatkan daya saing industri dan perdagangan, memperluas sumber-sumber pembiayaan pembangunan, dan mendorong inklusi ekonomi, yang ditopang oleh stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta modal dasar pembangunan yang lebih kuat.

14.1. Tantangan Perekonomian

Tantangan Perekonomian Global dan Regional

Ke depan, pemulihan ekonomi dunia diperkirakan masih akan berjalan lambat dan tidak merata bahkan cenderung bergerak dengan satu mesin pertumbuhan yaitu Amerika Serikat (AS). Perekonomian AS diprakirakan terus menunjukkan tren kinerja yang membaik, ditandai dengan permintaan domestik yang terus menguat, sejalan dengan meningkatnya pendapatan riil akibat semakin anjloknya harga minyak, serta didukung oleh perbaikan sektor tenaga kerja. Namun demikian, ekonomi AS juga dihadapkan pada beberapa *downside risks* seperti tercermin pada penurunan *purchasing manager index* (PMI), meski masih ekspansif, didorong oleh menurunnya permintaan ekspor dan permintaan dari perusahaan domestik yang berbasis energi. Kinerja sektor properti di AS juga menunjukkan tren penurunan. Sementara itu, pemulihan kondisi perekonomian di negara maju lainnya seperti Jepang diperkirakan semakin optimis ditopang oleh inisiatif-inisiatif fiskal. Sebaliknya, pemulihan ekonomi di Kawasan Eropa diperkirakan akan tertahan akibat tekanan pada sisi eksternal dan masih besarnya defisit anggaran serta potensi deflasi yang terus berlanjut. Dari sisi negara *emerging markets*, perlambatan perekonomian Tiongkok diperkirakan terus berlanjut sejalan dengan proses *rebalancing* ekonomi yang ditempuh.

Harga komoditas global diperkirakan akan tetap terkontraksi meskipun dengan kecenderungan yang semakin melambat. Hal ini sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah dari

prakiraan sebelumnya, terutama Tiongkok yang menjadi salah satu sumber utama permintaan dan penentu dinamika harga komoditas global. Masih terkontraknya harga komoditas global juga disebabkan oleh menurunnya harga minyak dunia akibat melemahnya permintaan, seiring pertumbuhan ekonomi dunia yang kurang menggembirakan, di tengah pasokan minyak mentah yang semakin meningkat terutama dari kelompok negara-negara non-Organization of the Petroleum Exporting Countries (non-OPEC). Peningkatan pasokan non-OPEC ini diprakirakan bersifat tetap dan akan membawa *excess supply* hingga beberapa tahun ke depan. Kondisi ini akan mendorong lambatnya proses pemulihan harga minyak dunia. Pelemahan harga minyak dan harga komoditas juga didorong oleh perilaku investor yang melakukan *shifting* investasi dari komoditas ke aset dolar AS (nonkomoditas) sejalan dengan ekspektasi penerapan normalisasi kebijakan moneter di AS. Perkembangan ekonomi global dan harga komoditas tersebut berpotensi memberikan tekanan pada perbaikan kinerja transaksi berjalan.

Di pasar keuangan global, ketidakpastian masih cukup tinggi sejalan dengan divergensi kebijakan moneter negara maju, dimana AS kemungkinan akan menaikkan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) dan Eropa serta Jepang akan menempuh kebijakan *quantitative easing* (QE). Meskipun proyeksi pasar terhadap kenaikan FFR semakin konvergen pada pertengahan 2015, namun hal tersebut masih akan bergantung pada perkembangan harga minyak dunia dan mata uang USD serta dampaknya terhadap tingkat inflasi di AS dalam jangka pendek. Ketidakpastian proses normalisasi kebijakan the Fed tersebut akan meningkatkan risiko pembalikan modal asing dari EM. Di sisi lain, kebijakan QE oleh Jepang dan ECB diperkirakan dapat mengimbangi sebagian pengaruh kebijakan the Fed terhadap pergerakan arus modal global ke EM, termasuk Indonesia. Program stimulus yang dinamakan ECB *Expanded Asset Purchase Program* (EAPP) akan menambah kembali likuiditas global semenjak berakhirnya program stimulus yang dilakukan oleh the Fed pada Oktober 2014.¹ Namun demikian, terdapat potensi ketidakpastian terkait dengan dampak dari kebijakan tersebut terhadap permintaan domestik Eropa di tengah faktor politik Eropa yang masih rentan seperti Yunani. Perkembangan

pasar keuangan global tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap Transaksi Modal dan Finansial (TMF) dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Hal ini terutama didorong oleh potensi risiko semakin kuatnya mata uang dolar AS, semakin meningkatnya risiko volatilitas aliran modal, dan semakin tingginya risiko premium.

Di tingkat regional, berbagai tantangan mengemuka seiring dengan akan diberlakukannya KEA pada akhir 2015. Penerapan KEA diperkirakan akan memicu lebih besar lagi arus perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini sejalan dengan berkurangnya berbagai hambatan perdagangan, baik barang maupun jasa, dan penguatan fasilitasi perdagangan intra ASEAN. Dalam KEA terdapat berbagai aspirasi penting yang perlu dicermati seperti ASEAN sebagai basis pasar dan produksi yang terpadu, serta terintegrasi sepenuhnya ke dalam rantai ekonomi global. Terkait dengan itu, KEA akan mengintegrasikan kemampuan produksi di ASEAN dalam bentuk ASEAN *Production Chain* yang lebih dikenal dengan nama *Priority Integration Sectors* (PIS), guna menghasilkan produk barang dan jasa.² Indonesia memiliki peluang untuk dapat menjadi basis produksi dalam memasok ke dalam rantai nilai ASEAN dan rantai nilai global. Namun, peluang ini sekaligus menjadi tantangan yang perlu dicermati. Efektivitas Indonesia sebagai basis produksi untuk barang-barang ekspor akan sangat bergantung pada kesiapan untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah wilayah ekonomi yang efisien dan mendukung aktivitas investasi dan penciptaan nilai tambah bagi produk ekspor, baik ke KEA maupun global. Apabila peluang tersebut tidak dapat dipersiapkan secara baik, maka dikhawatirkan Indonesia justru akan menjadi pasar bagi produk dan jasa negara-negara KEA lainnya atau menjadi lokasi produksi bagi barang dan jasa yang berorientasi pasar domestik atau menjadi lokasi produksi bagi barang dan jasa yang berorientasi pasar domestik.

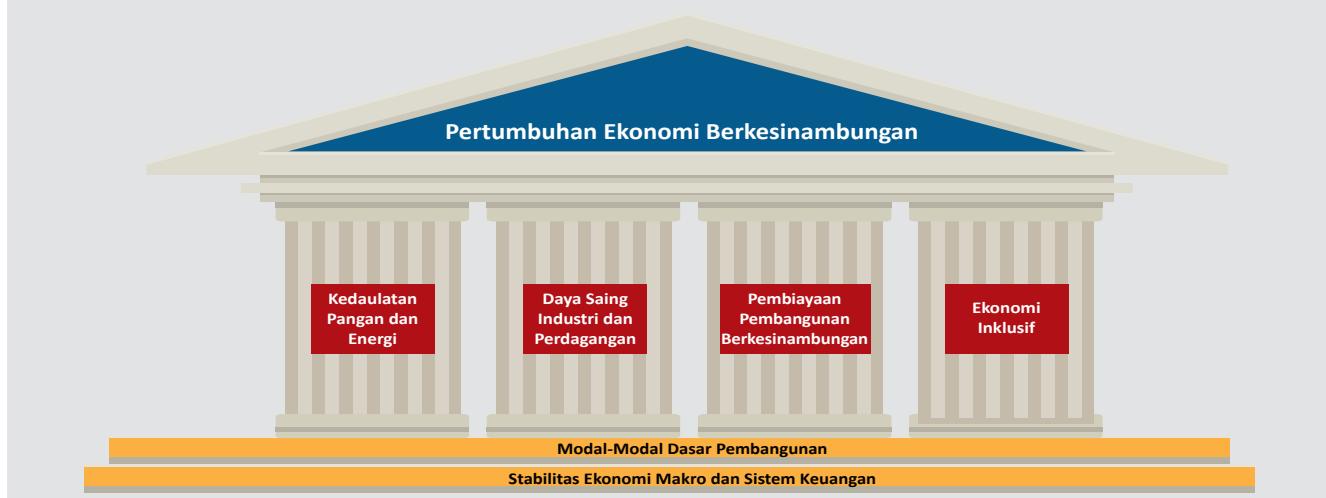
Tantangan Perekonomian Domestik

Sementara itu, dari domestik, perekonomian masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu melaju

1 Program stimulus EAPP akan menggelontorkan 60 miliar Euro per bulan ke ekonomi kawasan Euro mulai Maret 2015 sampai dengan September 2016. Dalam program ini, pembelian aset diperluas pada instrumen *government securities*, *agencies securities*, dan *European institutions*, tidak termasuk obligasi perusahaan (*corporate bond*). Skala program pembelian aset ini sekitar 1 triliun Euro dan bersifat *open-ended*, dengan kemungkinan masih bisa berlanjut setelah September 2016 hingga inflasi Eurozone mendekati target 2%.

2 PIS dalam bentuk barang akan meliputi antara lain produk-produk berbasis agro, otomotif, elektronika, teknologi informasi dan komunikasi, tekstil, pakaian jadi, perikanan, dan produk pengolahan kayu. Sedangkan PIS dalam bentuk jasa meliputi layanan kesehatan, perjalanan udara, pariwisata, dan layanan logistik.

Diagram 14.1. Bauran Kebijakan Makroekonomi dan Reformasi Struktural



pada lintasan yang tinggi namun tetap berimbang dan inklusif. Perwujudan pertumbuhan ekonomi tersebut mensyaratkan empat pilar fundamental perekonomian yang kokoh, yaitu: (i) kedaulatan pangan dan energi, (ii) adanya sektor industri yang berdaya saing global dan menyediakan lapangan kerja yang layak, (iii) tersedianya pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, dan (iv) terbukanya akses yang lebih merata (inklusif) terhadap berbagai peluang ekonomi (Diagram 14.1). Empat pilar perekonomian yang kokoh tersebut selanjutnya mensyaratkan adanya lingkungan perekonomian yang efisien dan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing kegiatan investasi dan kewirausahaan oleh sektor swasta. Untuk mewujudkan lingkungan tersebut diperlukan ketersediaan dua fondasi pendukung utama yaitu: (i) modal dasar pembangunan yang berkualitas dan memadai, mencakup infrastruktur konektivitas fisik dan digital, modal manusia, inovasi dan teknologi, serta kelembagaan yang kuat, dan (ii) stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan yang kokoh. Perkembangan sampai saat ini menunjukkan bahwa tantangan untuk memperkokoh ke empat pilar fundamental perekonomian domestik dan dua fondasi ekonomi tersebut masih mengemuka.

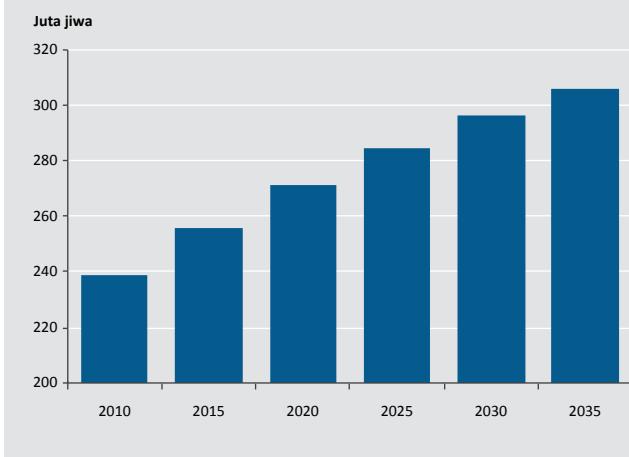
Tantangan Kedaulatan Pangan dan Energi

Fundamental perekonomian Indonesia yang kokoh sangat bergantung pada kemampuan menyediakan dua input produksi yang sangat penting dalam proses industrialisasi, yaitu pangan dan energi. Tantangan struktural di sektor pangan bersumber dari sisi produksi, distribusi, dan

permintaan. Produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas akibat berlanjutnya konversi lahan pertanian ke nonpertanian di tengah tingkat produktivitas dan tingkat penggunaan teknologi pertanian yang masih terbatas. Akibatnya, impor komoditas pertanian masih cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dari sisi distribusi, permasalahan muncul akibat infrastruktur konektivitas yang belum optimal. Dari sisi permintaan, kedaulatan pangan dihadapkan pada pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang tidak diimbangi dengan perubahan preferensi terhadap komoditas pangan utama. Tantangan ini perlu dicermati, karena sampai saat ini, beras masih merupakan komoditas yang menjadi preferensi utama penduduk Indonesia sebagai bahan pangan pokok (*staple food*). Pada saat yang bersamaan, pertumbuhan penduduk dan populasi kelas menengah semakin meningkat. Pada tahun 2020, penduduk Indonesia diperkirakan akan mendekati 274 juta orang dan pada tahun 2035 dapat melebihi 300 juta orang (Grafik 14.1).³ Dengan mengasumsikan tidak ada perubahan preferensi penduduk Indonesia terhadap komoditas pangan utama pada masa mendatang, kemampuan domestik dalam memasok bahan makanan pokok secara cukup dan dengan kualitas yang baik menjadi permasalahan penting.

³ Dalam satu setengah dekade kedepan, McKinsey Global Institute (2012) memperkirakan bahwa 71% penduduk Indonesia akan hidup di daerah perkotaan (urban) dan menyumbang pada 86% pembentukan output nasional. Lebih dari pada itu, sekitar 135 juta penduduk Indonesia akan menjadi kelas konsumen (*consuming class*). Lebih lengkap dapat dilihat pada "McKinsey Global Institute (2012): The Archipelago Economy – Unleashing Indonesia's Potential, September."

Grafik 14.1. Proyeksi Populasi Indonesia (2010-2035)

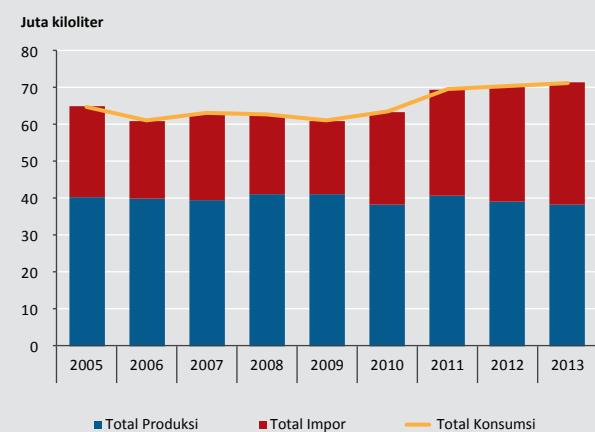


Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035 (Bappenas, BPS, dan UNFPA, 2013)

Upaya pencapaian swasembada pangan, termasuk beras, tidak dapat dilepaskan dari tantangan untuk mempercepat proses transformasi perekonomian Indonesia ke negara industri. Dalam proses transformasi tersebut terdapat dua isu utama pembangunan yang saling memengaruhi dan perlu menjadi perhatian. Pertama, untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di pedesaan diperlukan laju industrialisasi yang kuat di perkotaan dan aktivitas ekonomi nonpertanian yang meningkat di daerah pedesaan. Laju industrialisasi yang terjaga tersebut sangat penting untuk menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian dan menyediakan ruang bagi modernisasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi dan inovasi pertanian di daerah pedesaan. Kedua, sektor pertanian yang produktif, berbasis inovasi di bidang pertanian dan didukung infrastruktur pertanian yang andal, sangat diperlukan untuk memperkuat laju industrialisasi dan memperbesar keragaman aktivitas nonpertanian di pedesaan. Tanpa produktivitas pertanian dan surplus hasil pertanian yang cukup untuk menghidupi pekerja industrial di perkotaan, kelangkaan pangan akan terjadi, yang kemudian dapat mendorong kenaikan harga pangan dan memicu permintaan kenaikan upah pekerja di sektor industri. Jika permintaan kenaikan upah tersebut tidak didukung oleh peningkatan produktivitas, maka laju penyerapan kelebihan tenaga kerja sektor pertanian oleh industri dapat melambat. (Boks 14.1. Industrialisasi, Modernisasi Pertanian, dan Transformasi Struktural).

Pada sektor energi, sejalan dengan berlanjutnya ekspansi kelas menengah, konsumsi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik terus meningkat di tengah produksi energi yang semakin terbatas. Dari sisi BBM, meningkatnya konsumsi BBM belum mampu diimbangi

Grafik 14.2. Produksi dan Konsumsi BBM



Sumber: Kementerian ESDM

oleh produksi BBM akibat kurangnya kapasitas pengilangan minyak (Grafik 14.2). Ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran minyak ini telah mendorong meningkatnya impor sehingga defisit neraca perdagangan minyak semakin membesar dalam tiga tahun terakhir.⁴ Di sisi lain, kebutuhan listrik yang terus meningkat, khususnya untuk pelanggan rumah tangga (RT) dengan daya di bawah 1300VA dapat mengganggu kualitas keuangan pemerintah karena relatif besarnya subsidi listrik untuk kelompok RT tersebut.

Dari sisi pasokan listrik, terdapat ketidakseimbangan antara kawasan Jawa dan luar Jawa. Sampai saat ini, ketersediaan listrik untuk pulau Jawa masih relatif memadai. Namun, tuntutan untuk melakukan percepatan penyediaan pasokan dan distribusi diperkirakan akan semakin meningkat ke depan untuk menopang peningkatan aktivitas ekonomi di pulau Jawa. Jika tuntutan ini tidak terakomodasi maka laju industrialisasi dan penyerapan tenaga kerja oleh industri-industri di Jawa dapat terhambat. Terganggunya proses industrialisasi di Jawa, yang merupakan lokasi industri manufaktur utama di Indonesia, dapat memberi implikasi yang kurang menguntungkan bagi perekonomian nasional, karena laju penyerapan tenaga kerja dapat melambat, terutama penyerapan kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan peningkatan produktivitas pertanian terhambat sehingga dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga pangan, yang pada gilirannya dapat memberi efek balik negatif ke penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

4 Pada tahun 2013, porsi impor BBM minyak telah mencapai 46% dari total kebutuhan.

Sementara itu, masih terbatasnya pasokan listrik untuk wilayah-wilayah di luar Jawa, menunjukkan kecilnya kemungkinan wilayah-wilayah tersebut dapat memiliki sektor ekonomi dan industri yang lebih terdiversifikasi. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh berlanjutnya penyediaan fasilitas pasokan listrik secara mandiri dengan biaya yang cukup besar. Besarnya biaya penyediaan fasilitas listrik secara mandiri tersebut menghambat (*a barrier to entry*) aktivitas investasi yang lebih beragam. Kondisi ini pada gilirannya dapat menyebabkan perekonomian di luar Jawa tetap rentan terhadap gejolak karena tingkat keragaman ekspor dan sumber pertumbuhannya rendah.

Tantangan Daya Saing Industri dan Perdagangan

Fundamental perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada tantangan daya saing di bidang industri dan perdagangan. Berdasarkan profil daya saing produk manufaktur Indonesia menurut pemetaan *product space*, daya saing industri dan perdagangan semakin menurun.⁵ Dari pemetaan tersebut diketahui bahwa Indonesia mengalami penurunan keunggulan komparatif sebagaimana diukur dengan *Revealed Comparative Advantage* (RCA) pada *product space* di banyak jenis produk. Keunggulan komparatif yang dimiliki pada beberapa jenis produk pada tahun 2000 menjadi hilang di tahun 2013. Lebih lanjut, mayoritas produk-produk yang mengalami penurunan keunggulan komparatif adalah produk-produk yang termasuk dalam klaster-klaster dengan *proximity* yang padat dan menjadi klaster inti (*core*) dalam *product space*, seperti elektronik dan permesinan. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena kemampuan untuk mempertahankan daya saing pada klaster-klaster industri dengan *proximity* yang padat merupakan cerminan dari kemampuan meningkatkan kapabilitas global dalam memasok barang-barang yang beragam dengan nilai tambah tinggi dan berstandar internasional ke rantai nilai ekspor dunia.

Menurunnya daya saing telah membuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global semakin mengarah kepada importir langsung barang akhir untuk konsumsi final di Indonesia dan importir bahan baku dan antara untuk keperluan produksi barang akhir bagi pemenuhan pasar domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Indonesia

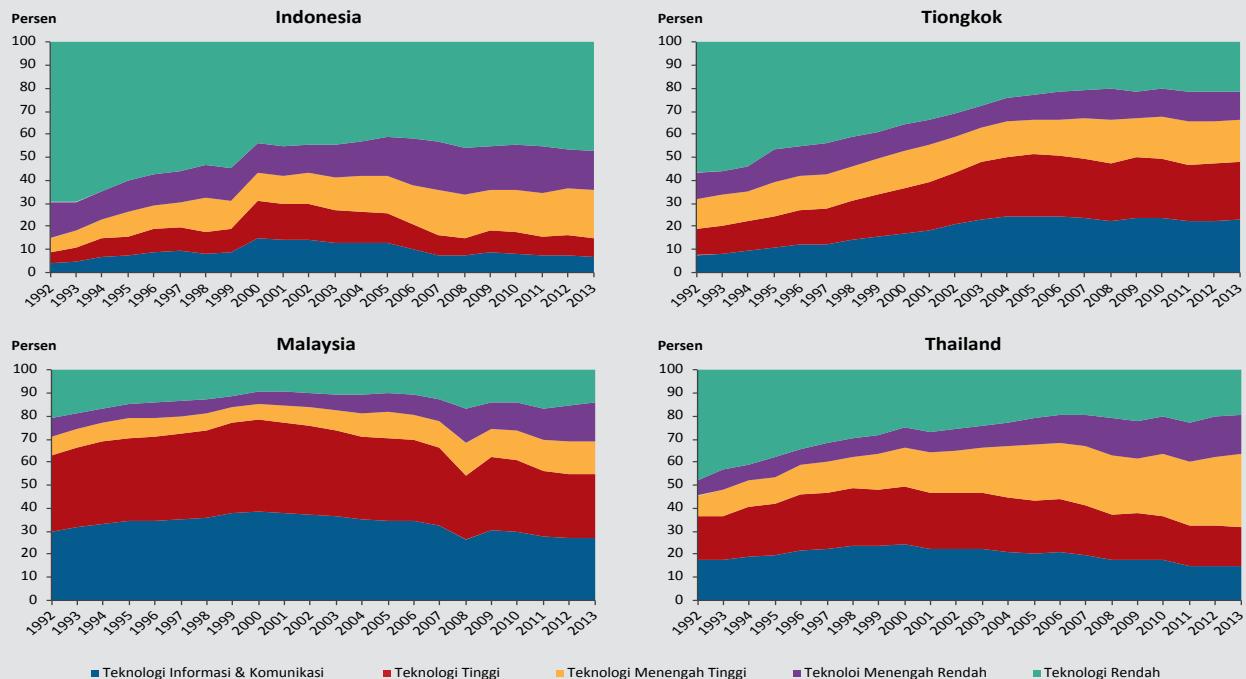
⁵ Konsep *product space* mengacu pada C. A. Hidalgo, B. Klinger, A.-L. Barabási, R. Hausmann, 2007, "The Product Space Conditions the Development of Nations", *Science*, 317: 482–487).

dalam rantai nilai global bukanlah sebagai basis produksi untuk ekspor ke pasar dunia, namun lebih sebagai pasar bagi produsen global dan domestik (Lihat Boks 14.2. Aktivitas Perdagangan Indonesia dalam Rantai Global). Selain itu, berdasarkan perbandingan komposisi ekspor antara Indonesia dan negara ASEAN juga menunjukkan bahwa secara umum ekspor Indonesia masih didominasi oleh barang komoditas primer dan barang industri bermuatan teknologi dan modal manusia yang rendah (Grafik 14.3).

Daya saing industri dan perdagangan yang menurun dan rendahnya muatan teknologi dan modal manusia dalam produk-produk ekspor perlu diwaspadai. Produk-produk ekspor yang cenderung bernilai tambah rendah mencerminkan kualitas penyerapan tenaga kerja yang belum meningkat di tengah meningkatnya status Indonesia dari negara berpendapatan rendah (*low income country*) menjadi negara berpendapatan menengah (*middle income country*) semenjak tahun 2004. Tanpa perbaikan pada kualitas penyerapan tenaga kerja, daya saing industri dan perdagangan Indonesia akan sangat bergantung pada rezim upah murah. Hal ini akan memberatkan tidak saja bagi kinerja neraca perdagangan ke depan, namun juga pada prospek pengentasan kemiskinan dan laju migrasi Indonesia ke negara maju. Transisi ke negara dengan tingkat pendapatan lebih tinggi dan proses transformasi ke negara industri niscaya akan diikuti oleh tekanan kenaikan upah. Mobilitas pekerja lintas batas (*overseas foreign workers*) dari Indonesia ke luar negeri juga menambah tekanan kenaikan upah tersebut. Tekanan kenaikan upah ini lambat laun dapat menyebabkan sektor-sektor padat karya berbasis upah murah mengalami penurunan daya saing di pasar internasional. Pertautan antara tekanan upah dan penurunan daya saing sektor padat karya berbasis upah murah ini mulai terasa dalam beberapa tahun belakangan seiring dengan meningkatnya upah riil pekerja industri, terutama di Jawa sebagai sentra manufaktur padat karya (Grafik 14.4).

Menurunnya daya saing global di sektor padat karya berbasis upah murah, yang saat ini perannya masih cukup besar dalam perekonomian, dapat lebih cepat jika daya saing nonupah, terutama terkait biaya logistik dan perdagangan serta kemudahan berusaha, semakin tertinggal dibandingkan negara pesaing. Daya saing nonupah yang memburuk dapat menambah total biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga daya saing di pasar global menurun lebih cepat. Lebih dari pada itu, melemahnya daya saing upah dan nonupah dapat pula berimplikasi pada menurunnya kemampuan sektor industri

Grafik 14.3. Perbandingan Intensitas Teknologi dalam Ekspor



Sumber: OECD, diolah

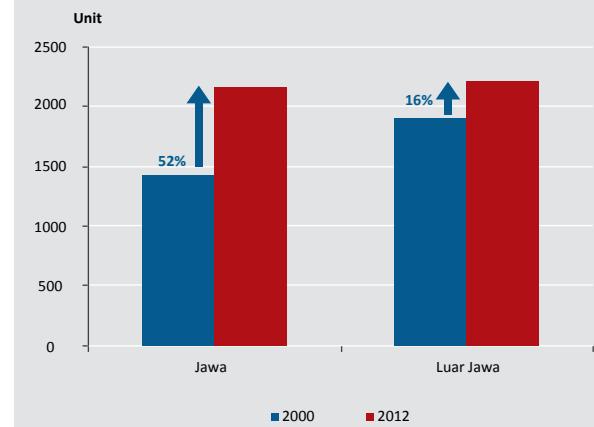
padat karya untuk menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian, sehingga transisi ke pertanian modern berbasis teknologi dan inovasi pun dapat melambat. Hal ini pada gilirannya dapat memicu penurunan produktivitas pertanian, meningkatkan potensi kelangkaan pangan dan deindustrialisasi yang prematur.

Tantangan lain terkait daya saing industri dan perdagangan adalah tingkat konsentrasi ekspor di kawasan luar Jawa. Konsentrasi ekspor pada produk-produk SDA bernilai tambah rendah telah memperlihatkan betapa rentannya provinsi-provinsi tersebut terhadap gejolak harga komoditas di pasar dunia. Tingkat konsentrasi ekspor pada produk bernilai tambah rendah dapat menjadi penghambat diversifikasi industri di luar Jawa yang pada gilirannya mengurangi kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan. Kerentanan provinsi-provinsi tersebut terhadap gejolak harga komoditas di pasar dunia menyebabkan semakin mendesaknya upaya melakukan transformasi perekonomian dan memperkuat daya tarik lokasinya untuk aktivitas investasi yang meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi sektoral. Dalam upaya mendorong transformasi struktural tersebut, kecenderungan tingginya tingkat upah di provinsi-provinsi di luar Jawa menjadi tantangan yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan (Grafik 14.4).

Tantangan Pembiayaan Pembangunan yang Berkesinambungan

Tantangan lain terkait fundamental perekonomian adalah masih terbatasnya sumber dana yang bersifat jangka panjang untuk membiayai perekonomian. Migrasi Indonesia ke perekonomian dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi menuntut investasi yang jauh lebih besar, baik untuk akumulasi modal oleh swasta maupun untuk

Grafik 14.4. Perbandingan Perkembangan Upah Riil di Jawa dan Luar Jawa



Sumber: BPS-SAKERNAS, diolah

pembiasaan pembangunan oleh Pemerintah. Penguanan basis pembiasaan investasi jangka panjang saat ini masih terkendala oleh beberapa isu struktural. Pertama, struktur pendanaan industri perbankan lebih didominasi oleh dana-dana jangka sangat pendek, sehingga tidak memungkinkan bagi perbankan untuk menyalurkan kredit investasi dengan jangka yang sangat panjang mengingat adanya risiko *mismatch*. Kedua, sumber pembiasaan dari pasar modal masih terbatas mengingat pasar obligasi sampai saat ini masih kurang likuid, dan bahkan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah yang menjadi pesaing di kawasan. Ketiga, tingkat partisipasi dana pensiun dan asuransi yang merupakan lembaga-lembaga yang memiliki dana untuk dipinjamkan melalui instrumen utang jangka panjang juga masih rendah. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya dana masyarakat yang dapat dihimpun melalui program dana pensiun dan asuransi serta reksa dana.

Selain itu, alternatif pembiasaan pembangunan bagi swasta dan pemerintah juga perlu terus diintensifkan. Upaya untuk terus memperkuat aliran masuk PMA juga penting sebagai pelengkap pembiasaan investasi dari dalam negeri, terutama PMA manufaktur nonmigas berorientasi ekspor yang banyak menyerap modal usaha. Di samping melonggarkan kendala pembiasaan perekonomian, kehadiran PMA berorientasi ekspor juga dapat membantu memperbaiki daya saing global sektor industri domestik. Dari sisi pemerintah, peranan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) perlu terus dikembangkan terutama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan energi.

Tantangan Ekonomi Inklusif

Tantangan selanjutnya terkait fundamental perekonomian adalah masih kuatnya permasalahan ketidakmerataan akses pada kesempatan dan peluang ekonomi bagi warga negara sehingga pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Walaupun secara agregat jumlah orang miskin dan tingkat kemiskinan di Indonesia masih dalam tren menurun, namun tren penurunan tersebut belum dapat mengurangi ketimpangan akses pada kesempatan dan peluang ekonomi terutama pada masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi pembangunan manusia menunjukkan bahwa secara umum akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih belum merata antar berbagai wilayah di Indonesia. Hal yang sama terjadi pula dengan akses ke infrastruktur dasar bagi peningkatan aktivitas

ekonomi yang lebih luas. Pada sektor keuangan, inklusi keuangan belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama layanan bagi masyarakat pada tingkat pendapatan paling bawah (*people at the bottom of the pyramid*). Kondisi saat ini juga menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal dan akses ke layanan perbankan masih belum merata.

Tantangan Modal Dasar Pembangunan

Ke depan, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat bergantung pada ketersediaan lingkungan pendukung (*enabling environment*) yang memfasilitasi efisiensi dan peningkatan produktivitas dunia usaha serta penguatan pilar-pilar fundamental perekonomian. Terkait dengan itu maka sangat penting untuk memperkuat ketersediaan modal-modal dasar pembangunan yang dapat menopang ketersediaan lingkungan pendukung tersebut. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang sedang bermigrasi ke negara berpendapatan lebih tinggi, modal-modal dasar yang utama adalah infrastruktur, modal manusia, inovasi dan teknologi, serta kelembagaan.

Dari sisi infrastruktur, terdapat masih banyak yang perlu ditingkatkan terkait ketersediaan dan kualitas infrastruktur konektivitas baik fisik maupun digital di Indonesia, agar seluruh biaya logistik dalam jaringan produksi, baik domestik maupun dengan global, dapat lebih rendah dan setara dengan negara-negara pesaing. Upaya penguatan infrastruktur konektivitas perlu terus dilakukan terutama untuk membangun akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah di Indonesia ke (i) jaringan konektivitas fisik intermoda yang efisien dan berkualitas baik (*seamless*) yang meliputi jalan, kereta api, pelabuhan, dan bandar udara, serta (ii) jaringan konektivitas digital yang andal dan efisien. Tersedianya aspek-aspek ini dengan kualitas dan kuantitas yang memadai secara merata di nusantara, dan berbiaya murah, dapat dengan segera menurunkan seluruh biaya logistik dan meningkatkan kemudahan pelaku usaha dalam mengkoordinasikan logistik pergerakan barang di dalam negeri dan ke/dari luar negeri.

Lebih dari itu, biaya logistik yang bersaing dengan negara-negara setaraf di Asia akan sangat menentukan peran yang dapat dijalankan oleh Indonesia dalam jaringan produksi dunia. Daya tarik Indonesia sebagai lokasi untuk membangun basis produksi eksport akan dapat meningkat signifikan bila biaya logistik perdagangan di dalam

Indonesia dan dari/ke Indonesia bersaing dengan biaya logistik dan perdagangan internasional di negara-negara pesaing. Dalam konteks transformasi perekonomian Indonesia, ketersediaan infrastruktur konektivitas maritim yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dapat memperkuat daya saing nonupah dan integrasi internal Nusantara sebagai sebuah zona industri yang memasok bahan-bahan baku, antara dan akhir ke jaringan produksi global.

Di samping infrastruktur, ketersediaan modal manusia berkeahlian (*skilled*) dengan tingkat pendidikan yang memadai (*educated*) merupakan modal dasar yang sangat penting bagi penguatan fundamental perekonomian Indonesia. Dalam kaitan ini, masih terdapat ruang perbaikan terhadap kuantitas dan kualitas modal manusia Indonesia. Dari sisi kuantitas, tenaga kerja berkeahlian dan berpendidikan tinggi yang tersedia di pasar tenaga kerja saat ini masih terbatas, termasuk dalam hal ketersediaan tenaga profesional dan pekerja yang berkeahlian teknis. Keterbatasan pasokan terutama pada modal manusia dengan keahlian di bidang *science, technology, engineering, mathematics, and health* (STEM-H) dan terampil berbahasa asing, yang merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi peningkatan daya saing ekspor sektor-sektor industri yang berbasis inovasi dengan muatan teknologi tinggi. Dari sisi pasokan modal manusia masa depan, terdapat pula kelemahan yang cukup besar pada kualitas modal manusia yang masih berada dalam bangku pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai dari survei *Program for International Student Assessment* (PISA) anak-anak Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara-negara lain di dunia. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk membangun kerjasama PMA dan PMDN guna terus mendorong industrialisasi dan daya saing sektor industri di era global, ketersediaan modal manusia berkeahlian dengan standar internasional, sebagai input faktor produksi yang utama, menjadi sangat mendesak.

Dari sisi kelembagaan, tantangan iklim usaha dan investasi yang kurang kondusif dan masih rumitnya proses birokrasi turut menjadi perhatian para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Hal ini tercermin pada sejumlah indikator kemudahan berusaha (*ease of doing business*) terutama terkait (i) prosedur yang harus diikuti, waktu pengurusan, biaya yang harus dikeluarkan, dan modal minimum untuk memulai usaha, (ii) waktu yang diperlukan untuk registrasi hak milik dan izin bangunan, dan (iii) waktu yang diperlukan untuk administrasi pembayaran pajak. Termasuk dalam

permasalahan kemudahan berusaha ini adalah akses terhadap lahan, biaya transaksi yang tinggi akibat aturan-aturan pemerintah daerah yang distortif, dan fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*) yang belum mendukung. Dalam aspek fasilitasi perdagangan, perbaikan-perbaikan pada aspek formalitas seperti penyederhanaan prosedur dan pengawasan di pelabuhan, serta penyediaan informasi terkait aturan-aturan perdagangan masih sangat diperlukan, disamping masalah waktu tunggu. Aspek kelembagaan lain yang masih menjadi tantangan adalah kualitas layanan publik oleh birokrasi. Prosedur kerja, mekanisme pembuatan keputusan, manajemen sumber daya manusia, kapabilitas sumber daya manusia, dan akuntabilitas merupakan tantangan-tantangan yang masih mewarnai dinamika kerja di birokrasi.

Tantangan Memperkokoh Stabilitas Ekonomi Makro dan Sistem Keuangan

Selanjutnya, dalam upaya mempercepat reformasi struktural terdapat prasyarat paling mendasar yang perlu dipenuhi, yaitu stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Tanpa kedua prasyarat mendasar ini perencanaan dan implementasi program pembangunan akan sulit dilakukan, bahkan dalam kondisi makro dan sistem keuangan yang tidak stabil, pencapaian pembangunan yang ada akan mengalami kemunduran (*set-back*). Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan adalah elemen-elemen peninimbang (*elements of continuity*) proses pembangunan nasional. Terkait kedua elemen peninimbang ini, masih terdapat tantangan-tantangan untuk lebih meningkatkan kinerja yang sudah dicapai. Dari sisi pencapaian stabilitas ekonomi makro, tantangan ke depan adalah menjangkar laju inflasi dan ekspektasinya pada level yang rendah dan mengarahkan defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat dalam jangka menengah. Sementara itu, dari sisi pencapaian stabilitas sistem keuangan adalah perlunya terus memperkokoh ketahanan sistem keuangan terhadap gejolak dan volatilitas global.

Inflasi dan ekspektasinya dapat dikatakan telah terjangkar dengan baik ketika kenaikan harga-harga dalam perekonomian dari waktu ke waktu rendah dan stabil. Inflasi yang demikian merupakan prasyarat paling mendasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dari sudut pandang ekonomi makro, laju inflasi yang tinggi dan bergejolak dapat menyebabkan harga produk-produk ekspor Indonesia di pasar dunia

menjadi kehilangan daya saingnya. Sementara itu, tingginya laju inflasi berarti pula bahwa harga domestik terus meningkat, sehingga dapat berakibat pada tingginya permintaan impor untuk substitusi. Proses ini pada gilirannya dapat menyebabkan kinerja neraca transaksi berjalan yang memburuk dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Sementara itu, jika ditinjau melalui kacamata perekonomian yang lebih luas, laju inflasi yang tinggi dan bergejolak dapat menyebabkan ineffisiensi alokasi sumber daya perekonomian. Pertama, inflasi akan meredistribusi pendapatan dan kekayaan, dari mereka yang menabung kepada mereka yang berutang. Jika inflasi tinggi, maka di satu sisi mereka yang berutang akan mendapat keuntungan karena akan membayar kembali utangnya dengan nilai uang yang berdaya-beli lebih rendah. Di sisi lain, para penabung atau pemberi utang akan mengalami kerugian karena nilai tabungan dan piutangnya secara riil akan berkurang. Dalam lingkungan makro yang ditandai oleh laju inflasi yang tinggi dan suku bunga nominal yang rendah, proses redistribusi tersebut akan cenderung lebih menguntungkan bagi mereka yang berutang.

Kedua, dalam kondisi laju inflasi tinggi, maka perubahan harga-harga di pasar barang akan lebih fluktuatif. Kondisi ini akan meylitikkan para wirausahawan untuk membedakan sinyal peningkatan harga karena fundamental sisi permintaannya memang meningkat dan sinyal yang diakibatkan oleh ekses likuiditas (ekses permintaan) dalam perekonomian. Ketidakpastian ini mendorong pelaku usaha untuk tidak mengambil keputusan usaha yang bersifat jangka panjang. Akibatnya, ekspansi usaha melalui investasi akan melambat.

Ketiga, terkait dengan hal kedua diatas, inflasi yang tinggi dan bergejolak akan mendorong pemodal untuk mengalihkan dana dari aktivitas investasi produktif ke aktivitas spekulasi misalnya di pasar properti, emas, dan komoditas. Apabila pembiayaan spekulasi tersebut berasal dari pembiayaan utang seiring kondisi moneter yang longgar, maka harga properti dan *real estate* dapat terus merangkak naik sehingga terjadi gelembung harga (*bubble*). Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan ketimpangan kepemilikan aset dalam perekonomian karena akses penduduk ke perumahan layak menjadi semakin terbatas akibat harga yang tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh *bubble* di properti dan real estat berisiko menimbulkan gejolak ekonomi ketika gelembung harga pecah.

Keempat, dalam kondisi inflasi yang tinggi, ketimpangan pendapatan dapat meningkat. Pekerja di sektor formal yang menerima upah atau gaji tetap dapat merespons kenaikan harga-harga secara lebih baik melalui renegotiasi upah atau gaji. Di sisi lain, para pekerja dengan sistem pengupahan yang lebih longgar, belum tentu dapat merespons kenaikan harga-harga tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan pendapatan yang melebar. Dalam kaitan ini pula, dengan upah formal yang terus meningkat akibat inflasi, proses industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja di perkotaan dapat tertahan.

Kelima, terkait dengan hal keempat diatas, dalam lingkungan makro yang inflatoir, laju kenaikan upah nominal menjadi sulit untuk diprediksi, sementara minat investasi pelaku usaha serta daya beli konsumen dan kelompok pekerja terus tergerus. Kombinasi ini selanjutnya dapat mengganggu keharmonisan hubungan industrial dan pada gilirannya dapat mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Secara ringkas, inflasi yang tinggi adalah semacam tambahan pajak terselubung yang dapat mengganggu fundamental perekonomian dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ke depan, tren inflasi dan ekspektasinya perlu terus dipastikan terjangkar pada laju yang rendah, agar proses pembangunan tidak terganggu dan pertumbuhan ekonomi dapat lebih bersinambungan.

Terkait dengan neraca pembayaran, ke depan, upaya perbaikan defisit transaksi berjalan menuju 2,5-3% dari PDB masih menghadapi tantangan. Kondisi ini terjadi akibat terteikanya kinerja ekspor seiring dengan berlanjutnya koreksi harga komoditas, pemulihan ekonomi dunia yang lambat dan tidak merata, serta lemahnya daya saing produk ekspor nonmigas Indonesia. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya impor barang modal, sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Dari sisi migas, prospek harga minyak dunia yang menurun diperkirakan berdampak terhadap prospek investasi migas sehingga dapat memperburuk lifting migas yang memang sudah menurun akibat usia sumur yang menua (*natural declining*). Kondisi ini berpotensi menurunkan ekspor migas sehingga neraca perdagangan migas tertekan. Sementara itu, masih tingginya ketidakpastian keuangan global berpotensi membatasi aliran modal masuk, di tengah masih terbatasnya sumber pembiayaan domestik.

Sementara itu, tantangan lain terkait dengan upaya untuk memperkokoh stabilitas sistem keuangan. Perekonomian

Indonesia yang terbuka dan sektor keuangan yang terintegrasi dengan pasar keuangan dunia telah meningkatkan aktivitas perdagangan dan pembiasaan pembangunan melalui aliran modal. Namun, dengan integrasi tersebut, gejolak dan krisis ekonomi yang terjadi di negara lain akan dengan cepat terasa dampaknya ke Indonesia baik melalui jalur perdagangan maupun jalur keuangan. Sementara itu, gejolak dan krisis dalam perekonomian dunia adalah sebuah fenomena yang kerap berulang. Sistem keuangan yang rentan terhadap gejolak eksternal berpotensi memperbesar dampak negatif gejolak (*shock amplifier*) pada perekonomian dan pada gilirannya mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperkokoh fondasi sistem keuangan agar berdaya tahan.

14.2. Arah Kebijakan

Dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks tersebut, Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah melalui beberapa dimensi bauran kebijakan. Bauran kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pertama, kebijakan Bank Indonesia akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kedua, koordinasi bauran kebijakan moneter dan fiskal akan diperkuat. Dalam hal ini, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan sustainabilitas fiskal melalui reformasi subsidi dan reformasi pajak. Ketiga, kebijakan reformasi struktural untuk memperkokoh kedaulatan pangan dan energi, meningkatkan daya saing industri dan perdagangan, memperluas sumber-sumber pembiasaan pembangunan, dan mendorong inklusi ekonomi yang ditopang oleh stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta modal dasar pembangunan yang kuat.

Kebijakan Bank Indonesia

Penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran akan tetap menjadi fokus Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Di

bidang moneter, kebijakan akan tetap secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi agar terus berada dalam tren menurun menuju kisaran sasarannya dan ekspektasi inflasi tetap terjangkar, serta defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya. Pergerakan nilai tukar yang sejalan dengan nilai fundamentalnya akan tetap dijaga agar tidak mengakselerasi guliran ekspektasi depresiasi. Pada satu sisi, nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya akan kondusif bagi pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas sistem keuangan, namun di sisi lain nilai tukar juga dapat mendukung perbaikan daya saing. Di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, bauran kebijakan yang tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi tersebut akan kondusif bagi upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia juga akan memastikan keseluruhan kerangka kebijakan makroekonomi memiliki koherensi dan merefleksikan kualitas pengelolaan ekonomi makro yang paripurna. Kualitas tersebut merupakan prasyarat paling mendasar bagi munculnya optimisme tentang perekonomian nasional ke depan. Selain itu, guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, Bank Indonesia akan terus melakukan penguatan operasi moneter, baik rupiah maupun valas. Berbagai kebijakan di atas juga akan diperkuat oleh Bank Indonesia, antara lain, dengan terus melakukan berbagai upaya pendalaman pasar, pengelolaan lalu lintas devisa yang berhati-hati dan penguatan jaring pengaman keuangan internasional melalui kerjasama dengan pemangku kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan internasional.

Di bidang makroprudensial, relaksasi ketentuan makroprudensial akan dilakukan secara selektif guna memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang prioritas. Bank Indonesia akan mengarahkan agar kredit dan likuiditas dapat tumbuh selaras dengan kebutuhan perekonomian serta keseimbangan finansial tetap terjaga, dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. Dalam kaitan ini, koordinasi dengan OJK, Kementerian Keuangan dan LPS akan ditingkatkan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Kerangka kebijakan makroprudensial akan terus diperkuat dengan berpedoman pada standar internasional, inisiatif reformasi keuangan global, dan *best practices* yang diselaraskan dengan kondisi domestik. Untuk memastikan kredit dan likuiditas perekonomian selaras

dengan kebutuhan perekonomian dan mencegah ketidakseimbangan finansial, Bank Indonesia akan menerapkan aturan-aturan makroprudensial. Sektor keuangan juga akan didorong untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor yang lebih produktif sehingga dapat membantu penurunan defisit transaksi berjalan dan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah untuk mendorong ekspor dan peningkatan kandungan lokal. Kerangka kebijakan makroprudensial akan terus diperkuat, antara lain melalui pengembangan neraca keuangan nasional dan daerah, guna mengidentifikasi ketidakseimbangan finansial yang berasal dari sektor Pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan rumah tangga. Bank Indonesia juga akan secara rutin melakukan asesmen ketahanan perbankan dan korporasi nonbank terhadap gejolak berbagai jenis risiko. Selain itu Bank Indonesia juga akan melaksanakan *surveillance* dan pemeriksaan makroprudensial pada *systemically important banks* dan lembaga lain yang terkait dengan bank dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka mendukung intermediasi perbankan yang lebih berkualitas, fasilitasi terhadap UMKM akan dilanjutkan untuk meningkatkan kapabilitas UMKM agar memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan bank, antara lain melalui modernisasi pencatatan transaksi keuangan dan mekanisme *credit rating* bagi UMKM.

Sementara itu, di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien. Untuk mendukung stabilitas sistem keuangan, maka dalam cakupan pembayaran yang bernilai besar, Bank Indonesia akan terus mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran untuk mempersiapkan penggunaan *central bank money* dalam rangka meminimasi risiko operasional atas setelman transaksi surat berharga korporasi. Untuk itu, setelman dana transaksi surat berharga di pasar modal akan dikoneksikan secara langsung ke RTGS dan kapasitas RTGS akan difokuskan pada pemrosesan transaksi *high value*. Bank Indonesia juga akan memperkuat pengawasan sistem pembayaran pada lembaga keuangan dan penyedia jasa sistem pembayaran. Pengawasan sistem pembayaran akan difokuskan pada *Important Financial Market Infrastructure* (IFMI), termasuk pada yang dikategorikan sebagai *designated payment system*, sehingga pengawasan tidak dilakukan hanya pada sistem setelman yang dioperasikan oleh Bank Indonesia (Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS) namun juga pada SKNBI. Ke depan, pengawasan sistem pembayaran akan menjangkau pula operasional NPG dan *Central Security Depository* (C-Best) yang merupakan setelman surat berharga korporasi. Metode pengawasan juga akan disempurnakan dengan mengarahkan pada

penerapan prinsip-prinsip “*risk based approach*”, untuk mengoptimalkan fungsi *monitoring* dan supervisi pada area-area kritis terkait risiko penyelenggaraan sistem pembayaran agar dapat menopang *macro surveillance* yang selama ini telah diterapkan.

Kebijakan Fiskal

Koordinasi bauran kebijakan moneter dan fiskal akan diperkuat. Dalam hal ini, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan sustainabilitas fiskal melalui reformasi subsidi dan reformasi pajak. Dalam rangka memperkuat fondasi stabilitas ekonomi makro, Pemerintah akan menjaga rasio utang pemerintah agar berada di bawah 30% dari PDB dan selanjutnya terus menurun menjadi 20% dari PDB pada tahun 2019, mengupayakan defisit keseimbangan primer (*primary balance*) terus menurun dan menjadi surplus di tahun 2019, serta menjaga defisit anggaran terus berada di bawah 3% dari PDB dan terus menurun sampai 2019 menjadi sekitar 1% dari PDB. Untuk itu Otoritas Fiskal akan meneruskan reformasi subsidi dan reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio pajak. Sementara itu, untuk memperkuat peran kebijakan fiskal dalam pembangunan, Otoritas Fiskal akan memastikan bahwa sumber utama defisit fiskal kedepan adalah kegiatan pembangunan. Terkait ini kebijakan fiskal akan diarahkan pada pemberian insentif yang lebih kuat dalam rangka mendorong kegiatan investasi dan ekspor yang lebih kuat baik oleh PMA maupun PMDN, dan realokasi anggaran ke kegiatan pembangunan (*expenditure switching*). Realokasi anggaran akan ditujukan terutama untuk memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur dan program layanan dasar bagi masyarakat, seperti wajib belajar 12 tahun dan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Dalam jangka pendek, pemerintah akan memperbaiki defisit transaksi berjalan dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah melalui sembilan kebijakan. Pertama, dalam rangka meningkatkan daya saing produk dalam negeri, Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur fleksibilitas Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS), sebagai respon jika terdapat lonjakan impor barang tertentu, serta penyederhanaan prosedur dan mekanisme pengembalian. Kedua, dalam rangka mendorong PMA dan PMDN, Pemerintah dalam waktu dekat akan merevisi

PP Nomor 52 mengenai *tax allowance*. Salah satu tambahan fasilitas yang akan diberikan adalah insentif untuk dividen yang direinvestasi di dalam negeri dan *tax allowance* untuk produsen yang mengekspor lebih dari 30% produknya. Selain itu, prosedur pemberian *tax allowance* juga akan dipermudah, yaitu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ketiga, mendorong kebijakan peningkatan penggunaan *biofuel* yang saat ini baru ditetapkan sebesar 10% menjadi lebih tinggi lagi, tentunya dengan memperhatikan ketersediaan *supply* serta kebijakan harga yang kompetitif. Keempat, menyusun skema perpajakan, khususnya PPN, untuk industri pelayaran dalam negeri agar dapat lebih kompetitif dengan pelayaran luar negeri (*neutral tax treatment*). Kelima, mendorong terbentuknya BUMN reasuransi untuk mengurangi defisit neraca jasa, khususnya sektor asuransi. Keenam, bekerjasama dengan BI meningkatkan *Law Enforcement* untuk mendorong implementasi UU Mata Uang yang wajibkan penggunaan rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri. Salah satu caranya adalah dengan membentuk *call center* untuk menangani pelaporan pelanggaran terhadap penggunaan mata uang asing untuk transaksi di dalam negeri, karena UU ini sifatnya delik aduan. Ketujuh, mendukung kewajiban penggunaan *letter of credit* untuk transaksi 4 (empat) komoditas utama. Kedelapan, memperbaiki sistem remitansi untuk memudahkan arus masuk pendapatan orang Indonesia yang bekerja/berdomisili di luar negeri ke dalam sistem perbankan dalam negeri. Kesembilan,

Tabel 14.1. Sasaran Kedaulatan Pangan

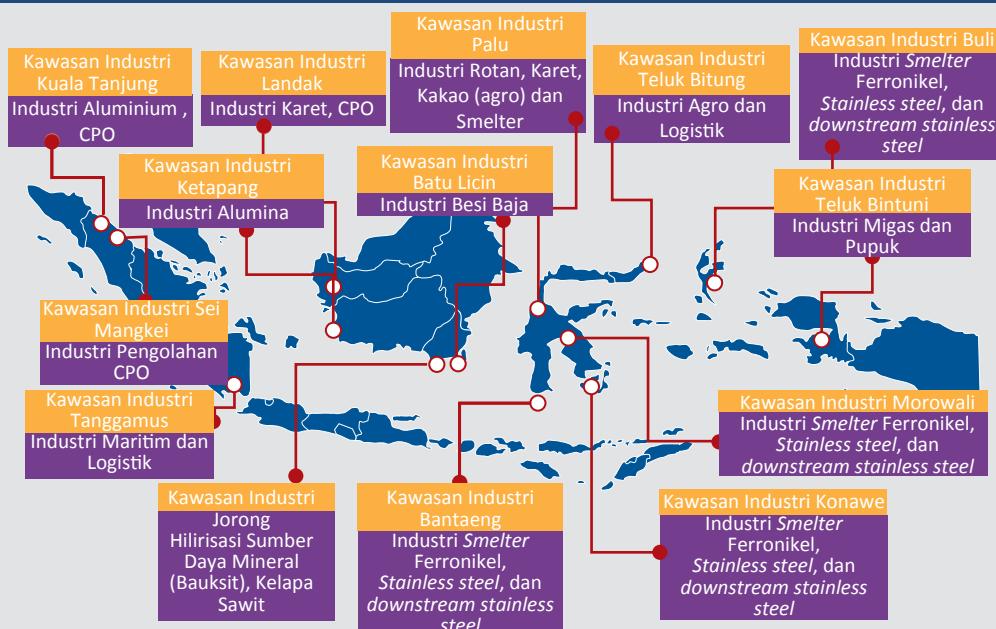
Komoditas	Unit	2014	2019
Produksi			
Padi	juta ton	70,6	82,0
Jagung	juta ton	19,1	24,1
Kedelai	juta ton	0,9	2,6
Gula	juta ton	2,6	3,8
Daging Sapi	ribu ton	452,7	755,1
Ikan	juta ton	12,4	18,8
Garam	juta ton	2,5	4,5
Konsumsi			
Konsumsi Kalori	Kkal	1967	2150
Konsumsi Ikan	kg/kap/th	38,0	54,5

Sumber: RPJMN

mendorong perkembangan industri pariwisata untuk mengundang turis asing datang ke Indonesia.

Selanjutnya, untuk menjawab berbagai permasalahan struktural, Pemerintah dan Bank Indonesia bersinergi untuk memperkuat bauran kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural yang ditujukan untuk memperkokoh kedaulatan pangan dan energi, meningkatkan daya saing industri dan perdagangan, memperluas sumber-sumber pembiayaan pembangunan, dan mendorong inklusi ekonomi yang ditopang oleh stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta modal dasar pembangunan yang kuat.

Gambar 14.1. Rencana Pembangunan Kawasan Industri di Luar Jawa



Sumber: Kementerian Perindustrian dan Bappenas, 2014

Kebijakan Reformasi Struktural

Penguatan Kedaulatan Pangan dan Energi

Dalam upaya meningkatkan kedaulatan pangan, Pemerintah telah mencanangkan sejumlah sasaran kedaulatan pangan (Tabel 14.1), antara lain tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, serta terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung oleh pengawasan distribusi pangan dan peningkatan cadangan beras pemerintah. Pemerintah juga merencanakan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur pertanian untuk irigasi dengan target pembangunan jaringan irigasi 9,89 juta hektar, merehabilitasi jaringan irigasi seluas 3,01 juta hektar, memelihara jaringan irigasi, serta membangun 28 waduk baru untuk mendukung produktivitas di sektor pertanian pangan. Peningkatan produktivitas pertanian juga akan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan meningkatkan kemampuan (*skill*) petani. Strategi kedaulatan pangan yang akan ditempuh Pemerintah tersebut ditargetkan dapat meningkatkan produksi pertanian nasional hingga mencapai: (i) 82 juta ton padi, (ii) 24,1 juta ton jagung, (iii) 2,6 juta ton kedelai, dan (iv) 3,8 juta ton gula di 2019. Strategi pembangunan sektor pertanian diatas tentunya akan membantu mempercepat modernisasi sektor pertanian, mengurangi tekanan kemunduran (*involusi*) pertanian di daerah pedesaan, dan memastikan surplus pangan cukup tersedia untuk menopang industrialisasi dan proses transformasi Indonesia ke perekonomian maju.

Sementara itu, untuk mencapai ketahanan energi, pemerintah akan menempuh kebijakan peningkatan produksi energi primer dan meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi. Peningkatan produksi energi primer diarahkan pada produksi minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksi. Produksi minyak dan gas bumi masing-masing ditargetkan mencapai 700 ribu SBM/hari dan 1.295 ribu SBM/hari. Untuk itu, peningkatan penerapan teknologi eksplorasi dan eksploitasi akan diintensifkan, selain upaya menemukan lapangan baru. Di samping itu, Pemerintah juga akan berupaya meningkatkan peranan sumber-sumber energi lain, terutama sumber energi yang terbarukan dalam keseluruhan bauran energi nasional.

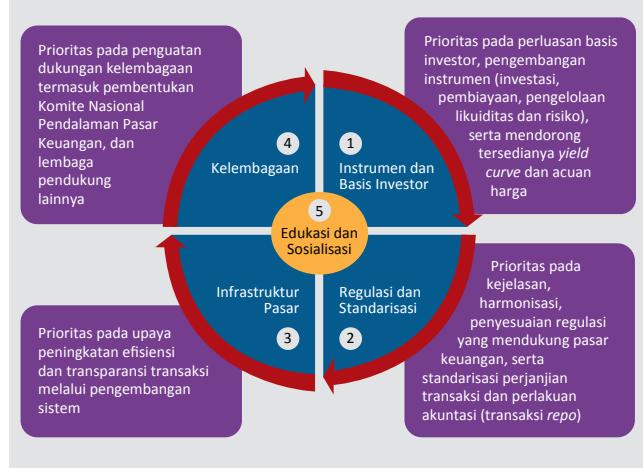
Peningkatan Daya Saing Industri dan Perdagangan

Untuk mengatasi tantangan peningkatan daya saing industri dan perdagangan, Pemerintah akan

mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengembangkan perwilayahannya industri, mendorong peningkatan populasi industri dan meningkatkan integrasi industri dalam rantai produksi global. Terkait hal-hal tersebut, Pemerintah berencana akan mengembangkan perwilayahannya Industri di luar Pulau Jawa. Strategi pengembangan perwilayahannya industri antara lain melalui fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) di berbagai wilayah di Indonesia (Gambar 14.1), 4 kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, pembangunan metropolitan di luar Jawa sebagai pusat investasi, pembangunan sentra-sentra industri kecil dan menengah, serta pengembangan infrastruktur pendukung tumbuhnya industri dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja.

Untuk mendorong peningkatan populasi Industri, Pemerintah akan mendorong investasi baik PMA maupun PMDN, terutama pada industri pengolah sumber daya alam, industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri, dan industri yang memanfaatkan peluang-peluang ekspor yang disediakan oleh jaringan produksi global. Guna mendorong populasi industri, Pemerintah dapat memberikan insentif untuk meningkatkan kerjasama global antara PMA dan PMDN yang berorientasi ekspor. Kerjasama global antara PMA dan PMDN ini menjadi penting mengingat melalui strategi ini, akses yang lebih kuat pada teknologi, sistem produksi, dan penyediaan jasa-jasa pendukung yang handal untuk mendorong transformasi di sektor industri dapat diperoleh. Selain daripada itu, kerjasama global dapat membuka akses yang lebih dalam ke pasar ekspor barang-barang bernilai tambah tinggi. Selain itu, upaya penguatan sektor industri juga akan diarahkan pada upaya peningkatan

Gambar 14.2. Lima Pilar Pendalaman Pasar Keuangan



produktivitas. Sejumlah kebijakan akan ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui strategi peningkatan efisiensi teknis, peningkatan penguasaan iptek/inovasi, peningkatan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru oleh industri domestik, dan peningkatan kualitas SDM Industri.

Penguatan Basis Pembiayaan Pembangunan

Untuk menjawab tantangan penguatan basis pembiayaan pembangunan dan dalam rangka penguatan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia dan Pemerintah bersinergi untuk menempuh sejumlah kebijakan agar pasar keuangan domestik dapat menjadi lebih dalam, likuid, dan efisien, sehingga memiliki peran lebih besar dalam menyalurkan dana dari sektor keuangan secara efektif dan efisien ke sektor ekonomi yang lebih produktif. Dari sisi Bank Indonesia akselerasi pendalaman pasar keuangan akan ditempuh terutama di pasar uang (*money market*) dan pasar valas (*forex market*). Pasar uang yang dalam dan likuid akan mendukung efektivitas kebijakan moneter dan memperkuat ketahanan sektor keuangan terhadap gejolak, serta memperkuat mekanisme penemuan harga (*price discovery*) instrumen keuangan jangka pendek, yang selanjutnya dapat memperkuat *price discovery* instrumen utang/kredit yang berjangka lebih panjang. Dengan mekanisme *price discovery* yang lebih kuat, maka pelaku swasta dapat lebih mudah menerbitkan dan memperjualbelikan instrumen-instrumen utang/pembiayaan baik untuk jangka pendek maupun panjang. Mekanisme *price discovery* yang lebih kuat tersebut akan meningkatkan efektivitas sinyaling kebijakan moneter dan transmisinya ke sektor riil melalui harga-harga instrumen kredit di sektor keuangan.

Selain itu, bersamaan dengan pengembangan pasar uang, pendalaman pasar keuangan juga memiliki fokus pada pengembangan pasar valas guna mendorong perkembangan instrumen pengelolaan risiko (*hedging*) bagi para pelaku pasar. Dengan semakin berkembangnya instrumen derivatif valas, diharapkan pelaku pasar akan mengubah kebiasaan yang sangat tergantung pada instrumen *valuta tod, tom* dan *spot* yang saat ini porsinya cukup dominan dan relatif berpengaruh pada volatilitas nilai tukar rupiah. Melalui pendalaman pasar valas, diharapkan pasar valas domestik memiliki daya tahan yang lebih baik untuk menyerap gejolak sehingga pada volatilitas nilai tukar rupiah dapat lebih terjaga.

Ke depan, untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik pasar keuangan maka akan digalakkan pemberian

struktural pasar keuangan melalui program-program pendalaman pasar uang dan valas yang dilandaskan pada lima pilar utama (Gambar 14.2). Pilar pertama adalah pemberian regulasi dan standardisasi untuk mendorong peran pelaku pasar tanpa mengurangi kehati-hatian. Bank Indonesia akan mengatur dan mengawasi pasar uang, sementara penyempurnaan regulasi transaksi lindung nilai di pasar valas akan dilanjutkan. Pilar kedua adalah penguatan kelembagaan. Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK akan memelopori pembentukan Komite Nasional Pendalaman Pasar Keuangan untuk mensinergikan visi-misi pengembangan pasar keuangan. Pilar ketiga adalah pengayaan instrumen dan perluasan basis investor. Bank Indonesia akan mendorong tersedianya keragaman instrumen di pasar uang sebagai sumber pendanaan dan sebagai instrumen pengelolaan likuiditas. Bank Indonesia juga akan berkoordinasi dengan OJK untuk mendorong peran dana pensiun dan asuransi, guna mengembangkan pasar obligasi korporasi. Pilar keempat adalah penguatan infrastruktur pasar. Bank Indonesia akan mengembangkan *platform* transaksi berbasis bursa untuk memperkuat transparansi di pasar uang, sehingga dapat mengefisiensikan transaksi di pasar uang, sekaligus sebagai media pengendalian risiko bagi pelaku pasar. Pilar kelima adalah edukasi dan sosialisasi. Hal ini akan dilakukan secara meluas, termasuk kepada penegak hukum, terutama terkait pentingnya transaksi lindung nilai.

Guna mendorong pembangunan infrastruktur, Pemerintah memperkuat mekanisme KPS antara lain melalui revitalisasi peran dan fungsi lembaga KPS. Di samping itu, juga perlu dilakukan upaya mengatasi berbagai masalah yang menghambat implementasi skema KPS di lapangan.

Penguatan Inklusi Ekonomi

Terkait inklusi ekonomi, terdapat sejumlah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mewujudkan bangun perekonomian domestik yang lebih inklusif. Untuk itu Pemerintah akan terus meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan, akses kepada air minum dan sanitasi yang layak, akses kepada penerangan, dan kepemilikan akte kelahiran, untuk membuka akses bagi masyarakat kurang mampu ke pelayanan dasar. Selain itu Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah peserta jaminan sosial untuk pekerja, baik formal maupun informal. Diharapkan dengan semakin terlindungnya pekerja informal dan teraksesnya pelayanan dasar seperti jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu maka produktivitas nasional dapat ditingkatkan.

Sementara itu, Bank Indonesia akan melengkapi dengan program keuangan inklusif, untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan. Dari sudut pandang Bank Indonesia, inklusivitas sistem keuangan akan secara langsung mendukung penguatan fondasi stabilitas sistem keuangan nasional, melalui diversifikasi risiko. Namun dari sudut pandang yang lebih luas, inklusi keuangan akan membuka akses bagi masyarakat miskin ke aktivitas ekonomi formal. Inklusi masyarakat *at the bottom of the pyramid* ke dunia formal melalui inklusi keuangan selanjutnya akan membuka ruang yang lebih luas bagi penerapan program-program intervensi sosial dan ekonomi yang lebih beragam dalam rangka meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat tersebut secara bertahap. Oleh karena itu, inklusi keuangan, di samping merupakan komponen penting dalam penguatan sistem keuangan, adalah juga sebuah perjalanan (*journey*) untuk memberdayakan masyarakat yang masih tertinggal. Dalam mendorong inklusi keuangan, Bank Indonesia akan terus memperkuat dan memperluas solusi layanan keuangan bagi masyarakat yang masih belum tersentuh oleh perbankan (*unbanked*). Penguanan tersebut dilakukan dengan mendorong bertumbuhkembangnya Layanan Keuangan Digital (LKD). Melalui LKD, masyarakat tidak lagi bergantung pada keberadaan kantor cabang bank untuk mendapatkan layanan pembayaran dan keuangan. Masyarakat cukup mendatangi agen LKD (perpanjangan tangan bank), yang berada di sekitar tempat tinggal mereka (*social banking*).

Kebijakan Bank Indonesia di bidang keuangan inklusif akan difokuskan pada empat hal. Pertama adalah pengembangan LKD secara berkelanjutan baik dari sisi penyelenggara, poin layanan maupun produk serta *value added* lainnya. Kedua adalah penyediaan akses keuangan secara berkualitas (*responsible finance*) melalui LKD. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan meningkatkan kualitas akses keuangan melalui edukasi keuangan secara berkelanjutan, khususnya peningkatan literasi keuangan masyarakat. Edukasi keuangan tersebut berfokus pada pengelolaan keuangan dan penggunaan LKD. Ketiga, Bank Indonesia akan meningkatkan perluasan dan nilai tambah LKD melalui penyediaan sistem informasi dan pembangunan ekosistem LKD yang kondusif. Untuk mengembangkan ekosistem LKD ini, Bank Indonesia akan mendorong sinergi antara LKD dan program keuangan inklusif lainnya, seperti *Financial Identity Number* (FIN), penyediaan sistem informasi bagi petani (*mobile agriculture*), dan remitansi bagi TKI. Data pengguna LKD juga akan dimanfaatkan menjadi salah satu basis data dari sistem informasi FIN bagi UMKM, yang selanjutnya dapat menjadi sumber data bagi pemeringkatan kredit UMKM dalam upaya

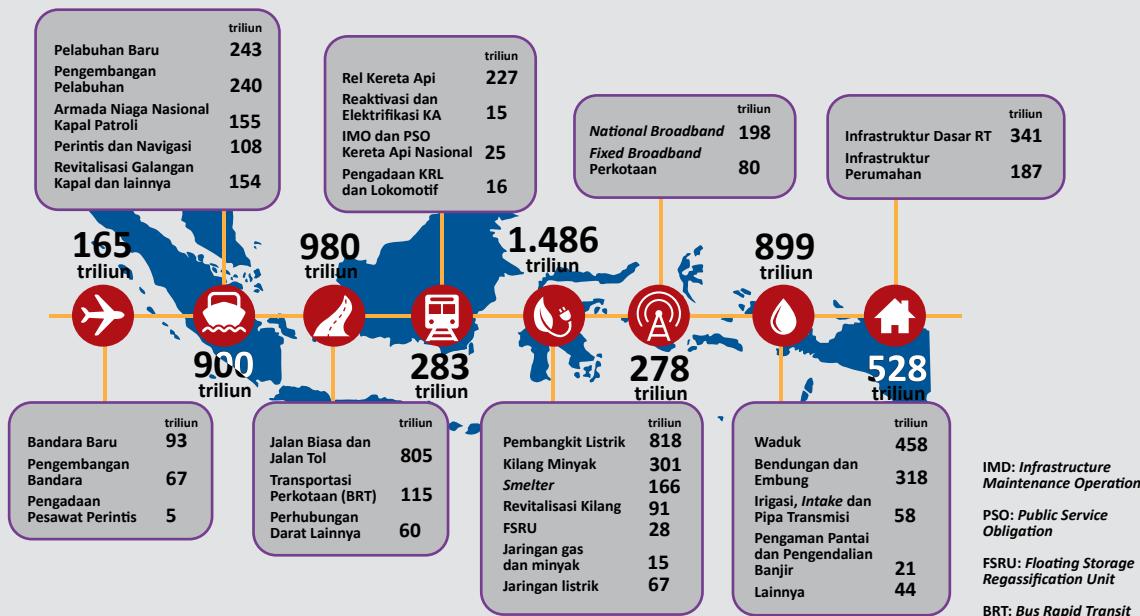
untuk meningkatkan akses kredit UMKM. Keempat, Bank Indonesia akan meningkatkan pendalaman layanan dan jasa keuangan melalui LKD dengan mengupayakan sinergi bank dan nonbank, seperti perusahaan telekomunikasi, pos, pegadaian, dan lembaga keuangan mikro. Dengan menyinergikan keunggulan dari masing-masing pihak, diharapkan dapat semakin mempercepat upaya perluasan akses. Di samping itu, upaya pendalaman layanan ini juga ditempuh melalui inklusi keuangan berbasis inovasi syariah. Pengembangan dan perluasan LKD ditargetkan dapat meningkatkan jumlah anggota masyarakat yang terhubung dengan bank hingga dua kali lipat, dari kondisi saat ini yang berdasarkan hasil survei Bank Dunia hanya menjangkau 20% penduduk dewasa. Melalui perluasan agen LKD dan sinergi dengan program bantuan Pemerintah, rekening uang elektronik teregistrasi ditargetkan akan naik hingga empat kali lipat dari posisi jumlah pada tahun 2014.

Penguatan Modal Dasar Pembangunan

Untuk mendukung perbaikan pada empat pilar reformasi struktural di atas, maka ketersediaan dan kualitas infrastruktur (termasuk pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia), kapasitas inovasi dan kualitas modal manusia, serta iklim usaha dan layanan birokrasi akan terus diperkuat. Dalam 5 tahun ke depan, Pemerintah telah menargetkan peningkatan rasio elektrifikasi hingga 96,6% dan peningkatan daya listrik sehingga kebutuhan untuk rumah tangga dan industri dapat terpenuhi. Dalam rangka memperkuat konektivitas fisik, Pemerintah merencanakan pengembangan jalan nasional sepanjang 45.592 km, penambahan jalan tol 1.000km, penambahan jalur kereta api 8.692 km, pengembangan 172 pelabuhan serta pembangunan 24 pelabuhan baru. Rencana investasi pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilihat di Diagram 14.2. Lebih dari Rp2.300 Triliun akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur berbagai moda transportasi terutama pada pembangunan konektivitas di darat dan laut. Selain konektivitas fisik, Pemerintah juga merencanakan untuk meningkatkan konektivitas digital melalui pengembangan jaringan pita lebar yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Melalui pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut diharapkan akan terbentuk konektivitas nasional sehingga terjadi penurunan waktu tempuh dan biaya logistik di dalam dan dari/ke Indonesia. Terkait ini, salah satu aspirasi adalah rencana untuk memperbaiki arus konektivitas antar wilayah di Indonesia melalui Program Poros Maritim. Langkah-langkah yang direncanakan terkait hal ini adalah pengembangan *International Hub Port* (IHP), implementasi Tol Laut, pengembangan dan pembinaan Pelayaran

Diagram 14.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2015-2019

Rencana Investasi Infrastruktur pada 2015-2019: Rp5.519 Triliun



Sumber: Bappenas, diolah

Perintis dan Pelayaran Rakyat (Pelra) dan pengembangan *Short Sea Shipping* (SSS). Pewujudan tol laut akan dilakukan melalui penentuan rute optimal tol laut, strategi revitalisasi armada angkutan laut dan peningkatan sarana-prasarana pelabuhan, skema bisnis tol laut, dan Strategi pendanaan dan implementasi tol laut, termasuk kebutuhan pengembangan kelembagaan dan regulasi.

Untuk memperkuat modal manusia ke depan, Pemerintah telah menargetkan rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia lebih dari 15 tahun menjadi 8,8 tahun, melalui program wajib belajar 12 tahun. Untuk melengkapi sasaran ini, Pemerintah akan meningkatkan jumlah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA berakreditasi minimal B dan meningkatkan kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan tersier, Pemerintah akan meningkatkan jumlah program studi perguruan tinggi minimal berakreditasi B. Guna meningkatkan kualitas modal manusia, Pemerintah dapat meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah dan tinggi (*skill-upgrading*), terutama di bidang-bidang pendidikan yang terkait dengan sains, teknologi, enjiniring, matematika dan kesehatan (science, technology, engineering, mathematics and health (STEM-H)) dan penguasaan bahasa-bahasa asing utama. Perusahaan-perusahaan dalam sektor-sektor industri dengan

produk bernilai tambah tinggi akan memerlukan banyak tenaga-tenaga terampil berpendidikan (berkeahlian) di bidang-bidang ini untuk mendukung kegiatan. Sementara itu, Pemerintah akan meningkatkan kapasitas inovasi dan penyerapan teknologi. Upaya ini dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan litbang (riset), layanan perekayasaan dan teknologi, layanan infrastruktur mutu, layanan pengawasan tenaga nuklir, dan penguatan kerjasama swasta-pemerintah-perguruan tinggi khususnya untuk sektor pertanian dan industri. Pemerintah juga akan membangun *techno & science parks*, dan mendorong peningkatan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek dalam rangka mendukung daya saing sektor industri.

Selanjutnya, kebijakan juga akan ditempuh Pemerintah dalam rangka memperkuat aspek kelembagaan yang mendukung efisiensi dunia usaha, terutama melalui perbaikan iklim usaha dan reformasi birokrasi. Kebijakan tersebut antara lain mencakup peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, serta melalui penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah terutama untuk sektor pengolahan dan jasa. Pemerintah juga akan mendorong pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan

pengusaha. Selain itu, Pemerintah akan menyediakan insentif dan fasilitasi investasi, baik insentif fiskal maupun nonfiskal yang lebih selektif dan proses yang transparan. Melalui serangkaian upaya kebijakan yang akan ditempuh tersebut, diharapkan tercapai sasaran di jangka menengah, yaitu turunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah, menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada *Ease of Doing Business* (EoDB), meningkatnya pertumbuhan investasi, dan meningkatnya investasi PMA dan PMDN.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya perbaikan efisiensi perekonomian melalui perbaikan iklim usaha dan layanan publik, Bank Indonesia akan terus mendukung dengan inisiatif-inisiatif terkait sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran akan terus membangun sistem pembayaran nasional agar semakin efisien, andal dan aman, dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. Efisiensi yang diciptakan melalui inisiatif-inisiatif Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran tersebut akan secara langsung memperkuat efisiensi perekonomian nasional, karena dibalik setiap pertukaran barang dan jasa yang terjadi di sektor riil senantiasa terdapat sisi moneter dimana sistem pembayaran yang efisien, aman dan andal adalah penopangnya. Terkait ini Bank Indonesia akan terus mendorong modernisasi sistem pembayaran nasional melalui perluasan sistem pembayaran nontunai dan elektronifikasi. Perubahan metode transaksi pembayaran dari sebagian besar tunai menjadi nontunai memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara elektronis dan lebih efisien dari sisi waktu, media, dan biaya transaksi. Perluasan elektronifikasi juga akan sejalan dengan berkembangnya iklim transparansi, *governance* dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan mampu

meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung inisiatif untuk melakukan perbaikan iklim usaha menjadi lebih ramah. Sebagai upaya perbaikan tata kelola keuangan pemerintah, penerapan *e-government* secara luas mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah perlu didukung oleh program elektronifikasi sebagai media pembayarannya. Untuk itu target perluasan transaksi nontunai dalam jangka menengah (lima tahun kedepan) telah dituangkan dalam *Road Map* Elektronifikasi.

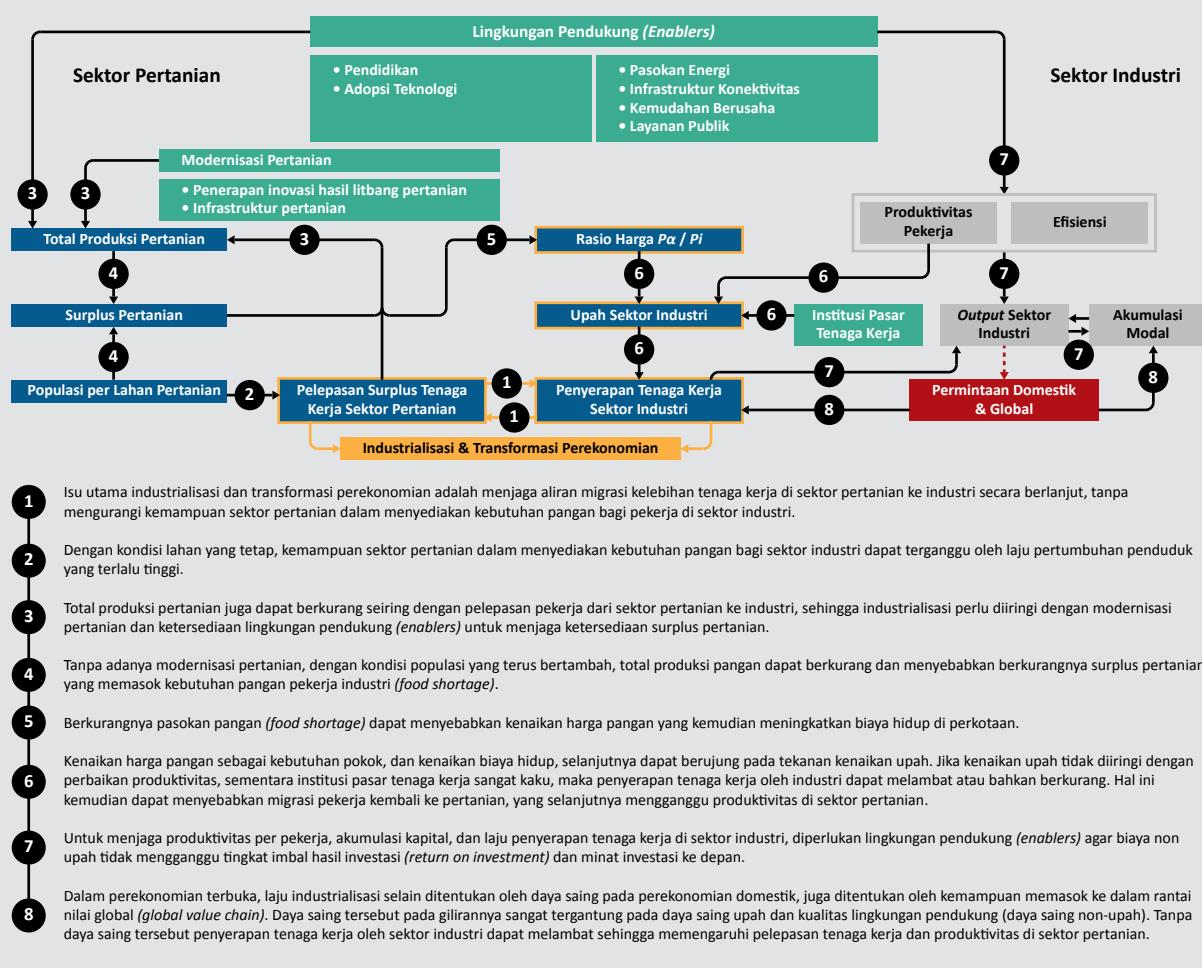
Penyempurnaan kelembagaan juga menuntut diberlakukannya reformasi birokrasi. Dalam kaitan dengan reformasi birokrasi, telah dicanangkan beberapa hal mendasar untuk penyempurnaan birokrasi mencakup kegiatan peningkatan kualitas layanan publik, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penataan peraturan perundang-undangan, penataan tata kelola pemerintahan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan pengawasan intern. Pembentukan manajemen perubahan dicanangkan di berbagai instansi pemerintah untuk mengakomodasi pemberhanan yang diperlukan. Perubahan organisasi pun akan dilakukan yang didukung oleh penerapan budaya kerja yang sesuai di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan. Demikian pula dengan transparansi kebijakan demi akuntabilitas publik, peningkatan akses publik secara luas terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh institusi dan lembaga pemerintahan baik melalui media digital maupun melalui sarana komunikasi lainnya akan lebih ditingkatkan. Dalam kaitannya dengan penguatan kelembagaan untuk layanan publik, Bank Indonesia juga telah melakukan pemberhanan ke dalam melalui program Transformasi Bank Indonesia yang dilakukan untuk memperkuat kinerja Bank Indonesia dalam melaksanakan mandatnya ditengah perubahan-perubahan di era global (Lihat Boks Transformasi Bank Indonesia).

Dalam perekonomian dualistik, keberhasilan industrialisasi tergantung pada dua aspek yang berjalan secara simultan, yaitu kecepatan penyerapan (*absorption*) tenaga kerja oleh sektor industri, dan pelepasan (*release*) kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian.¹ Secara umum, mekanisme penyerapan maupun pelepasan kelebihan tenaga kerja pertanian membutuhkan lingkungan pendukung (*enablers*) bagi peningkatan produktivitas (per unit lahan) di sektor pertanian dan peningkatan produktivitas per pekerja serta efisiensi di sektor industri (Diagram 1). Peningkatan produktivitas di kedua sektor dapat dicapai melalui pemanfaatan modal manusia berkeahlian dan adopsi teknologi, ketersediaan

pasokan energi, infrastruktur logistik yang mendukung, kemudahan berusaha, dan birokrasi yang melayani. Secara khusus, sektor pertanian juga membutuhkan modernisasi yang didukung oleh penerapan inovasi pertanian hasil penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan ketersediaan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan waduk.

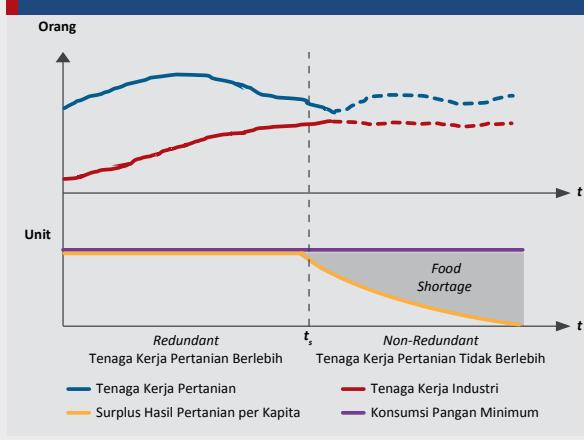
Dalam proses transformasi perekonomian dualistik ke perekonomian modern, interaksi antara modernisasi di sektor pertanian dan industri harus berjalan secara simultan. Kegagalan pada salah satu sektor dapat berakibat pada terhambatnya keseluruhan proses industrialisasi atau transformasi ekonomi (Diagram 1).

Diagram 1. Tranformasi Struktural dan Interaksi Sektor Pertanian dan Industri



1 Lihat Fei, J. dan Ranis, G (1997). Ulasan di boks ini banyak meminjam dari Fei-Ranis (1997) dengan beberapa penyesuaian.

Grafik 1. Deindustrialisasi dan Kelangkaan Pangan



Sumber: Diadaptasi dari Fei dan Binsis (1997)

Sebagai ilustrasi tentang proses transformasi yang terhambat adalah ketika laju industrialisasi yang kuat tidak diikuti oleh modernisasi pertanian. Laju industrialisasi mensyaratkan realokasi tenaga kerja antar sektor, dimana kondisi tenaga kerja pertanian yang awalnya sangat berlebihan (*redundant*) secara perlahan mulai berkurang. Jika produktivitas lahan pertanian tidak meningkat atau berjalan lambat, maka kondisi ini akan mulai berdampak pada berkurangnya total produksi pangan. Menurunnya total produksi pangan selanjutnya akan berdampak pada terjadinya kekurangan pangan (*food shortage*) untuk memenuhi kebutuhan pekerja di sektor industri, yang disebabkan oleh berkurangnya total surplus pangan, yaitu total produksi yang sudah dikurangi dengan kebutuhan pangan bagi keluarga pekerja pertanian. Apabila total surplus pertanian terus berkurang, maka *food shortage* akan semakin membesar.

Kurangnya pasokan pangan (*food shortage*) dalam negeri dapat menyebabkan kenaikan harga pangan (meningkatnya rasio harga pangan terhadap harga output industri) yang kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Tingginya harga bahan makanan sebagai kebutuhan pokok akan meningkatkan biaya hidup di kota, yang kemudian dapat berujung pada tekanan kenaikan upah oleh pekerja industri. Sementara itu, kenaikan upah yang tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas pekerja akan sangat memberatkan industri. Jika peristiwa ini berlanjut maka diujungnya akan terjadi deindustrialisasi prematur, dimana penyerapan tenaga kerja industri berjalan lambat atau bahkan berkurang

dan pekerja kembali ke sektor pertanian tanpa perbaikan produktivitas, atau masuk ke sektor jasa-jasa dengan produktivitas rendah (Grafik 1).

Di sisi lain, rasionalitas dari peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi inovasi-teknologi (modernisasi sektor pertanian) akan sangat bergantung pada kecepatan sektor industri untuk menyerap kelebihan pekerja di sektor pertanian. Kecepatan tersebut pada gilirannya sangat bergantung pada ketersediaan lingkungan pendukung untuk peningkatan produktivitas pekerja dan efisiensi di sektor industri. Ini dalam banyak halnya sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan struktural Pemerintah dan kecepatan implementasinya.

Keseimbangan antara pelepasan dan penyerapan tenaga kerja antar sektor secara berkesinambungan akan berdampak pada tercapainya kondisi yang dikenal dengan *Lewis Turning Point*, dimana upah sektor industri dan upah di sektor pertanian tidak lagi memiliki perbedaan. Kondisi ini terjadi ketika *labor surplus* di pertanian sudah terserap sepenuhnya di sektor industri dan produktivitas pertanian meningkat pesat karena adopsi inovasi dan komersialisasi di sektor pertanian menjadi semakin rasional.

Dalam perekonomian terbuka, kekurangan pangan, yang dapat terjadi karena menurunnya produktivitas pertanian, dapat ditutupi sementara dengan kebijakan impor. Namun, kebijakan impor tersebut bukan sebuah substitusi bagi perbaikan produktivitas pertanian karena kenaikan harga yang sangat tinggi dapat terjadi apabila impor berhenti seketika.

Kenaikan harga yang tiba-tiba tersebut dapat mendorong kenaikan tekanan upah secara signifikan di sektor industri, jauh lebih cepat dari kemampuan sektor tersebut untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Hal ini dengan cepat dapat menyebabkan melambatnya proses transformasi yang kemudian memicu deindustrialisasi prematur sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Oleh karena itu, keberianian tidak menjadikan impor pangan sebagai jawaban atas menurunnya produktivitas pangan, dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih mendasar untuk mendorong pemanfaatan inovasi dan teknologi di sektor pertanian (*balanced agricultural technology change*), akan mengembalikan proses transformasi perekonomian ke lintasan normalnya.

Aktivitas Indonesia dalam Rantai Nilai Global

Daya saing dalam perekonomian global pada abad 21 tidak hanya ditentukan dari seberapa besar barang dan jasa dapat diproduksi dan diekspor, tapi juga bagaimana interkoneksi aktivitas produksi dalam rantai nilai global (*Global Value Chains*) dan peran yang dapat disumbangkan dalam perdagangan nilai tambah (*trade in value added* (TiVA)). Bagi negara berkembang yang pada umumnya mengalami keterbatasan teknologi pada awal proses migrasinya ke negara maju, maka peran penting dalam GVC dan TiVA ditentukan oleh seberapa kemampuan memberikan nilai tambah setelah mengimpor bahan baku/ barang antara, untuk kemudian diekspor kembali ke berbagai negara.

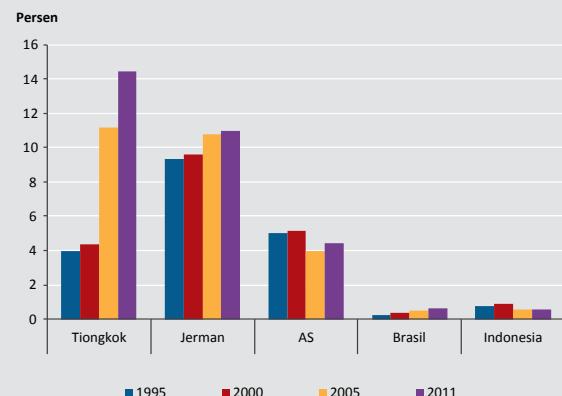
Analisis perkembangan aktivitas perdagangan dalam rantai nilai global dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemecahan (fragmentasi) perdagangan bilateral menjadi skema perdagangan segitiga (*triangular trading scheme*). Fragmentasi tersebut memberikan informasi terkait pola perdagangan dalam beberapa bentuk aktivitas perdagangan. Pemecahan kedalam skema perdagangan segitiga dapat dilakukan misalnya dengan me-rekonstruksi tabel input-output dunia.¹

Hasil analisis *triangular trading scheme* menunjukkan bahwa aktivitas TiVA dalam jaringan produksi global semakin meningkat.² Peningkatan tersebut menandakan adanya peningkatan pada aktifitas *global production sharing* pada beberapa industri di dunia. Tiongkok, Jerman, dan AS, merupakan 3 negara terbesar yang terlibat dalam TiVA sebagai *global production hub* di kawasannya masing-masing. Di antara 3 negara tersebut, Tiongkok dan Jerman

¹ Pemecahan aktivitas perdagangan dalam *Triangular Trading Scheme* diajukan misalnya oleh Lejour et al (2013) dan Johnson – Noguera (2011).

² Analisis dilakukan dengan basis *World Input-Output Table* (WIOT) periode 1995-2011 yang meliputi 40 negara, termasuk Indonesia. Data perdagangan dalam standar bilateral IO didekomposisi menjadi trilateral dengan merujuk pada metodologi yang diajukan oleh Lejour et al (2012). Melalui dekomposisi tersebut dapat diperoleh informasi antara lain: (1) Aktivitas ekspor bahan mentah ke dunia, (2) Ekspor bahan jadi dengan *input sourcing* dari domestik, (3) Ekspor bahan jadi dengan *input sourcing* dari luar negeri (*production hub*), (4) Impor bahan baku untuk konsumsi domestik, (5) Impor bahan jadi dari dunia, dan (6) Aktivitas produksi berdikari (bersumber, diproses, dan dikonsumsi domestik)

Grafik 1. Pangsa Negara dalam GVC sebagai *Hub*



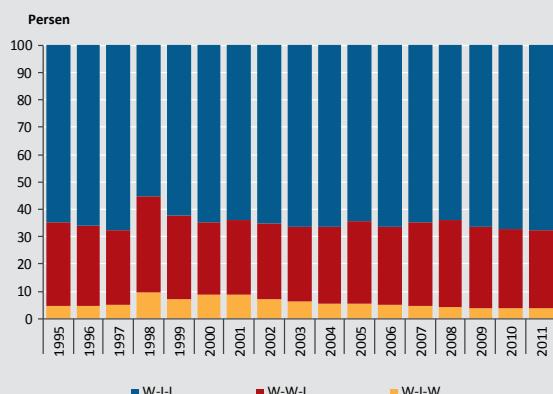
tercatat sebagai negara dengan tingkat daya saing sebagai basis produksi untuk global (*hub*) yang terkuat di dunia (Grafik 1).

Sementara itu, peran Indonesia sebagai *production hub* untuk ekspor dalam jaringan produksi global cenderung menurun. Aktivitas *re-export* setelah melakukan impor bahan baku dan barang antara dari dunia tergantikan oleh peningkatan impor untuk tujuan produksi dan konsumsi akhir pasar domestik, sebagaimana diilustrasikan pada Grafik 2. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan berupa melemahnya daya tarik investasi sebagai basis produksi untuk ekspor dalam rantai nilai global, dan menguatnya daya tarik sebagai pasar bagi investasi yang bersifat *domestic market seeking*.³ Masalah tingginya biaya logistik dan rendahnya daya saing lingkungan pendukung bagi investasi berorientasi ekspor ke pasar dunia, merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan struktural pada peran Indonesia sebagai *hub*.

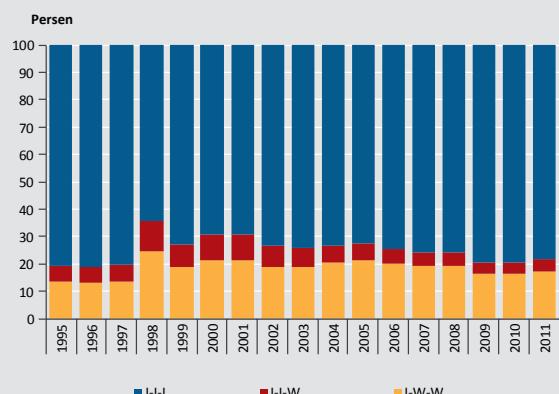
Lebih jauh lagi, perubahan struktural terkait menurunnya aktivitas Indonesia sebagai basis produksi

³ Share aktivitas impor didekomposisi menjadi: (1) W-I-I: impor bahan baku dunia untuk diproses dan dikonsumsi domestik (2) W-W-I: impor barang jadi yang bahan baku dan proses pengolahannya di dunia, dan (3) W-I-W: impor untuk tujuan *re-export* (*production hub*)

Grafik 2. Pangsa Aktivitas Impor Indonesia



Grafik 3. Pangsa Aktivitas Ekspor Indonesia



untuk ekspor dalam jaringan produksi global telah pula memengaruhi kapabilitas ekspor dari sumber dan produksi dalam negeri. Hal ini ditandai dengan menurunnya ekspor yang bahan baku dan proses pengolahannya berasal dari Indonesia (Grafik 3).⁴ Kurangnya peran Indonesia dalam jaringan produksi global barang ekspor telah menandakan semakin mendesaknya untuk meningkatkan efisiensi perekonomian dan mendorong daya saing global sektor industri melalui perbaikan kualitas, nilai tambah dan keragaman produk, perbaikan pada kualitas penyerapan tenaga kerja, serta akses yang lebih besar ke pasar ekspor dunia. Terkait hal-hal ini pengalaman negara-negara yang mampu memposisikan diri sebagai *hub* untuk ekspor menunjukkan pentingnya untuk mendorong kerjasama global antara PMA dan PMDN. Peningkatan kerjasama tersebut pada gilirannya sangat bergantung pada ketersediaan lingkungan pendukung (*enablers*) yang kondusif.

4 Share aktivitas ekspor didekomposisi menjadi: (1)I-I-I: aktivitas dengan bahan baku, proses, dan konsumsi akhir domestik, (2)I-I-W: ekspor barang jadi yang bahan baku dan proses pengolahannya dari Indonesia, dan (3) I-W-W: ekspor bahan mentah ke dunia

Tantangan Strategis: Global and Regional Megatrends

Tantangan strategis perkembangan lingkungan perekonomian regional dan global menuntut respon kebijakan yang tepat dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Dari sisi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, pelaku ekonomi global menyaksikan kebangkitan ekonomi Asia terus berlangsung, sementara integrasi perdagangan, arus modal dan arus sumberdaya manusia di wilayah ASEAN juga secara bertahap terus berlanjut. Di sistem keuangan, terdapat potensi “balkanisasi” sistem keuangan, peningkatan *shadow banking* dan berlanjutnya pendalaman pasar keuangan di wilayah.

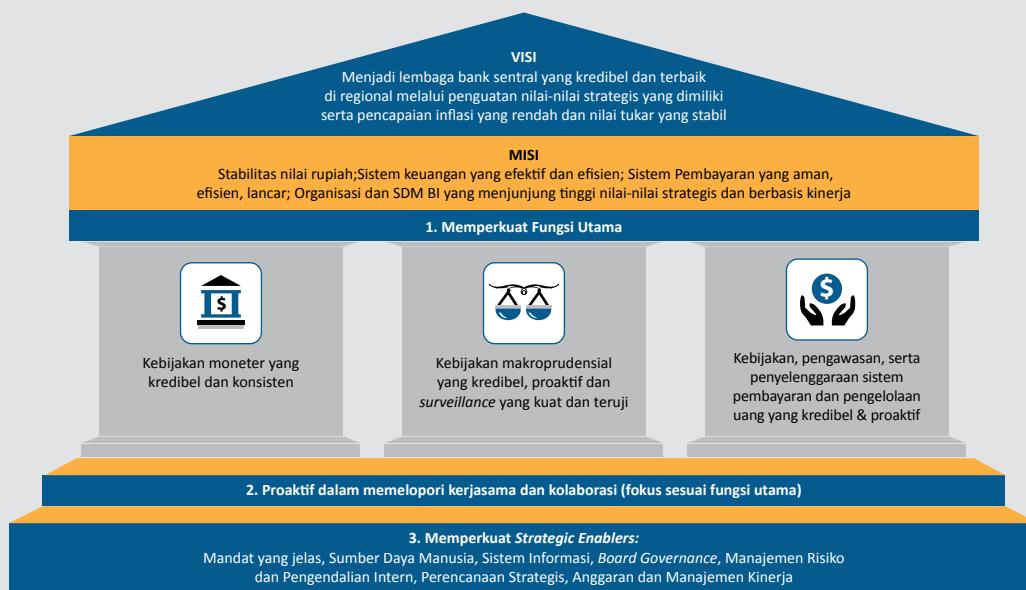
Sementara itu, di bidang *regulatory frameworks*, otoritas moneter global juga terus menyaksikan bagaimana *unconventional monetary policy* menjadi fitur permanen dalam kebijakan moneter. Stabilitas sistem keuangan kemudian menjadi fokus penguatan, walaupun fokus utamanya tetap pada stabilitas harga. Inovasi penggunaan instrumen makroprudensial kemudian semakin berkembang. Selanjutnya, inovasi teknologi seperti peningkatan dan penggunaan *Big Data* dewasa ini merupakan tantangan perkembangan

yang harus dengan cermat ditindaklanjuti oleh otoritas monter, bersama dengan perluasan digitalisasi perekonomian termasuk dalam bidang sistem pembayaran.

Pencanangan Program Transformasi Menuju Bank Indonesia 2024

Pada tanggal 24 April 2014, Bank Indonesia kemudian melakukan pencanangan program transformasi dengan menyusun Arsitektur Fungsi Strategis BI (AFSBI) 2024 (Gambar 1). Selain disusun untuk meningkatkan kekuatan dan kecekatan Bank Indonesia dalam menghadapi implikasi dinamika perubahan dan tantangan jangka menengah panjang terutama di bidang moneter, keuangan dan perekonomian baik global, regional dan nasional; arsitektur ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan fungsi strategis dan kapabilitas BI baru yang maju, kuat, berorientasi ke depan menghasilkan kebijakan terbaik dan merujuk pada praktek-praktek yang terbaik; serta dapat mewujudkan visi baru BI menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional. Penyusunan arsitektur didahului dengan diagnosa, menyusun rancangan arsitektur dan strategi dalam jangka menengah panjang 2014-2024, pentahapan penerapannya

Gambar 1. Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia 2024



beserta *quick wins* dan inisiatif-inisiatif penting untuk pencapaian visi Bank Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan arsitektur tersebut, pada 24 Oktober 2014 Bank Indonesia secara resmi memulai Implementasi Program Transformasi Menuju Bank Indonesia 2024. Program Transformasi ini akan mempercepat langkah Bank Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan inflasi serta mendukung tercapainya Stabilitas Sistem Keuangan. Program Transformasi ini juga akan meningkatkan inovasi Bank Indonesia di area Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang. Bank Indonesia mendedikasikan seluruh upaya transformasi ini untuk menjadi bank sentral yang semakin kredibel dan terbaik di regional serta memberi manfaat lebih bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Program Transformasi Bank Indonesia akan diimplementasikan melalui 5 Tema Transformasi, yang terdiri dari:

(i) Policy Excellence. Kebijakan BI harus berkualitas prima agar dapat berkesinambungan dan efektif dalam menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan nasional. Program yang akan dilakukan antara lain penguatan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, pengembangan *National and Regional Financial Balance Sheet*, serta peningkatan koordinasi dengan *stakeholders* dan transparansi komunikasi. **(ii) Outstanding Execution.** Dalam melaksanakan kebijakan BI akan memberikan yang terbaik dan efektif. Bank Indonesia akan memperkuat kantor perwakilan BI di daerah, membangun *Center of Excellence* di area pengawasan sistem keuangan dan sistem pembayaran, serta manajemen risiko dan manajemen kelangsungan tugas BI.

(iii) Institutional Leadership. Menyadari eratnya keterkaitan pelaksanaan peran BI di beberapa aspek dengan instansi lainnya, maka BI terus mendorong kerjasama dan koordinasi antar lembaga. Beberapa program yang akan dilakukan bersama instansi terkait adalah penguatan manajemen krisis, pendalaman pasar keuangan, pengembangan *National Payment Gateway*, mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (elektronifikasi instrument pembayaran), pengembangan keuangan inklusif dan UMKM serta keuangan syariah. **(iv) Motivated Organization.** SDM BI harus mampu untuk tidak sekedar kompeten namun bermotivasi kuat dalam menjalankan tugasnya sesuai nilai-nilai strategis BI. Untuk itu akan dilakukan

serangkaian program kapabilitas dan motivasi pegawai misalnya membangun BI Academy, transformasi strategi perencanaan SDM dan rekrutmen serta manajemen kinerja BI, *leadership engine*, dan restrukturisasi organisasi agar lebih efisien dan efektif. **(v) State-of-the-Art Technology.** BI akan meningkatkan pemanfaatan teknologi dan pendekatan mutakhir secara inovatif untuk mendukung menjadi yang terbaik. Beberapa program yang akan dilakukan adalah memanfaatkan *Big Data* untuk mendukung pengambilan keputusan, mentransformasi sistem informasi BI termasuk pengembangan proyek-proyek strategis.

Pelaksanaan Program Transformasi dituangkan dalam 25 Program Strategis yang pelaksanaannya selaras dengan nilai-nilai strategis BI yang mencakup *Trust & Integrity, Professionalism, Excellence, Public Interest*, serta *Coordination & Teamwork*. Program ini menuntut sumber daya dan pemikiran terbaik dari seluruh jajaran Bank Indonesia. Pelaksanaannya didukung komitmen Dewan Gubernur beserta seluruh pimpinan dan pegawai Bank Indonesia¹.

Diharapkan, pelaksanaan program transformasi ini dapat membawa Bank Indonesia mencapai visinya menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Langkah pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam fase 5 tahunan untuk kondisi lingkungan yang diharapkan.

¹ Untuk melaksanakan program transformasi yang terukur dan terkelola dengan baik, BI membentuk Pusat Program Transformasi BI (PPTBI) guna mengawal implementasi Program Transformasi. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia, tahapan perkembangan program ini dipublikasikan dalam laporan-laporan akuntabilitas dan informasi lainnya.

Halaman ini
sengaja dikosongkan



Keterangan gambar:

Masa depan selalu diwarnai dengan ketidakpastian. Namun, masa mendatang juga penuh dengan harapan kesuksesan bagi mereka yang optimis dan terus berusaha melakukan karya terbaik. Demikian pula dengan ekonomi Indonesia ke depan, stabilitas makroekonomi diprakirakan akan semakin kokoh dan fundamental ekonomi akan semakin kuat, didorong oleh bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah yang konsisten, termasuk percepatan reformasi struktural.



BAB 15

PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan semakin baik dengan fundamental yang lebih kuat. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan lebih tinggi sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan dana hasil penghematan subsidi untuk proyek infrastruktur. Permintaan eksternal diprakirakan meningkat sejalan dengan proses pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut, diikuti dengan permintaan domestik yang lebih kuat seiring dengan upaya pemerintah dalam mempercepat reformasi struktural. Sejalan dengan perkembangan tersebut, defisit transaksi berjalan diprakirakan juga akan membaik sementara inflasi akan kembali ke kisaran sasarnya.

Pencapaian kinerja ekonomi sepanjang tahun 2014 menjadi modal dasar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2015-2016 di tengah perkembangan perekonomian global yang beragam. Prospek ekonomi dunia dalam dua tahun ke depan diprakirakan masih terus mengalami pemulihan meski tidak merata. Prakiraan tersebut diwarnai dengan perekonomian negara maju yang semakin membaik, terutama ditopang oleh AS, di tengah perekonomian negara berkembang yang masih cenderung mengalami perlambatan, terutama di Tiongkok.

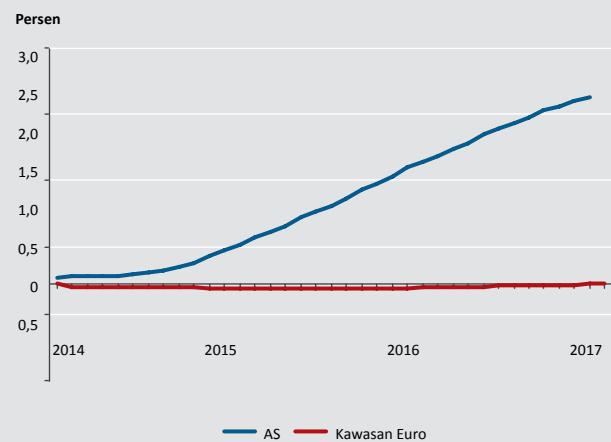
Ke depan, di tengah prakiraan ekonomi dunia tersebut, prospek perekonomian Indonesia bergantung pada tingkat implementasi kebijakan reformasi struktural, baik yang ditempuh oleh Bank Indonesia maupun Pemerintah. Bank Indonesia memperkirakan prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2015 membaik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,4-5,8% dengan laju inflasi yang terkendali menuju sasaran yang ditetapkan $4\pm 1\%$, diikuti dengan kinerja transaksi berjalan yang lebih sehat serta pertumbuhan kredit sebesar 15-17%.

Dalam jangka menengah, prospek perekonomian Indonesia berada dalam lintasan yang terus meningkat, didukung oleh reformasi struktural yang ditempuh pemerintah dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Reformasi struktural akan diwujudkan melalui penguatan lapangan usaha strategis untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif namun tetap memelihara kestabilan ekonomi. Melalui kebijakan reformasi struktural, perekonomian Indonesia dapat tumbuh mencapai 6,5% pada tahun 2019, diikuti dengan inflasi yang terjaga pada kisaran $3,5\pm 1\%$ dan defisit transaksi berjalan yang semakin sehat pada kisaran 2,5-3% dari PDB. Bahkan, apabila reformasi struktural berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan mampu tumbuh secara berkelanjutan hingga di atas 7%. Bank Indonesia akan tetap berupaya mendukung pencapaian perekonomian ke depan tersebut dengan memelihara stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan yang menjadi bagian dari percepatan reformasi struktural.

15.1. Prospek Perekonomian Global

Pemulihan perekonomian global masih akan terus berlangsung, terutama ditopang oleh perekonomian AS

Grafik 15.1. Prakiraan Respons Kebijakan Global



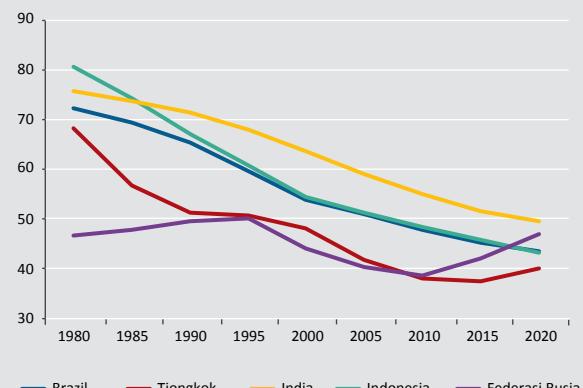
Sumber: IMF, WEO Oktober 2014

yang semakin solid. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 diprakirakan mencapai 3,6% dan terus membaik hingga mencapai 3,8% pada tahun 2016, terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi AS yang lebih konsisten. Pemulihan ekonomi AS didukung oleh konsumsi yang meningkat seiring dengan turunnya harga minyak dan membaiknya kondisi ketenagakerjaan. Konsumsi AS yang membaik tersebut diikuti oleh indikator produksi yang semakin meningkat. Perekonomian AS yang solid semakin menguatkan arah normalisasi kebijakan moneternya, meskipun waktu implementasinya masih diliputi ketidakpastian. Tingkat suku bunga FFR diprediksi akan mulai meningkat pada pertengahan 2015 (Grafik 15.1). Kebijakan ini akan terus mendorong penguatan dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang dunia serta meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Sementara itu, langkah *Quantitative Easing* dari Bank Sentral Eropa diprakirakan akan semakin memperlemah mata uang Euro di samping dapat mengimbangi sebagian dari pengaruh kebijakan the Fed terhadap pergerakan arus modal global ke *emerging markets*. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok diprediksi terus melambat seiring penurunan investasi. Sejalan dengan pola pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksi masih belum merata, volume perdagangan dunia diprediksi hanya tumbuh moderat masing-masing sebesar 4,5% dan 4,9% pada tahun 2015 dan 2016.

Sejalan dengan itu, harga komoditas global, termasuk harga minyak, diprediksi masih akan berada pada level yang rendah. Harga komoditas yang diprediksi masih terus menurun semakin memperkuat indikasi telah berakhirnya era *boom* kenaikan harga komoditas global. Hal ini tidak terlepas dari masih lemahnya pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang terutama Tiongkok

yang selama ini menjadi salah satu sumber permintaan komoditas global. Harga komoditas global diperkirakan masih akan mengalami penurunan sebesar 2,0% pada tahun 2016, lebih moderat dibandingkan tahun 2015 yang diperkirakan mengalami penurunan sebesar 5,6%. Sejalan dengan itu, penurunan harga minyak dunia berpotensi terus berlanjut, akibat pemulihan ekonomi dunia yang masih terbatas, terutama jika ekses pasokan minyak dunia tetap terjadi. Perkembangan tersebut menimbulkan risiko pada negara-negara yang merupakan pengekspor minyak mentah dan BBM. Walaupun demikian, dengan perkiraan ini, risiko inflasi dunia secara keseluruhan diperkirakan masih terkendali. Laju Inflasi IHK di negara berkembang diperkirakan masih dalam tren menurun sejalan dengan dinamika harga global tersebut.

Grafik 15.2. *Dependency Ratio Beberapa Negara*



Sumber: UN-DESA, diolah

15.2. Prospek Perekonomian Domestik

Prospek PDB Permintaan

Seiring dengan perkiraan pemulihan kondisi ekonomi global yang terus berlanjut, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan akan membaik dengan laju pertumbuhan berada pada kisaran 5,4-5,8%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan lebih banyak didorong oleh perbaikan permintaan domestik, sementara pertumbuhan permintaan eksternal diperkirakan relatif moderat (Tabel 15.1).

Pada tahun 2015 konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh moderat pada kisaran 5,0-5,4%.¹ Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh besarnya penduduk usia produktif sehingga meningkatkan jumlah angkatan kerja (Grafik 15.2). Rencana Pemerintah dalam mempercepat reformasi struktural melalui pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja

sehingga meningkatkan sumber pendapatan. Hal tersebut diperkirakan akan mendukung tren penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan jumlah kelas menengah sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Inflasi yang diperkirakan berada dalam rentang target 4±1% juga mendukung terjadinya daya beli masyarakat. Kenaikan upah buruh dan gaji pegawai negeri sipil, TNI/Polri serta pensiunan turut menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya sumber pendapatan yang membuat masih cukup resiliennya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Investasi pada tahun 2015 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,5-6,9%, lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2014. Prakiraan tersebut didukung oleh upaya Pemerintah dalam meningkatkan efektivitas belanja negara dengan memperbesar alokasi belanja yang produktif. Alokasi belanja produktif akan difokuskan pada peningkatan modal dasar pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Pembangunan infrastruktur tersebut pada gilirannya dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan kapasitas perekonomian, dan memperluas kesempatan kerja. Di samping itu, potensi pertumbuhan investasi yang masih cukup kuat juga didukung oleh mulai meningkatnya permintaan eksternal terhadap produk ekspor Indonesia.

Prakiraan investasi yang meningkat tersebut didukung pula oleh persepsi pelaku usaha yang positif terhadap prospek investasi ke depan. Hal ini tergambar pada publikasi *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Prospect Survey 2014-2016*, yang menempatkan Indonesia pada posisi ketiga sebagai

Tabel 15.1. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2016

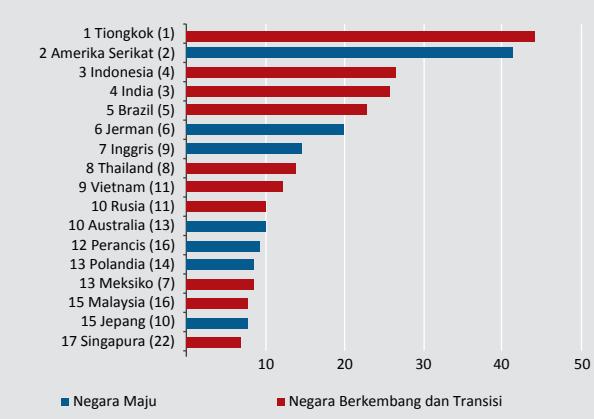
Komponen	2014	2015*	2016*
Konsumsi Rumah Tangga	5,3	5,0 - 5,4	5,0 - 5,4
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,1	6,5 - 6,9	7,0 - 7,4
Ekspor Barang dan Jasa	1,0	1,5 - 1,9	4,3 - 4,7
Impor Barang dan Jasa	2,2	1,5 - 1,9	4,1 - 4,5
PDB	5,0	5,4 - 5,8	5,6 - 6,0

*) Proyeksi

Sumber: BPS (diolah)

¹ Konsumsi Rumah Tangga termasuk Konsumsi Lembaga Nonprofit

Grafik 15.3. Negara dengan Prospek Investasi Tinggi 2014-2016



Sumber: UNCTAD, World Investment Report 2014

negara tujuan investasi paling prospektif (Grafik 15.3). Prospek investasi tersebut juga sejalan dengan strategi pemerintah untuk memperluas ruang fiskal. Seiring dengan penurunan harga minyak dunia, harga keekonomian pada akhir 2014 semakin mendekati harga jual BBM bersubsidi, sehingga tahun 2015 menjadi momentum yang tepat bagi Pemerintah untuk menerapkan *fixed subsidy*. Kebijakan tersebut akan menurunkan belanja subsidi BBM yang selanjutnya dapat dialihkan ke belanja modal dan bantuan sosial. Dalam bentuk belanja modal, alokasi program pengalihan subsidi BBM akan disalurkan sebagai dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur, sementara bantuan sosial disalurkan dalam bentuk program kompensasi.

Pertumbuhan ekspor pada tahun 2015 diprakirakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan pertumbuhan ekspor ini sejalan dengan perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia dan perkiraan mulai pulihnya ekspor mineral. Pertumbuhan ekspor Indonesia ke negara-negara maju seperti AS, Jepang, Eropa, dan India diprakirakan dapat mengimbangi terbatasnya pertumbuhan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor yang sedang mengalami moderasi seperti Tiongkok. Kinerja ekspor yang membaik juga didukung oleh langkah-langkah peningkatan daya saing seperti inflasi yang terjaga serta diversifikasi pasar dan produk. Dengan latar belakang tersebut, ekspor riil Indonesia diprakirakan meningkat sebesar 1,5-1,9%.

Pertumbuhan impor tahun 2015 diprakirakan berkisar 1,5-1,9% didorong oleh membaiknya permintaan domestik dan meningkatnya kegiatan ekspor. Sejalan dengan perkiraan investasi yang tumbuh lebih tinggi, pertumbuhan impor

barang modal, di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur, diprakirakan turut meningkat. Kegiatan produksi yang diprakirakan masih tetap kuat, antara lain untuk memenuhi permintaan ekspor yang tumbuh lebih cepat, akan mendorong peningkatan permintaan impor bahan baku. Sementara itu, impor barang konsumsi diprakirakan masih akan tetap tumbuh sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang masih cukup kuat.

Pada tahun 2016, perekonomian domestik diprakirakan tumbuh sebesar 5,6-6,0% dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga. Namun, prospek positif tersebut akan diikuti dengan defisit transaksi berjalan yang sedikit meningkat sejalan dengan peningkatan impor terkait dengan proyek infrastruktur pemerintah. Meskipun demikian, peningkatan defisit transaksi berjalan ini diperkirakan hanya bersifat temporer dan bersifat lebih produktif karena terkait dengan perbaikan infrastruktur. Dengan demikian, peningkatan defisit transaksi berjalan ini akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam jangka menengah panjang.

Prospek PDB Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 masih ditopang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Pengangkutan dan Komunikasi, serta lapangan usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR).² Selain itu, lapangan usaha Bangunan

Tabel 15.2. Prakiraan PDB sisi Lapangan Usaha

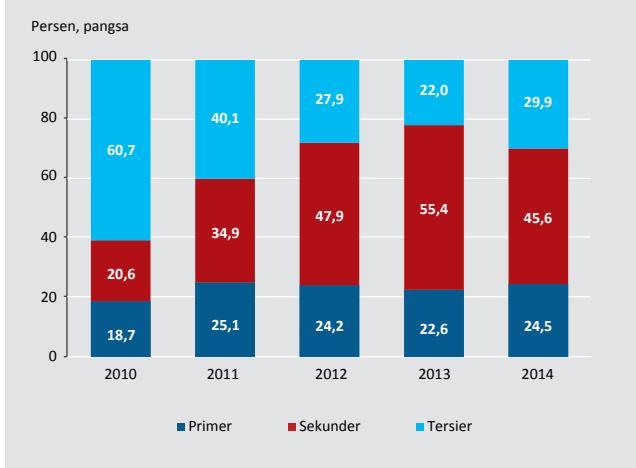
Komponen	2014	2015*	2016*
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perikanan	4,2	3,1 - 3,5	3,1 - 3,5
Pertambangan & Penggalian	0,5	2,4 - 2,8	2,4 - 2,8
Industri Pengolahan	4,6	4,7 - 5,1	4,9 - 5,3
Listrik, Gas & Air Bersih	5,4	5,5 - 5,9	5,8 - 6,2
Bangunan	7,0	7,1 - 7,5	7,2 - 7,6
Perdagangan, Hotel & Restoran	5,0	4,9 - 5,3	5,3 - 5,7
Pengangkutan & Komunikasi	9,1	9,6 - 10,0	10,6 - 11,0
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	5,9	6,4 - 6,8	6,4 - 6,8
Jasa-jasa	5,4	5,6 - 6,0	5,7 - 6,1
PDB	5,0	5,4 - 5,8	5,6 - 6,0

*) Proyeksi

Sumber: BPS (diolah)

² Prakiraan PDB dari sisi lapangan usaha sudah menggunakan tahun dasar 2010, namun ditampilkan berdasarkan klasifikasi tahun dasar 2000.

Grafik 15.4. Sektor Tujuan Investasi 2010-2014



Sumber: BKPM, diolah

diprakirakan tumbuh sejalan dengan rencana percepatan pembangunan infrastruktur (Tabel 15.2).

Lapangan usaha Industri Pengolahan diprakirakan tumbuh mencapai 4,7-5,1% pada tahun 2015 sejalan dengan berlanjutnya pemulihran ekonomi global. Prakiraan tetap terjadinya pertumbuhan di lapangan usaha ini didukung oleh realisasi investasi asing di lapangan usaha industri pengolahan (sekunder) yang menunjukkan tren peningkatan dan diprakirakan terus berlanjut (Grafik 15.4). Prospek tersebut tidak terlepas dari sejumlah kebijakan Pemerintah dalam memulihkan kinerja lapangan usaha industri pengolahan, antara lain melalui program akselerasi dan revitalisasi industri. Dalam rangka menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015, Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendorong

pertumbuhan industri nasional. Langkah tersebut sejalan dengan implementasi empat pilar KEA 2015 (Gambar 15.1).

Lapangan usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) diprakirakan relatif stabil mencapai 4,9-5,3% di tahun 2015. Tumbuhnya lapangan usaha PHR didorong oleh tetap kuatnya daya beli masyarakat seiring dengan ekspektasi inflasi yang tetap terjaga. Sektor ritel sebagai penopang utama lapangan usaha ini diprakirakan akan tumbuh pesat, termasuk di luar Jawa. Pertumbuhan sektor ini didukung pula oleh prospek pariwisata yang diprakirakan terus menguat, sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Optimisme pariwisata tersebut pada gilirannya berdampak positif terhadap perkembangan berbagai industri pendukung, antara lain hotel, restoran, transportasi, dan ritel.

Sejalan dengan perbaikan kinerja lapangan usaha PHR, lapangan usaha Pengangkutan dan Komunikasi diprakirakan akan tetap melanjutkan tren positif dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 9,6-10,0% pada 2015. Aktivitas perdagangan dan ekspor-impor yang semakin meningkat mampu mendorong kinerja sublapangan usaha pengangkutan. Pertumbuhan lapangan usaha ini juga didorong oleh perkiraan realisasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan penyediaan moda-moda transportasi oleh Pemerintah sebagai bagian dari rencana pembangunan infrastruktur 2015-2019. Dari sisi angkutan darat, proyek *smelter* diprakirakan dapat mendongkrak bisnis logistik terkait potensi meningkatnya kebutuhan pengangkutan komoditas tambang dari lokasi pertambangan ke *smelter*. Sementara itu, sejalan

Gambar 15.1. Langkah Strategis Pemerintah Menghadapi KEA 2015 di Lapangan Usaha Industri



Sumber: disarikan dari Siaran Pers Kemenperin

dengan perkembangan teknologi dan ekspansi kelas menengah, kebutuhan akan jaringan komunikasi membuat kebutuhan terhadap data dan *traffic* komunikasi akan terus bertambah. Kondisi ini menunjukkan potensi besar bagi peningkatan kapasitas data komunikasi ke depan.

Lapangan usaha Bangunan diprakirakan akan mengalami pertumbuhan yang stabil pada tahun 2015, yakni mencapai 7,1-7,5%. Perkembangan lapangan usaha ini salah satunya ditopang oleh upaya Pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur sebagai bagian dari upaya penguatan konektivitas nasional. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah 2015, rencana proyek infrastruktur antara lain meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 616,75 km, jalan bebas hambatan sepanjang 125 km, rel kereta api sepanjang 400 km, pengembangan pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut sebanyak 6 buah di Indonesia Timur, pembangunan 27 buah waduk, dan pengembangan 8 bandar udara baru. Sementara itu, prospek positif lapangan usaha Bangunan juga didukung lapangan usaha industri manufaktur melalui rencana pembangunan 13 kawasan industri di luar Jawa dan 2 kawasan industri di Jawa, serta pembangunan *smelter*.

Pada tahun 2016, semakin pulihnya perekonomian global berdampak pada prospek perekonomian domestik yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap didorong oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha industri pengolahan, PHR, serta pengangkutan dan komunikasi. Selain itu, kinerja ekonomi yang lebih baik tersebut juga ditopang oleh daya beli yang tetap resilien sejalan dengan ekspansi kelas menengah yang tetap berlanjut.

Prospek PDB Regional

Pada tahun 2015, prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah secara agregat mengindikasikan perekonomian nasional dapat tumbuh di kisaran 5,4%-5,8%, lebih tinggi daripada tahun 2014. Semakin solidnya prospek pemulihan ekonomi di AS diperkirakan memberi dampak yang positif bagi kinerja eksport manufaktur, namun perlambatan ekonomi Tiongkok berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Di kawasan Timur Indonesia, perekonomian pada tahun 2015 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2014, yaitu mencapai kisaran 7,6-8,1%. Setelah terkontraksi cukup dalam pada 2014 pasca-implementasi kebijakan pengendalian eksport mineral, kinerja sektor pertambangan akan membaik setelah dua eksportir utama tembaga di

Papua dan NTB mendapatkan izin ekspor. Hal ini memberi dampak langsung terhadap peningkatan eksport di Timur Indonesia, khususnya komoditas pertambangan dan pada gilirannya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan. Pemulihan pada sektor pertambangan akan mendorong aktivitas konsumsi rumah tangga, selain didukung adanya tren penurunan inflasi sehingga mendukung daya beli.

Di Kalimantan, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diprakirakan masih berada pada kisaran yang cukup rendah yakni 3,1-3,6%. Dari sisi penggunaan, perbaikan diperkirakan terjadi pada kinerja konsumsi, investasi dan eksport namun dalam level yang terbatas. Peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan mulai membaiknya kinerja sektor pertanian dan cukup baiknya kinerja sektor pertambangan. Investasi diperkirakan tumbuh membaik, didukung oleh investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan merupakan pendorong utama perbaikan di tahun 2015. Pada lapangan usaha pertanian, diperkirakan akan terjadi peningkatan produksi sejalan dengan semakin tingginya produktivitas sawit yang memasuki usia produktif. Pada lapangan usaha industri pengolahan, mulai beroperasinya *smelter* alumina dan besi diperkirakan dapat mendorong kinerja sektor industri, sementara peningkatan produksi sawit juga akan mendorong kinerja industri CPO.

Di kawasan Jawa, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada di kisaran 5,9-6,2% pada tahun 2015 yang ditopang oleh menguatnya konsumsi rumah tangga serta potensi perbaikan perdagangan antar-pulau dan eksport luar negeri. Sementara, kinerja investasi swasta diperkirakan masih rendah sebagai pengaruh dari terus meningkatnya biaya produksi pada sektor industri pengolahan. Dari sisi lapangan usaha, ketiga sektor utama diperkirakan tumbuh membaik. Kinerja lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan mengalami peningkatan kapasitas produksi dengan beroperasinya beberapa industri semi-otomatis (tekstil dan tembakau), seiring dengan meningkatnya permintaan. Sementara itu, lapangan usaha pertanian juga berpotensi tumbuh meningkat seiring dengan jaminan dukungan pemerintah dalam mendorong produksi tanaman bahan makanan Jawa. Di sisi lain, kinerja sektor perdagangan besar didukung oleh potensi membaiknya kinerja sektor perdagangan antar-pulau dan eksport ke AS serta Jepang.

Di kawasan Sumatera, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diperkirakan tumbuh 4,6-5,1%, sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Peningkatan diperkirakan terjadi hampir di seluruh provinsi di Sumatera. Hal tersebut didukung oleh berbagai rencana infrastruktur yang

akan dilaksanakan pada tahun 2015, sehingga investasi diperkirakan akan meningkat. Adanya pengalihan subsidi BBM ke berbagai proyek seperti pembangunan desa, irigasi, dan waduk juga diperkirakan akan mendorong kegiatan investasi dan konsumsi Pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi diperkirakan akan didorong oleh lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran. Berbagai pengembangan infrastruktur jalan maupun pelabuhan diperkirakan akan mendorong aktivitas sektor industri pengolahan lebih tinggi. Selain itu, kegiatan perdagangan di kawasan Sumatera juga diperkirakan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan konsumsi rumah tangga yang masih relatif tinggi.

Prospek Inflasi

Inflasi tahun 2015 diprakirakan berada dalam kisaran sasaran inflasi sebesar $4\pm1\%$. Ekspektasi inflasi diperkirakan masih tetap terjaga sejalan dengan dukungan bauran kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui TPI dan TPID. Terjaganya tingkat ekspektasi inflasi tercermin pada prakiraan inflasi dari berbagai lembaga internasional yang relatif konvergen (Grafik 15.5). Dipandang dari sumbernya, tekanan inflasi dari sisi eksternal diprakirakan tidak terlalu besar. Hal tersebut sejalan dengan perkiraan harga komoditas yang masih turun di tengah laju pemulihan ekonomi global yang berlangsung secara gradual. Dari sisi domestik, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pertengahan November 2014 menyebabkan tekanan inflasi dari sisi penawaran yang cukup tinggi. Namun demikian, respons kebijakan

Bank Indonesia yang diperkuat koordinasi dengan Pemerintah, diperkirakan mampu membawa inflasi kembali ke dalam kisaran sasaran inflasi 2015. Optimisme ini juga diperkuat dengan prospek harga minyak dunia yang masih menurun dan diimplementasikannya kebijakan *fixed subsidy* sejak awal tahun 2015.

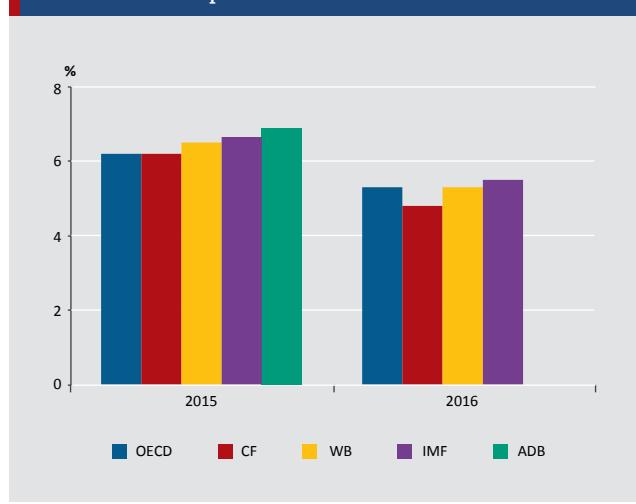
Inflasi inti tahun 2015 diprakirakan tetap terkendali. Tekanan inflasi inti dari sisi eksternal relatif terjaga, terutama terkait dengan harga komoditas internasional yang masih tumbuh negatif. Harga minyak dunia secara rata-rata juga diprakirakan menurun pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi domestik, meningkatnya permintaan domestik diprakirakan masih dapat dipenuhi, diindikasikan melalui kapasitas produksi yang masih memadai di tengah tingkat pertumbuhan PDB yang masih berada di bawah tingkat potensialnya. Dengan kondisi tersebut, tekanan inflasi dari sisi permintaan diprakirakan relatif minimal. Selain itu, ekspektasi inflasi juga relatif terjaga seiring dengan bauran kebijakan dan koordinasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah.

Inflasi dari kelompok *volatile food* pada akhir tahun 2015 diprakirakan relatif moderat. Cukup moderatnya tekanan inflasi *volatile food* ini diprakirakan tidak terlepas dari berbagai koordinasi pengendalian inflasi yang selama ini telah dilakukan. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan struktural yang menjadi tantangan untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan, terutama terkait tata niaga. Untuk mengantisipasi potensi tekanan lebih lanjut akibat permasalahan tata niaga tersebut, diperlukan solusi berupa peningkatan kapasitas serta perbaikan saluran irigasi, dan penyediaan waduk di daerah tangkapan air hujan. Untuk meredam tekanan inflasi *volatile food* dalam periode mendatang, diperlukan peningkatan produksi dengan berbagai strategi, serta diiringi dengan manajemen stok-distribusi bahan makanan dan tata niaga yang lebih baik. Dengan kondisi tersebut, inflasi *volatile food* pada tahun 2015 diprakirakan dapat ditekan sehingga mendukung pencapaian sasaran inflasi ke depan.

Inflasi kelompok *administered prices* tahun 2015 diprakirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan prakiraan harga komoditas global dan minyak dunia yang masih menurun, Pemerintah diperkirakan akan merespons dengan melakukan penyesuaian harga energi, antara lain harga jual BBM dan tarif listrik, sehingga mendukung pencapaian sasaran inflasi.

Pada tahun 2016, dengan berbagai kebijakan yang diambil untuk mengendalikan inflasi, diprakirakan inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi $4\pm1\%$. Sumber

Grafik 15.5. Prospek Inflasi 2015-2016



Sumber: berbagai lembaga internasional

tekanan inflasi antara lain diprakirakan berasal dari permintaan domestik yang meningkat di tengah turunnya harga komoditas yang semakin terbatas. Inflasi inti diprakirakan masih akan terjaga dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar. Inflasi *volatile food* juga diprakirakan akan cenderung menurun seiring dengan peningkatan produksi bahan makanan dan tata niaga yang lebih baik. Inflasi *administered prices* diprakirakan tetap pada level yang rendah apabila tidak ada kebijakan untuk menaikkan harga barang/jasa yang bersifat strategis. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan dan mempererat koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah sehingga diharapkan dapat mengarahkan ekspektasi inflasi pada sasarannya.

Prospek Neraca Pembayaran

Perbaikan neraca transaksi berjalan pada tahun 2015 diprakirakan masih berlangsung secara moderat. Kondisi ini terjadi akibat meningkatnya impor barang modal sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah di tengah tertekannya kinerja ekspor akibat berlanjutnya koreksi harga komoditas dan penurunan harga minyak dunia. Dari sisi migas, prospek harga minyak dunia yang menurun pada tahun 2015 diperkirakan berdampak terhadap prospek investasi migas sehingga memperburuk *lifting* migas yang memang sudah menurun akibat usia sumur yang menua (*natural declining*). Kondisi ini berpotensi menurunkan ekspor migas sehingga neraca perdagangan migas tertekan. Namun, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan *lifting* minyak melalui pengoperasian blok Cepu pada April 2015 dengan target *lifting* 125 ribu barel per hari, prospek penurunan kinerja ekspor minyak diperkirakan lebih terbatas. Untuk kebutuhan impor minyak, konsumsi BBM diperkirakan meningkat sejalan dengan permintaan domestik yang meningkat namun dengan nilai yang menurun akibat tingkat harga minyak dunia yang menurun. Secara keseluruhan neraca perdagangan migas diperkirakan menurun. Di neraca jasa, sejalan dengan masih rendahnya harga minyak dunia, pendapatan investasi langsung terutama dari sektor migas juga menurun. Secara keseluruhan, defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan di kisaran 3% terhadap PDB. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial (TMF) diperkirakan masih mengalami surplus sejalan dengan arus masuk investasi portofolio dan penarikan pinjaman luar negeri korporasi yang didukung oleh pertambahan likuiditas global menyusul kebijakan stimulus ekonomi yang dirilis ECB. Namun, optimisme ini sedikit dibayangi

normalisasi kebijakan moneter di AS yang berpotensi berdampak terhadap tertahannya aliran modal yang masuk ke Indonesia terutama melalui investasi portofolio.

Seiring dengan prakiraan membaiknya perekonomian domestik, defisit transaksi berjalan tahun 2016 diperkirakan sedikit membesar seiring dengan meningkatnya kebutuhan barang impor akibat permintaan domestik dan ekspor yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, defisit transaksi berjalan masih berada di kisaran 3% terhadap PDB. Di sisi lain, membaiknya fundamental ekonomi sejalan dengan reformasi struktural yang terus berlangsung mendorong arus modal masuk, terutama FDI, sehingga kinerja TMF tetap positif dan memadai bagi pembiayaan defisit transaksi berjalan.

Prospek Stabilitas Sistem Keuangan

Prospek Stabilitas Sistem Keuangan pada tahun 2015 diperkirakan akan tetap terkendali, ditopang oleh ketahanan perbankan yang tetap terjaga dan kinerja pasar keuangan yang membaik. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan DPK dan kredit diperkirakan akan meningkat sehingga mencapai, masing-masing, sebesar 14-16% dan 15-17%. Kisaran proyeksi pertumbuhan kredit tersebut masih konsisten dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas perekonomian domestik. Bank Indonesia akan terus mendorong peran aktif perbankan dalam mendukung upaya pengelolaan ekonomi ke arah yang lebih sehat melalui koordinasi dengan OJK. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) diprakirakan masih tinggi, di atas ketentuan minimum 8%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) diperkirakan tetap rendah dan stabil. Likuiditas perbankan diprakirakan semakin membaik seiring dengan operasi keuangan pemerintah yang lebih ekspansif. Sementara itu, pasar saham maupun SBN diprakirakan akan mencatatkan kinerja yang positif sejalan dengan masih positifnya persepsi investor terhadap perbaikan fundamental dan prospek ekonomi Indonesia ke depan.

15.3. Prospek Ekonomi Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, prospek perekonomian Indonesia diprakirakan berada dalam lintasan yang terus meningkat. Prakiraan ini didukung oleh prospek

perekonomian global yang terus membaik disertai dengan terlaksananya berbagai kebijakan struktural sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang bersifat inklusif namun tetap memelihara ketabilan ekonomi.

Prospek perekonomian domestik dalam jangka menengah didukung perekonomian global yang diperkirakan terus membaik. Dari sisi harga, harga minyak dunia diperkirakan kembali meningkat secara gradual seiring dengan perkiraan pengendalian produksi minyak oleh negara anggota OPEC untuk memulihkan tingkat harga. Harga komoditas nonmigas juga meningkat meski terbatas sejalan dengan perkiraan masih berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok. Secara keseluruhan, sejalan dengan prospek harga komoditas global yang tumbuh lebih terbatas, tekanan inflasi global diperkirakan relatif moderat. Namun, pemulihan ekonomi negara maju dapat berdampak pada tekanan inflasi yang meningkat di kelompok negara tersebut sehingga mendorong berlanjutnya kenaikan suku bunga LIBOR secara gradual.

Dari sisi domestik, perbaikan prospek ekonomi Indonesia ditopang oleh penerapan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan sektor riil. Pemerintah akan melanjutkan upaya pembangunan melalui implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III 2015-2019 sebagai bagian dari tahapan pembangunan RPJPN 2005-2025. Berdasarkan tahapan tersebut, RPJMN III diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini menjadi upaya konkret dalam mengatasi tantangan struktural yang dihadapi oleh perekonomian domestik.

Dengan dukungan prospek ekonomi global yang membaik dan pelaksanaan berbagai kebijakan di sektor riil tersebut, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai 6,5%. Tingkat produktivitas diperkirakan akan meningkat sebagai dampak dari implementasi kebijakan reformasi struktural. Dengan peningkatan produktivitas tersebut, pertumbuhan ekspor akan lebih tinggi seiring dengan perubahan struktur ekspor dari komoditas primer menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah, yaitu lebih padat teknologi, padat modal manusia, dan padat penelitian dan pengembangan (*research and development/R&D*). Sementara itu, permintaan impor barang antara dan barang modal secara bertahap akan dipenuhi oleh domestik.

Kinerja NPI dalam jangka menengah diperkirakan akan membaik dengan perbaikan defisit transaksi berjalan yang terus berlanjut ke kisaran 2,5-3% dari PDB. Perbaikan tersebut terutama ditopang oleh ekspor nonmigas yang diperkirakan semakin membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut dan kembali positifnya harga komoditas nonmigas. Di sisi lain, peningkatan permintaan domestik dan ekspor serta pembangunan infrastruktur mendorong peningkatan impor bahan baku dan barang modal. Dari sisi migas, prospek harga minyak yang kembali meningkat secara gradual berdampak pada penerimaan ekspor minyak yang membaik. Namun, peningkatan tersebut semakin terbatas sejalan dengan penurunan produksi secara natural akibat usia sumur yang menua. Ekspor gas diperkirakan tetap naik sejalan dengan produksi gas yang diperkirakan meningkat, meskipun terdapat kewajiban pemenuhan kebutuhan gas untuk dalam negeri dengan menyerahkan 25% dari produksi gas. Sementara itu, impor minyak diperkirakan terus meningkat sejalan dengan pertambahan kelas menengah yang mendorong peningkatan konsumsi BBM. Pada neraca transaksi modal dan finansial, semakin kuatnya fundamental ekonomi Indonesia sejalan dengan implementasi kebijakan reformasi struktural Pemerintah diperkirakan akan mendorong arus modal masuk, baik FDI maupun portofolio sehingga mampu membiayai defisit transaksi berjalan.

Melalui perbaikan kondisi infrastruktur dan produktivitas, kapasitas perekonomian nasional akan semakin meningkat sehingga di samping dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga kondusif bagi tercapainya inflasi sebesar $3,5\pm1\%$. Bahkan, jika kapabilitas industrial dapat ditingkatkan melalui implementasi reformasi struktural yang lebih optimal, perekonomian Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan dapat tumbuh secara berkelanjutan hingga di atas 7%. Bank Indonesia akan tetap berupaya mendukung pencapaian perekonomian ke depan tersebut dengan memelihara stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan. Bauran kebijakan tersebut di antaranya adalah upaya pendalaman pasar keuangan yang menjadi bagian dari kebijakan reformasi struktural untuk menyediakan sumber pembiayaan pembangunan yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan. Namun, apabila implementasi kebijakan reformasi struktural Pemerintah tidak berjalan optimal sehingga tidak mampu mengatasi tantangan struktural yang dihadapi dan faktor risiko yang masih membayangi, maka pertumbuhan ekonomi dapat lebih rendah dari prakiraan dengan diikuti oleh inflasi yang lebih tinggi dan perbaikan defisit transaksi berjalan yang lebih terbatas.



Keterangan gambar:

Lomba panjat pinang adalah permainan tradisional yang populer ketika merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Sebuah pohon pinang yang tinggi, batangnya dilumuri pelumas, dilengkapi berbagai hadiah menarik di bagian atasnya untuk diperebutkan oleh para peserta menjadi tontonan yang menghibur. Panjat pinang mengajarkan nilai luhur seperti saling percaya (*trust*), kerjakeras (*professionalism*), kerja cerdas (*excellence*), serta koordinasi dan kerjasama (*coordination and teamwork*) antar peserta agar tidak jatuh ketika memanjat dan mencapai tujuan yaitu menggapai berbagai hadiah.



Lampiran

Peraturan Bank Indonesia Tahun 2014

No	Peraturan	Tanggal	Perihal
1	No. 16/1/PBI/2014	16 Januari 2014	Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
2	No. 16/2/PBI/2015	14 Februari 2014	Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan tahun 2013
3	No. 16/3/PBI/2016	18 Maret 2014	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2004
4	No. 16/4/PBI/2017	18 Maret 2014	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) Tahun Emisi 2005
5	No. 16/5/PBI/2018	18 Maret 2014	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (lima puluh ribu) Tahun Emisi 2004
6	No. 16/6/PBI/2019	18 Maret 2014	Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (dua ribu) Tahun Emisi 2009
7	No. 16/7/PBI/2020	7 April 2014	Perubahan keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
8	No. 16/8/PBI/2021	8 April 2014	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>)
9	No. 16/9/PBI/2022	8 April 2014	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
10	No. 16/10/PBI/2023	14 Mei 2014	Penerimaan Devisa Hasil Expor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri
11	No. 16/11/PBI/2024	1 Juli 2014	Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
12	No. 16/12/PBI/2025	24 Juli 2014	Operasi Moneter Syariah
13	No. 16/13/PBI/2026	24 Juli 2014	Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) tahun emisi 2014
14	No. 16/14/PBI/2027	24 Juli 2014	Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Khusus Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) tahun emisi 2014 Dalam Bentuk Uang Rupiah Kertas Bersambung
15	No. 16/15/PBI/2028	11 September 2014	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
16	No. 16/16/PBI/2029	17 September 2014	Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
17	No. 16/17/PBI/2030	17 September 2014	Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
18	No. 16/18/PBI/2031	17 September 2014	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank
19	No. 16/19/PBI/2032	17 September 2014	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi SWAP Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
20	No. 16/20/PBI/2033	28 Oktober 2014	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
21	No. 16/21/PBI/2034	29 Desember 2014	Penerapan Prinsip Kehati-harian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

Berbagai Ketentuan dan Kebijakan Penting di Bidang Ekonomi dan Keuangan Tahun 2014

Tanggal	Keterangan	Nomor Peraturan
Januari		
11	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar	PMK No. 6/PMK.011/2014
17	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/ atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 11/PMK.011/2014
Februari		
3	Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi Dan Bangunan	PMK No. 23/PMK.03/2014
3	Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Penggantian Dana Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.	PMK No. 24/PMK.05/2014
10	Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan	PMK No. 30/PMK.03/2014
Maret		
3	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	PP No.1 Tahun 2014
4	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014	Perpres No.2 Tahun 2014
7	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	Perpres No.39 Tahun 2014
10	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asdp Indonesia Ferry	PP No.6 Tahun 2014
11	Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri	PP No.7 Tahun 2014
12	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	PP No.8 Tahun 2014
14	Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang	PP No.10 Tahun 2014
17	Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan	PP No.11 Tahun 2014
18	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan	PP No.12 Tahun 2014
18	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Riset dan Teknologi	PP No.13 Tahun 2014
21	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan	PP No.17 Tahun 2014
25	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	PP No.20 Tahun 2014
26	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah	PP No.22 Tahun 2014
April		
3	Perindustrian	UU No.3 Tahun 2014
9	Perdagangan	UU No.7 Tahun 2014
16	Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	PMK No. 64/PMK.011/2014
Mei		
28	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Barang Kapas selain Benang Jahit	PMK No. 96/PMK.011/2014
30	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I	PP No.28 Tahun 2014
30	Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014	Inpres No.4 Tahun 2014
Juni		
2	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	Perpres No.45 Tahun 2014

Berbagai Ketentuan dan Kebijakan Penting di Bidang Ekonomi dan Keuangan Tahun 2014 - Lanjutan

Tanggal	Keterangan	Nomor Peraturan
5	Kawasan Ekonomi Khusus Palu	PP No.31 Tahun 2014
9	Kawasan Ekonomi Khusus Bitung	PP No.32 Tahun 2014
10	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan	PP No.33 Tahun 2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus dan/atau Produksi Obat Infus untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 117/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 118/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film</i> , Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik, Karung Plastik, Benang dari Plastik, Terpal Plastik, dan/atau Geotekstil untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 119/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 120/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde</i> dan/atau <i>Formaldehyde Resin</i> untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 121/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa <i>Ballpoint</i> dan <i>Casing Crayon</i> untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 122/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Pakan Ternak untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 123/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 124/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan Peralatan Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Besi dan Baja, Bejana Tekan dan Tangki dari Logam, serta Pembuatan Mesin Pertanian dan Kehutanan untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 125/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 126/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 127/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 128/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 129/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 130/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik, dan Kartu Telepon Selular untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 131/PMK.011/2014
16	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2014	PMK No. 132/PMK.011/2014
Juli		
7	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan.	PMK No. 137.1/PMK.011/2014
25	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar	PMK No. 153/PMK.011/2014
Agustus		
14	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai	PMK No. 163/PMK.04/2014
September		
2	Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015.	PMK No. 183/PMK.07/2014

Berbagai Ketentuan dan Kebijakan Penting di Bidang Ekonomi dan Keuangan Tahun 2014 - Lanjutan

Tanggal	Keterangan	Nomor Peraturan
Oktober		
14	Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations	Keppres No.37 Tahun 2014
27	Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	PP No.60 Tahun 2014
27	Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	PP No.65 Tahun 2014
27	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III	PP No.72 Tahun 2014
27	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perpres No.97 Tahun 2014
27	Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil	Perpres No.98 Tahun 2014
27	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	Perpres No.100 Tahun 2014
28	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara	PP No.73 Tahun 2014
November		
5	Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	PP No.77 Tahun 2014
5	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	PP No.78 Tahun 2014
5	Kebijakan Energi Nasional	PP No.79 Tahun 2014
11	Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan	PP No.85 Tahun 2014
11	Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro	PP No.89 Tahun 2014
11	Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations	Inpres No. 6 Tahun 2014
25	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014	UU No.12 Tahun 2014
25	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015	UU No. 27 Tahun 2014
Desember		
16	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam	PMK No. 224/PMK.011/2014
30	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal	PMK No. 258/PMK.011/2014

Daftar Tabel

Nomor	Judul
Tabel 1	Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Penggunaan
Tabel 2	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan)
Tabel 3	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku)
Tabel 4	Perkembangan Upah Minimum Provinsi per Bulan
Tabel 5	Indeks Harga Konsumen Indonesia
Tabel 6	Angka Inflasi di 66 Kota
Tabel 7	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
Tabel 8	Neraca Pembayaran Indonesia
Tabel 9	Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas
Tabel 10	Volume Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas
Tabel 11	Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan (FOB)
Tabel 12	Nilai Impor Menurut Kelompok Barang
Tabel 13	Nilai Impor Nonmigas Menurut Komoditas (CIF)
Tabel 14	Volume Impor Nonmigas Menurut Komoditas
Tabel 15	Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal (CIF)
Tabel 16	Nilai Ekspor Minyak dan Gas (FOB)
Tabel 17	Uang Beredar
Tabel 18	Perubahan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Tabel 19	Suku Bunga Deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Kelompok Bank
Tabel 20	Pasar Uang Antarbank di Jakarta (Rata-rata Volume Transaksi PUAB Pagi dan Sore Berbagai Tenor)
Tabel 21	Penerbitan, Pelunasan, dan Posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Tabel 22	Penghimpunan Dana oleh Bank Umum
Tabel 23	Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank
Tabel 24	Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Sektor Ekonomi
Tabel 25	Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi
Tabel 26	Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas Melalui Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia
Tabel 27	Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam Melalui Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia
Tabel 28	Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Tabel 29	Inflasi Dunia
Tabel 30	Suku Bunga dan Nilai Tukar

Tabel 1. Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Penggunaan ¹⁾

Jenis penggunaan	2010	2011	2012	2013 *	2014**					Miliar rupiah
					I	II	III	IV	TOTAL	
Harga Konstan										
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	3.786.063	3.977.289	4.195.788	4.421.721	1.131.465	1.144.411	1.186.404	1.186.793	4.649.072	
a. Makanan dan Minuman selain restoran	1.457.599	1.489.545	1.545.636	1.608.381	410.563	412.812	426.611	426.690	1.676.677	
b. Pakaian	154.222	162.350	172.878	182.483	46.667	47.454	49.005	48.280	191.406	
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	516.320	543.181	575.044	608.664	154.173	156.731	163.346	164.070	638.319	
d. Kesehatan dan Pendidikan	255.277	268.834	284.509	300.723	77.173	79.128	81.505	81.084	318.890	
e. Transportasi dan Komunikasi	894.898	953.674	1.018.099	1.087.559	279.479	282.978	293.116	293.469	1.149.042	
f. Restoran dan Hotel	337.158	355.868	381.367	403.127	103.899	105.372	111.536	111.396	432.203	
g. Lainnya	170.589	203.836	218.255	230.783	59.511	59.935	61.285	61.805	242.536	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	72.759	76.790	81.919	88.617	25.788	26.305	23.599	23.944	99.636	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	618.178	652.292	681.819	729.060	130.225	172.838	181.029	259.379	743.471	
a. Konsumsi Kolektif	381.063	407.985	420.887	456.249	80.319	110.985	111.186	162.932	465.421	
b. Konsumsi Individu	237.115	244.307	260.931	272.811	49.906	61.853	69.843	96.447	278.049	
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.127.841	2.316.359	2.527.729	2.661.311	660.326	685.268	702.173	723.197	2.770.963	
a. Bangunan	1.580.435	1.675.389	1.811.558	1.933.672	482.360	501.896	517.455	538.515	2.040.225	
b. Mesin dan Perlengkapan	220.378	273.416	306.654	307.782	72.973	75.500	71.968	73.146	293.586	
c. Kendaraan	123.095	143.012	171.259	161.592	37.250	38.216	36.610	35.520	147.596	
d. Peralatan lainnya	30.761	34.348	35.908	36.022	8.755	8.792	9.382	9.702	36.632	
e. <i>Cultivated Biological Resources (CBR)</i>	125.663	139.609	146.767	157.466	40.229	34.975	40.656	46.886	162.746	
f. Produk Kekayaan Intelektual	47.509	50.585	55.583	64.776	18.758	25.889	26.103	19.429	90.179	
5. a. Perubahan Inventori	129.095	118.207	174.183	149.137	54.703	74.297	44.122	-10.270	162.853	
b. Diskrepansi Statistik ¹⁾	0	1.252	30.882	28.095	35.419	38.388	41.953	-31.841	83.918	
6. Eksport Barang dan Jasa	1.667.918	1.914.268	1.945.064	2.026.120	501.608	505.736	508.713	530.683	2.046.740	
a. Barang	1.520.295	1.746.663	1.761.024	1.828.166	451.953	455.680	458.506	477.043	1.843.182	
a.1. Nonmigas	1.266.971	1.442.177	1.479.142	1.584.724	397.525	398.894	396.515	415.128	1.608.062	
a.2. Migas	253.324	304.486	281.882	243.441	54.428	56.786	61.991	61.915	235.119	
b. Jasa	147.623	167.605	184.039	197.954	49.655	50.056	50.207	53.640	203.558	
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.537.720	1.768.822	1.910.300	1.945.867	479.052	507.941	481.118	520.426	1.988.538	
a. Barang	1.280.689	1.495.888	1.632.008	1.665.064	413.251	437.132	411.587	443.092	1.705.062	
a.1. Nonmigas	1.021.879	1.203.515	1.326.281	1.338.229	334.988	361.833	331.076	350.581	1.378.479	
a.2. Migas	258.809	292.373	305.727	326.835	78.262	75.299	80.511	92.511	326.583	
b. Jasa	257.031	272.934	278.291	280.803	65.802	70.809	69.531	77.334	283.476	
8. Produk Domestik Bruto	6.864.133	7.287.635	7.727.083	8.158.194	2.060.482	2.139.301	2.206.875	2.161.458	8.568.116	
Harga Berlaku										
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	3.786.063	4.260.076	4.768.745	5.352.697	1.417.561	1.445.960	1.516.271	1.531.373	5.911.165	
a. Makanan dan Minuman selain restoran	1.457.599	1.638.644	1.854.629	2.073.904	543.176	551.520	576.541	580.646	2.251.882	
b. Pakaian	154.222	175.860	187.041	206.150	53.492	54.551	56.464	55.949	220.456	
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	516.320	569.629	637.060	726.351	191.727	197.944	207.947	209.304	806.922	
d. Kesehatan dan Pendidikan	255.277	290.850	327.738	360.911	95.382	98.278	101.963	102.197	397.820	
e. Transportasi dan Komunikasi	894.898	993.369	1.085.926	1.225.581	328.693	334.071	352.295	360.731	1.375.790	

Tabel 1. Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Penggunaan¹⁾ - Lanjutan

Jenis penggunaan	2010	2011	2012	2013 *	2014**				
					I	II	III	IV	TOTAL
f. Restoran dan Hotel	337.158	385.156	443.100	500.341	135.600	138.377	147.923	148.327	570.227
g. Lainnya	170.589	206.569	233.251	259.457	69.492	71.219	73.138	74.219	288.068
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	72.759	80.530	89.586	103.930	31.490	32.307	29.470	31.242	124.509
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	618.178	709.451	796.848	904.996	165.901	229.269	259.133	351.097	1.005.400
a. Konsumsi Kolektif	381.063	444.289	492.963	565.755	102.491	147.417	159.847	220.482	630.237
b. Konsumsi Individu	237.115	265.162	303.885	339.241	63.410	81.852	99.285	130.615	375.162
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.127.841	2.451.914	2.819.026	3.059.781	799.394	838.715	871.825	924.190	3.434.125
a. Bangunan	1.580.435	1.791.932	2.053.896	2.242.780	592.292	623.505	649.295	704.031	2.569.122
b. Mesin dan Perlengkapan	220.378	280.002	329.147	343.132	86.342	89.988	88.978	85.117	350.426
c. Kendaraan	123.095	146.580	179.039	172.446	38.266	39.783	38.876	38.664	155.588
d. Peralatan lainnya	30.761	35.531	38.480	40.084	10.279	10.516	11.445	12.109	44.349
e. <i>Cultivated Biological Resources (CBR)</i>	125.663	145.934	159.227	187.189	49.835	43.616	51.061	60.234	204.747
f. Produk Kekayaan Intelektual	47.509	51.934	59.236	74.149	22.380	31.307	32.169	24.036	109.891
5. a. Perubahan Inventori	129.095	131.329	202.638	183.329	72.347	99.416	61.705	-14.463	219.005
b. Diskrepansi Statistik ¹⁾	0	4.616	-27.181	-4.545	8.060	7.407	21.166	-108.818	-72.185
6. Ekspor Barang dan Jasa	1.667.918	2.061.886	2.118.979	2.283.761	625.252	617.899	616.315	641.736	2.501.202
a. Barang	1.520.295	1.890.412	1.918.040	2.044.357	559.270	551.568	549.096	567.509	2.227.443
a.1. Nonmigas	1.266.971	1.528.932	1.572.451	1.703.498	466.512	461.188	458.770	483.055	1.869.525
a.2. Migas	253.324	361.481	345.589	340.859	92.758	90.380	90.326	84.454	357.918
b. Jasa	147.623	171.474	200.939	239.404	65.982	66.331	67.219	74.227	273.759
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.537.720	1.868.075	2.152.937	2.359.212	620.127	657.864	636.419	666.117	2.580.527
a. Barang	1.280.689	1.596.456	1.850.040	2.012.940	527.483	559.117	538.129	552.523	2.177.252
a.1. Nonmigas	1.021.879	1.230.538	1.439.293	1.523.386	394.384	431.391	403.906	422.673	1.652.354
a.2. Migas	258.809	365.918	410.747	489.554	133.099	127.726	134.223	129.850	524.898
b. Jasa	257.031	271.619	302.897	346.272	92.644	98.747	98.290	113.594	403.275
8. Produk Domestik Bruto	6.864.133	7.831.726	8.615.705	9.524.737	2.499.878	2.613.109	2.739.466	2.690.241	10.542.694

Catatan:

¹⁾ Data PDB sejak Tahun 2010 menggunakan tahun dasar 2010=100

*) Data sementara

**) Data sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan)¹⁾

Miliar rupiah

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**				
					I	II	III	IV	TOTAL
Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	956.120	993.857	1.039.441	1.083.142	272.120	292.188	317.723	246.417	1.128.448
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	754.434	780.581	816.304	847.764	214.012	229.698	254.665	180.856	879.231
Tanaman pangan	253.327	250.787	263.076	268.268	83.567	67.994	76.994	40.363	268.918
Tanaman hortikultura	110.395	120.079	117.425	118.208	29.860	33.240	33.082	26.977	123.159
Tanaman perkebunan	268.207	281.465	301.020	319.533	64.605	92.058	106.438	75.054	338.155
Peternakan	108.400	113.603	119.250	125.302	31.707	32.096	33.387	34.932	132.122
Jasa pertanian dan perburuan	14.105	14.646	15.534	16.453	4.273	4.310	4.765	3.530	16.878
Kehutanan dan penebangan kayu	58.126	58.731	58.872	59.229	13.139	15.722	15.422	15.291	59.574
Perikanan	143.559	154.545	164.264	176.149	44.970	46.769	47.636	50.270	189.643
Pertambangan dan penggalian	718.129	748.956	771.562	785.016	190.965	195.233	197.724	205.409	789.330
Pertambangan minyak dan gas bumi	336.170	335.737	323.632	312.820	76.700	76.539	78.337	73.758	305.334
Pertambangan batu bara dan lignit	160.733	199.244	230.589	242.065	59.978	58.220	55.381	69.430	243.009
Pertambangan biji logam	109.244	95.414	91.615	98.609	20.099	25.818	27.886	24.122	97.924
Pertambangan dan penggalian lainnya	111.982	118.562	125.726	131.523	34.188	34.656	36.120	38.099	143.063
Industri pengolahan	1.512.761	1.607.452	1.697.787	1.774.097	450.681	466.053	468.509	471.068	1.856.311
Industri batubara dan pengilangan migas	233.822	233.052	227.456	223.585	55.458	55.082	55.194	53.134	218.867
Industri makanan dan minuman	360.443	400.004	441.342	459.283	117.397	127.729	129.518	128.446	503.091
Pengolahan tembakau	67.249	67.097	73.011	72.814	19.342	19.708	19.810	20.399	79.259
Industri tekstil dan pakaian jadi	96.307	102.561	108.754	115.913	28.870	30.185	29.623	29.004	117.682
Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	19.697	21.852	20.665	21.746	5.543	5.764	5.715	5.922	22.944
Industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	56.775	55.231	54.787	58.181	15.124	15.596	15.411	15.581	61.712
Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	67.985	70.632	68.590	68.229	17.579	18.278	17.745	16.967	70.569
Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	114.332	124.231	140.102	147.249	38.216	37.997	37.647	39.114	152.973
Industri karet, barang dari karet dan plastik	66.763	68.153	73.307	71.946	18.952	18.183	18.156	17.486	72.777
Industri barang galian bukan logam	50.948	54.910	59.252	61.229	15.077	15.235	15.629	16.750	62.691
Industri logam dasar	54.472	61.860	60.889	67.972	17.123	17.959	18.265	18.631	71.978
Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	130.751	142.245	158.804	173.452	42.700	43.962	45.253	46.598	178.513
Industri mesin dan perlengkapan	23.767	25.795	25.437	24.164	6.604	6.601	6.501	6.583	26.289

Tabel 2. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan)¹⁾ - Lanjutan

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**				
					I	II	III	IV	TOTAL
Industri alat angkutan	134.260	142.815	148.905	171.166	43.098	43.919	44.295	46.604	177.915
Industri furnitur	20.069	22.062	21.589	22.375	5.661	5.851	5.835	5.830	23.177
Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	15.120	14.954	14.897	14.794	3.938	4.004	3.912	4.020	15.873
Pengadaan listrik	72.549	76.678	84.393	88.805	22.334	23.549	23.395	24.477	93.756
Ketenagalistrikan	58.867	63.385	70.827	75.051	18.720	19.979	19.837	20.744	79.280
Pengadaan gas dan produksi es	13.683	13.294	13.567	13.754	3.614	3.570	3.559	3.733	14.476
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5.849	6.125	6.330	6.587	1.681	1.686	1.707	1.714	6.788
Konstruksi	626.905	683.422	728.226	772.720	194.998	202.412	209.376	219.829	826.616
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor	923.924	1.013.200	1.067.912	1.118.207	280.032	297.555	302.453	292.323	1.172.363
Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya	182.141	190.878	203.431	218.291	56.922	58.213	56.829	57.219	229.182
Pedagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda	741.783	822.322	864.481	899.916	223.111	239.343	245.623	235.104	943.180
Transportasi dan pergudangan	245.375	265.774	284.663	308.521	79.813	82.445	85.051	85.881	333.191
Angkutan rel	2.375	2.298	2.202	2.333	641	717	736	763	2.857
Angkutan darat	135.486	145.019	155.852	171.307	44.810	45.490	47.403	48.069	185.772
Angkutan laut	21.715	23.542	25.601	27.372	7.227	7.377	7.573	7.297	29.474
Angkutan sungai, danau dan penyebrangan	8.113	8.813	9.057	9.469	2.419	2.468	2.606	2.625	10.118
Angkutan Udara	38.304	43.917	47.030	49.263	12.137	13.188	13.265	13.665	52.255
Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir	39.383	42.185	44.921	48.776	12.579	13.205	13.468	13.463	52.716
Penyediaan akomodasi dan makan minum	200.282	214.022	228.233	243.748	63.403	64.315	64.912	65.531	258.161
Penyediaan akomodasi	35.764	39.785	43.567	47.700	12.285	12.833	12.948	13.213	51.278
Penyediaan makan minum	164.518	174.237	184.665	196.049	51.118	51.483	51.964	52.318	206.883
Informasi dan komunikasi	256.048	281.694	316.279	349.150	92.655	95.013	97.085	99.377	384.130
Jasa keuangan	239.728	256.443	280.896	306.432	77.730	80.617	80.153	83.025	321.526
Jasa perantara keuangan	149.843	158.504	175.168	193.095	48.065	50.390	49.405	51.833	199.693
Asuransi dan dana pensiun	51.411	55.802	60.045	64.711	16.944	17.268	17.570	17.823	69.605
Jasa keuangan lainnya	32.702	35.860	38.868	41.242	10.803	11.010	11.199	11.363	44.374
Jasa penunjang keuangan	5.774	6.277	6.815	7.384	1.919	1.949	1.980	2.006	7.854

Tabel 2. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan) ¹⁾ - Lanjutan

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**				
					I	II	III	IV	TOTAL
Real estate	198.214	213.441	229.254	244.238	62.837	63.653	64.574	65.375	256.440
Jasa perusahaan	99.085	108.239	116.293	125.491	33.590	34.098	34.835	35.272	137.795
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	259.646	276.337	282.235	288.963	71.006	70.170	75.510	79.459	296.145
Jasa pendidikan	201.560	215.029	232.704	251.785	62.926	63.173	66.737	74.797	267.633
Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya	66.445	72.592	78.380	84.518	21.467	22.007	23.196	24.617	91.288
Jasa lainnya	101.061	109.372	115.675	123.089	32.541	33.167	33.851	34.511	134.070
Nilai tambah bruto pada harga dasar	6.683.680	7.142.634	7.560.263	7.954.509	2.010.781	2.087.336	2.146.790	2.109.082	8.353.989
Pajak kurang subsidi pada produk	180.453	145.001	166.821	203.684	49.700	51.965	60.084	52.376	214.126
PRODUK DOMESTIK BRUTO	6.864.133	7.287.635	7.727.083	8.158.194	2.060.482	2.139.301	2.206.875	2.161.458	8.568.116

¹⁾ Data PDB sejak Tahun 2010 menggunakan tahun dasar 2010=100

* Data sementara

** Data sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku)

Miliar rupiah

Lapangan Usaha	Harga Konstan				
	2010	2011*	2012*	2013**	2014***
Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	956.120	1.058.245	1.152.262	1.275.048	1.410.657
Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	754.434	832.514	902.126	994.778	1.088.945
Tanaman pangan	253.327	270.977	305.671	332.112	343.952
Tanaman hortikultura	110.395	125.286	125.108	137.369	159.521
Tanaman perkebunan	268.207	303.403	323.362	358.172	397.896
Peternakan	108.400	117.257	130.614	147.982	167.075
Jasa pertanian dan perburuan	14.105	15.591	17.372	19.143	20.501
Kehutanan dan penebangan kayu	58.126	62.248	65.882	69.599	74.618
Perikanan	143.559	163.484	184.254	210.671	247.094
Pertambangan dan penggalian	718.129	924.813	1.000.308	1.042.976	1.035.121
Pertambangan minyak dan gas bumi	336.170	444.068	492.894	519.210	506.445
Pertambangan batu bara dan lignit	160.733	253.026	270.519	275.988	251.303
Pertambangan biji logam	109.244	104.284	100.845	98.468	93.537
Pertambangan dan penggalian lainnya	111.982	123.436	136.050	149.310	183.836
Industri pengolahan	1.512.761	1.704.251	1.848.151	1.998.694	2.215.754
Industri batubara dan pengilangan migas	233.822	284.099	298.403	310.863	331.743
Industri makanan dan minuman	360.443	410.387	457.773	489.742	560.620
Pengolahan tembakau	67.249	71.735	79.340	82.203	95.509
Industri tekstil dan pakaian jadi	96.307	108.192	116.558	129.627	138.758
Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	19.697	22.045	21.687	24.682	28.417
Industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	56.775	59.501	60.629	66.848	75.734
Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	67.985	75.308	73.665	74.178	84.089
Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	114.332	124.717	143.460	156.690	179.340
Industri karet, barang dari karet dan plastik	66.763	72.006	76.425	76.157	79.926
Industri barang galian bukan logam	50.948	55.606	63.028	69.261	76.667
Industri logam dasar	54.472	62.846	64.557	74.269	81.774
Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	130.751	142.059	162.970	185.346	197.113
Industri mesin dan perlengkapan	23.767	23.376	24.832	25.314	32.855
Industri alat angkutan	134.260	154.864	166.391	191.996	206.435
Industri furnitur	20.069	21.985	22.487	25.009	28.247
Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	15.120	15.523	15.947	16.512	18.527
Pengadaan listrik	72.549	91.722	95.638	98.687	114.122
Ketenagalistrikan	58.867	72.816	73.350	74.358	83.842
Pengadaan gas dan produksi es	13.683	18.906	22.288	24.329	30.280
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5.849	6.209	6.604	7.155	7.704
Konstruksi	626.905	712.184	805.208	905.991	1.041.950

Tabel 3. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku) - Lanjutan

Lapangan Usaha	Harga Konstan				
	2010	2011*	2012*	2013**	2014***
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor	923.924	1.066.092	1.138.484	1.263.815	1.410.932
Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya	182.141	208.944	228.667	262.525	289.553
Pedagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda	741.783	857.148	909.818	1.001.291	1.121.379
Transportasi dan pergudangan	245.375	276.122	313.156	368.679	450.600
Angkutan rel	2.375	2.408	2.783	3.216	4.429
Angkutan darat	135.486	148.062	159.226	187.213	218.303
Angkutan laut	21.715	24.083	26.615	30.062	36.075
Angkutan sungai, danau dan penyebrangan	8.113	9.202	9.780	11.165	13.137
Angkutan udara	38.304	47.029	62.201	77.722	108.792
Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir	39.383	45.338	52.552	59.302	69.864
Penyediaan akomodasi dan makan minum	200.282	224.215	252.612	289.498	330.672
Penyediaan akomodasi	35.764	41.102	51.052	63.489	74.787
Penyediaan makan minum	164.518	183.113	201.560	226.009	255.886
Informasi dan komunikasi	256.048	281.778	311.362	341.009	368.943
Jasa keuangan	239.728	270.586	320.534	368.877	408.647
Jasa perantara keuangan	149.843	167.456	204.479	237.170	258.587
Asuransi dan dana pensiun	51.411	58.759	65.882	76.241	87.367
Jasa keuangan lainnya	32.702	37.761	42.688	47.031	53.238
Jasa penunjang keuangan	5.774	6.610	7.485	8.436	9.455
Real estate	198.214	218.797	237.914	264.275	294.573
Jasa perusahaan	99.085	113.975	127.724	144.604	165.991
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	259.646	304.756	340.568	371.209	404.380
Jasa pendidikan	201.560	232.727	270.372	309.439	346.558
Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya	66.445	76.405	86.235	96.667	109.070
Jasa lainnya	101.061	113.022	122.566	140.312	163.549
PRODUK DOMESTIK BRUTO	6.864.133	7.831.726	8.615.705	9.524.737	10.542.694
Nonmigas	2.171.114	2.322.764	2.481.797	2.636.976	2.636.976
Migas	4.693.020	5.508.963	137.142	133.369	133.369

¹⁾ Data PDB sejak Tahun 2010 menggunakan tahun dasar 2010=100

* Data sementara

** Data sangat sementara

*** Data sangat sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4. Perkembangan Upah Minimum Provinsi per Bulan

Propinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nangroe Aceh Darussalam	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.550.000	1.750.000
Sumatera Utara	905.000	965.000	1.035.500	1.200.000	1.305.000	1.505.850
Sumatera Barat	880.000	940.000	1.055.000	1.150.000	1.350.000	1.490.000
Riau	901.650	1.016.000	1.120.000	1.238.000	1.400.000	1.700.000
Kepulauan Riau	892.000	925.000	975.000	1.015.000	1.365.087	1.665.000
Jambi	800.000	900.000	1.028.000	1.142.000	1.300.000	1.502.300
Sumatera Selatan	824.730	927.825	1.048.440	1.195.220	1.630.000	1.825.000
Bangka Belitung	850.000	910.000	1.024.000	1.110.000	1.265.000	1.640.000
Bengkulu	727.950	780.000	815.000	930.000	1.200.000	1.350.000
Lampung	691.000	767.500	855.000	975.000	1.150.000	n.a.
Banten	917.500	955.300	1.000.000	1.042.000	1.170.000	1.325.000
DKI Jakarta	1.069.865	1.118.009	1.290.000	1.529.150	2.200.000	2.441.301
Jawa Barat	628.191	671.500	732.000	780.000	850,000 ¹⁾	n.a.
Jawa Tengah	575.000	660.000	675.000	720.000	830,000 ²⁾	n.a.
D.I. Yogyakarta	700.000	745.694	808.000	892.660	947,114 ³⁾	n.a.
Jawa Timur	570.000	630.000	705.000	745,000 ³⁾	866,250 ⁴⁾	n.a.
Bali	760.000	829.316	890.000	967.500	1.181.000	n.a.
Nusa Tenggara Barat	832.500	890.775	950.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000
Nusa Tenggara Timur	725.000	800.000	850.000	925.000	1.010.000	n.a.
Kalimantan Barat	705.000	741.000	802.500	900.000	1.060.000	1.380.000
Kalimantan Tengah	873.089	986.500	1.134.580	1.327.459	1.553.127	1.723.970
Kalimantan Selatan	930.000	1.024.500	1.126.000	1.225.000	1.337.500	1.620.000
Kalimantan Timur	955.000	1.002.000	1.084.000	1.177.000	1.752.073	1.886.315
Sulawesi Utara	929.500	1.000.000	1.080.000	1.250.000	1.550.000	1.900.000
Sulawesi Tengah	720.000	777.500	827.500	885.000	995.000	1.250.000
Sulawesi Selatan	905.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.440.000	1.800.000
Sulawesi Tenggara	770.000	860.000	930.000	1.032.300	1.125.207	1.400.000
Sulawesi Barat	909.400	944.200	1.006.000	1.127.000	1.165.000	n.a.
Maluku	775.000	840.000	900.000	975.000	1.275.000	1.415.000
Maluku Utara	770.000	n.a	889.350	960.498	1.200.622	n.a.
Gorontalo	675.000	710.000	762.500	837.500	1.175.000	1.325.000
Papua	1.216.100	1.316.500	1.403.000	1,515,000 ⁴⁾	1.710.000	1.900.000
Papua Barat	1.180.000	1.210.000	1.410.000	1.450.000	1.720.000	1.870.000

Keterangan:

- Sumber: Kemenakertrans, Direktorat Pengupahan & Jamsostek - Ditjen PHK
- Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.PER-01/MEN/1999 tahun 1999, setiap awal tahun Upah Minimum Regional Tingkat I atau Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan Daerah masing-masing provinsi
- Penjelasan "n.a", yaitu : Provinsi Timtim keluar dari NKRI, Provinsi belum terbentuk, Provinsi Maluku Utara tidak menetapkan UMP
- ¹⁾ Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur no.561/Kep.1405-Bangsos/2012, UMP Provinsi Jawa Barat mengacu kepada UMK Kab.Majalengka sebesar Rp 850.000,-
- ²⁾ Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah no.561.4/58/2012, UMP Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada UMK Kab.Wonogiri sebesar Rp 830.000,-
- ³⁾ SK Gubernur DIY No. 370/KEP/2012, UMP DIY Yogyakarta mengacu kepada UMK Kab. Gunungkidul sebesar Rp 974.114,-
- ⁴⁾ Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur no.72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012, mengacu kepada UMK Kab.Magetan sebesar Rp 866.250,-

Tabel 5. Indeks Harga Konsumen Indonesia

Aakhir periode ¹⁾	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan Rekreasi & Olaharaga	Transportasi dan Komunikasi	Umum	Perubahan Indeks Umum
2001	290,74	278,75	208,57	277,90	262,99	224,12	221,47	249,15	12,55
2002	317,29	304,35	235,08	285,38	277,79	248,43	255,85	274,13	10,03
2003	311,84	323,35	256,74	305,60	293,54	277,52	266,34	287,99	5,06
2004 ²⁾	111,10	115,70	124,19	113,36	113,06	126,20	114,25	116,86	6,40
2005	126,55	131,56	141,50	121,21	119,99	136,60	165,38	136,86	17,11
2006	142,92	139,93	148,34	129,50	127,03	147,70	167,06	145,89	6,60
2007	159,01	148,90	155,58	140,41	132,51	160,74	169,15	155,50	6,59
2008 ³⁾	122,70	114,98	113,02	112,27	109,13	109,84	107,26	113,86	11,06
2009	127,46	123,96	115,09	119,01	113,38	114,11	103,32	117,03	0,33
2010									6,96
Januari	129,66	126,35	115,48	118,77	113,55	114,22	103,49	118,01	0,84
Februari	130,78	126,85	115,71	118,21	113,76	114,30	103,60	118,36	0,30
Maret	129,59	127,21	115,86	118,22	114,04	114,32	103,67	118,19	-0,14
April	130,02	127,52	115,98	118,38	114,23	114,33	103,71	118,37	0,15
Mei	130,66	127,95	116,09	119,79	114,35	114,35	103,73	118,71	0,29
Juni	134,84	128,48	116,36	120,91	114,42	114,42	103,89	119,86	0,97
Juli	141,17	129,32	116,66	120,80	114,73	115,40	105,46	121,74	1,57
Agustus	141,83	130,19	118,51	120,87	115,04	116,86	105,84	122,67	0,76
September	142,46	130,87	118,81	122,18	115,30	117,16	106,44	123,21	0,44
Okttober	141,25	131,50	119,24	124,29	115,58	117,68	105,83	123,29	0,06
November	143,36	132,11	119,54	125,40	115,68	117,78	105,84	124,03	0,60
Desember	147,39	132,59	119,79	126,76	115,86	117,86	106,10	125,17	0,92
2011									3,79
Januari	150,64	133,24	120,37	126,95	116,41	118,36	106,43	126,29	0,89
Februari	150,14	133,86	120,85	126,85	117,21	118,51	106,59	126,46	0,13
Maret	147,22	134,29	121,20	127,33	117,65	118,71	106,68	126,05	-0,32
April	144,42	134,56	121,46	128,28	118,10	118,80	106,75	125,66	-0,31
Mei	144,01	134,86	121,76	129,10	118,69	118,83	106,90	125,81	0,12
Juni	145,84	135,41	122,13	129,84	119,18	119,04	107,06	126,50	0,55
Juli	148,52	135,98	122,36	130,65	119,50	120,20	107,24	127,35	0,67
Agustus	150,11	136,60	122,76	134,66	119,81	122,77	108,10	128,54	0,93
September	149,97	137,25	123,08	135,96	120,07	123,43	108,29	128,89	0,27
Okttober	149,45	137,61	123,33	134,25	120,38	123,80	107,85	128,74	-0,12
November	150,33	137,88	123,60	136,08	120,58	123,85	107,99	129,18	0,34
Desember	152,76	138,57	123,95	136,35	120,79	123,94	108,14	129,91	0,57
2012									4,30
Januari	155,59	139,47	124,62	136,24	121,40	124,12	108,39	130,90	0,76
Februari	154,45	139,95	124,96	137,90	121,58	124,22	108,46	130,96	0,05
Maret	153,94	140,59	125,21	138,11	121,77	124,31	108,57	131,05	0,07
April	154,13	141,46	125,51	137,48	122,05	124,39	108,80	131,32	0,21
Mei	153,90	142,03	125,74	137,18	122,27	124,41	108,88	131,41	0,07
Juni	156,32	142,71	126,19	137,71	122,53	124,55	108,91	132,23	0,62
Juli	158,94	143,98	126,39	137,96	123,04	125,25	109,25	133,16	0,70
Agustus	161,29	144,94	126,72	139,14	123,34	127,38	110,89	134,43	0,95
September	159,80	145,76	127,16	141,19	123,51	128,74	110,00	134,45	0,01
Okttober	159,12	146,32	127,69	142,52	123,82	129,01	109,98	134,67	0,16
November	158,91	146,61	127,88	142,38	124,08	129,09	110,23	134,76	0,07
Desember	161,44	147,04	128,10	142,72	124,30	129,16	110,52	135,49	0,54

Tabel 5. Indeks Harga Konsumen Indonesia - Lanjutan

Akhir periode ¹⁾	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan Rekreasi & Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum	Perubahan Indeks Umum
2013									8,38
Januari	166,91	147,71	128,82	143,07	124,66	129,22	110,21	136,88	1,03
Februari	170,39	148,41	129,87	142,23	125,36	129,47	110,30	137,91	0,75
Maret	173,87	149,00	130,14	141,23	125,66	129,62	110,51	138,78	0,63
April	172,48	149,45	130,68	139,63	125,94	129,82	110,62	138,64	-0,10
Mei	171,04	149,98	131,66	137,92	126,23	129,90	110,67	138,60	-0,03
Juni	173,04	150,98	131,93	137,52	126,52	129,95	114,88	140,03	1,03
Juli	182,48	153,32	132,51	137,39	127,02	130,85	125,91	144,63	3,29
Agustus	185,67	154,37	133,39	139,88	127,49	132,63	127,10	146,25	1,12
September	180,32	155,57	134,20	144,06	127,83	133,57	126,09	145,74	-0,35
Oktober	179,20	156,42	134,55	143,26	128,25	133,98	126,76	145,87	0,09
November	178,36	156,85	135,47	143,22	128,69	134,13	126,79	146,04	0,12
Desember	179,77	157,99	136,07	143,46	128,90	134,21	127,50	146,84	0,55
2014 ⁴⁾									8,36
Januari	117,81	110,71	108,72	103,88	105,76	105,98	113,72	110,99	1,07
Februari	118,23	111,19	108,90	104,47	106,06	106,16	113,89	111,28	0,26
Maret	117,71	111,67	109,07	104,55	106,50	106,31	114,16	111,37	0,08
April	116,43	112,17	109,34	104,29	107,15	106,56	114,39	111,35	-0,02
Mei	116,26	112,56	109,59	104,42	107,59	106,63	114,63	111,53	0,16
Juni	117,41	112,92	110,01	104,73	107,98	106,72	114,85	112,01	0,43
Juli	119,69	114,05	110,50	105,62	108,40	107,20	115,86	113,05	0,93
Agustus	120,12	114,64	111,31	105,86	108,76	108,89	115,72	113,58	0,47
September	119,92	115,23	112,17	105,68	109,07	109,63	115,44	113,89	0,27
Oktober	120,22	115,73	113,34	105,90	109,72	109,88	115,62	114,42	0,47
November	122,80	116,55	113,90	105,81	110,19	109,97	120,58	116,14	1,50
Desember	126,76	118,84	115,55	106,49	111,00	110,37	127,27	119,00	2,46

¹⁾ Angka tahunan/triwulan adalah angka akhir periode yang bersangkutan

²⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2002 = 100 di 45 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok

³⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2007 = 100 di 66 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok pada Juni 2008

⁴⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2012 = 100 di 82 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok pada Januari 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 6. Angka Inflasi di 66 Kota¹⁾

Kota	2010	2011	2012	2013	2014 ²⁾	Kota	2010	2011	2012	2013	2014 ²⁾	Persen, yoy
Meulaboh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,20	Probolinggo	6,68	3,78	5,88	7,98	6,79	
Banda Aceh	4,64	3,32	0,06	6,39	7,83	Madiun	6,54	3,49	3,51	7,52	7,39	
Lhokseumawe	7,19	3,55	0,39	8,27	8,53	Surabaya	7,33	4,72	4,39	7,52	7,90	
Sibolga	11,83	3,71	3,30	10,08	8,36	Serang	6,18	2,78	4,41	9,16	10,07	
Pematang Siantar	9,68	4,25	4,73	12,02	7,94	Tangerang	6,08	3,78	4,44	10,02	9,81	
Medan	7,65	3,54	3,79	10,09	8,24	Cilegon	6,12	2,35	3,91	7,98	11,37	
Padang Sidempuan	7,42	4,66	3,54	7,82	7,38	Singaraja	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,32	
Padang	7,84	5,37	4,16	10,87	11,90	Denpasar	8,10	3,75	4,71	7,35	8,03	
Bukit Tinggi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,24	Mataram	11,07	6,38	4,10	9,27	7,18	
Tembilahan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,06	Bima	6,35	7,19	3,61	10,42	7,37	
Pekanbaru	7,00	5,09	3,35	8,83	8,53	Maumere	8,48	6,59	6,49	6,24	4,00	
Dumai	9,05	3,09	3,21	8,60	8,53	Kupang	9,97	4,32	5,10	8,84	8,32	
Bungo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,99	Pontianak	8,52	4,91	6,62	9,48	9,38	
Jambi	10,52	2,76	4,22	8,74	8,72	Singkawang	7,10	6,72	4,21	6,15	9,65	
Palembang	6,02	3,78	2,72	7,04	8,38	Sampit	9,53	3,60	4,69	7,25	7,90	
Lubuk Linggau	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,34	Palangkaraya	9,49	5,28	6,73	6,45	6,63	
Bengkulu	9,08	3,96	4,61	9,94	10,85	Tanjung	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,80	
Bandar Lampung	9,95	4,24	4,30	7,56	8,36	Banjarmasin	9,06	3,98	5,96	6,98	7,16	
Metro	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,50	Balikpapan	7,38	6,45	6,41	8,56	7,43	
Tanjung Pandan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,15	Samarinda	7,00	6,23	4,81	10,37	6,74	
Pangkal Pinang	9,36	5,00	6,57	8,71	6,81	Tarakan	7,92	6,43	5,99	10,35	11,91	
Batam	7,40	3,76	2,02	7,81	7,61	Manado	6,28	0,67	6,04	8,12	9,67	
Tanjung Pinang	6,17	3,32	3,92	10,09	7,49	Palu	6,40	4,47	5,87	7,57	8,85	
Jakarta	6,21	3,97	4,52	8,00	8,95	Bulukumba	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,45	
Bogor	6,57	2,85	4,06	8,55	6,83	Watampone	6,74	3,94	3,65	6,86	8,22	
Sukabumi	5,43	4,26	3,98	8,03	8,38	Makassar	6,82	2,87	4,57	6,24	8,51	
Bandung	4,53	2,75	4,02	7,97	7,75	Pare-pare	5,78	1,60	3,49	6,31	9,38	
Cirebon	6,70	3,20	3,36	7,86	7,08	Palopo	3,99	3,35	4,11	5,25	8,95	
Bekasi	7,88	3,45	3,46	9,46	7,68	Kendari	3,87	5,09	5,25	5,92	7,40	
Depok	7,97	2,94	4,11	10,97	7,49	Bau-bau	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,37	
Tasikmalaya	5,56	4,17	3,87	6,89	8,09	Gorontalo	7,43	4,08	5,31	5,84	6,14	
Cilacap	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,18	Mamuju	5,12	4,91	3,28	5,91	7,88	
Purwokerto	6,04	3,40	4,73	8,50	7,09	Ambon	8,78	2,85	6,73	8,81	6,81	
Kudus	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,59	Tual	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,48	
Surakarta	6,65	1,93	2,87	8,32	8,01	Ternate	5,32	4,52	3,29	9,78	9,34	
Semarang	7,11	2,87	4,85	8,19	8,52	Manokwari	4,68	3,64	4,88	4,63	5,70	
Tegal	6,73	2,58	3,10	5,80	7,40	Sorong	8,13	0,90	5,12	7,93	6,84	
Yogyakarta	7,38	3,88	4,31	7,32	6,59	Merauke	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,31	
Jember	7,09	2,43	4,49	7,21	7,53	Jayapura	4,48	3,40	4,52	8,27	7,98	
Banyuwangi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,59	Inflasi Nasional	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	
Sumenep	6,75	4,18	5,05	6,62	8,04							
Kediri	6,80	3,62	4,63	8,05	7,49							
Malang	6,70	4,05	4,60	7,92	8,14							

Keterangan

¹⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2007 = 100 di 66 kota

²⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2012 = 100 di 82 kota

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 7. Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia

Kelompok	2009 ¹⁾	2010	2011 ²⁾	2012	2013	2014	Perubahan 2014 thdp 2013 (%)
Pertanian	208,84	231,43	248,78	263,25	264,48	175,05	-33,81
Pertambangan dan penggalian	206,49	212,31	221,50	231,20	217,33	117,22	-46,06
Industri	164,79	172,01	180,32	187,48	181,29	122,89	-32,21
Impor	156,61	160,90	177,37	189,17	188,20	137,37	-27,01
Eksport	134,10	137,80	154,11	163,15	164,64	138,73	-15,74
Migas	142,41	142,05	173,11	194,28	168,58	168,10	-0,28
Nonmigas	108,16	124,52	148,00	153,16	153,03	129,07	-15,66
Indeks Umum	162,71	170,59	183,31	192,69	189,60	132,44	-30,15

¹⁾ Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2005 = 100, sejak Januari 2009

²⁾ Data tahun 2011 telah menggunakan tahun dasar 2010 = 100

Pada bulan November-Desember 2013, BPS tidak menerbitkan angka IHPB eksport Migas

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 8. Neraca Pembayaran Indonesia

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014				
					I*	II*	III*	IV**	2014
I. Transaksi Berjalan	5.144,29	1.685,08	-24.418,12	-29.114,92	-4.149,47	-8.939,24	-6.963,20	-6.180,61	-26.232,53
A. Barang	31.002,66	33.825,00	8.679,52	5.833,23	3.349,64	-375,16	1.560,11	2.367,60	6.902,19
- Eksport, fob	149.965,84	191.108,71	187.346,48	182.089,23	43.937,16	44.504,56	43.605,81	43.242,06	175.289,59
- Impor, fob	-118.963,18	-157.283,71	-178.666,96	-176.255,99	-40.587,51	-44.879,73	-42.045,70	-40.874,46	-168.387,40
1. Barang Dagangan Umum	29.982,64	32.215,37	6.710,91	4.068,67	2.832,08	-703,33	1.192,21	2.072,42	5.393,38
- Eksport	148.866,47	189.432,27	185.337,19	180.293,99	43.413,57	44.171,10	43.231,58	42.940,51	173.756,76
- Impor	-118.883,83	-157.216,90	-178.626,28	-176.225,32	-40.581,48	-44.874,44	-42.039,37	-40.868,09	-168.363,38
a. Nonmigas	26.750,27	32.865,50	11.949,85	13.777,23	5.580,95	2.474,85	4.325,73	4.851,79	17.233,31
- Eksport	120.208,01	151.365,60	149.765,76	146.705,57	35.821,52	36.656,68	35.969,89	36.556,60	145.004,69
- Impor	-93.457,74	-118.500,10	-137.815,90	-132.928,34	-30.240,57	-34.181,83	-31.644,16	-31.704,81	-127.771,37
b. Migas	3.232,37	-650,13	-5.238,94	-9.708,56	-2.748,87	-3.178,18	-3.133,51	-2.779,38	-11.839,94
- Eksport	28.658,46	38.066,67	35.571,43	33.588,42	7.592,05	7.514,43	7.261,69	6.383,90	28.752,07
- Impor	-25.426,09	-38.716,80	-40.810,38	-43.296,98	-10.340,91	-10.692,61	-10.395,20	-9.163,28	-40.592,01
2. Barang Lainnya	1.020,02	1.609,64	1.968,61	1.764,56	517,56	328,17	367,90	295,18	1.508,82
- Eksport	1.099,37	1.676,44	2.009,29	1.795,23	523,59	333,46	374,23	301,55	1.532,83
- Impor	-79,35	-66,80	-40,67	-30,67	-6,03	-5,29	-6,33	-6,37	-24,02
B. Jasa - jasa	-9.790,51	-9.803,27	-10.564,20	-12.071,65	-2.229,96	-2.920,43	-2.594,51	-2.787,53	-10.532,43
- Eksport	16.670,49	21.888,15	23.660,23	22.944,08	5.788,41	5.631,56	5.588,74	6.114,53	23.123,22
- Impor	-26.460,99	-31.691,42	-34.224,43	-35.015,73	-8.018,37	-8.551,99	-8.183,25	-8.902,05	-33.655,66
C. Pendapatan Primer	-20.698,16	-26.547,17	-26.627,83	-27.054,65	-6.354,35	-7.177,80	-7.132,64	-7.157,11	-27.821,90
- Penerimaan	1.933,88	2.581,12	2.649,63	2.602,36	390,95	680,98	634,10	411,20	2.117,23
- Pembayaran	-22.632,04	-29.128,28	-29.277,45	-29.657,01	-6.745,30	-7.858,79	-7.766,75	-7.568,30	-29.939,13
D. Pendapatan Sekunder	4.630,30	4.210,51	4.094,38	4.178,15	1.085,21	1.534,15	1.203,84	1.396,42	5.219,62
- Penerimaan	7.571,25	7.635,63	8.066,75	8.508,30	2.084,44	2.504,50	2.305,83	2.478,77	9.373,54
- Pembayaran	-2.940,95	-3.425,12	-3.972,37	-4.330,15	-999,23	-970,35	-1.101,99	-1.082,35	-4.153,92
II. Transaksi Modal	49,85	32,89	50,57	45,29	1,23	7,21	3,25	14,87	26,57
- Penerimaan	49,85	32,89	50,57	45,29	1,23	7,21	3,25	14,87	26,57
- Pembayaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Transaksi Finansial²	26.476,13	13.603,33	24.858,06	21.964,42	7.188,62	13.864,29	14.727,58	7.778,69	43.559,18
- Aset	-7.294,22	-16.453,46	-17.971,27	-15.467,05	-6.245,13	-2.907,12	-3.917,47	1.030,89	-12.038,82

Tabel 8. Neraca Pembayaran Indonesia - Lanjutan

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014				
					I*	II*	III*	IV**	2014
- Kewajiban	33.770,35	30.056,80	42.829,33	37.431,47	13.433,74	16.771,41	18.645,05	6.747,80	55.598,00
1. Investasi Langsung	11.106,33	11.528,39	13.716,23	12.295,44	3.287,99	3.458,64	5.945,14	2.573,87	15.265,65
a. Aset	-4.185,68	-9.036,54	-7.484,55	-11.111,69	-2.883,04	-2.406,98	-2.226,22	-2.904,60	-10.420,83
b. Kewajiban	15.292,01	20.564,94	21.200,78	23.407,13	6.171,03	5.865,62	8.171,36	5.478,47	25.686,48
2. Investasi Portofolio	13.201,98	3.806,37	9.206,43	10.874,79	8.703,36	8.046,27	7.441,30	1.610,94	25.801,87
a. Aset	-2.511,30	-1.189,45	-5.467,02	-1.272,76	465,44	-991,40	1.299,03	1.635,50	2.408,56
b. Kewajiban	15.713,28	4.995,82	14.673,45	12.147,55	8.237,92	9.037,67	6.142,27	-24,55	23.393,31
- Sektor publik	13.526,06	826,50	9.251,20	10.257,27	5.917,13	2.890,58	5.298,46	1.273,66	15.379,83
- Sektor swasta	2.187,22	4.169,31	5.422,25	1.890,28	2.320,78	6.147,09	843,81	-1.298,21	8.013,47
3. Derivatif Finansial	-94,39	69,35	12,99	-334,36	-140,36	45,25	-57,36	-60,82	-213,29
4. Investasi Lainnya	2.262,20	-1.800,78	1.922,42	-871,45	-4.662,38	2.314,13	1.398,50	3.654,70	2.704,95
a. Aset	-1.725,26	-6.754,48	-5.352,99	-3.427,38	-4.066,18	427,50	-2.869,92	2.323,03	-4.185,58
b. Kewajiban	3.987,46	4.953,69	7.275,42	2.555,93	-596,19	1.886,62	4.268,42	1.331,67	6.890,53
- Sektor publik	1.756,04	-2.258,17	2.453,31	-1.375,64	-1.534,48	-295,16	-612,66	-1.766,29	-4.208,60
- Sektor swasta	2.231,42	7.211,87	4.822,11	3.931,58	938,29	2.181,79	4.881,08	3.097,97	11.099,13
IV. Total (I + II + III)	31.670,26	15.321,30	490,50	-7.105,20	3.040,38	4.932,26	7.767,63	1.612,95	17.353,22
V. Selisih Perhitungan Bersih	-1.327,16	-3.464,68	-275,38	-219,52	-974,14	-635,57	-1.292,22	797,29	-2.104,63
VI. Neraca Keseluruhan (IV + V)	30.343,10	11.856,61	215,12	-7.324,73	2.066,25	4.296,69	6.475,41	2.410,25	15.248,59
VII. Cadangan Devisa dan yang terkait³	-30.343,10	-11.856,61	-215,12	7.324,73	-2.066,25	-4.296,69	-6.475,41	-2.410,25	-15.248,59
A. Transaksi Cadangan Devisa	-30.343,10	-11.856,61	-215,12	7.324,73	-2.066,25	-4.296,69	-6.475,41	-2.410,25	-15.248,59
B. Kredit dan Pinjaman IMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Exceptional Financing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Memorandum:									
- Posisi Cadangan Devisa	96.206,83	110.123,00	112.781,03	99.386,71	102.591,87	107.678,11	111.164,46	111.861,60	111.861,60
Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	7,56	6,74	6,15	5,47	5,73	6,05	6,31	6,44	6,44
- Transaksi Berjalan (% PDB)	0,72	0,2	-2,78	-3,18	-1,97	-3,97	-2,99	-2,81	-2,95

Catatan:

¹⁾ Data menggunakan BPM6, namun penggunaan tanda "+" dan "-" mengikuti BPM5

²⁾ Tidak termasuk cadangan devisa dan yang terkait

³⁾ Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

Tabel 9. Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas¹⁾

Ribu dolar AS

Rincian	2010		2011		2012		2013		2014*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Hasil pertanian	4.933.130	4,07	5.077.862	3,32	5.584.278	3,68	5.787.688	3,90	5.927.310	4,04
Biji coklat	1.186.717	0,98	616.202	0,40	388.326	0,26	443.372	0,30	201.407	0,14
Udang	850.988	0,70	1.064.620	0,70	1.111.388	0,73	1.467.208	0,99	1.786.340	1,22
Biji kopi	811.997	0,67	1.030.338	0,67	1.241.922	0,82	1.166.406	0,79	1.030.826	0,70
Ikan dan lain-lain	802.877	0,66	970.195	0,63	1.106.691	0,73	1.003.940	0,68	987.888	0,67
Rempah-rempah	408.873	0,34	430.320	0,28	631.746	0,42	554.137	0,37	577.627	0,39
Teh	149.569	0,12	136.366	0,09	126.754	0,08	131.112	0,09	108.843	0,07
Bahan nabati	137.801	0,11	159.926	0,10	134.133	0,09	165.132	0,11	228.120	0,16
Buah-buahan	130.495	0,11	172.746	0,11	181.322	0,12	184.506	0,12	299.853	0,20
Tembakau	76.221	0,06	61.037	0,04	60.791	0,04	93.458	0,06	82.397	0,06
Sayur-sayuran	71.688	0,06	57.605	0,04	83.943	0,06	67.687	0,05	82.958	0,06
Damar dan getah damar	67.958	0,06	87.903	0,06	94.134	0,06	105.591	0,07	107.564	0,07
Karet alam	34.886	0,03	28.493	0,02	19.481	0,01	14.178	0,01	11.675	0,01
Hasil pertanian lainnya	203.061	0,17	262.111	0,17	403.647	0,27	390.962	0,26	421.812	0,29
Hasil industri	89.386.455	73,69	111.461.020	72,83	112.171.467	73,91	109.321.211	73,62	115.438.236	78,78
Minyak sawit	12.890.141	10,63	16.709.854	10,92	17.685.127	11,65	16.518.525	11,12	17.458.681	11,91
Tekstil dan produk tekstil	11.176.059	9,21	13.172.828	8,61	12.510.222	8,24	12.770.966	8,60	12.847.052	8,77
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	8.154.411	6,72	8.592.466	5,61	11.157.423	7,35	10.716.148	7,22	10.108.184	6,90
Produk logam dasar	8.989.998	7,41	10.774.417	7,04	9.303.974	6,13	8.614.179	5,80	9.085.492	6,20
Karet olahan	9.199.403	7,58	14.083.724	9,20	10.368.180	6,83	9.306.376	6,27	7.022.183	4,79
Kertas dan barang dari kertas	4.121.145	3,40	4.144.400	2,71	3.938.382	2,59	3.732.138	2,51	3.780.011	2,58
Makanan olahan	3.596.530	2,96	4.582.987	2,99	5.089.625	3,35	5.369.071	3,62	6.325.968	4,32
Bahan kimia	3.371.990	2,78	4.579.567	2,99	3.634.536	2,39	3.498.625	2,36	3.851.410	2,63
Produk kayu olahan	2.819.030	2,32	3.244.615	2,12	3.338.150	2,20	3.510.392	2,36	3.906.762	2,67
Alas kaki	2.473.922	2,04	3.254.189	2,13	3.518.257	2,32	3.859.520	2,60	4.109.722	2,80
Damar tiruan, bahan plastik	2.062.646	1,70	2.402.329	1,57	2.475.062	1,63	2.608.021	1,76	2.760.489	1,88
Furnitur	1.802.305	1,49	1.722.845	1,13	1.728.879	1,14	1.693.575	1,14	1.728.791	1,18
Kapal laut dan sejenisnya	522.209	0,43	328.274	0,21	397.701	0,26	683.239	0,46	748.616	0,51
Bahan kertas	1.442.103	1,19	1.537.801	1,00	1.540.093	1,01	1.816.694	1,22	1.713.636	1,17
Suku cadang kendaraan	1.263.353	1,04	1.213.935	0,79	1.961.842	1,29	1.814.455	1,22	2.096.517	1,43
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	1.101.581	0,91	1.541.550	1,01	2.491.899	1,64	2.492.773	1,68	2.919.483	1,99
Suku cadang mesin	325.458	0,27	457.288	0,30	854.526	0,56	684.059	0,46	763.368	0,52
Asam berlemak	697.196	0,57	1.334.065	0,87	1.878.791	1,24	1.718.603	1,16	2.367.180	1,62
Komputer dan bagianya	383.459	0,32	279.570	0,18	699.832	0,46	575.740	0,39	579.213	0,40
Sabun mandi dan cuci	579.335	0,48	740.114	0,48	866.562	0,57	895.776	0,60	906.193	0,62
Minyak atsiri dan lainnya	453.993	0,37	527.167	0,34	546.023	0,36	566.619	0,38	593.827	0,41
Gelas dan barang dari gelas	423.348	0,35	432.356	0,28	498.666	0,33	452.941	0,31	432.536	0,30
Pupuk	388.845	0,32	415.196	0,27	548.257	0,36	631.035	0,42	508.675	0,35
Perlengkapan olahraga	330.510	0,27	323.236	0,21	453.825	0,30	545.887	0,37	514.885	0,35
Produk keramik	364.376	0,30	375.447	0,25	342.240	0,23	342.339	0,23	365.290	0,25
Makanan ternak	347.192	0,29	510.353	0,33	599.077	0,39	733.112	0,49	775.918	0,53
Margarin dan lemak lainnya	345.491	0,28	922.707	0,60	811.401	0,53	618.983	0,42	777.803	0,53
Produk farmasi	315.699	0,26	428.328	0,28	441.752	0,29	449.277	0,30	519.046	0,35
Barang dari logam mulia	298.973	0,25	1.053.125	0,69	170.300	0,11	183.584	0,12	2.122.861	1,45
Kulit dan barang dari kulit	201.438	0,17	223.765	0,15	211.209	0,14	230.055	0,15	218.039	0,15
Preparat pembasmi kuman	193.761	0,16	236.899	0,15	247.671	0,16	318.040	0,21	302.762	0,21

Tabel 9. Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas¹⁾ - Lanjutan

Rincian	2010		2011		2012		2013		2014*	
	Nilai	Pangsa (%)								
Pesawat udara dan baginya	128.464	0,11	160.270	0,10	105.480	0,07	102.608	0,07	97.458	0,07
Bahan celup organik sintetik	113.182	0,09	133.908	0,09	140.127	0,09	164.488	0,11	182.768	0,12
Semen	108.805	0,09	57.724	0,04	20.050	0,01	49.657	0,03	37.333	0,03
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	58.275	0,05	109.138	0,07	197.914	0,13	105.918	0,07	143.786	0,10
Barang anyaman	43.071	0,04	56.680	0,04	85.021	0,06	81.805	0,06	77.596	0,05
Rotan olahan	33.803	0,03	42.098	0,03	1.586	0,00	877	0,00	504	0,00
Peti kemas	3.633	0,00	7.556	0,00	9.865	0,01	12.727	0,01	5.833	0,00
Gliserol dan larutan alkali	5.924	0,00	22.959	0,02	47.161	0,03	75.656	0,05	76.636	0,05
Hasil industri lainnya	8.255.395	6,81	10.725.291	7,01	11.254.781	7,42	10.776.727	7,26	12.605.729	8,60
Hasil pertambangan dan sektor lainnya	25.536.616	21,05	34.270.797	22,39	31.365.925	20,67	30.946.415	20,84	22.834.995	15,58
Batubara	17.801.230	14,67	26.924.584	17,59	26.248.270	17,29	24.359.167	16,40	20.814.382	14,20
Biji tembaga	6.325.227	5,21	4.706.934	3,08	2.565.990	1,69	2.999.560	2,02	1.673.548	1,14
Biji nikel	574.683	0,47	1.333.171	0,87	1.458.409	0,96	1.677.366	1,13	85.913	0,06
Bauksit	453.951	0,37	767.138	0,50	637.597	0,42	1.318.775	0,89	47.742	0,03
Granit	42.802	0,04	35.792	0,02	15.598	0,01	131	0,00	0	0,00
Hasil pertambangan lainnya	338.723	0,28	503.179	0,33	440.061	0,29	591.415	0,40	213.410	0,15
Hasil sektor lainnya ²⁾	351.810	0,29	555.909	0,36	644.161	0,42	650.255	0,44	804.145	0,55
Ekspor yang tidak dapat diklasifikasikan³⁾	1.099.368	0,91	1.676.441	1,10	2.009.286	1,32	1.795.235	1,21	1.532.832	1,05
Jumlah, fob	121.307.379	100,00	153.042.030	100,00	151.775.118	100,00	148.500.805	100,00	146.537.518	100,00

Catatan:

¹⁾ Klasifikasi komoditas berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan bersumber dari Bank Indonesia sebagai pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia

²⁾ Terdiri dari barang seni, barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik, dan barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut

³⁾ Mencakup emas nonmoneter dan merchanting

* Data sementara

Tabel 10. Volume Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas ¹⁾

Rincian	2010		2011		2012		2013		2014*	
	Volume	Pangsa (%)								
Hasil pertanian	2.937	0,71	2735	0,53	3.004	0,54	2.844	0,44	2.844	0,56
Biji coklat	2.908	0,70	2.696	0,52	3.005	0,54	3.103	0,48	3.215	0,63
Udang	432	0,10	211	0,04	172	0,03	198	0,03	77	0,02
Biji kopi	109	0,03	119	0,02	133	0,02	145	0,02	160	0,03
Ikan dan lain-lain	432	0,10	344	0,07	446	0,08	532	0,08	384	0,08
Rempah-rempah	555	0,13	550	0,11	644	0,12	649	0,10	623	0,12
Teh	129	0,03	96	0,02	111	0,02	119	0,02	156	0,03
Bahan nabati	79	0,02	68	0,01	62	0,01	65	0,01	61	0,01
Buah-buahan	180	0,04	230	0,04	169	0,03	192	0,03	203	0,04
Tembakau	234	0,06	209	0,04	243	0,04	245	0,04	300	0,06
Sayur-sayuran	96	0,02	20	0,00	16	0,00	20	0,00	17	0,00
Damar dan getah damar	125	0,03	88	0,02	147	0,03	104	0,02	111	0,02
Karet alam	47	0,01	38	0,01	71	0,01	73	0,01	50	0,01
Hasil pertanian lainnya	14	0,00	9	0,00	9	0,00	7	0,00	6	0,00
Hasil industri	476	0,11	713	0,14	780	0,14	755	0,12	1.068	0,21
Minyak sawit	60.882	14,65	62.703	12,20	64.782	11,73	70.819	10,88	75.439	14,86
Tekstil dan produk tekstil	15.535	3,74	15.823	3,08	18.967	3,43	21.517	3,31	22.885	4,51
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	1.972	0,47	1.934	0,38	1.951	0,35	2.109	0,32	2.213	0,44
Produk logam dasar	571	0,14	573	0,11	623	0,11	588	0,09	536	0,11
Karet olahan	2.454	0,59	2.256	0,44	2.361	0,43	2.019	0,31	3.059	0,60
Kertas dan barang dari kertas	2.898	0,70	3.080	0,60	3.030	0,55	3.324	0,51	3.248	0,64
Makanan olahan	4.474	1,08	4.216	0,82	4.227	0,77	4.263	0,66	4.343	0,86
Bahan kimia	1.955	0,47	2.499	0,49	2.315	0,42	2.538	0,39	3.351	0,66
Produk kayu olahan	4.603	1,11	4.843	0,94	4.088	0,74	3.863	0,59	4.185	0,82
Alas kaki	3.635	0,87	3.986	0,78	4.202	0,76	4.900	0,75	5.972	1,18
Damar tiruan, bahan plastik	161	0,04	193	0,04	199	0,04	213	0,03	214	0,04
Furnitur	1.209	0,29	1.201	0,23	1.279	0,23	1.350	0,21	1.483	0,29
Kapal laut dan sejenisnya	649	0,16	588	0,11	599	0,11	551	0,08	552	0,11
Bahan kertas	228	0,05	128	0,02	165	0,03	107	0,02	135	0,03
Suku cadang kendaraan	2.537	0,61	2.902	0,56	3.185	0,58	3.671	0,56	3.494	0,69
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	176	0,04	156	0,03	231	0,04	230	0,04	259	0,05
Asam berlemak	806	0,19	1.200	0,23	1.855	0,34	2.150	0,33	2.589	0,51
Komputer dan bagianya	21	0,00	15	0,00	25	0,00	22	0,00	21	0,00
Sabun mandi dan cuci	551	0,13	621	0,12	745	0,13	839	0,13	863	0,17
Minyak atsiri dan lainnya	86	0,02	106	0,02	100	0,02	101	0,02	100	0,02
Makanan ternak	3.281	0,79	3.660	0,71	4.236	0,77	4.613	0,71	4.822	0,95
Margarin dan lemak lainnya	355	0,09	796	0,15	766	0,14	681	0,10	805	0,16
Produk farmasi	19	0,00	19	0,00	21	0,00	26	0,00	24	0,00
Barang dari logam mulia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kulit dan barang dari kulit	13	0,00	12	0,00	10	0,00	11	0,00	8	0,00
Preparat pembasmi kuman	69	0,02	79	0,02	72	0,01	82	0,01	95	0,02
Pesawat udara dan bagianya	2	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	2	0,00
Bahan celup organik sintetik	24	0,01	25	0,00	30	0,01	34	0,01	34	0,01
Semen	2.954	0,71	1.318	0,26	275	0,05	946	0,15	571	0,11
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	7	0,00	11	0,00	20	0,00	11	0,00	15	0,00

Tabel 10. Volume Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas¹⁾ - Lanjutan

Rincian	2010		2011		2012		2013		2014*	
	Volume	Pangsa (%)								
Barang anyaman	14	0,00	22	0,00	23	0,00	22	0,00	22	0,00
Rotan olahan	33	0,01	40	0,01	1	0,00	0	0,00	0	0,00
Peti kemas	1	0,00	3	0,00	3	0,00	4	0,00	3	0,00
Gliserol dan larutan alkali	31	0,01	96	0,02	164	0,03	248	0,04	318	0,06
Hasil industri lainnya	6.816	1,64	7.871	1,53	6.219	1,13	6.688	1,03	6.238	1,23
Hasil pertambangan dan sektor lainnya	351.912	84,65	448.449	87,27	484.713	87,73	576.742	88,64	429.155	84,51
Batubara	286.856	69,00	348.056	67,74	385.421	69,76	422.637	64,95	408.247	80,39
Biji tembaga	2.449	0,59	1.480	0,29	1.109	0,20	1.455	0,22	715	0,14
Biji nikel	18.050	4,34	37.474	7,29	46.901	8,49	64.232	9,87	4.284	0,84
Bauksit	25.911	6,23	39.634	7,71	29.799	5,39	55.557	8,54	2.087	0,41
Granit	5.144	1,24	4.468	0,87	2.002	0,36	19	0,00	0	0,00
Hasil pertambangan lainnya	13.502	3,25	17.337	3,37	19.480	3,53	32.842	5,05	13.822	2,72
Hasil sektor lainnya ²⁾	2	0,00	1	0,00	2	0,00	3	0,00	3	0,00
Jumlah	415.704	100,00	513.849	100,00	552.502	100,00	650.666	100,00	507.812	100,00

Catatan :

¹⁾ Klasifikasi komoditi berdasarkan Harmonized System (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, barang untuk diperbaiki, dan penyesuaian cakupan ekspor industri Batam. Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia.

²⁾ Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik

* Data sementara

Tabel 11. Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan (FOB) ¹⁾

Ribu dolar AS

	2010		2011		2012		2013		2014*	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Amerika	16.788.547	13,84	19.749.881	12,90	18.824.693	12,40	19.401.683	13,07	20.327.656	13,87
Amerika Utara	13.613.569	11,22	15.967.415	10,43	15.286.203	10,07	15.795.051	10,64	16.607.330	11,33
Amerika Serikat	12.911.111	10,64	15.019.944	9,81	14.497.394	9,55	15.017.442	10,11	15.851.790	10,82
Kanada	701.502	0,58	946.635	0,62	787.624	0,52	775.984	0,52	754.366	0,51
Amerika Utara Lainnya	956	0,00	836	0,00	1.185	0,00	1.626	0,00	1.174	0,00
Amerika Tengah dan Selatan	3.174.977	2,62	3.782.466	2,47	3.538.490	2,33	3.606.631	2,43	3.720.326	2,54
Argentina	277.710	0,23	352.449	0,23	310.359	0,20	336.956	0,23	237.166	0,16
Brasil	1.506.827	1,24	1.665.021	1,09	1.479.334	0,97	1.517.190	1,02	1.503.465	1,03
Meksiko	478.472	0,39	597.834	0,39	594.865	0,39	625.022	0,42	814.494	0,56
Amerika Tengah dan Selatan lainnya	911.967	0,75	1.167.162	0,76	1.153.932	0,76	1.127.463	0,76	1.165.201	0,80
Eropa	18.535.693	15,28	22.381.070	14,62	20.827.697	13,72	19.998.354	13,47	20.044.107	13,68
Uni Eropa	16.052.972	13,23	19.204.575	12,55	17.780.102	11,71	16.613.817	11,19	16.846.951	11,50
Belanda	3.542.720	2,92	4.728.965	3,09	4.473.179	2,95	4.009.880	2,70	3.909.794	2,67
Belgia	1.158.814	0,96	1.341.888	0,88	1.293.102	0,85	1.254.708	0,84	1.217.226	0,83
Inggris	1.570.807	1,29	1.627.847	1,06	1.679.815	1,11	1.618.871	1,09	1.659.576	1,13
Italia	2.252.617	1,86	2.995.989	1,96	2.279.791	1,50	2.121.981	1,43	2.287.691	1,56
Jerman	2.965.452	2,44	3.201.299	2,09	3.064.411	2,02	2.860.998	1,93	2.819.491	1,92
Perancis	844.421	0,70	1.049.478	0,69	1.116.351	0,74	1.053.698	0,71	1.018.400	0,69
Spanyol	2.062.966	1,70	2.231.984	1,46	2.059.230	1,36	1.806.692	1,22	1.938.255	1,32
Uni Eropa lainnya ²⁾	1.655.174	1,36	2.027.124	1,32	1.814.223	1,20	1.886.988	1,27	1.996.519	1,36
Rusia	596.415	0,49	852.039	0,56	866.396	0,57	934.132	0,63	1.056.775	0,72
Turki	1.063.717	0,88	1.423.668	0,93	1.361.964	0,90	1.537.295	1,04	1.447.167	0,99
Eropa lainnya	822.589	0,68	900.788	0,59	819.235	0,54	913.110	0,61	693.214	0,47
Asia dan Timur Tengah	80.276.371	66,18	103.157.274	67,40	102.731.460	67,69	99.945.259	67,30	95.970.887	65,49
ASEAN	22.215.802	18,31	26.971.924	17,62	30.797.388	20,29	29.359.595	19,77	28.840.931	19,68
Brunei Darussalam	58.651	0,05	65.327	0,04	116.854	0,08	88.496	0,06	98.866	0,07
Filipina	3.090.843	2,55	3.642.588	2,38	3.651.969	2,41	3.757.698	2,53	3.886.987	2,65
Kamboja	216.290	0,18	266.448	0,17	290.188	0,19	316.755	0,21	416.539	0,28
Laos	5.504	0,00	10.613	0,01	23.736	0,02	5.087	0,00	6.212	0,00
Malaysia	7.517.245	6,20	8.779.155	5,74	8.445.424	5,56	7.161.960	4,82	6.397.597	4,37
Myanmar	224.296	0,18	321.484	0,21	412.643	0,27	576.497	0,39	587.256	0,40
Singapura	5.537.771	4,57	7.142.675	4,67	10.136.569	6,68	9.687.013	6,52	10.015.553	6,83
Thailand	3.690.277	3,04	4.547.436	2,97	5.469.613	3,60	5.209.797	3,51	4.990.703	3,41
Vietnam	1.874.924	1,55	2.196.200	1,44	2.250.393	1,48	2.556.292	1,72	2.441.218	1,67
Hong Kong SAR	2.342.544	1,93	3.078.247	2,01	2.644.935	1,74	2.646.008	1,78	2.760.064	1,88
India	9.412.210	7,76	13.158.360	8,60	12.454.827	8,21	12.948.553	8,72	12.216.454	8,34
Irak	54.692	0,05	148.874	0,10	44.886	0,03	171.973	0,12	70.480	0,05
Jepang	15.833.786	13,05	18.135.364	11,85	17.165.696	11,31	16.025.840	10,79	14.636.828	9,99
Korea Selatan	6.772.177	5,58	7.283.875	4,76	6.657.016	4,39	5.999.024	4,04	5.725.271	3,91
Pakistan	675.786	0,56	910.807	0,60	1.375.854	0,91	1.412.034	0,95	2.048.083	1,40
Republik Rakyat Tiongkok	13.786.936	11,37	21.414.082	13,99	20.783.070	13,69	21.156.450	14,25	16.465.324	11,24
Saudi Arabia	1.108.315	0,91	1.372.845	0,90	1.764.557	1,16	1.728.591	1,16	2.155.287	1,47
Taiwan, Provinsi Tiongkok	3.164.634	2,61	4.154.619	2,71	4.084.297	2,69	3.714.616	2,50	3.891.682	2,66
Asia dan Timur Tengah lainnya	4.909.489	4,05	6.528.277	4,27	4.958.934	3,27	4.782.574	3,22	7.160.483	4,89
Australia dan Oseania	2.876.768	2,37	3.235.990	2,11	4.026.451	2,65	3.922.662	2,64	4.519.376	3,08
Australia	2.243.471	1,85	2.445.147	1,60	3.296.172	2,17	2.989.647	2,01	3.697.363	2,52
New Zealand	292.378	0,24	388.844	0,25	356.826	0,24	444.951	0,30	460.164	0,31
Australia dan Oseania Lainnya	340.919	0,28	401.999	0,26	373.454	0,25	488.064	0,33	361.849	0,25
Afrika	2.478.190	2,04	3.961.906	2,59	4.552.974	3,00	4.400.184	2,96	4.857.604	3,31

Tabel 11. Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan (FOB) ¹⁾ - Lanjutan

	2010		2011		2012		2013		2014*	
	Nilai	Pangsa (%)								
Afrika Selatan	666.756	0,55	1.409.167	0,92	1.642.411	1,08	1.245.443	0,84	1.378.907	0,94
Afrika lainnya	1.811.434	1,49	2.552.739	1,67	2.910.563	1,92	3.154.740	2,12	3.478.697	2,37
Ekspor yang tidak dapat diklasifikasikan ³⁾	351.810	0,29	555.909	0,36	811.843	0,53	832.663	0,56	817.888	0,56
Jumlah, fob	121.307.379	100,00	153.042.030	100,00	151.775.118	100,00	148.500.805	100,00	146.537.518	100,00

Catatan:

¹⁾ Klasifikasi komoditas berdasarkan Harmonized System (HS) dan bersumber dari Bank Indonesia sebagai pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia

²⁾ Terdiri dari barang seni, barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik, dan barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut

³⁾ Mencakup emas nonmoneter dan merchanting

* Data sementara

Tabel 12. Nilai Impor Menurut Kelompok Barang¹⁾

Rincian	Ribu dolar AS									
	2010		2011		2012		2013		2014*	
	Nilai	Pangsa (%)								
Barang Konsumsi	16.075.292	13,51	22.611.945	14,38	25.532.632	14,29	26.879.699	15,25	25.907.626	15,39
Makanan dan minuman, baku, untuk rumah tangga	1.154.128	0,97	1.832.692	1,17	1.537.179	0,86	1.394.325	0,79	1.541.254	0,92
Makanan dan minuman, olahan, untuk rumah tangga	2.382.616	2,00	3.533.437	2,25	2.759.331	1,54	2.812.575	1,60	2.750.515	1,63
Mobil penumpang	700.176	0,59	872.628	0,55	1.498.307	0,84	1.171.510	0,66	784.431	0,47
Alat angkutan bukan untuk industri	561.609	0,47	555.433	0,35	367.729	0,21	383.485	0,22	268.904	0,16
Barang konsumsi tahan lama	894.444	0,75	1.192.777	0,76	1.592.871	0,89	1.624.973	0,92	1.415.736	0,84
Barang konsumsi semi-tahan lama	1.141.048	0,96	1.501.594	0,95	1.921.446	1,08	2.150.785	1,22	1.953.177	1,16
Barang konsumsi tidak tahan lama	1.303.702	1,10	1.490.297	0,95	1.910.634	1,07	2.154.691	1,22	2.157.479	1,28
Bahan bakar dan pelumas, olahan, produk minyak ²⁾	7.748.089	6,51	11.465.941	7,29	13.720.367	7,68	14.736.636	8,36	14.504.300	8,61
Barang yang tidak dirinci secara spesifik	189.480	0,16	167.147	0,11	224.769	0,13	450.718	0,26	531.831	0,32
Bahan baku dan bahan penolong	85.140.528	71,57	113.151.281	71,94	126.732.417	70,93	127.649.765	72,42	121.714.342	72,28
Makanan dan minuman, baku untuk industri	3.138.468	2,64	4.112.931	2,61	4.005.713	2,24	4.348.635	2,47	4.934.832	2,93
Makanan dan minuman, olahan untuk industri	2.244.877	1,89	3.261.887	2,07	3.317.376	1,86	3.294.925	1,87	3.250.252	1,93
Bahan pasokan, baku untuk industri	4.394.192	3,69	6.679.561	4,25	5.480.589	3,07	6.180.739	3,51	5.993.853	3,56
Bahan pasokan, olahan untuk industri	37.993.141	31,94	49.204.480	31,28	58.236.091	32,59	56.624.346	32,13	56.255.219	33,41
Suku cadang dan perlengkapan untuk barang modal	12.053.134	10,13	13.831.250	8,79	18.011.245	10,08	17.191.495	9,75	15.552.241	9,24
Suku cadang dan perlengkapan untuk alat angkutan	5.723.753	4,81	6.617.550	4,21	8.267.873	4,63	8.980.793	5,10	7.128.627	4,23
Bahan bakar dan pelumas, baku	8.359.681	7,03	10.923.734	6,95	11.008.146	6,16	13.322.222	7,56	12.896.531	7,66
a.l: minyak mentah ²⁾	8.336.534	7,01	10.905.440	6,93	10.987.073	6,15	13.236.094	7,51	12.600.220	7,48
Bahan bakar dan pelumas, olahan	11.233.281	9,44	18.519.887	11,77	18.405.384	10,30	17.706.610	10,05	15.702.788	9,33
a.l: produk minyak ²⁾	9.854.156	8,28	16.590.030	10,55	15.540.944	8,70	14.408.358	8,17	12.442.789	7,39
a.l: gas elpiji ³⁾	1.196.084	1,01	1.708.094	1,09	2.626.816	1,47	3.094.502	1,76	3.039.246	1,80
Barang Modal	23.576.377	19,82	30.490.023	19,39	36.086.323	20,20	30.909.621	17,54	29.482.331	17,51
Barang modal (kecuali alat angkutan)	17.399.877	14,63	22.301.038	14,18	26.642.473	14,91	25.541.302	14,49	25.570.907	15,19
Mobil penumpang	700.176	0,59	872.628	0,55	1.498.307	0,84	1.171.510	0,66	784.431	0,47
Alat angkutan lainnya, untuk industri	5.476.323	4,60	7.316.357	4,65	7.945.543	4,45	4.196.809	2,38	3.126.993	1,86
Barang dagangan lainnya ⁴⁾	699.868	0,59	724.016	0,46	743.455	0,42	714.679	0,41	764.333	0,45
Impor yang tidak dapat diklasifikasikan ⁵⁾	83.657	0,07	71.097	0,05	43.071	0,02	32.398	0,02	25.331	0,02
Jumlah, cif	125.575.721	105,56	167.048.361	106,21	189.137.898	105,86	186.186.162	105,63	177.893.962	105,65
Asuransi dan ongkos pengangkutan	6.612.540	5,56	9.764.655	6,21	10.470.943	5,86	9.930.168	5,63	9.506.567	5,65
Jumlah, fob	118.963.181	100,00	157.283.706	100,00	178.666.955	100,00	176.255.994	100,00	168.387.396	100,00

Catatan:

¹⁾ Klasifikasi komoditas berdasarkan *Broad Economic Category (BEC)*. Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia

²⁾ Merupakan komponen impor minyak

³⁾ Merupakan komponen impor gas

⁴⁾ Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki

⁵⁾ Merupakan emas nonmoneter

* Data sementara

Tabel 13. Nilai Impor Nonmigas Menurut Komoditas (CIF)¹⁾

Ribu dolar AS

Akhir Periode	2010		2011		2012		2013		2014*	
	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %
Hasil pertanian	6.189.203	6,62	9.277.539	7,82	8.129.294	5,90	8.650.023	6,51	9.340.947	7,31
Biji coklat	89.460	0,10	62.895	0,05	62.719	0,05	77.422	0,06	342.015	0,27
Udang	19.277	0,02	49.459	0,04	51.709	0,04	63.173	0,05	60.549	0,05
Biji kopi	30.388	0,03	39.092	0,03	109.399	0,08	29.424	0,02	39.794	0,03
Ikan dan lain-lain	146.960	0,16	172.917	0,15	129.259	0,09	139.702	0,11	139.614	0,11
Rempah-rempah	15.837	0,02	396.509	0,33	153.669	0,11	30.082	0,02	71.275	0,06
Teh	17.078	0,02	24.749	0,02	28.732	0,02	24.199	0,02	19.568	0,02
Bahan nabati	2.215	0,00	1.896	0,00	1.748	0,00	1.834	0,00	1.422	0,00
Buah-buahan	635.367	0,68	792.567	0,67	834.467	0,61	653.001	0,49	781.560	0,61
Tembakau	65.458	0,07	134.434	0,11	258.929	0,19	224.698	0,17	205.136	0,16
Sayur-sayuran	410.741	0,44	557.773	0,47	470.697	0,34	612.965	0,46	612.137	0,48
Damar dan getah damar	7.485	0,01	4.131	0,00	2.174	0,00	2.163	0,00	7.671	0,01
Karet alam	29.108	0,03	27.408	0,02	39.576	0,03	36.709	0,03	31.477	0,02
Hasil pertanian lainnya	4.719.829	5,05	7.013.708	5,92	5.986.217	4,34	6.754.652	5,08	7.028.729	5,50
Hasil industri	90.887.312	97,17	115.099.993	97,08	136.202.320	98,80	129.985.389	97,76	123.625.249	96,74
Minyak sawit	34.262	0,04	24.992	0,02	509	0,00	46.251	0,03	489	0,00
Tekstil dan produk tekstil	4.868.609	5,21	6.529.501	5,51	6.788.245	4,92	7.061.634	5,31	7.178.294	5,62
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	13.187.071	14,10	15.462.441	13,04	19.690.154	14,28	19.581.953	14,73	17.966.878	14,06
Produk logam dasar	11.653.537	12,46	14.687.575	12,39	20.917.890	15,17	19.191.815	14,43	17.405.053	13,62
Karet olahan	1.005.398	1,07	1.260.895	1,06	1.624.157	1,18	1.423.535	1,07	1.303.045	1,02
Kertas dan barang dari kertas	1.576.197	1,69	1.941.297	1,64	1.931.670	1,40	1.914.713	1,44	2.026.682	1,59
Makanan olahan	3.257.389	3,48	5.203.802	4,39	4.572.444	3,32	4.471.081	3,36	4.420.755	3,46
Bahan kimia	6.982.955	7,47	8.642.410	7,29	9.284.444	6,73	9.219.775	6,93	9.172.787	7,18
Produk kayu olahan	261.166	0,28	366.068	0,31	378.610	0,27	367.416	0,28	349.575	0,27
Alas kaki	210.085	0,22	314.536	0,27	367.657	0,27	412.326	0,31	390.349	0,31
Damar tiruan, bahan plastik	4.445.234	4,75	6.270.210	5,29	7.139.882	5,18	7.827.678	5,89	7.913.466	6,19
Furniture	198.066	0,21	261.448	0,22	365.781	0,27	371.420	0,28	340.918	0,27
Kapal laut dan sejenisnya	1.775.537	1,90	2.134.241	1,80	2.006.036	1,46	1.411.337	1,06	1.452.848	1,14
Bahan kertas	1.050.033	1,12	1.180.856	1,00	1.043.749	0,76	1.259.124	0,95	1.274.317	1,00
Suku cadang kendaraan	2.539.681	2,72	3.013.552	2,54	3.890.143	2,82	3.995.442	3,01	3.527.128	2,76
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	4.454.756	4,76	5.842.187	4,93	7.580.873	5,50	4.627.083	3,48	3.266.401	2,56
Emas batangan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Suku cadang mesin	1.202.779	1,29	1.630.158	1,37	2.615.726	1,90	2.066.901	1,55	2.167.546	1,70
Asam berlemak	38.780	0,04	66.289	0,06	65.820	0,05	68.853	0,05	62.857	0,05
Komputer dan bagianya	2.220.878	2,37	2.707.714	2,28	2.641.069	1,92	2.758.276	2,07	2.466.049	1,93
Sabun mandi dan cuci	206.323	0,22	263.520	0,22	325.142	0,24	329.083	0,25	348.729	0,27
Minyak atsiri dan lainnya	608.649	0,65	683.025	0,58	849.363	0,62	1.098.519	0,83	1.013.739	0,79
Gelas dan barang dari gelas	260.798	0,28	320.015	0,27	398.987	0,29	395.404	0,30	374.272	0,29
Pupuk	1.643.583	1,76	2.587.220	2,18	2.617.943	1,90	1.744.110	1,31	1.822.385	1,43
Perlengkapan olahraga	150.409	0,16	185.708	0,16	248.572	0,18	233.121	0,18	160.259	0,13
Produk keramik	204.531	0,22	259.801	0,22	425.998	0,31	320.347	0,24	369.373	0,29
Makanan ternak	1.860.310	1,99	2.208.054	1,86	2.783.272	2,02	3.044.755	2,29	3.274.681	2,56
Margarin dan lemak lainnya	18.515	0,02	27.930	0,02	41.562	0,03	39.595	0,03	33.930	0,03
Produk farmasi	480.440	0,51	513.397	0,43	560.115	0,41	612.677	0,46	685.816	0,54
Barang dari logam mulia	12.947	0,01	11.364	0,01	29.145	0,02	22.971	0,02	19.982	0,02

Tabel 13. Nilai Impor Nonmigas Menurut Komoditas (CIF)¹⁾ - Lanjutan

Akhir Periode	2010		2011		2012		2013		2014*	
	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %
Kulit dan barang dari kulit	353.988	0,38	473.948	0,40	445.709	0,32	460.467	0,35	551.332	0,43
Preparat pembasmi kuman	216.867	0,23	277.063	0,23	289.489	0,21	407.411	0,31	392.330	0,31
Pesawat udara dan bagiannya	2.047.016	2,19	2.014.855	1,70	2.320.848	1,68	1.495.957	1,13	709.852	0,56
Bahan celup organik sintetik	298.499	0,32	349.173	0,29	378.996	0,27	441.577	0,33	486.376	0,38
Semen	66.403	0,07	65.850	0,06	206.954	0,15	240.513	0,18	249.431	0,20
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	67.848	0,07	139.190	0,12	165.928	0,12	207.286	0,16	145.336	0,11
Barang anyaman	1.401	0,00	3.740	0,00	1.751	0,00	1.354	0,00	2.387	0,00
Rotan olahan	48	0,00	81	0,00	5	0,00	73	0,00	44	0,00
Peti kemas	6.189	0,01	16.253	0,01	14.359	0,01	21.626	0,02	21.494	0,02
Gliserol dan larutan alkali	2.671	0,00	2.622	0,00	959	0,00	272	0,00	206	0,00
Hasil industri lainnya	21.417.463	22,90	27.157.012	22,90	31.192.368	22,63	30.791.657	23,16	30.277.860	23,69
Hasil pertambangan dan hasil sektor lainnya	977.403	1,04	1.197.691	1,01	1.130.859	0,82	1.302.202	0,98	1.521.495	1,19
Batubara	13.948	0,01	12.860	0,01	18.699	0,01	82.752	0,06	296.310	0,23
Biji tembaga	1.189	0,00	103.809	0,09	102.762	0,07	148.665	0,11	42.830	0,03
Biji nikel	0	0,00	0	0,00	11	0,00	6	0,00	0	0,00
Bauksit	1.042	0,00	421	0,00	716	0,00	811	0,00	280	0,00
Granit	6.808	0,01	8.853	0,01	9.883	0,01	6.971	0,01	8.205	0,01
Hasil pertambangan lainnya	954.417	1,02	1.071.747	0,90	998.788	0,72	1.062.997	0,80	1.173.870	0,92
Hasil sektor lainnya ²⁾	548.755	0,59	458.608	0,39	474.557	0,34	429.382	0,32	457.320	0,36
Impor yang tidak dapat diklasifikasikan³⁾	83.657	0,09	71.097	0,06	43.071	0,03	32.398	0,02	25.331	0,02
Jumlah, cif	98.686.329	105,51	126.104.929	106,36	145.980.103	105,89	140.399.394	105,60	134.970.342	105,61
Asuransi dan ongkos pengangkutan	5.149.237	5,51	7.538.026	6,36	8.123.524	5,89	7.440.379	5,60	7.174.953	5,61
Jumlah, fob	93.537.092	100,00	118.566.903	100,00	137.856.579	100,00	132.959.014	100,00	127.795.389	100,00

¹⁾ Klasifikasi komoditi berdasarkan Harmonized System (HS) dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki.

Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia.

²⁾ Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik, dan barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut

³⁾ Merupakan emas nonmoneter

*Data sementara

Tabel 14. Volume Impor Nonmigas Menurut Komoditas¹⁾

Akhir Periode	Ribu ton											
	2009		2010		2011		2012		2013		2014*	
Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai
Hasil pertanian	8.946	15,87	11.092	15,77	13.900	16,43	12.787	13,98	14.902	15,54	15.982	16,23
Biji coklat	28	0,05	27	0,04	19	0,02	24	0,03	31	0,03	109	0,11
Udang	6	0,01	3	0,00	6	0,01	7	0,01	8	0,01	7	0,01
Biji kopi	13	0,02	18	0,03	14	0,02	51	0,06	13	0,01	17	0,02
Ikan dan lain-lain	138	0,24	178	0,25	213	0,25	141	0,15	138	0,14	127	0,13
Rempah-rempah	22	0,04	25	0,04	72	0,08	57	0,06	31	0,03	32	0,03
Teh	6	0,01	11	0,01	19	0,02	23	0,03	20	0,02	14	0,01
Bahan nabati	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Buah-buahan	619	1,10	650	0,92	781	0,92	781	0,85	505	0,53	548	0,56
Tembakau	12	0,02	15	0,02	36	0,04	63	0,07	56	0,06	40	0,04
Sayur-sayuran	657	1,17	643	0,91	896	1,06	791	0,86	784	0,82	853	0,87
Damar dan getah damar	0	0,00	3	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	2	0,00
Karet alam	11	0,02	14	0,02	9	0,01	18	0,02	19	0,02	21	0,02
Hasil pertanian lainnya	7.432	13,18	9.505	13,51	11.830	13,98	10.831	11,84	13.296	13,86	14.213	14,43
Hasil industri	42.265	74,98	52.306	74,37	63.747	75,35	71.648	78,31	72.661	75,76	69.665	70,74
Minyak sawit	19	0,03	43	0,06	23	0,03	0	0,00	65	0,07	0	0,00
Tekstil dan produk tekstil	706	1,25	984	1,40	1.075	1,27	1.252	1,37	1.317	1,37	1.358	1,38
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	698	1,24	865	1,23	2.380	2,81	1.207	1,32	1.080	1,13	1.022	1,04
Produk logam dasar	9.120	16,18	10.215	14,52	11.551	13,65	17.652	19,29	20.758	21,64	15.476	15,71
Karet olahan	174	0,31	241	0,34	329	0,39	304	0,33	426	0,44	290	0,29
Kertas dan barang dari kertas	2.826	5,01	2.995	4,26	3.143	3,72	3.066	3,35	3.053	3,18	3.016	3,06
Makanan olahan	2.406	4,27	3.743	5,32	5.993	7,08	5.443	5,95	4.894	5,10	4.962	5,04
Bahan kimia	6.433	11,41	7.404	10,53	7.560	8,94	8.770	9,58	8.603	8,97	8.720	8,85
Produk kayu olahan	470	0,83	511	0,73	703	0,83	735	0,80	776	0,81	657	0,67
Alas kaki	31	0,05	42	0,06	52	0,06	58	0,06	57	0,06	51	0,05
Damar tiruan, bahan plastik	1.938	3,44	2.266	3,22	3.455	4,08	3.401	3,72	3.709	3,87	3.718	3,78
Furniture	62	0,11	124	0,18	142	0,17	140	0,15	142	0,15	131	0,13
Kapal laut dan sejenisnya	1.079	1,91	1.063	1,51	1.380	1,63	1.225	1,34	550	0,57	679	0,69
Bahan kertas	1.072	1,90	1.250	1,78	1.310	1,55	1.349	1,47	1.629	1,70	1.605	1,63
Suku cadang kendaraan	235	0,42	375	0,53	463	0,55	537	0,59	550	0,57	533	0,54
Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih	225	0,40	453	0,64	532	0,63	663	0,72	458	0,48	337	0,34
Emas batangan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Suku cadang mesin	115	0,20	153	0,22	204	0,24	262	0,29	187	0,20	177	0,18
Asam berlemak	27	0,05	24	0,03	31	0,04	36	0,04	59	0,06	40	0,04
Komputer dan bagiannya	61	0,11	64	0,09	60	0,07	51	0,06	49	0,05	45	0,05
Sabun mandi dan cuci	81	0,14	96	0,14	97	0,12	124	0,14	139	0,14	145	0,15
Minyak atsiri dan lainnya	69	0,12	76	0,11	83	0,10	93	0,10	113	0,12	107	0,11
Gelas dan barang dari gelas	200	0,35	302	0,43	363	0,43	403	0,44	413	0,43	386	0,39
Pupuk	2.767	4,91	4.936	7,02	6.457	7,63	6.285	6,87	5.483	5,72	6.679	6,78
Perlengkapan olahraga	43	0,08	55	0,08	73	0,09	69	0,08	62	0,06	42	0,04
Produk keramik	246	0,44	357	0,51	520	0,61	872	0,95	734	0,76	966	0,98
Makanan ternak	3.512	6,23	4.082	5,80	4.362	5,16	4.890	5,34	5.017	5,23	5.355	5,44
Margarin dan lemak lainnya	4	0,01	4	0,01	7	0,01	10	0,01	12	0,01	13	0,01
Produk farmasi	14	0,02	20	0,03	20	0,02	26	0,03	31	0,03	25	0,03
Barang dari logam mulia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Tabel 14. Volume Impor Nonmigas Menurut Komoditas¹ - Lanjutan

Akhir Periode	2009		2010		2011		2012		2013		2014*	
	Nilai	Pangsa %										
Kulit dan barang dari kulit	42	0,07	57	0,08	56	0,07	53	0,06	57	0,06	60	0,06
Preparat pembasmi kuman	36	0,06	55	0,08	53	0,06	53	0,06	69	0,07	71	0,07
Pesawat udara dan bagiannya	7	0,01	8	0,01	8	0,01	37	0,04	2	0,00	2	0,00
Bahan celup organik sintetik	50	0,09	67	0,10	63	0,07	70	0,08	78	0,08	77	0,08
Semen	1.552	2,75	1.533	2,18	1.391	1,64	3.370	3,68	3.685	3,84	4.066	4,13
Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	4	0,01	7	0,01	12	0,01	13	0,01	17	0,02	13	0,01
Barang anyaman	1	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Rotan olahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Peti kemas	1	0,00	2	0,00	2	0,00	3	0,00	5	0,01	4	0,00
Gliserol dan larutan alkali	0	0,00	8	0,01	8	0,01	2	0,00	0	0,00	0	0,00
Hasil industri lainnya	5.940	10,54	7.825	11,13	9.782	11,56	9.125	9,97	8.382	8,74	8.833	8,97
Hasil pertambangan dan hasil sektor lainnya	5.158	9,15	6.930	9,85	6.950	8,22	7.061	7,72	8.342	8,70	12.839	13,04
Batubara	56	0,10	56	0,08	48	0,06	65	0,07	496	0,52	2.260	2,29
Biji tembaga	10	0,02	0	0,00	33	0,04	39	0,04	73	0,08	23	0,02
Biji nikel	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bauksit	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00
Granit	26	0,05	24	0,03	29	0,03	42	0,05	27	0,03	26	0,03
Hasil pertambangan lainnya	5.065	8,99	6.848	9,74	6.839	8,08	6.914	7,56	7.744	8,07	10.529	10,69
Hasil sektor lainnya ²⁾	2	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Jumlah	56.371	100,00	70.330	100,00	84.598	100,00	91.498	100,00	95.907	100,00	98.487	100,00

¹⁾ Klasifikasi komoditi berdasarkan *Harmonized System (HS)* dan tidak termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki. Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia

²⁾ Terdiri dari barang seni dan barang lainnya yang tidak dirinci secara spesifik

*Data sementara

Tabel 15. Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal (CIF)¹⁾

Akhir Periode	Ribu dolar AS											
	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %
Amerika	10.077.771	13,02	12.047.861	12,21	15.688.248	12,44	16.193.572	11,09	15.874.282	11,31	14.704.458	10,89
Amerika Utara	7.594.771	9,81	8.687.002	8,80	11.068.663	8,78	11.382.731	7,80	10.871.756	7,74	9.987.897	7,40
Amerika Serikat	6.544.538	8,45	7.450.054	7,55	9.064.606	7,19	9.556.941	6,55	8.766.560	6,24	8.079.016	5,99
Kanada	1.050.228	1,36	1.236.948	1,25	1.998.298	1,58	1.809.859	1,24	2.104.103	1,50	1.907.500	1,41
Amerika Utara lainnya	n.a.	n.a.	0	0	5.759	0,00	15.931	0,01	1.094	0,00	1.380	0,00
Amerika Tengah dan Selatan	2.483.001	3,21	3.360.859	3,41	4.619.585	3,66	4.810.841	3,30	5.002.526	3,56	4.716.561	3,49
Argentina	661.009	0,85	936.672	0,95	1.577.916	1,25	1.749.601	1,20	1.683.663	1,20	1.460.787	1,08
Brasil	1.056.704	1,36	1.682.622	1,71	1.789.636	1,42	1.934.842	1,33	2.205.400	1,57	2.550.322	1,89
Meksiko	139.791	0,18	203.240	0,21	394.537	0,31	566.649	0,39	516.890	0,37	186.926	0,14
Amerika Tengah dan Selatan lainnya	625.497	0,81	538.326	0,55	857.496	0,68	559.748	0,38	596.573	0,42	518.526	0,38
Eropa	9.764.632	12,61	11.463.569	11,62	14.176.998	11,24	17.366.142	11,90	17.387.563	12,38	15.541.607	11,51
Uni Eropa	7.839.092	10,12	8.745.835	8,86	11.045.709	8,76	13.533.662	9,27	13.374.868	9,53	12.698.423	9,41
Belanda	546.860	0,71	597.250	0,61	808.102	0,64	843.705	0,58	865.846	0,62	908.425	0,67
Belgia	435.898	0,56	533.788	0,54	570.577	0,45	614.244	0,42	649.753	0,46	581.453	0,43
Inggris	631.014	0,82	809.153	0,82	1.030.182	0,82	1.280.271	0,88	1.063.312	0,76	898.720	0,67
Italia	737.360	0,95	839.860	0,85	1.089.934	0,86	1.506.481	1,03	1.680.403	1,20	1.721.204	1,28
Jerman	2.334.153	3,01	2.654.621	2,69	3.085.809	2,45	4.039.148	2,77	4.377.945	3,12	4.094.374	3,03
Perancis	1.171.507	1,51	1.128.030	1,14	1.544.263	1,22	1.607.593	1,10	1.525.163	1,09	1.292.369	0,96
Spanyol	221.544	0,29	305.056	0,31	390.512	0,31	521.227	0,36	573.305	0,41	553.608	0,41
Uni Eropa lainnya ²⁾	1.760.757	2,27	1.878.076	1,90	2.526.330	2,00	3.120.994	2,14	2.639.142	1,88	2.648.269	1,96
Rusia	553.917	0,72	1.051.174	1,07	1.255.824	1,00	1.743.576	1,19	2.038.204	1,45	1.184.540	0,88
Turki	241.857	0,31	286.002	0,29	334.116	0,26	409.520	0,28	257.638	0,18	259.152	0,19
Eropa lainnya	1.129.767	1,46	1.380.558	1,40	1.541.349	1,22	1.679.384	1,15	1.716.853	1,22	1.399.492	1,04
Asia dan Timur Tengah	52.429.344	67,72	68.553.280	69,47	88.138.518	69,89	104.529.392	71,61	99.498.165	70,87	96.454.421	71,46
ASEAN	18.435.816	23,81	18.551.532	18,80	25.074.815	19,88	31.711.907	21,72	30.210.287	21,52	29.609.724	21,94
Brunei Darussalam	1.995	0,00	5.878	0,01	8.941	0,01	14.703	0,01	6.406	0,00	26.157	0,02
Filipina	549.314	0,71	585.439	0,59	751.789	0,60	795.015	0,54	770.294	0,55	693.269	0,51
Kamboja	3.361	0,00	3.995	0,00	7.324	0,01	11.053	0,01	17.752	0,01	18.722	0,01
Laos	1.393	0,00	615	0,00	1.292	0,00	3.278	0,00	7.543	0,01	51.265	0,04
Malaysia	3.261.762	4,21	4.035.334	4,09	5.218.598	4,14	6.339.805	4,34	5.913.357	4,21	5.752.358	4,26
Myanmar	26.755	0,03	31.617	0,03	69.558	0,06	63.359	0,04	72.997	0,05	122.393	0,09
Singapura	9.578.610	12,37	5.460.689	5,53	6.548.829	5,19	10.745.357	7,36	10.117.172	7,21	10.051.296	7,45
Thailand	4.514.565	5,83	7.325.871	7,42	10.135.104	8,04	11.221.263	7,69	10.624.689	7,57	9.688.566	7,18
Vietnam	484.000	0,63	1.102.095	1,12	2.333.380	1,85	2.518.074	1,72	2.680.076	1,91	3.205.697	2,38
Hong Kong SAR	1.491.482	1,93	1.759.224	1,78	2.338.465	1,85	1.897.323	1,30	1.956.494	1,39	1.893.022	1,40
India	2.089.420	2,70	2.690.908	2,73	3.856.988	3,06	3.991.576	2,73	3.756.065	2,68	3.559.680	2,64
Irak	1.124	0,00	1.176	0,00	703	0,00	200	0,00	49	0,00	338	0,00
Jepang	9.712.649	12,54	15.867.587	16,08	18.461.913	14,64	22.624.472	15,50	18.934.319	13,49	16.805.661	12,45
Korea Selatan	3.750.228	4,84	5.457.507	5,53	7.243.088	5,74	8.276.805	5,67	8.787.367	6,26	7.749.484	5,74
Pakistan	63.082	0,08	70.303	0,07	190.042	0,15	271.276	0,19	162.555	0,12	158.951	0,12
Republik Rakyat Tiongkok	13.309.401	17,19	19.052.020	19,31	24.222.690	19,21	29.030.885	19,89	29.488.605	21,00	30.495.703	22,59

Tabel 15. Nilai Impor Nonmigas Menurut Negara Asal (CIF)¹⁾ - Lanjutan

Akhir Periode	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %	Nilai	Pangsa %
Saudi Arabia	458.163	0,59	742.071	0,75	948.559	0,75	1.021.447	0,70	973.749	0,69	967.809	0,72
Taiwan, Provinsi Tiongkok	1.965.079	2,54	2.794.787	2,83	3.681.422	2,92	4.198.366	2,88	4.142.844	2,95	3.630.166	2,69
Asia dan Timur Tengah lainnya	1.152.900	1,49	1.566.165	1,59	2.119.833	1,68	1.505.136	1,03	1.085.831	0,77	1.583.881	1,17
Australia dan Oseania	4.095.998	5,29	4.925.665	4,99	5.756.139	4,56	5.767.039	3,95	5.761.917	4,10	6.365.265	4,72
Australia	3.328.651	4,30	4.147.752	4,20	4.985.847	3,95	5.004.988	3,43	4.879.329	3,48	5.485.492	4,06
Selandia Baru	558.322	0,72	722.892	0,73	726.069	0,58	692.249	0,47	796.396	0,57	837.698	0,62
Australia dan Oseania lainnya	n.a.	n.a.	55.020	0,06	44.223	0,04	69.803	0,05	86.192	0,06	42.075	0,03
Afrika	671.638	0,87	1.158.485	1,17	1.895.420	1,50	1.663.061	1,14	1.473.965	1,05	1.477.325	1,09
Afrika Selatan	298.413	0,39	520.756	0,53	687.657	0,55	649.171	0,44	622.865	0,44	475.773	0,35
Afrika lainnya	373.225	0,48	637.729	0,65	1.207.764	0,96	1.013.890	0,69	851.101	0,61	1.001.552	0,74
Impor yang tidak dapat diklasifikasikan³⁾	384.702	0,50	537.468	0,54	449.606	0,36	460.896	0,32	403.501	0,29	427.267	0,32
Jumlah, cif	77.424.085	100,00	98.686.329	100,00	126.104.929	100,00	145.980.103	100,00	140.399.394	100,00	134.970.342	100,00

¹⁾ Data bersumber dari Bank Indonesia sebagai tabel pendukung data Neraca Pembayaran Indonesia

²⁾ Pemekaran menjadi 27 negara sejak Bulgaria dan Romania bergabung dengan Uni Eropa pada Januari 2007

³⁾ Terdiri dari barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut, dan barang untuk diperbaiki

*Data sementara

Tabel 16. Nilai Ekspor Minyak dan Gas (FOB)

Rincian	2009	2010	2011	2012	2013*	2014**
Nilai Ekspor (juta dolar AS)						
Minyak Bumi dan produknya	8.290	11.635	14.821	14.648	14.675	13.125
Gas	9.002	12.840	17.663	17.860	18.336	16.989
- LNG	7.879	11.708	15.204	12.448	12.306	11.704
- LPG	24	8	74	9	11	4
- Gas Alam	980	900	2.164	5.402	6.020	5.280
- Gas Lainnya	119	224	220	0	0	0
Total	17.292	24.475	32.484	32.507	33.011	30.114
Volume Ekspor						
Minyak Bumi dan produknya (juta barel)	152	156	149	132	138	131
Gas	1.452	1.896	1.711	1.411	1.528	1.304
- LNG (juta MMBTU)	1.115	1.506	1.264	931	975	885
- LPG (ribu MT)	46	11	81	8	10	4
- Gas Alam (juta MMBTU)	137	123	207	472	543	414
- Gas Lainnya	155	256	158	0	0	0
Total	1.604	2.051	1.860	1.543	1.667	1.435

MMBTU: Million British Thermal Unit

MT: Metric Ton

Tabel 17. Uang Beredar

Miliar rupiah

Akhir Periode	M1 ¹⁾		Uang Kuasi ²⁾		M2 ³⁾		
	Posisi	"Pangsa (%)"	Posisi	"Pangsa (%)"	Posisi	Perubahan	
						Tahunan	Triwulanan
2009	515.824	24,09	1.622.055	75,75	2.141.384	12,95	6,09
2010	605.411	24,52	1.856.720	75,12	2.471.206	15,32	8,55
2011	722.991	25,13	2.139.840	74,37	2.877.220	16,43	8,85
2012							
Januari	696.281	24,37	2.147.437	75,16	2.857.127	17,25	
Februari	683.208	23,96	2.153.062	75,49	2.852.005	17,84	
Maret	714.215	24,51	2.185.208	74,98	2.914.194	18,88	1,29
April	720.876	24,61	2.193.285	74,87	2.929.610	20,34	
Mei	749.403	25,03	2.229.990	74,47	2.994.474	20,97	
Juni	779.367	25,53	2.256.809	73,93	3.052.786	21,01	4,76
Juli	771.739	25,24	2.272.665	74,33	3.057.336	19,22	
Agustus	772.378	24,98	2.307.083	74,62	3.091.568	17,94	
September	795.460	25,43	2.321.262	74,20	3.128.179	18,34	2,47
Okttober	774.923	24,49	2.378.880	75,18	3.164.443	18,17	
November	801.345	24,98	2.396.157	74,70	3.207.908	17,53	
Desember	841.652	25,45	2.455.435	74,24	3.307.508	14,95	5,73
2013							
Januari	787.860	24,10	2.470.101	75,57	3.268.789	14,41	
Februari	786.549	23,98	2.483.011	75,69	3.280.420	15,02	
Maret	810.055	24,38	2.500.342	75,25	3.322.529	14,01	0,45
April	832.213	24,76	2.515.813	74,85	3.360.928	14,72	
Mei	822.876	24,02	2.588.094	75,54	3.426.305	14,42	
Juni	858.499	25,15	2.543.285	74,51	3.413.379	11,81	2,73
Juli	879.986	25,10	2.608.175	74,38	3.506.574	14,69	
Agustus	855.783	24,43	2.625.946	74,98	3.502.420	13,29	
September	867.721	24,21	2.691.903	75,11	3.584.017	14,57	5,00
Okttober	856.146	23,94	2.697.208	75,41	3.576.758	13,03	
November	870.458	24,08	2.719.258	75,23	3.614.408	12,67	
Desember	887.081	23,78	2.820.311	75,61	3.730.197	12,78	4,08
2014							
Januari	842.678	23,07	2.787.449	76,32	3.652.349	11,73	
Februari	834.532	22,91	2.787.035	76,50	3.643.059	11,05	
Maret	853.502	23,32	2.785.176	76,09	3.660.606	10,18	(1,87)
April	880.470	23,60	2.828.686	75,83	3.730.376	10,99	
Mei	906.727	23,93	2.860.135	75,48	3.789.279	10,59	
Juni	945.718	24,46	2.903.415	75,10	3.865.891	13,26	5,61
Juli	918.566	23,58	2.959.732	75,97	3.895.981	11,11	
Agustus	895.827	23,00	2.982.674	76,57	3.895.374	11,22	
September	949.168	23,67	3.044.842	75,93	4.010.147	11,89	3,73
Okttober	940.349	23,37	3.066.421	76,19	4.024.489	12,52	
November	955.535	23,44	3.099.350	76,03	4.076.670	12,79	
Desember	942.221	22,58	3.209.475	76,90	4.173.327	11,88	4,07

¹⁾ Terdiri atas uang kartal dan giro²⁾ Terdiri atas deposito berjangka dan tabungan, dalam rupiah dan valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk³⁾ Terdiri atas uang beredar dalam arti sempit (M1), uang kuasi, dan surat berharga selain saham dengan sisa jangka waktu s.d 1 tahun⁴⁾ Sejak periode data Januari 2012 dilakukan perluasan cakupan data BPR melalui penambahan BPR Syariah

Tabel 18. Perubahan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Rincian	2009	2010	2011	2012	2013	2014				Miliar rupiah
						I	II	III	IV	
Uang Beredar										
M2	2.141.384	2.471.206	2.877.220	3.307.508	3.730.197	3.660.298	3.865.758	4.009.857	4.170.731	
M1	515.824	605.411	722.991	841.652	887.081	853.497	945.724	949.173	942.145	
Kartal	226.006	260.227	307.760	361.897	399.606	377.433	381.644	395.234	419.185	
Giral	289.818	345.184	415.231	479.755	487.475	476.065	564.080	553.939	522.960	
Kuasi	1.622.055	1.856.720	2.139.840	2.455.435	2.820.311	2.784.873	2.903.277	3.044.547	3.206.956	
Faktor yang Memengaruhi	2.141.384	2.471.206	2.877.220	3.307.508	3.730.197	3.660.298	3.865.758	4.009.857	4.170.731	
Aktiva Luar Negeri Bersih	679.448	865.121	912.174	965.442	1.011.361	987.705	1.077.147	1.114.215	1.105.783	
Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat	429.406	368.717	351.177	389.827	406.615	308.632	325.321	345.783	416.871	
Tagihan Kepada Sektor Lainnya	1.538.918	1.910.022	2.383.823	2.917.452	3.526.531	3.548.864	3.717.248	3.822.938	3.960.150	
Tagihan Kepada Pemerintah Daerah	1.017	1.594	1.410	2.790	4.726	5.219	5.709	6.083	6.677	
Tagihan Kepada Sektor Swasta	1.403.686	1.684.207	2.118.376	2.581.327	3.098.225	3.113.022	3.259.185	3.349.075	3.487.206	
Aktiva Lainnya Bersih	-119.293	-121.460	-29.895	17.778	33.977	34.997	27.471	42.762	47.845	

1) Sejak periode data Januari 2012 dilakukan perluasan cakupan data BPR melalui penambahan BPR Syariah

Tabel 19. Suku Bunga Deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Kelompok Bank¹⁾

Jangka Waktu	Persen											
	Desember 2009		Desember 2010		Desember 2011		Desember 2012		Desember 2013		Desember 2014	
	Rupiah	Valas										
Bank Persero												
1 bulan	6,59	2,94	6,48	2,08	6,04	1,32	5,22	0,95	7,15	1,11	8,12	1,81
3 bulan	7,34	3,36	6,73	2,07	6,62	2,11	5,54	1,11	7,60	1,38	8,73	1,61
6 bulan	7,7	3,21	6,55	2,05	6,54	2,05	5,58	1,98	6,84	1,37	8,83	1,99
12 bulan	9,4	3,24	6,93	2,78	6,94	1,47	5,91	1,66	6,88	1,69	8,80	1,75
24 bulan	8,39	2,9	7,66	2,62	6,4	1,25	5,87	1,23	8,19	0,94	9,34	0,65
Bank Swasta Nasional												
1 bulan	7,02	1,92	6,94	1,91	6,62	1,81	5,96	2,06	7,55	2,60	8,05	2,76
3 bulan	7,55	2,03	7,06	1,85	6,91	2,03	5,81	2,14	8,41	2,82	9,03	2,64
6 bulan	7,81	2,26	7,06	1,81	7,28	2,41	6,18	2,40	7,81	1,45	9,35	1,09
12 bulan	9,05	3,33	6,83	2,24	7,05	1,93	5,82	2,47	7,32	1,80	9,10	1,52
24 bulan	10,45	2,49	9,19	2,28	5,83	0,41	4,23	2,63	7,44	1,15	7,70	1,04
Bank Pemerintah Daerah												
1 bulan	7,69	3,68	8,07	1,98	7,39	2,09	5,92	2,03	8,53	2,48	9,04	2,34
3 bulan	8,23	3,96	8,59	2	8,04	6,29	6,69	2,48	7,53	2,51	9,11	2,53
6 bulan	9,17	4,14	9,99	1,49	8,24	1	6,60	1,55	7,61	2,64	9,54	2,59
12 bulan	10,93	4,48	12,07	1,3	8,41	1,28	7,08	1,04	6,79	2,39	8,58	2,52
24 bulan	8,04	-	7,73	-	7,63	-	6,65	1,20	7,43	3,28	7,33	2,67
Bank Asing & Campuran												
1 bulan	6,68	1,74	7,69	2,64	5	1,19	4,61	1,51	7,51	1,67	7,51	1,37
3 bulan	6,85	2,09	7,16	1,79	5,74	1,62	5,54	1,90	7,98	1,52	8,57	1,41
6 bulan	7,45	2,26	6,97	2,59	6,47	1,74	6,04	2,04	8,17	2,02	9,23	1,52
12 bulan	9,73	2,05	6,81	2,19	6,64	1,51	6,19	1,86	6,90	2,42	9,50	2,40
24 bulan	7,37	-	4,04	2,5	6,64	1,17	6,20	0,92	9,18	1,46	10,01	1,40
Bank Umum												
1 bulan	6,87	2,42	6,83	2,05	6,35	1,53	5,58	1,48	7,92	1,80	8,58	2,00
3 bulan	7,48	2,79	7,06	1,93	6,81	1,9	5,76	1,86	7,61	2,07	8,94	2,18
6 bulan	7,87	2,95	7,2	2,03	7,19	2,11	6,05	2,20	7,49	2,10	9,30	2,23
12 bulan	9,55	2,96	7,88	2,56	7,06	1,69	6,09	2,09	6,89	2,14	8,79	2,25
24 bulan	9,1	2,77	8,11	2,43	6,33	0,8	5,47	1,63	8,17	2,01	9,26	1,96

¹⁾ Rata-rata tertimbang pada akhir periode.

Tabel 20. Pasar Uang Antarbank di Jakarta (Rata-rata Volume Transaksi PUAB Pagi dan Sore Berbagai Tenor)¹⁾

Akhir Periode	Nilai Transaksi (Miliar Rupiah)	Suku Bunga Rata-rata Tertimbang (Persen per Tahun)	Akhir Periode	Nilai Transaksi (Miliar Rupiah)	Suku Bunga Rata-rata Tertimbang (Persen per Tahun)
2009¹⁾			2012		
Januari	5.616	9,04	Januari	5.622	4,36
Februari	7.053	8,44	Februari	5.352	3,84
Maret	9.353	8,05	Maret	5.567	3,77
Januari - Maret	7.341	8,51	Januari - Maret	5.514	3,99
April	9.195	7,75	April	6.334	3,77
Mei	10.175	7,46	Mei	12.622	3,80
Juni	10.319	6,95	Juni	15.603	4,01
April - Juni	9.896	7,39	April - Juni	11.520	3,86
Juli	8.993	6,68	Juli	11.225	4,08
Agustus	10.265	6,39	Agustus	12.561	4,23
September	8.364	6,33	September	8.454	4,15
Juli - September	9.207	6,47	Juli - September	10.747	4,15
Oktober	8.372	6,37	Oktober	10.804	4,19
November	7.092	6,33	November	8.808	4,21
Desember	7.986	6,31	Desember	9.157	4,29
Oktober - Desember	7.817	6,34	Oktober - Desember	9.590	4,23
2010			2013		
Januari	7.649	6,27	Januari	8.379	4,24
Februari	9.279	6,20	Februari	9.550	4,23
Maret	9.979	6,18	Maret	11.198	4,24
Januari - Maret	8.997	6,22	Januari - Maret	9.709	4,24
April	10.251	6,11	April	11.747	4,23
Mei	11.087	6,17	Mei	12.066	4,23
Juni	9.277	6,21	Juni	14.242	4,41
April - Juni	10.162	6,16	April - Juni	12.685	4,29
Juli	9.002	6,20	Juli	9.525	4,84
Agustus	10.338	6,23	Agustus	10.444	5,16
September	9.214	6,20	September	10.369	5,73
Juli - September	9.519	6,21	Juli - September	10.113	5,24
Oktober	7.832	5,91	Oktober	11.110	5,89
November	7.281	5,64	November	10.296	6,09
Desember	8.030	5,68	Desember	9.947	6,26
Oktober - Desember	7.714	5,74	Oktober - Desember	10.451	6,08
2011			2014		
Januari	10.341	5,87	Januari	9.720	6,45
Februari	10.567	6,10	Februari	9.046	6,54
Maret	9.493	6,24	Maret	11.503	6,56
Januari - Maret	10.134	6,07	Januari - Maret	10.089	6,52
April	11.222	6,25	April	12.088	6,56
Mei	12.534	6,28	Mei	11.133	6,55
Juni	13.033	6,12	Juni	13.002	6,54
April - Juni	12.263	6,22	April - Juni	12.074	6,55
Juli	11.738	6,03	Juli	14.999	6,45
Agustus	9.019	5,91	Agustus	9.936	6,46
September	9.304	5,45	September	10.928	6,16
Juli - September	10.020	5,80	Juli - September	11.954	6,36
Oktober	10.434	5,15	Oktober	9.215	5,95
November	10.539	4,76	November	9.242	5,89
Desember	9.288	4,59	Desember	11.796	5,64
Oktober - Desember	10.087	4,83	Oktober - Desember	10.084	5,83

1) Angka rata-rata harian

Tabel 21. Penerbitan, Pelunasan, dan Posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

				Miliar rupiah
Akhir Periode	Penerbitan	Pelunasan	Posisi	
Januari - Desember 2003	1.225.665	1.197.376	105.402	
Januari - Desember 2004	1.194.384	1.197.054	102.732	
Januari - Desember 2005	1.119.549	1.100.922	70.047	
Januari - Desember 2006	2.145.485	2.010.322	207.800	
Januari - Desember 2007	3.204.778	3.163.851	248.727	
2008				
Januari	408.820	381.966	290.164	
Februari	277.046	272.182	276.359	
Maret	153.484	220.201	260.664	
April	133.032	132.180	223.941	
Mei	204.047	232.809	216.436	
Juni	151.165	170.455	165.446	
Juli	199.534	187.961	182.312	
Agustus	114.445	139.227	159.975	
September	72.517	105.854	135.914	
Oktober	107.901	87.435	111.705	
November	143.937	114.246	156.894	
Desember	147.453	136.863	168.901	
2009				
Januari	156.141	161.903	206.450	
Februari	134.384	125.951	235.224	
Maret	107.870	109.849	233.754	
April	141.864	141.112	230.285	
Mei	85.000	94.850	232.073	
Juni	97.942	88.814	231.392	
Juli	150.318	147.013	235.519	
Agustus	113.259	125.519	234.585	
September	187.680	177.035	217.287	
Oktober	198.801	180.199	240.631	
November	184.877	173.205	243.719	
Desember	247.555	238.642	253.756	
2010				
Januari	232.791	192.349	295.965	
Februari	221.447	213.564	303.847	
Maret	183.931	189.868	297.910	
April	150.270	104.374	343.806	
Mei	78.287	123.120	298.973	
Juni	91.466	120.781	269.658	
Juli	61.048	95.981	234.724	
Agustus	73.625	38.100	270.249	
September	64.161	82.625	251.785	
Oktober	36.449	63.227	225.006	
November	59.999	71.445	213.561	
Desember	55.000	68.448	200.113	
2011				
Januari	25.000	29.799	195.314	
Februari	14.000	14.680	194.635	
Maret	45.525	10.012	230.148	
April	23.422	23.499	230.071	
2012				
Januari	10.000	23.422	106.355	
Februari	5.000	12.281	99.074	
Maret	10.423	15.000	94.497	
April	5.000	4.000	95.497	
Mei	7.167	7.000	95.664	
Juni	2.070	8.000	89.734	
Juli	6.285	13.841	82.178	
Agustus	8.240	8.941	81.477	
September	14.003	27.292	68.188	
Oktober	11.372	10.000	69.560	
November	11.245	5.000	75.805	
Desember	13.491	10.423	78.873	
2013				
Januari	10.399	5.000	84.272	
Februari	10.965	7.167	88.070	
Maret	6.000	2.070	91.999	
April	9.665	6.285	95.379	
Mei	7.590	8.240	94.729	
Juni	1.194	14.003	81.920	
Juli	3.553	11.372	74.101	
Agustus	3.223	11.245	66.079	
September	12.386	13.491	64.974	
Oktober	34.685	10.399	89.260	
November	11.000	10.965	89.295	
Desember	8.097	6.000	91.392	
2014				
Januari	9.720	9.665	91.447	
Februari	8.000	7.590	91.857	
Maret	12.846	1.194	103.510	
April	10.609	3.553	110.566	
Mei	7.000	3.223	114.342	
Juni	8.000	12.386	109.957	
Juli	10.000	34.685	85.272	
Agustus	8.000	11.000	82.272	
September	5.000	8.097	79.175	
Oktober	12.275	9.720	81.730	
November	8.875	8.000	82.605	
Desember	19.140	12.846	88.899	

Keterangan:

Penerbitan SBI dimulai pada bulan Februari 1984, dan sejak Juli 1998 penjualan SBI dilakukan melalui lelang dengan sistem SOR (*Stop Out Rate*)

Tabel 22. Penghimpunan Dana oleh Bank Umum¹⁾

Akhir Periode							Miliar rupiah	
	Giro			Deposito			Tabungan	Jumlah
	Dalam Rupiah	Dalam Valas	Sub Jumlah	Dalam Rupiah ²⁾	Dalam Valas	Sub Jumlah		
2009	283.498	124.454	407.952	739.927	138.169	878.096	602.446	1.884.669
2010	359.571	144.525	504.096	903.166	137.629	1.040.795	728.903	2.251.183
2011								
Maret	353.449	157.287	510.736	924.401	139.318	1.063.719	719.320	2.293.775
Juni	400.536	146.137	546.672	945.202	132.275	1.077.477	750.052	2.374.201
September	397.656	145.177	542.833	994.655	145.324	1.139.979	793.297	2.476.109
Desember	445.073	160.012	605.085	1.043.418	156.183	1.199.600	893.699	2.698.385
2012								
Januari	434.474	167.378	601.852	1.054.033	157.844	1.211.877	877.772	2.691.502
Februari	425.927	162.760	588.687	1.058.547	162.411	1.220.958	879.787	2.689.432
Maret	451.827	165.349	617.176	1.081.141	165.933	1.247.074	884.564	2.748.813
April	456.285	161.059	617.345	1.078.618	166.675	1.245.292	899.097	2.761.734
Mei	481.790	173.414	655.205	1.086.451	177.382	1.263.833	908.739	2.827.777
Juni	494.271	180.299	674.570	1.082.394	182.292	1.264.686	934.301	2.873.557
Juli	483.977	181.055	665.031	1.086.539	189.150	1.275.689	943.524	2.884.244
Agustus	472.153	179.608	651.762	1.099.383	189.449	1.288.832	965.724	2.906.318
September	500.243	177.663	677.906	1.109.781	202.884	1.312.665	976.362	2.966.933
Oktober	477.446	185.581	663.027	1.130.604	207.154	1.337.758	989.202	2.989.987
November	504.893	189.154	694.046	1.130.584	209.591	1.340.175	1.007.332	3.041.554
Desember	518.969	191.431	710.400	1.139.847	197.494	1.337.341	1.071.485	3.119.227
2013								
Januari	497.549	207.387	704.935	1.151.276	193.492	1.344.768	1.056.420	3.106.123
Februari	498.462	213.755	712.217	1.168.643	188.594	1.357.238	1.049.606	3.119.061
Maret	512.086	200.446	712.532	1.193.162	201.122	1.394.284	1.041.999	3.148.816
April	542.835	200.587	743.423	1.203.689	196.745	1.400.434	1.052.659	3.196.515
Mei	524.754	227.048	751.803	1.225.016	215.093	1.440.109	1.055.548	3.247.460
Juni	549.835	215.574	765.409	1.187.850	217.520	1.405.370	1.060.350	3.231.128
Juli	535.400	221.495	756.894	1.205.923	229.953	1.435.876	1.090.045	3.282.815
Agustus	533.739	231.506	765.246	1.201.286	241.434	1.442.720	1.091.658	3.299.624
September	547.119	255.443	802.561	1.221.121	253.686	1.474.807	1.120.140	3.397.508
Oktober	529.958	254.920	784.878	1.240.512	239.703	1.480.215	1.114.720	3.379.812
November	535.496	274.192	809.689	1.244.092	230.826	1.474.918	1.131.813	3.416.420
Desember								
2014								
Januari	503.642	255.953	759.595	1.320.753	245.940	1.566.693	1.185.418	3.511.706
Februari	509.397	254.912	764.310	1.336.138	236.201	1.572.340	1.183.756	3.520.405
Maret	518.026	238.915	756.941	1.366.384	235.923	1.602.307	1.166.126	3.525.374
April	548.203	243.945	792.148	1.399.640	233.559	1.633.199	1.175.782	3.601.128
Mei	566.333	264.296	830.629	1.404.036	250.298	1.654.334	1.166.658	3.651.621
Juni	609.768	246.784	856.552	1.434.774	259.759	1.694.533	1.177.601	3.728.685
Juli	506.114	241.083	747.197	1.463.701	252.643	1.716.344	1.214.085	3.677.626
Agustus	539.377	244.008	783.384	1.501.252	253.114	1.754.366	1.203.749	3.741.500
September	601.100	256.241	857.341	1.529.918	268.804	1.798.723	1.216.709	3.872.773
Oktober	590.315	269.086	859.401	1.559.042	256.056	1.815.098	1.212.299	3.886.798
November	601.316	271.702	873.018	1.570.637	257.911	1.828.548	1.228.516	3.930.082
Desember	576.870	268.797	845.667	1.592.501	274.853	1.867.354	1.296.797	4.009.818

¹⁾ Tidak termasuk dana milik pemerintah dan bukan penduduk

²⁾ Termasuk sertifikat deposito

Tabel 23. Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank¹⁾

Akhir Periode	Bank Persero		Bank Pemerintah Daerah		Bank Swasta Nasional		Bank Asing & Campuran		Bank Umum		Persen
	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	
2009	13,63	12,56	13,91	12,54	14,09	13,51	11,73	12,22	13,69	12,96	
2010	13,06	10,81	13,57	12,44	13,02	13,20	10,23	11,82	12,83	12,28	
2011											
Maret	11,68	10,61	13,56	12,50	12,96	13,03	9,45	10,96	12,32	12,18	
Juni	11,52	10,60	13,57	12,55	12,81	12,97	9,55	10,65	12,24	12,13	
September	12,51	10,57	13,70	12,54	12,63	12,89	9,14	10,11	12,39	12,06	
Desember	12,37	10,39	13,52	12,40	12,34	12,64	8,71	14,89	12,16	12,04	
2012											
Januari	12,39	10,21	13,47	12,37	12,34	12,58	8,52	9,71	12,14	11,73	
Februari	12,38	10,16	11,28	11,24	12,36	12,54	8,25	9,63	12,02	11,62	
Maret	12,19	10,12	13,62	12,40	12,27	12,42	8,25	9,44	12,01	11,62	
April	12,05	10,05	13,64	12,20	12,11	12,38	8,04	9,46	11,86	11,56	
Mei	11,95	10,01	13,62	12,22	12,06	12,31	7,97	9,43	11,78	11,51	
Juni	12,00	9,98	13,63	12,33	12,02	12,23	7,98	9,54	11,79	11,46	
Juli	11,99	9,98	13,64	12,32	12,03	12,18	7,93	9,50	11,78	11,42	
Agustus	11,97	9,92	13,73	12,27	11,99	12,11	7,96	9,52	11,73	11,35	
September	11,91	9,94	13,76	12,29	11,95	12,10	7,96	9,58	11,70	11,36	
Oktober	11,93	9,86	13,76	12,31	11,88	12,03	8,00	9,60	11,68	11,29	
November	11,83	9,92	13,74	12,32	11,81	11,97	7,95	8,93	11,61	11,24	
Desember	11,70	10,08	13,66	12,25	11,68	11,88	7,90	9,47	11,49	11,27	
2013											
Januari	11,75	10,13	13,60	12,18	11,68	11,88	8,00	9,55	11,49	11,29	
Februari	11,67	10,09	13,71	12,20	11,64	11,87	8,03	9,55	11,45	11,27	
Maret	11,72	10,07	13,44	12,20	11,58	11,82	8,04	9,44	11,44	11,24	
April	11,75	10,07	13,66	12,25	11,53	11,77	8,05	9,45	11,44	11,21	
Mei	11,78	10,04	13,63	12,27	11,55	11,72	8,03	9,43	11,46	11,17	
Juni	11,79	10,35	13,60	12,24	11,46	11,67	8,11	9,49	11,41	11,14	
Juli	11,89	10,46	13,59	12,23	11,85	11,86	8,46	9,66	11,66	11,29	
Agustus	11,69	10,54	13,62	12,26	11,90	11,93	8,74	9,90	11,63	11,37	
September	11,71	10,53	13,61	12,27	12,15	12,16	9,23	10,24	11,80	11,50	
Oktober	11,86	10,72	13,46	12,23	12,26	12,28	9,47	10,46	11,93	11,65	
November	11,94	10,79	13,46	12,20	12,42	12,39	9,69	10,55	12,06	11,73	
Desember	11,94	10,84	13,37	12,23	12,55	12,51	9,84	10,71	12,12	11,82	
2014											
Januari	12,05	10,91	13,34	12,21	12,68	12,63	9,96	10,87	12,23	11,92	
Februari	12,06	10,96	13,34	12,27	12,86	12,69	10,09	11,04	12,33	11,98	
Maret	12,09	10,98	13,36	12,23	12,87	12,72	10,20	10,97	12,37	12,00	
April	12,23	11,04	13,30	12,34	12,79	12,77	10,19	10,99	12,38	12,06	
Mei	12,38	11,13	13,19	12,18	13,19	12,96	10,25	11,04	12,63	12,18	
Juni	12,26	11,20	13,24	12,21	13,29	13,02	10,27	11,00	12,63	12,24	
Juli	12,34	11,40	13,27	12,22	13,36	13,06	10,41	10,78	12,70	12,32	
Agustus	12,42	11,43	13,21	12,22	13,43	13,07	10,44	10,91	12,76	12,34	
September	12,44	11,44	13,24	12,23	13,43	13,08	10,44	10,94	12,78	12,34	
Oktober	12,52	11,48	13,72	12,51	13,39	13,13	10,49	10,94	12,82	12,39	
November	12,53	11,48	13,84	12,40	13,41	13,13	10,41	10,90	12,84	12,38	
Desember	12,50	11,47	13,63	12,38	13,36	13,11	10,49	10,93	12,79	12,36	

1) Rata-rata tertimbang

Tabel 24. Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Sektor Ekonomi¹⁾

Rincian	2009	2010	2011	2012	2013	2014				Miliar rupiah
						I	II	III	IV	
Kredit dalam Rupiah	1.246.077	1.522.859	1.877.355	2.327.325	2.775.760	2.820.894	2.963.102	3.029.018	3.126.394	
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha	799.403	976.367	1.198.618	1.516.435	1.839.697	1.872.887	1.972.259	2.016.574	2.079.409	
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	68.183	76.537	98.141	133.141	162.546	167.584	177.810	183.500	194.363	
Pertambangan dan Penggalian	11.462	13.102	17.837	24.658	29.404	27.380	28.191	27.964	29.139	
Industri Pengolahan	167.011	184.610	235.571	301.983	370.851	378.966	397.788	413.966	435.079	
Listrik, Gas dan Air Bersih	17.015	23.790	33.006	42.289	51.819	61.124	59.855	63.999	58.214	
Konstruksi	54.203	57.645	71.061	88.797	107.800	108.033	120.296	132.823	136.565	
Perdagangan, Hotel dan Restoran	280.626	316.611	383.286	507.787	640.632	655.681	705.316	711.681	736.249	
Pengangkutan dan Komunikasi	61.246	57.895	70.804	89.363	117.666	115.569	126.014	125.941	118.809	
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	123.773	103.315	130.474	172.593	210.850	216.050	243.751	240.517	244.227	
Jasa-jasa	15.884	142.862	158.438	155.824	148.129	142.501	113.238	116.184	126.765	
Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	446.674	546.492	678.737	810.889	936.063	948.007	990.843	1.012.444	1.046.985	
Kredit dalam Valuta Asing	297.486	347.627	463.307	591.073	794.077	806.945	849.756	864.345	894.646	
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha	297.175	347.627	463.293	591.073	793.949	806.944	849.756	864.345	894.646	
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	39.742	52.269	64.445	81.849	114.211	117.626	122.367	125.243	132.226	
Pertambangan dan Penggalian	15.384	20.403	32.025	36.349	40.729	39.094	39.675	42.412	46.596	
Industri Pengolahan	58.009	58.193	77.723	103.353	147.777	156.454	171.819	175.893	180.815	
Listrik, Gas dan Air Bersih	21.464	24.995	35.458	45.487	66.271	66.593	68.085	68.981	70.296	
Konstruksi	20.524	17.395	17.989	21.807	30.800	33.705	37.079	38.714	44.928	
Perdagangan, Hotel dan Restoran	43.994	56.245	75.289	108.810	144.849	146.772	153.783	156.168	163.509	
Pengangkutan dan Komunikasi	46.542	44.286	57.009	73.819	99.810	96.369	105.421	103.467	99.313	
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	43.705	35.446	51.828	69.608	85.631	86.874	93.414	94.893	94.172	
Jasa-jasa	7.811	38.394	51.525	49.992	63.871	63.457	58.114	58.574	62.790	
Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	311	0	14	1	128	0	0	0	0	
Kredit dalam Rupiah dan Valuta Asing	1.446.808	1.783.601	2.223.685	2.738.054	3.323.801	3.343.381	3.505.561	3.595.145	3.707.916	
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha	996.326	1.232.688	1.538.397	1.916.443	2.386.571	2.392.765	2.513.831	2.581.234	2.659.972	
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	77.394	92.525	116.210	150.399	186.278	191.716	204.187	210.031	221.903	
Pertambangan dan Penggalian	41.559	60.495	85.532	101.669	124.886	116.628	113.245	131.183	139.469	
Industri Pengolahan	246.188	274.330	343.002	444.149	574.386	567.899	602.162	624.521	655.019	
Listrik, Gas dan Air Bersih	23.894	33.625	45.538	58.838	79.327	89.382	82.708	87.552	80.611	
Konstruksi	63.765	63.426	75.510	96.089	116.965	117.428	129.329	144.573	148.542	
Perdagangan, Hotel dan Restoran	301.883	346.226	414.509	554.802	713.043	726.896	779.446	781.706	804.035	
Pengangkutan dan Komunikasi	73.002	75.488	95.486	120.142	159.853	156.397	170.516	172.622	165.585	
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	152.061	136.582	180.418	222.393	271.346	272.525	307.372	302.294	305.275	
Jasa-jasa	16.580	149.992	182.191	167.963	160.487	153.893	124.866	126.752	139.533	
Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	450.482	550.913	685.288	821.611	937.230	950.616	991.730	1.013.912	1.047.944	

¹⁾ Tidak termasuk pinjaman antarbank, pinjaman kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk, serta nilai lawan valuta asing pinjaman

Tabel 25. Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi¹⁾

Miliar rupiah

Rincian	2012		2013				2014			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Modal Kerja	1.223.951	1.302.340	1.335.724	1.393.805	1.496.247	1.566.011	1.554.587	1.630.885	1.683.817	1.731.853
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	59.628	61.210	63.135	54.340	59.954	63.574	65.116	72.116	75.218	79.869
Perikanan	3.941	4.168	4.356	4.362	4.644	4.853	4.788	5.153	5.262	5.606
Pertambahan dan Penggalian	54.515	65.232	65.694	70.188	73.143	84.064	77.418	73.439	88.637	92.743
Industri Pengolahan	321.073	340.177	344.420	359.223	400.615	425.906	410.679	429.539	447.823	473.386
Listrik, Gas dan Air	24.104	13.323	17.303	14.173	14.718	13.020	22.744	14.575	18.524	10.260
Konstruksi	75.574	73.349	71.231	79.059	88.510	84.845	82.098	90.417	103.922	102.123
Perdagangan Besar dan Eceran	384.055	419.562	448.034	500.537	523.768	540.152	549.151	592.698	591.795	606.117
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.370	12.743	13.261	12.831	12.917	13.645	14.103	15.354	15.883	16.450
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	43.351	46.415	48.988	53.381	58.846	60.344	60.256	70.725	73.264	67.766
Perantara Keuangan	111.226	111.725	113.838	124.055	132.600	134.781	133.828	156.090	148.012	149.509
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	70.809	78.291	82.020	88.739	93.431	98.646	99.397	70.960	73.714	76.418
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	285	286	225	284	291	6.175	307	344	308	417
Jasa Pendidikan	1.263	1.259	1.291	1.214	1.236	1.365	1.368	1.981	1.908	1.761
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.623	2.950	3.064	2.822	2.997	3.624	3.372	3.919	4.422	4.403
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	20.158	21.440	21.046	22.853	24.981	27.285	26.480	23.763	28.839	37.328
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	475	488	646	718	831	899	946	1.083	1.151	1.196
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional	426	403	351	298	251	228	229	212	204	138
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	38.710	48.813	36.213	3.946	1.673	1.545	1.120	8.515	4.826	6.253
Penerima Kredit bukan Lapangan Usaha	12	8	26	8	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Investasi	554.562	588.110	601.033	694.657	745.242	790.602	803.354	845.894	859.484	889.562
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	71.106	80.148	81.853	99.137	103.600	112.079	115.491	119.933	122.572	129.339
Perikanan	1.090	1.128	1.128	1.305	1.417	1.536	1.539	1.782	1.880	2.090
Pertambahan dan Penggalian	36.832	36.337	36.488	37.138	39.177	40.713	39.079	39.662	42.397	46.582
Industri Pengolahan	97.114	103.298	107.186	123.376	140.084	147.697	156.362	171.717	175.778	180.698
Listrik, Gas dan Air	43.998	45.485	45.742	55.307	58.715	66.269	66.590	68.080	68.975	70.289
Konstruksi	22.545	21.730	21.306	29.273	32.848	30.688	33.593	36.946	38.519	44.713
Perdagangan Besar dan Eceran	69.618	75.971	76.089	90.686	93.976	98.111	97.443	101.123	101.643	104.776
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	28.090	31.843	33.895	38.956	40.766	45.600	48.060	51.333	52.885	57.038
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	70.570	74.822	76.637	86.364	94.201	101.784	98.664	109.204	107.307	102.711
Perantara Keuangan	11.778	11.983	11.832	11.917	13.280	14.412	14.241	16.195	15.886	15.005

Tabel 25. Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi¹¹ - Lanjutan

Rincian	2012		2013				2014			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	68.430	71.484	74.740	85.051	89.532	93.610	92.945	86.811	87.420	88.613
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	44	48	40	46	54	49	24	123	68	65
Jasa Pendidikan	3.205	3.338	3.400	3.615	3.832	4.108	4.377	4.578	4.847	4.885
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.285	5.565	5.782	6.560	6.578	6.505	6.786	7.057	7.375	7.875
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	23.181	23.196	23.404	24.913	25.932	25.912	26.528	25.917	27.928	29.356
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	231	222	232	460	550	638	724	844	933	1.022
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional	35	33	31	31	33	33	29	29	25	26
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	1.408	1.478	1.246	521	665	859	879	4.557	2.945	4.364
Penerima Kredit bukan Lapangan Usaha	1	1	1	n.a.						
Konsumsi	757.358	798.041	811.723	850.319	889.185	907.938	918.849	958.557	979.963	1.013.195
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	n.a.									
Perikanan	n.a.									
Pertambahan dan Penggalian	n.a.									
Industri Pengolahan	n.a.									
Listrik, Gas dan Air	n.a.									
Konstruksi	n.a.									
Perdagangan Besar dan Eceran	n.a.	n.a.	1	n.a.						
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	n.a.									
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	n.a.									
Perantara Keuangan	n.a.									
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	n.a.									
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	n.a.									
Jasa Pendidikan	n.a.									
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	n.a.									
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	n.a.	2	1							
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	n.a.									
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional	n.a.									
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	n.a.	4	5							
Penerima Kredit bukan Lapangan Usaha	757.342	798.019	811.699	850.295	889.163	907.919	918.831	958.556	979.956	1.013.187

Tabel 25. Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi¹⁾ - Lanjutan

Rincian	2012		2013				2014			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Jenis Penggunaan	2.535.870	2.688.491	2.748.480	2.938.781	3.130.674	3.264.552	3.276.790	3.435.336	3.523.264	3.634.611
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	130.735	141.359	144.988	153.477	163.555	175.653	180.606	192.049	197.790	209.208
Perikanan	5.032	5.296	5.484	5.666	6.061	6.389	6.327	6.934	7.142	7.696
Pertambahan dan Penggalian	91.347	101.569	102.182	107.325	112.320	124.776	116.496	113.101	131.034	139.325
Industri Pengolahan	418.187	443.475	451.606	482.599	540.698	573.602	567.041	601.255	623.602	654.084
Listrik, Gas dan Air	68.102	58.808	63.045	69.480	73.434	79.289	89.334	82.655	87.498	80.550
Konstruksi	98.119	95.079	92.537	108.332	121.359	115.534	115.691	127.363	142.441	146.836
Perdagangan Besar dan Eceran	453.673	495.533	524.124	591.223	617.744	638.262	646.594	693.821	693.438	710.892
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	39.460	44.586	47.156	51.786	53.684	59.245	62.163	66.687	68.768	73.488
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	113.920	121.238	125.625	139.746	153.046	162.128	158.920	179.929	180.571	170.477
Perantara Keuangan	123.004	123.708	125.670	135.972	145.880	149.193	148.068	172.286	163.899	164.513
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	139.239	149.775	156.759	173.789	182.963	192.256	192.342	157.771	161.134	165.031
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329	335	265	330	345	6.224	331	468	376	482
Jasa Pendidikan	4.468	4.596	4.690	4.829	5.067	5.472	5.745	6.560	6.755	6.647
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.909	8.515	8.846	9.382	9.574	10.129	10.158	10.976	11.797	12.279
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	43.340	44.636	44.450	47.766	50.914	53.197	53.008	49.680	56.769	66.685
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	706	709	877	1.178	1.381	1.537	1.670	1.927	2.084	2.218
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional	461	436	382	329	283	261	257	241	228	164
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	40.118	50.291	37.460	4.467	2.338	2.404	1.999	13.072	7.775	10.622
Penerima Kredit bukan Lapangan Usaha	757.354	798.028	811.726	850.303	889.165	907.919	918.831	958.557	979.956	1.013.187

¹⁾ Tidak termasuk pinjaman antarbank, pinjaman kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk, serta nilai lawan valuta asing pinjaman
Klasifikasi Jenis Penggunaan telah mengacu pada metodologi SNA2008

Tabel 26. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas melalui Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia

Satuan Kerja	Miliar rupiah											
	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Wilayah Sumatera	41.654	38.973	43.271	67.795	57.892	80.014	65.902	85.168	74.276	97.778	86.021	102.258
Nanggroe Aceh Darussalam	686	2.702	1.162	4.567	2.306	6.333	2.618	6.372	4.035	8.237	4.566	8.627
Sumatera Utara	16.141	8.560	16.598	16.360	23.238	22.152	25.980	22.480	26.674	22.266	30.500	26.374
Sumatera Barat	7.609	2.379	6.894	5.454	9.382	5.296	11.190	6.431	13.150	7.202	14.102	7.053
Riau	1.222	6.555	1.383	9.934	3.012	12.428	4.447	13.006	6.287	15.966	6.356	15.147
Kepulauan Riau	557	2.835	650	4.784	1.426	5.813	2.236	6.958	2.295	9.246	2.563	10.219
Jambi	994	2.315	874	4.684	1.867	5.213	2.138	5.010	3.865	8.014	5.169	8.374
Sumatera Selatan	9.712	9.671	9.984	14.922	7.818	14.514	9.124	15.590	8.055	14.341	10.039	13.252
Bengkulu	690	1.404	672	2.241	1.152	2.559	1.201	2.957	2.641	4.261	3.261	4.559
Lampung	4.045	2.553	5.053	4.849	7.690	5.708	6.968	6.364	7.274	8.246	9.450	8.332
Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	322
Wilayah DKI Jakarta	49.094	50.826	52.063	68.941	62.955	101.105	76.663	136.022	84.524	148.709	92.102	151.817
Wilayah Jawa (selain DKI Jakarta)	71.489	31.799	83.612	49.584	123.830	83.427	160.419	111.267	200.667	137.458	217.252	146.953
Jawa Barat	22.862	6.198	26.012	11.330	43.730	20.745	60.589	28.859	72.383	35.791	78.619	40.828
Jawa Tengah	21.396	6.525	25.414	11.249	35.101	19.962	43.276	28.477	57.301	37.652	60.467	39.081
D.I. Yogyakarta	2.652	2.511	3.373	3.772	6.488	7.529	9.172	9.478	13.984	12.062	13.891	13.160
Jawa Timur	24.579	16.565	28.813	23.234	38.510	35.190	47.382	44.454	56.999	51.953	64.276	53.884
Wilayah Kawasan Timur Indonesia	30.227	30.501	31.974	60.589	48.640	82.304	63.188	96.378	77.339	105.232	88.786	110.273
Bali	2.212	2.258	3.208	4.988	6.394	8.886	8.202	10.751	10.433	13.107	11.600	13.071
Nusa Tenggara Barat	1.122	1.655	1.158	2.490	1.798	3.815	3.669	4.374	4.513	5.175	5.692	5.616
Nusa Tenggara Timur	1.452	1.269	1.825	2.986	2.125	3.690	2.735	4.257	3.169	4.705	3.512	4.660
Kalimantan Barat	1.341	1.817	1.159	4.266	2.831	5.210	3.385	5.686	4.029	6.001	5.942	6.726
Kalimantan Tengah	700	3.227	828	5.341	778	6.844	1.134	7.736	1.896	8.026	1.887	8.304
Kalimantan Selatan	3.214	1.052	4.324	3.984	5.369	5.117	7.311	5.571	8.471	6.408	9.614	6.253
Kalimantan Timur	2.341	4.655	2.127	9.381	4.293	12.319	5.743	14.410	7.542	17.530	8.935	17.402
Sulawesi Utara	3.990	2.817	4.762	5.349	5.670	6.598	6.634	6.365	7.435	4.734	7.374	7.202
Sulawesi Tengah	1.025	1.815	1.149	3.383	1.562	4.015	1.883	4.454	2.584	5.041	2.998	5.727
Sulawesi Selatan	5.899	2.045	4.942	4.407	10.593	8.960	13.701	11.867	16.805	14.144	19.384	15.634
Sulawesi Tenggara	735	1.147	603	2.132	659	2.888	963	2.949	1.392	3.510	2.255	3.536
Maluku Utara	329	716	357	1.294	586	1.630	632	1.674	896	2.014	1.005	1.813
Maluku	600	616	968	1.891	1.273	2.350	1.147	2.688	1.389	2.714	1.781	2.864
Papua	5.268	5.412	4.561	8.697	4.710	9.983	6.046	13.596	6.785	12.124	6.793	11.295
Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	170
Jumlah	192.465	152.099	210.919	246.909	293.317	346.849	366.171	428.836	436.806	489.177	484.161	511.300

Keterangan: KPw Bangka Belitung dan KPw Papua Barat mulai beroperasi pada tahun 2014.

Tabel 27. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam melalui Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia

Satuan Kerja	Miliar rupiah											
	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Wilayah Sumatera	3,6	31,0	7,0	42,8	8,3	78,5	8,4	66,3	5,8	68,2	2,5	80,6
Nanggroe Aceh Darussalam	0,6	2,4	1,3	3,0	1,5	5,1	1,8	5,5	0,7	5,7	0,5	5,6
Sumatera Utara	0,3	7,4	0,3	10,4	0,2	24,6	0,3	14,7	0,4	17,5	0,2	15,7
Sumatera Barat	0,7	2,9	1,8	4,0	2,9	4,1	2,3	3,2	1,6	2,8	0,7	7,5
Riau	0,5	4,2	0,5	4,7	0,4	6,1	0,1	7,9	0,1	7,7	0,1	10,7
Kepulauan Riau	0,0	3,8	0,1	5,5	0,1	6,1	0,1	7,9	0,1	12,2	0,0	12,6
Jambi	0,0	1,8	0,0	2,4	0,2	4,0	0,1	3,7	0,2	4,6	0,1	5,3
Sumatera Selatan	1,2	3,7	2,2	5,5	2,1	10,0	2,4	9,7	1,5	9,8	0,4	11,1
Bengkulu	0,0	0,8	0,6	1,2	0,6	1,7	0,5	2,5	1,1	2,0	0,5	3,0
Lampung	0,2	3,9	0,2	6,2	0,2	16,8	0,9	11,2	0,1	5,7	0,0	8,8
Bangka Belitung	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,0	0,2
Wilayah DKI Jakarta	6,4	230,3	1,4	246,7	3,2	499,5	2,3	444,5	2,2	532,3	1,0	459,0
Wilayah Jawa (selain DKI Jakarta)	51,2	25,3	72,8	57,7	86,1	84,5	63,7	95,1	54,7	109,2	49,5	116,2
Jawa Barat	27,2	4,4	32,0	22,9	44,4	36,6	40,3	35,5	37,9	30,1	41,1	28,4
Jawa Tengah	22,2	1,1	37,5	7,6	35,7	12,9	21,7	16,3	16,5	21,8	8,3	29,1
D.I. Yogyakarta	0,3	1,6	1,5	3,3	1,3	8,9	0,9	8,4	0,2	10,4	0,0	11,2
Jawa Timur	1,5	18,2	1,8	23,9	4,6	26,2	0,9	35,0	0,0	47,0	0,1	47,6
Wilayah Kawasan Timur Indonesia	2,3	39,0	7,0	62,1	10,3	103,7	10,9	109,8	9,2	120,5	6,7	120,9
Bali	0,5	9,7	0,2	16,2	0,7	26,2	0,3	31,1	0,1	38,5	0,1	32,1
Nusa Tenggara Barat	0,2	0,8	2,8	0,6	4,1	4,0	6,2	4,8	3,9	4,5	1,9	3,2
Nusa Tenggara Timur	0,0	1,1	0,7	2,0	0,2	2,9	0,0	3,0	0,1	3,9	0,1	3,5
Kalimantan Barat	0,1	4,2	0,1	5,5	0,1	11,1	0,2	11,7	0,0	10,2	0,0	10,3
Kalimantan Tengah	0,0	1,9	0,2	2,8	0,3	5,5	0,4	5,1	0,3	5,1	0,5	5,7
Kalimantan Selatan	0,0	4,2	0,0	5,2	0,1	8,6	0,1	9,3	0,0	10,7	0,1	11,8
Kalimantan Timur	0,1	7,4	0,3	11,3	0,6	18,9	0,5	15,5	0,4	21,0	0,7	23,8
Sulawesi Utara	0,1	2,4	1,1	5,2	0,6	8,1	0,3	9,7	1,2	5,1	0,2	5,1
Sulawesi Tengah	0,5	1,4	0,5	1,8	1,3	2,9	1,5	4,3	1,6	4,2	1,7	4,3
Sulawesi Selatan	0,0	1,9	0,1	5,3	0,8	7,7	0,3	5,6	0,3	6,3	0,4	11,2
Sulawesi Tenggara	0,1	0,6	0,8	0,9	0,9	1,2	0,2	1,3	0,5	1,4	0,2	1,3
Maluku Utara	0,4	1,0	0,2	1,0	0,2	0,9	0,3	2,7	0,2	3,0	0,5	2,7
Maluku	0,0	0,8	0,0	1,5	0,0	2,3	0,0	1,9	0,0	2,1	0,0	2,2
Papua	0,2	1,7	0,2	2,9	0,3	3,3	0,6	3,9	0,6	4,3	0,4	3,7
Papua Barat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,0	0,0
Jumlah	63,4	325,6	88,2	409,3	107,9	766,3	85,4	715,7	71,9	830,2	59,7	776,7

Keterangan: KPw Bangka Belitung dan KPw Papua Barat mulai beroperasi pada tahun 2014.

Tabel 28. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Negara	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dunia	-0,4	5,2	3,9	3,2	2,9	3,1
Negara Industri Maju	-3,4	3,0	1,7	1,5	1,2	1,7
Amerika Serikat	-2,8	2,5	1,6	2,3	2,2	2,6
Kawasan Euro	-4,4	2,0	1,5	-0,6	-0,4	0,7
Jerman	-5,1	3,9	3,4	0,9	0,5	1,0
Perancis	-2,9	2,0	2,1	0,3	0,3	0,3
Italia	-5,5	1,7	0,5	-2,4	-1,9	-0,5
Jepang	-5,5	4,7	-0,5	1,5	1,5	-0,3
Inggris	-5,2	1,7	1,1	0,3	1,7	2,7
Kanada	-2,7	3,4	2,5	1,7	2,0	2,4
NIAEs*	-0,9	8,4	4,0	1,8	3,2	2,3
Negara Berkembang dan <i>Emerging Market</i>	3,1	7,5	6,2	4,9	4,5	4,5
Afrika Sub-Sahara	2,6	5,6	5,5	4,9	5,0	n.a.
Amerika Latin dan Karibia	-1,2	6,0	4,6	2,9	2,7	1,1
Asia**	7,7	9,8	7,8	6,4	6,3	6,4
Tiongkok	9,2	10,4	9,3	7,7	7,7	7,4
Malaysia	-1,5	7,4	5,2	5,6	4,7	5,9
Thailand	-2,3	7,8	0,1	6,5	2,9	1,0
Filipina	1,1	7,6	3,7	6,8	7,2	6,2
Vietnam	5,4	6,4	6,2	5,2	5,4	5,5
Eropa Tengah dan Timur	-3,6	4,6	5,4	1,4	2,3	2,9
<i>Commonwealth of Independent States</i>	-6,4	4,9	4,8	3,4	2,1	-1,5
Rusia	-7,8	4,5	4,3	3,4	1,3	0,2
Timur Tengah dan Afrika Utara	3,0	5,5	3,9	4,6	2,1	n.a.

Sumber: IMF-*World Economic Outlook* Update Januari 2013, IMF-*World Economic Outlook* Oktober 2014

NIAEs: *Newly Industrialized Asian Economies*

Keterangan:

*) Data NIAEs bersumber pada IMF-WEO Update Januari 2013 karena mulai edisi April 2013 kategori NIAEs dihilangkan dari WEO.
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/data/changes.htm>

**) Data Asia menggunakan data PDB kategori *Developing Asia* pada WEO Oktober 2014.

Tabel 29. Inflasi Dunia

Negara	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata tahun, persen 2014
Dunia	4,1	6,0	2,5	3,6	4,8	4,0	3,3	3,3
Negara Industri Maju	2,2	3,4	0,12	1,5	2,7	2,0	1,3	1,8
Amerika Serikat	2,9	3,8	-0,3	1,6	3,1	2,1	2,2	2,4
Kawasan Euro	2,1	3,3	0,3	1,6	2,7	2,5	-0,5	0,8
Jerman	2,3	2,8	0,2	1,2	2,5	2,1	0,2	1,5
Perancis	1,6	3,2	0,1	1,7	2,3	2,2	0,3	0,4
Italia	2,0	3,5	0,8	1,6	2,9	3,3	-1,9	-0,4
Jepang	0,1	1,4	-1,3	-0,7	-0,3	0,0	1,6	0,1
Inggris	2,3	3,6	2,1	3,3	4,5	2,8	1,7	2,6
Kanada	2,1	2,4	0,3	1,8	2,9	1,5	2,0	2,4
NIAEs*	2,2	4,5	1,3	2,3	3,6	2,7	2,2	2,8
Negara Berkembang dan Emerging Market	6,5	9,2	5,3	5,9	7,1	6,1	4,7	4,4
Afrika Sub-Sahara	6,4	12,9	9,4	7,4	9,3	9,0	5,2	4,8
Amerika Latin dan Karibia	5,4	7,9	5,9	5,9	6,6	5,9	2,8	1,2
Asia**	5,3	7,4	3,0	5,3	6,3	4,7	6,6	6,5
Tiongkok	4,8	5,9	-0,7	3,3	5,4	2,7	7,8	7,4
Malaysia	2,0	5,4	0,6	1,7	3,2	1,7	3,0	2,8
Thailand	2,2	5,5	-0,9	3,3	3,8	3,0	1,7	1,1
Filipina	2,9	8,2	4,2	3,8	4,7	3,2	3,4	3,6
Vietnam	8,3	23,1	6,7	9,2	18,7	9,1	8,8	n.a.
Eropa Tengah dan Timur	6,0	8,1	4,7	5,3	5,3	5,8	2,8	2,7
Commonwealth of Independent States	9,7	15,6	11,2	7,2	10,1	6,5	2,2	0,9
Rusia	9,0	14,1	11,7	6,9	8,4	5,1	1,3	0,6
Timur Tengah dan Afrika Utara	10,6	12,4	6,3	6,5	9,2	10,8	2,2	2,8

Sumber: IMF-World Economic Outlook Update Januari 2013, IMF-World Economic Outlook October 2014

NIAEs: Newly Industrialized Asian Economies

Keterangan:

*) Data NIAEs bersumber pada IMF-WEO Update Januari 2013 karena mulai edisi April 2013 kategori NIAEs dihilangkan dari WEO.
(<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/data/changes.htm>)

**) Data Asia menggunakan data PDB kategori Developing Asia pada WEO Oktober 2014.

Tabel 30. Suku Bunga dan Nilai Tukar

Rincian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Akhir periode
Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (10 th), %							
AS	3,84	3,29	1,88	1,76	3,03	2,17	
Jepang	1,30	1,13	0,98	0,79	0,74	0,33	
Kawasan Eropa	3,39	2,96	1,83	1,32	1,93	0,54	
Libor 6 bulan, %							
USD	0,43	0,46	0,81	0,51	0,35	0,36	
Yen	0,48	0,35	0,34	0,28	0,21	0,14	
Euro	0,97	1,18	1,57	0,22	0,35	0,15	
Nilai Tukar							
USD/Yen	93,03	81,12	76,91	86,75	105,31	119,78	
USD/EUR	1,43	1,34	1,30	1,32	1,37	1,21	
USD/GBP	1,62	1,56	1,55	1,63	1,66	1,56	

Sumber: Bloomberg

Daftar Istilah

Istilah	Keterangan
Abenomics	Serangkaian langkah kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah ekonomi makro Jepang dari resesi berkepanjangan di negara itu. Mencakup kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan investasi swasta untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri sekaligus meningkatkan eksport
Administered Prices	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lainnya
Asas Cabotage	Asas yang wajibkan kapal yang beroperasi di Indonesia menggunakan bendera Merah Putih atau dengan kata lain kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia, serta dikemudikan oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia
Asset Backed Securities	Surat berharga yang terdiri dari sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, dan arus kas
Balance Sheet	Bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement	Sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika
Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System	Sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaan dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS
Barel	Satuan pengukur volume yang umumnya digunakan dalam perdagangan minyak internasional
Base Money / Monetary Base	Jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal dan simpanan perbankan pada bank sentral
Basic Balance	Kemampuan pembiayaan transaksi berjalan dengan sumber dari pendanaan jangka panjang. Basic balance merupakan penjumlahan dari transaksi berjalan, neto investasi langsung dan neto investasi lainnya jangka panjang
BI Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
Building Stock	Pembelian surat berharga yang dimaksudkan untuk menambah <i>portfolio</i> surat berharga tersebut
Bullish	Kecenderungan harga untuk meningkat
Capital Adequacy Ratio	Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh suatu bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko
Capital Flow	Aliran modal yang dapat berupa aliran masuk atau keluar
Capital Inflow	Aliran modal masuk ke dalam negeri
Capital Reversal	Pembalikan arah pergerakan aliran modal
Cash Basis	Pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode saat uang kas diterima (untuk pendapatan) atau uang kas dibayarkan (untuk beban)
Cash in Vault	Rasio uang kartal yang berada di khazanah perbankan dan mesin ATM
Channel	Saluran atau media penyaluran
Clean Money Policy	Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar dalam rangka meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat
Consensus Forecast	Prediksi masa depan yang dibuat melalui penggabungan beberapa perkiraan terpisah yang dibuat menggunakan berbagai metodologi yang berbeda
Consumption Led Growth	Pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi
Contemporaneous Effect	Efek atau akibat yang terjadi seketika
Cost Push Inflation	Inflasi yang timbul karena adanya tekanan dari sisi <i>supply</i> . Faktor terjadinya <i>cost push inflation</i> dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan <i>administered prices</i> , dan terjadinya <i>negative supply shocks</i> akibat bencana alam dan terganggunya distribusi
Countercyclical Capital Buffer	Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan
Covered Bonds	Obligasi yang diterbitkan dengan jaminan piutang. <i>Covered bonds</i> lebih aman dibandingkan <i>asset backed securities</i> karena masih tercatat di dalam <i>balance sheet</i> penerbit obligasi (<i>bond issuer</i>)
Covered Interest Parity	Konsep bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan tingkat suku bunga antara dua negara, menggunakan nilai tukar di pasar <i>forward</i> untuk mengkonversikan <i>returns</i> di masing-masing negara
Credit Default Swap	Perjanjian jual beli yaitu penjual memberikan jaminan asuransi kepada pembeli bahwa dana pinjaman yang dikeluarkannya dipastikan akan dibayar
Credit Limit	Batas maksimal kredit yang dapat diberikan
Credit Rating	Sebuah penaksiran kelayakan kredit dari individu atau korporasi
Crisis Management Protocol	Prosedur manajemen krisis yang menetapkan protokol penggelaran tim manajemen dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab anggota tim itu
Currency Outside Bank	Rasio uang kartal yang beredar di luar sistem perbankan
Currency Swap Arrangement	Kesepakatan antar negara untuk melakukan pertukaran mata uang dengan menetapkan bunga dan jumlah uang, yang akan dipertukarkan selama jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut

Daftar Istilah - Lanjutan

Istilah	Keterangan
Current Account Receipts	Penerimaan yang berasal dari ekspor barang dan jasa, neraca pendapatan primer dan pendapatan sekunder
Dana Alokasi Khusus	Alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
Dana Alokasi Umum	Sejumlah dana dari APBN yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Dana Pihak Ketiga	Kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing
Debt Ceiling	Pagu hutang
Debt Service Ratio	Rasio beban pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor suatu negara
Deflasi	Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum
Density Ratio Bank	Rasio jumlah kantor bank dengan jumlah penduduk
Dependency ratio	Rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk yang produktif
Deposit Facility	Penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia
Deposit Rate	Tingkat suku bunga simpanan
Deposito	Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah
Depresiasi Rupiah	Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
Devisa	Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional
Dimensi Akses	Dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan
Disposable Income	Jumlah pendapatan pribadi individu yang dapat digunakan untuk belanja dan tabungan, setelah memperhitungkan pajak dan biaya lainnya
Divergensi	Keberagaman
Domestic Scheme	Sebuah skema (<i>brand</i>) kartu kredit/kartu debet domestik yang akan bersaing dengan skema internasional
Domestic Switch	Sebuah lembaga/instansi di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan <i>switching</i> atau <i>routing</i> atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti mesin ATM atau EDC dalam rangka memperoleh otorisasi Penerbit APMK
Down Payment	Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian
Downside Risk	Jenis risiko yang merugikan
Dropshot	Kebijakan pembayaran uang rupiah layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan penghitungan rinci dan penyortiran. Pembayaran oleh Bank Indonesia kepada bank dilakukan dalam 1 kemasan plastik transparan (10 brood) yang masih utuh, tersegel dan terdapat label bank penyetor
Dual Intervention	Intervensi yang dilakukan melalui dua kebijakan secara bersamaan. <i>Dual intervention</i> nilai tukar dilakukan melalui intervensi jual di pasar valas yang disertai dengan pembelian SBN
Durables	Barang-barang tahan lama
Early Redemption	Pembelian kembali (penebusan) surat berharga secara lebih awal
Early Termination	Percepatan penyelesaian transaksi
Ekspansi fiskal	Kebijakan peningkatan fiskal dengan cara menambah pengeluaran pemerintah
Ekspor	Penjualan barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
Elektronifikasi	Pengalihan dari sistem manual menjadi sistem berbasis elektronik atau menggunakan alat tertentu
EMBIG Spread	<i>Spread</i> antara <i>yield</i> surat utang pemerintah AS dan rata-rata tertimbang dari <i>yield</i> surat utang negara berkembang. Semakin rendah EMBIG spread maka semakin tinggi toleransi risiko investor (<i>risk appetite</i>) investor
Emerging Market	Kelompok negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi
E-money	Uang elektronik, yaitu alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti <i>server</i> atau <i>chip</i> ; (3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (4) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan
Enabling Environment	Lingkungan pendukung
Enabling Factor	Faktor pendukung
Euro	Mata uang negara kawasan Eropa
Exchange Rate Pass Through	Persentase perubahan dalam mata uang lokal akibat perubahan nilai tukar negara-negara pengekspor dan pengimpor. <i>Exchange rate pass through</i> terjadi ketika perubahan nilai mata uang mempengaruhi perubahan harga dan juga inflasi

Daftar Istilah - Lanjutan

Istilah	Keterangan
Expenditure Switching	Realokasi anggaran ke kegiatan pembangunan
Fed Fund Rate	Suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat
Financial Identity Number	Nomor yang bersifat unik, sederhana, melekat yang diberikan kepada masyarakat umum yang memiliki keterbatasan akses keuangan, misalnya diberikan dalam bentuk kartu, yang dapat ditunjukkan kepada lembaga keuangan tersebut untuk mengakses database FIN melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia
Financial Inclusion	Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem keuangan
Financing to Deposit Ratio	Rasio penyaluran pembiayaan terhadap dana pihak ketiga
Fiscal Drag	Kebijakan fiskal ketat oleh pemerintah yang menyebabkan rendahnya permintaan agregat sehingga menimbulkan tekanan deflasi, biasanya karena kurangnya belanja negara atau pajak yang berlebihan
Fiscal Space	Ruang ekspansi kebijakan fiskal
Fiscal Sustainability	Keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang
Fixed Subsidy	Subsidi yang diberikan dalam jumlah atau nominal yang tetap
Flight to Quality	Istilah yang digunakan untuk menyatakan fenomena di pasar keuangan, yaitu saat investor menjual apa yang mereka anggap sebagai investasi beresiko dan membeli investasi yang lebih aman
Forward	Transaksi jual atau beli antara dua valuta dengan penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi
Forward Guidance	Alat yang digunakan oleh bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter untuk mempengaruhi ekspektasi pasar mengenai tingkat suku bunga di masa depan
Funding Gap	Selisih antara DPK yang dimiliki dan kredit yang disalurkan
FX Swap	Transaksi/kontrak untuk membeli atau menjual valuta asing lawan valuta (asing) lainnya pada tanggal valuta tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk menjual atau membeli kembali pada tanggal valuta berbeda di masa yang akan datang, dengan harga yang ditentukan pada tanggal kontrak. Kedua transaksi tersebut dilaksanakan sekaligus dan dengan <i>counterparty</i> yang sama
Garis Kemiskinan	Suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin
Gerakan Nasional Non Tunai	Gerakan yang digagas dan dicanangkan oleh Bank Indonesia sebagai suatu terobosan untuk mengakselerasi penggunaan instrumen pembayaran non tunai
Giro	Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan
Giro Wajib Minimum	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK
Global Value Chain	Rantai nilai global
Hawkish	Sebuah pernyataan atau kebijakan yang memberikan indikasi kenaikan dan biasanya mendapat respon positif di pasar
Hedging	Lindung nilai dengan cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan
Hibah	Pemberian dari satu pihak kepada pihak lainnya tanpa imbalan
High Value Payment System	Transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp100 juta ke atas dan bersifat segera (<i>urgent</i>)
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
Imported Inflation	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang impor
Indeks Harga Konsumen	Suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu
Indeks Kedalaman Kemiskinan	Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan atau tingkat kemiskinan semakin dalam
Indeks Keparahan Kemiskinan	Ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin tinggi ketimpangan antara penduduk miskin
Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	Indeks yang mencerminkan kondisi stabilitas sistem keuangan pada suatu periode tertentu
Inflasi	Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum
Inflasi Inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (<i>persistent component</i>) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi
Inflasi Inti Traded	Inflasi inti yang mencerminkan tekanan eksternal
Initial Public Offering	Penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum
Interoperabilitas	Kapabilitas dari suatu sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain tanpa batasan akses
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal
Investasi Portofolio	Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar keuangan

Daftar Istilah - Lanjutan

Istilah	Keterangan
Investment Grade	Peringkat layak investasi
Investment Led Growth	Pertumbuhan yang bertumpu pada investasi
Iron Stock Nasional	Persediaan siaga untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan permintaan uang kartal yang tidak diprediksi pada saat penyusunan Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) tahunan, misalnya kenaikan BBM dan TTL pada periode tahun berjalan
Jalur Hijau	Proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dengan kriteria importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah
Jalur Merah	Proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dengan kriteria importir baru, importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (<i>high risk importir</i>), barang impor sementara, Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II; barang re-impor, terkena pemeriksaan acak, barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi
Job Layoffs	Pemutusan hubungan kerja karyawan
Job Openings	Jumlah lowongan pekerjaan
Kapasitas Fiskal	Penjumlahan PAD, DBH, DAU, lain-lain pendapatan daerah dikurangi belanja pegawai dan jumlah penduduk miskin
Kartu ATM	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana. Kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu
Kartu ATM/Debet	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan. Kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu
Kartu Kredit	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh <i>acquirer</i> atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (<i>charge card</i>) ataupun dengan pembayaran secara angsuran
Kas Keliling	Kegiatan layanan penukaran uang oleh unit kerja kas di Kantor Pusat maupun KPwDN-BI kepada masyarakat, bank dan pihak lain dengan menggunakan sarana transportasi tertentu
Kas Minimum	Jumlah persediaan kas minimum yang harus dijaga di seluruh Kantor Bank Indonesia dengan asumsi tidak ada penyetoran bank ke Bank Indonesia. Kas Minimum dijaga karena faktor distribusi dan transportasi, serta pasokan uang Hasil Cetak Sempurna (HCS) dari Perum Peruri
Kas Titipan	Kegiatan penyediaan uang rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada salah satu bank umum untuk mencukupi kebutuhan kas bank-bank dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu
Keuangan Inklusif	Hak setiap individu untuk memiliki akses penuh terhadap berbagai layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, jelas, dan dengan biaya terjangkau
Kredit Usaha Rakyat	Program yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
Layanan Keuangan Digital	Layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis <i>mobile</i> maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif
Lending Facility	Penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank
Less Cash Society	Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran non tunai
Lifting	Volume minyak yang diambil dari tangki penampungan (<i>stock</i>), diangkut dengan tanker atau melalui pipa, dan dijual kepada pembeli. Dengan kata lain, lifting minyak adalah produksi minyak yang siap jual
Loan to Deposit Ratio	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank
Loan to Value Ratio	Angka rasio antara nilai kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir
Low Income Country	Negara berpendapatan rendah
Lower Middle Income Country	Negara berpendapatan menengah rendah
M1	Uang dalam arti sempit (uang kartal dan uang giral)
M2	Uang dalam arti luas (uang kartal, uang giral, uang kuasi dan surat berharga selain saham)
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
Margin	Selisih
Masyarakat Unbanked	Masyarakat yang sama sekali belum memiliki akses ke lembaga keuangan
Masyarakat Underbanked	Masyarakat yang sudah menjadi nasabah bank, namun dalam layanan yang terbatas, contohnya hanya sebagai nasabah penabung, belum dapat menikmati layanan kredit, <i>internet banking</i> atau layanan perbankan lainnya secara optimal, atau masih mengandalkan jasa keuangan nonformal

Daftar Istilah - Lanjutan

Istilah	Keterangan
Middle Income	Golongan orang berpendapatan menengah
Mikroprudensial	Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya
Minimum Holding Periods	Jangka waktu minimal sebuah aset dimiliki
Mortgage Backed Securities	Surat berharga yang dibentuk atas kredit kepemilikan perumahan
Multispeed Recovery	Pemulihan ekonomi di berbagai negara dengan laju yang berbeda-beda
Neraca Transaksi Berjalan	Bagian dari neraca pembayaran Indonesia yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara
Negative Deposit Rate	Penurunan suku bunga kebijakan hingga deposit rate menjadi negatif
Neraca Pembayaran	Ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
Neraca Perdagangan	Neraca yang mencatat nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu, diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Neraca perdagangan positif artinya nilai ekspor lebih tinggi dari impor, sebaliknya untuk neraca perdagangan negatif. Neraca perdagangan sering kali dibagi berdasarkan sektor barang dan sektor jasa
Net Demand	Permintaan bersih
Net Domestic Asset	Aktiva domestik bersih yang terdiri dari tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan Operasi Pasar Terbuka
Net Foreign Asset	Nilai aset suatu negara yang terdapat di luar negeri, dikurangi nilai aset domestik yang dimiliki oleh pihak asing
Net Interest Margin	Rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif
Net Supply	Pasokan bersih
Netting	Cara penyelesaian/setelmen transaksi valas yang melibatkan dua pihak dengan hanya menyerahkan dana sebesar selisih kewajiban masing-masing pihak
Non Performing Loan	Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit secara keseluruhan
Nondurables	Barang-barang tidak tahan lama
Nontradables Sector	Sektor yang tidak menghasilkan output yang dapat diperdagangkan ke luar negeri
Online Banking	Transaksi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet
Operasi Pasar	Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter
Otoritas Moneter	Suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang
Outflow	Aliran modal atau dana keluar
Part Time Workers for Economic Reasons	Jumlah pekerja yang bisa lowongan kerja <i>full-time</i> tersedia, lebih memilih untuk bekerja <i>full-time</i> dibandingkan dengan bekerja paruh waktu
Pasar Obligasi	Tempat diperdagangkannya obligasi
Pelonggaran Moneter	Kebijakan moneter untuk meningkatkan kinerja perekonomian yang dinilai terlalu lambat. Contoh: menurunkan tingkat suku bunga
Penduduk Miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan
Pengetatan Moneter	Kebijakan moneter untuk menahan kinerja perekonomian yang dinilai terlalu cepat. Contoh: menaikkan tingkat suku bunga
Peringkat Utang	Penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu
Posisi Investasi Internasional	Neraca posisi aset finansial luar negeri (AFLN) dan kewajiban finansial luar negeri (KFLN) pada suatu waktu tertentu
Primary Balance	Pinjaman bersih pemerintah atau pinjaman bersih, tidak termasuk pembayaran bunga atas kewajiban pemerintah konsolidasi.
Produk Domestik Bruto	Nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu
Protokol Manajemen Krisis	Prosedur manajemen krisis yang menetapkan protokol penggelaran tim manajemen dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab anggota tim tersebut
Quantitative Easing	Kebijakan pelonggaran atau penambahan stimulus moneter oleh bank sentral dengan cara membeli aset keuangan dalam jumlah tertentu dari bank komersial atau institusi swasta lainnya
Rasio Elektifikasi	Tingkat ketersediaan listrik di suatu daerah, yaitu perbandingan antara jumlah pelanggan sambungan listrik dengan jumlah penduduk daerah tersebut
Rebalancing Ekonomi	Proses yang dilakukan dalam rangka menyeimbangkan kembali perekonomian
Rebound	Pemulihan menuju kondisi yang lebih baik
Reformasi Struktural	Reformasi dalam struktur perekonomian Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan
Remitansi	Transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya
Repo	Lihat keterangan <i>Repurchase Agreement</i>

Daftar Istilah - Lanjutan

Istilah	Keterangan
Repurchase Agreement	Transaksi penjualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati
Restitusi	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
Retribusi	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan
Return	Imbal hasil, yaitu salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya
Return on Asset	Rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis
Return on Equity	Rasio profitabilitas yang membandingkan antara laba bersih (<i>net profit</i>) perusahaan dengan aset bersihnya (ekuitas atau modal). Rasio ini mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh Perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh Pemegang Saham
Reverse Repo	Transaksi pembelian surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan
Rights Issue	Hak untuk memesan/membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan
Risiko Currency Mismatch	Risiko yang terjadi akibat perubahan nilai tukar
Risiko Likuiditas	Risiko yang terjadi jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai
Risiko Over Leveraged	Risiko beban utang yang berlebihan
Risk Appetite	Batas tingkat risiko yang dapat diterima
Risk Aversion	Kecenderungan investor untuk menghindari risiko
Risk Taking	Perilaku pelaku usaha yang cenderung mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya
Roll Over	Perpanjangan transaksi
Ruang Fiskal	Ruang ekspansi kebijakan fiskal
Safe Haven Asset	Aset yang memiliki risiko rendah
Second Round Effect	Dampak lanjutan dari suatu kebijakan
Sequester	Program pemotongan belanja Pemerintah AS untuk menurunkan rasio utang Pemerintah/PDB
Sertifikat Bank Indonesia	Surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto/bunga
Shadow Banking	Institusi keuangan yang menjalankan fungsi layaknya perbankan, seperti perusahaan sekuritas, <i>private equity</i> , dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan, hingga lembaga keuangan mikro
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
Smelter	Fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir
Solvabilitas	Kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya
Sovereign Debt Crisis	Krisis yang timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya (bunga dan pokoknya)
Spillover	Dampak rambatan atau eksternalitas kegiatan ekonomi yang memengaruhi mereka yang tidak terlibat secara langsung
Spot	Transaksi jual atau beli antara dua valuta dengan penyerahan dananya dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi
Spread Bid-Ask	Perbedaan harga antara harga tertinggi yang pembeli bersedia untuk membayar aset dan harga terendah yang penjual bersedia untuk menjualnya
Stabilitas Sistem Keuangan	Suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi
Stimulus Fiskal	Kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (<i>aggregate demand</i>) yang selanjutnya (diharapkan) akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek
Strategi Front Loading	Strategi pembiayaan yang dilakukan pada awal tahun anggaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti penyerapan di pasar keuangan dan kondisi perekonomian secara keseluruhan
Stress Test	Uji daya tahan sistem keuangan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko yang mengancam dari waktu ke waktu
Subsidi	Bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah untuk produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dalam bidang tertentu
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah
Super Cycle	Suatu periode di mana perekonomian dunia tumbuh cepat sebagai dampak dari kombinasi beberapa faktor, misalnya saja kemajuan teknologi dan sumber daya alam
Supervisory Action	Tindakan supervisi dalam upaya memperkuat ketahanan bank

Daftar Istilah - Lanjutan

Istilah	Keterangan
Surat Berharga Negara	Surat berharga yang diterbitkan oleh negara
Surat Perbendaharaan Negara	Surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh dana jangka pendek dengan menjualnya di bawah harga nominal
Surveillance	Pengamatan atau pemantauan aktivitas, perilaku, atau perubahan informasi lainnya dari suatu objek
Swap	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan
Taper Ends	Berakhirnya program stimulus moneter
Tapering Off	Pengurangan stimulus moneter secara bertahap
Tariff Adjustment	Kebijakan penyesuaian tarif berdasarkan perubahan harga minyak dunia, nilai tukar, dan inflasi
Tenor	Masa pelunasan pinjaman, dinyatakan dalam hari, bulan atau tahun
Term Deposit	Sejumlah dana yang diletakkan di bank atau lembaga keuangan lainnya untuk jangka waktu minimum, sebelum dapat ditarik tanpa penalti. Disebut juga deposito berjangka
Terms of Trade	Rasio harga ekspor terhadap harga impor
The Fed	Bank sentral Amerika Serikat yang merupakan entitas independen di dalam pemerintahan
Tradables sector	Sektor yang dapat diperdagangkan
Training of Trainers	Pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain
Trance Mezzanine	Kualitas <i>asset backed securities</i> dengan rating selevel BBB
Tranche Senior	Kualitas <i>asset backed securities</i> dengan rating di atas BBB (piutang yang disekuritisasi)
Transfer Dana	Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima
Trilema Kebijakan	Trilema antara tiga tujuan yang memiliki hubungan saling menegaskan: nilai tukar tetap, mobilitas modal bebas dan independensi kebijakan moneter
TUKAB	Kegiatan antar bank yang meliputi permintaan, penawaran dan penukaran uang rupiah yang masih layak edar dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan uang sesuai ketentuan Bank Indonesia
Unsettled Transactions	Terdapatnya transaksi yang tidak dapat diselesaikan <i>settlement</i> -nya karena sampai dengan akhir jam operasional tidak tersedia likuiditas yang cukup pada peserta
Unwind	Pengakhiran transaksi
Upper Middle Income	Golongan orang berpendapatan menengah ke atas
Velositas uang	Konsep yang menunjukkan berapa kali dalam setahun uang berputar di dalam suatu perekonomian
Volatile Food	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional
Yield	Pendapatan atau imbal hasil atau <i>return</i> yang akan diperoleh dari investasi
Yuan	Mata uang Tiongkok

Daftar Singkatan

No.	Singkatan	Kepanjangan	No.	Singkatan	Kepanjangan
1	ABIF	ASEAN Banking Integration Framework	49	BPM5	Balance of Payments and International Investment Position Manual, 5th edition
2	ABS	Asset Backed Securities	50	BPM6	Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th edition
3	ACI	Association Cambiste Internationale	51	BPN	Badan Pertanahan Nasional
4	ADB	Asian Development Bank	52	BPP	Biaya Pokok Produksi
5	AFI	Alliance for Financial Inclusion	53	BPR	Bank Perkreditan Rakyat
6	AFLN	Aset Finansial Luar Negeri	54	BPS	Badan Pusat Statistik
7	AFSBI	Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia	55	BSA	Bilateral Swap Arrangement
8	AIIB	Asian Infrastructure Investment Bank	56	BU	Bank Umum
9	AKAP	Antar Kota Antar Provinsi	57	BUK	Bank Umum Konvensional
10	AMRO	ASEAN+3 Macroeconomic Research Office	58	BUKU	Bank Umum Kegiatan Usaha
11	APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	59	BULOG	Badan Urusan Logistik
12	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	60	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
13	APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan	61	BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
14	APMK	Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	62	CAR	Capital Adequacy Ratio
15	ARAM	Angka Ramalan	63	CBCA	Cross Border Collateral Arrangement
16	AS	Amerika Serikat	64	CBR	Central Bank of Russia
17	ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	65	CBRT	Central Bank of the Republic of Turkey
18	ASEAN 5	Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina	66	CBU	Completely Build Up
19	ASEAN+3	Negara ASEAN + Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan	67	CCB	Countercyclical Capital Buffer
20	ASTINDO	Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia	68	CCT	Crisis Communication Test
21	ATM	Anjungan Tunai Mandiri	69	CDS	Credit Default Swap
22	BA	Bank Asing	70	CF	Consensus Forecast
23	Banxico	The Bank of Mexico	71	CGS	Comprehensive Growth Strategy
24	Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	72	CIP	Covered Interest Parity
25	Bareskrim	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia	73	CIV	Cash In Vault
26	BBM	Bahan Bakar Minyak	74	CMIM	Chiang-Mai Initiative Multilateralization
27	BBRT	Bahan Bakar Rumah Tangga	75	CMRF	Crisis Management and Resolution Framework
28	BCB	Banco Central do Brasil	76	COB	Currency Outside Bank
29	BCSA	Bilateral Currency Swap Arrangement	77	CPO	Crude Palm Oil
30	BEI	Bursa Efek Indonesia	78	DAK	Dana Alokasi Khusus
31	Bhakesra	Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara	79	DAU	Dana Alokasi Umum
32	BI	Bank Indonesia	80	DBH	Dana Bagi Hasil
33	BI-CAC	Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center	81	DF	Deposit Facility
34	BIG-eB	Bank Indonesia Government electronic Banking	82	DHE	Devisa Hasil Ekspor
35	BISILK	Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas	83	DHN	Daftar Hitam Nasional
36	BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal	84	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
37	BLSM	Bantuan Langsung Sementara Masyarakat	85	DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
38	BLU	Badan Layanan Umum	86	DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
39	BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	87	DJPL	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
40	BoE	Bank of England	88	DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
41	BoJ	Bank of Japan	89	DKEM	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
42	BoK	Bank of Korea	90	DNI	Daftar Negatif Investasi
43	BOP	Barang Operasional Perminyakan	91	DOC	Day Old Chicken
44	BOPO	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	92	DOLS	Dynamic Ordinary Least Square
45	Botasupal	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	93	DP	Down Payment
46	BPD	Bank Pembangunan Daerah	94	DPAU	Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
47	BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	95	DPK	Dana Pihak Ketiga
48	BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	96	DPM	Departemen Pengelolaan Moneter
			97	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
			98	DPU	Departemen Pengelolaan Uang

Daftar Singkatan - Lanjutan

No.	Singkatan	Kepanjangan
99	DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
100	DSR	Debt Service Ratio
101	DTP	Ditanggung Pemerintah
102	DWG	Development Working Group
103	E-budgeting	Electronic budgeting
104	ECB	European Central Bank
105	EDC	Electronic Data Capture
106	EKU	Estimasi Kebutuhan Uang
107	EM	Emerging Markets
108	EMBIG	Emerging Markets Bond Index Global
109	EMEAP	Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks
110	EMKL	Ekspedisi Muatan Kapal Laut
111	E-payment	Electronic payment
112	ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
113	FASBIS	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
114	FCL	Flexible Credit Line
115	FDI	Foreign Direct Investment
116	FDR	Financing to Deposit Ratio
117	FFR	Fed Fund Rate
118	FIN	Financial Identity Number
119	FKMM	Forum Koordinasi Makro-Mikroprudensial
120	FKPISP	Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan
121	FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
122	FOMC	Federal Open Market Committee
123	FSB	Financial Stability Board
124	FX	Foreign Exchange
125	G20	Group of Twenty
126	GBI	Gubernur Bank Indonesia
127	GFSN	Global Financial Safety Net
128	GII	Global Infrastructure Initiative
129	GIM	Gerakan Indonesia Menabung
130	GNNT	Gerakan Nasional Non Tunai
131	GPA	Global Policy Agenda
132	GPFI	Global Partnership on Financial Inclusion
133	GPPU	Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas
134	GSIB	Global Systemically Important Banks
135	GWM	Giro Wajib Minimum
136	HAM	Hak Asasi Manusia
137	HCS	Hasil Cetak Sempurna
138	HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
139	HLM	High Level Meeting
140	HVPS	High Value Payment System
141	IAIN	Institut Agama Islam Negeri
142	ICP	Indonesia Crude Price
143	ICRA	Indonesia's Credit Rating Specialist
144	IFEMC	Indonesia Foreign Exchange Market Committee
145	IHK	Indeks Harga Konsumen
146	IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
147	IKNB	Institusi Keuangan Nonbank
148	ILO	International Labour Organization
149	IMF	International Monetary Fund
150	INFE	International Network on Financial Education

No.	Singkatan	Kepanjangan
151	Inpres	Instruksi Presiden
152	IPE	Indeks Penjualan Eceran
153	IPI	Industrial Production Index
154	IPJ	Informasi Pangan Jakarta
155	IPO	Initial Public Offering
156	ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
157	Jabodetabek	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
158	JGB	Japanese Government Bond
159	JIBOR	Jakarta Interbank Offered Rate
160	JISDOR	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
161	JPKI	Jaring Pengaman Keuangan Internasional
162	JPSK	Jaring Pengaman Sistem Keuangan
163	K/L	Kementerian/Lembaga
164	KA	Kereta Api
165	KAD	Kerjasama Antar Daerah
166	KADIN	Kamar Dagang dan Industri
167	KCJ	Kereta Commuter Jabodetabek
168	KEA	Komunitas Ekonomi ASEAN
169	Kemeneg	Kementerian Negara
170	Kemenkertrans	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
171	Kemenkeu	Kementerian Keuangan
172	Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
173	KFLN	Kewajiban Finansial Luar Negeri
174	KI	Kredit Investasi
175	KIP	Kartu Indonesia Pintar
176	KIS	Kartu Indonesia Sehat
177	KK	Kredit Konsumsi
178	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
179	KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
180	KMK	Kredit Modal Kerja
181	KNRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
182	KPBI	Kantor Pusat Bank Indonesia
183	KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
184	KPR	Kredit Pemilikan Rumah
185	KPWDN-BI	Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia
186	KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
187	KSX	Kajian Stabilitas Keuangan
188	KSXS	Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera
189	KSM	Keluarga Sangat Miskin
190	KTI	Kawasan Timur Indonesia
191	KUPVA	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
192	KUR	Kredit Usaha Rakyat
193	Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
194	LCS	Less Cash Society
195	LDR	Loan to Deposit Ratio
196	LF	Lending Facility
197	LKD	Layanan Keuangan Digital
198	LKK	Lembaga Keuangan Konvensional
199	LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
200	LKS	Lembaga Keuangan Syariah
201	LNPRT	Lembaga Nonprofit Rumah Tangga
202	LPG	Liquified Petroleum Gas
203	LPS	Lembaga Penjamin Simpanan

Daftar Singkatan - Lanjutan

No.	Singkatan	Kepanjangan	No.	Singkatan	Kepanjangan
204	LTV	Loan to Value	255	PIN	Personal Identification Number
205	MBS	Mortgage Backed Securities	256	PKH	Program Keluarga Harapan
206	MDBs	Multilateral Development Banks	257	PL	Precautionary Line
207	MFO	Marine Fuel Oil	258	PLL	Precautionary and Liquidity Line
208	MHP	Month Holding Period	259	PLN	Perusahaan Listrik Negara
209	Migas	Minyak dan Gas	260	PLRT	Penata Laksana Rumah Tangga
210	Minerba	Mineral dan Batubara	261	PM	Peraturan Menteri
211	MoU	Memorandum of Understanding	262	PMA	Penanaman Modal Asing
212	MP3EI	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	263	PMK	Peraturan Menteri Keuangan
213	MRA	Master Repurchase Agreement	264	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
214	NAB	Nilai Aktiva Bersih	265	PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
215	NDA	Net Domestic Assets	266	PNS	Pegawai Negeri Sipil
216	MTM	Month to Month	267	Pokjanas	Kelompok Kerja Nasional
217	NFA	Net Foreign Assets	268	PP	Perusahaan Pembiayaan
218	NFP	Nonfarm Payroll	269	PPPh	Pajak Penghasilan
219	NIM	Net Interest Margin	270	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
220	NJOP	Nilai Jual Objek Pajak	271	PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
221	NK	Nota Kesepahaman	272	PPP	Purchasing Power Parity
222	NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia	273	PSE	Pelayanan Secara Elektronik
223	Nonmigas	Non Minyak dan Gas	274	PSKS	Program Simpanan Keluarga Sejahtera
224	NPF	Non Performing Financing	275	PSO	Public Service Obligation
225	NPG	National Payment Gateway	276	PTK	Pencatatan Transaksi Keuangan
226	NPI	Neraca Pembayaran Indonesia	277	PTP	Point to Point
227	NPL	Non Performing Loan	278	PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
228	NTB	Nusa Tenggara Barat	279	PUAB	Pasar Uang Antar Bank
229	O/N	Overnight	280	PUAS	Pasar Uang Antar Bank Berbasis Syariah
230	OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development	281	PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
231	OJK	Otoritas Jasa Keuangan	282	QAB	Qualified ASEAN Banks
232	OM	Operasi Moneter	283	QE	Quantitative Easing
233	OMT	Outright Monetary Transactions	284	Rakornas	Rapat Koordinasi Nasional
234	OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries	285	RBA	Reserve Bank of Australia
235	ORI	Obligasi Ritel Indonesia	286	RBI	Reserve Bank of India
236	P2P	Person to Person	287	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership
237	PAD	Pendapatan Asli Daerah	288	RCU	Rencana Cetak Uang
238	PBB	Pajak Bumi dan Bangunan	289	RDG	Rapat Dewan Gubernur
239	PBI	Peraturan Bank Indonesia	290	REMBI	Regional Macroeconomic Model Bank Indonesia
240	PBoC	People's Bank of China	291	Renaksi	Rencana Aksi
241	PDB	Produk Domestik Bruto	292	RFA	Regional Financial Arrangement
242	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto	293	RIRU	Regional Investor Relation Unit
243	PEFINDO	Pemeriksa Efek Indonesia	294	RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
244	Pelni	Pelayaran Nasional Indonesia	295	ROA	Return on Asset
245	Pemda	Pemerintah Daerah	296	ROE	Return on Equity
246	Pemilu	Pemilihan Umum	297	RT	Rumah Tangga
247	Pemprov	Pemerintah Provinsi	298	RTGS	Real Time Gross Settlement
248	PerMen	Peraturan Menteri	299	RUU	Rancangan Undang-Undang
249	Perpres	Peraturan Presiden	300	SAK-ETAP	Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
250	Perum Peruri	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	301	SARB	South African Reserve Bank
251	PGN	Perusahaan Gas Negara	302	SBI	Sertifikat Bank Indonesia
252	PHRI	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia	303	SBN	Surat Berharga Negara
253	PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis	304	SBS	Surat Berharga Syariah
254	PII	Posisi Investasi Internasional	305	SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
			306	SDA	Sumber Daya Alam
			307	SDBI	Sertifikat Deposito Bank Indonesia

Daftar Singkatan - Lanjutan

No.	Singkatan	Kepanjangan
308	SDHI	Sukuk Dana Haji Indonesia
309	SDM	Sumber Daya Manusia
310	SE	Surat Edaran
311	SFEMC	Singapore Foreign Exchange Markets Committee
312	SHAT	Sertifikasi Hak Atas Tanah
313	SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
314	SIP	Sistem Informasi bagi Petani
315	SISKOTKLN	Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
316	SIT	System Integration Test
317	SITC	Standard International Trade Classification
318	SK	Surat Keputusan
319	SKB	Surat Keputusan Bersama
320	SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
321	SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
322	SMA	Sekolah Menengah Atas
323	SMS	Short Messaging Service
324	SNKI	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
325	SOP	Standard Operational Procedure
326	SP	Sistem Pembayaran
327	SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
328	SPIME	Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
329	SPN	Surat Perbendaharaan Negara
330	SPPB	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
331	SSB	Surat-Surat Berharga
332	SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
333	SSSS	Scripless Securities Settlement System
334	SUN	Surat Utang Negara
335	Tabama	Tanaman Bahan Makanan
336	TBS	Tandan Buah Segar
337	TC	Traveler's Cheque
338	TD	Term Deposit

No.	Singkatan	Kepanjangan
339	TKI	Tenaga Kerja Indonesia
340	TNI	Tentara Nasional Indonesia
341	TNI-AL	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut
342	TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
343	ToB	Training of Beneficiary
344	ToT	Terms of Trade
345	TPI	Tim Pengendalian Inflasi
346	TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
347	TTL	Tarif Tenaga Listrik
348	TUKAB	Transaksi Uang Kartal Antar Bank
349	UKA	Uang Kertas Asing
350	UKM	Usaha Kecil dan Menengah
351	UKP4	Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
352	ULE	Uang Layak Edar
353	ULN	Utang Luar Negeri
354	UMK	Usaha Mikro dan Kecil
355	UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
356	UMP	Upah Minimum Provinsi
357	UNEP	United Nations Environment Programme
358	UTLE	Uang Tidak Layak Edar
359	UU	Undang-Undang
360	UUS	Unit Usaha Syariah
361	UYD	Uang yang Diedarkan
362	Valas	Valuta Asing
363	VCF	Value Chain Financing
364	WCPSS	Working Committee on Payment and Settlement Systems
365	WEO	World Economic Outlook
366	WTO	World Trade Organization
367	YoY	Year on Year

Halaman ini
sengaja dikosongkan

TIM PENYUSUN

Pengarah

Juda Agung

Penanggung Jawab dan Editor:

Doddy Zulverdi, Solikin M. Juhro, T.M. Arief Machmud

Koordinator Penyusun:

Muslimin Anwar, Rosita Dewi, Wahyu Agung Nugroho

Tim Penulis:

Alen Suci Marlina; Arnita Rishanty;
Asrianti Mira Anggraeni; Butet Linda H.P.; Chatarina A.;
Darius Tirtosudiro; Donni Fajar Anugrah; Elpiwin Adela;
Fitria Irmee Triswati; Gunawan Wicaksono;
Hendy Hadiyan; Indra Astrayuda; Indriani Karlina;
Kurniawan Agung; K. Dewi Soekirman; Mualam Noor;
Mochamad Soekarno Andy P.; Nugroho Joko Prastowo;
Nurkholisoh Ibnu Aman; Oki Hermansyah F;
Prasaja Widiatmaka; Primitiva Febriarti;
Reza Anglingkusumo; Riza Putera; Sari Nadia;
Susiati Dewi; Syachman Perdymer; Tony Noor Tjahjono;
Yanfitri

Tim Pendukung:

Anggita Cinditya M.K.; Illinia A. Riyadi; Tri Kurnia Ayu S.

Kontributor:

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Departemen Pengelolaan Moneter
Departemen Kebijakan Makroprudensial
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Departemen Statistik
Departemen Internasional
Departemen Pengelolaan Uang
Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
Pusat Program Transformasi Bank Indonesia



BANK INDONESIA

Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 - INDONESIA
www.bi.go.id